

THE ROAD TO SUSTAINABLE PERFORMANCE & IMPACT

JALAN MENUJU KINERJA DAN DAMPAK BERKELANJUTAN





Tema dan Kesenambungan Tema Theme and Continuity

2023

THE ROAD TO SUSTAINABLE PERFORMANCE & IMPACT JALAN MENUJU KINERJA DAN DAMPAK BERKELANJUTAN



Tahun 2023 menjadi tonggak penting pencapaian kinerja terbaik dan tertinggi bagi PT PII semenjak didirikan pada tahun 2009. Peran dan kehadiran PT PII yang memiliki kredibilitas tinggi bagi penjaminan di bidang pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan, baik secara internasional maupun nasional. PT PII mampu memberikan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur.

Setelah melalui masa pemulihan akibat Covid selama 2 tahun dan menjalankan mandat dalam mendukung proyek-proyek non infrastruktur, maka pada tahun 2023 Perseroan berfokus terhadap penguatan keberlangsungan *pipeline* mandat Perseroan serta berupaya memperluas kebermanfaatan di berbagai sektor, utamanya terkait sektor yang mendukung upaya transisi energi dan menghadapi tantangan perubahan iklim, juga melalui pelaksanaan mandat sehubungan dengan pinjaman langsung Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta kegiatan *Project Development Facility* dan pengembangan jasa *advisory*.

Sampai dengan akhir tahun 2023, PT PII telah mencatatkan Laba Bersih sebesar Rp835,82 miliar dari Pendapatan Rp1,32 triliun dan Aset Rp16,41 triliun, serta mampu memberikan dividen sebesar Rp142,83 miliar atau sekitar 20% dari Laba Bersih. Sejak berdirinya sampai dengan akhir tahun 2023, PT PII juga telah melaksanakan mandat penjaminan sejumlah 50 penjaminan dengan total nilai investasi proyek mencapai Rp497 triliun.

PT PII berkomitmen untuk mendukung berbagai agenda pembangunan dan memberikan dampak kebermanfaatan yang lebih luas terhadap masyarakat, melalui dukungan pada infrastruktur sosial dan perubahan iklim di tahun mendatang, khususnya pada sektor persampahan, sanitasi dan kesehatan, serta dukungan pada Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berskala kecil untuk proyek infrastruktur di daerah dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan melalui pengembangan serta perluasan ekosistem pembiayaan inovatif sehingga upaya mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045 akan dapat tercapai.

2023 was a brilliant year for IIGF's achievements, with various breakthroughs from the efforts conducted in the previous years. IIGF's role and presence, with high credibility in guaranteeing investment security in the field of infrastructure development, is vital amidst the challenging economic conditions, both internationally and nationally. IIGF is able to capture investors' confidence and interest in investing in the infrastructure sector.

After recovering due to COVID-19 for 2 years and having a mandate in supporting non-infrastructure projects, in 2023, the Company focused on strengthening the sustainability of the Company's mandate pipeline and sought to expand benefits in various sectors, mainly related to sectors that support energy transition and face the climate change challenges, as well as implementing mandates in connection with direct loans to State-Owned Enterprises (SOEs), and Project Development Facility activities and the development of advisory services.

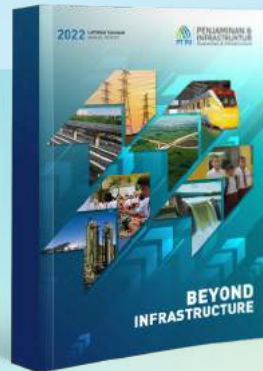
As of the end of 2023, IIGF recorded a Net Income of Rp835.82 billion from Revenues of Rp1.32 trillion and Assets of Rp16.41 trillion, and was able to provide dividends of Rp142.83 billion or approximately 20% of the Net Income. Since its establishment until the end of 2023, IIGF has carried out 50 guarantee mandates with a total project investment value of Rp497 trillion.

IIGF is committed to supporting various development agendas and providing a broader beneficial impact on society, through support for social infrastructure and climate change in the coming year, especially in the waste, sanitation and health sectors, as well as support for small-scale Government Cooperation with Business Entities (PPP) for infrastructure projects in the regions in order to accelerate equitable distribution of infrastructure development and through the development and expansion of innovative financing ecosystems so that efforts to realise Advanced Indonesia in 2045 will be achieved.



2022

Beyond Infrastructure



Pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih dari 2 tahun telah memukul segala aspek kehidupan dan hampir semua sektor usaha terkena imbasnya termasuk sektor infrastruktur. Agenda pembangunan infrastruktur turut terkena dampak negatif dari pandemi Covid-19. Hal itu terjadi akibat ruang fiskal pemerintah mengalami tekanan, karena lebih banyak digunakan untuk mendukung sektor kesehatan, pengusaha dan masyarakat yang terdampak pandemi. Terlebih lagi, adanya perang Rusia-Ukraina memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global sehingga menimbulkan ketidakpastian. Namun demikian, di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian nasional mampu menunjukkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31%, jauh melampaui pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,69%. Perlahan tapi pasti, sektor infrastruktur juga mulai menggeliat sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mempercepat pergerakan ekonomi Indonesia yang sebelumnya terhambat oleh pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, keberadaan Perseroan sangatlah signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia melalui proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selama 13 tahun perjalanannya, PT PII telah menjamin 49 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan pinjaman langsung (non-KPBU) serta 8 proyek penjaminan BUMN dalam rangka program PEN dengan total nilai investasi sebesar Rp550 triliun. Dengan kinerja yang semakin solid di tahun 2022, Perseroan akan terus berupaya memainkan perannya sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan guna mengakselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

The Covid-19 pandemic that lasted more than 2 years has hit all aspects of life and all business sectors, including the infrastructure sector. The infrastructure development agenda has also been negatively affected by the Covid-19 pandemic. This is since the government's fiscal space is under pressure, as it is mostly used to support the health sector, entrepreneurs and communities affected by the pandemic. Moreover, the Russia-Ukraine war has had a significant impact on the global economy, creating uncertainty. Nevertheless, amidst the global economic slowdown, the national economy was able to show strong growth of 5.31%, far exceeding 2021's growth of 3.69%. Slowly but surely, the infrastructure sector has also begun to stretch in line with the national economic recovery and is supported by the National Economic Recovery (PEN) program to accelerate Indonesia's economic movement which was previously hampered by the Covid-19 pandemic.

In this context, the presence of the Company can significantly support Indonesia's economic recovery through infrastructure projects that can improve the quality of life of the Indonesians. In its 13-year journey, IIGF has guaranteed 49 projects consisting of 41 PPP scheme guarantee projects and direct lending (Non-PPP), as well as 8 SOE guarantee projects related to the National Economic Recovery Program (PEN) with a total Project Value of Rp550 trillion. With an increasingly solid performance in 2022, IIGF will continue to play its role as a *Special Mission Vehicle* (SMV) of the Ministry of Finance to accelerate infrastructure development and sustainable development in Indonesia.

2021

Aksi Strategis Menuju Pemulihan yang Lebih Baik Strategic Actions Towards A Better Recovery



Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan semangat mendukung program percepatan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, PT PII tentunya terlibat aktif dalam berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Salah satunya melalui penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai agenda besar Pemerintah dalam mempercepat pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema "Aksi Strategis Menuju Pemulihan yang Lebih Baik" memberikan gambaran upaya PT PII mengemban amanat yang diberikan dengan tujuan besar mendukung Program PEN dari Pemerintah Indonesia. Dengan pengelolaan usaha yang sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham, tahun 2021 menjadi jejak langkah penting bagi PT PII untuk dapat memperkuat kompetensinya.

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE) that serves to support the national economic acceleration program through infrastructure development. The Company actively participates in various policies of the Indonesian Government, including providing Guarantee to the National Economic Recovery (PEN) Program as the main agenda of the Government to speed up the economic recovery that was impacted by the Covid-19 pandemic.

The theme of "Strategic Actions towards a Better Recovery" illustrates the commitment of IIGF to implementing the tasks of realizing the PEN Program of the Indonesian Government. The Company's business management, at the same time, provides added value to the Indonesian Government as the main shareholders. 2021 marks the momentous Milestones for IIGF to enhance the competitiveness.



2020

Menjaga Momentum Pemulihan

Safeguarding Momentum Towards Recovery



Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia. Covid-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, di tengah tantangan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 PT PII tetap menjaga momentum pembangunan infrastruktur dengan secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan mandatnya dalam memberikan penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur. Selain fokus pada pelaksanaan mandat utama, PT PII turut berperan serta mendukung Pemerintah dalam program penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Pemerintah memberikan mandat baru dan penugasan kepada PT PII untuk berkontribusi dalam PEN.

Berbekal pengalaman selama lebih dari satu dekade sebagai fiscal tools Pemerintah, semangat mewujudkan visi dan misi Perseroan serta dukungan dari Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan, Pandemi Covid-19 bukan menjadi penghalang bagi Perseroan untuk terus senantiasa berkarya dan berkontribusi dalam membangun negeri, namun justru menjadi momentum untuk semakin optimal berkontribusi dalam menjaga pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic made an extraordinary impact on the dynamics of the world economy in 2020, including Indonesia. Covid-19 has not only caused a health and humanitarian crisis, but also slowed down the rate of economic growth.

In accordance with the Government policies, amid the challenges of overcoming the impact of the Covid-19 pandemic, IIGF continued to maintain the momentum of infrastructure development by consistently and sustainably conducting the mandate in providing government guarantee in the infrastructure sector. In addition to focusing on implementing its key mandate, the Company also performed a role in supporting the Government in the program to overcome the impact of the Covid-19 pandemic. In 2020, the Government gave a new mandate and assignment to the Company to contribute to the National Economic Recovery PEN Program.

Equipped with more than a decade of experience as the Government's fiscal tool and the spirit to realize IIGF's vision and mission as well as support from the Shareholders and all Stakeholders, the Covid-19 Pandemic was not an obstacle for the Company to continue working and contributing to the country's development. Instead, it became a momentum to contribute more optimally in maintaining the development and recovery of the national economy.

2019

Jaga Infrastruktur untuk Indonesia Maju

Safeguarding the Infrastructure for a Developed Indonesia



Satu dekade kamialui dengan menjalankan kegiatan usaha untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Selama itu pula, kami senantiasa bekerja keras membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Memasuki dekade kedua, dengan mandat-mandat baru yang diberikan, merupakan saat bagi kami memantapkan langkah selanjutnya untuk semakin mengokohkan peran PT PII dalam mengawal pembangunan infrastruktur demi menjaga cita-cita bangsa untuk Indonesia maju.

In the first decade of our establishment, IIGF has been carrying out the mandate to provide government guarantee in the field of infrastructure. In the course of time, we are always working hard to build ecosystems and awareness of infrastructure project development in Indonesia through the Public Private Partnership (PPP) scheme. Entering the second decade, with new mandates given, we are strengthening the next move to enhance the role of IIGF in safe guarding infrastructure development in order to drive the nation's aspirations for a developed Indonesia.



2018

Dengan PII, Infrastruktur Jadi Teratur IIGF, for a Well-Structured Infrastructure



Pemerintah telah menetapkan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan dan kesinambungan kinerja ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan sosial. Mengingat bahwa infrastruktur merupakan proyek strategis yang memiliki karakteristik jangka panjang dan investasi yang tidak sedikit, Pemerintah melakukan inovasi berbagai skema pembiayaan dalam membangun infrastruktur, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Skema KPBU ini merupakan solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan fiskal Pemerintah. Dalam konteks inilah penjaminan atas proyek berskema KPBU yang diberikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) menjadi sangat penting demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2018, PT PII dengan telah dilaksanakannya mandat baru untuk memberikan penjaminan pada proyek non-KPBU, serta melakukan kegiatan dalam persiapan proyek.

dan pendampingan transaksi, PT PII secara lengkap dapat mengawal proses pembangunan proyek-proyek infrastruktur dari tahap awal, yakni persiapan proyek, hingga akhir pemantauan operasional proyek.

Seluruh mandat tersebut memberikan peran bagi PT PII untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan proyek infrastruktur agar menjadi lebih teratur. Teratur dari sisi disiplin proses, alokasi risiko, asas kemanfaatan, akuntabilitas, dan kesinambungan proyek di masa mendatang.

The government has established infrastructure development as a development priority to support the improvement and sustainability of national economic performance as well as improving social welfare. Considering that infrastructure is a strategic project with long-term characteristics and significant amounts of investments, the Government implements a number of innovative funding schemes for infrastructure development, including among others, the Public Private Partnership (PPP) scheme.

The PPP scheme is a strategic solution in overcoming the government's fiscal limitations. In this context, the presence of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) that provides guarantee facilities for PPP projects, become essential for the sustainability of infrastructure development.

In 2018, with the implementation of new mandate for IIGF to also provide guarantee facilities for non-PPP projects, as well as activities in project preparation and transaction advisory, IIGF has been able to safeguard the entire process of infrastructure project development, from the initial phase or project preparation, up to the operational monitoring of completed projects.

These mandates provides IIGF with significant opportunities to support the Government in establishing well-structured infrastructure projects, in terms of a disciplined process, risk allocation, benefit principle, accountability, and future project sustainability.



Daftar Isi

Contents



Pendahuluan

Introduction

Disclaimer dan Lingkup Tanggung Jawab Disclaimer and Scope of Responsibility	1
Tema dan Kesinambungan Tema Theme and Continuity	3
Daftar Isi Contents	7
Kinerja Unggul Tahun 2023 2023 Excellent Performance	10
Ikhtisar Data Keuangan Penting Important Financial Data Highlight	12
Ikhtisar Saham dan Aksi Korporasi Share and Corporate Action Highlight	19
Informasi Tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya Information of Bonds, Sukuk or Converted Bonds, As Well As Other Financing Information	19
Penghargaan dan Sertifikasi Certification and Awards	20
Peristiwa Penting Tahun 2023 Significant Events in 2023	22



Laporan Manajemen

Management Report

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	32
Laporan Direksi Board of Directors Report	50
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Statement of Accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2023 Annual Report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund	74



Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identity	78
Riwayat Singkat Perusahaan Company's Brief History	80
Jejak Langkah Milestones	86
Bidang Usaha serta Produk dan Jasa yang Dihasilkan Business Line, and Generated Products and Services	95
Makna Logo Perusahaan Corporate Logo Meaning	98

Visi dan Misi Perusahaan Corporate Vision and Mission	99
Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Value and Culture	100
Wilayah Operasional Operational Areas	101
Struktur Organisasi Organizational Structure	102
Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Information on the Changes to the Membership of the Board of Commissioners and Board of Directors	104
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profiles	106
Profil Direksi Board of Directors' Profiles	110
Profil Deputy Direktur Deputy Director's Profile	114
Demografi Karyawan Employee Demographics	116
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders	119
Struktur Grup/Kelompok Usaha serta Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/Special Purpose Vehicle Structure of the Group/Business Group and its Subsidiaries/Associates/Joint Ventures/Special Purpose Vehicles	120
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	120
Lembaga Profesi Penunjang Perseroan Company's Supporting Institutions	121
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of Share Issuance and/or Listing	122
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya Chronology of Bonds/Securities Issuance and/or Listing	123
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	123
Informasi pada Situs Website Perseroan Information on the Company's Website	124



Aspek Pendukung Bisnis Business Support Aspects

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resources Management	128
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	141



Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Tinjauan Ekonomi dan Industri Economic and Industrial Review	148
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review by Business Segment	151
Profitabilitas Per Segmen Segmentation Profitability	231
Tinjauan Keuangan Financial Review	235
Analisis Posisi Keuangan Financial Position Analysis	235
Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprensensif Lain Profit or Loss and Other Comprehensive Income	242
Analisis Arus Kas Cash Flow Analysis	246

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Solvency and Collectability of Receivables	250
Struktur Modal Capital Structure	252
Realisasi Investasi Barang Modal Capital Expenditure Realization	254
Ikatan Material Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditure Investment	256
Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 Comparison between the 2023 Target and Realization and 2024 Projection	256
Kebijakan Dividen Dividend Policy	259
Kontribusi Kepada Negara Contribution to the State	260
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	261
Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisitions and Debt/Capital Restructuring	267
KPI atau Indeks Kinerja Utama (IKU) Korporasi Corporate Key Performance Index (KPI)	268
Prospek Usaha Business Prospect	270
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliates/Related Parties	273
Perubahan Peraturan serta Dampaknya Terhadap Perusahaan Regulation Changes and the Impacts on the Company	278
Perubahan Kebijakan Akuntansi Amendment to Accounting Principles	279
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Fact and Information After the Accounting Reporting Date	281
Realisasi Dana Penawaran Umum Utilization of Funds from Public Offerings	281
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	281



Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

Pendahuluan Introduction	284
Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan GCG Perseroan Legal Basis and Policy for GCG Implementation	286
Struktur Tata Kelola Perseroan Structure of Corporate Governance	289
Strategi Menciptakan Tata Kelola Terbaik dan Berkelanjutan Strategies for Creating Best and Sustainable Governance	291
Prestasi Perseroan dalam Implementasi GCG di Tahun 2023 Company Achievement in GCG Implementation in 2023	292
Skor Penilaian Assessment Atas Penerapan GCG di Perseroan Assessment Score of GCG Implementation in the Company	292
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	293
Direksi Board of Directors	301
Dewan Komisaris Board of Commissioners	317
Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Working Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors	344
Informasi Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors	344
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	346
Organ pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioner's Supporting Organs	351
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners	352



Komite Audit Audit Committee	356
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	367
Komite Lainnya Other Committees	367
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	367
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	377
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	383
Sistem Pengendalian Internal (Internal Control) Internal Control System	392
Audit Eksternal/Akuntan Publik External Audit/Public Accountant	399
Manajemen Risiko Perseroan Company's Risk Management	401
Informasi Sanksi Administratif Tahun Buku Information on Administrative Sanctions for the Fiscal Year	420
Informasi Permasalahan Hukum Information on Legal Issues	421
Kode Etik Perusahaan Code of Conduct	422
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Policy on Providing Performance- Based Long-Term Compensation To Management and/or Employees	426
Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	426
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	432
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	441
Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Kreditur Creditor Rights Protection Policy	444
Kebijakan Insider Trading Insider Trading Policy	444
Evaluasi Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan Evaluation of the Corporate Governance Compliance	445



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social Responsibility

Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) Program	452
Landasan Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Basis for the Corporate Social Responsibility Programs	453
Prinsip Dasar Pelaksanaan TJSL Perseroan Principles of Company's CSR Implementation	453
Ruang Lingkup Program TJSL Perseroan Scope of the Company's CSR Program	454
Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Governance	455
Kinerja Ekonomi Economic Performance	458
Kinerja Lingkungan Environmental Performance	459
Kinerja Sosial Social Performance	464



Laporan Keuangan Audit Audited Financial Statement

Laporan Keuangan Financial Statement	481



Kinerja Unggul Tahun 2023

2023 Excellent Performance

Kinerja Operasional **Operational Performance**

50

Akumulasi Penjaminan*
Accumulated Guarantee*

4 Penjaminan Baru di 2023 4 New Guarantee in 2023

1. Tol Akses Pelabuhan Patimban dengan Skema KPBU
 2. PJJU Kabupaten Lombok Barat dengan Skema KPBU
 3. Tol JORR *Elevated* Cikunir Ulujami dengan Skema KPBU
 4. Penjaminan Pinjaman dalam Rangka Cadangan Pangan Pemerintah
1. Patimban Port Access Toll Road with PPP Scheme
 2. PJJU West Lombok Regency with PPP Scheme
 3. JORR *Elevated* Toll Road Cikunir Ulujami with PPP Scheme
 4. Loan Guarantee in the Framework of Government Food Reserves

Penjaminan Non Infrastruktur
Non-Infrastructure Guarantee

9

Nilai Eksposur Penjaminan
Guaranteed Exposure Value

Rp91
triliun trillion

Akumulasi Nilai Investasi Proyek
Accumulated Project Investment Value

Rp497
triliun trillion

41

Penjaminan Proyek Infrastruktur
Infrastructure Project Guarantee

Dampak Ekonomi Proyek yang telah Dijamin Guaranteed Project Economic Impact

14
ruas jalan tol sepanjang
959 km
sections toll road
959 km

9
Pelestarian ruas Jalan Nasional sepanjang
72,87 km
Preservation of the
72.87 km National Road
section

37
Penggantian jembatan di Pulau Jawa
Replacement bridge on
the island Java

Palapa Ring
8.479 km
kabel optik lintas pulau
cross-island optical cable

Satelit Multifungsi
menghubungkan
149.400
titik layanan *offline* di Indonesia (termasuk area 3T)
Multifunction Satellite connects 149,400 offline service points in Indonesia (including 3T areas)

6
Proyek SPAM
SPAM Project

Total debit produksi
15.450
liter/detik yang melayani ±5,9 juta orang (±1,18 juta koneksi)
Total production flow is 15,450 liters/second which serves ± 5.9 million people (±1.18 million connection)

Alat Penerangan Jalan (APJ)
Street Lighting Equipment (APJ)

Melayani
7.459
titik di Kabupaten Madiun dan
12.915
titik di Kabupaten Lombok Barat
Serving 7,459 points in Madiun Regency and 12,915 points in West Lombok Regency

* Akumulasi penjaminan oleh PT PII sejak berdiri hingga 31 Desember 2023. Pada tahun 2023, PT PII memberikan 4 (empat) penjaminan baru.
Accumulated guarantees by IIGF since its founding until 31 December 2023. In 2023, IIGF provides 4 (four) new guarantees.



Kinerja Keuangan Financial Performance



Laba Bersih
Tahun Berjalan
Net Income for the Year

Rp835,82
miliar billion



Pendapatan
Revenues

Rp1.318
miliar billion



Jumlah Aset
Total Assets

Rp16.406
miliar billion



Ekuitas
Equity

Rp15.962
miliar billion



Liabilitas
Liabilities

Rp443,25
miliar billion



Dividen
Dividend

Rp142,83
miliar billion

untuk tahun buku 2022 yang
dibayarkan pada tahun 2023
for the 2022 fiscal year
and paid in 2023



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Data Highlight

Upaya berkelanjutan dari Perseroan untuk menjaga kelangsungan bisnisnya menghasilkan performa yang solid baik dari sisi operasional maupun keuangan.

The Company's continuous efforts to maintain business continuity have resulted in solid operational and financial performance.

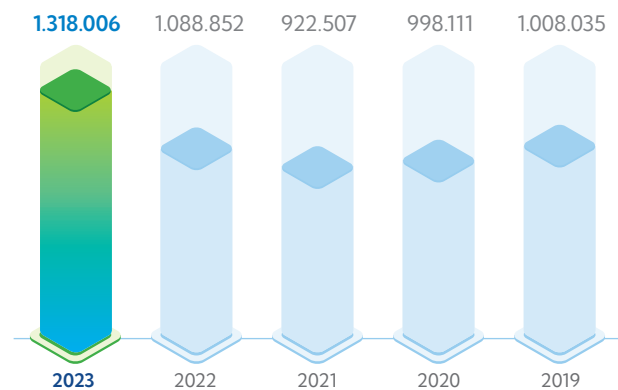
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain (Rp juta)

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income (Rp million)

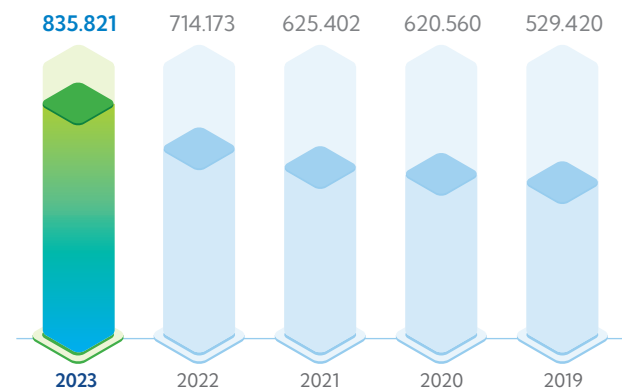
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Revenues	1.318.006	1.088.852	922.507	998.111	1.008.035
Beban Usaha Operating Expenses	(482.467)	(386.216)	(333.941)	(376.687)	(413.629)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	835.539	702.636	588.566	621.424	594.406
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit/(Expenses)	282	11.537	36.836	(864)	(64.986)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	835.821	714.173	625.402	620.560	529.420
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak Other comprehensive income/(loss) for the year, after tax	116.345	(278.069)	6.049	291.916	117.149
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	952.166	436.104	631.451	912.476	646.568
Laba Bersih per Saham Earnings per Share	78.444	67.027	65.350	64.844	66.178

*) Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah lembar saham.
Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the number of shares.

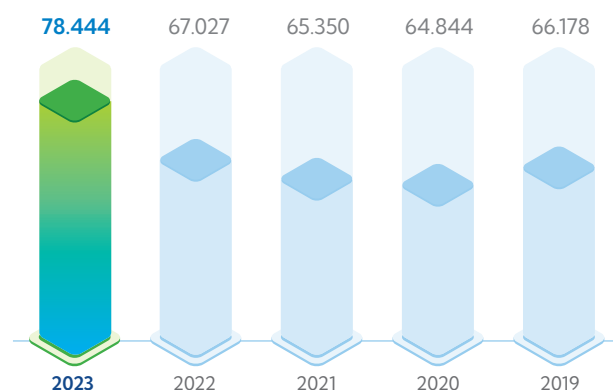
Grafik Pendapatan
Graph: Revenues



Grafik Laba Tahun Berjalan
Graph: Profit for the Year



Grafik Laba Per Saham
Graph: Earnings per Share



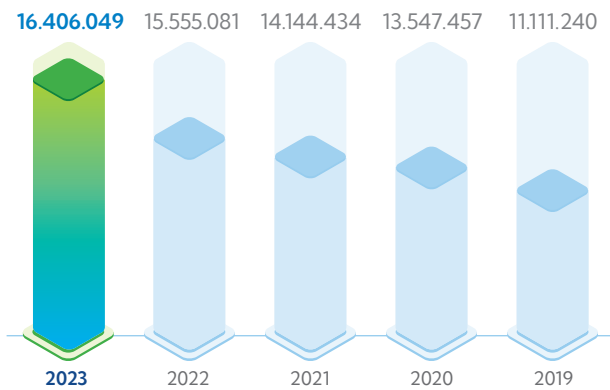


Posisi Keuangan (Rp juta)
Financial Position (Rp million)

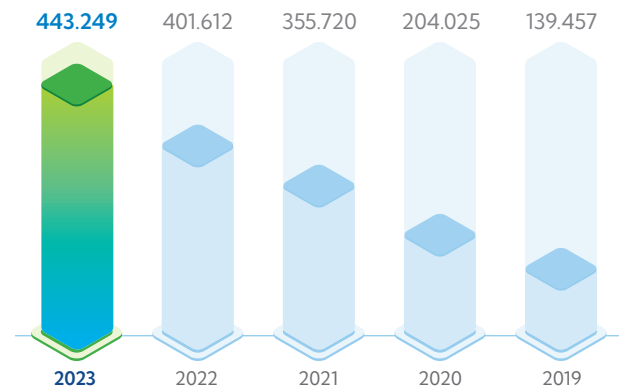
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Aset Assets					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	121.488	134.306	5.893.948	4.883.893	26.809
Investasi Investment	15.793.649	15.008.164	7.948.301	8.380.506	10.881.161
Piutang Usaha Account Receivables	327.575	294.720	169.217	155.189	113.189
Piutang Lainnya Other Receivables	11.444	9.885	10.735	12.757	12.581
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	3.106	2.826	6.734	1.147	1.570
Aset Tetap Fixed Assets	13.551	4.896	8.141	10.606	14.499
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	45.314	12.573	31.433	50.293	
Aset Takberwujud Intangible Assets	4.287	5.470	3.242	2.045	1.824
Beban Tangguhan Deferred Expenses	4.333	5.663	7.571	19.164	26.697
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	5.030	2.015	1.613	3.870	4.210
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Asset	70.903	69.194	58.130	22.618	23.331
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan Refundable Deposit	5.369	5.369	5.369	5.369	5.369
Jumlah Aset Total Assets	16.406.049	15.555.081	14.144.434	13.547.457	11.111.240
Liabilitas Liabilities					
Utang Usaha Account Payables	14.045	9.993	7.373	3.089	3.772
Utang Pajak Taxes Payable	3.846	3.780	4.421	3.258	2.439
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables	162.669	135.669	65.282	39.570	37.990
Pendapatan Tangguhan Unearned Income	130.836	169.932	171.117	15.662	10.968
Liabilitas Sewa Pembiayaan Financial Lease Liabilities	46.200	8.546	33.504	51.094	
Pinjaman Penerusan Two-Step Loans	55.127	55.127	55.127	55.127	55.127
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Obligation	30.526	18.565	18.896	36.225	29.161
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	443.249	401.612	355.720	204.025	139.457
Ekuitas Equity					
Modal Saham Share Capital	10.655.000	10.655.000	9.570.000	9.570.000	8.000.000
Laba Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Unrealised Gain from Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income	142.008	20.605	300.351	298.993	6.404
Keuntungan/(Kerugian) Aktuarial, Setelah Pajak Actuarial Gain/(Loss), Net of Tax	849	5.907	4.229	(461)	212
Saldo Laba Retained Earnings					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	264.478	228.769	197.499	166.471	140.000
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	4.900.465	4.243.188	3.716.635	3.308.429	2.825.167
Jumlah Ekuitas Total Equity	15.962.800	15.153.469	13.788.714	13.343.432	10.971.783
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	16.406.049	15.555.081	14.144.434	13.547.457	11.111.240



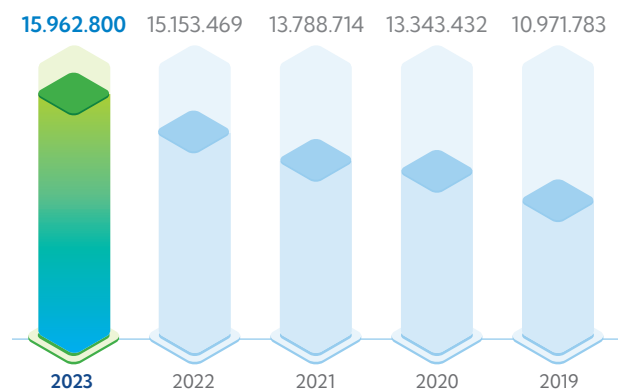
Grafik Aset
Graph: Assets



Grafik Liabilitas
Graph: Liabilities



Grafik Ekuitas
Graph: Equity

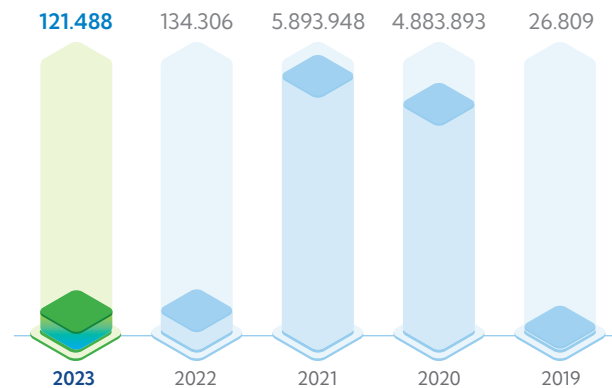


Arus Kas (Rp juta) Cash Flow (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	821.988	684.035	788.709	616.703	578.552
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(676.863)	(7.344.891)	429.422	2.788.510	(2.095.466)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(157.943)	901.215	(208.076)	1.451.870	(155.456)
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	(12.818)	(5.759.641)	1.010.055	4.857.084	(1.672.370)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	134.306	5.893.948	4.883.893	26.809	1.699.179
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of the Year	121.488	134.306	5.893.948	4.883.893	26.809



Grafik Kas dan Setara Kas Akhir
Graph: Cash and Cash Equivalents at the End of Year

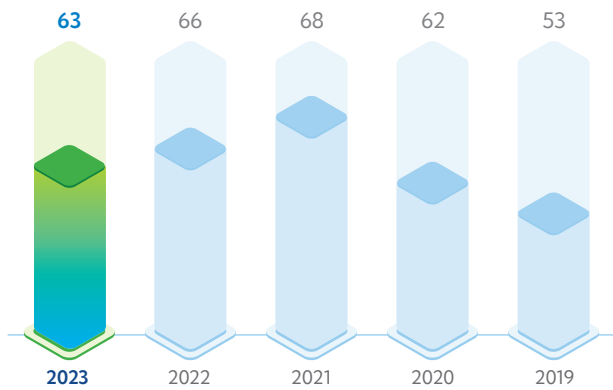


Rasio-rasio Keuangan (dalam %)
Financial Ratios (in %)

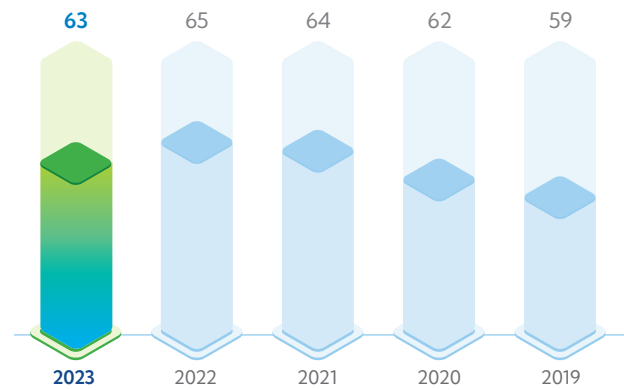
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio Imbal Hasil Aset Return on Assets (ROA)	5,1	4,6	4,6	5,4	4,9
Rasio Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity (ROE)	5,2	4,7	4,6	5,4	4,9
Margin Laba Operasi Operating Profit Margin	63	65	64	62	59
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	63	66	68	62	53
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Revenue (BOPO)	37	36	37	38	41
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Kas Cash Ratio	8.814	10.133	17.959	28.888	24.678
Rasio Lancar Current Ratio	7.414	8.582	17.890	28.851	23.738
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Liabilitas Terhadap Aset Liabilities to Assets Ratio	2,7	2,6	2,5	1,5	1,3
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	2,8	2,9	2,6	1,8	1,3
Pertumbuhan Development					
Pendapatan Revenue	21,1	18,0	(7,6)	(1,0)	20,8
Beban Usaha Operating Expenses	24,9	15,7	(11,3)	(8,9)	15,9
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	17,0	14,2	0,8	17,2	12,4
Aset Assets	5,5	10,0	4,4	21,9	4,6
Liabilitas Liabilities	10,4	12,9	74,4	46,3	(0,6)
Ekuitas Equity	5,3	9,9	3,3	21,6	4,7



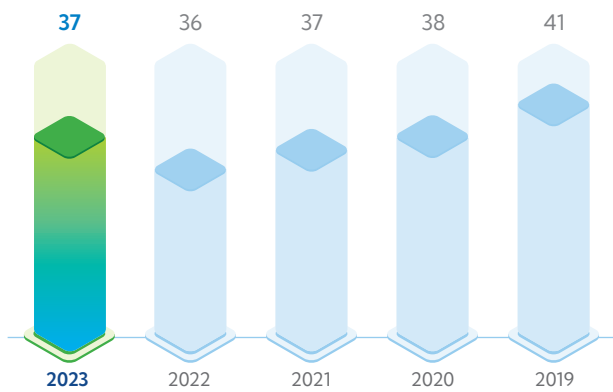
Grafik Margin Laba Bersih (%)
Graph: Net Profit Margin (%)



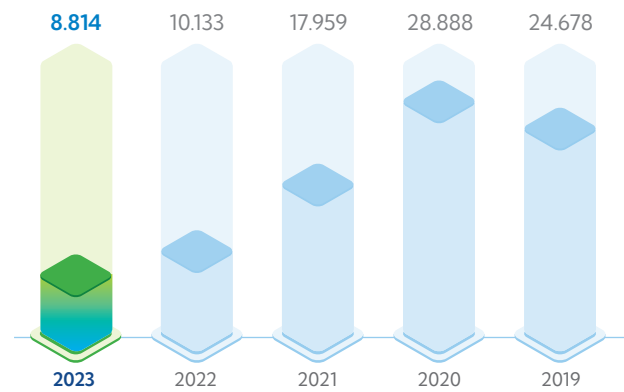
Grafik Margin Laba Operasi (%)
Graph: Operating Profit Margin (%)



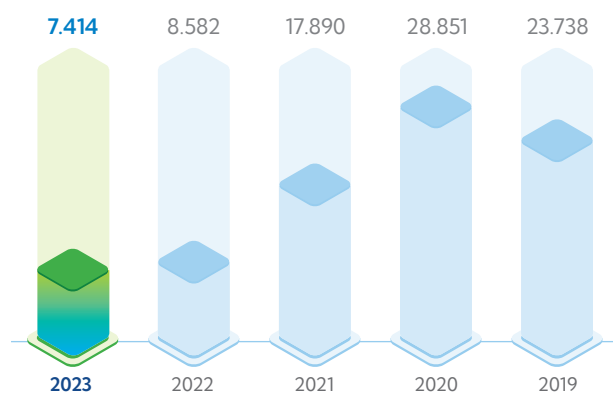
Grafik Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%)
Graph: Operating Expenses to Operating Revenue (BOPO) (%)



Grafik Rasio Kas (%)
Graph: Cash Ratio (%)



Grafik Rasio Lancar (%)
Graph: Current Ratio (%)





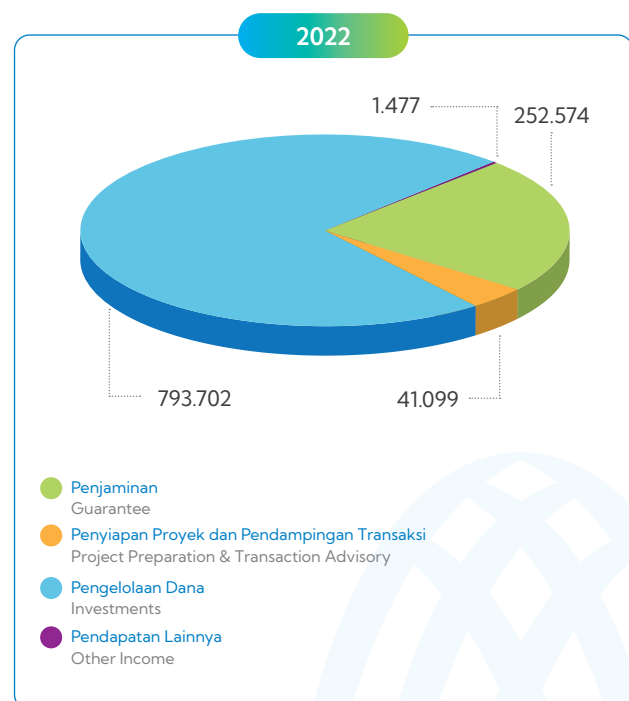
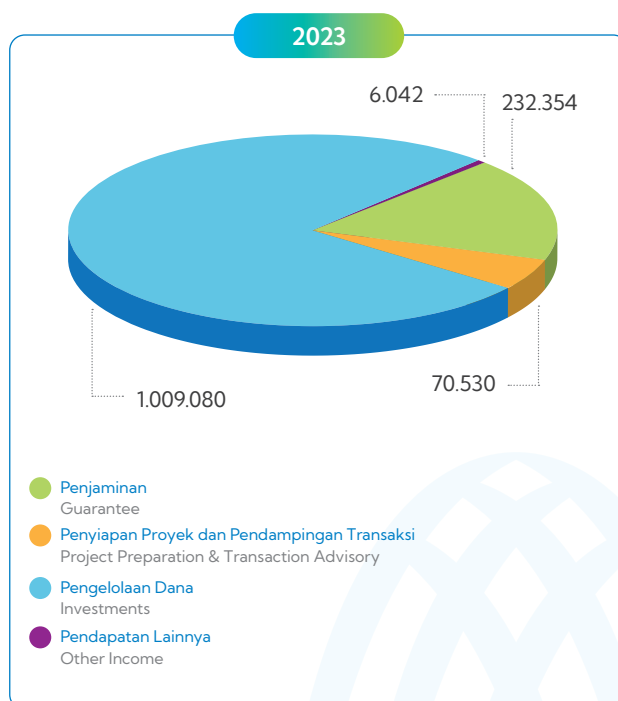
Ikhtisar Bisnis

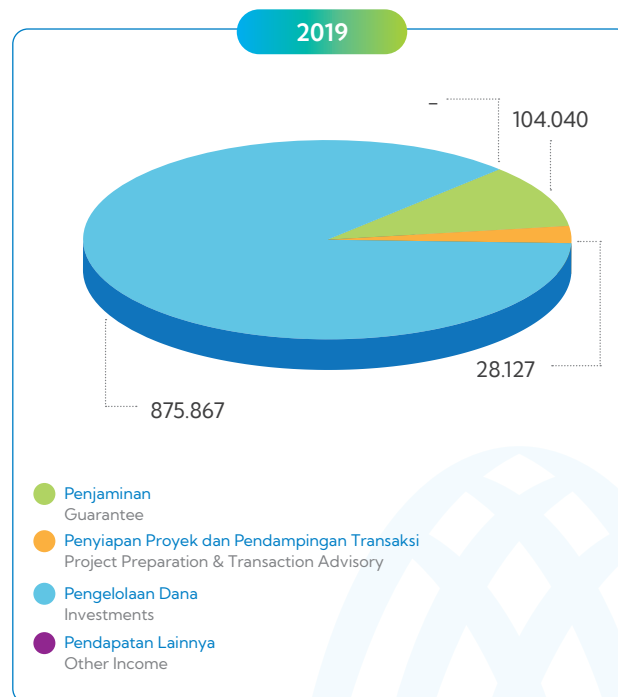
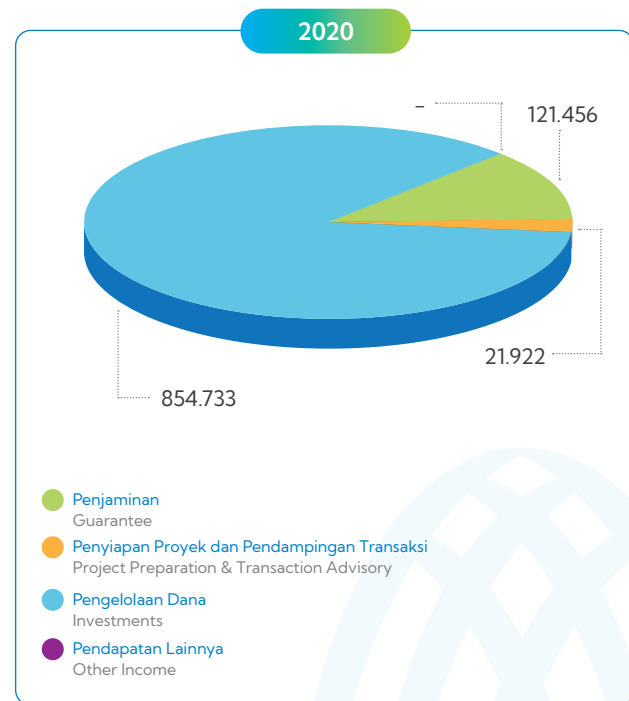
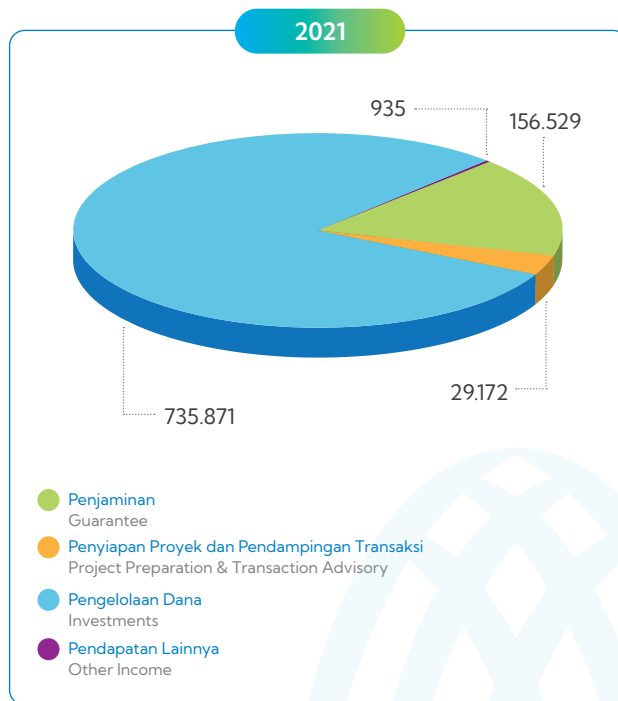
Business Highlight

(dalam jutaan Rupiah in million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Revenues					
Penjaminan Guarantee	232.354	252.574	156.529	121.456	104.040
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project Preparation & Transaction Advisory	70.530	41.099	29.172	21.922	28.127
Pengelolaan Dana Investments	1.009.080	793.702	735.871	854.733	875.867
Pendapatan Lainnya Other Income	6.042	1.477	935	-	-
Jumlah Pendapatan Total Revenues	1.318.006	1.088.852	922.507	998.111	1.008.035

Grafik Komposisi Pendapatan
Graph: Revenues Composition







Ikhtisar Saham dan Aksi Korporasi

Share and Corporate Action Highlight

Jumlah saham Perseroan sebanyak 10.655.000 lembar saham, dengan kepemilikan seluruhnya atau 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek manapun baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan saham Perseroan.

The Company has a total of 10,655,000 shares, with 100% ownership by the Government of the Republic of Indonesia. Until the end of 2023, the Company did not list its shares on any stock exchange either in Indonesia or abroad. Accordingly, the Company does not present information related to the number of outstanding shares, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and trading volume of the Company's shares.

Selain itu, Perseroan juga tidak menyajikan informasi terkait pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, penghentian sementara perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham.

In addition, the Company also does not present information related to stock split, reverse stock, share dividend, bonus shares, decrease in par value of shares, suspension and delisting.

Informasi Tentang Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi, Serta Informasi Pendanaan Lainnya

Information of Bonds, Sukuk or Converted Bonds, As Well As Other Financing Information

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi. Oleh karena itu, Perseroan tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki pendanaan lainnya seperti Surat Berjangka Menengah.

Until the end of 2023, the Company did not issue any bonds/sukuk/converted bonds. Accordingly, the Company does not present information related to the number of outstanding bonds/sukuk/converted bonds, interest/reward rates, maturity dates, and bond/sukuk ratings. In addition, the Company also does not have other funding such as Medium Term Notes.



Penghargaan dan Sertifikasi Certification and Awards

Penghargaan Awards



Bronze Winner untuk kategori Owned Media
Bronze Winner for the Owned Media Category

Tanggal Date
17 Maret 2023 17 March 2023

Acara/Kegiatan Event
PR Indonesia Awards

Penyelenggara Organizer
PR Indonesia



Indonesia Best CEO Award 2023 pada kategori Infrastructure Support Financing
Indonesia Best CEO Award 2023 in the Infrastructure Support Financing Category

Tanggal Date
6 April 2023 6 April 2023

Acara/Kegiatan Event
Indonesia Best 50 Most CEO Awards 2023

Penyelenggara Organizer
The Economics



PPP Agency of the Year 2023

Tanggal Date
21 Agustus 2023 21 Agustus 2023

Acara/Kegiatan Event
The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards

Penyelenggara Organizer
The Asset



Best CSR & TJSL in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023

Tanggal Date
26 Mei 2023 26 May 2023

Acara/Kegiatan Event
Indonesia Best CSR & TJSL Awards 2023

Penyelenggara Organizer
The Economics



ASEAN GRC Award dan Runner-up kategori Public Initiative Award
ASEAN GRC Award and Runner-up category Public Initiative Award

Tanggal Date
7 Juli 2023 7 July 2023

Acara/Kegiatan Event
ASEAN Risk Awards 2023

Penyelenggara Organizer
ERMA (Enterprise Risk Management Academy)



Inovasi Sosial kategori Silver
Social Innovation Silver category

Tanggal Date
10 Agustus 2023 10 August 2023

Acara/Kegiatan Event
Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2023

Penyelenggara Organizer
PT Sucofindo



The Best GRC for Corporate Culture 2023

The Best GRC for Corporate Finance 2023

The Best CEO for GRC Excellence 2023

Tanggal Date
30 Agustus 2023 30 August 2023

Acara/Kegiatan Event
GRC & Performance Excellence Award 2023

Penyelenggara Organizer
Business News



Financial Services In-House Team of The Year

Tanggal Date
25 Oktober 2023 25 October 2023

Acara/Kegiatan Event
Asian Legal Business Indonesia Law Awards

Penyelenggara Organizer
Asian Legal Business Indonesia



Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) kategori Pengelolaan Sampah Perkotaan
Corporate Social Responsibility Award (TSLP) in the Urban Waste Management category

Tanggal Date
15 – 17 Maret 2023 15–17 March 2023

Acara/Kegiatan Event
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Award
Corporate Social Responsibilities Award

Penyelenggara Organizer
Pemerintah Kota Yogyakarta
Yogyakarta Municipal



TOP GRC Award #5
The Most Committed GRC Leader 2023

Tanggal Date
6 September 2023 6 September 2023

Acara/Kegiatan Event
TOP GRC Awards 2023

Penyelenggara Organizer
TOP Business

Sertifikasi Certification



ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-bribery Management System

Masa Berlaku Expiry
30 Maret 2022 – 29 Maret 2025
30 March 2022 – 29 March 2025

Pemberi Sertifikasi Certifying Body
PT Chesna dan Komite Akreditasi Nasional
PT Chesna and National Accreditation Committee



Peristiwa Penting Tahun 2023

Significant Events in 2023



6 Januari January

Sebagai bentuk Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) antara *Special Mission Vehicle (SMV)* di bawah Kementerian Keuangan, PT PII bersama PT Geo Dipa Energi menginisiasi penanaman 15.000 pohon di wilayah Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. As a form of Social and Environmental Responsibility Synergy (CSR) between Special Mission Vehicle (SMV) reporting to the Ministry of Finance, IIGF, in collaboration with PT Geo Dipa Energi, planted 15,000 trees in the Dieng Plateau area, Banjarnegara.



10 Januari January

PT PII bersama Kementerian Keuangan & beberapa Media Nasional melaksanakan *site visit* ke Proyek Kereta Api Makassar – Parepare. Proyek ini mendapatkan dukungan Fasilitas Penyiapan & Pendampingan Transaksi serta Penjaminan Pemerintah dari Kementerian Keuangan melalui PT PII. IIGF, together with the Ministry of Finance & several National Media, conducted a site visit to the Makassar-Parepare Train Project. This project is supported by the Project Development Facility, and Government Guarantee from the Ministry of Finance via IIGF.



24 Januari January

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan & Regres pada proyek Jalan Tol Akses Patimban bersama PJKP Kementerian PUPR RI. The signing of the Guarantee & Recourse Agreements on the Patimban Access Toll Road project with the GCA, the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia



2 Februari February

Kerjasama terkait Implementasi KPBU & *Creative Financing* antara PT PII dan Politeknik Negeri Madiun ditandai penandatanganan MoU kedua pihak pada acara Peresmian Lab Kereta Api. Salah satu bentuknya melalui kegiatan *sharing session* tentang KPBU oleh PT PII untuk mendorong penguatan dan partisipasi dari 48 pimpinan Politeknik seluruh Indonesia sebagai pelaku ekosistem di lingkungan Pendidikan Vokasi. Cooperation for PPP Implementation & Creative Financing between IIGF and Madiun State Polytechnic, symbolized by the signing of the MoU between the two parties at the Railway Lab Inauguration. One of the forms is via sharing session on PPP by IIGF, to encourage the strengthening and participation of 48 Polytechnic leaders in Indonesia as ecosystem actors in Vocational Education.



14 Februari February

Seremonial kesepakatan bersama antara PT PII dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai langkah strategis dalam upaya penguatan ekosistem pengembangan infrastruktur melalui skema KPDBU khususnya dalam pengembangan *pipeline* penjaminan. A ceremonial joint agreement between IIGF and Ngawi Regency Government as a strategic step in efforts to strengthen the infrastructure development ecosystem via PPP scheme, especially in developing the guarantee pipeline.



15 Februari February

Market Sounding untuk proyek TPA Sampah Regional Piyungan, kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat calon investor sehingga proyek dapat segera terlaksana. Selain itu, PT PII bersedia menyiapkan penjaminan dalam upaya untuk mendukung program Pemerintah Daerah DIY dalam meningkatkan pengelolaan persampahan melalui skema KPBU.

Market Sounding for the Piyungan Regional Waste Landfill project. The activity shall attract potential investors so that the project can be implemented as soon as possible. In addition, IIGF is willing to provide guarantees to support the Government of the Special Region of Yogyakarta to enhance waste management via the PPP scheme.



1 Maret March

PT PII mengadakan acara INFINITY (*Innovative Financing in Unity*) dalam rangka Puncak HUT PT PII Ke-13 sebagai bentuk apresiasi PT PII kepada para pemangku kepentingan yang mendukung Perseroan hingga saat ini, dengan rangkaian acara yang terdiri dari dialog panel dengan tema kolaborasi ekosistem *Innovative Financing* dan pemberian apresiasi kepada para *stakeholders* yang telah mendukung ekosistem *Innovative Financing*.

IIGF held an INFINITY (*Innovative Financing in Unity*) event for the peak event, as a form of IIGF's appreciation to stakeholders who have supported the Company to date, with a series of events consisting of panel dialogs with the theme of collaboration of the Innovative Financing ecosystem and expressing appreciation to stakeholders who have supported the Innovative Financing ecosystem.



9 Maret March

PT PII melalui IIGF Institute, bekerja sama dengan Universitas Mulawarman melaksanakan *Indonesia Infrastructure Roundtable* (IIR) ke-24 dengan tema Peluang dan Tantangan Pengembangan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Melalui Skema KPBU yang dilaksanakan di Fakultas Teknis Universitas Mulawarman Kota Samarinda.

IIGF, via IIGF Institute, in collaboration with Mulawarman University, held the 24th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) with the theme Opportunities and Challenges for Public Street Lighting (PJU) Project Development through PPP Scheme, at the Faculty of Engineering, Mulawarman University, Samarinda City.



9 Maret March

Dalam mendorong potensi penjaminan dengan skema KPBU di IKN, PT PII melaksanakan *Site Visit* IKN bersama dengan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur KND Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

To encourage the potential for guarantees with the PPP scheme at IKN, IIGF visited the IKN Site, together with the Ministry of Finance, represented by the Director of KND Directorate General of State Assets.



4-6 April

Dalam rangkaian acara di bulan Ramadhan dengan tema #PIIBerkah "Berbagi Kebahagiaan ke Sesama", PT PII melaksanakan kegiatan CSR dengan melibatkan seluruh karyawan PT PII yang berlangsung selama 3 hari di Panti Sosial Tresna Wedha Budi Mulia I Jakarta Timur, Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang dan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama.

In a series of events in the month of Ramadhan with the theme #PIIBerkah "Sharing Happiness with Others", IIGF conducted CSR involving all IIGF's employees, for 3 days at the Tresna Wedha Budi Mulia I East Jakarta Social Home, Muhammadiyah Tanah Abang Orphanage and Putra Utama Children's Orphanage.



8 April

PT PII berkolaborasi dengan Mata Garuda, LPDP dan PT Pembangunan Perumahan dalam kegiatan MGTalk2 yang bertajuk Peran Pemuda sebagai Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) untuk Mendukung Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan. IIGF collaborated with Mata Garuda, LPDP, and PT Pembangunan Perumahan in the MGTalk2 activity entitled The Role of Youth as the Support of the National Capital City (IKN) to Encourage the Acceleration of Sustainable Development.



11 April

The Economics memberikan penghargaan kepada Direktur Utama PT PII sebagai *Best CEO Awards* pada kategori *Infrastructure Support Financing*. The Economics awarded IIGF's President Director as the Best CEO Awards in the Infrastructure Support Financing category.



5 Mei May

PT PII berpartisipasi pada kegiatan *Roundtable Discussion* bertemakan "*Breaking Barriers – Scaling the sustainable finance agenda in Asia-Pacific*" yang diselenggarakan oleh The Asset di Incheon, Korea Selatan yang merupakan rangkaian dari *The 56th Annual Meeting of Asian Development Bank (ADB)* dimana Direktur Utama PT PII hadir dan menjadi salah satu panelis. IIGF participated in the Roundtable Discussion with the theme "Breaking Barriers – Scaling the sustainable finance agenda in Asia-Pacific" organized by The Asset in Incheon, South Korea, which was a series of the 56th Annual Meeting of the Asian Development Bank (ADB), in which IIGF's President Director attended and was one of the panellists.



19 Mei May

Sebagai bentuk kepatuhan Perseroan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT PII telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022. As a form of the Company's compliance in implementing Good Corporate Governance, IIGF held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) with the agenda to Approve the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year.



26 Mei May

PT PII memperoleh penghargaan *Indonesia Best CSR & TJSL Awards 2023* yang digelar oleh The Economics, dimana PT PII mendapat penghargaan *Best CSR in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023*. IIGF received the 2023 Indonesia Best CSR & TJSL Awards held by The Economics. IIGF was awarded 2023 Best CSR in the Infrastructure Guarantee Sector Industry.



7 Juni June

PT PII mendapatkan penghargaan *Top CSR 2023 on Star 4* dan Kategori Khusus TOP CSR Award 2023 untuk CSR Bidang Lingkungan dari Majalah Top Business dalam ajang Top CSR Award 2023. Selain itu, Direktur Utama PT PII mendapatkan penghargaan *Top Leader on CSR Commitment 2023*.

IIGF received Top CSR 2023 on Star 4 Award and the Special Category of TOP CSR Award 2023 for CSR in the Environmental Sector from Top Business Magazine in the 2023 Top CSR Award. In addition, IIGF's President Director received Top Leader on CSR Commitment 2023 Award



7 Juni June

PT PII bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) melaksanakan Kesepakatan Bersama terkait kolaborasi dalam pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUS).

IIGF, in collaboration with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten (Bank BJB) executed a Joint Agreement for the cooperation in developing an infrastructure financing ecosystem through the Public Private Partnership (PPP) scheme.



23 Juni June

PT PII bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan INCoTalk Seri 1 sekaligus peluncuran Buku Kajian Kritis Pembangunan Jalan Tol di Indonesia berlokasi di Kampus UGM Jakarta.

IIGF, together with Gadjah Mada University (UGM), organized INCoTalk Series 1 simultaneously with the launch of the Critical Study Review on Toll Road Development in Indonesia at UGM Jakarta Campus.



7 Juli July

PT PII kembali raih penghargaan ASEAN Risk Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) di Singapura, pada kategori ASEAN GRC Award dan runner up pada kategori Public Initiative Award.

IIGF again won the 2023 ASEAN Risk Awards organized by the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) in Singapore, in the ASEAN GRC Award category and runner-up in the Public Initiative Award category.



26 Juli July

PT PII melalui IIGF Institute kembali menyelenggarakan Program Certified PPP Professional (CP3P) Level Foundation Batch 14 dimana sebanyak 9 orang dari Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian Keuangan, PT SMI (Persero), PT MRT Jakarta, dan PT WIKA Gedung Tbk berhasil menyelesaikan ujian dan tersertifikasi Certified PPP Professional Level Foundation.

IIGF, via IIGF Institute, again held the Certified PPP Professional (CP3P) Level Foundation Batch 14 Program. 9 people from Ministries/ Institutions including the Ministry of Finance, PT SMI (Persero), PT MRT Jakarta, and PT WIKA Gedung Tbk, successfully completed the exam and were Certified PPP Professional Level Foundation.



27 Juli July

PT PII berkolaborasi dengan IDX dalam acara "Fostering The Role of Capital Market for Creative Financing Indonesia Infrastructure Development".

IIGF collaborated with IDX in the "Fostering The Role of Capital Market for Creative Financing Indonesia Infrastructure Development" event.



1 Agustus August

Segenap manajemen dan karyawan PT PII menyambut bergabungnya Ibu Rina Widiyanti Wahyuningdyah sebagai Komisaris Utama PT PII yang diangkat melalui KMK No. 216 Tahun 2023.

All management and employees of IIGF welcomed Mrs. Rina Widiyanti Wahyuningdyah as IIGF's President Commissioner, who was appointed pursuant to KMK No. 216 of 2023.



10 Agustus August

Penandatanganan MoU antara Kemenhub dengan PT PII tentang Pemberian Dukungan dalam Upaya Penyediaan Infrastruktur melalui Pembiayaan Kreatif yang dilaksanakan pada acara *Launching Simpul Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi*.

The signing of the MoU between the Ministry of Transportation and IIGF on Providing Support to Establish Infrastructure through Creative Financing, which was conducted at the Launching of the Creative Financing Node for Transportation Infrastructure Provision.



21 Agustus August

PT PII kembali meraih penghargaan PPP Agency of the Year dalam ajang *Sustainable Infrastructure Award* di kategori Institution Awards yang diadakan oleh The Asset, Singapura.

IIGF won the PPP Agency of the Year award at the Sustainable Infrastructure Award in the Institution Awards category held by The Asset, Singapore.



4-5 September

DJPPR Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII, USAID-SINAR, LKPP dan PT SMI melaksanakan *Capacity Building* Penyiapan Proyek dan Transaksi Skema KPBU untuk Infrastruktur Alat Penerangan Jalan kepada Pemerintah Daerah di Bali.

Director General of Budget Financing and Risk Management of the Ministry of Finance, in collaboration with IIGF, USAID-SINAR, LKPP, and PT SMI, conducted Capacity Building for Project Preparation and PPP Scheme Transaction for Street Lighting Infrastructure to Local Government in Bali.



13-16 September

PT PII melalui IIGF Institute menjadi *knowledge partner* pada rangkaian kegiatan *Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) - Infrastructure Forum & Edutainment Expo*.

IIGF, via IIGF Institute, became a knowledge partner in the activities of *Sewindu National Strategic Project (PSN) - Infrastructure Forum & Edutainment Expo*.



29 September

PT PII melaksanakan *Company Gathering* yang diselenggarakan di Malang pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2023 dan diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris, Organ Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT PII. *Company Gathering* dilaksanakan dengan menjunjung tema “*Grow Beyond Yourself*”.

IIGF held a *Company Gathering* in Malang from 29 September to 1 October 2023, and the event was attended by Members of the Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and IIGF's Employees. The *Company Gathering* had the theme “*Grow Beyond Yourself*”.



17 Oktober October

PT PII menandatangani perjanjian Proyek KPBU Jalan Tol JORR *Elevated* Cikunir – Ulujami yang terdiri atas Perjanjian Penjaminan dengan PT Jakarta Metro Expressway selaku BUJT dan Perjanjian Regres dengan Kementerian PUPR.

IIGF signed the Cikunir – Ulujami JORR *Elevated* Toll Road PPP Project agreement, consisting of a Guarantee Agreement with PT Jakarta Metro Expressway as BUJT, and a Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



23 Oktober October

PT PII turut serta dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar 8 (KM8) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dengan 17 perwakilan relawan yang dikirim ke 4 daerah 6 sekolah secara serentak, yaitu di SMAN 8 Jakarta, SMAN 34 Jakarta, SMPN 3 Singkawang, Kalimantan Barat, SMP IT Albina Ternate, Maluku Utara, dan SDN 1 Wanagiri, Buleleng, Bali.

IIGF participated in the Kemenkeu Mengajar 8 (KM8/Ministry of Finance Teaching 8) carried out by the Ministry of Finance with 17 volunteer representatives sent to 4 regions of 6 schools simultaneously, i.e., State High School 8 Jakarta, State High School 34 Jakarta, State Junior High School 3 Singkawang, West Kalimantan, Integrated Islamic Junior High School Albina Ternate, North Maluku, and State Elementary School 1 Wanagiri, Buleleng, Bali.



28 Oktober October

PT PII membuka *booth* untuk meramaikan *gathering* perayaan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-77 dengan menampilkan hasil UMKM binaan PT PII dan aktivitas-aktivitas interaktif lainnya.

IIGF opened a *booth* to enliven the gathering to celebrate the 77th Republic of Indonesia Oeang Day (HORI) by displaying the results of MSMEs assisted by IIGF, and other interactive activities.



20 November

PMO Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan PT PII, PT KCIC, PMO DJPPR, PMO DJPb, PMO DJKN dan BDK Cimahi untuk menyelenggarakan PMO *Internal Meeting III* dengan tema “Peran *Creative Financing* dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia” sebagai acara kolaborasi Duta Transformasi dan PMO Setjen Kementerian Keuangan yang mengusung konsep *Collaboration Tour*.

The PMO of the Secretariat General of the Ministry of Finance collaborated with IIGF, PT KCIC, PMO DJPPR, PMO DJPb, PMO DGSAM, and BDK Cimahi to organize the PMO *Internal Meeting III* with the theme “The Role of *Creative Financing* in Indonesia's Infrastructure Development” as a collaborative event of the Transformation Ambassador and PMO of the Secretariat General of the Ministry of Finance with the concept of *Collaboration Tour*.



PT PII sebagai inisiator, bersama dengan SMV Kementerian Keuangan bersinergi untuk mendukung penyelesaian masalah sampah di Indonesia melalui program WE CARE (Waste Management for Circular Economy) yang diresmikan oleh Ditjen KN Kementerian Keuangan di Yogyakarta.

IIGF, as the initiator, together with the Ministry of Finance's SMV, cooperated to support the waste problems solution in Indonesia through the WE CARE (Waste Management for Circular Economy) program which was inaugurated by the Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance in Yogyakarta.



Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023, PT PII menyelenggarakan kegiatan *Talkshow Forum GRC* bertajuk "Membangun Budaya Organisasi/Perusahaan dalam Mencegah Korupsi dan Penyuapan".

In commemorating World Anti-Corruption Day in 2023, PT PII organized a Talkshow Forum on GRC titled "Building Organizational/Company Culture in Preventing Corruption and Bribery."



Pelaksanaan *Workshop* "Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan" yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Bappenas, dan LKPP dengan *support* dari Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

"ESG Implementation Policy in Promoting Sustainable Infrastructure Development" Workshop, involving the Ministry of Finance, Ministry of Public Works and Housing, Bappenas, and LKPP, with the support from Indonesia Australia Partnership for Infrastructure (KIAT).



PT PII telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) agenda Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, sekaligus Pengesahan Kontrak Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024.

IIGF held a General Meeting of Shareholders (GMS) with the agenda to Ratify the 2024 Company's Work Program and Budget (RKAP), and the Performance Contract of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2024.







Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report



Rina Widiyani Wahyuningdyah
Komisaris Utama
President Commissioner



Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada segenap jajaran Direksi dan manajemen di bawahnya atas upaya dan kerja keras selama tahun 2023. Kami menilai Direksi telah melakukan pengelolaan kegiatan secara baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan bisnis Perseroan. Berkat kerja sama seluruh jajaran Direksi, Perseroan mencapai kinerja terbaik sepanjang berdirinya Perseroan.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' and the supporting management for their efforts and hard work in 2023. We assessed that the Board of Directors has managed the activities well in accordance with the predetermined work program to maintain the stability and continuity of the Company's business. Because of the cooperation of the Board of Directors, the Company achieved the best performance in the history of its establishment.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Terhormat

To All Distinguished Shareholders and Stakeholders

Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga mampu melaksanakan pengelolaan PT PII dengan baik selama tahun buku 2023 dengan pencapaian kinerja yang sangat baik.

Pada kesempatan ini, izinkan kami mewakili jajaran Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan pengawasan sepanjang tahun 2023. Seluruh tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengusung tema "*The Road to Sustainable Performance & Impact*," Laporan Tahunan Perseroan ini menggambarkan kondisi Perseroan di tahun 2023. Di tengah situasi global yang diwarnai dengan ketidakpastian, Perseroan memiliki fokus yang lebih luas daripada sekadar infrastruktur untuk mencapai kinerja terbaiknya. PT PII juga memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan, seperti manajemen sumber daya manusia, inovasi, teknologi, keberlanjutan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kesuksesan jangka panjang Perseroan.

Peace and prosperity to us all. We express our gratitude to the God Almighty, for His grace, IIGF was able to conduct management during the 2023 fiscal year with an excellent performance.

On this occasion, please allow us, on behalf of the Board of Commissioners, to submit a supervisory report in 2023. All duties and responsibilities have been carried out in accordance with the Company's Articles of Association and laws and regulations. The Board of Commissioners has ensured that the Company's operations have referred to the established work program, and been managed professionally, in accordance with the interests of Shareholders and other stakeholders.

Under the theme "*The Road to Sustainable Performance & Impact*," the Company's Annual Report depicted the Company's condition in 2023. Amidst the global situation characterized by uncertainty, the Company has a broader focus than infrastructure to achieve its best performance. IIGF takes into account other factors that may affect the Company's performance, such as human resource management, innovation, technology, sustainability, and other factors that can affect the Company's long-term success.



Tinjauan Ekonomi Dunia dan Nasional Global and National Economic Review

Berdasarkan data IMD's *World Competitiveness Ranking* 2023 yang dipublikasikan oleh *International Institute for Management Development* (IMD), Indonesia memiliki peringkat daya saing infrastruktur yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di dunia maupun di Kawasan Asia Tenggara yaitu peringkat 51 dari 64 negara. Rendahnya peringkat pada indeks infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan pengembangan infrastruktur di berbagai sektor.

Rendahnya daya saing infrastruktur mendorong Pemerintah untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas. Pada tahun 2023 belanja infrastruktur terealisasi sebesar Rp455,8 triliun atau lebih tinggi 22,2% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp372,8 triliun. Dalam RPJMN 2020–2024, Pemerintah juga merencanakan kebutuhan belanja infrastruktur sebesar Rp6.455 triliun sementara kemampuan Pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp2.385 triliun atau 37% dari total kebutuhan.

Proyek-proyek prioritas yang dicanangkan Pemerintah diharapkan mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur sehingga pada akhirnya mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, mengingat tingginya nilai investasi untuk proyek-proyek infrastruktur dan keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam memenuhinya, diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema pembiayaan kreatif lainnya. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pendanaan infrastruktur yang menggunakan sumber pendanaan alternatif disamping pendanaan APBN/APBD.

Sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PT PII diharapkan dapat menjadi penghubung antara Pemerintah dan investor demi kelangsungan proyek-proyek infrastruktur dengan tetap antisipatif terhadap risiko ketidakpastian untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan secara berkelanjutan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Based on the IMD's *World Competitiveness Ranking* 2023 data published by the *International Institute for Management Development* (IMD), Indonesia has relatively low infrastructure competitiveness compared to several other countries in the world and in the Southeast Asia Region, i.e., ranked 51 out of 64 countries. The low ranking on the infrastructure index depicted that Indonesia still needs infrastructure development in various sectors.

The low competitiveness of infrastructure encouraged the Government to prioritize infrastructure development as one of its priority programs. In 2023, infrastructure expenditure was Rp455.8 trillion or 22.2% higher than the 2022 realization of Rp372.8 trillion. In the 2020–2024 RPJMN, the Government forecasts infrastructure expenditure budget of Rp6,455 trillion, while the Government's ability to fund is approximately Rp2,385 trillion or 37% of the total budget.

Priority projects launched by the government are expected to catch up in infrastructure to ultimately support economic transformation and new growth centers. However, given the high value of investment for infrastructure projects and the limited ability of the Government to fulfill it, innovative efforts are necessary to encourage the participation of community investment and business entities via Public Private Partnership (PPP) schemes and other creative financing schemes. This is in accordance with the new paradigm of infrastructure financing, making State Budget/Regional Budget the last alternative source of financing.

As an Infrastructure Guarantee Business Entity, IIGF shall be a liaison between the Government and investors for the continuity of infrastructure projects, while anticipating the risks of uncertainty to strive to support the achievement of construction targets in a sustainable manner with good governance principles.



Penilaian atas Kinerja Direksi

Performance Assessment of the Board of Directors

Dewan Komisaris sangat mengapresiasi kinerja Direksi dan seluruh jajaran insan Perseroan atas pencapaian kinerja positif yang berhasil dicapai di tengah berbagai tantangan dan peluang yang muncul. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengerahkan upaya dan strategi terbaik demi mempertahankan stabilitas dan kelangsungan bisnis Perseroan. Dewan Komisaris juga memandang Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Keuangan Perseroan secara individual telah berhasil mencapai target kinerja yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) individual masing-masing sebesar 102,31%, 104,92%, dan 102,58%.

The Board of Commissioners highly appreciated the performance of the Board of Directors and all Company's personnel for the positive performance achievements amidst various challenges faced. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has given its best efforts and strategies to maintain the stability and continuity of the Company's business. The Board of Commissioners considers that the President Director, Business Director, and Finance Director of the Company have individually achieved the performance targets expected by stakeholders, as indicated by the individual achievement of Key Performance Indicators (KPI), at 102.31%, 104.92%, and 102.58%, respectively.

Penilaian atas Kinerja Perseroan

Assessment of the Company's Performance

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada segenap Direksi dan jajaran atas upaya dan kerja keras selama tahun 2023. Kami menilai Direksi dan jajaran telah melakukan pengelolaan kegiatan secara baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan bisnis Perseroan. Berkat kerja sama seluruh Direksi dan jajaran di tahun 2023 ini, Perseroan telah berhasil mencapai kinerja terbaik sepanjang berdirinya Perseroan.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' and the supporting management for their efforts and hard work in 2023. We assessed that the Board of Directors has managed the activities well in accordance with the predetermined work program to maintain the stability and continuity of the Company's business. Because of the cooperation of the Board of Directors, the Company achieved the best performance in the history of its establishment.

PT PII berperan secara aktif terlibat dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur baik pusat dan daerah untuk direncanakan dan dikembangkan dengan skema KPBU maupun non-KPBU. Selain itu, PT PII juga melaksanakan mandat penjaminan proyek non infrastruktur berdasarkan penugasan dari Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 2023, terdapat 4 tambahan proyek baru yang dijamin yaitu Tol Akses Patimban, Alat Penerangan Jalan (APJ) Lombok Barat, Tol Cikunir – Ulujami dan penjaminan dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah sehingga sejak berdiri sampai dengan akhir tahun 2023, PT PII telah melaksanakan penjaminan sebanyak 50 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp497 triliun.

IIGF is actively involved in the development of infrastructure projects both at the central and regional levels, to be planned and developed under PPP and non-PPP schemes. In 2023, 4 additional new projects were guaranteed, including Patimban Access Toll Road, West Lombok Street Lighting, Cikunir-Ulujami Toll Road, and Guarantee for the Government Food Reserves. Therefore, as of the end of 2023, IIGF has guaranteed 50 infrastructure projects with an investment value of Rp497 trillion.

Dari total 50 proyek yang dijamin, sebanyak 41 proyek merupakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU, dan 9 penjaminan proyek non infrastruktur. Penjaminan proyek infrastruktur meliputi 7 sektor yakni: (i) ketenagalistrikan, (ii) telekomunikasi, (iii) air minum, (iv) jalan, (v) transportasi, (vi) pariwisata, dan (vii) konservasi energi.

Of the total 50 projects guaranteed, 41 projects are guarantees for infrastructure projects with PPP and non-PPP schemes, and 9 guarantees for non-infrastructure projects. Infrastructure project guarantees cover 7 sectors: (i) electricity, (ii) telecommunications, (iii) drinking water, (iv) roads, (v) transport, (vi) tourism, and (vii) energy conservation.

Dewan Komisaris mengapresiasi atas diberikannya mandat baru kepada Perseroan untuk memberikan penjaminan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Penjaminan penyelenggaraan CPP bertujuan untuk

The Board of Commissioners expressed its appreciation for the new mandate provided to the Company to provide guarantees in organizing the Government Food Reserves. The guarantee for CPP (Government Food Reserves) has the objective of



mendukung kemampuan penyelenggara CPP dalam memperoleh pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP (*credit enhancement*), kewajiban finansial yang dijamin oleh PT PII antara lain berupa pokok pinjaman, bunga/imbalan, dan/atau biaya lainnya yang timbul.

Dalam upaya peningkatan kapasitasnya untuk melakukan penjaminan, PT PII secara akumulatif sejak berdirinya di tahun 2009 hingga 2023 telah mendapatkan PMN sebesar Rp10,7 triliun. Pada tahun 2023 ini, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp835,82 miliar meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar. Dari sisi biaya, Dewan Komisaris juga terus mendukung upaya Perseroan untuk terus melakukan efisiensi biaya. Pada tahun 2023, capaian tingkat rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang dicapai oleh Perseroan adalah sebesar 37%, sama dengan tahun sebelumnya.

Selain Pajak, PT PII pun telah berkontribusi bagi penerimaan negara melalui pembayaran dividen. Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2022 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp142.834.724.200 yang telah dibayarkan pada 9 Juni 2023. Dewan Komisaris terus mendorong upaya PT PII untuk meningkatkan kontribusi kepada negara melalui pembayaran dividen.

supporting the ability of the CPP organizer to obtain loans to implement CPP (*credit enhancement*). IIGF guaranteed the financial obligations which include principal loan, interest/compensation, and/or other costs incurred.

To increase its capacity to provide guarantees, PT PII has accumulatively received a PMN of Rp10.7 trillion since its establishment in 2009 until 2023. In 2023, the Company recorded income for the year of Rp835.82 billion, increased by 17.03% compared to 2022, which was Rp714.17 billion. In terms of expenses, the Board of Commissioners keeps supporting the Company's efforts to continue to conduct cost efficiency. In 2023, the Operating Expenses to Operating Income (BOPO) ratio of the Company was 37%, the same as the previous year.

In addition to Tax, IIGF has also contributed to the state revenue by paying dividends. The Shareholders, via the Company's Annual General Meeting of Shareholders on 19 May 2023, have approved the dividend distribution for the 2022 fiscal year amounting to 20% of the Company's net profit, equivalent to Rp142,834,724,200, which was paid on 9 June 2023. The Board of Commissioners encourages IIGF's efforts to enhance its contribution to the state via dividend payments.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan Supervision of the Company's Strategy Implementation

Dewan Komisaris berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi melalui komunikasi yang intensif dan selalu dilaksanakan untuk membahas isu-isu signifikan, termasuk dalam perencanaan dan konsistensi pelaksanaan rencana Perseroan di tahun 2023.

Dalam perumusan target kinerja dan kebijakan strategis di awal tahun, Dewan Komisaris berperan memberikan arahan, nasihat dan masukan kepada Direksi. Tidak hanya dalam hal perumusan, namun Dewan Komisaris juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis dan tercapainya target-target kinerja yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pemberian arahan, nasihat dan masukan dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, melalui surat tertulis, rapat Komite di bawah Dewan Komisaris, dan juga dalam kunjungan kerja Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is committed to implementing its supervisory and advisory functions to the Board of Directors through intensive and frequent communication to discuss significant issues, including the planning and consistent implementation of the Company's 2023 plan.

In the formulation of performance targets and strategic policies at the beginning of the year, the Board of Commissioners provided direction, advice, and input according to its capacity and capability to the Board of Directors and all Company's personnel. In addition to formulation, the Board of Commissioners is responsible for ensuring the effectiveness of the strategic policies and the achievement of performance targets set forth in the Company's Work Program and Budget (RKAP).

Providing direction, advice and input from the Board of Commissioners to the Board of Directors is carried out in meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, through written letters, Committee meetings under the Board of Commissioners, and also during working visits from the Board of Commissioners.



Pengawasan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan Supervision of the Sustainable Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta membangun suatu lingkungan bisnis yang profesional, transparan, berintegritas, dan efisien yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Sebagaimana perkembangan penerapan GCG, Perseroan menempatkan GCG dalam koridor pembangunan berkelanjutan atau *sustainability development*, yang diharapkan dapat berdampak positif baik bagi Perseroan maupun bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi usahanya.

Sementara itu bagi Perseroan, implementasi GCG yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku universal disertai penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif diharapkan akan memfasilitasi setiap elemen untuk melaksanakan tugasnya sesuai etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta membangun hubungan industrial yang berlandaskan etika antara pemangku kepentingan dan perusahaan.

Dewan Komisaris mendukung PT PII untuk terus berkomitmen meningkatkan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, serta menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional di lingkungan Perseroan. Dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dalam upaya meningkatkan praktik-praktik GCG sehingga prinsip-prinsip GCG dapat berjalan dan diterapkan dengan baik.

Good Corporate Governance (GCG) implementation within the Company is part of the Company's commitment to protecting the interests of its stakeholders and establishing a professional, transparent, integrity, and efficient business environment to enhance and optimize corporate value. As the development of GCG implementation, the Company considers GCG in the corridor of sustainable development, which shall have a positive impact both for the Company and for the community and environment around its business location. By organizing operations based on good corporate governance and best practices, the Company hopes to contribute to the creation of a business climate that accommodates healthy competition in Indonesia as well as sustainable economic growth and stability to provide maximum benefits for the entire community.

Meanwhile, the Company prioritizes GCG implementation with universally accepted corporate governance, accompanied by an effective supervision and control system. This shall facilitate each element to carry out its duties according to work ethics and responsible decision-making, support integrity in financial reporting, proper risk management, and establish industrial relations based on ethics between stakeholders and the company.

The Board of Commissioners supports IIGF in continuing its commitment to consistently and sustainably enhance the implementation GCG, as well establishing GCG principles as the basis of the company's operation. In its implementation, the Board of Commissioners performs a supervisory function to enhance GCG practices so that GCG principles can be carried out and implemented properly.

Pandangan atas Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Perspective on the *Good Corporate Governance* (GCG)

Dewan Komisaris secara konsisten menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan PT PII termasuk pada aspek kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. PT PII telah menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penilaian GCG Tahun Buku 2023 mengacu kepada parameter yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Hasil penilaian BPKP tersebut menunjukkan pencapaian skor sebesar 90,036% dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Penerapan GCG di lingkungan Perseroan memperlihatkan perkembangan yang signifikan dan dapat dilihat pada nilai skor *assessment* GCG Perseroan yang selalu berada dalam kategori "Sangat Baik" dari tahun ke tahun.

The Board of Commissioners consistently implements its supervisory duties on IIGF's management, especially on the quality of Good Corporate Governance. Therefore, in 2023, IIGF conducted a GCG assessment for the 2023 Fiscal Year with reference to the parameters developed by the Ministry of Finance, as stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 of 2015, on the Implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance. The assessment resulted in a score of 90.036%, which is qualified as a "Very Good" GCG implementation. GCG implementation within the Company shows significant progress and is reflected in the Company's GCG assessment score, which is in the "Very Good" category steadily.



Kemajuan dalam penerapan GCG selama ini terbukti telah memberikan dampak yang positif bagi Perseroan, antara lain meningkatnya kinerja dan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta meningkatkan *employee engagement* di internal PT PII. Dewan Komisaris akan terus melakukan *monitoring* dan memberikan arahan untuk memastikan perbaikan terhadap area-area yang direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku asesor. Dewan Komisaris juga berharap agar penerapan GCG Perseroan dapat terus disempurnakan melalui komitmen yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh insan Perseroan dalam rangka menjaga kepercayaan dan kepentingan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Effectiveness of Risk Management System

Sejalan dengan tanggung jawab Dewan Komisaris atas pengawasan efektivitas manajemen risiko di PT PII, Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko yang diusulkan oleh Direksi termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Guna memastikan Perseroan telah mengelola aktivitas dan risiko-risiko secara efektif, Dewan Komisari melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko melalui *monitoring* risiko secara berkala. Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan arahan perbaikan atas pelaksanaan manajemen risiko, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko secara baik.

Tata Kelola Manajemen Risiko yang diterapkan di Perseroan mengadopsi model 3 garis (*three lines model*) yang menggambarkan hubungan kerja sama dan komunikasi dari seluruh unsur-unsur di Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko, serta para Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan *Risk Officer* yang berada di setiap divisi. Perseroan juga menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management/ERM*) sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan, terutama pada area-area yang mencakup kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang dikembangkan sesuai *best practice*. Direksi juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa (*Procurement*) dalam rangka mencegah terjadinya risiko *fraud*. Penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting, mengingat

The progress in GCG implementation has proven to have a positive impact on the Company, including increased performance and trust of stakeholders. The Board of Commissioners shall monitor and provide guidance to ensure improvements in the areas recommended by BPKP as the assessor. The Board of Commissioners also hopes that the Company's GCG implementation can be refined continuously via strong commitment and active participation from all the Company's personnel to maintain the stakeholders' trust and interests in a sustainable manner.

In line with the Board of Commissioners' responsibilities on risk management effectiveness in IIGF, the Board of Commissioners has approved the risk management policy, including strategy and risk management framework set forth in accordance with the risk appetite and risk tolerance.

The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, evaluates the effectiveness of risk management by regular risk monitoring to ensure that the Company has effectively managed its activities and risks. The Board of Commissioners has provided advice and direction on the risk management implementation, in accordance with the precautionary principle and proper risk management implementation.

The Company implemented Risk Management Governance that adopted a three lines model, illustrating the cooperation and communication relationships of all elements in the Company including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Audit, Risk Management function and the Risk Owners, as well as and Risk Officers in each division. The Company utilizes the Enterprise Risk Management (ERM) approach as a reference to perform risk management activities effectively and efficiently.

The Board of Commissioners considers the Board of Directors to have demonstrated a strong commitment to continuously improving the quality of risk management practices, especially in areas that cover resource capabilities, technology and methodologies developed, in accordance with best practice. The Board of Directors has implemented the Anti-Bribery Management System (SMAP) in the Procurement scope of work to prevent fraud risk. Effective risk management is very important, considering the challenges and demands of the business world, including the expectations of stakeholders, that



tantangan dan tuntutan dunia usaha, termasuk harapan para pemangku kepentingan terus meningkat di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

Terkait pengelolaan risiko proyek, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam upaya menguatkan mitigasi risiko, khususnya dalam proses penjaminan *small scale project* Alat Penerangan Jalan (APJ), penanganan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah mengajukan klaim penjaminan, mekanisme regres kepada pemerintah daerah, analisis risiko terhadap sektor-sektor yang menjadi target penjaminan korporasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), analisis kemampuan PJKP dalam memenuhi komitmen *Availability Payment*, penanganan klaim dan regres untuk penjaminan proyek dan juga potensi klaim penjaminan.

Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan kepada Direksi agar memastikan adanya pedoman pengelolaan risiko yang kuat untuk menghadapi risiko pasar (*mark to market*) dalam kegiatan pengelolaan dana, mengingat risiko kenaikan suku bunga yang semakin tinggi. Selain itu, Direksi juga telah diminta untuk memberikan masukan yang konstruktif dengan data yang akurat dan tepat dalam kegiatan penyusunan profil risiko jaminan Proyek KPBU sehubungan dengan pengisian *piloting* Profil Risiko APBN, Kontijensi dan Neraca Konsolidasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Masukan yang diberikan agar mempertimbangkan posisi Perseroan sebagai *ring fencing* APBN serta potensi kebutuhan PMN untuk memperkuat kapasitas penjaminan Perseroan di masa depan.

continue to increase amidst uncertain economic and business situations.

In terms of project risk management, the Board of Commissioners has provided direction and input to the Board of Directors to strengthen risk mitigation, particularly in the process of guaranteeing small-scale projects for Street Lighting Equipment (APJ), handling Drinking Water Supply System (DWSS) projects that have validly submitted guarantee claims, recourse mechanisms to local governments, risk analysis of sectors targeted for corporate guarantees in PEN, and analysis of GCA's ability to fulfil AP commitments.

The Board of Commissioners also provided direction to the Board of Directors to ensure that there are sufficiently strong risk management guidelines in dealing with market risk (mark to market) on fund management activities, given the risk of higher interest rates. In addition, the Board of Directors was requested to provide constructive input with accurate and precise data to prepare the PPP Project guarantee risk profile in connection with the piloting of the State Budget Risk Profile, Contingency, and Consolidated Balance Sheet, conducted by the Directorate General of Budget Financing and Risk Management of the Ministry of Finance. The input provided considers the Company's position as State Budget's ring fencing and the potential PMN need to strengthen the Company's guarantee capacity in the future.

Pandangan atas Kinerja Kepatuhan Direksi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perspective on the Compliance of the Board of Directors and the Effectiveness of the Internal Control

Dewan Komisaris berpandangan bahwa selama tahun 2023, Direksi telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian dengan pihak ketiga serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan/atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Optimalisasi pelaksanaan kepatuhan hukum Perseroan oleh Divisi Corporate Secretary & Communication fungsi Corporate Legal dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan memastikan kepatuhan tindakan dan legalitas/dokumen Perseroan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di internal Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait Sistem Pengendalian Internal, PT PII menerapkan 3 (tiga) aspek pengendalian internal yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan, dan kepatuhan. Dewan Komisaris mendukung Perseroan untuk terus melakukan perbaikan yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan Perseroan, termasuk dalam hal ini adalah kehandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

In 2023, the Board of Commissioners considers the Board of Directors has implemented the Company's governance in accordance with laws and regulations, agreements with third parties, and the Work Plan and Company Budget (RKAP) and/or Long-Term Company Plan (RJPP). The Company optimizes legal compliance by using the Corporate legal function in the form of examining and ensuring compliance of the Company's actions and legalities/documents with the Company's internal policies and prevailing laws and regulations.

In terms of the Internal Control System, IIGF implements three (3) aspects of internal control, i.e., operational control, financial control, and compliance. The Board of Commissioners considers that improvements to the internal control system have been carried out continuously by all IIGF's personnel with the objective of increasing effectiveness and efficiency in managing resources to achieve the Company's objectives, including, in this case, the reliability of financial reporting and compliance with laws and regulations.



Laporan implementasi pengendalian internal dari Direksi menjadi salah satu bahan penelaahan Dewan Komisaris yang selanjutnya menjadi rekomendasi dalam memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah menerapkan *Risk Based Audit Planning* yang baik sehingga menyajikan informasi yang memadai dan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam audit. Dewan Komisaris dan Komite Audit juga melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan rekomendasi audit internal diselesaikan sesuai dengan prosedur dan target waktu yang ditetapkan.

Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar segera menyelesaikan seluruh rekomendasi audit, baik internal maupun eksternal, terutama untuk temuan yang telah jatuh tempo dan dilakukan penjadwalan ulang. Selain itu Dewan Komisaris mendukung penyusunan rencana kerja dari Divisi Internal Audit serta pelaksanaannya.

Untuk memberi keyakinan bahwa pengendalian internal di PT PII telah berjalan sesuai dengan sistem, Perseroan melaksanakan audit kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal di Perseroan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun berjalan bersamaan dengan audit Laporan Keuangan. Adapun terhadap catatan atas masalah-masalah tertentu berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan di tahun 2022 yang disertai saran perbaikan, telah diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan tuntas.

Pandangan atas Efektivitas Audit Eksternal Perspective on the Effectiveness of the External Audit

Pemantauan Dewan Komisaris terhadap audit eksternal merupakan salah satu fungsi penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perusahaan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Untuk itu Dewan Komisaris terlibat dalam proses pemilihan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit eksternal yang didasarkan pada kriteria yang objektif dan memastikan bahwa kantor akuntan publik tersebut memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi yang diperlukan. Di samping itu, Dewan Komisaris senantiasa memantau kinerja kantor akuntan publik dalam melakukan audit eksternal, meliputi peninjauan terhadap laporan audit, memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Selama tahun 2023, terdapat beberapa pemeriksaan oleh auditor eksternal di antaranya pemeriksaan pendahuluan kinerja dan pemeriksaan terinci kinerja atas efektivitas pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tahun 2022 s.d. 2023 dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah pada

The internal control report from the Board of Directors is one of the review materials of the Board of Commissioners to be a recommendation in providing advice and direction to the Board of Directors. This is conducted to ensure that the activities carried out have implemented good risk-based audit planning to present adequate information and provide recommendations to improve the weaknesses found in the audits. The Board of Commissioners and the Audit Committee also conduct regular monitoring to ensure that internal audit recommendations are finished in accordance with the procedures and predetermined time targets.

The Board of Commissioners requests the Board of Directors to immediately complete all audit recommendations, especially for findings that are due and rescheduled. In addition, the Board of Commissioners supports the preparation of the work program of the Internal Audit Division for Risk Based Audit, and the Internal Audit Division's work program to check the business processes in the new guaranteed projects.

The Company conducts a compliance audit of the Laws and Regulations and Internal Control in the Company to provide assurance that internal control at IIGF has been carried out in accordance with the system. The audit is conducted by the Public Accounting Firm (KAP) for the current year, along with the audit of the Financial Statements. Notes on certain issues related to compliance with legislation in 2022 with suggestions for improvement have been resolved and followed up thoroughly.

The Board of Commissioners's monitoring of the external audit is one of the important functions in maintaining the Company's transparency, accountability, and compliance with prevailing standards and regulations. Therefore, the Board of Commissioners is responsible for selecting the public accounting firm that will conduct the external audit, based on objective criteria, and ensuring that the public accounting firm has the necessary credibility, competence, and independence. In addition, the Board of Commissioners monitors the performance of the public accounting firm in conducting the external audit, including reviewing the audit report, ensuring that the audit is conducted in accordance with prevailing auditing standards, and confirming whether there are any problems or weaknesses that need to be addressed.

In 2023, there were several audits by external auditors, including preliminary performance audits and detailed performance audits on the effectiveness of the management of Public Private Partnership (PPP) Projects in 2022 up to 2023 to accelerate infrastructure development and regional development at the Ministry of Finance as the Fiscal Manager, Ministry of National



Kementerian Keuangan selaku pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta oleh BPK RI, pemeriksaan pemberian dukungan Pemerintah pada Perseroan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan evaluasi program peningkatan produk dalam negeri triwulan IV tahun 2023 pada BUMN oleh BPKP.

Sebagian besar rekomendasi dari auditor eksternal telah ditindaklanjuti pada tahun 2023, namun terdapat 1 dari total 32 rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yaitu terkait pemutakhiran SOP siaga tanggap darurat, yang selesai dilakukan pada triwulan I 2024. Dewan Komisaris akan senantiasa memastikan bahwa Direksi telah melakukan upaya terbaik untuk menyelesaikan hasil rekomendasi dari auditor eksternal.

Development Planning/Bappenas, and other related agencies in Special Capital Region of Jakarta by the Audit Board of the Republic of Indonesia, audit of the provision of Government support to the Company by the Inspectorate General of the Ministry of Finance, and evaluation of the domestic product improvement program in Q4 2023 SOEs by Financial and Development Supervisory Agency.

Most of the recommendations from external auditors have been followed up, but there is still 1 out of a total of 32 recommendations from the Inspectorate General of the Ministry of Finance that is still in the process of being followed up, i.e., updating the emergency response SOP. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors performs best efforts to finalize the recommendations of the external auditor.

Pandangan atas Penerapan Sistem Teknologi Informasi

Perspective on the Information Technology System

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah memberikan perhatian yang memadai terkait pengembangan sistem Teknologi Informasi di Perseroan. Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa *milestone* dari sisi IT, di antaranya migrasi data Perseroan ke *cloud*, penggunaan *Enterprise Resource Planning*, dan penerapan *e-Office* untuk otomatisasi surat masuk dan keluar.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi dalam hal pengembangan sistem Teknologi Informasi untuk mendukung proses bisnis Perseroan, mengintegrasikan masing-masing fungsi di Perseroan, dan meningkatkan aksesibilitas serta keamanan data.

The Board of Commissioners considers the Board of Directors has provided adequate attention to the Information Technology system development in the Company. In 2023, IT reached several milestones, including the migration of the Company's data to the cloud, the use of Enterprise Resource Planning, and the implementation of e-office to automate incoming and outgoing mail.

The Board of Commissioners encourages the Board of Directors to develop the Information Technology system to support the Company's business processes, integrate each function in the Company, and improve data accessibility and security.

Pandangan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier

Perspective on Career Development Policy and Implementation

Dewan Komisaris memandang bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan Perseroan. Oleh karena itu Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan optimal, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengelola talenta internal Perseroan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris terus mendukung pengembangan SDM oleh Perseroan dapat meningkatkan pertumbuhan Perseroan, mengembangkan inovasi dan kreatifitas, serta menjadikan Perseroan sebagai yang terdepan melalui pelaksanaan program pelatihan, pembinaan, *mentoring*, pemberian *reward* dan *punishment*, penerapan manajemen karier dan program pengembangan lainnya.

The Board of Commissioners considers human resources as valuable assets in supporting the Company's sustainability. Therefore, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to effectively manage human resources, improve organizational performance, and sustain the development of the Company's internal talent.

The Board of Commissioners supports the development of human resources by the Company to enhance the Company's growth, develop innovation and creativity, and deliver the Company as a leader via the implementation of training, coaching, mentoring, reward and punishment programs, career management, and other development programs.



Pandangan atas Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Perspective on the Accounting Policies and Financial Statements Preparation

Dewan Komisaris telah melakukan reviu dan pembahasan terkait kebijakan akuntansi pada Perseroan dan disampaikan secara berkala kepada Direksi melalui rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi setiap bulannya. Terdapat beberapa isu mengenai kebijakan akuntansi yang menjadi *concern* dari Dewan Komisaris selama tahun 2023 di antaranya pengakuan piutang regres, pembebanan pada penugasan PDF, dan perubahan kebijakan akuntansi dikarenakan adanya perubahan regulasi penugasan maupun perpajakan. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris berpendapat bahwa kebijakan akuntansi yang diterapkan di Perseroan masih sejalan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum. Dewan Komisaris juga berpendapat bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah akurat, lengkap, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

The Board of Commissioners has reviewed and discussed the Company's accounting policies and submitted them periodically to the Board of Directors through a joint meeting between the Board of Commissioners and the Board of Directors every month. Several issues regarding accounting policies were considered by the Board of Commissioners in 2023, including the recognition of regress receivables, mandate on PDF assignments, and changes in accounting policies due to changes in assignment and tax regulations. Based on the results of the discussion with the Board of Directors, the Board of Commissioners considers the changes in accounting policies applied by the Company to be in line with generally accepted accounting policies. The Board of Commissioners has the opinion that the information presented in the financial statements is accurate, complete, and easily understood by stakeholders.

Pandangan atas Penerapan Kebijakan Mutu atau Kepuasan Pelayanan

Perspective on the Quality Policy or Service Satisfaction

Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan kebijakan mutu atau kepuasan layanan PT PII sangat penting dalam memastikan bahwa Perseroan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada *stakeholders* penerima jaminan.

The Board of Commissioners considers IIGF's quality policy or service satisfaction is very important in ensuring that the Company fulfills the predetermined standards and provides quality services to stakeholders who received guarantees.

Dewan Komisaris senantiasa memantau kinerja Perseroan dalam menerapkan kebijakan mutu atau kepuasan layanan yang meliputi evaluasi terhadap pengukuran kinerja serta tingkat kepuasan penerima penjamin. Disamping itu juga, Dewan Komisaris telah mengarahkan agar Direksi memastikan kepatuhan Perseroan untuk memenuhi standar mutu yang relevan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Perseroan akan dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, memperkuat reputasi Perseroan sebagai Perusahaan Penjamin, dan memastikan kepuasan *stakeholders* penerima jaminan yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners monitors the Company's performance in implementing quality policy or service satisfaction, which includes evaluation of performance measurement and the satisfaction of guarantor recipients. In addition, the Board of Commissioners has ensured that the Company has complied with relevant quality standards in accordance with government regulations. Thus, the Company shall be able to improve its operational performance, strengthen the Company's reputation as a Guarantor Company, and ensure the continued satisfaction of stakeholders as guarantee recipients.

Dalam rangka meningkatkan penerapan kebijakan mutu atau kepuasan layanan Perseroan, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi untuk terus meningkatkan mutu dan kepuasan pelayanan kepada seluruh *stakeholders*.

The Board of Commissioners has provided direction and recommendations to the Board of Directors to continuously improve the quality and satisfaction of services to all stakeholders to improve the Company's quality policy or service satisfaction.



Pandangan atas Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Perspective on the Social Responsibility (CSR) Management

Dewan Komisaris berpandangan bahwa kegiatan TJSL merupakan bentuk kepedulian dan dukungan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan berkeyakinan bahwa melalui pelaksanaan Program TJSL, Perseroan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, berperan dalam pelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan reputasi Perseroan. Penerapan berbagai program TJSL merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan lingkungan di sekitar proyek infrastruktur yang didukung oleh PT PII serta bagian dari mitigasi dampak sosial atas pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Oleh karena itu optimalisasi penyerapan anggaran TJSL serta ketepatan penggunaannya merupakan hal yang krusial.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam melakukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan. Peraturan terkait TJSL di Perseroan perlu terus diperbaharui dengan melakukan *benchmark* terhadap *best practice* pengelolaan TJSL yang baik. Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa terkait pelaksanaan TJSL juga perlu menjadi perhatian bagi Direksi agar ketepatan waktu pelaksanaan program TJSL tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek tata kelola. Dewan Komisaris akan terus mendukung penuh kegiatan-kegiatan TJSL Perseroan yang rencananya akan difokuskan pada program-program yang dapat mendukung percepatan perkembangan pembangunan masyarakat di Indonesia dalam sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan. Program tersebut sebagai bentuk dukungan kepada fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan dan diharapkan generasi muda Indonesia mendatang dapat memiliki daya saing dan profesionalisme yang dapat diperhitungkan.

Dewan Komisaris juga mendukung upaya Direksi dalam memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek yang menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berdasarkan taksonomi hijau Otoritas Jasa Keuangan.

The Board of Commissioners considers CSR activities as a form of care and support to stakeholders and the public. As a State-Owned Enterprise, the Company believes that implementation of the CSR Program shall provide many benefits to the community, play a role in preserving the environment, and improve the Company's reputation. The various CSR programs are implemented as a long-term investment to improve the quality of Human Resources around infrastructure projects supported by IIGF, as well as part of the mitigation of social impacts on infrastructure development in the area. Therefore, the optimization and the accuracy of CSR budget absorption and usage are very crucial.

The Board of Commissioners supports the efforts made by the Board of Directors in improving the planning, implementation, and accountability aspect of activities. Regulations related to CSR in the Company shall be continuously updated by benchmarking best practices in CSR management. The procurement policy for goods and/or services related to the CSR implementation shall be taken into account by the Board of Directors. Therefore, the timeliness of the CSR programs can be maintained with due regards to the governance aspects. The Board of Commissioners shall continue to fully support the Company's CSR activities, which are focused on programs to support the accelerated development of community development in Indonesia in the Community Empowerment and Education sectors. These programs are a form of support for the Government's focus on enhancing the quality of human resources in a sustainable manner. Thus, it shall encourage poverty alleviation and the next generation of Indonesian youth will have competitiveness and professionalism that can be taken into account.

The Board of Commissioners supports the Board of Directors' efforts in providing guarantees for projects that apply Environmental, Social, and Governance (ESG) principles based on the Financial Services Authority's green taxonomy.



Peran Aktif Dewan Komisaris dalam Memantau Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Active Role of the Board of Commissioners in Monitoring the Whistleblowing System (WBS)

Dewan Komisaris memahami bahwa penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh *stakeholder* adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholder* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan Perseroan. Oleh karenanya Dewan Komisaris sangat mendukung diimplementasikannya mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Pelaporan yang diperoleh dari mekanisme ini wajib mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Secara umum Dewan Komisaris melihat bahwa pengelolaan WBS di Perseroan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. PT PII telah menyusun dan menyempurnakan kebijakan WBS sebagai dasar pedoman dalam menangani pelaporan pelanggaran.

Dewan Komisaris senantiasa mendorong efektivitas implementasi WBS dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan dalam rangka memberikan pemahaman tentang WBS yang dikelola secara independen.

The Board of Commissioners understands that the resolution of violation reports by stakeholders is a form of enhancing stakeholder protection to guarantee their rights in dealing with the Company. Therefore, the Board of Commissioners strongly supports the whistleblowing system (WBS) implementation. Reports received from this mechanism shall be attended and followed up, including the imposition of appropriate penalties to provide a deterrent effect for perpetrators of violations and also for those who intend to do so.

Generally, the Board of Commissioners considers that the WBS management in the Company has run as expected. IIGF has developed and refined the WBS policy as a basic guideline to handle whistleblowing.

The Board of Commissioners encourages the effective WBS implementation by conducting periodic socialization to the Company's personnel and stakeholders to provide an understanding of the WBS, which is managed independently.

Pandangan Atas Prospek Usaha dan Strategi Perseroan

Perspective on the Company's Business Prospect and Strategy

Infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir masa jabatan. Maka dari itu, arsitektur APBN 2024 juga diarahkan untuk mendukung hal tersebut khususnya pembangunan infrastruktur menyangkut konektivitas dan mobilitas, jaringan irigasi dan bendungan, infrastruktur bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta pembangunan IKN. Belanja negara dalam APBN 2024 tercatat Rp3.325,1 triliun. Sementara, alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 sebesar Rp422,7 triliun. Nilai ini naik 5,8% dari proyeksi realisasi anggaran infrastruktur 2023 sebesar Rp399,6 triliun.

Sektor infrastruktur akan tetap prospektif dan menjadi kontributor penggerak utama ekonomi dalam negeri di tahun 2024, mengingat hal tersebut merupakan kelanjutan dari proyek-proyek infrastruktur yang mulai menggeliat pasca pandemi COVID-19 serta termasuk salah satu fokus kebijakan Pemerintah dalam rangka mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045.

Infrastructure is still one of the main focuses of President Joko Widodo's (Jokowi) administration at the end of his term. Therefore, the 2024 State Budget (APBN) is also designed to support this, especially infrastructure development related to connectivity and mobility, irrigation networks and dams, energy and food infrastructure, equal access to information and communication technology, and the IKN development. State expenditure in the 2024 State Budget amounted to Rp3,325.1 trillion. Meanwhile, the infrastructure budget allocation in the 2024 State Budget was Rp422.7 trillion. This is a 5.8% increase from the projected 2023 infrastructure budget realization of Rp399.6 trillion.

The infrastructure sector will remain prospective and be a major contributor to the domestic economy in 2024, given that infrastructure projects started to awaken again after the COVID-19 pandemic. Although the Government would be more selective in building new infrastructure, infrastructure development is still one of the focuses of government policy in 2024 to promote increased productivity for economic transformation towards the vision of 2045 Advanced Indonesia.



Dewan Komisaris mendorong Perseroan untuk dapat mengantisipasi prospek bisnis dan peluang di tahun 2024 dan melakukan langkah-langkah strategis yang dijabarkan dalam RKAP tahun 2024 yang penyusunannya mempertimbangkan RJPP Perseroan, perkembangan ekonomi, politik dan sosial terkini yang dapat mempengaruhi proses usaha Perseroan.

The Board of Commissioners encourages the Company to be able to anticipate business prospects and opportunities in 2024, and take strategic steps as described in the 2024 RKAP, the preparation of which took into account the Company's RJPP, the latest economic, political, and social developments that affected the Company's business processes.

Pandangan Atas Realisasi dan Tata Kelola Penggunaan Tambahan Dana PMN

Perspective on the Realization and Governance of the Usage of Additional PMN Fund

PT PII merupakan salah satu BUMN yang memiliki peranan penting sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi khususnya sektor infrastruktur. Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah telah memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada Perseroan senilai Rp10,655 triliun yang terbagi menjadi 2 peruntukan yaitu sebesar Rp9,085 triliun untuk penjaminan infrastruktur dan Rp1,57 triliun untuk penjaminan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dewan Komisaris terus mendorong Perseroan agar dapat mengelola dana PMN yang telah diinvestasikan oleh Pemegang Saham secara *prudent* dan dapat dikembangkan secara optimal serta terus menjaga *sustainability* dana PMN tersebut melalui mitigasi risiko dan pengelolaan klaim yang optimal.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan dana PMN dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan Direksi dalam mengelola dana PMN secara bijaksana, mempertimbangkan risiko dengan penuh kehati-hatian dan menggunakan dana sesuai dengan kebijakan dan tujuan Perseroan. Penilaian ini mencerminkan kinerja yang baik dari Direksi dalam memelihara keuangan Perseroan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Pemerintah, yang mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur, maupun sektor lainnya. Dengan pencapaian tersebut, akan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab yang telah dilakukan oleh Perseroan.

IIIGF is one of the SOEs that has an important role as an agent of economic development, especially in the infrastructure sector. As of 2023, the Government has provided State Capital Injection (PMN) to the Company of Rp10.655 trillion, which is divided into 2 designations, i.e., Rp9.085 trillion for infrastructure guarantees, and Rp1.57 trillion for guarantees in the National Economic Recovery (PEN) Program. PMN funds of Rp10.655 trillion shall be managed by the Company through prudent fund management and it shall be invested to reach Rp15.15 trillion. The PMN balance shall be sustainable via optimal risk mitigation and claims.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has managed PNM funds in a prudent and good manner. This reflects the Board of Directors' seriousness in managing PNM funds wisely, considering risks prudently, and using funds in accordance with the Company's policies and objectives. This assessment reflects the Board of Directors' good performance in maintaining the Company's finances and ensuring that funds are utilized in accordance with the mandate given by the Government, which includes increasing economic growth and supporting the success of infrastructure development and other sectors. These achievements will enhance stakeholders' confidence in the Company's sound and responsible financial management.



Penilaian Atas Kinerja Organ Dewan Komisaris

Assessment of the Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris telah membentuk organ pendukung yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu tugas dan kegiatan operasional Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas membantu memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Komite Pemantau Risiko merupakan organ pendukung yang bertugas membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan dan strategi terkait pengelolaan risiko Perseroan.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja organ Dewan Komisaris di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Sekretaris Dewan Komisaris dan kedua komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan efektif sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Setiap tahun masing-masing organ pendukung, sekretaris dan komite membuat program kerja tahunan. Program kerja tahun 2023 telah di reviu dan disetujui Dewan Komisaris. Sekretariat membantu Dewan Komisaris dalam penyelesaian seluruh administrasi. Realisasi program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2023 telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara triwulanan yang disertai rekomendasi dengan pokok-pokok realisasi program kerja tahunan, meliputi diantaranya: 1) Evaluasi pelaksanaan RKAP 2023; 2) Penyusunan Laporan Pengawasan tahun 2023; 3) Evaluasi audit Laporan Keuangan & IKU Tahun 2023 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PwC; 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan Direksi; 5) Rapat anggota Komite Audit pembahasan Evaluasi Tindak Lanjut rekomendasi divisi Internal Audit; 6) Rekomendasi terkait penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; dan 7) Tanggapan atas RKAP 2024; dll. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

The Board of Commissioners has established supporting organs that work collectively and function to assist the Board of Commissioners in performing its duties, i.e., the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Risk Monitoring Committee. The Secretary of the Board of Commissioners was established to assist the duties and operations of the Board of Commissioners. The Audit Committee has the responsibility to ensure the effectiveness of the duties and supervisory functions of the Board of Commissioners on matters related to financial statements, internal control systems, internal and external audit functions, and compliance with prevailing laws and regulations. The Risk Monitoring Committee is a supporting organ responsible for assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities, particularly in assessing and providing input on the policies and strategies related to the Company's risk management.

The Board of Commissioners regularly assesses the effectiveness of the performance of the Board of Commissioners' organs reporting directly to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners considers the Secretary of the Board of Commissioners and the two committees have performed their duties and responsibilities well and effectively in accordance with the charter applicable to each committee.

Each year, the supporting organs, secretary, and committees create annual work programs. The realization of the Audit Committee's work program in 2023 has been reported to the Board of Commissioners quarterly, accompanied by recommendations with the main points of realization of the annual work program, including: 1) Evaluation of the 2023 RKAP implementation; 2) Preparation of the 2023 Supervisory Report; 3) Evaluation of the audit of Financial Statements & KPI for 2023 by PwC Auditors; 4) Recommendation provisions to the Board of Commissioners on requests for recommendations and written approval of the Board of Commissioners for corporate actions taken by the Board of Directors; 5) Audit Committee's meetings to discuss the Follow-up of the recommendations of the Internal Audit division; 6) Recommendations related to the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year; and 7) Response to the 2024 RKAP; etc. In 2023, the Audit Committee held nine (9) meetings.



Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan Komite Pemantau Risiko diantaranya: 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan; 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko; 3). Melakukan revidu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan; 4) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan; 5) Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko; 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap permintaan rekomendasi dan persetujuan tertulis Dewan Komisaris atas tindakan korporasi yang dilakukan Direksi; dan 7) Tanggapan atas RKAP 2024; dll. Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali rapat.

Dengan dukungan Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko, pada tahun 2023 ini, Dewan Komisaris telah berhasil mencapai nilai IKU sebesar 104,57%. Capaian ini merupakan ukuran atas keberhasilan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Realisasi IKU tahun 2023 telah dilaporkan kepada RUPS melalui surat No. S-07/PII/DK/0224 tanggal 22 Februari 2024.

The Risk Monitoring Committee has carried out various activities: 1) Evaluating the conformity between risk management policies and the Company's risk management policies; 2). Monitoring and evaluating the duties of the Company's working unit in charge of risk management; 3). Reviewing and evaluating the Company's risk management report; 4) Monitoring the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control, and risk management information systems conducted by the Company; 5) Evaluating the Company's compliance with prevailing laws and regulations related to risk management; 6) Providing recommendations to the Board of Commissioners on requests for recommendations and written approval of the Board of Commissioners for corporate actions taken by the Board of Directors; and 7) Providing feedback on the 2024 RKAP; etc. In 2023, the Risk Monitoring Committee held nine (9) meetings.

With the support of the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Risk Monitoring Committee, the Board of Commissioners achieved a KPI score of 104.57% in 2023. KPI is a measure of assessment of the successful implementation of the duties and responsibilities of supervision and provisions of Advice of the Board of Commissioners. In 2023, the KPI was reported to the GMS via letter No. S-07/PII/DK/0224 dated 22 February 2024.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in the Board of Commissioners' Composition

Pada tahun 2023 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PT PII. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023, Pemegang Saham mengangkat Sdr. Iqbal Islami dan memberhentikan Sdr. Wahyu Utomo yang mengundurkan diri karena mendapat penugasan menjadi komisaris di perusahaan lain. Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023, Pemegang Saham mengangkat Sdr. Rina Widiyanti Wahyuningdyah dan memberhentikan Sdr. Awan Nurmawan Nuh yang mengundurkan diri karena mendapat penugasan menjadi komisaris di perusahaan lain.

In 2023, there was a change in the composition of PT PII's Board of Commissioners. Based on the Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated 31 January 2023, the Shareholders appointed Mr. Iqbal Islami, and dismissed Mr. Wahyu Utomo, who resigned because he was appointed as a commissioner in another company. Further, based on the Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 216 of 2023 dated 19 June 2023, the Shareholders appointed Mrs. Rina Widiyanti Wahyuningdyah, and dismissed Mr. Awan Nurmawan Nuh, who resigned because he was appointed as a commissioner in another company.



Susunan Dewan Komisaris setelah adanya perubahan-perubahan di atas adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners after the changes mentioned above is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Terms of Office
Rina Widiyani Wahyuningdyah	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2023 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 216 of 2023	19 Juni 2023 – 18 Juni 2028 19 June 2023 to 18 June 2028	Ke-1 First
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 720/KMK.06/2019 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 720/KMK.06/2019	19 Agustus 2019 s.d. 18 Agustus 2024 19 August 2019 to 18 August 2024	Ke-2 Second
Iqbal Islami	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 33/KMK.06/2023 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023	31 Januari 2023 – 30 Januari 2028 31 January 2023 to 30 January 2028	Ke-1 First

Kami atas nama Dewan Komisaris, menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Awan Nurmawan Nuh dan Sdr. Wahyu Utomo, atas kontribusinya bagi PT PII dan menyampaikan selamat datang dan bergabungnya para anggota Dewan Komisaris baru. Kami percaya bahwa dengan soliditas dan dukungan saudara, PT PII mampu berkinerja menjadi lebih baik.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to thank our predecessors, Mr. Awan Nurmawan Nuh and Mr. Wahyu Utomo, for their contributions to IIGF, and welcome the new members of the Board of Commissioners. We believe that with your solidity and support, IIGF shall perform better.



Penutup

Closing

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya. Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh pencapaian yang membanggakan sepanjang tahun 2023. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemegang Saham atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan, kepada mitra usaha atas kerja sama yang saling menguntungkan, serta kepada semua pihak yang terus mendukung PT PII secara langsung maupun tidak langsung.

Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2023 ini disampaikan.

The Board of Commissioners would like to express our gratitude to all stakeholders for their trust and support. The Board of Commissioners also expressed our appreciation for all the excellent achievements in 2023. We expressed our gratitude to the Shareholders for their support and trust, to business partners for their mutually beneficial cooperation, and to all parties who continue to support IIGF, directly or indirectly.

Thus, We convey the supervisory report of the Board of Commissioners in 2023.

Jakarta, 6 Mei 2024
Jakarta, 6 May 2024

Atas nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Rina Widiyanti Wahyuningdyah
Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Direksi

Board of Directors' Report



Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director



Secara umum kinerja yang dibukukan PT PII berhasil mencapai target yang positif dan merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah berdirinya Perseroan. PT PII sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan telah membukukan kinerja keuangan per 31 Desember 2023 dengan raihan laba bersih mencapai Rp835,82 miliar, meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar. Setelah dilakukan serangkaian penempatan dan pengelolaan usaha, maka pada akhir tahun 2023, Ekuitas Perseroan menjadi Rp15,96 triliun.

Generally, IIGF recorded a positive performance which was the greatest achievement in the history of the Company's establishment. IIGF as one of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance has recorded financial performance as of 31 December 2023 with a net profit amounting to Rp835.82 billion, an increase of 17.03% compared to 2022 of Rp714.17 billion. After carrying out a series of business placements and management, at the end of 2023, the Company's Equity will be Rp15.96 trillion.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat, To All Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada tahun 2023 PT PII mampu mencatatkan kinerja yang baik, meskipun masih di tengah kondisi perekonomian yang menantang. Pencapaian kinerja yang membanggakan ini tidak terlepas dari komitmen Perseroan untuk menjalankan mandat yang diberikan dengan mengedepankan pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan yang baik serta *continuous improvement* sehingga mampu mendorong produktivitas untuk tetap *survive* dan menangkap peluang bisnis di tengah berbagai tantangan yang muncul.

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2023 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tahun 2023 Direksi dan segenap jajaran manajemen beserta seluruh karyawan PT PII telah berhasil melewati tahun 2023 yang penuh tantangan dengan berbagai prestasi dan penghargaan serta pencapaian penting lainnya.

We express our praise to the God Almighty, for all His mercy and grace, in 2023, IIGF recorded good performance, amidst the challenging economic conditions. This proud performance is inseparable from the Company's commitment to carrying out the mandate given, by prioritizing risk management, good corporate governance, and continuous improvement to encourage productivity in order to survive and seize business opportunities amidst various challenges that arise.

We hereby submit the accountability report of the Board of Directors for the management of the Company in 2023 fiscal year, along with the financial statements that have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, with unqualified opinion, the Company's financial position as of 31 December 2023, as well as its financial and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

In 2023, the Board of Directors and all levels of management, and all employees of IIGF successfully passed the challenging year with various achievements, awards, and other important achievements.



Tinjauan Makroekonomi 2023

2023 Macroeconomic Overview

Hingga akhir tahun 2023, kondisi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian global ini dipicu dinamika negara-negara maju yang berdampak ke global. Amerika Serikat masih dihadapkan pada inflasi yang berada di atas target, tingginya suku bunga, peningkatan tekanan fiskal, dan tergerusnya *excess saving* yang membayangi pelemahan ekonomi. Sementara itu, negara maju lainnya yakni Tiongkok masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca COVID-19 dan Eropa yang kondisi ekonominya melemah dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi oleh *core inflation* yang masih tinggi.

Selain masalah ekonomi, kondisi geopolitik juga menunjukkan resiko yang makin tinggi. Perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan *downside risk* terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global juga akan berpengaruh sehingga menimbulkan volatilitas di sektor keuangan dan prospek dari perang yang belum berakhir dan bahkan mungkin akan melebar berpotensi menimbulkan tekanan proteksionisme dan melemahkan perdagangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diprediksi turun oleh IMF menjadi hanya 3% dan oleh Bank Dunia hanya 2,1%. Inflasi juga diprediksi mencapai level 5,8%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi. Sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, cukup adaptif dan *agile* menghadapi tekanan inflasi dan ketatnya kebijakan moneter. Indonesia masih termasuk negara yang memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi tertinggi di lingkungan ASEAN dan di lingkungan G20 yaitu di 5%.

Di sisi lain prospek pertumbuhan global diperkirakan masih akan lemah, di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Adanya tren penurunan *leading economic indicator* (LEI) secara persisten pada berbagai negara utama di dunia, khususnya Amerika Serikat (AS), China, dan Uni Eropa. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi global yang masih dinamis dan fluktuatif, terdapat tiga tantangan utama yang perlu diwaspadai. Pertama, tren inflasi global yang secara historis masih cukup tinggi. Kedua, kondisi geopolitik yang masih tak menentu, yang bisa memicu kembali disrupti rantai pasok barang kebutuhan primer dan komoditas energi, sehingga dapat berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketiga, pemulihan ekonomi China yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akibat aktivitas industri dan permintaan konsumen yang melambat. Kombinasi dari berbagai tantangan tersebut diperkirakan akan masih berdampak pada perekonomian global di tahun 2024.

Until the end of 2023, global economic conditions are still very uncertain. This global risk and uncertainty is triggered by the dynamics of developed countries that have a global impact. The United States is still faced with above-target inflation, high-interest rates, increased fiscal pressure, and erosion of excess savings that overshadow the economic downturn. Meanwhile, other developed countries, i.e., China, is still grappling with the post-COVID-19 economic downturn, and Europe, with weakening economic conditions, faced an increasing fiscal deficit accompanied by high core inflation.

In addition to economic issues, geopolitical conditions also show increasing risks. The war in Ukraine and in the Middle East, especially Palestine, which showed no end in sight, poses downside risks to the economic growth prospects. Global sentiment also affected the volatility in the financial sector, and the prospect of unending and possibly even widening wars could potentially lead to protectionist pressures that weaken global trade. In 2023, global economic growth was predicted to decline by the IMF to only 3% and by the World Bank to only 2.1%. Inflation is also predicted to reach a level of 5.8%, higher than the pre-pandemic period. Most developing countries, including Indonesia, are quite adaptive and agile in facing inflationary pressures and tight monetary policy. Indonesia is still among the countries with the highest economic growth performance in the ASEAN and G20, at 5%.

Meanwhile, the global growth outlook is expected to remain weak, even with inflation that has moderated or declined, it has not necessarily lowered interest rates that have been quite high in the last 18 months. There is a persistent downward trend in leading economic indicators (LEI) in various major countries in the world, especially the United States (US), China, and the European Union. In line with the dynamic and fluctuating global economic growth, there are three main challenges that are looming. First, the global inflation trend is still historically quite high. Second, uncertain geopolitical conditions, which could trigger further disruption in the supply chain of primary necessities and energy commodities, which could have an impact on increasing global inflation. Third, China's economic recovery is lower than the forecasted projection due to slowing industrial activity and consumer demand. The combination of these various challenges shall have an impact on the 2024 global economy.



Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Hal ini ditopang oleh kuatnya konsumsi domestik dan akselerasi investasi, seiring dengan berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional pasca pandemi. Tetap solidnya pertumbuhan ekonomi nasional, juga didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali, sehingga daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Inflasi domestik tercatat menurun pada tahun 2023 sebesar 2,61%, dari tahun sebelumnya sekitar 5,51%. Dari pasar finansial, nilai tukar Rupiah terhadap US Dolar tetap terjaga dan mencatat apresiasi sebesar 1,1% sepanjang tahun 2023. Kinerja Rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa mata uang negara seperti Peso Filipina, Rupee India, dan Ringgit Malaysia.

Tetap kuatnya kondisi perekonomian nasional, juga tercermin dari sisi kegiatan manufaktur, terlihat 69,6% negara berada di zona kontraksi seperti AS, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sementara 30% lainnya berada di zona ekspansi termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan Indonesia berada di dalam zona ekspansi yang cukup bertahan semenjak pandemi berakhir dan termasuk di dalam kategori ekonomi dan kegiatan manufakturnya *resilient* atau tetap bisa bertahan positif dan ekspansif. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Menanggapi kondisi ekonomi global dan nasional tersebut, Perseroan meyakini pentingnya menetapkan inisiatif dan langkah-langkah strategis guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga tercapai kinerja positif Perseroan tahun 2023.

In terms of domestic, Indonesia's economic growth remains strong amidst the global economic slowdown. Data from the Statistics Indonesia (BPS) shows that economic growth in Q4 2023 grew by 5.04% (yoy), increased compared to growth in the previous quarter of 4.94% (yoy). This is supported by strong domestic consumption and accelerated investment, in line with the continuation of various national strategic projects post-pandemic. The national economic growth remained solid because of a controlled inflation rate to maintain people's purchasing power. Domestic inflation recorded a decline in 2023 by 2.61%, from the previous year of approximately 5.51%. In terms of the financial market, the Rupiah exchange rate against the US Dollar remains maintained and recorded an appreciation of 1.1% in 2023. The Rupiah's performance was relatively better compared to several peer currencies, such as the Philippine Peso, Indian Rupee, and Malaysian Ringgit.

The continued strength of the national economic condition is also reflected in manufacturing, showing that 69.6% of countries are in the contraction zone, e.g., the US, Europe, Germany, France, England, Italy, Japan, South Korea, Thailand, Malaysia, and Vietnam. Meanwhile, the rest 30% is in the expansion zone, including Indonesia. This shows that Indonesia is in a fairly sustainable expansion zone since the pandemic ended, and is considered in the resilient economy and manufacturing activities category, or remaining positive and expansive. Infrastructure development is one of the important and vital aspects to accelerate the national development process. Responding to global and national economic conditions, the Company believes in the importance of establishing initiatives and strategic steps to face challenges and take advantage of existing opportunities so that the Company achieves positive performance in 2023.

Analisis Atas Pencapaian Kinerja 2023 2023 Performance Achievements Analysis

Secara umum kinerja yang dibukukan PT PII berhasil mencapai target yang positif dan merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah berdirinya Perseroan. PT PII sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan telah membukukan kinerja keuangan per 31 Desember 2023 dengan raihan laba bersih mencapai Rp835,82 miliar, meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar. Setelah dilakukan serangkaian penempatan dan pengelolaan usaha, maka pada akhir tahun 2023, Ekuitas Perseroan menjadi Rp15,96 triliun. Prestasi ini menunjukkan bahwa PT PII mampu mengelola risiko dengan baik, memanfaatkan peluang bisnis, dan menjalankan strategi keuangan yang efisien serta didukung oleh kinerja makro yang baik yakni inflasi yang rendah dan suku bunga yang tinggi.

Generally, IIGF recorded a positive performance which was the greatest achievement in the history of the Company's establishment. IIGF as one of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance has recorded financial performance as of 31 December 2023 with a net profit amounting to Rp835.82 billion, an increase of 17.03% compared to 2022 of Rp714.17 billion. After carrying out a series of business placements and management, at the end of 2023, the Company's Equity will be Rp15.96 trillion. This achievement shows that IIGF is able to manage risks well, take advantage of business opportunities, and carry out efficient financial strategies and is supported by good macro performance, namely low inflation and high interest rates.



Strategi dan Kebijakan Perseroan Company's Strategy and Policy

Mencermati pemulihan dan perbaikan ekonomi nasional, PT PII terus berupaya memanfaatkan setiap peluang untuk mencapai target Perseroan. Kami juga terus merespon setiap perubahan yang terjadi dengan melakukan penyesuaian secara cepat dan efisien. Sebagai BUMN dan *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, Perseroan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui perluasan mandat usaha dan pelaksanaan tugas dari fungsi-fungsi tersebut, Perseroan berperan aktif mendukung rencana strategis Pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui percepatan penyediaan infrastruktur untuk masyarakat. Untuk itu, disertai dengan analisis berbagai tantangan dan peluang, Perseroan melakukan perumusan strategi dan kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.

Perseroan telah menetapkan arah strategis tahun 2023 yaitu memperluas kebermanfaatan dalam berbagai sektor maupun dalam tahapan proyek infrastruktur. Sesuai arah strategis tersebut, pada tahun 2023 PT PII berfokus pada penguatan keberlangsungan pipeline dalam mandat eksisting dan perluasan sektor penjaminan KPBU terutama terkait sektor yang mendukung upaya transisi energi dan menghadapi tantangan perubahan iklim (*climate change*), pelaksanaan mandat sehubungan dengan penjaminan pinjaman langsung BUMN, kegiatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/*Project Development Facility* (PDF) dan pengembangan jasa *advisory*, serta memperkuat kapabilitas dan kapasitas organisasi.

Sampai dengan tahun 2023, PT PII menjalankan 3 (tiga) pilar mandat utama yaitu Penjaminan, Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi, serta *Capacity Building* untuk Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dari sisi Pemerintah maupun dari Badan Usaha Pelaksana.

Sejak berdiri, Perseroan menjalankan mandat penjaminan, pada awalnya berfokus pada sektor infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kemudian dalam perjalanannya aspek ini berkembang meliputi penjaminan infrastruktur di luar skema KPBU masih dalam sektor infrastruktur. Selanjutnya, PT PII juga menjalankan mandat untuk mendukung sektor lain di luar infrastruktur dengan skema di luar KPBU yang telah berjalan sejak pandemi sampai dengan tahun 2023, yang di antaranya merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah.

Observing the recovery and improvement of the national economy, IIGF strives to seize every opportunity to achieve the Company's targets. We continue to respond to every change occurring by adjusting quickly and efficiently. As an SOE and a Special Mission Vehicle (SMV) under the Ministry of Finance, the Company executes its duties and functions as a single window service in evaluating, preparing guarantee structures, and providing guarantees for infrastructure projects, under the Public Private Partnership (PPP) scheme. By expanding its business mandate and implementing the duties of these functions, the Company has an active role in supporting the Government's strategic plan to drive national economic development by accelerating the provision of infrastructure for the community. Therefore, in 2023, accompanied by an analysis of various challenges and opportunities, the Company formulated strategies and strategic policies set forth in the 2023 Company's Work Program and Budget (RKAP).

The Company has set a strategic direction for 2023, i.e., expanding benefits in various sectors and in various stages of infrastructure projects. In accordance with this strategic direction, in 2023, IIGF focused on strengthening pipeline sustainability in existing mandates and expanding the PPP guarantee sector, especially related to sectors that support energy transition and face the climate change challenges, implementing mandates related to SOEs direct loan guarantees, Project Development Facility (PDF), and developing advisory services, as well as strengthening organizational capabilities and capacity.

As of 2023, IIGF is engaged in three (3) main mandate pillars, i.e., Guarantee, Project Development Facility, and Capacity Building for Government Contracting Agency and the Implementing Business Entities.

Since its establishment, the Company conducted guarantee mandates, initially focusing on the infrastructure sector with the Public Private Partnership (PPP) scheme. Further, this aspect developed to include infrastructure guarantees in addition to the PPP scheme, still within the infrastructure sector. In addition, IIGF is also mandated to support other sectors outside infrastructure with schemes in addition to PPP that have been running since the pandemic until 2023, which are part of the National Economic Recovery (PEN) by the Government.



Selanjutnya mandat kedua terkait Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi yang disebut *Project Development Facility* (PDF). PDF merupakan program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu para Kepala Daerah yang akan melaksanakan pengembangan pembangunan infrastruktur, sehingga mereka bisa melakukan penyiapan proyek hingga mencapai tingkat kesiapan atau readiness untuk mendapatkan partisipasi dari pihak swasta. Adanya mandat ini merupakan upaya mengatasi sejumlah proyek yang ternyata belum siap untuk mendapat partisipasi dari pihak swasta, sehingga masih diperlukan penyiapan-penyiapan terutama dari aspek kelayakan proyek, *bankability* dan kesiapan dari dokumentasinya. Semula mandat ini hanya untuk sektor infrastruktur dengan skema KPBU, namun seiring dengan perjalanan Perseroan, mandat ini telah berkembang untuk menjalankan sektor lain dengan atau di luar skema KPBU.

Inisiatif strategis secara umum telah dilaksanakan guna mendukung tercapainya target kinerja Perseroan tahun 2023 dengan memperluas jangkauan penjaminan di luar infrastruktur seperti ekonomi hijau melalui pelaksanaan *framework Environment, Social and Governance* (ESG) seperti transisi energi dan *urban facility* dalam bentuk konservasi energi. Proyek-proyek yang diberikan penjaminan sangat beragam, dari jalan, konservasi energi, ketenagalistrikan, air minum, transportasi, telekomunikasi, hingga pariwisata. Salah satu proyek yang diberikan penjaminan adalah proyek transisi dan konservasi energi yaitu mengelola sampah di Legok Nangka menjadi penghasil energi listrik (*waste to energy*). Pengelolaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka nantinya akan merubah sampah menjadi energi listrik dengan kapasitas 18 megaWatt. Selain itu APJ (Alat Penerang Jalan) di Lombok Barat menjadi salah satu proyek percontohan sistem pencahayaan hemat energi pada APJ, yakni meningkatkan penggunaan teknologi lampu hemat energi (LED) yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Kebutuhan APJ semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ekonomi suatu daerah yang perlu didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai. Bertambahnya panjang jalan memerlukan pemasangan APJ baru yang juga semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya APJ baru, kebutuhan energi juga meningkat. Oleh karena itu, PT PII mendukung program Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi energi pada APJ melalui penggunaan teknologi lampu hemat energi, program meterisasi dan retrofit APJ. Hal ini tentu saja mendukung penghematan energi dan akan menekan biaya tagihan listrik Pemerintah Daerah setempat setiap bulannya.

Selain itu, fokus PT PII juga diarahkan kepada penjaminan *small scale* Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang menjadi proyek percontohan guna mengembangkan pembangunan infrastruktur yang potensial di setiap daerah. Beberapa penjaminan *small scale* KPBU yaitu PJU Lombok Barat dan replikasi 8 proyek APJ dan 4 RSUD. Pengusahaan KPBU daerah di 31 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Further, the second mandate is the Project Development Facility (PDF). This mandate is an effort to face several projects that are not yet ready to receive participation from the private sector, thus requiring preparations, especially in terms of project feasibility, bankability, and documentation readiness. PDF is a program provided by the Ministry of Finance to assist Regional Heads who will implement infrastructure development, so that they can prepare the project to a level of readiness for private participation. Initially, this mandate was only for the PPP scheme infrastructure sector, but as the Company progressed, this mandate has expanded to carry out other sectors with the PPP scheme and non-PPP scheme.

Generally, strategic initiatives have been implemented to support the achievement of the Company's performance targets in 2023, by expanding the range of guarantees outside infrastructure, such as the green economy, by applying the Environment, Social and Governance (ESG) framework, i.e., energy transition and urban facilities in the form of energy conservation. The guaranteed projects are very diverse, from roads, energy conservation, electricity, drinking water, transportation, and telecommunications, to tourism. One of the guaranteed projects is the energy transformation and conservation project, i.e., managing waste in Legok Nangka to generate electricity (*waste to energy*). The Legok Nangka Waste Processing and Final Processing Site (TPPAS) will convert waste into electricity with a capacity of 18 megawatts. In addition, West Lombok APJ (Street Lighting) is one of the pilot projects for energy-efficient APJ lighting systems, which increases the use of energy-efficient lighting technology (LED) to be able to reduce greenhouse gas emissions (GHG). The need for APJ keeps increasing, in line with the economic development of an area that needs to be supported by adequate road infrastructure. The increase in road length requires the installation of new APJ, which are also increasing. In line with the new APJ increase, energy needs also increase. Therefore, IIGF supports the Government's program to monitor APJ energy consumption by using energy-efficient lighting technology, metering programs, and APJ retrofit. This, of course, supports energy savings and reduces the cost of local government electricity bills every month.

In addition, IIGF is also focusing towards small-scale Public Private Partnership (PPP) guarantees that become the pilot projects to develop potential infrastructure development in each region. Some of the small-scale PPP guarantees are PJU West Lombok and replication of 8 APJ projects and 4 Local Hospital PPPs in 31 Regencies/Cities in Indonesia.



PT PII juga tengah mempersiapkan rencana besar yang dituangkan dalam Penyusunan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta sekaligus untuk mengantisipasi dampak tidak terutilisasinya gedung/bangunan pemerintahan/aset BMN pasca pemindahan IKN dan agar terjadi optimalisasi peningkatan nilai aset BMN yang pada akhirnya dampak tersebut kembali untuk peningkatan Jakarta.

Sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan, PII menjalankan mandat dari Pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif yang berfokus pada upaya memperbesar kebermanfaatan bagi masyarakat pada setiap lini usaha Perseroan. *Innovative financing* merupakan salah satu upaya untuk mengatasi anggaran pemerintah yang terbatas dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam rangka memperluas kebermanfaatan untuk kontribusi membangun infrastruktur Indonesia yang berkelanjutan, PII menetapkan arah strategis melalui IIGF memperkenalkan *Innovative Financing Community* yang akan menjadi faktor penting dalam berkembangnya pola dan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur. Melalui *Innovative Financing Community* ini, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak yang tergabung dalam komunitas akan membentuk ekosistem *Innovative Financing* dengan kemampuan teknis yang lengkap sebagai wadah *Community of Practice*. Melalui *Innovative Financing Community* PT PII agar dapat mengenali risiko yang terus berubah dan bergerak dari berbagai aspek dan keilmuan.

Dalam menjalankan berbagai kegiatan tersebut, dibutuhkan kompetensi tertentu baik dari sisi internal Perseroan, maupun pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, dalam mendukung pelaksanaan mandat, Perseroan melaksanakan *Capacity Building*, yang dilakukan melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Institute (IIGF Institute). Guna memastikan bahwa Perseroan memiliki tim yang kompeten dan terampil yang siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di pasar infrastruktur Indonesia serta untuk mencapai misi dan tujuan jangka panjang Perseroan, maka setiap tahunnya Perseroan menjadwalkan keikutsertaan karyawan (dalam kuota tertentu) ke dalam program pelatihan *Certified Public-Private Partnerships Professional* yang diselenggarakan oleh IIGF Institute. Pada tahun 2023 Perseroan telah melakukan *launching* program *career management* yaitu InCHARGE yang menggunakan *framework Competency Based Human Resource Management* (CBHRM) dengan *tagline* “*manage your career, control your future*” sekaligus melakukan asesmen kompetensi teknis dan kompetensi non teknis karyawan, dengan tujuan untuk melakukan pemetaan talenta yang ada di Perseroan dan pengembangan karyawan. Diharapkan dengan pengelolaan talenta yang telah dilakukan, dapat memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan dirinya sekaligus

IIGF has a big plan outlined in the Preparation of the Grand Design Study for Jakarta City. This is to anticipate the impact of the non-utilization of government buildings/state assets/BMN assets after the transfer of IKN and to optimize the increase in BMN asset value that will impact on improving Jakarta.

As a Special Mission Vehicle (SMV) of the Ministry of Finance, IIGF carries out the Government's mandate to support the acceleration of infrastructure development by using innovative financing schemes focusing on efforts to increase benefits for the community in each of the Company's business lines. Innovative financing is an effort to overcome the limited Government budget to encourage the acceleration of infrastructure development in Indonesia. PT PII set a strategic direction via IIGF to introduce the Innovative Financing Community to expand the benefits of contributing to establishing Indonesia's sustainable infrastructure, which will be an important factor in the infrastructure development financing patterns and schemes. Through the Innovative Financing Community, the Company is committed to strengthening the collaboration and cooperation of various parties who are the community's members to form an Innovative Financing ecosystem with complete technical capabilities as a Community of Practice. IIGF shall recognize risks that continue to change and jump from various aspects and knowledge through the Innovative Financing Community.

In carrying out these various activities, certain competencies are required from the Company's internal side and related stakeholders. Therefore, the Company implements Capacity Building to support the implementation of the mandate, which is carried out via the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Institute (IIGF Institute). The Company annually schedules the participation of employees (within a certain quota) in the Certified Public-Private Partnerships Professional training program organized by the IIGF Institute to ensure that the Company has a competent and skilled team that is ready to face the challenges and opportunities in the Indonesian infrastructure market and achieve the Company's mission and long-term goals. In 2023, the Company launched a career management program, i.e., InCHARGE, using the Competency-Based Human Resource Management (CBHRM) with the tagline “manage your career, control your future”, and conducted an assessment of employees' technical and non-technical competencies, with the objective to map the existing talents in the Company and develop the employees. With the talent management implemented, the Company shall provide employees with opportunities to develop themselves and simultaneously develop their careers within the Company. In addition, Capacity Building is organized by IIGF Institute for



mengembangkan kariernya di Perseroan. Di sisi lain, *Capacity Building* diselenggarakan oleh IIGF Institute bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas PJPK dalam berbagai aspek termasuk keahlian teknis, manajemen proyek, kepemimpinan, dan keterampilan teknis, manajemen proyek serta keterampilan lain yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Tahun 2023, PT PII terus melakukan penguatan Teknologi Informasi dan *Governance* yang meliputi serangkaian langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan dalam pengelolaan teknologi informasi dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Guna memberikan arah pengembangan yang jelas terkait pengelolaan Teknologi Informasi, Perseroan telah menyusun *IT Master Plan* untuk 5 tahun ke depan. *IT Master Plan* sangat penting bagi Perseroan karena membantu mengarahkan investasi teknologi, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. PT PII berhasil dan terus mengimplementasikan "Digitalisasi" ke dalam Perseroan melalui fungsi Teknologi Informasi. *Journey Digitalisasi* yang berhasil digabungkan dan diimplementasikan dalam inisiatif-inisiatif Perseroan sepanjang tahun 2023 antara lain:

1. Pembuatan *super mobile apps* "PII Satu" sebagai portal utama akses aplikasi-aplikasi *mobile* dan *web-based* Perseroan.
2. Implementasi *Financial Dashboard* untuk *monitoring* data-data keuangan Perseroan yang dapat diakses oleh manajemen secara langsung.
3. Implementasi aplikasi GAS (*general affair services*) untuk membantu karyawan melakukan otomatisasi proses internal perkantoran.
4. Modernisasi infrastruktur IT menggunakan teknologi *serverless*, termasuk simplifikasi dan peningkatan efektivitas *Data Center* melalui penerapan *hybrid infrastructure*.
5. Peningkatan keamanan *cyber* melalui penerapan *Single sign On*, *multi factor authentication*, *mobile device management*, dan peningkatan *IT security awareness*.
6. Peningkatan peran pihak *Managed Service* untuk membantu pengelolaan *end user device*, IT operasional, dan keamanan data dan infrastruktur Perseroan.

PT PII juga berkomitmen untuk terus memperkuat Implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta kerangka kerjanya. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Dengan mengadopsi prinsip ESG, PT PII memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan, termasuk memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan, memperhatikan hak asasi manusia, serta memastikan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar.

the Government Contracting Agency (GCA) to improve the ability/capacity of GCA in various aspects, including technical expertise, project management, leadership, and technical skills, project management and other skills needed to support infrastructure development in Indonesia.

In 2023, IIGF strengthened the Information Technology and Governance, which includes a series of strategic steps to improve efficiency, security, and service quality in the information technology and corporate governance management continuously. The Company has developed an IT Master Plan for the next 5 years to provide a clear development direction for Information Technology management. The IT Master Plan is vital for the Company to assist in directing the technology investment, increasing operational efficiency, improving service quality, and supporting sustainable business growth. IIGF has successfully and keeps implementing "Digitalization" into the Company via the Information Technology function. The Digitalization Journey that was successfully incorporated and implemented in the Company's initiatives in 2023 includes:

1. Development of "PII Satu" super mobile apps as the main portal for accessing the Company's mobile and web-based applications.
2. Implementation of a Financial Dashboard to monitor the Company's financial data that can be accessed by the management directly.
3. GAS (general affairs services) application to assist employees in automating internal office processes.
4. Modernization of IT infrastructure using serverless technology, including simplification and improvement of data center effectiveness by implementing hybrid infrastructure.
5. Improved cyber security via the implementation of single sign-on, multi-factor authentication, mobile device management, and increased IT security awareness.
6. Role enhancement of Managed Service to help manage the Company's end-user devices, IT operations, and data and infrastructure security.

IIGF is committed to strengthening the Environmental, Social, and Governance (ESG) implementation and its framework. This is an important step to achieving good corporate governance. By adopting ESG principles, IIGF ensures that the Company's operations take into account the social and environmental impacts, including caring for environmental responsibility, paying attention to human rights, and ensuring the welfare of employees and the surrounding communities. By reviewing ESG implementation and applying the right ESG framework through



Dengan melakukan kajian implementasi ESG dan menerapkan kerangka kerja ESG yang tepat melalui pelibatan pemangku kepentingan, PT PII dapat memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, meminimalkan risiko, dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan mandat sebagai SMV, PT PII senantiasa menempatkan *stakeholders* sebagai fokus utama dalam seluruh operasi bisnis. Penempatan *stakeholders* sebagai fokus utama dalam seluruh operasi bisnis dan menyediakan struktur penjaminan baru merupakan salah satu langkah strategis bagi PT PII. Dengan penyediaan lima (5) struktur penjaminan baru untuk diversifikasi penjaminan ke sektor-sektor baru, PT PII menunjukkan komitmen untuk mengakomodasi kebutuhan pasar yang berkembang dan untuk membantu mengurangi risiko (*de-risking*) dalam penjaminan proyek-proyek yang didukung oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Indonesia (KBPU).

Peran PT PII sebagai *first loss absorber* dengan *first loss* adalah besaran porsi penjaminan dari BUPI yang mendapat penugasan untuk melakukan penjaminan Pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya Perseroan dalam menjalankan fungsi penjaminan dengan efisien dan bertanggung jawab. Melalui mekanisme ini, PT PII berperan sebagai garda pertama yang akan menyerap risiko kerugian akibat gagal bayar. Sehingga melalui peran ini, PT PII telah membantu memagari (*ring fence*) Pemerintah dari timbulnya kewajiban kontinjensi dan meminimalkan kejutan langsung (*sudden shock*) kepada APBN. Dengan demikian, peran PT PII sebagai *first loss absorber* memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas pasar, melindungi pemangku kepentingan, dan memperkuat integritas industri penjaminan secara keseluruhan.

Untuk menguatkan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, menguatkan kapasitas serta meningkatkan efektivitas pengawasan intern sektor publik, PT PII mengadopsi *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). Dan berdasarkan penilaian dari BPKP, PT PII memiliki aktivitas audit intern di level 3, yang artinya unit pengawasan intern Perseroan telah meningkat "Peran dan Layanan Audit Intern"-nya tidak sekedar menguasai 'Audit Ketaatan' tetapi juga mampu memberikan 'Audit Kinerja' dan 'Layanan Konsultansi'.

stakeholder engagement, IIGF shall strengthen good corporate governance, minimize risks, and increase long-term value for the Company and all stakeholders.

In carrying out its mandate as an SMV, IIGF prioritizes stakeholders as the main focus in all business operations. Stakeholders as the main focus in all business operations, and new guarantee structures are some of IIGF's strategic steps. By providing five (5) new guarantee structures to diversify guarantees to new sectors, IIGF demonstrates its commitment to accommodating the evolving market needs and to assisting in de-risking projects supported by the Ministry of Finance and the Government of Indonesia (PPP).

IIGF's role is as a first loss absorber, with the first loss as the amount of the guarantee portion of the Implementing Business Entity assigned to carry out the sovereign guarantee. This reflects the Company's importance in carrying out the guarantee function in an efficient and responsible manner. Via this mechanism, PT PII acts as the first line of defense to absorb the risk of loss due to default. Thus, through this role, IIGF assisted to ringfence the Government from contingent liabilities and minimize sudden shocks to the state budget. Thus, IIGF's role as a first loss absorber has a significant impact on maintaining market stability, protecting stakeholders, and strengthening the integrity of the guarantee industry comprehensively.

IIGF adopted the Internal Audit Capability Model (IA-CM) to strengthen the effectiveness of the internal control system, strengthen capacity, and improve the effectiveness of public sector internal audit. Based on the BPKP's assessment, IIGF's internal audit activities are considered at level 3, or the Company's internal control unit has increased its "Internal Audit Roles and Services" not only mastering 'Compliance Audits' but also being able to provide 'Performance Audits' and 'Consultancy Services'.



Proses yang Dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Board of Directors' Process to Ensure Strategy Implementation

Direksi terlibat aktif dalam merumuskan strategi dan kebijakan PT PII, yang meliputi target usaha, rencana ekspansi, teknologi, sumber daya manusia, dan berbagai hal lainnya. Implementasi strategi dan kebijakan strategis memiliki peran penting dalam mengarahkan Perseroan mencapai sasaran strategi yang ditetapkan. Dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis, Direksi terlibat secara langsung dalam pengawasan implementasi strategi serta memastikan bahwa seluruh bagian organisasi memperoleh kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide-ide dan inovasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan Perseroan dan senantiasa berkonsultasi kepada Dewan Komisaris. Beberapa tugas dan peranan utama Direksi dalam perumusan strategi di antaranya menganalisis situasi internal dan eksternal Perseroan untuk memahami lingkungan bisnis dan tantangan yang harus dihadapi, serta menentukan tujuan strategis yang menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan Perseroan.

The Board of Directors is actively involved in formulating IIGF's strategies and policies, which include business targets, expansion plans, technology, human resources, etc. Implementation of strategies and strategic policies play an important role in directing the Company to achieve the predetermined strategic targets. In formulating strategies and strategic policies, the Board of Directors is directly involved in supervising strategy and ensuring that all parts of the organization have the same opportunity to convey ideas and innovations to support the achievement of the Company's objectives, and consult with the Board of Commissioners. Some of the main duties and roles of the Board of Directors in formulating strategy include analyzing the Company's internal and external situation to understand the business environment and the challenges to be faced, as well as determining strategic objectives that form the basis for establishing the Company's strategy and policies.

Peranan Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Board of Directors' Role in Formulating Strategies and Strategic Policy

Dalam memastikan implementasi strategi dan kebijakan strategis Perseroan terlaksana dengan baik, Direksi menetapkan inisiatif strategis dalam RKAP tahun 2023. Keseluruhan inisiatif strategis tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya kinerja yang *excellent* guna mewujudkan pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Direksi memastikan inisiatif strategis dan kebijakan yang ditetapkan senantiasa sejalan dengan Visi dan Misi Perseroan serta sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perseroan yang berlaku.

The Board of Directors set forth the strategic initiatives in the 2023 RKAP to ensure the implementation of the Company's strategic initiatives and policies. The overall strategic Initiative shall encourage the creation of excellent performance to realize the Company's growth. The Board of Directors ensures that strategic initiatives and policies shall always be in line with the Company's Vision and Mission and in accordance with the Company's Long-Term Plan (RJPP).

Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2023

Comparison of Performance Result and Target in 2023

Sepanjang tahun 2023, PT PII merealisasikan target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023. Secara umum kinerja yang dibukukan PT PII berhasil mencapai target yang positif. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan berhasil mencatat kinerja keuangan yang solid dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

In 2023, IIGF realized the predetermined targets as outlined in the 2023 Work Program and Budget (RKAP). Generally, IIGF recorded a positive performance. As of 31 December 2023, the Company recorded solid and better financial performance compared to the previous year. This is reflected in the 2023 Fiscal Year Financial Statements, which was audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, in its report dated 28 February 2024 with an unqualified opinion.



Ditinjau dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp835,82 miliar meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar. Sedangkan, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp116,34 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan yang signifikan dari pendapatan usaha yang dikontribusikan oleh Pendapatan Penjaminan sebesar Rp232,35 miliar, Pendapatan Penyiapan Proyek & Pendampingan Transaksi (PDF) sebesar Rp70,53 miliar, Pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp1.009,08 miliar dan Pendapatan lainnya sebesar Rp6,04 miliar. Adapun peningkatan dari penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2023 disebabkan oleh kenaikan harga pasar obligasi atas penempatan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Perseroan juga senantiasa mempertahankan efisiensi biaya dengan capaian tingkat rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 37%, kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan kinerja keuangan pada tahun 2023 seiring dengan pertumbuhan bisnis yang baik, biaya yang terkendali, dan tren kualitas aset yang lebih baik. Ditinjau dari posisi keuangan, Aset tahun 2023 sebesar Rp16,41 triliun mengalami peningkatan 5,47% dibandingkan total Aset tahun 2022 sebesar Rp15,56 triliun. Peningkatan total Aset PT PII disebabkan oleh adanya kenaikan investasi yang signifikan. Capaian ini berada 101% di atas target RKAP 2023 sebesar Rp159 miliar. Sementara itu, total Liabilitas tahun 2023 mencapai Rp443,25 miliar, mengalami peningkatan 10,37% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp401,61 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penambahan liabilitas sewa pembiayaan terkait dengan kontrak baru sewa gedung dari periode September 2023 sampai dengan Agustus 2026. Capaian ini berada 102% di atas target RKAP 2023 sebesar Rp8 miliar. Adapun total Ekuitas tahun 2023 mencapai Rp15,96 triliun, mengalami peningkatan 5,34% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15,15 triliun.

Highlight kinerja PT PII dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat diinformasikan sebagai berikut:

- Secara umum PT PII sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 terus membukukan Laba dan telah menyetorkan dividen untuk Negara.
- Total Aset terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam hal skala operasional, investasi, dan nilai aset.
- Total Ekuitas terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Perseroan berhasil menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dalam keuangan dan operasi. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur terhadap Perseroan, serta memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan masa depan.

In terms of the profit and loss and comprehensive income report, the Company recorded income for the year of Rp835.82 billion, increased by 17.03% compared to 2022, which was Rp714.17 billion. Meanwhile, the total comprehensive income for the year 2023 was Rp116.34 billion. This increase was mainly influenced by a significant increase in operating income, contributed by Guarantee Income of Rp232.35 billion, Project Development Facilities (PDF) income of Rp70.53 billion, Fund Management Income of Rp1,009.08 billion, and Other income of Rp6.04 billion. In 2023, the increase in comprehensive income for the year was mainly due to an increase in the market price of bonds for investment, which were measured at fair value through other comprehensive income. The Company continues to maintain cost efficiency by achieving an Operating Expenses Operating Income (BOPO) ratio of 37%, which is the same as the previous year.

The improved financial performance in 2023 was in line with good business growth, controlled costs, and better asset quality trends. In terms of financial position, in 2023, the Assets achieved Rp16.41 trillion, increased by 5.47% compared to the total Assets in 2022 of Rp15.56 trillion. IIGF's total assets increased due to a significant increase in investment. This achievement is 101% above the 2023 RKAP target of Rp159 billion. Meanwhile, in 2023, the total Liabilities achieved Rp443.25 billion, increased by 10.37% compared to the in 2022 of Rp401.61 billion. This increase was influenced by the addition of leasing liabilities related to new building rental contracts from September 2023 to August 2026. This achievement is 102% above the 2023 RKAP target of Rp8 billion. In 2023, the Total Equity reached Rp15.96 trillion, increased by 5.34% compared to the Total Equity in 2022 of Rp15.15 trillion.

IIGF's performance highlights within the last five (5) years are as follows:

- Generally, from 2019 up to 2023, IIGF recorded a profit and deposited dividends for the State.
- Total Assets have continued to increase in the last five (5) years. This reflected the Company's growth and development in terms of operations, investment, and asset value.
- Total Equity has continued to increase in the last five (5) years. This increase depicts the Company's success in generating value for shareholders and experiencing sustainable growth in finance and operations. It also increases the investor's and creditor's confidence in the Company, and provides a strong foundation for future growth.



- d. Total Liabilitas terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, namun masih dalam rasio *debt to equity* yang terukur dan dinilai aman.
- e. Total Pendapatan cenderung mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sejak 2019 sampai dengan 2021 Pendapatan Perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 pada kinerja keuangan Perseroan dan adanya kebijakan untuk menahan sebagian dari laba untuk keperluan modal atau investasi jangka panjang. Sementara itu, sejak 2022 dan tahun 2023 telah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan membaiknya tren pertumbuhan jangka panjang Perseroan, sehingga dapat menarik minat investor baru, memperluas portofolio bisnis, dan memperkuat posisinya di pasar penjaminan.
- f. Total Pendapatan Penjaminan terus meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menggambarkan pertumbuhan dan diversifikasi portofolio penjaminan Perseroan semakin luas dengan adanya peningkatan volume penjaminan, ekspansi ke sektor-sektor baru, dan peningkatan pangsa pasar akan menunjukkan kekuatan bisnis PT PII dalam menyediakan solusi penjaminan yang inovatif dan komprehensif.
- g. Total Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi cenderung meningkat sejak tahun 2020. Hal ini membuktikan tingginya komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia serta menunjukkan kontribusi PT PII dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
- h. Total Pendapatan Pengelolaan Dana cenderung mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sejak 2019 sampai dengan 2021 Pendapatan Pengelolaan Dana Perseroan mengalami penurunan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 pada kinerja keuangan Perseroan, kemudian mulai mengalami peningkatan di tahun 2022 hingga 2023. Hal ini terjadi karena Perseroan melakukan peningkatan efisiensi, diversifikasi investasi, dan pengelolaan risiko yang baik sehingga dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Dari kinerja operasional, selama tahun buku 2023, Perseroan memiliki 4 (empat) tambahan penjaminan baru yang terdiri dari 3 (tiga) penjaminan proyek infrastruktur dan 1 (satu) penjaminan non infrastruktur. Tiga tambahan penjaminan proyek baru di tahun 2023 yaitu Tol Akses Patimban, APJ Lombok Barat, dan proyek Tol Cikunir – Ulujami menjadi komitmen PII dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat yang berkualitas. Tol Akses Patimban dengan panjang 37,05 KM merupakan *solicited project* yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan jalan tol Trans Jawa ruas Cikopo – Palimanan, yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target awal selesai sebelum tahun 2024. Selama ini, belum adanya tol menyebabkan peran dari Pelabuhan Patimban terhambat

- d. Total Liabilities have continued to increase in the last five (5) years, with a measurable and safe debt-to-equity ratio.
- e. Total Revenue tends to fluctuate within the last five (5) years. From 2019 to 2021, the Company's Revenue experienced a decline due to the impact of the COVID-19 pandemic on the Company's financial performance and the policy to retain part of the profit for capital purposes or long-term investment. However, it has since increased in 2022 and 2023. This reflects an improvement in the Company's long-term growth trend. Thus, the Company may attract new investors, expand its business portfolio, and strengthen its position in the guarantee market.
- f. Total Guarantee Income has continued to increase in the last five (5) years. This illustrates the growth and diversification of the Company's guarantee portfolio which is expanding with an increase in guarantee volume, expansion into new sectors, and increase in market share, which will show IIGF's business strength in providing innovative and comprehensive guarantee solutions.
- g. Total Project Development Facility Income tended to increase since 2020. This proves the Company's high commitment to supporting infrastructure and non-infrastructure development and other strategic projects in Indonesia, and reflects IIGF's contribution in encouraging economic growth and national development.
- h. Total Fund Management Revenue tends to fluctuate within the last five (5) years. From 2019 to 2021, the Company's Fund Management Revenue decreased due to the COVID-19 pandemic's impact on the Company's financial performance. Then it began to increase from 2022 to 2023. This was because the Company increased efficiency, investment diversification, and risk management to optimize financial performance and maximize value for shareholders.

From operational performance, in the 2023 fiscal year, the Company has four (4) additional new guaranteed projects, consisting of three (3) infrastructure projects and one (1) non-infrastructure project. Three additional new project guarantees in 2023, i.e., Patimban Access Toll Road, West Lombok APJ, and Cikunir-Ulujami Toll Road project, are IIGF's commitment to developing and providing quality infrastructure for the community. Patimban Access Toll Road with a length of 37.05 km is a solicited project that connects Patimban Port with the Trans Java Cikopo-Palimanan toll section, which is a National Strategic Project (PSN), with an initial target of completion before 2024. To date, the absence of the toll road has hindered the progress of Patimban Port, even though the original objective of the Port



kemajuannya, padahal tujuan semula Pelabuhan dibangun adalah sebagai pusat konektivitas dan logistik terutama di kawasan-kawasan industri di Jawa Barat seperti Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Melalui pembangunan tol ini maka akses logistik dapat lebih mudah dijangkau dan kompetitif.

APJ (Alat Penerang Jalan) Lombok Barat menjadi salah satu proyek percontohan sistem pencahayaan hemat energi pada APJ, yakni meningkatkan penggunaan teknologi lampu hemat energi (LED) yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Kebutuhan APJ semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ekonomi suatu daerah yang perlu didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai. Bertambahnya panjang jalan memerlukan pemasangan APJ baru yang juga semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya APJ baru, kebutuhan energi juga meningkat. Oleh karena itu, PII mendukung program Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi energi pada APJ melalui penggunaan teknologi lampu hemat energi, program meterisasi dan retrofit APJ. Hal tersebut mendukung penghematan energi dan akan menekan biaya tagihan listrik Pemda setempat setiap bulannya.

Tol *Elevated* Cikunir-Ulujami dibangun untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta pada JORR (Jakarta Outer Ring Road) eksisting sekaligus membangun konektivitas masa depan. Jalan Tol ini akan dibangun sepanjang 21,6 KM dengan struktur *full elevated* di atas JORR eksisting dengan biaya investasi mencapai Rp21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun. Jalan tol ini akan terkoneksi dengan jalan arteri Pondok Indah, on/off ramp terkoneksi jalan arteri Bampu Apus, serta off ramp terkoneksi jalan Tol Jagorawi.

Di tahun 2023, PT PII juga mendapatkan mandat baru untuk memberikan penjaminan proyek non infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Penjaminan penyelenggaraan CPP bertujuan untuk mendukung kemampuan penyelenggara CPP dalam memperoleh pinjaman dalam rangka penyelenggaraan CPP (*credit enhancement*), kewajiban finansial yang dijamin oleh PII antara lain berupa pokok pinjaman, bunga/imbalan, dan/ atau biaya lainnya yang timbul. Terdapat 9 proyek penjaminan non-KPBU PEN BUMN & Cadangan Pangan Pemerintah.

Dengan demikian sejak berdirinya PT PII sampai dengan 31 Desember 2023, PT PII telah menandatangani penjaminan untuk 50 proyek dimana 41 proyek merupakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non-KPBU, dan 9 penjaminan proyek non infrastruktur. Penjaminan proyek infrastruktur meliputi 7 sektor yakni: (i) ketenagalistrikan, (ii) telekomunikasi, (iii) air minum, (iv) jalan, (v) transportasi, (vi) pariwisata, dan (vii) konservasi energi dimana 35 proyek di

was as a connectivity and logistics center, especially in industrial areas in West Java, such as Bekasi, Karawang, and Purwakarta. By constructing this toll road, logistics access shall be more accessible and competitive.

West Lombok APJ (Street Lighting) is one of the pilot projects for energy-efficient APJ lighting systems, which increases the use of energy-efficient lighting technology (LED) to be able to reduce greenhouse gas emissions (GHG). The need for APJ keeps increasing, in line with the economic development of an area that needs to be supported by adequate road infrastructure. The increase in road length requires the installation of new APJ, which are also increasing. In line with the increase in new APJ, energy demand also increases. Therefore, IIGF supports the Government's program to monitor APJ energy consumption by using energy-efficient lighting technology, metering programs, and APJ retrofit. This supports energy savings and reduces the cost of local government electricity bills every month.

Cikunir-Ulujami Elevated Toll Road was built to reduce traffic congestion in the Special Capital Region of Jakarta on the existing JORR (Jakarta Outer Ring Road) while establishing future connectivity. This toll road was 21.6 km, fully elevated above the existing JORR with an investment cost of Rp21.26 trillion and a 45-year concession period. This toll road connects Pondok Indah arterial road, on/off ramp is connected to Bampu Apus arterial road, and off-ramp is connected to Jagorawi Toll road.

In 2023, IIGF received a new mandate to provide non-infrastructure project guarantees to organize the Government Food Reserve (CPP). The guarantee for CPP (Government Food Reserves) has the objective of supporting the ability of the CPP organizer to obtain loans to implement CPP (credit enhancement). IIGF guaranteed the financial obligations which include principal loan, interest/compensation, and/or other costs incurred. There are 9 non-PPP PEN guarantee projects for SOEs & Government Food Reserves.

Since the establishment of IIGF up to 31 December 2023, IIGF signed guarantees for 50 projects, consisting of 41 projects of PPP and non-PPP infrastructure projects, and 9 guarantees for non-infrastructure projects. Infrastructure project guarantees cover 7 sectors: (i) electricity, (ii) telecommunications, (iii) drinking water, (iv) roads, (v) transport, (vi) tourism, and (vii) energy conservation, of which 35 projects have been guaranteed effectively. In addition, IIGF also received further assignments to conduct



antaranya telah efektif dijamin. Selain itu, PT PII juga mendapatkan penugasan lanjutan untuk melakukan Pendampingan Transaksi/ *Project Development Facility* (PDF) dan pengembangan jasa *advisory* terkait optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) setelah Jakarta tidak lagi ibu kota Negara.

Sampai dengan Desember tahun 2023, PT PII telah menjamin 50 proyek terdiri dari 41 proyek merupakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non KPBU, serta 9 penjaminan proyek non infrastruktur.

Jumlah eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII per Desember 2023 ialah sebesar Rp91 triliun yang terdiri dari proyek Infrastruktur KPBU dan Non KPBU sebesar Rp83 triliun serta Non Infrastruktur sebesar Rp8 triliun, maka ekuitas PT PII tanpa memperhitungkan PMN PEN adalah sebesar Rp14,4 Triliun dan *Gearing Ratio* sampai dengan Desember 2023 adalah 5,8x.

Project Development Facility (PDF) and the advisory services development related to the optimization of the utilization of State Property (BMN) after Jakarta is no longer the capital city.

As of December 2023, IIGF has guaranteed 50 projects, consisting of 41 guaranteed infrastructure projects with PPP and non-PPP schemes, and 9 guaranteed non-infrastructure projects.

As of December 2023, the effective amount of guarantee exposure for projects guaranteed by PT PII was Rp91 trillion, consisting of PPP and Non-PPP Infrastructure projects of Rp83 trillion and Non-Infrastructure projects of Rp8 trillion. Therefore, IIGF's equity without taking into account PMN PEN was Rp14.4 trillion with a Gearing Ratio of 5.8x.

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaiannya

Obstacles and Resolutions

Sepanjang tahun 2023, Perseroan menghadapi beberapa tantangan, di antaranya terdapat perubahan atau pergantian pejabat Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) selama proses penjaminan proyek, pemenuhan standar kelayakan pada proses penilaian proyek potensial, dinamika pada proses persetujuan proyek di tingkat pemerintah daerah provinsi atau kabupaten, serta tantangan lainnya yang membawa dampak tidak tercapainya tahapan proyek penjaminan yang diharapkan.

Proses bisnis dan proyek Perseroan melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal mulai dari Kementerian, Lembaga ataupun BUMN/BUMD. Dengan demikian, keberhasilan kami dalam menjalankan kegiatan bisnis sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Mengantisipasi hal ini, kami mengoptimalkan peran sebagai fasilitator dari pemangku kepentingan terkait serta menengahi berbagai isu yang ada selama proyek berlangsung guna melancarkan proses proyek. Kami juga terus melakukan pendampingan serta *capacity building* untuk memberikan pemahaman dan mendapatkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

In 2023, the Company faced several challenges, including changes in officials in charge of the Government Contracting Agency (GCA) during the project guarantee process, fulfillment of feasibility standards in the potential project assessment process, dynamics in the project approval process at the provincial or district level, as well as other challenges that affected the achievement of the expected stages of the guarantee project.

The Company's business processes and projects involve various external stakeholders, from Ministries, Institutions, and SOEs/ Regional-Owned Enterprises. Thus, our success in carrying out its business activities is highly dependent on good support and coordination from all stakeholders. Anticipating this, we optimize our role as a facilitator for relevant stakeholders and mediate various issues that arise during the project to expedite the project process. We also strive to provide assistance and capacity building to provide understanding and obtain commitment from all stakeholders.



Tantangan lainnya adalah, kapasitas dan kecukupan modal untuk memastikan bahwa PT PII dapat menjalankan mandat sebagai penjamin proyek infrastruktur. Oleh sebab itu PT PII juga melaksanakan penjaminan bersama dengan Kementerian Keuangan serta berupaya untuk terus memperkuat kerja sama dan hubungan dengan lembaga multilateral sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan PT PII. Untuk mengantisipasi tantangan yang ada, perbaikan dan perubahan lingkungan internal dalam rangka perbaikan berkelanjutan senantiasa dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja dari berbagai aspek.

Another challenge is capacity and capital adequacy to ensure that IIGF can implement its mandate as a guarantor of infrastructure projects. Therefore, IIGF conducts joint guarantees with the Ministry of Finance and strives to strengthen cooperation and relationships with multilateral institutions as partners in increasing IIGF's guarantee capacity. The Company strives to perform continuous improvement to anticipate existing challenges, improvements, and changes to the internal environment, to improve performance from various aspects.

Pengelolaan SDM Secara Berkelanjutan Sustainable HR Management

PT PII memandang sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu ujung tombak dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan Perseroan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Kehadiran SDM terbaik yang profesional, kompeten, berdedikasi tinggi serta berintegritas akan membuat PT PII memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan Perseroan. Peran strategis SDM dalam mendukung tercapainya kinerja PT PII secara keseluruhan perlu difokuskan pada peningkatan kemampuan *leadership*, peningkatan kapabilitas organisasi, membangun strategi kompetensi dan produktivitas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi menjadi hal yang terus disempurnakan.

IIGF considers human resources (HR) as one of the spearheads with a key role in determining the Company's success in actualizing its vision and conducting its mission. The presence of the best HR who are professional, competent, dedicated, and with integrity, will ensure that IIGF has a strong foundation to grow and develop to achieve the Company's objectives. The strategic role of HR in supporting the achievement of IIGF's overall performance is focused on improving leadership capabilities, increasing organizational capabilities, building competency and productivity strategies to overcome gaps that exist, that are continuously refined.

Perseroan senantiasa memfasilitasi karyawan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi guna mendukung perkembangan kariernya. Program pengembangan kompetensi disesuaikan dengan *Individual Development Plan* setiap karyawan yang mencakup kompetensi teknis dan non teknis. Program pengembangan kompetensi karyawan Perseroan dilaksanakan berdasarkan Model Kompetensi (*Competency Model*) yang berlaku di Perseroan. Selain itu, Perseroan senantiasa membuka kesempatan bagi setiap karyawan untuk mengajukan diri dalam mengembangkan kompetensinya dengan mempertimbangkan kebutuhan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, rencana pengembangan kompetensi individu maupun pengembangan usaha Perseroan. Perseroan memastikan tidak terjadinya tindakan diskriminasi dalam memperlakukan karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang unggul.

The Company facilitates employees to participate in competency development programs to support their career development. The competency development program is tailored to each employee's *Individual Development Plan* which includes technical and non-technical competencies. The Company's employee competency development program is implemented based on the Competency Model applicable in the Company. In addition, the Company opens opportunities for all employees to apply to develop his/her competence by considering the needs of his/her job duties and responsibilities, individual competence development plans, and the Company's business development. The Company ensures that there are no acts of discrimination in treating employees to create fair and honest treatment in accordance with each individual's potential, abilities, experience, and skills to achieve performance excellence



Program pengembangan kompetensi karyawan, yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital & Organization Development Perseroan, dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu (1) *in-house training*; (2) *public training*; dan (3) *knowledge sharing*. Dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan melalui program pengembangan karyawan tersebut, sepanjang tahun 2023 Perseroan telah melaksanakan program pengembangan yang diikuti oleh 143 karyawan dengan total jam pelatihan 3.678 jam.

Untuk mengukur tingkat keterlibatan, kepuasan, dan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan Perseroan serta memastikan bahwa seluruh karyawan berkontribusi maksimal terhadap kemajuan Perseroan, PT PII secara rutin melaksanakan *Employee Engagement Survey*. Hasil *Employee Engagement Survey* tahun 2023 mencapai angka 79% meningkat dari tahun lalu sebesar 77%.

Perseroan akan terus konsisten dalam melanjutkan program pengembangan SDM yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Fokus program tahun 2024 meliputi:

1. Pengembangan kamus kompetensi teknis berkelanjutan.
2. Pengembangan kompetensi karyawan berdasarkan *gap* kompetensi teknis dan non teknis melalui metode pembelajaran *formal learning*, *social learning* dan *experiential learning*.
3. Fokus pengembangan kompetensi *leadership* untuk *senior leader* dan karyawan di *level middle*.
4. Penguatan program budaya berdasarkan nilai-nilai Perseroan.

The employee competency development program, which is organized by the Company's Human Capital & Organization Development Division, is categorized into three (3) classifications, i.e., (1) *in-house training*; (2) *public training*; and (3) *knowledge-sharing*. To improve employee competence via the employee development program, in 2023, the Company provided a development program attended by 143 employees with a total of 3,678 training hours.

IIGF regularly conducts an Employee Engagement Survey to measure the level of employee engagement, satisfaction, and commitment to the work and the Company, and ensure that all employees contribute maximally to the Company's advancement. In 2023, the Employee Engagement Survey was 79%, an increase from last year's 77%.

The Company strives to be consistent in continuing HR development programs that are in line with the Company's vision and mission. The programs' focus in 2024 includes:

1. Continuous technical competency dictionary development.
2. Development of employee competencies based on technical and non-technical gaps through formal learning, social learning, and experiential learning methods.
3. Focus on developing leadership competencies for senior leaders and middle level employees.
4. Strengthening cultural programs based on the Company's values.

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Menjaga Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan usaha, menjaga kepercayaan para Pemangku Kepentingan dan menumbuhkan integritas Perseroan. Kami menyadari bahwa prinsip GCG sangat penting bagi pembentukan keunggulan, daya saing dan citra positif Perseroan secara berkelanjutan. Di samping itu, penerapan prinsip GCG juga dapat meningkatkan nilai Perseroan secara maksimal dan mendorong pengelolaan bisnis secara profesional dan efisien. Oleh sebab itu, PT PII berupaya melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pokok-pokok pelaksanaan GCG PT PII diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

The Company considers good GCG as a tool to maintain business continuity, maintain the trust of Stakeholders, and enhance the Company's integrity. We realize that the Good Corporate Governance principles are vital to establish excellence, competitiveness, and a positive image of the Company continuously. In addition, GCG principles implementation also increases the Company's value maximally and encourages professional and efficient business management. Therefore, IIGF strives to implement governance principles in every business activity at all levels of the organization. IIGF's principles of GCG implementation are realized in the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, the completeness and implementation of the duties of committees and working units that carry out internal control functions, the compliance functions, internal auditors, and external auditors, the risk management, including internal control systems.



Selama tahun 2023 PT PII telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat dilaksanakan secara konsisten. Pengelolaan PT PII senantiasa dilandasi dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan GCG sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan GCG PT PII diaktualisasikan melalui serangkaian kegiatan yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, yaitu diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, di antaranya dengan inisiatif penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Dokumen Perseroan, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Pemutakhiran kebijakan-kebijakan terkait GCG tersebut dimaksudkan guna memastikan bahwa kebijakan terkait sejalan dengan ketentuan perundang-undangan terkini dan kondisi Perseroan. Selanjutnya Perseroan secara aktif melakukan diseminasi atas kebijakan terkait GCG tersebut guna meningkatkan pemahaman seluruh Insan Perseroan atas program tata kelola perusahaan khususnya pengendalian gratifikasi dan sebagai tindak lanjut atas area perbaikan dari hasil penilaian GCG tahun sebelumnya. Selain itu Perseroan juga melaksanakan *Audit Surveillance* terkait dengan sertifikat SMAP ISO 37001/2016.

Untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, Perseroan telah melakukan penilaian atas penerapan GCG berdasarkan Pasal 72 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015. Berdasarkan hasil penilaian atas penerapan GCG tahun 2023 diperoleh skor sebesar 90,036 dengan predikat Sangat Baik. Secara bertahap dan berkelanjutan, PT PII berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil *assessment* yang menjadi *area of improvement* GCG serta penerapan tata kelola yang lebih baik dengan mengacu pada *best practice* yang ada dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan guna meningkatkan kualitas penerapan GCG yang lebih baik di masa mendatang.

Manajemen Risiko

Risk Management

Dalam mengemban mandat-mandatnya, Perseroan menghadapi perkembangan bisnis yang semakin dinamis. Oleh karena itu, Perseroan memperkuat penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan proyek-proyek maupun dalam pengelolaan korporasi. Manajemen risiko diterapkan secara proaktif dan memandang ke depan guna mendukung Perseroan dalam mengantisipasi, memaksimalkan nilai tambah bagi Pemegang Saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan. Perseroan memiliki Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan (*Enterprise Risk Management/ERM Framework*) yang disusun secara holistik dan terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien.

In 2023, IIGF has made various efforts to ensure corporate governance can be implemented consistently. IIGF's management is always performed based on prudent and good corporate governance principles in accordance with prevailing regulations. IIGF's GCG implementation is actualized via a series of activities to support sustainable corporate governance, which is realized in various forms, including initiatives to improve the Company's Manual, Gratification Control Policy, and Whistleblowing System Policy. Updating GCG policies shall ensure that related policies are in line with the latest statutory provisions and the Company's conditions. Further, the Company actively disseminates policies related to GCG to increase the understanding of all Company's personnel regarding the corporate governance program, especially gratification control. This is also conducted as a follow-up to areas of improvement from the results of the previous year's GCG assessment. In addition, the Company also implemented Surveillance Audits related to the SMAP ISO 37001/2016 certificate.

To comply with prevailing regulations, the Company assessed the GCG implementation based on Article 72 point (b) of Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015. Based on the assessment results of GCG implementation in 2023, the Company received a 90.036 score, which is Very Good. Gradually and continuously, IIGF is committed to following up on every recommendation from the assessment results, which are areas of GCG improvement, as well as implementing better governance by referring to existing best practices in the Company's business activities to improve the GCG quality in the future.

In carrying out its mandate, the Company faced increasingly dynamic business developments. Therefore, the Company strengthens the risk management, both in project implementation and corporate management. Risk management is implemented in a proactive and forward-looking manner to support the Company in anticipating, maximizing shareholder value, managing capital comprehensively, and ensuring profitability and sustainable growth of the Company's business. The Company has an Enterprise Risk Management (ERM) Framework, which is prepared holistically and is integrated with strategies and business processes as a reference to carry out risk management effectively and efficiently.



Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan ini diturunkan pada kebijakan dan/atau prosedur yang mengatur proses-proses bisnis Perseroan. Pada proses penjaminan KPBU dan non KPBU, identifikasi, analisa atau evaluasi, dan mitigasi risiko menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategik baik pada tahapan pra-penandatanganan perjanjian penjaminan maupun pasca penandatanganan perjanjian yaitu dalam proses monitoring sepanjang berjalannya proyek. Secara regulasi, Perseroan menyusun Acuan Alokasi Risiko untuk skema KPBU yang menjadi acuan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam mengalokasikan risiko kepada pihak yang tepat, serta menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan peranan PT PII sebagai pengelola risiko pemerintah dalam proyek KPBU maupun non-KPBU, PT PII terus membangun pemantauan risiko yang kuat terutama melalui upaya mempertahankan tingkat pengendalian risiko dengan tujuan agar jumlah proyek dengan status tidak terdapat potensi klaim terus meningkat. Pada akhir 2023, persentase jumlah risiko proyek dengan status tidak terdapat potensi klaim dibandingkan dengan jumlah risiko proyek yang dijamin adalah sebesar 93%.

Divisi Risk Management Perseroan menjalankan peran fungsi Manajemen Risiko Korporat yaitu utamanya:

1. Pengembangan kebijakan, prosedur dan kerangka ERM;
2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi organisasi secara luas atas kegiatan Manajemen Risiko;
3. Pengembangan dan penyediaan metodologi dan alat yang mendukung;
4. Pemantauan dan pelaporan organisasi secara luas akan risiko;
5. Memberikan dukungan spesialis Manajemen Risiko dan saran bagi bisnis;
6. Menelaah rancangan kebijakan, pedoman dan prosedur bisnis dari perspektif Manajemen Risiko.

Selain itu, Divisi Risk Management juga bertugas memberikan pendampingan dan konsultasi terkait proses kepatuhan sebagai bagian dari implementasi GCG dan pengendalian internal.

Atas komitmen dalam menerapkan manajemen risiko, PT PII berhasil meraih penghargaan diantaranya ASEAN Risk Awards 2023 yang diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA) di Singapura. PT PII memenangkan awards pada kategori ASEAN GRC Award dan runner up pada kategori Public Initiative Award. Selama 7 tahun berturut-turut, PT PII telah memenangkan penghargaan Asean Risk Award pada berbagai kategori dengan lebih dari 250 peserta yang berpartisipasi. Kami berharap penghargaan-penghargaan ini dapat memotivasi kami untuk lebih meningkatkan dan mendorong kematangan penerapan manajemen risiko lewat berbagai inisiatif serta mampu mengintegrasikan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan di Perseroan.

The Company's Risk Management Framework is derived into the policies and/or procedures that regulate the Company's business processes. In the PPP and non-PPP guarantee processes, identification, analysis or evaluation, and mitigation of risks are the basis for strategic decision-making at the pre-signing guarantee agreement stage and post-signing of the agreement, i.e., in the monitoring process throughout the progress of the project. In terms of regulation, the Company has formulated a Risk Allocation Reference document for PPP scheme, to be used by the Government Contracting Agency (GCA) to allocate risks to the right parties, as well as prepare risk mitigation plans to provide adequate infrastructure in accordance with the community needs.

In carrying out IIGF's role as government risk manager in PPP and non-PPP projects, IIGF strives to establish strong risk monitoring, especially through its efforts in maintaining the level of risk control to ensure that the number of projects with a status of no potential claims keeps increasing. By the end of 2023, the percentage of the number of project risks with a status of no potential claims compared to the number of guaranteed project risks is 93%.

The Company's Risk Management Division has the duties to perform Corporate Risk Management functions:

1. Developing ERM policies, procedures, and framework;
2. Coordinating and facilitating the whole organization in Risk Management activities;
3. Developing and providing supporting methodologies and tools;
4. Monitoring and reporting risks in the organizational scale;
5. Providing specialist Risk Management support and advice to the business;
6. Reviewing the design of business policies, guidelines, and procedures from a Risk Management perspective.

In addition, the Risk Management Division also has the duty to provide assistance and consultation regarding the compliance process as part of the GCG and internal control implementation.

For its commitment to implementing risk management, IIGF won various awards, including the 2023 ASEAN Risk Awards organized by the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) in Singapore. IIGF also won awards in the ASEAN GRC Award category and runner-up in the Public Initiative Award category. For 7 consecutive years, IIGF has won the ASEAN Risk Award in various categories with more than 250 candidates participating. We hope that these awards shall motivate us to further improve and encourage maturity in the risk management implementation through various initiatives and integrate good governance, risk management, and compliance in the Company.



Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Dalam penerapan sistem pengendalian internal sebagai aspek penting dalam pengelolaan Perseroan, Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris senantiasa menjaga aset yang dimiliki, menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat dan handal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran atas aspek kehati-hatian. Untuk itu PT PII memiliki Pedoman Sistem Pengendalian Internal dan Kebijakan Pengelolaan Proses Bisnis Berbasis Pengendalian Internal yang keduanya mengadopsi COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework (COSO Framework)* 2013.

PT PII senantiasa meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern yang efektif melalui pelaksanaan fungsi dan peran seluruh pihak dalam struktur organisasi sesuai kewenangannya, termasuk peran Divisi Internal Audit yang efektif. Perseroan menerapkan 3 (tiga) aspek pengendalian internal, yaitu pengendalian internal yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan, dan kepatuhan. Kerangka kinerja pengendalian internal yang berlaku di Perseroan mengadopsi COSO. Sebagaimana diatur dalam COSO, pengendalian internal merupakan sebuah sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan dalam sebuah Perseroan, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT PII melaksanakan evaluasi implementasi sistem pengendalian internal secara berkala (tahunan) melalui Evaluasi atas *Entity Level Control* oleh Divisi Internal Audit dan Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal oleh Auditor Eksternal (KAP) untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, Divisi Internal Audit melakukan pemantauan dan menindaklanjuti tanggapan atas rekomendasi dari hasil audit internal dan eksternal melalui prosedur peninjauan dan verifikasi atas perkembangan status tindakan perbaikan yang dijalankan oleh unit kerja terkait. Profesionalisme seluruh personil divisi Internal Audit terus dipertahankan melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional yang dimiliki oleh setiap personil.

In implementing the internal control system as an important aspect of the Company's management, the Board of Directors, together with the Board of Commissioners, safeguards the assets owned, creates operational effectiveness and efficiency, ensures the availability of accurate and reliable financial reporting, enhances compliance with prevailing regulations, and reduces risk of losses, irregularities, and violations of prudential aspects. Therefore, IIGF has an Internal Control System Guideline and an Internal Control-Based Business Process Management Policy, which adopted the 2013 COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework (COSO Framework)*.

IIGF keeps improving its effective internal control system by implementing the functions and roles of all parties in the organizational structure in accordance with their authority, including the effective role of the Internal Audit Division. The Company implements three (3) internal control aspects, i.e., operational control, financial control and compliance. The internal control performance framework in the Company adopts COSO. As regulated in COSO, internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees in a company, to provide reasonable assurance regarding the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with prevailing laws and regulations.

IIGF evaluates the internal control system annually through the Evaluation of Entity Level Control by the Internal Audit Division and the Evaluation of Compliance with Laws and Internal Control by External Auditors (KAP) to ensure that the internal control system has been implemented adequately. The Internal Audit Division monitors and follows up on responses to recommendations from internal & external audit results through procedures review and verification on the status of corrective actions progress carried out by the relevant work units to ensure the effectiveness of the internal control system. The professionalism of all Internal Audit division personnel is maintained by means of continuous training and professional certifications for each and every personnel.



Prospek Usaha Perseroan Company Business Prospect

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 yaitu Indonesia Maju, salah satu fokus utama agenda Pemerintah pada tahun 2024 melalui transformasi ekonomi di antaranya melanjutkan pembangunan infrastruktur disertai peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), penguatan reformasi birokrasi, serta simplifikasi regulasi. Pembangunan infrastruktur akan difokuskan kepada mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakannya antara lain percepatan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi), energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air dan irigasi, air minum, pangan, penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan, rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, Infrastruktur kesehatan serta akses teknologi informasi dan transformasi digital.

Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp422,7 triliun. Nilai ini naik 5,8% dari proyeksi realisasi anggaran infrastruktur pada tahun 2023 yang diperkirakan mencapai Rp399,6 triliun. Mengingat anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur, Pemerintah pun mendorong badan usaha untuk turut serta terlibat dalam pembiayaan infrastruktur. Pemerintah telah mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif (*innovative financing*) untuk mendorong peran serta badan usaha melalui beberapa skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya.

Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII hadir untuk menjamin risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab bagi Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) serta untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi. Komitmen kami untuk terus mendorong skema pembiayaan inovatif akan terus dijalankan, utamanya untuk membantu beban APBN yang saat ini berfokus pada akselerasi transformasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, yang hingga saat ini juga masih berfokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kami juga secara terbuka senantiasa mendukung Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang akan mengembangkan proyek skema KPBU dan mendukung *sustainable finance*, di mana proyek ini memenuhi aspek ESG dengan mengusung konsep *green energy*.

One of the main focuses of the Government's agenda in 2024 is economic transformation to achieve the 2045 development goal, i.e., Advanced Indonesia. The economic transformation includes infrastructure development accompanied by improving the quality of human resources, developing a green economy, and utilizing new renewable energy (NRE), strengthening bureaucratic reform, as well as simplifying regulations. Infrastructure development is focused on supporting the acceleration of inclusive and sustainable economic transformation. The policy directions include accelerating economic driving infrastructure (connectivity and transportation), energy and electricity, water resources and irrigation, drinking water, food, gradual and sustainable construction of IKN, flats for the low-income community (MBR), urban economic infrastructure facilities, health infrastructure, as well as access to information technology and digital transformation.

The Government allotted Rp422.7 trillion of budget in the 2024 State Budget for infrastructure. This is a 5.8% increase from the projected 2023 infrastructure budget realization of Rp399.6 trillion. Considering that the infrastructure budget from the State Budget is not able to finance investment needs comprehensively for infrastructure development, the Government encourages business entities to participate in the infrastructure financing. The government has developed various innovative financing schemes to encourage the participation of business entities via Public Private Partnership (PPP) schemes and other innovative financing schemes

As one of the Special Mission Vehicles (SMV) of the Ministry of Finance, IIGF is present to guarantee infrastructure risks, which are the responsibility of the Government Contracting Agency (GCA) and provide certainty and comfort for investors in investing. We are committed to encouraging innovative financing schemes implementation, to help with the State Budget, which is currently focused on accelerating economic transformation and people's welfare, on the National Economic Recovery (PEN). We openly support the Ministries/Institutions and Local Governments that will develop PPP scheme projects and support sustainable finance, in which such projects shall meet ESG aspects based on the green energy concept.



Pengalaman dan pengetahuan kami selama lebih satu dekade berdiri, menjadi bekal bagi PT PII untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur nasional. Kami optimis bahwa prospek bisnis Perseroan pada masa mendatang akan semakin baik dan pencapaian kinerja yang semakin bertumbuh dapat diraih, serta mampu memanfaatkan berbagai peluang maupun beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks pada masa mendatang.

Our experience and knowledge from more than a decade of existence have provided IIGF with the opportunity to support national infrastructure development. We are optimistic that the Company has better business prospects in the future, can achieve performance growth, can seize various opportunities and adapt to changes in the increasingly complex business environment in the future.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Social and Environmental Responsibility Program (CSR)

PT PII memandang penting bahwa keberlanjutan usaha, lingkungan, dan masyarakat menjadi satu kesatuan untuk menjadikan bisnis Perseroan terus berlanjut. PT PII secara konsisten melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai wujud kepedulian sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan sehingga berdampak pada keberlangsungan bisnis PT PII. Program TJSL dikembangkan guna mendukung rencana jangka panjang Perseroan dalam menjaga kelangsungan bisnis, serta berkontribusi dalam pemenuhan sasaran pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan TJSL diharapkan akan membangun daya saing Perseroan dan meningkatkan skala ekonomi Perseroan sehingga Perseroan mempertahankan kelangsungan bisnisnya dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk jangka panjang bagi seluruh *stakeholder*.

IIGF considers that business sustainability, the environment, and society as a key to ensure the Company's business continuity. IIGF consistently conducts Social and Environmental Responsibility (CSR) as a form of care and appreciation for the community who have given trust and support to the Company's business processes, thereby impacting IIGF's business sustainability. The CSR program was developed to support the Company's long-term plans to maintain business continuity, and contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) launched by the Government. The CSR implementation shall establish the Company's competitiveness and increase the Company's economic scale to maintain the Company's business continuity and provide long-term sustainable benefits for all stakeholders.

Dalam melaksanakan aktivitas TJSL, Perseroan membangun jalur-jalur komunikasi untuk dapat menangkap aspirasi para pemangku kepentingan, baik yang terlibat ataupun terdampak, secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas operasional Perseroan. Pada tahun 2023, Perseroan telah menyusun agenda program TJSL yang mencakup aspek kesehatan, lingkungan, donasi sosial, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Program TJSL yang dilakukan Perseroan juga mendukung program pemerintah khususnya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, kemandirian ekonomi masyarakat lewat pembinaan pelaku UMKM, kesehatan, lingkungan, donasi sosial, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi para pelaku UMKM. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, Perseroan telah membuat perencanaan inisiatif kegiatan, yaitu sebanyak 28 program. Kemudian untuk mendukung pelaksanaannya, Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,3 Miliar dengan tingkat penyerapan sebesar 61% dari total alokasi anggaran TJSL di tahun 2023.

In carrying out CSR, the Company establishes communication channels to capture the aspirations of stakeholders, both those involved and affected, directly or indirectly, by the Company's operations. In 2023, the Company has formulated the CSR program agenda, which includes health, environmental, social, education, and community empowerment aspects. In 2023, the CSR program carried out by the Company also supported government programs, especially in alleviating extreme poverty, preventing stunting, and ensuring community economic independence by the partnership of MSMEs entrepreneurs, health, environment, social donations, education, and economic empowerment of MSMEs entrepreneurs. Based on these aspects, the Company planned 28 programs. Then, to support its implementation, the Company budgeted Rp7.3 billion with an absorption rate of 61% of the total CSR budget in 2023.



PT PII sebagai salah satu *special mission vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah guna mencapai implementasi SDGs melalui berbagai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang memberikan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut dibuktikan pada ajang *Indonesia Best CSR & TJSL Awards 2023*, PT PII mendapat penghargaan *Best CSR in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023*. Selain itu juga mendapatkan penghargaan *Top CSR 2023 on Star 4*, serta Kategori Khusus TOP CSR Award 2023 untuk CSR Bidang Lingkungan dan pada ajang *Environmental and Social Innovation Award* (ENSIA) 2023, PT PII berhasil meraih *Silver Winner* pada kategori Inovasi Sosial. Selain itu, Direktur Utama juga mendapatkan penghargaan *Top Leader on CSR Commitment 2023*.

Pencapaian ini merupakan bukti wujud kepedulian Perseroan terhadap Lingkungan dan Kemandirian Masyarakat sekitar Lingkungan Operasi Perseroan dalam menjalankan Program CSR. Kami berharap penghargaan ini dapat mendorong PT PII untuk mengedepankan TJSL tidak hanya sebagai kewajiban Perseroan, tetapi juga sebagai bagian dari dukungan yang dilakukan Perseroan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

IIGF, as one of the Ministry of Finance's special mission vehicles (SMV), strives to commit to supporting the government in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through various social and environmental responsibility (CSR) activities which have a major impact on society and the environment. This was evidenced by IIGF's award at the 2023 Indonesia Best CSR & TJSL Awards, by winning the 2023 Best CSR in Infrastructure Guarantee Sector Industry. The Company also received Top CSR 2023 on Star 4 award, and TOP CSR 2023 award Special Category for CSR in the Environmental Sector. Also, in the 2023 Environmental and Social Innovation Award (ENSIA), IIGF won Silver in the Social Innovation category. In addition, IIGF's President Director received the 2023 Top Leader on CSR Commitment award.

This achievement is proof of the Company's care for the Environment and the Community Independence around the Company's Operational Environment by implementing the CSR Program. We hope that these awards shall encourage IIGF to prioritize CSR, not only as an obligation, but also as part of the Company's support to provide maximum benefits to the community.

Komposisi Direksi

Board of Directors' Composition

Pada periode tahun buku pelaporan, tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Sampai dengan 31 Desember 2023, komposisi Direksi masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu:

In the reporting period of fiscal year, there was no change in the composition of members of the Board of Directors. As of 31 December 2023, the Board of Directors remained the same as the previous year:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Terms of Office
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019 juncto KMK No. 340/KMK.06/2022 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019 juncto KMK No. 340/KMK.06/2022	4 Desember 2022 s.d 3 Desember 2027 4 December 2022 to 3 December 2027	Ke-2 Second
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020	23 Maret 2020 s.d 22 Maret 2025 23 March 2020 to 22 March 2025	Ke-1 First
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022	17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2027 17 January 2022 to 16 January 2027	Ke-1 First



Apresiasi Appreciation

Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas arahan yang diberikan dan kerja sama yang telah terjalin selama tahun 2023. Dengan arahan dan bimbingan dari Pemegang Saham serta kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan, PT PII berkomitmen untuk terus melakukan optimalisasi peran strategis Perseroan sesuai dengan mandat yang diamanatkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui skema pembiayaan inovatif (*innovative financing*), serta terus meningkatkan kebermanfaatan untuk keberlanjutan Perseroan. Semoga di tahun mendatang PT PII dapat secara optimal menjalankan perluasan perusahaan penjaminan khususnya pada sektor infrastruktur sosial untuk memperbesar dampak kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis dan segenap pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan, kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Pencapaian dan pertumbuhan PT PII di tahun 2023 diraih berkat usaha dari seluruh karyawan yang mengupayakan inovasi dan kreativitas di tengah tantangan dan perubahan proses kerja, kepercayaan dan dukungan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, serta kerja sama yang baik dengan mitra usaha.

Atas nama PT PII, secara khusus kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Awan Nurmawan Nuh dan Bapak Wahyu Utomo, atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Rina Widiyani Wahyuningdyah dan Bapak Iqbal Islami sebagai Dewan Komisaris baru Perseroan.

The Board of Directors expresses its gratitude and respect to the Shareholders and Board of Commissioners for the direction given and the cooperation that has been established in 2023. With direction and guidance from Shareholders, as well as trust and support from stakeholders, IIGF is committed to optimizing the Company's strategic role in accordance with the mandate given by the Ministry of Finance, to encourage sustainable infrastructure development through innovative financing schemes, as well as to increase benefits for the Company's sustainability. Hopefully, in the future, IIGF shall optimally expand its guarantee business, especially in the social infrastructure sector, to increase the impact on community welfare via sustainable infrastructure development.

We also express our appreciation and gratitude to all employees, business partners, and other stakeholders for the trust, contribution, and support they have provided. In 2023, IIGF achieved its accomplishment and growth because of the efforts of all employees who innovated and were very creative amidst the challenges and changes in the business processes, the trust and support of the Shareholders and the Board of Commissioners, as well as good cooperation with business partners.

On behalf of IIGF, we would like to express our appreciation and gratitude to Mr. Awan Nurmawan Nuh and Mr. Wahyu Utomo, for their dedication and contributions during their tenure as the Company's Board of Commissioners. We also congratulate Mrs. Rina Widiyani Wahyuningdyah and Mr. Iqbal Islami as the Company's new Board of Commissioners.



Kami yakin bahwa dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, diiringi dengan kerja keras dan semangat yang kuat oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan, Perseroan akan dapat terus memanfaatkan setiap peluang di depan dengan memberikan kinerja yang optimal. Bersama-sama, mari kita wujudkan visi PT PII untuk "Menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui berbagai skema inovatif" dan mencapai kinerja yang lebih baik.

We are certain that with our competence and skill, accompanied with hard work and strong passion from all level of management and employees, the Company will continue to benefit from any future opportunity ahead by delivering optimum performance. Together, let's actualize IIGF's vision "to be the trusted driving entity in supporting efforts to accelerate infrastructure and sustainable development by the Government via various innovative schemes" and achieve better performance.

Jakarta, 6 Mei 2024

Jakarta, 6 May 2024

Atas Nama Direksi

On Behalf of the Board of Directors

Muhammad Wahid Sutopo

Direktur Utama

President Director



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun buku 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 6 Mei 2024

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Rina Widiyani Wahyuningdyah

Komisaris Utama
President Commissioner

Mariatul Aini

Komisaris
Commissioner

Iqbal Islami

Komisaris
Commissioner



Statement of Accountability of the Board of Commissioners and The Board of Directors for the 2023 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2023 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has been presented in full and we shall be fully accountable for the accuracy of the contents of the Company Annual Report.

This statement was made with actual.

Jakarta, 6 May 2024

Direksi

Board of Directors

Muhammad Wahid Sutopo

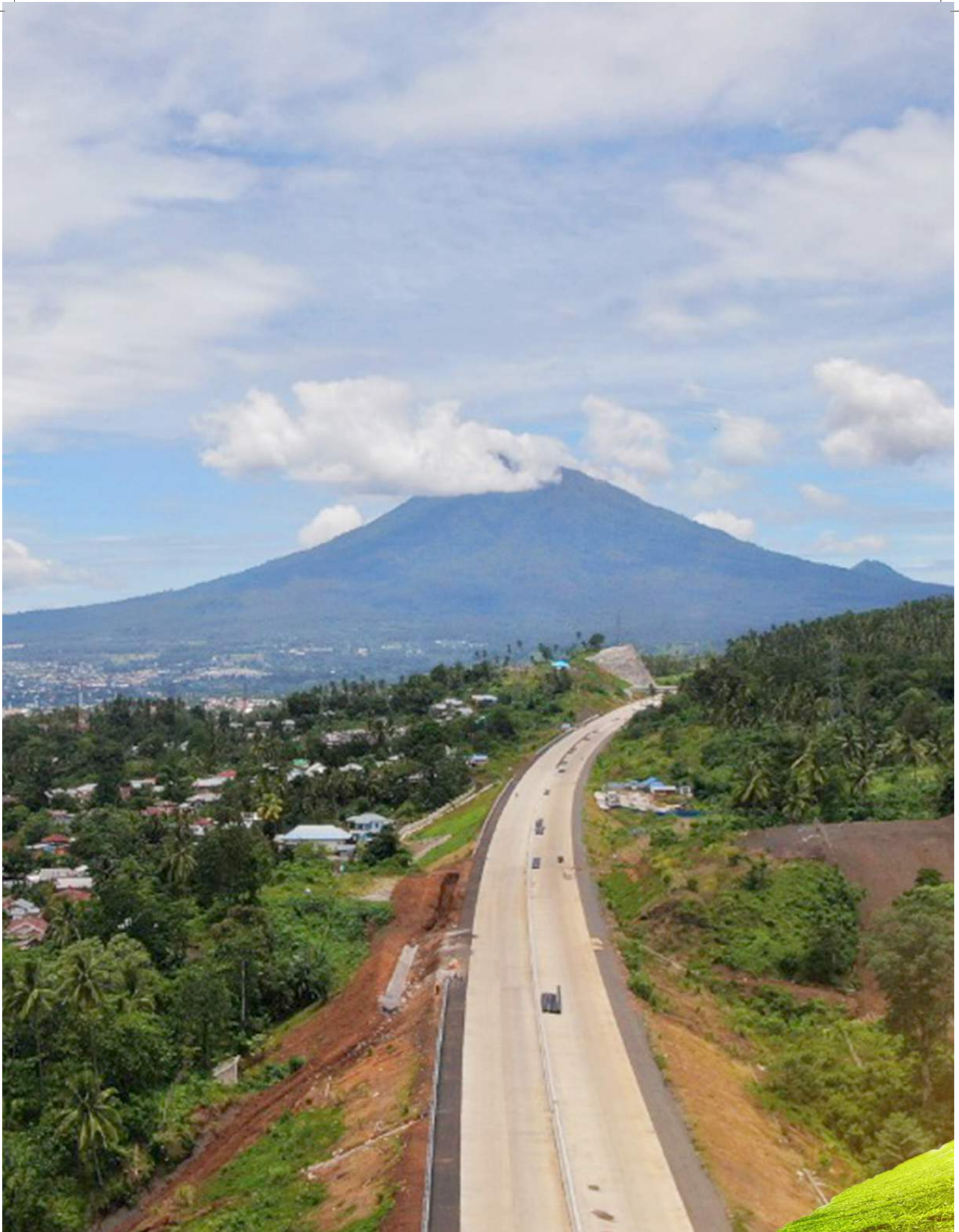
Direktur Utama
President Director

Andre Permana

Direktur Bisnis
Business Director

Donny Hamdani

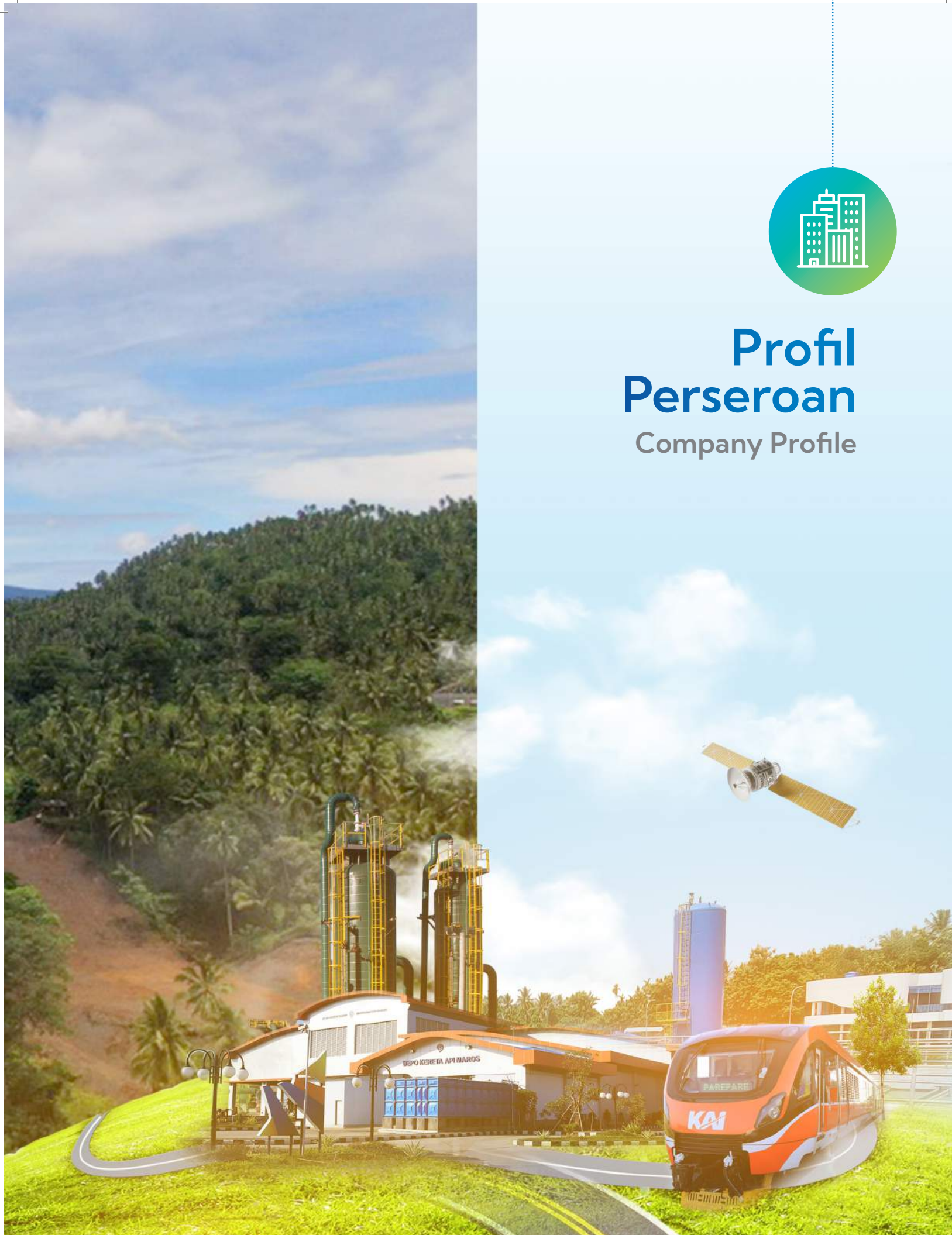
Direktur Keuangan
Finance Director





Profil Perseroan

Company Profile





Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Perusahaan
Corporate Identity



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund



PENJAMINAN & INFRASTRUKTUR
Guarantee & Infrastructure

Tanggal Pendirian
Date of Establishment



30 Desember 2009

30 December 2009

Jenis/Badan Hukum Perusahaan
Company's Type/
Legal Entity



Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan.

Limited Liability Company, as a State-Owned Enterprise (SOE) under the guidance and supervision of the Minister of Finance.

Kegiatan Bisnis Utama sesuai Anggaran Dasar
Main Business Pursuant to the Articles of Association



- ▶ Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di bidang infrastruktur;
- ▶ Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional;
- ▶ Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

- ▶ Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
- ▶ Conducting activities related to the Sovereign Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the central and local national economy;
- ▶ Providing Sovereign Guarantee in other sectors' financing in addition to infrastructure based on government assignments.

Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Legal Basis for Establishment and Amendments to the Articles of Association



Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 29 tertanggal 30 Desember 2009, dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 06 tertanggal 12 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Arry Supratno S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0139871 tertanggal 13 Juli 2023.

Deed of Establishment of the Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) No. 29 dated 30 December 2009, made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, a Notary in Jakarta, as amended by Deed of Amendment No. 14 dated 14 January 2010 made before Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M, a Notary in Jakarta, which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-04444.AH.01.2010 dated 27 January 2010 on the Ratification of the Company's Legal Entity, which has been amended several times, lastly by the Deed of Statement of the Shareholders' Resolution of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. 06 dated 12 July 2023, made before Arry Supratno S.H., a Notary in Jakarta, which has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Changes in the Company Data of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. AHU-AH.01.09-0139871 dated 13 July 2023.



Kepemilikan Ownership		Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (100%).	All Company's shares are owned by the Republic of Indonesia (100%).
Modal Dasar Authorized Capital		Rp20.000.000.000.000,- yang terdiri dari 20.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,- per lembar saham.	Rp20,000,000,000,000,- consisting of 20,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000,- per share.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Up Capital		Rp10.655.000.000.000,- yang terdiri dari 10.655.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,- per lembar saham.	Rp10,665,000,000,000,- consisting of 10,655,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000,- per share.
Pencatatan Di Bursa Listing on the Exchange		Perseroan merupakan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa manapun.	The Company is a state-owned enterprise that has not been listed on any stock exchange.
Jumlah Karyawan Number of Employees		164 Karyawan	164 Employees
Alamat Kantor Pusat Head Office Address		Capital Place, 7-8 Floor Jl. Gatot Subroto No. Kav 18, RT.6/RW.1, Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan 12710 +62 21 5795 0550 +62 21 5795 0040	Capital Place, 7-8 Floor Jl. Gatot Subroto No.Kav 18, Neighborhood 6/Hamlet 1, West Kuningan, Mampang Prapatan Sub-District, South Jakarta, 12710 +62 21 5795 0550 +62 21 5795 0040
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary		Yunan Novaris Arifdianto (EVP Corporate Secretary and Communication) y.novaris@iigf.co.id +62 21 5795 0550	
Email		info@iigf.co.id	
Website		www.iigf.co.id	
Media Sosial Social Media		PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) @pii_persero @PII_Persero	



Riwayat Singkat Perusahaan

Company's Brief History

Hadir untuk mendorong pembangunan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, saat ini, PT PII sebagai salah satu *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan RI telah menjamin 50 proyek yang terdiri dari 41 penjaminan proyek infrastruktur dengan skema KPBU dan non KPBU, serta 9 penjaminan proyek non infrastruktur dengan total nilai proyek investasi keseluruhan sebesar Rp497 triliun.

Existing to encourage infrastructure development to support Indonesia's economic growth, currently, IIGF as one of the *Special Mission Vehicles* (SMV) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, has guaranteed 50 projects, consisting of 41 infrastructure PPP projects and Non-PPP projects, and 9 non infrastructure projects with a total project investment value for infrastructure projects of Rp432 trillion.

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 30 Desember 2009 melalui Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 35/2009") dan ditugaskan sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur ("Perpres 38/2015"). Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengalihan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Agar KPBU dapat berjalan baik, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan penjaminan infrastruktur melalui PT PII, untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen PJPB dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap pelaksanaan perjanjian KPBU. Peran PT PII diharapkan mampu meningkatkan kepastian dalam perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek melalui peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah. PT PII

The Company is a State-Owned Enterprise (SOE), established by the Government of the Republic of Indonesia on 30 December 2009 through Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company (Persero) in the Field of Infrastructure Guarantee ("PP 35/2009"), and is assigned as one of the implementing service (*single window*) to evaluate, prepare guarantee structures, and provide guarantees for infrastructure projects under the PPP scheme.

As a basis for implementing PPP, the Government has issued Presidential Regulation No. 38 of 2015 on the Public Private Partnership (PPP) in Providing Infrastructure ("Perpres 38/2015"). PPP implementation has the objective to fulfill the funding in a sustainable manner to develop infrastructure, by mobilizing private funds, realizing the provision of infrastructure that is of high quality, effective, efficient, right on target and on time, as well as creating an investment climate that encourages the participation of Business Entities in providing infrastructure based on healthy business principles.

The Government of the Republic of Indonesia provides infrastructure guarantee support through IIGF to ensure that PPP can be conducted well, and to provide certainty to the private sector regarding the commitment of GCA in fulfilling its financial obligations as stipulated in the PPP agreement. IIGF shall play a role in increasing certainty in obtaining financing (*financial close*) for projects by improving the creditworthiness or *bankability* of PPP projects, while maintaining the Government's interests, especially regarding contingent obligations that may arise to the Government. IIGF,



sebagai BUMN yang dirancang Pemerintah untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel melalui tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, *framework* yang akuntabel serta didukung dengan transparansi, profesionalisme, dan independensi.

Pada tahun 2016, Pemerintah Republik Indonesia membuat Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 50/2016"). Melalui PP 50/2016, PT PII mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur di luar skema KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur ("PMK 101/2018").

Sejak tahun 2018, PT PII juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.08/2018 yang pada tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK/08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sehingga, ruang lingkup kegiatan usaha PT PII menjadi lebih luas, tidak hanya terbatas pada penjaminan, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Pada tahun 2020, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat dan dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara termasuk program PEN sebagai akibat pandemi Covid-19, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur ("PP 55/2020"). Melalui PP 55/2020 ini, Pemerintah memberikan perluasan mandat kepada PT PII sehingga maksud dan tujuan usaha PT PII menjadi lebih luas, yaitu:

as an SOE, is designed by the Government to be a credible guarantee institution through good corporate governance, risk management, and an accountable framework, supported by transparency, professionalism, and independence.

In 2016, the Government of the Republic of Indonesia issued Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector ("PP 50/2016"). Through PP 50/2016, IIGF received an expanded mandate to provide Sovereign Guarantee for infrastructure projects in addition to the PPP scheme. This mandate expansion was followed up with the issuance of Minister of Finance Regulation No. 101 of 2018 on the Procedures for Providing and Implementing Joint Sovereign Guarantee or Through Infrastructure Guarantee Business Entity against the Risk of Default from State-Owned Enterprises that Take Out Loans and/or Issue Bonds to Finance Infrastructure Provision ("MoFR 101/2018").

Since 2018, IIGF has also received an assignment from the Ministry of Finance to assist in the preparation and implementation of infrastructure project transactions using the PPP scheme, as stated in Minister of Finance Regulation No. 73/PMK.08/2018, which in 2020 was revoked by Minister of Finance Regulation No. 180/PMK/08/2020 on the Facilities for Preparation and Implementation of Public Private Partnership Project Transactions with Business Entities in Providing Infrastructure. Thus, the scope of IIGF's business activities is expanded, no longer limited to guarantees, but also assistance, both in the preparation stage and the transaction phase.

In 2020, to support Government policy to fulfill the increasing need for Sovereign Guarantee and support state financial policies including PEN program as a result of the Covid-19 pandemic, the Government issued Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 55 of 2020 on the Second Amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector ("PP 55/2020"). Pursuant to PP 55/2020, the Government provides an expanded mandate to IIGF, making IIGF's business and objectives broader:



1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di bidang infrastruktur;
2. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan
3. Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Perluasan mandat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan Anggaran Dasar PT PII. Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KMK/06/2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ("KMK 497/2020"), Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Utama, menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT PII yang mencakup perubahan maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha Perseroan, serta penambahan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun.

Keputusan tersebut kemudian dinyatakan dalam Akta No. 14 tanggal 19 November 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., serta telah memperoleh

1. Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
2. Conducting activities related to the Sovereign Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the national economy; and
3. Providing Sovereign Guarantee in other sectors' financing in addition to infrastructure based on government assignments.

The mandate expansion was then followed up with amending IIGF's Articles of Association. Based on the Minister of Finance Decree No. 497/KMK/06/2020 on the Amendment to the Articles of Association of the Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund ("MoFD 497/2020"), the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, representing the Government of the Republic of Indonesia as the Main Shareholder, approved the amendment to the Articles of Association of IIGF, which includes changes to the Company's goals and objectives, the Company's business activities, and additional authorized capital for the Company amounted to Rp20 trillion.

This Decree was then stated in Deed No. 14 dated 19 November 2020, which was made before Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., and has been ratified by the Minister of Law and



persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.Tahun 2020 pada tanggal 19 November 2020.

Selain itu, di tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan dampak pandemi Covid-19, yang memiliki dampak pada kegiatan usaha PT PII. Peraturan-peraturan penting tersebut antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 23/2020");
2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 43/2020");

Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.Tahun 2020 dated 19 November 2020.

In addition, in 2020, the Government of the Republic of Indonesia also made several regulations to implement programs to overcome the impact of the COVID-19 pandemic, which affected IIGF's business activities. These important regulations include:

1. Government Regulation No. 23 of 2020 on the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling the Covid-19 Pandemic and/or to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economy Rescue ("PP 23/2020");
2. Government Regulation No. 43 of 2020 on the Amendment to the Government Regulation No. 23 of 2020 on the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economy Rescue ("PP 43/2020");



3. Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah kepada Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 98/2020");
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT PII dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 522/2020"); dan
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT PII untuk Melaksanakan Dukungan *Loss Limit* Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK 523/2020").

Implementasi perluasan mandat dan penugasan PT PII dimulai dengan melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dirumuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2020. Keputusan Pemegang Saham pada RUPSLB telah menyetujui dan mengesahkan perubahan RKAP PT PII Tahun Buku 2020. Kemudian, hasil keputusan RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 30 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Dari sisi kapasitas keuangan, menindaklanjuti peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun, pada tanggal 30 Desember 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan (Persero) PT PII ("PP 79/2020") yang menjadi dasar tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PII sebesar Rp1,57 triliun. Penambahan PMN tersebut merupakan bentuk dukungan kapasitas dari Pemerintah kepada PT PII dalam rangka pelaksanaan program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan pemerintah kepada PT PII. Penambahan PMN tersebut telah dicatatkan sebagai modal disetor PT PII berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.06/2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) PT PII ("KMK 61/2021"), yang kemudian dinyatakan dalam Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 9 Maret 2021 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 on the Procedures for Sovereign Guarantee to Corporate Entrepreneurs through appointed Guarantee Business Entity to Implement National Economic Recovery Program ("MoFR 98/2020");
4. Minister of Finance Decree No. 522/KMK.08/2020 on the Assignment to IIGF to Implement Joint Guarantees with Indonesian Export Financing Agency for Corporate Entrepreneurs to Carry Out the National Economic Recovery Program ("MoFD 522/2020"); and
5. Minister of Finance Decree No. 523/KMK.08/2020 on the Assignment to IIGF to Implement Sovereign Guarantee Loss Limit Support to Carry Out the National Economic Recovery Program ("MoFD 523/2020").

Implementation of the expansion of IIGF's mandate and assignments began with the adjustments to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) which were formulated through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 21 December 2020. The Shareholders' Resolution at the EGMS approved and ratified the changes to IIGF's RKAP for the 2020 Fiscal Year. Then, the results of the EGMS Resolution were stated in Deed No. 20 dated 30 December 2020 made before Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

In terms of financial capacity, following up on the increase in the Company's authorized capital to Rp20 trillion, on 30 December 2020, Government Regulation No. 79 of 2020 on the Additional State Capital Injection of the Republic of Indonesia to the Authorized Capital of the Company (Persero) IIGF ("PP 79/2020") was issued, which is the basis for additional State Capital Injection (PMN) to IIGF amounting to Rp1.57 trillion. The PMN addition is a form of capacity support from the Government to IIGF to implement the PEN program, and encourage the national economy through government assignments to IIGF. The additional PMN has been recorded as paid-up capital of IIGF based on Minister of Finance Decree No. 61/KMK.06/2021 on the Addition of State Capital Injection of the Republic of Indonesia to the Authorized Capital and Amendment to the Articles of Association of the Company (Persero) IIGF ("MoFD 61/2021"), which was then ratified in the Deed of Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 4 dated 9 March 2021, and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.



Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan dan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah, maka pada tanggal 12 Desember 2022 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal Perseroan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PT PII Tahun Anggaran 2022.

To improve the capital structure, enhance the Company's business capacity, and encourage the acceleration of the development of Government infrastructure projects, on 12 December 2022, Government Regulation No. 53 of 2022 on the Addition of State Capital Injection of the Republic of Indonesia to the Authorized Capital of the Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, was issued. The Addition of State Capital Injection (PMN) to the authorized capital of Limited Liability Company (Persero) Indonesia Infrastructure Guarantee Fund originates from the State Budget for the 2022 Fiscal Year, as re-established in the Details of IIGF's State Budget for the 2022 Fiscal Year.

Informasi Perubahan Nama dan Status Badan Hukum Perseroan

Information on Changes in the Company's Name and Legal Status

Sejak awal pendirian, Perseroan tidak pernah melakukan perubahan nama maupun status badan hukum.

Since its establishment, the Company has never changed its name or legal entity status.



Jejak Langkah Milestones



Pembentukan Perseroan Company's Establishment

Pada 30 Desember 2009 Perseroan resmi didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

On 30 December 2009, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund was officially established by the Government of the Republic of Indonesia as a State-Owned Enterprise (SOE) through State Capital Injection of the Republic of Indonesia amounting to Rp1 trillion, in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector.



Peresmian Operasional Perseroan Inauguration of the Company's Operations

Pada 11 Mei 2010 Perseroan resmi beroperasi dengan mandat menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. On 11 May 2010, the Company officially operated with a mandate to provide guarantees for infrastructure projects under PPP scheme to accelerate infrastructure development in Indonesia.

Perpres No. 78/2010 dan PMK 260/2010

Presidential Decree No. 78/2010 and MoFR 260/2010

Pada 21 Desember 2010 diterbitkan Perpres No. 78/2010 dan 31 Desember 2010 diterbitkan PMK No. 260/2010 yang menjadi pedoman bagi Perseroan untuk menjamin proyek infrastruktur dan mengokohkan keberadaan Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).

On 21 December 2010, Presidential Decree No. 78/2010 was issued. On 31 December 2010, MoFR No. 260/2010 was also issued. Both are a guideline for the Company to guarantee infrastructure projects and strengthen the Company's existence as an Infrastructure Guarantee Business Entity (BUPI).

PP No. 88/2010

Government Regulation No. 88/2010

Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di IIGF sebesar Rp1 Triliun, merujuk pada PP No.88/2010.

The Government of Indonesia increased the State Capital Injection (PMN) in IIGF by Rp1 trillion, with reference to PP No. 88/2010.



Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

MOU between the Company and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Pada 24 Januari 2011 dilaksanakan penandatanganan MOU antara Perseroan dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam rangka mempromosikan investasi infrastruktur melalui berbagai kegiatan bersama.

On 24 January 2011, an MOU was signed between the Company and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) to promote infrastructure investment via various joint activities.

Acuan Alokasi Risiko

Risk Allocation References

Pada 31 Maret 2011 Perseroan menerbitkan Dokumen Acuan Alokasi Risiko Edisi Pertama yang berisi acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

On 31 March 2011, the Company published the First Edition of the Risk Allocation Reference Document, which contains references regarding the categories and distribution of infrastructure risks as a reference for parties involved in infrastructure projects under the PPP scheme.

Penandatanganan Penjaminan Proyek PLTU Batang - Jawa Tengah

Signing of Guarantee for the PLTU Batang Central Java Project

Pada 6 Oktober 2011 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini merupakan proyek dengan skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah dengan menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh Perseroan dan Kementerian Keuangan RI.

On 6 October 2011, the Company signed a Guarantee Agreement for the 2 x 1,000 MW Central Java Steam Power Plant (PLTU) project in Batang, Central Java. This project is the first PPP project that was successfully realized by the Government using joint guarantee facilities by the Company and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.



Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan ICIEC

Signing of Memorandum of Understanding with ICIEC

Pada 20 April 2012 Perseroan dan Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC) menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangkaian acara *Asia Finance and Risk Mitigation Forum 2012* di Makati City, Filipina.

On 20 April 2012, the Company and the Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC) signed a Memorandum of Understanding in the 2012 Asia Finance and Risk Mitigation Forum in Makati City, Philippines.

IIGF Institute

Peluncuran IIGF Institute dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perseroan dengan 3 (tiga) perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang program peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur.

Launching of the IIGF Institute and Signing of a Memorandum of Understanding between the Company and three (3) universities, i.e., the University of Indonesia, Institut Teknologi Bandung, and Gadjah Mada University, regarding a program to increase stakeholders' understanding and capacity on infrastructure provision.



Peningkatan Kapitalisasi Penjaminan dan Pengakuan Peringkat Kredit

Guarantee Capitalization Increase and Credit Rating Recognition

Pada awal tahun 2013 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank senilai USD25 juta dan implementasi *Co-Guarantee* dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan. Di samping itu Perseroan juga mendapatkan Peringkat Kredit BBB- (outlook stabil) dari *Fitch Rating*, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perseroan.

In early 2013, the Company obtained a loan from the World Bank amounted to USD25 million and implemented a Co-Guarantee with MIGA amounted to USD50 million to increase guarantee capacity. In addition, the Company also received a BBB- (stable outlook) Credit Rating from Fitch Rating, an international financial rating agency, equivalent to the Government of Indonesia's rating, which recognized the Company's financial capacity and performance.

Indonesia Infrastructure Roundtable II (IRR)

Pada 28 Februari 2013 Perseroan melalui IIGF Institute bersama dengan UI, ITB dan UGM menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Roundtable II dengan topik "Investasi Sektor Swasta pada Bidang Air Minum" di Kabupaten Tangerang.

On 28 February 2013, the Company, via the IIGF Institute, in collaboration with UI, ITB, and UGM held the Indonesia Infrastructure Roundtable II, with the "Private Sector Investment in the Drinking Water Sector" topic in Tangerang Regency.



Kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin

Collaboration with Sriwijaya University and Hasanuddin University

Pada 18 Agustus 2014 dan 17 Oktober 2014 Perseroan melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya dan Universitas Hasanuddin, untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.

On 18 August 2014 and 17 October 2014, the Company, via the IIGF Institute, signed a Memorandum of Understanding with Sriwijaya University and Hasanuddin University, for cooperation in the fields of education, research, community service, capacity building, and partnerships in environmental, social, and community development.

Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat

National Seminar on Infrastructure for the People

Perseroan bekerja sama dengan UI, ITB, dan UGM menyelenggarakan seminar nasional bertajuk "Infrastruktur untuk Rakyat, Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar" sebagai bentuk sosialisasi hasil acara *Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR)* tahun 2013-2014 yang disponsori oleh Perseroan.

The Company collaborates with UI, ITB, and UGM to hold a national seminar entitled "Infrastructure for the People, Returning the State's Role in Providing Basic Infrastructure" as a form of dissemination of 2013-2014 Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) results, sponsored by the Company.



Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015

Presidential Regulation No. 38 of 2015

Pada 20 Maret 2015 diterbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai upaya memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dapat dijamin Perseroan menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

On 20 March 2015, Presidential Regulation No. 38 of 2015 on the Public Private Partnership in Providing Infrastructure was issued, as an effort to expand the PPP scheme infrastructure project sector that can be guaranteed by the Company, up to 19 sectors which include the social infrastructure sector.

PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

SPP Batang Central Java (CJPP)

Pada 28 Agustus 2015 dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan proyek PLTU Batang Jawa Tengah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, PT PLN, Perseroan dan investor pengembang. Proyek ini merupakan proyek KPBU sektor listrik pertama yang akan memperoleh penjaminan dari Perseroan. Pada 6 Juni 2016 telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek PLTU Batang Jawa Tengah.

On 28 August 2015, President Joko Widodo did the groundbreaking for the construction of the PLTU Batang Central Java project, accompanied by the Minister of Finance, the Minister of SOEs, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Governor of Central Java, Regent of Batang, PT PLN, the Company, and developer investors. This project was the first PPP project in the electricity sector that received guarantees from the Company.

Pembentukan UNIID

UNIID Establishment

Pada 16 Desember 2015 Perseroan melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja Antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID). Pembentukan jaringan ini menjadi forum bagi para akademisi untuk berkontribusi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

On 16 December 2015, the Company, via the IIGF Institute, facilitated the establishment of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID). The establishment of this network provides a forum for academics to contribute to encouraging the national infrastructure development.



Penjaminan Proyek Palapa Ring Barat

West Palapa Ring Project

Pada 29 Februari 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat oleh Perseroan dan PT Palapa Ring Barat selaku Badan Usaha, dan antara Perseroan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK. Pada 25 Juli 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat.

On 29 February 2016, the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the West Palapa Ring project were signed by the Company and PT Palapa Ring Barat as the Business Entity, and between the Company and the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA. On 25 July 2016, the Financial Close for West Palapa Ring Project was carried out.

Penjaminan Proyek Palapa Ring Tengah

Central Palapa Ring Project

Pada 4 Maret 2016 dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Tengah oleh Perseroan dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku Badan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK. Pada 29 September 2016 dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Tengah.

On 4 March 2016, the Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Central Palapa Ring project were signed by the Company and PT Len Telekomunikasi Indonesia as the Business Entity, and the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA. On 29 September 2016, the Financial Close for Central Palapa Ring Project was carried out.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 4 Jalan Tol

Signing of Guarantee Agreement for 4 Toll Roads

Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan 4 (empat) proyek di sektor Jalan Tol yaitu Jalan Tol Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung.

The Company signed guarantee agreements for four (4) projects in the Toll Road sector, i.e., Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, and Manado-Bitung Toll Roads.

Penjaminan Proyek SPAM Umbulan

SPAM Umbulan

Pada 21 Juli 2016 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres antara Perseroan dengan Gubernur Jawa Timur dalam rangka menjamin Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Pada 30 Desember 2016 telah dicapai tahap *Financial Close* Proyek SPAM Umbulan.

On 21 July 2016, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta, and a Recourse Agreement with the Governor of East Java to guarantee the Umbulan Drinking Water Supply System (SPAM) Project. On 30 December 2016, the SPAM Umbulan Project reached Financial Close.



Sinergi Pendampingan Hukum Legal Assistance Synergy

Pada 2 Agustus 2016 Perseroan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk saling bersinergi dalam memberikan pendampingan hukum demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

On 2 August 2016, the Company signed a Memorandum of Understanding with the Junior Attorney General and State Administration (Jamdatun) to work together to provide legal assistance to accelerate infrastructure development in Indonesia.

Perluasan Mandat Perseroan Company's Mandate Expansion

Pada 7 November 2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Diterbitkannya perubahan Peraturan ini memperluas mandat Perseroan untuk dapat menjamin proyek-proyek infrastruktur di luar skema KPBU. On 7 November 2016, Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector. The issuance of amendment to this Regulation expands the Company's mandate to be able to guarantee infrastructure projects outside the PPP scheme.



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 6 Jalan Tol Signing of Guarantee Agreement for 6 Toll Roads

Pada 22 Februari 2017 dan Desember 2017 Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan sejumlah total 6 (enam) proyek Jalan Tol yaitu: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta-Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo-Banyuwangi; dan (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

On 22 February 2017 and December 2017, the Company signed six (6) guarantee agreements for Toll Roads projects: (1) Cileunyi-Sumedang-Dawuan; (2) Serang-Panimbang; (3) Jakarta-Cikampek II Elevated (4); Krian-Legundi-Bunder-Manyar; (5) Probolinggo-Banyuwangi; and (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.



Penjaminan Proyek SPAM Bandar Lampung SPAM Bandar Lampung

Pada 14 Februari 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Regres proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung. On 14 February 2018, the Company signed a Guarantee and Recourse Agreements for the Bandar Lampung Drinking Water Supply System (SPAM) project.

Penjaminan Proyek SPAM Semarang Barat SPAM West Semarang

Pada 23 November 2018 Perseroan menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat. On 23 November 2018, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with PDAM Tirta Moedal for the SPAM West Semarang Project.

Pinjaman Proyek KEK Mandalika - Mandalika SEZ Project Loan

Perseroan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) pada 28 Desember 2018 sehubungan dengan Penjaminan Pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok. The Company signed a Guarantee Implementation Agreement with PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) on December 28, 2018 in relation to the Loan Guarantee for the Mandalika Special Economic Zone Tourism Infrastructure Facility Development Project, Lombok.



Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU

Assignment and Implementation of PPP Project

Perseroan mendapatkan mandat dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU, 1) Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, 2) Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, 3) Jalan Lintas Timur Riau yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dan 4) Rumah Sakit Kanker Dharmas yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

The Company received a mandate from the Ministry of Finance to implement facilities for Project Preparation and Transaction Advisory of PPP Projects, 1) Makassar-Parepare Train developed by the Ministry of Transportation, 2) South Sumatra East Cross Road, 3) Riau East Cross Road developed by Ministry of PUPR, and 4) Dharmas Cancer Hospital, developed by the Ministry of Health.

Penjaminan pada Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare

The Company Provided Guarantees for the Makassar-Parepare Train Project

Pada 5 April 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku PJKP dengan PT Celebes Railway Indonesia (CRI) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek ini berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi perkeretaapian sekaligus merupakan proyek KPBU pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan.

On 5 April 2019, a Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Transportation c.q Directorate General of Railways as GCA, and PT Celebes Railway Indonesia (CRI) as the Special Purpose Vehicle (SPV). This project is the first Public Private Partnership (PPP) in the railway transportation sector within the scope of the Ministry of Transportation.

Penjaminan pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia

The Company Provides Guarantees for PPP Project of Multifunctional Satellite of the Republic of Indonesia

Pada 3 Mei 2019 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Perseroan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai PJKP. SATRIA merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang diberikan penjaminan pemerintah melalui Perseroan setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Indonesia.

On 3 May 2019, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Satelit Nusantara Tiga as the Special Purpose Vehicle (SPV) and the Recourse Agreement of the Multifunction Satellite for the Republic of Indonesia PPP project (SATRIA) with the Minister of Communication and Information Technology as the GCA. SATRIA is the fourth PPP project in the telecommunications sector to be provided a Sovereign Guarantee through the Company, after the West, Central, and East Palapa Ring Packages, with the objective to improve connectivity in Indonesia's Disadvantaged, Frontier, and Outermost regions.

Penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang – Demak

The Company Provides Guarantee for the Semarang-Demak Toll Roads PPP

Pada 23 September 2019 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ruas Jalan Tol Semarang-Demak antara Kementerian PUPR selaku PJKP dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD) yang merupakan konsorsium dari Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Misi Mulia Metrikal.

On 23 September 2019, a cooperation agreement for the Public Private Partnership (PPP) project for the Semarang-Demak Toll Road section was signed between the Ministry of PUPR as GCA and the Special Purpose Vehicle (SPV), PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD), which is a Consortium of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, and PT Misi Mulia Metrikal.



Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2

Construction Project of Geothermal Power Plant (PLTP) Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2

Pada tanggal 19 Agustus 2020 PT PII dan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") menandatangani perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2, yang meliputi Penandatanganan Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* antara GeoDipa dan ADB, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GeoDipa. On 19 August 2020, IIGF and PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") signed an agreement with the Asian Development Bank (ADB) for the Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2 Geothermal Power Plants (PLTP) Development projects, which include the Signing of the Loan Agreement between GeoDipa and ADB, the Signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the Signing of the Guarantee Agreement between IIGF and GeoDipa.

Proyek KPBU Jalan Tol Jogja Solo

PPP Project for Jogja Solo Toll Road

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Solo (dahulu PT Jogjasolo Marga Makmur) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK. On 9 September 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Solo (previously PT Jogjasolo Marga Makmur) as the Special Purpose Vehicle (SPV). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with the Implementing Business Entity, and a Recourse Agreement with the GCA.

Perluasan Mandat Perseroan

Company's Mandates Expansion

Pada 30 September 2020 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Diterbitkannya perubahan Peraturan ini memperluas maksud dan tujuan PT PII tidak lagi terbatas pada penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur, namun juga mencakup penjaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya berdasarkan penugasan pemerintah dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek yang mendukung perekonomian nasional.

On 30 September 2020, Government Regulation No. 55 of 2020 was issued, as the Second Amendment to Government Regulation No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector. The issuance of the amendment to this Regulation expanded IIGF's goals and objectives, so that the Company is no longer limited to sovereign guarantees in the infrastructure sector, but includes sovereign guarantees in financing in other sectors based on government assignments, and carries out activities related to the sovereign guarantees and other activities related to the projects that support the national economy.

Proyek KPBU Jalan Tol Jogja Bawen

PPP Project for Jogja Bawen Toll Road

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan PJPK.

On 13 November 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Bawen as the Special Purpose Vehicle (SPV)). On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with the Implementing Business Entity, and a Recourse Agreement with the GCA.



Penjaminan Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Kelistrikan di Jawa Timur dan Bali

Construction of East Java and Bali Electricity Distribution Network

Pada 10 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Perseroan atas Pinjaman Langsung (*Direct Lending*) dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) kepada PT PLN untuk pembiayaan proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali.

On 10 February 2021, the Company signed a Sovereign Guarantee Agreement with the Ministry of Finance for Direct Lending from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) to PT PLN to finance the East Java and Bali Distribution Network Development.

Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Korporasi

Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs

Pada 16 Februari 2021 dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi yang dilakukan oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Eksekutif LPEI.

On 16 February 2021, the Company, represented by the President Director, signed a Cooperation Agreement for the Implementation of Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs, with the Executive Director of LPEI.

Penjaminan Proyek KPBU Unsolicited SPAM Jatiluhur I

Unsolicited SPAM Jatiluhur I PPP Project

Pada 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Jatiluhur I yang merupakan Proyek KPBU *Unsolicited*.

On 18 February 2021, there was a ceremonial activity to sign an agreement regarding the Government's guarantee for the SPAM Jatiluhur I Project, which is an Unsolicited PPP Project.

Financial Close Proyek Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan

Financial Close of South Sumatra East Cross Road (Jalintim) Project

Pada 22 Februari 2021 dilaksanakan *Financial Close* Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel yang merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan Non-tol di Indonesia dan merupakan proyek KPBU pertama yang mendapatkan pendanaan Syariah.

On 22 February 2021, the South Sumatra Jalintim Preservation PPP Project reached its Financial Close phase. The project was the first PPP project in the Non-Toll Road sector in Indonesia and is the first PPP project to receive Sharia funding.

Penjaminan Proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Pasuruan Jawa Timur

SPAM Umbulan PPP Project in Pasuruan, East Java

Pada 18 Februari 2021 dilaksanakan kegiatan seremonial penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk Proyek SPAM Jatiluhur I yang merupakan Proyek KPBU *Unsolicited*.

On 18 February 2021, there was a ceremonial activity to sign an agreement regarding the Government's guarantee for the SPAM Jatiluhur I Project, which is an Unsolicited PPP Project.

Penjaminan Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau

East Sumatra Cross Road Preservation Project in Riau Province

Pada 12 April 2021 Perseroan resmi memberikan penjaminan pada Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau yang merupakan proyek kedua di sektor jalan Non-tol di Indonesia.

On 12 April 2021, the Company officially provided guarantees for the East Sumatra Cross Road Preservation PPP Project in Riau Province, which is the second project in the non-toll road sector in Indonesia.

Penjaminan Proyek KPBU Unsolicited SPAM Karian – Serpong (*Unsolicited*)

SPAM Karian–Serpong Unsolicited PPP Project (*Unsolicited*)

Pada 29 April 2021 dilaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek SPAM Karian – Serpong dimana menjadi proyek ke-6 di sektor Air Minum yang diberikan penjaminan oleh Perseroan.

On 29 April 2021, the Company signed an agreement regarding the Sovereign Guarantee for the Karian–Serpong SPAM project, which is the 6th project in the Drinking Water sector to be given a guarantee by the Company.

Penjaminan Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa (*Unsolicited*)

Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication Project on Java Island (*Unsolicited*)

Pada 6 Desember 2021 dengan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Perseroan melaksanakan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek dengan skema KPBU *unsolicited* di sektor jalan dan jembatan yaitu proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa.

On 6 December 2021, witnessed directly by the Minister of PUPR, Basuki Hadimuljono, the Company signed an agreement regarding the Government's guarantee for an unsolicited PPP project in the road and bridge sector, i.e. the Callender Hamilton (CH) Bridge Replacement and/or Duplication project on Java Island.



Penjaminan Proyek KPBU

PPP Project Guarantee

1. Pada tanggal 20 September 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait dengan Proyek Alat Penerangan Jalan Madiun.
2. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perseroan dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait dengan Proyek *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJKSB) Bekasi.
1. On 20 September 2022, a guarantee agreement was signed for the Madiun Street Lighting Project.
2. On 31 October 2022, the Company signed a guarantee agreement for the Proving Ground Project of the Bekasi Roadworthiness Testing and Certification Center (BPLJKSB).

Presidensi G20

G20 Presidency

Perseroan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 sebagai *co-host* T20 TF8 dalam rangka percepatan *economic recovery* melalui penyediaan infrastruktur publik yang berkelanjutan dengan tema "*Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing*".

The Company actively participates in supporting the G20 Presidency as *co-host* of T20 TF8 to accelerate economic recovery via the provision of sustainable public infrastructure with the theme "Stronger Economic Recovery through Inclusive, Resilient, and Greener Infrastructure Investment and Financing".

Penjaminan Proyek Non-KPBU

Non-PPP Project Guarantee

1. Pada tanggal 22 April 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (persero) Tbk.
2. Pada tanggal 19 Mei 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek *Sustainable and Reliable Energy Access Program Western and Central Java* (SREAP)
3. Pada tanggal 28 Desember 2022, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Pembangunan PLTU Tahap III (PLTU Timor-1)
4. Pada tanggal 30 Desember 2022, dilaksanakan penandatanganan:
 - a. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Industri Kereta Api (Persero);
 - b. perjanjian penjaminan atas pinjaman Perusahaan Umum DAMRI;
 - c. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Pertamina (Persero);
 - d. perjanjian penjaminan atas pinjaman PT LEN Industri (Persero).
1. On 22 April 2022, an agreement was signed for the guarantees of Bond IV and Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
2. On 19 May 2022, a guarantee agreement was signed for the Western and Central Java Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) Project.
3. On 28 December 2022, a guarantee agreement for the SPP Phase III Development Project (SPP Timor-1) was signed.
4. On 30 December 2022, the following signing were carried out:
 - a. Guarantee Agreement for the loan of PT Industri Kereta Api (Persero);
 - b. Guarantee Agreement for the loan of DAMRI Public Corporation;
 - c. Guarantee Agreement for the loan of PT Pertamina (Persero);
 - d. Guarantee Agreement for the loan of PT LEN Industry (Persero).



Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Project Preparation and Transaction Advisory

1. Pada tanggal 24 Maret 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.
 2. Pada tanggal 19 Juni 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo;
 3. Pada tanggal 31 Agustus 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek Kapal Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
 4. Pada tanggal 10 November 2023 diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penugasan khusus PT PII sebagai pelaksana dalam Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Denpasar.
1. On 24 March 2023, Minister of Finance Decree (MoFD) was issued regarding the special assignment of IIGF as implementor in Preparation and Implementation of State Property Utilization Transactions and/or Transfer of State Property in the context of Preparation, Development, and Relocation of the National Capital.
 2. On 19 June 2023, Minister of Finance Decree (MoFD) was issued regarding the special assignment of IIGF as implementor in Assistance to Project Preparation and Transaction Advisory of SPAM Karo Regency PPP Project;
 3. On 31 August 2023, Minister of Finance Decree (MoFD) was issued regarding the special assignment of IIGF as implementor in Assistance to Project Preparation and Transaction Advisory of Vessel Research Project with National Research and Innovation Agency (BRIN);
 4. On 10 November 2023, Minister of Finance Decree (MoFD) was issued regarding the special assignment of IIGF as implementor in Assistance to Project Preparation and Transaction Advisory of SPAM Denpasar PPP Project.

Penjaminan Proyek KPBU

PPP Project Guarantee

1. Pada tanggal 24 Januari 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Tol Akses Patimban.
 2. Pada tanggal 12 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan Proyek Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat.
 3. Pada tanggal 17 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan terkait Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir – Ulujami.
1. On 24 January 2023, a guarantee agreement was signed for Patimban Access Toll Road Project.
 2. On 12 October 2023, an agreement was signed for the Public Street Lighting Project in West Lombok Regency.
 3. On 17 October 2023, a guarantee agreement was signed for the Jakarta Outer Ring Road (JORR) Cikunir–Ulujami Elevated Toll Project.

Penjaminan Proyek Non-KPBU

Non-PPP Project Guarantee

Pada tanggal 19 Oktober 2023, dilaksanakan penandatanganan perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah.

On 19 October 2023, a guarantee agreement was signed for the loan of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) for the Government's food reserves implementation.



Bidang Usaha serta Produk dan Jasa yang Dihasilkan

Business Line, and Generated Products and Services

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Business Activities Pursuant to the Company's Articles of Association

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 14 tertanggal 19 November 2020, yang dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan dari kegiatan Perseroan adalah untuk:

1. Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) di bidang infrastruktur;
2. Memberikan penjaminan Pemerintah (*Sovereign Guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah;
3. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional.

In accordance with the Company's Articles of Association, which was lastly amended through the Statement of Shareholders' Resolutions of the Company No. 14 dated November 19, 2020, made before Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn, a Notary in Jakarta, the Company's purposes and objectives of the activities are to:

1. Providing Sovereign Guarantee in the infrastructure sector;
2. Providing Sovereign Guarantee in other sectors' financing in addition to infrastructure based on government assignments; and
3. Conducting activities related to the Sovereign Guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the central and local national economy.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Business Activities

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah diuraikan di atas, Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

The Company conducts the following business activities to achieve the purposes and objectives described above:

No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Pursuant to the Articles of Association
1.	Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam skema perjanjian kerja sama Pemerintah dan Badan usaha dalam proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontingensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (<i>creditworthiness</i>) proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. Providing guarantees for the government's fiscal obligations in the Public Private Partnership (PPP) scheme in infrastructure projects, which shall realize accountability in the management of the Government's contingent obligations and increase the creditworthiness of Public Private Partnership in the infrastructure sector.
2.	Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial pemerintah dalam proyek infrastruktur. Providing guarantees for government fiscal obligations in infrastructure projects.
3.	Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: - Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan; - Penerbitan surat hutang atau obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya. Providing guarantees for the risk of default by State-Owned Enterprises in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which arise as a result of: - Execution of loan agreements with financial institutions; - Issuance of debt securities or bonds and/or other financial instruments.
4.	Pemberian penjaminan atas risiko gagal bayar kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat dari: - Pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan lembaga keuangan; - Penerbitan surat hutang/obligasi. Providing guarantees for the risk of default to the Regional-Owned and/or State-Owned Enterprises in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which arise as a result of: - Execution of agreements with financial institutions; - Issuance of debt securities/bonds.



No	Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Pursuant to the Articles of Association
5.	Pemberian penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial dalam bentuk selain pinjaman dan surat utang/obligasi. Providing guarantees for other financial risks to State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises and/or Business Entities, in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance, which arise as a result of obtaining financing or financial risk mitigation facilities in forms other than loans and debentures/bonds.
6.	Pemberian penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Providing guarantees to other entrepreneurs in accordance with assignments and/or provisions stipulated by the Minister of Finance.
7.	Pemberian jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitasi perencanaan, penyiapan, dan penyiapan kelayakan, atas proyek atau program serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek. Providing consulting services, information provisions, planning, preparation and feasibility facilitation for projects or programs, as well as other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.
8.	Kerja sama dengan pihak lain termasuk organisasi/lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Collaboration with other parties including international financial organizations/institutions to implement provision of guarantees as referred to in numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.
9.	Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perseroan. Joint ventures or capital investments in other legal entities with objectives and goals that are similar to the Company's objectives and goals.
10.	Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Other activities to achieve the Company's goals and objectives in accordance with statutory provisions.

Produk dan Jasa yang Dihasilkan Generated Products and Services

Beberapa produk dan jasa yang dihasilkan Perseroan adalah sebagai berikut.

1. Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur untuk Proyek KPBU maupun non KPBU;
2. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dan Penerbitan Obligasi BUMN untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur;
3. Penjaminan Pemerintah terhadap Pinjaman dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
4. Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; serta
5. Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Some of the products and services generated by the Company are as follows.

1. Sovereign Guarantee in the Infrastructure Sector for PPP Project and non PPP Project;
2. Sovereign Guarantee for SOE Loans and Bond Issuance to Finance Infrastructure Provision;
3. Sovereign Guarantee for Loan on Government Food Reserves;
4. Project Preparation and Transaction Advisory; as well as
5. Sovereign Guarantee for Corporate Entrepreneurs in terms of the National Economic Recovery Program

Sektor yang Dapat Diberikan Penjaminan Sectors that Can Be Guaranteed

Dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia, PT PII berperan aktif dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur melalui kegiatan penjaminan yang diberikan kepada 22 sektor sebagai berikut.

To accelerate Indonesia's infrastructure development, IIGF plays an active role in developing infrastructure projects through guarantee activities provided to 22 sectors as follows.



Gearing Ratio

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460 tahun 2022 tentang Penetapan Batas Kemampuan (*Gearing Ratio*) Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dalam Melakukan Kegiatan Penjaminan menetapkan batas kemampuan BUPI yakni PT PII dalam melakukan kegiatan penjaminan (*gearing ratio*) sebesar maksimal 12 (dua belas) kali dari ekuitas BUPI.

Gearing ratio adalah rasio yang membandingkan antara nilai eksposur penjaminan dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki pada saat tertentu untuk mengetahui tingkat pemanfaatan dari ekuitas yang dimiliki dalam melakukan penjaminan. Berdasarkan jumlah eksposur atas penjaminan proyek infrastruktur yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan nilai sebesar Rp82,85 triliun dan dengan ekuitas sebesar Rp14,4 triliun tanpa memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka *Gearing Ratio* PT PII di akhir tahun 2023 sebesar 5,8 kali.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 460 of 2022 on the Determination of the Gearing Ratio of Infrastructure Guarantee Agency in Conducting Guarantee Activities, it stipulated the limit of BUPI's ability, i.e., IIGF, in providing guarantee (*gearing ratio*) of a maximum of twelve (12) times of the BUPI's equity.

The gearing ratio is a ratio that compares the value of the guarantee exposure compared to the equity owned at a certain period to determine the level of utilization of the equity owned in the guarantee. Based on the total exposure for infrastructure project guarantees of Rp82.85 trillion, and with equity of Rp14.4 trillion, without taking into account the State Capital Injection (PMN) for the National Economic Recovery (PEN) program, IIGF's Gearing Ratio at the end of 2023 is 5.8 times.



Makna Logo Perusahaan

Corporate Logo Meaning

Logo PT PII disahkan pada tahun 2009 yang diciptakan dengan ide dasar merujuk pada kerajinan karya seni asli penduduk Indonesia, yaitu kerajinan anyaman yang merepresentasikan mandat PT PII untuk menjadi jembatan penggerak percepatan pembangunan infrastruktur.

IIGF's logo was ratified in 2009, which was created with the basic idea with reference to Indonesia's indigenous art crafts, i.e., woven crafts that represent IIGF's mandate to be the bridge to accelerate infrastructure development.



Makna Logo

Logo Meaning

Warna Biru pada logo mengandung makna

The Blue Color in the logo means

Trust (terpercaya), *responsibility* (tanggung jawab) dan *strength* (kekuatan). Warna tersebut merepresentasikan PT PII sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab dan profesional untuk mewujudkan visi PT PII menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Trust, responsibility, and strength. The color represents IIGF as a trusted, responsible, and professional company to actualize IIGF's vision to be the key driver of SOEs that actively accelerates sustainable infrastructure development to enhance the quality of life of Indonesians.

Warna Hijau pada logo mengandung makna

The Green Color in the logo means:

Growth (pertumbuhan), *financial* (keuangan), *harmony* (keseimbangan, keselarasan) dan *environment* (lingkungan; masyarakat). Warna tersebut sejalan dengan misi PT PII untuk memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

1. Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia;
2. Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel; dan
3. Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Growth, financial, harmony, and environment. The color is in line with IIGF's mission of ensuring the acceleration of the fulfillment of sustainable infrastructure development by providing guarantees and added value for infrastructure development that:

1. Has the greatest benefits for the people of Indonesia;
2. Protects the Government's interest in completing infrastructure development via a transparent and accountable process; and
3. Enhances the investors' trust by providing convenience in investing and certainty of payment for risks of loss in the form of claims in a cooperated infrastructure project.



Visi dan Misi Perusahaan

Corporate Vision and Mission

Visi dan Misi PT PII merupakan Visi dan Misi dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan periode 2023 – 2027 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penetapan visi dan misi tersebut merupakan hasil dari kajian yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris berkenaan dengan berakhirnya periode Rencana Jangka Panjang Perseroan sebelumnya dan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan periode berjalan sebagai bentuk evaluasi dan kesinambungan.

IIGF's Vision and Mission are the Vision and Mission in the Company's 2023–2027 Long-Term Plan, which was determined on 15 December 2022 at the General Meeting of Shareholders (GMS). The determination of the vision and mission is the result of a study by the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the end of the previous Company's Long-Term Plan period and the preparation of the Company's Long-Term Plan for the current period as a form of evaluation and continuity.

Visi Vision



Menjadi entitas penggerak yang terpercaya dalam mendukung upaya akselerasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan oleh Pemerintah melalui berbagai skema inovatif.

To be the trusted driving entity in supporting efforts to accelerate infrastructure and sustainable development by the Government via various innovative schemes.

Misi Mission



Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan dukungan lainnya melalui:

1. Menjalankan peran sebagai alat fiskal Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko dan proses yang transparan dan akuntabel;
2. Menyediakan *instrument de-risking*, penjaminan, dan fasilitasi pengelolaan risiko untuk mendukung investasi oleh badan usaha dan pemenuhan pembiayaannya secara berkelanjutan;
3. Berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem Pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial;
4. Memperkuat kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung tercapainya visi Perseroan.

To ensure the accelerated fulfillment of equitable and sustainable infrastructure development by providing guarantees and other support by:

1. Performing the role as the Government's fiscal tool in implementing sustainable development through transparent and accountable risk management and processes;
2. Providing *de-risking* instruments, guarantees, and risk management facilitation to support investment by business entities and the fulfillment of their financing in a sustainable manner;
3. Having an active role as part of the ecosystem of sustainable national development with due regard to environmental and social principles;
4. Strengthening the capabilities, organizational capacity, and quality of human resources to support the achievement of the Company's vision.

Selanjutnya, pembaharuan penjelasan Visi dan Misi Perseroan disosialisasikan kepada seluruh karyawan pada bulan Januari 2023. Visi dan Misi Perseroan di atas senantiasa dikaji secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan. Perumusan Visi dan Misi Perseroan dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan, serta memperhatikan kepentingan dari para Pemangku Kepentingan lainnya.

Further, the updated description of the Company's Vision and Mission was disseminated to all employees in January 2023. The Company's Vision and Mission are reviewed regularly to ensure that they are in line with the development of the Company's business environment. The formulation of the Company's Vision and Mission is conducted by involving all relevant parties, i.e., the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Employees, with due regards to the interests of other Stakeholders.



Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Value and Culture

PT PII telah memiliki tata nilai Perseroan yang dikenal sebagai **InTIME**, yakni *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust*, dan *Excellence* sebagai nilai-nilai utama yang membentuk Budaya Perseroan dan menjadi dasar pembentukan karakter talenta di lingkungan Perseroan. Tata nilai dan budaya Perseroan merupakan aspek fundamental yang wajib dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh jajaran di Perseroan dan diharapkan dapat menuntun Insan Perseroan untuk lebih optimal dan berjalan lebih terarah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

IIGF has a corporate value, known as **InTIME**, i.e., *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust*, and *Excellence*, as the main values that form the Company's Culture and become the basis for the character-building of talents within the Company. The Company's values and culture are fundamental aspects that must be adhered to and implemented by all Company personnel, and shall guide the Company's personnel to be more optimal and more assertive in carrying out their respective duties and responsibilities.



Penerapan Budaya Perusahaan Company Culture Implementation

Penerapan Tata Nilai dan Budaya Perusahaan di PT PII menjadi tanggung jawab seluruh insan PT PII, mulai dari jajaran Dewan Komisaris dan Direksi hingga karyawan. Tata Nilai dan Budaya senantiasa diinternalisasikan dan disosialisasikan, baik melalui kegiatan *Town Hall Meeting* maupun dalam kaitannya dengan sosialisasi Kebijakan Kode Etik Perseroan.

The implementation of Corporate Values and Culture at IIGF is the responsibility of all personnel, from the Board of Commissioners and Board of Directors, to its employees. Values and Culture are constantly internalized and socialized, through *Town Hall Meeting* and in relation to the dissemination of the Company's Code of Ethics Policy.



Wilayah Operasional Operational Areas

Wilayah operasional PT PII secara keseluruhan berada di wilayah Indonesia. Hingga akhir 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, kantor cabang dan kantor perwakilan. Seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan di kantor pusat Perseroan yang beralamat di:

IIGF operates within Indonesia's territory. As of 31 December 2023, the Company does not have subsidiaries, associates, branch offices, and representative offices. All Company's business activities are carried out at the Company's head office located at:



Capital Place, 7-8 Floor
Jl. Gatot Subroto No. Kav 18
RT.6/RW.1, Kuningan Barat
Kec. Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan 12710



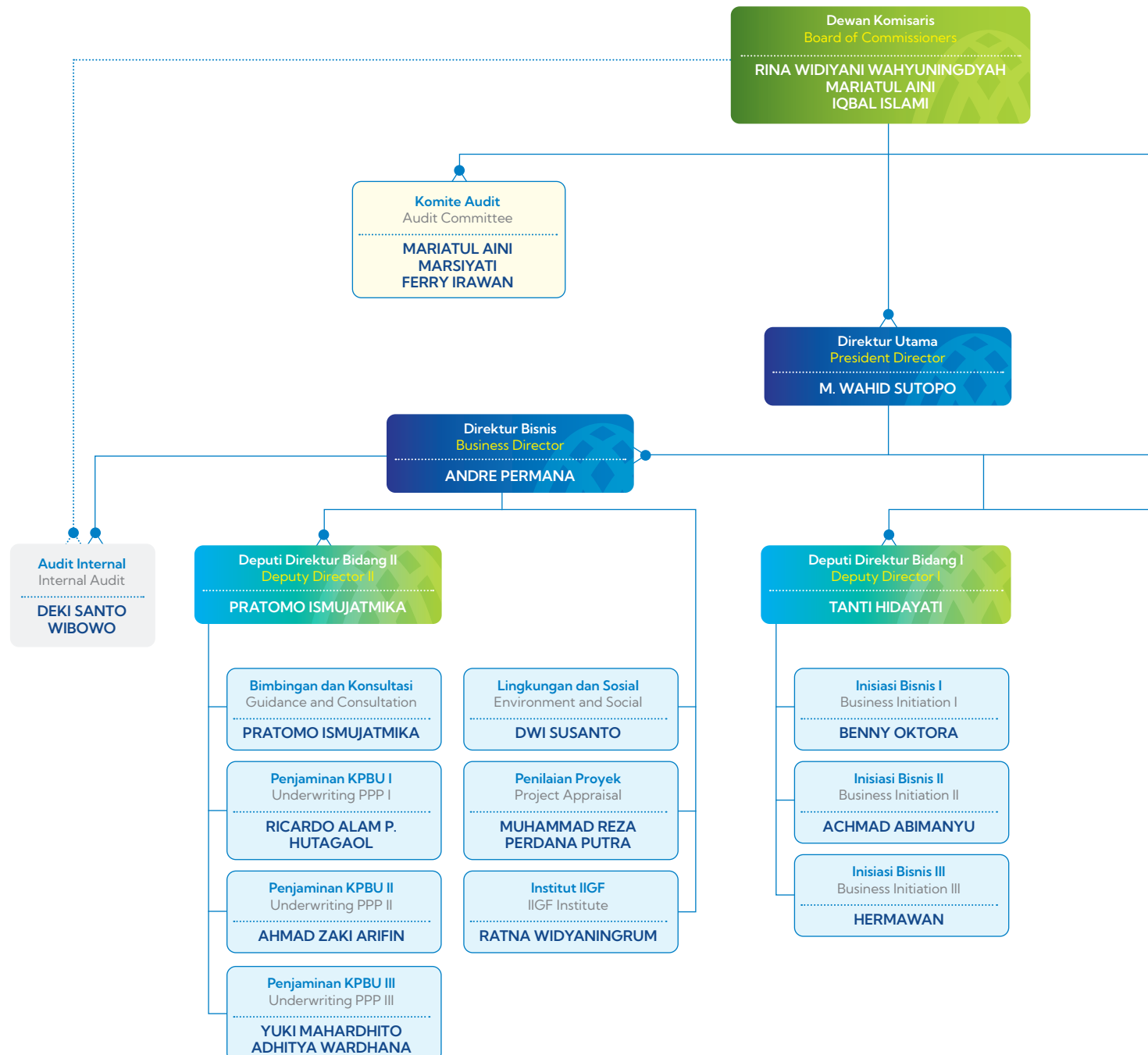


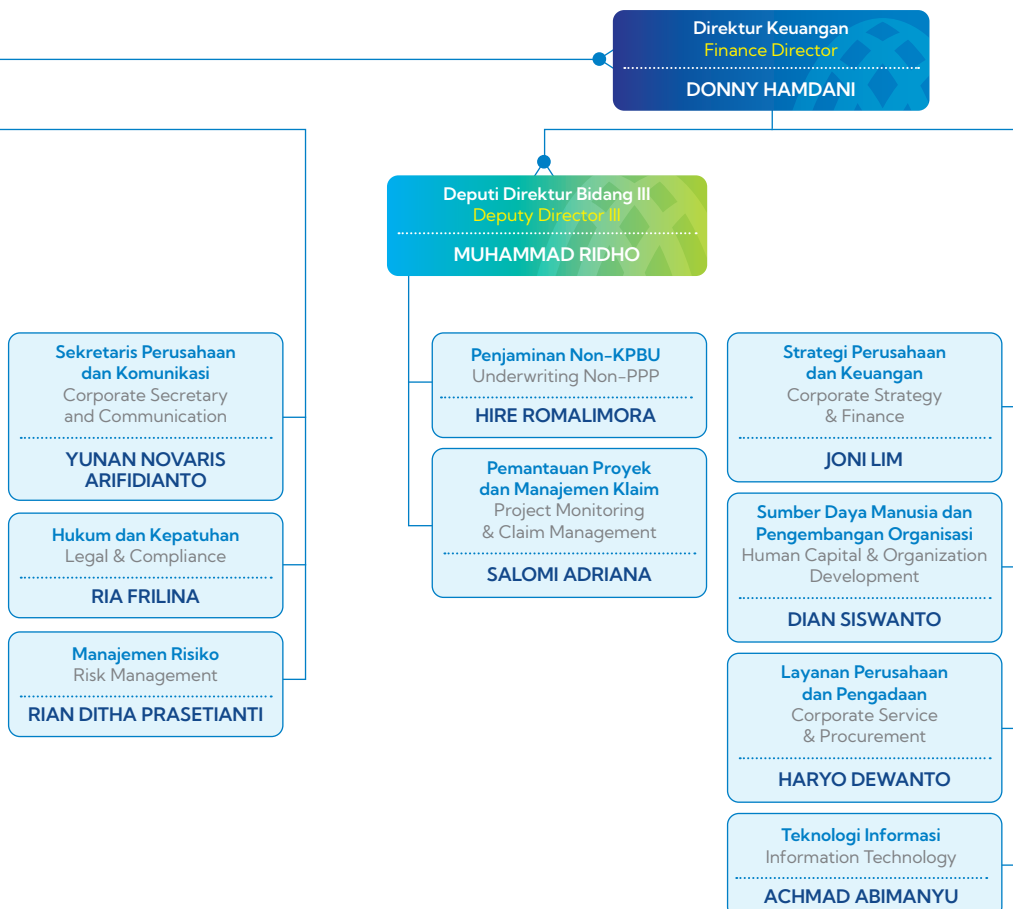
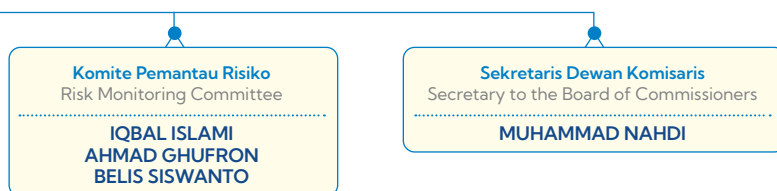
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi PT PII ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-004/PII-BOD/0322 tanggal 18 Maret 2022 tentang Struktur Organisasi Perseroan. Bagan struktur organisasi PT PII per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

IIGF's organizational structure is determined based on the Board of Directors' Decree No. SK-004/PII-BOD/0322 dated 18 March 2022 on the Company's Organizational Structure. IIGF's Organizational Structure as of 31 December 2023 is as follows.







Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Information on the Changes to the Membership of the Board of Commissioners and Board of Directors

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2023

Changes in the Composition of the Board of Commissioners in 2023

Pada tahun 2023, komposisi Dewan Komisaris PT PII mengalami perubahan sesuai Keputusan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Sdr. Iqbal Islami dan memberhentikan Sdr. Wahyu Utomo dikarenakan adanya penugasan Sdr. Wahyu Utomo sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Gas.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023, Perseroan mengangkat Sdri. Rina Widiyani Wahyuningdyah dan memberhentikan Sdr. Awan Nurmawan Nuh dikarenakan adanya penugasan Sdr. Awan Nurmawan Nuh sebagai Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berikut histori perubahan komposisi Dewan Komisaris PT PII selama tahun 2023:

In 2023, the composition of IIGF's Board of Commissioners changed in accordance with the Decree of the Minister of Finance as the General Meeting of Shareholders. Based on the Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated 31 January 2023, the General Meeting of Shareholders appointed Mr. Iqbal Islami, and dismissed Mr. Wahyu Utomo because he was appointed the President Commissioner of PT Pertamina Gas.

Further, based on the Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 216 of 2023 dated 19 June 2023, the Company appointed Mrs. Rina Widiyani Wahyuningdyah, and dismissed Mr. Awan Nurmawan Nuh because he was appointed a Commissioner of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The history of changes in the composition of IIGF's Board of Commissioners in 2023 is as follows:

Jabatan Position	Periode 1 Januari 2023 – 30 Januari 2023 Period 1 January 2023 – 30 January 2023	Periode 31 Januari 2023 – 18 Juni 2023 Period 31 January 2023 – 18 June 2023	Periode 19 Juni 2023 – 31 Desember 2023 Period 19 June 2023 – 31 December 2023
Komisaris Utama President Commissioner	Awan Nurmawan Nuh	Awan Nurmawan Nuh	Rina Widiyani Wahyuningdyah
Komisaris Commissioner	Mariatul Aini	Mariatul Aini	Mariatul Aini
Komisaris Commissioner	Wahyu Utomo	Iqbal Islami	Iqbal Islami



Perubahan Komposisi Direksi Tahun 2023

Changes in the Composition of the Board of Directors in 2023

Pada tahun 2023, tidak terdapat pengangkatan dan pemberhentian Direksi, sehingga tidak ada perubahan susunan maupun komposisi Direksi Perseroan. Berikut komposisi Direksi PT PII periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023:

In 2023, there was no appointment or dismissal of the Board of Directors. Thus, there was no change in the composition of the Company's Board of Directors. The composition of IIGF's Board of Directors for the period 1 January 2023–31 December 2023 is as follows:

Nama Nama	Jabatan Position
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director

Informasi Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Setelah Tahun Buku 2023

Information on Changes in the Board of Commissioners and Directors after the 2023 Fiscal Year

Tidak terdapat perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah tahun buku 2023 sampai dengan batas waktu penyusunan Laporan Tahunan.

There were no changes in the members of the Board of Commissioners and Board of Directors after the 2023 fiscal year, until the deadline for Annual Report's submission.



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profiles



Mariatul Aini
Komisaris
Commissioner

Rina Widiyanti Wahyuningdyah
Komisaris Utama
President Commissioner

Iqbal Islami
Komisaris
Commissioner



Rina Widiyani Wahyuningdyah
Komisaris Utama
President Commissioner



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	57 tahun per 31 Desember 2023 57 years old as of 31 December 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 28 Mei 1966 Jakarta, 28 May 1966
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	- Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro (1990) - Master of Science dengan kekhususan <i>Law and Economics</i>, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (1994)	- Bachelor of Law, Diponegoro University (1990) - Master of Science in Law and Economics, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA (1994)
Sertifikasi Certification	-	-
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum (2015–2021) dan Sekretaris Pengadilan Pajak (2013–2015) di Kementerian Keuangan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan (2021–sekarang)	She has served as Head of the Legal Bureau (2015–2021) and Secretary of the Tax Court (2013–2015) at the Ministry of Finance, and currently serves as Expert Staff for Legal and Institutional Relations (2021–present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023	The Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 216 of 2023 dated 19 June 2023
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 19 Juni 2023 sampai 18 Juni 2028	First term of office from 19 June 2023 to 18 June 2028
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Jabatan rangkap di dalam Perseroan: Tidak ada Jabatan rangkap di luar Perseroan: Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan di Kementerian Keuangan (2021–sekarang)	Concurrent positions in the Company: None. Concurrent positions outside the Company: Expert Staff for Legal and Institutional Relations at the Ministry of Finance (2021–present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan	She has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. She is affiliated with the Shareholders via her concurrent position at the Ministry of Finance.
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak ada	None



Mariatul Aini
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan
Citizenship

Indonesia

Usia
Age

60 tahun per 31 Desember 2023
60 years old as of 31 December 2023

Tempat & Tanggal Lahir
Place and Date of Birth

Jakarta, 11 Oktober 1963
Jakarta, 11 October 1963

Domisili
Domicile

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Central Jakarta, Special Capital Region
of Jakarta, Indonesia



Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Insinyur Bidang Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor (1987)
- *Master of Business Administration dari University of Wisconsin, Amerika Serikat (1994)*
- Engineer in Soil Science from Institut Pertanian Bogor (1987).
- *Master of Business Administration from the University of Wisconsin, the United States (1994).*

Sertifikasi
Certification

- Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Sertifikasi Pimpinan Proyek
- Procurement Certification
- Project Leader Certification

Riwayat Jabatan
Career History

Beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI antara lain sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (2011) dan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (2018). Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2021-1 November 2023).

She held various key positions in the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance, including as Director of Budgetary Regulation Harmonization (2011) and Director of Non-Tax State Revenue (2018). Currently, she serves as the Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance (2021-1 November 2023).

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Pertama kali diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/KMK.06/2018 tanggal 21 Desember 2018 untuk masa jabatan sampai dengan 31 Desember 2019. Selanjutnya diangkat kembali kedua kalinya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 720/KMK.06/2019 tanggal 6 September 2019 untuk masa jabatan sampai dengan 18 Agustus 2024.

Appointed for the first time pursuant to the Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 861/KMK.06/2018 dated 21 December 2018 for her term of office up to 31 December 2019. Further, appointed for the second time pursuant to the Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 720/KMK.06/2019 dated 6 September 2019 for her term of office up to 18 August 2024.

Periode Jabatan
Term of Office

Periode kedua dengan masa jabatan 19 Agustus 2019 sampai 18 Agustus 2024

Second term of office from 19 August 2019 to 18 August 2024.

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

Jabatan rangkap di dalam Perseroan:
Ketua Komite Audit

Jabatan rangkap di luar Perseroan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2021-1 November 2023)

Concurrent positions in the Company:
Chairman of Audit Committee.

Concurrent positions outside the Company:
Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance (2021-1 November 2023).

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan

She has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. She is affiliated with the Shareholders via her concurrent position at the Ministry of Finance.

Kepemilikan Saham
Shareholding

Tidak ada

None



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	60 tahun per 31 Desember 2023 60 years old as of 31 December 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 6 Desember 1963 Jakarta, 6 December 1963
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia



Riwayat Pendidikan Educational Background	- Diploma IV (D4) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991) - <i>Master (S2) of Business Administration</i> dalam bidang <i>finance</i> dari Case Western Reserve University, Ohio, Amerika Serikat (1994)	- Young Bachelor of Accounting from State College of Accountancy (1991). - Master of Business Administration in Finance from Case Western Reserve University, Ohio, the United States (1994).
Sertifikasi Certification	Akuntan Register Negara, Wakil Manajer Investasi, dan <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA).	State Registered Accountant, Investment Manager Representative, and Qualified Internal Auditor (QIA).
Pengalaman Kerja Career History	Sebelum mengakhiri tugasnya sebagai pegawai Kementerian Keuangan yaitu per 1 Januari 2024, Beliau terakhir bertugas sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan (2020 – 2023). Sebelumnya, Beliau menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP), Kementerian Keuangan (2016–2020). Sebelum diangkat sebagai Kepala Pusdiklat AP, Beliau bertugas sebagai Widyaiswara di BPPK pada periode 2011 – 2016. Selain itu, di bidang akademis, di awal karirnya Beliau pernah bertugas sebagai Asisten Dosen di STAN (1985 –1988) dan sebagai Dosen di STAN (1994 – 2011). Beliau juga memiliki keahlian di bidang Manajemen stratejik, Corporate Finance, Keuangan Negara, Corporate Governance, dan Manajemen Risiko, serta Learning and Development adalah bidang-bidang yang menjadi keahliannya.	Before finishing his tenure as an employee of the Ministry of Finance on 1 January 2024, he last served as the Secretary of the Financial Education and Training Agency (BPPK), Ministry of Finance (2020 – 2023). Previously, he served as the Head of Budget and Treasury (AP) Training Center, Ministry of Finance (2016–2020). Prior to his appointment as Head of Budget and Treasury Training Center, he served as a Civil Servant at BPPK from 2011–2016. In addition, in the academic field, at the beginning of his career he was a Lecturer Assistant at STAN (1985–1988) and a Lecturer at STAN (1994–2011). His area of expertise includes Strategic Management, Corporate Finance, Public Finance, Corporate Governance, and Risk Management, and Learning and Development.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023	Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated 31 January 2023
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 31 Januari 2023 sampai 30 Januari 2028	First term of office from 31 January 2023 to 30 January 2028
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Jabatan rangkap di dalam Perseroan: Ketua Komite Pemantau Risiko Jabatan rangkap di luar Perseroan: Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan (2020–2023)	Concurrent positions in the Company: Chairman of Risk Monitoring Committee Concurrent positions outside the Company: Secretary of the Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance (2020–2023)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan Direksi. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham melalui rangkap jabatan di Kementerian Keuangan	He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. He is affiliated with the Shareholders via his concurrent position at the Ministry of Finance
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak ada	None

Pernyataan independensi dan pelatihan Dewan Komisaris Perseroan disajikan terpisah dan diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

The Independence Statement and Training of the Company's Board of Commissioners is presented separately and described in the Chapter Corporate Governance, a sub-chapter of the Board of Commissioners, in this Annual Report.



Profil Direksi

Board of Directors' Profiles



Andre Permana
Direktur Bisnis
Business Director

Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama
President Director

Donny Hamdani
Direktur Keuangan
Finance Director



Muhammad Wahid Sutopo

Direktur Utama
President Director



Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia

Usia Age

54 tahun per 31 Desember 2023
54 years old as of 31 December 2023

Tempat & Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Jakarta, 17 Juni 1969
Jakarta, 17 June 1969

Domisili Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background

- Sarjana Teknik jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1993)
- Magister Manajemen dari International Business IPMI (program bersama dengan Monash University), Jakarta (2002)

- Bachelor of Electric Engineering from Institut Teknologi Bandung (1993).
- Master of Management from International Business IPMI (collaboration with Monash University), Jakarta (2002).

Sertifikasi Certification

Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure

Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure

Pengalaman Kerja Career History

Beliau pernah menjabat berbagai posisi kunci antara lain sebagai Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011–2017), Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011–2017), Komisaris Utama PT PGN ING Indonesia (2015–2016) dan Direktur Eksekutif Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017–2019) sebelum diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Held various key positions, including the Director of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011–2017), President Commissioner of PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011–2017), President Commissioner of PT PGN ING Indonesia (2015–2016), and Executive Director of Business of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (2017–2019), prior to being appointed as President Director of the Company.

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019 tanggal 29 November 2019. Selanjutnya diangkat kembali kedua kalinya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 340/KMK.06/2022 tanggal 22 Agustus 2022

Appointed for the first time pursuant to the Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019 dated 29 November 2019. Further, appointed for the second time pursuant to the Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 340/KMK.06/2022 dated 22 August 2022.

Periode Jabatan Term of Office

Periode kedua dengan masa jabatan 4 Desember 2022 sampai 3 Desember 2027

Second term of office from 4 December 2022 to 3 December 2027.

Rangkap Jabatan Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan

Has no concurrent positions internally or externally.

Hubungan Afiliasi Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or the Company's Shareholders.

Kepemilikan Saham Shareholding

Memiliki kepemilikan saham pribadi sebanyak 10.000 lembar saham pada PT Indosat Tbk dan 10.000 lembar saham pada PT Ameda Sigma Integra

Has personal share ownership of 10,000 shares in PT Indosat Tbk and 10,000 shares in PT Ameda Sigma Integra



Andre Permana
Direktur Bisnis
Business Director

Kewarganegaraan
Citizenship

Indonesia

Usia
Age

47 tahun per 31 Desember 2023
47 years old as of 31 December 2023

Tempat & Tanggal Lahir
Place and Date of Birth

Cirebon, 31 Januari 1976
Cirebon, 31 January 1976

Domisili
Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia



Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Indonesia (1998)
- Magister Teknik bidang Manajemen Proyek dari Universitas Indonesia (2003)
- *Doctor of Philosophy* bidang *Risk Management, Project Finance* dari Nanyang Technological University, Singapura (2012)

- Bachelor of Civil Engineering from University of Indonesia (1998)
- Master of Project Management Engineering from the University of Indonesia (2003)
- Doctor of Philosophy of Risk Management, Project Finance, from Nanyang Technological University, Singapore (2012)

Sertifikasi
Certification

- *Certified CP3P Level Foundation*
- *Accredited Trainer CP3P Level Foundation*
- Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)

- Certified CP3P Level Foundation
- Accredited Trainer CP3P Level Foundation
- Civil Engineering Junior Expert (Construction Services Development Institute)

Pengalaman Kerja
Career History

Sebelum diangkat menjadi Direktur Bisnis Perseroan, karier profesional beliau di Perseroan dimulai pada tahun 2010 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Divisi Risk and Compliance (2010–2016), Kepala Divisi Business Development (2017), dan terakhir kali menjabat sebagai Executive Vice President Project Appraisal (2017–2020). Dosen Tidak Tetap, Program S2 Magister Teknik, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (2014–sekarang)

Prior to being appointed as the Company's Business Director, his professional career in the Company began in 2010 and he held various strategic positions, including as Head of Risk and Compliance Division (2010–2016), Head of the Business Development Division (2017), and most recently as Executive Vice President Project Appraisal (2017–2020). Non-permanent Lecturer, Master of Engineering Program, Faculty of Engineering University of Indonesia (2014 – present)

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 tanggal 23 Maret 2020

Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020 dated 23 March 2020

Periode Jabatan
Term of Office

Periode pertama dengan masa jabatan 23 Maret 2020 sampai 22 Maret 2025

First term of office from 23 March 2020 to 22 March 2025

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan

Has no concurrent positions internally or externally

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan

He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or the Company's Shareholders

Kepemilikan Saham
Shareholding

Tidak ada

None



Donny Hamdani
Direktur Keuangan
Finance Director



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Age	45 tahun per 31 Desember 2023 45 years old as of 31 December 2023
Tempat & Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 23 September 1978 Jakarta, 23 September 1978
Domisili Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000)	Bachelor of Accounting from the University of Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	-	-
Pengalaman Kerja Career History	Beliau merintis karier sebagai auditor selama 11 tahun di KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (Pricewaterhousecoopers) tahun 2001-2012. Kemudian beliau bergabung pertama kali dengan Perseroan pada tahun 2012 dan pernah menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Executive Vice President Corporate Strategy and Finance (2017-2018) dan terakhir kali menjabat sebagai Deputy Direktur Keuangan (2018-2022) sebelum diangkat sebagai Direktur.	He started his career as an auditor for 11 years at KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) in 2001-2012. He first joined the Company in 2012 and held various strategic positions, including Executive Vice President of Corporate Strategy and Finance (2017-2018) and most recently as Deputy Director of Finance (2018-2022) prior to his appointment as Director.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 tanggal 17 Januari 2022	Decree of the Minister of Finance (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022 dated 17 January 2022
Periode Jabatan Term of Office	Periode pertama dengan masa jabatan 17 Januari 2022 sampai 16 Januari 2027	First term of office from 17 January 2022 to 16 January 2027
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak memiliki rangkap jabatan baik di dalam Perseroan maupun di luar Perseroan	Has no concurrent positions internally or externally
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya maupun dengan Pemegang Saham Perseroan	He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or the Company's Shareholders
Kepemilikan Saham Shareholding	Tidak ada	None

Pernyataan independensi dan pelatihan Direksi Perseroan disajikan terpisah dan diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

The Independence Statement and Training of the Company's Board of Directors is presented separately and described in the Chapter Corporate Governance, a sub-chapter of the Board of Commissioners, in this Annual Report.



Profil Deputy Direktur Deputy Director's Profile

Tanti Hidayati
Deputi Direktur Bidang I
Deputy Director I



Warga Negara Indonesia.
Saat ini berusia 51 tahun. Berdomisili di Depok,
Jawa Barat, Indonesia.
Indonesian citizen.
Currently, 51 years old. Domiciled in Depok,
West Java, Indonesia.

Latar Belakang Pendidikan:
Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1995).

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang I berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No. SK-014/DIR/HC/0322.

Educational Background:
Bachelor of Agribusiness from Institut Pertanian Bogor
(1995).

Appointed as Deputy Director I pursuant to Decree of
the Board of Directors No. SK-014/DIR/HC/0322.

Pratomo Ismujatmika
Deputi Direktur Bidang II
Deputy Director II



Warga Negara Indonesia.
Saat ini berusia 48 tahun. Berdomisili di Jakarta
Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
Indonesian citizen.
Currently, 48 years old. Domiciled in East Jakarta,
Special Capital Region of Jakarta, Indonesia

Latar Belakang Pendidikan:
– Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi
Sepuluh Nopember (1999)
– Magister Manajemen (Keuangan) dari Universitas
Gadjah Mada (2003)
– Master of Business Administration dari Sullivan
University (2005)
– Doktor Ilmu Manajemen (Kandidat) dari Universitas
Padjajaran (2021 – sekarang).

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang II berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No. SK-030/DIR/HC/0922.

Educational Background:
– Bachelor of Architecture Engineering from Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (1999)
– Master of Management (Finance) from University of
Gadjah Mada (2003)
– Master of Business Administration from Sullivan
University (2005)
– Doctor of Management Science (Candidate) from
Padjajaran University (2021–present).

Appointed as Deputy Director II pursuant to Decree of
the Board of Directors No. SK-030/DIR/HC/0922.



Muhammad Ridho

Deputi Direktur Bidang III

Deputy Director III



Warga Negara Indonesia.

Saat ini berusia 47 tahun. Berdomisili di Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

Indonesian citizen.

Currently, 47 years old. Domiciled in South Tangerang, Banten, Indonesia

Latar Belakang Pendidikan:

- Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Diponegoro (1998)
- Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2003)
- Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2005)
- Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2008), Graduated in 2010.

Diangkat sebagai Deputi Direktur Bidang III berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-030/DIR/HC/0922.

Educational Background:

- Bachelor of Engineering in Urban and Regional Planning from Diponegoro University (1998)
- Research Student, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2003)
- Master of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2005)
- Doctor of Engineering, Urban and Environmental Engineering, Kyushu University (2008), Graduated in 2010.

Appointed as Deputy Director III pursuant to Decree of the Board of Directors No. SK-030/DIR/HC/0922.



Demografi Karyawan Employee Demographics

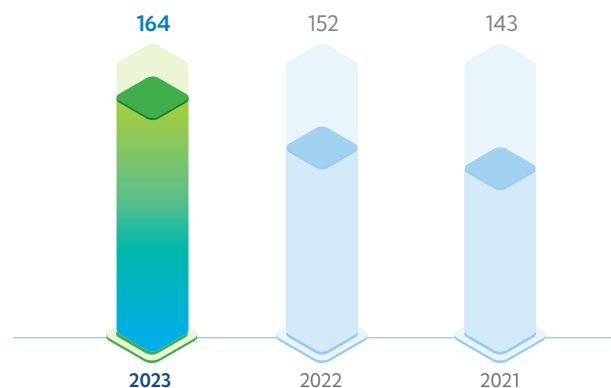
Hingga akhir tahun 2023, jumlah karyawan PT PII mengalami peningkatan sebesar 8%, yaitu dari 152 orang di tahun 2022 menjadi 164 orang di tahun 2023, sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan. Komposisi karyawan saat ini telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perseroan, baik secara kuantitas maupun kualitas kompetensinya.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan komposisi karyawan selama tiga tahun terakhir berdasarkan status kepegawaian, level organisasi, jenjang jabatan, jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

As of the end of 2023, IIGF's employees increased by 8%, from 152 people in 2022 to 164 people in 2023, in line with the Company's business development. The current employee composition has been adjusted to the Company's organizational needs, both in terms of quantity and quality of competence.

The tables below depict the composition of employees over the past three years by employment status, organizational level, job title, gender, age, and education level.

Jumlah Karyawan PT PII Tahun 2021-2023
IIGF's Employees in 2021-2023



Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2023	2022	2021	
Tetap Permanent	149	136	131	13
Tidak Tetap Contract Employee	15	16	12	(1)
Jumlah Total	164	152	143	12



Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi Employee Composition by Organizational Level

Level Organisasi Organizational Level	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2023	2022	2021	
Deputy Director	3	3	2	0
Executive leader (EVP)	4	2	4	2
Senior leader (VP-SVP)	36	30	30	6
Middle level (M-AVP)	60	59	50	1
Staff (Staff-AM)	61	58	57	3
Jumlah Total	164	152	143	12

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Employee Composition by Position

Level Jabatan Position Level	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2023	2022	2021	
EVP	7	5	6	2
VP-SVP	36	30	30	6
DSM-AVP	34	30	25	4
AM-M	61	58	55	3
Staff	26	29	27	(3)
Jumlah Total	164	152	143	12

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2023	2022	2021	
Laki-laki Male	88	81	79	7
Perempuan Female	76	71	64	5
Jumlah Total	164	152	143	12



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia Employee Composition by Age

Usia Age	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2023	2022	2021	
41 – 56 Tahun years old	42	36	31	6
31 – 40 Tahun years old	83	74	75	9
20 – 30 Tahun years old	39	42	37	(3)
Jumlah Total	164	152	143	12

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	Tahun Year			Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2023	2022	2021	
Doktoral Doctorate	2	2	3	0
Pasca Sarjana Master	61	51	50	10
Sarjana Bachelor	97	94	85	3
Diploma	4	5	5	-1
Jumlah Total	164	152	143	12

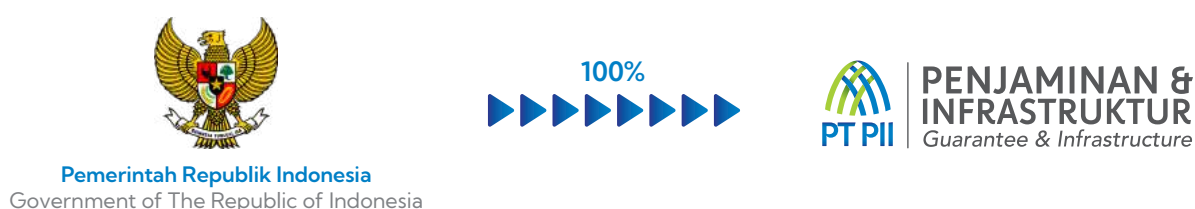


Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Structure and Composition of Shareholders

PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh saham (100%) Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jumlah saham sebanyak 10.655.000 lembar saham.

IIGF is a State-Owned Enterprise (SOE) under the guidance and supervision of the Minister of Finance. As of 31 December 2023, all Company's shares (100%) are owned by the Government of the Republic of Indonesia c.q Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, with a total of 10,655,000 shares.



Dengan kepemilikan saham mencapai 100%, Negara Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham Utama dan Pengendali PT PII serta satu-satunya pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%, sehingga tidak terdapat pemegang saham lainnya dengan kepemilikan di bawah 5%.

With 100% share ownership, the Republic of Indonesia is the Main and Controlling Shareholder of IIGF, and the only shareholder with ownership above 5%. Therefore, there are no other shareholders with ownership below 5%.

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Shareholdings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

As of 31 December 2023, none of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors own shares of the Company, either directly or indirectly.



Struktur Grup/Kelompok Usaha serta Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/*Special Purpose Vehicle*

Structure of the Group/Business Group and its Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures/*Special Purpose Vehicles*

Sampai dengan 31 Desember 2023, PT PII tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, entitas Pengendalian Bersama, perusahaan patungan atau *Joint Venture Company* (JV), maupun *Special Purpose Vehicle* (SPV).

As of 31 December 2023, IIGF does not have any subsidiaries, associates, Joint Control entities, Joint Venture Companies (JV), or *Special Purpose Vehicles* (SPV).

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015
Alamat Address	Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 29 RT. 4/RW. 2, Kuningan, Karet Setiabudi, Indonesia 12920	Jl. Jenderal Sudirman No. Kav 29 RT. 4/RW. 2, Kuningan, Karet Setiabudi, Indonesia 12920
Nama Akuntan Publik Public Accountant's Name	Jimmy Pangestu, S.E. Izin Praktik Akuntan Publik No. AP.1124	Jimmy Pangestu, S.E. Public Accountant License No. AP.1124
Periode Penugasan KAP KAP Tenure Period	Periode ke-6, Tahun Buku 2018-2023	The 6 th Period, Fiscal Year 2018-2023
Periode penugasan Akuntan Publik Tenure Period Public Accountant's	Periode ke-3, Tahun Buku 2021-2023	The 3 th Period, Fiscal Year 2021-2023
Jasa yang diberikan Service provided	Jasa Audit: Jasa audit laporan keuangan dan jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan <i>internal control</i> (PSA 62) Jasa Lainnya: Jasa Perikatan Asuransi atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris	Audit Services: Financial statement audit services and regulatory compliance and internal control audit services (PSA 62) Other Services: Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners
Biaya Fee	Rp1.055.000.000	Rp1.055.000.000



Lembaga Profesi Penunjang Perseroan

Company's Supporting Institutions

Kantor Notaris

Notary Office

Nama Name	Arry Supratno, S.H.	Arry Supratno, S.H.
Alamat Address	Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat, Jakarta 10210	Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat, Jakarta 10210
Jasa yang diberikan Service provided	1. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS) atas Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PII (31 Januari 2023); 2. Berita Acara RUPS atas Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022; 3. PKPS atas Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PII (19 Juni 2023); 4. Berita Acara RUPS atas Persetujuan RKAP Tahun Buku 2024.	1. Statement of Shareholders' Resolution (SSR) on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of IIGF (January 31, 2023); 2. Minutes of the GMS on the Approval of the Annual Report for the Fiscal Year 2022; 3. SSR on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of IIGF (June 19, 2023); 4. Minutes of the GMS on the Approval of the RKAP for the Fiscal Year 2024.
Periode Penugasan Tenure Period	Tahun 2023	2023

Nama Name	Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn.	Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn.
Alamat Address	Kebun Jeruk Business Park Blok C1-18, Jl Meruya Ilir Raya Kav. 88, Jakarta Barat 11620	Kebun Jeruk Business Park Blok C1-18, Jl Meruya Ilir Raya Kav. 88, Jakarta Barat 11620
Jasa yang diberikan Service provided	Penyusunan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PII atas Persetujuan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	Formulation of Notarial Deed of Statement of Shareholders' Resolution of IIGF on the Approval of the Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into Share Capital and Amendment to the Company's Articles of Association.
Periode Penugasan Tenure Period	Tahun 2023	2023

Biro Administrasi Publik

Bureau of Public Administration

Per 31 Desember 2023, PT PII tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Biro Administrasi Publik.

As of 31 December 2023, IIGF does not issue shares on any Stock Exchange. Thus, there is no information on the Public Administration Bureau.

Perusahaan Pemeringkat Efek

Securities Rating Company

Per 31 Desember 2023, PT PII tidak menerbitkan saham di Bursa Efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek.

As of 31 December 2023, IIGF does not issue shares on any Stock Exchange. Thus, there is no information on the Securities Rating Company.



Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sampai dengan 31 Desember 2023 PT PII tidak menerbitkan saham kepada publik. Dengan demikian pada Laporan Tahunan ini, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (*corporate action*), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

All of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, as of 31 December 2023, IIGF did not issue any shares to the public. Therefore, in this Annual Report, the Company does not present information on the chronology of listing, types of corporate actions, changes in the number of shares, or the name of the exchange.





Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi/Efek Lainnya

Chronology of Bonds/Securities Issuance and/or Listing

Sampai dengan 31 Desember 2023, PT PII tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak mencatatkan sahamnya di bursa efek mana pun, serta belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apa pun yang diperdagangkan di bursa mana pun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.

As of 31 December 2023, IIGF did not execute public offering of shares and did not list its shares on any stock exchange, and has never issued securities in any form traded on any exchange. Therefore, there is no information regarding the chronology of issuance and/or listing of other securities from the beginning of the issuance until the end of the fiscal year.

Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

Hingga tanggal 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki keanggotaan dalam asosiasi industri manapun.

As of 31 December 2023, the Company did not participate in any industry association.





Informasi Pada Situs Website Perseroan Information on the Company's Website

Publikasi informasi dan data Perseroan pada situs website PT PII dirancang sebagai bentuk transparansi bagi publik yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan.

The publication of the Company's information and data on IIGF's website is designed as a form of transparency for the public with the objective to enhance shareholders' confidence and establish stronger relationships with stakeholders.

PT PII menyediakan berbagai informasi dan data terkait Perseroan yang dapat diakses oleh publik melalui situs website Perseroan yang beralamat di www.ptpii.co.id. Situs web resmi PT PII menyajikan informasi dalam dua Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang mencakup informasi terkait Pemegang Saham, Kode Etik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Laporan Tahunan, Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Satuan Pengawasan Internal.

IIGF provides various Company's information and data accessible by the public at the Company's website, www.ptpii.co.id. IIGF's official website presents information in two languages, i.e., Indonesian and English, which includes information related to Shareholders, Code of Conduct, General Meeting of Shareholders (GMS), Annual Report, Profiles of the Board of Commissioners and Directors, as well as Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.



Dalam situs web PT PII terdapat 10 bagian utama yang telah diungkapkan pada situs web Perseroan, yaitu:

1. Tentang Kami
2. Tata Kelola Perusahaan
3. Pelaporan Pelanggaran
4. Produk
5. Berita
6. e-Procurement
7. Proyek
8. Manajemen Risiko
9. Keberlanjutan
10. IIGF Institute

IIGF's website has 10 main sections, disclosed on the Company's website:

1. About Us
2. Good Corporate Governance
3. Whistleblowing
4. Product
5. News
6. e-Procurement
7. Projects
8. Risk Management
9. Sustainability
10. IIGF Institute

Berikut tabel pemenuhan informasi pada situs Perseroan sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2015.

The following is a table of information fulfillment on the Company's website in accordance with POJK No. 8/POJK.04/2015.

Muatan Content	Ketersediaan Availability	Keterangan Description
Struktur grup Perseroan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Company's group structure and shareholders' information down to individual final owners	√	Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available, at the "About IIGF" menu
Isi Kode Etik Code of Conducts	√	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan" Available, at the "Company's Manual" menu
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covers the agenda discussed in the GMS, Minutes of GMS, and important dates, i.e. announcement of GMS date, summoning date for GMS, date of GMS, date of announcement for Minutes of GMS	√	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi" Available, at the "News and Publication" menu
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) Annual financial statements (the last 5 years)	√	Ada, terdapat pada menu "Berita dan Publikasi" Available, at the "News and Publication" menu
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors.	√	Ada, terdapat pada menu "Tentang PT PII" Available, at the "About IIGF" menu
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	√	Ada, terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan" Available, at the "Company's Manual" menu

√ = tersedia pada situs Perseroan
x = belum tersedia pada situs web Perseroan

√ = available at the Company's website
x = not available at the Company's website





Aspek Pendukung Bisnis

Business Support Aspects





Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resources Management

Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen utama dalam mendukung tercapainya tujuan Perseroan dan mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan. Dengan latar belakang ini, PT PII secara berkelanjutan mengelola SDM secara fokus demi memperoleh SDM yang andal dan kompetitif untuk memaksimalkan kontribusinya kepada Perseroan.

The Company is fully aware that Human Resources (HR) is one of the main elements in supporting the achievement of the Company's objectives and realizing the vision and mission, as well as the planned sustainable working program. With this background, IIGF manages HR in a focused manner to obtain reliable and competitive HR to maximize their contribution to the Company.

Fungsi Pengelola SDM

HR Management Function

Perseroan memberikan komitmen dan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan SDM Perseroan dan memastikan pengelolaan SDM dijalankan dengan fokus yang baik agar dapat mendukung tercapainya tujuan Perseroan.

The Company commits to and cares for the management of the Company's human resources and ensures that HR management is carried out with a good focus to support the achievement of the Company's objectives.

Untuk itu, Perseroan membentuk Divisi Human Capital and Organization Development, sebuah divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan SDM Perseroan. Divisi Human Capital and Organization Development dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan.

Therefore, the Company established the Human Capital and Organization Development Division, a division responsible for the management and development of the Company's human resources. The Human Capital and Organization Development Division is chaired by a Head of Division who is responsible to the Finance Director.

Adapun tugas, tanggung jawab, peran dan lingkup Divisi Human Capital and Organization Development secara garis besar antara lain:

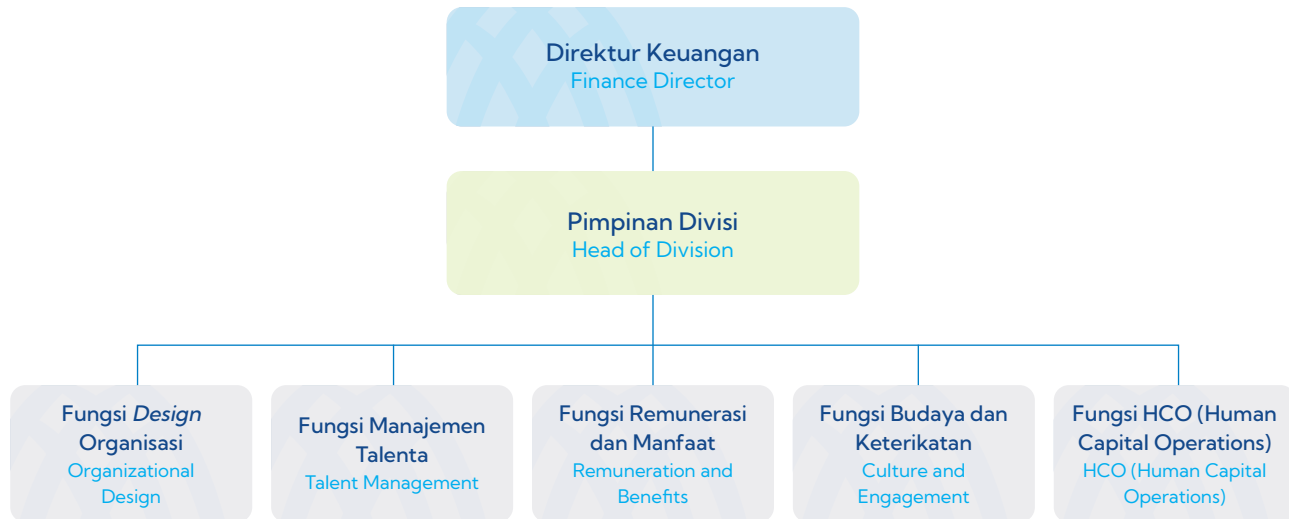
In general, the duties, responsibilities, roles, and scope of the Human Capital and Organization Development Division include:

1. Memastikan pengembangan struktur organisasi sesuai visi, misi, dan strategi Perseroan.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perseroan melalui proses seleksi dan rekrutmen SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, pendekatan terkini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan Perseroan maupun individu karyawan.
4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang terstruktur, objektif, dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi.
5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip *internally fair and externally competitive*.
6. Menginternalisasi budaya Perseroan sesuai dengan nilai Perseroan.
7. Memastikan uraian tugas, spesifikasi pekerjaan, dan pengklasifikasian pekerjaan tersedia dalam menunjang tugas dan tanggung jawab karyawan.
8. Memastikan data dan informasi karyawan yang akurat dan termutakhir.
9. Berkontribusi aktif dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja.

1. Ensuring the development of the organizational structure in accordance with the Company's vision, mission, and strategy.
2. Ensuring the fulfillment of the Company's HR needs by means of HR selection and recruitment process that are in accordance with established procedures, updated approaches, and prevailing laws and regulations.
3. Ensuring the effectiveness of the development programs based on the organizational strategic direction so that competency development programs shall fulfill the Company's and the individual's needs.
4. Ensuring the implementation of a structured, objective, and fair performance assessment system in all working units in the organization.
5. Ensuring the compensation and benefits system that is based on internally fair and externally competitive principles.
6. Internalizing the Company's culture in accordance with the Company's values.
7. Ensuring job descriptions, specifications, and classifications are available to support employees' duties and responsibilities.
8. Ensuring accurate and up-to-date employee data and information.
9. Actively contributing to increasing work unit optimization and productivity.



Struktur Organisasi Divisi Human Capital and Organization Development Organizational Structure of the Human Capital and Organization Development Division



Dalam pengelolaan kegiatan *Human Capital* terdapat 5 (lima) elemen penting yang dapat mendukung kinerja bisnis dan operasional Perseroan secara menyeluruh, yaitu:

In managing Human Capital activities, there are five (5) important elements that can support the Company's business and operational performance:

Desain Organisasi (*Organization Design*) Organization Design

Perseroan membentuk desain organisasi yang efektif untuk mengakomodir peningkatan efektifitas dan fleksibilitas pekerjaan. Desain organisasi merupakan sebuah proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi sesuai strategi dan lingkungan Perseroan. Desain organisasi yang efektif didukung dengan uraian tugas (*Job Description*), spesifikasi jabatan (*Job Specification*), tingkat pekerjaan (*Job Grading*) dan dokumentasi proses bisnis yang baik sehingga Perseroan dapat memastikan Karyawan bekerja dalam landasan yang sama untuk mencapai tujuan yang disepakati.

The Company has established an effective organizational design to accommodate increased work effectiveness and flexibility. Organizational design is a process of developing relationships and creating structures to achieve organizational objective, in accordance with the Company's strategy and environment. Effective organizational design is supported by job descriptions, job specifications, job grading, and good business process. Thus, the Company can ensure that employees work on the same basis to achieve the agreed objectives.

Manajemen Talenta (*Talent Management*) Talent Management

Manajemen talenta dalam Perseroan dilakukan untuk mengelola Karyawan dari awal bergabung hingga pengembangan kariernya, dengan cakupan sebagai berikut:

- Rekrutmen dan penempatan Karyawan;
- Pelatihan dan pengembangan Karyawan;
- Pengelolaan kinerja Karyawan; dan
- Pengembangan karier Karyawan.

The Company carried out talent management by managing the employees, from the moment they are onboard up to their career development, with the following scope:

- Employee recruitment and placement;
- Employee training and development;
- Employee performance management; and
- Employee career development.



Remunerasi dan Manfaat (*Remuneration and Benefit*)

Remuneration and Benefit

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, maka Perseroan perlu memberikan kompensasi dan manfaat berupa tunjangan yang layak kepada karyawannya. Hal ini dilakukan untuk mendorong daya saing Perseroan, menyelaraskan sasaran kerja individu/kelompok dengan sasaran Perseroan dan memperkuat *ownership* Karyawan terhadap Perseroan.

The Company needs to provide compensation and benefits in the form of adequate allowances to its employees to maintain and improve the quality of its human resources. This is carried out to encourage the Company's competitiveness, align individual/group work targets with the Company's targets, and strengthen employees' ownership of the Company.

Budaya dan Keterikatan (*Culture and Engagement*)

Culture and Engagement

Dalam rangka meningkatkan *engagement* Karyawan dan mengelola perubahan secara berkelanjutan, maka Perseroan menempatkan budaya organisasi sebagai fokus utama yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan suatu organisasi. Perseroan dengan budaya perusahaan efektif dapat menciptakan peningkatan produktivitas, meningkatkan *ownership* dari Karyawan dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan dan sasaran Perseroan.

The Company prioritizes organizational culture as the main focus that can be linked to the success of an organization to increase employee engagement and manage change in a sustainable manner. A company with an effective corporate culture can create increased productivity, increase employee ownership, and ultimately achieve the Company's goals and objectives.

Human Capital Operations (HCO)

Human Capital Operations (HCO)

Perseroan perlu memastikan pelaksanaan operasional berjalan secara efektif dan efisien sehingga peran *Human Capital* dalam menunjang pelaksanaan operasional menjadi salah satu elemen yang cukup penting. Elemen ini mencakup antara lain pengelolaan database karyawan dan proses bisnis, pengelolaan dokumen administrasi, pengelolaan komunikasi dan pemantauan tugas serta pekerjaan.

The Company needs to ensure that operations runs effectively and efficiently. Thus, the role of Human Capital in supporting operations becomes a fairly important element. This element includes, among other things, managing employee databases and business processes, managing administrative documents, managing communications, and monitoring tasks and work.

Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Human Resources Governance

Dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis di masa depan dan dinamika yang bergerak begitu cepat, Perseroan tentu membutuhkan bibit-bibit talenta unggul yang senantiasa dapat diandalkan untuk mendukung kemajuan organisasi. Adapun Tata Kelola SDM yang dilaksanakan Perseroan meliputi 5 (lima) elemen penting yaitu desain organisasi, manajemen talenta, remunerasi dan manfaat, budaya dan keterikatan serta operasional *Human Capital*. Selain itu, bekerja sama dengan fungsi General Affair, Human Capital juga turut serta melakukan praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perseroan. Kebijakan pengelolaan SDM Perseroan telah diatur dalam Kebijakan Pengelolaan Kegiatan *Human Capital* No. HCOD.002/KEB/V.01/2023 tahun 2023.

In facing various business challenges in the future with fast-moving dynamics, the Company needs superior talent who can always be relied on to support the organization's advancement. The HR Governance implemented by the Company includes five (5) important elements, i.e., organizational design, talent management, remuneration and benefits, culture and engagement, as well as Human Capital operations. In addition, Human Capital also participates in carrying out Occupational Health and Safety (OHS) practices in the Company, in collaboration with the general affairs. The Company's HR management policy is stipulated in the Human Capital Management Policy No. HCOD.002/KEB/V.01/2023 of 2023.



Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Recruitment Policy and Implementation

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan strategi organisasi. Dalam konteks global yang terus berubah dan kompetitif, pengelolaan SDM tidak hanya tentang merekrut karyawan yang tepat untuk posisi yang tepat, tetapi juga tentang memahami tren pasar tenaga kerja, menghadapi tantangan teknologi, dan membangun budaya kerja yang inklusif dan inovatif. Oleh karena itu, rekrutmen menjadi salah satu aspek yang krusial dalam manajemen SDM di berbagai organisasi. Dalam era yang semakin kompetitif dan dinamis, kemampuan untuk menarik, memilih, dan mempertahankan talenta menjadi kunci keberhasilan organisasi.

Kegiatan seleksi karyawan pada proses rekrutmen di Perseroan senantiasa dilakukan secara transparan dan terbuka bagi siapa pun tanpa adanya diskriminasi terhadap gender, suku, agama, ras dan golongan tertentu, sepanjang kandidat yang bersangkutan memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Tahapan ini menjadi penting dalam hal pengelolaan SDM karena pada proses inilah Perseroan mendapatkan kandidat yang sesuai dengan budaya dan tujuan strategis yang hendak dicapai Perseroan.

Selama tahun 2023, Perseroan berhasil merekrut 16 orang karyawan baru, baik yang berstatus *pro-hire* maupun *fresh graduates*, yang diharapkan dapat menjadi kontributor dalam perkembangan bisnis Perseroan.

Human Resource (HR) management is an important aspect of an organization's comprehensive strategy. In an ever-changing and competitive global context, HR management is not only about recruiting the right employees for the right positions, but also about understanding labor market trends, meeting technological challenges, and establishing an inclusive and innovative work culture. Therefore, recruitment is a crucial aspect of HR management in various organizations. In an increasingly competitive and dynamic era, the ability to attract, select, and retain talents are the key to organizational success.

The Company always perform the employees' selection in the recruitment process transparently and openly to anyone without any discrimination against gender, ethnicity, religion, race, or certain groups, as long as the candidate concerned meets the qualifications and requirements set by the Company. In HR management, this is an important phase, because in this process the Company obtains candidates who are in line with the culture and strategic objective that the Company wishes to achieve.

In 2023, the Company succeeded in recruiting 16 new employees, both *pro-hire* and *fresh graduates*, who shall become contributors to the Company's business development.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Competency Development Policy and Implementation

Program pengembangan kompetensi karyawan yang dilaksanakan oleh Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan secara merata, baik untuk kemampuan umum maupun kemampuan khusus yang diperlukan masing-masing karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Program pengembangan kompetensi disesuaikan dengan Individual Development Plan setiap karyawan yang mencakup kompetensi teknis dan non teknis. Program pengembangan kompetensi karyawan Perseroan dilaksanakan berdasarkan Model Kompetensi (*Competency Model*) dan kesempatan yang terbuka bagi setiap karyawan.

Setiap karyawan dapat mengajukan diri untuk mengikuti pelatihan dengan mengajukan persyaratan administrasi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan divisi/atasan masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan tugas, rencana pengembangan kompetensi dan pengembangan usaha. Perseroan memastikan tidak terjadinya

The Company implements the employee competency development program to increase employee competency equally, for their general abilities and special abilities needed by each employee to improve their performance. The competency development program is tailored to each employee's Individual Development Plan which includes technical and non-technical competencies. The Company's employee competency development program is implemented based on the Competency Model and open opportunities to every employee.

Each employee can apply to take part in training by submitting certain administrative requirements and obtaining approval from their respective division leaders/superiors, with due regards to the needs, competency development plans, and business development. The Company ensures that there are no acts of discrimination in treating employees to create fair



tindakan diskriminasi dalam memperlakukan karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang *excellence*.

Program pengembangan kompetensi karyawan, yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital Perseroan, dikategorikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (1) *inhouse training*; (2) *public training*; dan (3) *knowledge sharing*. Program pengembangan kompetensi karyawan yang dilaksanakan pada tahun 2023, tersaji pada tabel berikut ini:

and honest treatment in accordance with each individual's potential, abilities, experience, and skills to achieve performance excellence.

The employee competency development program, which is organized by the Company's Human Capital Division, is categorized into three (3) classifications, i.e., (1) in-house training; (2) public training; and (3) knowledge sharing. The employee competency development program conducted in 2023 is presented in the following table:

Tabel Pelaksanaan Program Berdasarkan Jenis Pelatihan

Table: Program Implementation by Type of Training

Uraian Description	Jumlah Kegiatan Pelatihan Training	Total Peserta Participants	Rata-rata Peserta per Pelatihan Average Participants per Training
<i>In House Training</i>	12	145	12
<i>Public Training</i>	40	64	2
<i>Knowledge Sharing</i>	3	191	64

Tabel Pelaksanaan Program Berdasarkan Jenjang Jabatan

Table: Program Implementation by Position Level

Kategori Category	Jumlah Kegiatan Pelatihan Training	Total Peserta Participants	Rata-rata Peserta per Pelatihan Average Participants per Training
<i>Senior Leader</i>	26	142	5
<i>Middle</i>	29	129	4
<i>Junior</i>	33	128	4

Tabel Pelaksanaan Program In House Training

Table: In House Training Program

No.	Pelatihan Training
1	<i>Competency Based Interview - Batch 1</i>
2	<i>Competency Based Interview - Batch 2</i>
3	<i>CP3P Execution</i>
4	<i>CP3P Foundation</i>
5	<i>CP3P Preparation</i>
6	<i>First Aid Basic Training</i>
7	Konsinyering Persiapan CP3P <i>Execution</i> CP3P <i>Execution</i> Preparation Consignment
8	Konsinyering Persiapan Ujian CP3P <i>Foundation</i> CP3P <i>Foundation</i> Exam Preparation Consignment
9	Konsinyering Persiapan Ujian CP3P <i>Preparation</i> CP3P <i>Preparation</i> Exam Preparation Consignment
10	Manajemen Rumah Sakit <i>Hospital Management</i>
11	Pengembangan Dokumen Proses Bisnis IA <i>Development of IA Business Process Documents</i>
12	<i>Workshop</i> Pembiayaan Modal Kerja untuk BUMN oleh Perbankan <i>Workshop on Working Capital Financing for SOEs by Banking</i>



Tabel Pelaksanaan Program Public Training

Table: Public Training Program

No.	Pelatihan Training
1	Perppu 2/2023 re Omnibus Law (<i>chapter</i> ketenagakerjaan) PERPPU 2/2023 re Omnibus Law (Chapter Employment)
2	<i>Climate Change and Energy</i>
3	The 8 th PR INDONESIA Awards (PRIA) 2023 konferensi dan <i>workshop</i> The 8 th PR INDONESIA Awards (PRIA) Conference and Workshop
4	18 th Indonesia HR Expo
5	<i>Administrative Human Resources Professional (AHRP)</i>
6	Analisis Financial Proyek Project Financial Analysis
7	<i>Best Practice Procurement</i>
8	<i>Cashflow & Treasury Management</i>
9	<i>Certified Contract Management Specialist (CCMS)</i>
10	<i>Certified Human Resources Professional (CHRP)</i>
11	<i>Certified IT Procurement Expert</i>
12	<i>Clean Energy Finance & Investment (CEFI)</i>
13	<i>Developing Organizational Excellence through Talent Assessment</i>
14	<i>Enhancing Legal Writing Skills Drafting Contracts</i>
15	<i>ESG Learning Program for Infrastructure Development</i>
16	<i>Exam Preparation Project Management</i>
17	<i>Facility Management</i>
18	<i>Financial Statement Fraud Risk Analysis & Prevention</i>
19	<i>Forecasting Budgeting & Cost Control</i>
20	GRC Summit 2023 Master Class & Seminar
21	<i>Implementing GRC</i>
22	<i>Key Risk Indicators</i>
23	Konvensi Humas Indonesia 2023 2023 Indonesian Public Relations Convention
24	Pelatihan dan Asesmen <i>Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)</i> Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) Training and Assessment
25	Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Special Education for the Advocate Profession (PKPA)
26	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Corporate Criminal Liability
27	<i>Project Management Professional (PMP)</i>
28	<i>Project Management Regular</i>
29	<i>Project Procurement and Contract Management</i>
30	QIA Tingkat Lanjutan Advanced Level QIA
31	QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA
32	<i>Risk Based Budgeting</i>
33	<i>Risk Control Self Assessment</i>
34	SC-900T00: <i>Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals</i>
35	Seminar Nasional Internal Audit 2023 (SNIA) 2023 Internal Audit National Seminar (SNIA)
36	Standar Profesi Sekretaris Perusahaan, Pendidikan Dasar I Corporate Secretary Professional Standards, Basic Education I
37	<i>The IIA's 2023 International Conference Amsterdam & Paris On-Site Learning</i>
38	<i>Workshop Finansial dan Legal Merger, Akuisisi, dan Valuasi Bisnis</i> Financial and Legal Workshop on Mergers, Acquisitions, and Business Valuation
39	Tingkat Komponen Dalam Negeri Domestic Component Level
40	<i>Training Investment Banking</i>



Tabel Pelaksanaan Program Knowledge Sharing Knowledge Sharing Program

No.	Topik Knowledge Sharing Knowledge Sharing Topic
1	Forum GRC dalam rangka Hakordia 2023 GRC Forum for 2023 World Anti-Corruption Day
2	Leading Innovation Culture: Fostering Innovation Culture
3	Webinar Sharing Session SMAP ISO 37001:2016 "Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai Bagian Penegakan Integritas dan Pencegahan Suap" SMAP ISO 37001:2016 Webinar Sharing Session "Implementation of an Anti-Bribery Management System (SMAP) as Part of Integrity Enforcement and Bribery Prevention"

Sepanjang tahun 2023 Perseroan telah merealisasikan dana pendidikan dan pelatihan karyawan sebesar Rp4.310 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1.101 miliar. Peningkatan biaya ini terjadi karena pada tahun 2023 pandemi telah usai dan pelaksanaan pelatihan mulai aktif diselenggarakan baik *online* maupun *offline*, dan di dalam maupun di luar negeri.

In 2023, the Company has realized Rp4,310 billion for employees' education and training programs. This amount is higher compared to 2022, which was Rp1.101 billion. The increase in costs occurred because in 2023 the pandemic was considered over, and training began to be actively held both online and offline locally and internationally.

Tabel Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan PT PII Tahun 2022-2023 Table: Comparison of IIGF's Competency Development Costs in 2022-2023

Uraian Description	Realisasi 2023 (Rp Juta) 2023 Realization (Rp million)	Anggaran 2023 (Rp Juta) 2023 Budget (Rp million)	Penyerapan Anggaran 2023 (%) 2023 Budget Absorption (%)	Realisasi 2022 (Rp Juta) 2022 Realization (Rp million)	Realisasi 2023 terhadap realisasi 2022 2023 Realization to 2022 Realization
Investasi Pelatihan dan Pendidikan Training and Education Investment	4.310	4.659	92,51%	1.101	391,46%

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karier Career Development Policy and Implementation

Perseroan berkomitmen untuk memberi kesempatan kepada setiap karyawan dalam pengembangan kariernya. Perseroan telah menetapkan jenjang karier yang jelas dan transparan melalui jalur fungsional maupun struktural. Pada tahun 2023 Perseroan telah melakukan *launching* program *career management* yaitu InCHARGE dengan *tagline* "manage your career, control your future" sekaligus melakukan asesmen kompetensi teknis dan kompetensi non teknis karyawan, dengan tujuan untuk melakukan pemetaan talenta yang ada di Perseroan dan pengembangan karyawan. Diharapkan dengan pengelolaan talenta yang telah dilakukan, dapat memberikan kesempatan karyawan untuk mengembangkan dirinya sekaligus mengembangkan kariernya di Perseroan. Pengembangan karier karyawan ini bertujuan untuk:

1. Membantu pencapaian prestasi atau tujuan individu sebagai bentuk hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tujuan Perseroan.
2. Meningkatkan produktivitas, motivasi, dan loyalitas karyawan.

The Company is committed to providing opportunities for every employee to develop their career. The Company has established clear and transparent career paths via functional and structural pathways. In 2023, the Company launched a career management program, i.e., InCHARGE, with the tagline "manage your career, control your future", and conducted an assessment of employees' technical and non-technical competencies, with the objective to map the existing talents in the Company and develop the employees. With the talent management implemented, the Company shall provide employees with opportunities to develop themselves and simultaneously develop their careers within the Company. The employee's career development has the objective to:

1. Assisting to achieve individual achievements or objective as a form of reciprocal relationship that is beneficial for employee welfare and the Company's objectives.
2. Increasing employee productivity, motivation, and loyalty.



3. Membantu karyawan memahami dan mengembangkan potensi dan keahliannya, sehingga mampu menciptakan iklim kerja positif.
4. Mengurangi tingkat *turnover*.

Perseroan melalui Divisi Human Capital and Organization Development, selaku unit kerja yang membidangi fungsi SDM, telah melakukan reviu terhadap kebijakan pengembangan karier yang berlaku di Perseroan. Diharapkan dengan adanya pembaharuan terhadap kebijakan tersebut, dapat mendukung pengembangan karier karyawan dan tentunya akan berdampak pada *engagement* karyawan.

Penilaian Kinerja

Performance Assessment

Perseroan memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang terintegrasi dan menyeluruh serta terdokumentasi dengan baik agar dapat digunakan sebagai *tools* untuk membantu masing-masing karyawan dalam mencapai kinerja terbaik mereka dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Kinerja karyawan dinilai oleh atasan langsung dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan target individual menggunakan *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau disebut juga dengan BSC KPI. Kemudian, dalam rangka *monitoring* pencapaian kinerja individu, divisi dan Perseroan, Divisi Human Capital and Organization Development juga melakukan evaluasi kinerja tengah tahun.

Di akhir periode proses penilaian kinerja, hasil penilaian kinerja karyawan tersebut, selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan oleh Divisi Human Capital and Organization Development untuk menentukan program pengembangan dan pelatihan yang dibutuhkan selanjutnya, optimalisasi penempatan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, pemberian *reward and punishment*, penentuan remunerasi, dan perencanaan suksesi karyawan yang berpotensi untuk diangkat ke posisi manajemen puncak.

Strategi dan Kebijakan Remunerasi

Remuneration Strategy and Policy

Dalam sistem pengelolaan SDM, remunerasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam upaya menarik (*attract*), memotivasi (*motivate*), dan mempertahankan (*retain*) karyawan terbaik dalam rangka tersedianya SDM yang berkualitas.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang dinamis, responsif, kompetitif, adil dan seimbang, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kebijakan penerapan remunerasi di lingkungan Perseroan didasarkan atas kinerja Perseroan dan karyawan, yang disesuaikan dengan strategi Perseroan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Assisting employees understand and develop their potential and skills, to create a positive working climate.

4. Reducing turnover rate.

The Company, via its Human Capital and Organization Development Division, as the work unit responsible for HR functions, has conducted a review of the career development policies applicable in the Company. The updated policy will support employees' career development and will have an impact on employee engagement.

The Company has an integrated and comprehensive employee performance assessment system that is well documented to be used as a tool to assist each employee in achieving their best performance to support the achievement of the Company's objectives. Employee performance is assessed by the direct superiors with reference to the achievement of individual goals and targets using the *Balanced Score Card* (BSC)-based *Key Performance Indicators* (KPI) or BSC KPI. Further, to monitor the performance achievements of individuals, divisions, and the Company, the Human Capital and Organization Development Division evaluates the mid-year performance.

At the end of the performance assessment process period, the results of the employee performance assessment are used as a basis for consideration by the Human Capital and Organization Development Division to determine the training and development needed, optimize employee placement according to their competencies, provide rewards and punishment, determine remuneration, and plan succession of employees who have the potential to be appointed to top management positions.

In the HR management system, remuneration is an important aspect in efforts to attract, motivate, and retain the best employees to ensure quality human resources.

The Company is committed to implementing a remuneration system that is dynamic, responsive, competitive, fair, and balanced, and in accordance with prevailing provisions. The policy for implementing remuneration within the Company is based on the performance of the Company and its employees, which is adjusted to the Company's short-term and long-term strategy.



Perseroan menerapkan sistem remunerasi karyawan yang kompetitif dan dipastikan telah memenuhi ketentuan tingkat upah minimum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Remunerasi juga disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku seperti ketenagakerjaan, maupun melakukan *benchmark* dengan organisasi sejenis lainnya. Terkait hal tersebut, Perseroan telah menetapkan standar penggajian berdasarkan jenjang jabatan yang disandarkan kepada *remuneration survey* dalam industri sejenis dengan memperhatikan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam rangka mengupayakan kesejahteraan setiap karyawan, Perseroan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan dengan memperhatikan *gap* rasio gaji seluruh karyawan untuk menghindari terjadinya kesenjangan yang terlalu tinggi. Dapat dipastikan bahwa seluruh karyawan Perseroan telah mendapatkan remunerasi yang sesuai dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya sistem remunerasi yang baik ini, diharapkan dapat menjadi salah satu strategi retensi karyawan untuk meningkatkan loyalitas mereka kepada Perseroan, dan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan Perseroan karena setiap karyawan akan bekerja secara maksimal dalam mencapai rencana kerja Perseroan.

Struktur remunerasi karyawan Perseroan senantiasa disesuaikan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan unsur kompetitif dengan eksternal dan unsur *fairness* di dalam Perseroan. Secara umum, setiap karyawan Perseroan berhak atas beberapa komponen remunerasi sebagai berikut:

1. Gaji pokok;
2. Tunjangan Tetap;
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
4. Tunjangan Cuti Tahunan;
5. Tunjangan Cuti Besar; dan
6. Tunjangan Profesional.

BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment

Perseroan telah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh karyawan Perseroan telah ikut serta dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.

The Company implements a competitive employee remuneration system and ensures that it meets the prevailing minimum wage as stipulated in statutory provisions. Remuneration is also formulated with due regards to the prevailing laws and regulations, such as employment, as well as benchmarking with other similar organizations. Therefore, the Company has set salary standards based on position levels which are based on remuneration surveys in similar industries, by taking into account the Law of Employment and Provincial Minimum Wage (UMP) Regulations.

The Company establishes an employee remuneration policy to strive for the employee welfare, by paying attention to the salary ratio gap for all employees to avoid a too high gap. The Company ensures that all employees have received remuneration in accordance with their respective positions and functions. The good remuneration system shall be an employee retention strategy to increase their loyalty to the Company, and have a positive impact on the Company's growth because each employee will work optimally to achieve the Company's work programs.

The Company's employee remuneration structure is adjusted annually with due regards to the external competitive elements and internal fairness elements. In general, every employee of the Company is entitled to several remuneration components as follows:

1. Basic Salary;
2. Fixed Allowances;
3. Religious Holiday Allowance;
4. Annual Leave Allowance;
5. Long Service Allowance; and
6. Professional Benefits.

The Company has implemented the Regulation of the Government of the Republic of Indonesia No. 46 of 2015 on the Implementation of Provident Fund Benefit Program and Pension Security Programs in accordance with Government Regulation No. 45 of 2015 on the Implementation of Pension Security Programs. As of the end of 2023, all Company's personnel have participated in the BPJS Employment Program.



Internalisasi Budaya Kerja Internalization of Working Culture

Budaya kerja Perseroan mengacu kepada nilai-nilai Perseroan yaitu InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust dan Excellence*). Nilai-nilai Perseroan ini telah menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan. Internalisasi nilai-nilai budaya Perseroan tentunya menjadi program berkelanjutan yang terus dilakukan oleh Divisi Human Capital and Organization Development yang membidangi fungsi pengelolaan SDM di Perseroan untuk membentuk budaya Perseroan yang dapat mendukung pencapaian Perseroan dalam jangka panjang.

Internalisasi ini diantaranya dilakukan melalui sosialisasi dan program-program berkelanjutan yang dilaksanakan selama tahun 2023 melalui kegiatan-kegiatan di Perseroan seperti:

- Kegiatan kebersamaan yaitu *Townhall Meeting, Company Gathering* dan perayaan Hari Ulang Tahun Perseroan.
- Kegiatan keagamaan melalui kajian rutin setiap minggu, rangkaian acara dalam rangka memeriahkan bulan Ramadhan diantaranya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh karyawan, *quote of the day*, kegiatan berbagi karyawan ke panti asuhan dan *werdha*, serta kegiatan *i'tikaf*.
- Kegiatan kesehatan karyawan/*work life balance* yaitu pelaksanaan berbagai aktivitas olahraga rutin setiap minggu, seperti badminton, *mini soccer*, olahraga dengan instruktur (*poundfit, zumba, yoga, dll*), tenis, golf dan sepeda.
- Kegiatan tematik yang diadakan berdasarkan momen acara setiap tahun, seperti perayaan Hari Kartini, rangkaian acara perayaan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Oeang Day.

The Company's work culture refers to the Company's values, i.e., InTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, and Excellence*). These Company values are a part of and cannot be separated from all of the Company's business activities. Internalizing the Company's cultural values is a continuous program carried out by the Human Capital and Organization Development Division, which is in charge of the HR management function in the Company, to establish a Company culture that can support the Company's long-term achievements.

This internalization is carried out, among other things, via dissemination and sustainable programs, which were implemented in 2023 through various activities in the Company such as:

- Townhall Meeting, Company Gathering, and Company Anniversary celebrations.
- Religious activities, via regular weekly studies, a series of events to enliven the Ramadhan month including the reading of the Holy Quran by employees, quote of the day, employee sharing activities with orphanages and nursing homes, and *itikaf* activities.
- Employee health activities/*work-life balance*, i.e., various regular sports activities every week, such as badminton, mini soccer, sports with an instructor (*poundfit, zumba, yoga, etc.*), tennis, golf, and cycling.
- Thematic activities are held based on events every year, such as Kartini Day, a series of events celebrating Indonesian Independence Day, and Indonesian Oeang Day.

Hubungan Industrial Industrial Relations

Perseroan terus berupaya menghadirkan lingkungan kerja yang terbuka, positif, dan progresif untuk meningkatkan hubungan industri yang harmonis, dinamis, dan adil antara Perseroan sebagai pihak pemberi kerja dengan para karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Pengelolaan hubungan industrial pada lingkup Perseroan senantiasa menjunjung tinggi hak dan kewajiban karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berbagai kesempatan, manajemen membuka komunikasi dan forum diskusi bersama dengan karyawan untuk membahas isu-isu di bidang ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan kapan pun sesuai dengan kebutuhan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan terciptanya hubungan kerja yang sehat maka produktivitas kerja dan *engagement* masing-masing karyawan juga akan meningkat.

The Company strives to provide an open, positive, and progressive working environment to enhance harmonious, dynamic, and fair industrial relations between the Company as an employer and employees as one of the main stakeholders. Industrial relations management within the Company upholds the rights and obligations of employees as regulated in the Company's Regulations and prevailing laws and regulations.

On various occasions, management opens communication and discussion forums with employees to discuss issues in the employment sector. These activities can be carried out at any time based on the needs. The Company understands that by creating healthy working relationships, the work productivity and engagement of each employee will increase.



Komitmen Perseroan untuk membangun dan memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara karyawan, Perseroan dan Pemerintah (Tripartit), dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dan Perseroan.

Perseroan akan secara konsisten melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan Perseroan serta berkomitmen untuk menindaklanjuti keluhan terkait masalah ketenagakerjaan yang diajukan kepada Perseroan dengan sebaik-baiknya. Perseroan juga berkomitmen untuk memberlakukan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier secara adil, wajar, dan konsisten berdasarkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh Perseroan dalam upaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis, antara lain dengan menyelenggarakan *townhall meeting* yang melibatkan seluruh karyawan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan *Senior Leaders*. Melalui kegiatan tersebut Perseroan berusaha memfasilitasi dan memberi ruang bagi karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya.

Program K3 OHS Program

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan hal penting bagi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan praktik K3. Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah dilaksanakan Perseroan selama ini utamanya berfokus pada pencapaian tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*.

Dalam upaya mencapai hal tersebut, Perseroan melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengatur tentang pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan SMK3 di Perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Perseroan meyakini dengan penerapan SMK3 yang memadai dan kesadaran terhadap pentingnya SMK3 akan mendukung terwujudnya suasana aman dan nyaman dalam bekerja. Hal tersebut juga diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya insiden kecelakaan kerja. Hal tersebut tercermin dari tidak terjadi kecelakaan di lingkungan kerja Perseroan sepanjang tahun 2023.

The Company's commitment to establishing and maintaining healthy and harmonious Industrial Relations as a healthy and constructive working relationship system between employees, the Company, and the Government (Tripartite), is carried out with the objective to enhance the productivity and welfare of employees and the Company.

The Company consistently evaluates and improves the Company's policies and is committed to following up complaints with best endeavours regarding employment issues submitted to the Company. The Company is also committed to implementing a fair, reasonable, and consistent recruitment, promotion, and career development system based on competency, in line with the Company's needs. The Company has taken several approaches to create an open, positive, and progressive work atmosphere to create healthy and harmonious industrial relations, including holding townhall meetings involving all employees, or Focus Group Discussions (FGD) involving Senior Leaders. By means of these activities, the Company strives to facilitate and provide space for employees to express their aspirations.

The Occupational Health and Safety (OHS) is important for the Company. Therefore, the Company has a strong commitment to implementing OHS practices. The Company has implemented Occupational Health and Safety (OHS) practices with the main focus on achieving a zero accident rate.

Therefore, the Company implements an Occupational Health and Safety Management System (OHSMS), which regulates risk control of work activities, including preventing work accidents and work-related diseases. The OHSMS implementation in the Company is carried out with reference to the Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 on the Occupational Health and Safety Management System, which has been refined by the Government Regulation No. 50 of 2012 on the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS).

The Company understands that adequate implementation of OHSMS and awareness of the OHSMS importance shall support the creation of a safe and comfortable atmosphere at work. This shall also reduce and prevent work accident/incidents. This is reflected in no accidents in the Company's working environment in 2023.



Sebagai bentuk kesadaran kami akan tanggung jawab pelaksanaan K3, pada tahun 2023 telah dilakukan identifikasi atas keberlakuan SOP Tanggap Darurat yang merupakan bagian dari regulasi internal mengenai keselamatan kerja di Perseroan.

Employee Engagement Survey

Employee Engagement Survey

Perseroan menilai bahwa karyawan memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis Perseroan. Oleh sebab itu, penting bagi Perseroan untuk mengetahui tingkat keterikatan karyawan secara personal terhadap Perseroan sebagai tempat pengembangan kariernya.

Employee engagement survey telah dilaksanakan di Perseroan pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keterikatan karyawan terhadap Perseroan. Keterikatan karyawan merujuk pada tingkat komitmen, loyalitas, dan keterlibatan emosional yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaan dan Perseroan.

Pada tahun 2023, *employee engagement survey* diikuti oleh 154 karyawan dengan skor 79. Hasil survei ini lebih tinggi 2 poin jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2022 dengan skor 77. Perseroan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap hasil *employee engagement survey* serta melakukan tindak lanjut apabila dari hasil survei tersebut dapat membuat karyawan lebih optimal dan memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam bekerja, sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan dan Perseroan dapat berkembang dengan baik ke depannya.

Turnover Karyawan

Employee Turnover

Dari tahun ke tahun, Perseroan selalu berupaya menjaga tingkat *turnover* karyawan agar tetap terkendali pada batas yang wajar sehingga tidak mengganggu proses pencapaian tujuan Perseroan. Perseroan menyadari bahwa tingkat perputaran karyawan menjadi tantangan yang tidak terhindarkan dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi retensi yang tepat untuk meningkatkan loyalitas karyawan.

Perseroan melakukan reviu secara berkala terhadap kebijakan pengelolaan SDM yang dimiliki agar tetap relevan dengan dinamika bisnis yang terjadi dan mampu menjawab kebutuhan karyawan. Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan SDM yang tepat dan terjalinnya hubungan antar karyawan yang harmonis, Perseroan mampu mengendalikan tingkat perputaran karyawan pada angka yang relatif rendah setiap tahunnya.

As part of awareness of our OHS responsibilities, in 2023, we have identified the applicability of Emergency Response SOP, which is part of the internal regulations in the Company's occupational safety.

The Company considers employees to have a very important role in the Company's business continuity. Therefore, the Company considers the understanding of personal employee engagement important towards the Company as a place for career development.

The Company has conducted employee engagement surveys in recent years. This is carried out to determine and evaluate the level of employee engagement with the Company. Employee engagement refers to the level of commitment, loyalty, and emotional involvement that employees have towards their work and the Company.

In 2023, the Employee Engagement Survey was participated by 154 employees with a score of 79. The result is 2 points higher when compared to the survey results in 2022, which was 77. The Company always monitors the results of employee engagement surveys and carries out follow-up actions if the survey results can enhance employees' performance and maximize their potential at work. Thus, it affects the improvement of the Company's performance, and the Company shall develop well in the future.

Every year, the Company strives to keep the employee turnover rate under control within reasonable limits so that it does not interfere with the process of achieving the Company's objective. The Company understands that employee turnover is an unavoidable challenge in an organization. Therefore, it is necessary to have an appropriate retention strategy to increase employee loyalty.

The Company regularly reviews its HR management policies to ensure the relevance with current business dynamics and answer employee needs. By implementing appropriate HR management policies and establishing harmonious relationships between employees, the Company shall be able to control employee turnover at a relatively low rate every year.



Informasi lebih detail terkait tingkat *turnover* karyawan Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir tersaji pada tabel di bawah ini:

More detailed information regarding the Company's employee turnover rate in the last three (3) years is presented in the following table:

Tabel Turnover Karyawan 2021-2023

Table: 2021-2023 Employee's Turnover

Uraian Description	2023	2022	2021
Pensiun Pension	1	-	-
Meninggal Dunia Death	-	-	1
Mengundurkan Diri Resignation	4	9	12
Diberhentikan Termination	-	-	-
Jumlah Karyawan Number of Employees	164	152	143
Rasio Turnover Turnover Ratio	3,17%	6,10%	8,06%

Program Pensiun Retirement Program

Bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun, Perseroan telah mengatur terkait hal tersebut dalam kebijakan berupa Surat Keputusan Direksi. Dalam kebijakan tersebut telah memuat pengaturan terkait fleksibilitas waktu kerja, pelatihan dan hak-hak serta benefit.

In terms of employees entering retirement period, the Company has regulated this matter in a policy in the form of a Board of Directors' Decree. The policy stipulates regulations regarding work time flexibility, training, and rights and benefits.

Perseroan telah memiliki program pensiun bagi seluruh karyawan dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

The Company has a pension program for all employees under the following conditions:

1. Usia pensiun Karyawan ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, dengan waktu kerja terakhir jatuh pada akhir bulan saat Karyawan menginjak usia 56 (lima puluh enam) tahun. Sebagai contoh, Karyawan berulang tahun ke-56 di 10 Januari 2016, maka hari kerja terakhir Karyawan adalah 31 Januari 2016.
2. Dalam menjaga efisiensi dan efektivitas bisnis Perseroan atau dalam rangka memberikan kesempatan untuk pengembangan potensi diri Karyawan, maka Perseroan dapat menentukan atau memberhentikan Karyawan dengan hak pensiun.

1. The employee retirement is set forth at fifty-six (56) years, with the last working month in the month when employee turns fifty-six (56) years old. For example, if an employee turns 56 on 10 January 2016, the employee's last working day will be 31 January 2016.
2. To maintain the efficiency and effectiveness of the Company's business or to provide opportunities for developing the employees' personal potential, the Company can determine or dismiss employees with retirement rights.



Rencana Fokus Pengembangan SDM Tahun 2024

HR Development Focus Plan in 2024

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas karyawan, Perseroan akan terus konsisten melanjutkan program pengembangan SDM yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan, di mana fokus program tahun 2024 adalah:

1. Pengembangan kamus kompetensi untuk kompetensi spesifik;
2. Pengembangan kompetensi karyawan berdasarkan *gap* kompetensi teknis maupun kompetensi non teknis melalui metode pembelajaran *formal learning*, *social learning* dan *experiential learning*;
3. Fokus pengembangan kompetensi *leadership* untuk senior leader dan karyawan di *level middle*; dan
4. Penguatan program budaya atas nilai-nilai Perseroan.

The Company consistently manages its HR development program in accordance with the Company's vision and mission, to increase employee capacity and capability, with the 2024 program focus as follows:

1. Development of competency sourcebook for specific competencies;
2. Development of employee competencies based on technical and non-technical competency gaps through formal learning, social learning, and experiential learning methods;
3. Focus on developing leadership competencies for senior leaders and middle level employees; and
4. Strengthening cultural programs on the Company's values.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Pengembangan Teknologi Informasi (TI), terutama di era digital, semakin penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Di era pandemi dan *post* pandemi, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan prioritas bagi banyak Perseroan, tak terkecuali PT PII.

Oleh karenanya, Perseroan memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Teknologi Informasi melalui *upgrading* sarana dan prasarana TI, khususnya terkait digitalisasi dan keamanan penggunaan TI agar dapat bekerja secara optimal terutama saat menghadapi perubahan bisnis yang sangat agile serta serangan siber (*cyber attack*) yang semakin bervariasi. *Cyber Security* menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh PT PII terkait pengelolaan Teknologi Informasi. Untuk itu, PT PII berkomitmen untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) data sebagai hal yang semakin krusial saat ini yang didukung oleh perangkat yang memadai.

Pemanfaatan Teknologi Informasi diharapkan mampu meningkatkan dan memudahkan proses bisnis Perseroan dan mendukung operasional Perseroan sejalan dengan visi dan misi PT PII.

The development of Information Technology (IT), especially in the digital era, is increasingly important to support the Company's fluent operation. In the pandemic and *post*-pandemic era, the use of information technology has become the priority for many companies, including IIGF.

Therefore, the Company heavily considers the development of Information Technology by upgrading IT facilities and infrastructure, especially related to digitalization and security of IT usage so that it can work optimally, specifically when facing highly agile business changes and increasingly varied cyber attacks. IIGF faces Cyber Security risk as one of the risks in managing Information Technology. Therefore, IIGF is committed to ensuring the confidentiality, integrity, and availability of data as an increasingly crucial matter, supported by adequate equipment.

The utilization of Information Technology shall improve and facilitate the Company's business processes and support the Company's operations, in line with IIGF's vision and mission.



Roadmap Pengelolaan Teknologi Informasi Information Technology Management Roadmap

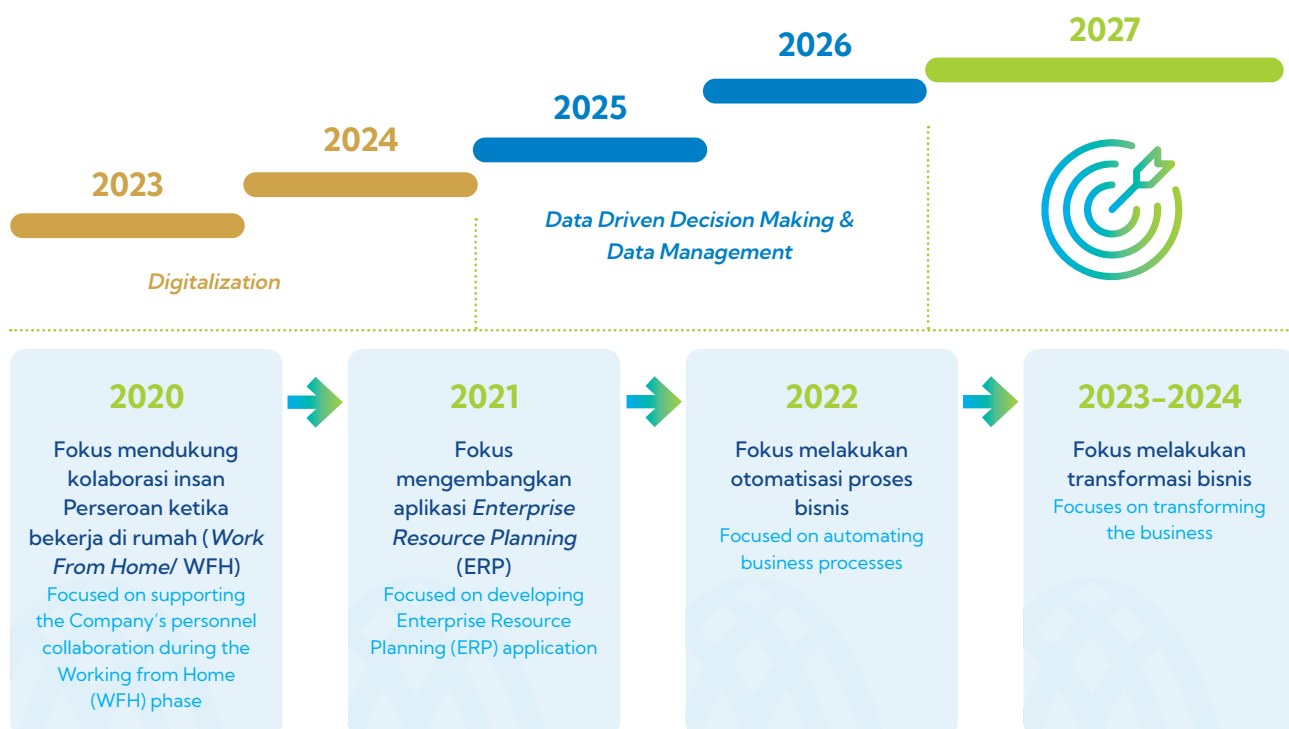
Guna memberikan arah pengembangan yang jelas terkait pengelolaan Teknologi Informasi di PT PII, sebuah *Information Technology Master Plan* (ITMP) telah disusun sebagai acuan pengembangan teknologi informasi serta diimplementasikan pada jangka waktu periode 2018–2023 dengan *review* terakhir dilakukan di tahun 2022. Pada tahun 2023, PT PII juga telah menyelesaikan penyusunan ITMP periode 2023–2027.

The Company has prepared the Information Technology Master Plan (ITMP) as a reference for information technology development to provide a clear development direction related to Information Technology management at IIGF. The ITMP has been implemented in the 2018–2023 period and lastly reviewed in 2022. In 2023, IIGF has developed ITMP for the 2023–2027 period.

Bagan berikut ini menggambarkan tahapan *roadmap* pengelolaan TI Perseroan:

The following illustrates the phases of the Company's IT management roadmap:

Phase 1	Phase 2	Phase 3
- Melakukan otomatisasi proses bisnis <i>end-to-end</i> - Menciptakan budaya digitalisasi di Perseroan dalam rangka efisiensi biaya dan efektivitas proses bisnis - Menyediakan sistem informasi yang saling terintegrasi - Peningkatan aspek <i>cyber security</i> - Automate end-to-end business processes - Creating a digitalization culture in the Company in the context of cost efficiency and effectiveness of business processes - Providing an integrated information system - Improving cyber security aspects	- Membangun <i>data governance</i> dalam membangun <i>single source of information</i> - Membangun <i>data quality</i> - Membangun sistem pengambilan keputusan berdasarkan data-data Perseroan - Building data governance in building a single source of information - Building data quality - Building a decision-making system based on company data	- Persiapan Peran TI Selanjutnya sesuai dengan arahan strategi bisnis Perseroan dalam RJPP - Implementasi <i>Advance Technology</i> yang mampu membantu keberlangsungan bisnis - Preparation for the Next IT Role in accordance with the direction of the Company's business strategy in RJPP - Implementation of Advance Technology that can help business continuity





Penanggung Jawab Pengelolaan Teknologi Informasi

Information Technology Governance Person in Charge

Secara struktural, pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Perseroan adalah Divisi Teknologi Informasi (TI). Pengelolaan dilaksanakan bersama dengan Komite Pengarah TI dalam rangka implementasi ITMP. Pengelolaan TI juga terbagi ke dalam bagian-bagian yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola teknologi informasi. Bagian-bagian yang dimaksud adalah Perencanaan TI, Pengembangan TI, Operasional TI serta bagian sarana dan pendukung.

Sementara itu, Perseroan telah membentuk Komite Pengarah TI dengan Direktur Keuangan sebagai *team leader* Komite Pengarah TI. Komite Pengarah TI memiliki keanggotaan, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Structurally, the party responsible for managing information technology within the Company is the Information Technology Division (IT). The IT Division managed the ITMP implementation in collaboration with the IT Steering Committee. IT management is also divided into sections, specifically those responsible for information technology governance. Those various sections are IT Planning, IT Development, IT Operations, and the facilities and supports.

Meanwhile, the Company has established an IT Steering Committee, with the Director of Finance as the Team Leader of the IT Steering Committee. IT Steering Committee has duties and responsibilities as follows:

Jabatan Position	Deskripsi Pekerjaan Job Description
Keanggotaan Tim Members	- Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi ("Komite Pengarah TI") terdiri dari 1 (satu) orang sebagai <i>Team Leader</i> serta beberapa Kepala Divisi dan/atau Direksi sebagai <i>Team Member</i> - Komite Pengarah TI adalah Direksi yang membidangi TI dan menyetujui prosedur dan kebijakan pemantauan <i>Master Plan</i> TI. Bertanggung jawab atas penyelesaian rencana kegiatan yang tercantum dalam <i>Roadmap</i> TI. Menyampaikan keterbukaan informasi atas nama Komite Pengarah TI - Keanggotaan dalam Komite Pengarah TI merupakan bagian dari tanggung jawab individu dan diperhitungkan sebagai salah satu bagian penilaian kinerja individu - Keanggotaan <i>Team Member</i> dapat berasal dari luar Perseroan sepanjang disetujui oleh Direksi dan maksimal hanya berjumlah 1 orang - The members of the Information Technology Steering Committee ("IT Steering Committee") are one (1) personnel as Team Leader and several Division Heads and/or Directors as Team Members - The IT Steering Committee is the Board of Directors in charge of IT and approves the procedures and policies for monitoring the IT Master Plan. Responsible for completing planned activities as listed in the IT Roadmap. Providing information disclosure on behalf of the IT Steering Committee - IT Steering Committee's membership is part of an individual's responsibilities and is considered in the individual's performance assessment - Team Members may be external parties outside the Company as long as they are approved by the Board of Directors and such member has a maximum of 1 person
Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities	- Memastikan keselarasan Rencana Strategis TI dengan Rencana Strategis Perseroan - Memberikan persetujuan terhadap IT <i>Master Plan</i> - Melakukan pemantauan dan memberikan arahan atas implementasi Rencana Strategis TI - Memonitor efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perseroan - Menentukan prioritas terhadap inisiatif TI - Perumusan Kebijakan dan Prosedur TI - Penyelesaian terhadap isu-isu ataupun permasalahan TI yang bersifat strategis - Ensuring alignment of the IT Strategic Plan with the Company's Strategic Plan - Approving the IT Master Plan - Monitoring and providing advice on the IT Strategic Plan - Monitoring the effectiveness of IT Policy within the Company - Prioritizing IT initiatives - Formulating IT Policy and Procedures - Resolving strategic IT issues or problems



Tabel Realisasi Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2023

Table: IT Steering Committee Meetings in 2023

Tanggal Rapat Komite Pengarah TI Date of IT Steering Committee Meeting	Agenda yang dibahas Agenda	Arahan Instruction
27 Juni 2023 27 June 2023	Finalisasi dan <i>approval</i> IT Master Plan 2023–2027 Finalization and approval of the 2023–2027 IT Master Plan	– Mendorong IT untuk lebih <i>agile</i> dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis serta tantangan baik dari sisi <i>external</i> dan internal – Mengoptimalkan sinergi dan integrasi baik antar aplikasi arsitektur, maupun Kementerian Keuangan – Dilakukan <i>review</i> dan evaluasi tahunan atas pencapaian dan rencana eksekusi lanjutannya – Encouraging IT to be more agile and adaptive to the dynamics of business needs and challenges internally and externally – Optimizing synergy and integration between architecture implementation and the Ministry of Finance – Conducting annual review and evaluation of achievements and follow-up of planned execution

Strategi dan Kebijakan serta Pengembangan Teknologi Informasi Perseroan Tahun 2023

Company's Information Technology Strategy, Policy, and Development in 2023

PT PII berhasil dan terus mengimplementasikan "Digitalisasi" ke dalam Perseroan melalui fungsi Teknologi Informasi. Dalam Digitalisasi, disadari perlunya dukungan internal baik dari level pengguna hingga manajemen, serta dukungan ekosistem teknologi oleh pihak-pihak dengan kemampuan lebih lebih untuk memitigasi risiko untuk mengembangkan layanan dan memberikan tingkat layanan terbaik untuk keberhasilan bisnis. *Journey* Digitalisasi yang berhasil digabungkan dan diimplementasikan dalam inisiatif-inisiatif Perseroan sepanjang tahun 2023 antara lain:

1. Pembuatan *super mobile apps* "PII Satu" sebagai portal utama akses aplikasi-aplikasi *mobile* dan *web based* Perseroan.
2. Implementasi *Financial Dashboard* untuk *monitoring* data-data keuangan Perseroan yang dapat diakses oleh manajemen secara langsung.
3. Implementasi aplikasi GAS (*general affair services*) untuk membantu karyawan melakukan otomatisasi proses internal perkantoran.
4. Modernisasi infrastruktur IT menggunakan teknologi *serverless*, termasuk simplifikasi dan peningkatan efektivitas *Data Center* melalui penerapan *hybrid infrastructure*.
5. Peningkatan keamanan *cyber* melalui penerapan *single sign on*, *multi factor authentication*, *mobile device management*, dan peningkatan IT *security awareness*.
6. Peningkatan peran pihak *Managed Service* untuk membantu pengelolaan *end user device*, IT operasional, dan keamanan data dan infrastruktur Perseroan.

IIIGF has successfully and keeps implementing "Digitalization" into the Company via the Information Technology function. In Digitalization, it is necessary to have internal support from users up to the management level, as well as technology ecosystem support by parties with more capabilities to mitigate risks to develop services and provide the best level of service for business success. The Digitalization Journey that was successfully incorporated and implemented in the Company's initiatives in 2023 includes:

1. Development of "PII Satu" super mobile apps as the main portal for accessing the Company's mobile and web-based applications.
2. Implementation of a Financial Dashboard to monitor the Company's financial data that can be accessed by the management directly.
3. GAS (general affairs services) application to assist employees in automating internal office processes.
4. Modernization of IT infrastructure using serverless technology, including simplification and improvement of data center effectiveness by implementing hybrid infrastructure.
5. Improved cyber security via the implementation of single sign-on, multi-factor authentication, mobile device management, and increased IT security awareness.
6. Role enhancement of Managed Service to help manage the Company's end-user devices, IT operations, and data and infrastructure security.



Rencana Pengembangan TI ke Depan Future IT Development Plans

Kedepannya PT PII berencana untuk melanjutkan Digitalisasi yang sudah berjalan dengan baik di Perseroan. Pada tahun 2024 PT PII berencana melanjutkan digitalisasi khususnya untuk proses-proses bisnis yang masih manual, serta pembentukan fondasi *data centric organization* melalui implementasi teknologi *Big Data*. Di sisi Infrastruktur dan keamanan, PT PII tetap berkomitmen meningkatkan layanan dan keamanan *data center* melalui penguatan kritikal melalui implementasi teknologi infrastruktur terkini dan implementasi *mini scale Security Operation Center (SOC)*. Di sisi layanan aplikasi untuk karyawan, PT PII berupaya untuk terus meningkatkan *end user experience* dan otomatisasi proses manual melalui implementasi *GRC Systems*, *Claim Management System*, *Project Management System*, digitalisasi proses *back office* lanjutan, peningkatan layanan aplikasi *mobile* melalui "PII Satu" *mobile apps*, dan pengembangan lainnya.

In the future, IIGF strives to continue the Digitalization that has been running well in the Company. In 2024, IIGF plans to continue digitalization, especially for manual business processes, as well as the establishment of a data-centric organization foundation using Big Data technology. In terms of infrastructure and security, IIGF remains committed to improving data center services and security through critical strengthening by using the latest infrastructure technology and a mini-scale Security Operation Center (SOC). In terms of application services for employees, IIGF is committed to continuously improving end-user experience and automation of manual processes by implementing GRC Systems, Claim Management Systems, Project Management Systems, digitalization of advanced back office processes, mobile application services improvement through "PII Satu" mobile apps, and other developments.







Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis





Tinjauan Ekonomi dan Industri

Economic and Industrial Review

Kondisi Perekonomian Global

Global Economic Conditions

Perekonomian Indonesia 2023 menghadapi tantangan yang tidak ringan, bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan divergensi pertumbuhan antarnegara yang melebar. Setelah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 3,5% pada 2022, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 turun ke 3,0%, dan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024. Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup sejalan dengan berlanjutnya dampak luka memar (*scarring effect*) dan meningkatnya fragmentasi geopolitik-ekonomi. Kinerja ekonomi global pada 2023 juga diwarnai dengan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi, dengan negara-negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs) yang mengalami penurunan dan stagnasi. Di negara EMDEs, pertumbuhan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti, sedangkan kinerja ekonomi India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina) tetap baik.

Bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, proses disinflasi dunia berjalan lambat sehingga level inflasi masih di atas sasaran untuk negara maju. Satu sisi, inflasi dunia turun menjadi 6,8% pada Desember 2023 dari level tertinggi pada triwulan II 2022. Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan penurunan harga energi dan pangan, terurainya keketatan pasokan, serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter bank sentral di banyak negara. Namun pada sisi lain, penurunan inflasi dunia berlangsung lebih lambat dari prakiraan semula. Tetap ketatnya pasar tenaga kerja menyebabkan inflasi di negara-negara maju masih jauh di atas sasaran yang ingin dicapai, yaitu 2%. Sementara di kelompok negara berkembang, inflasi sejumlah negara di atas sasaran seperti Brazil dan Meksiko di Amerika Latin serta Filipina di Asia, hal ini juga sejalan dengan persepsi risiko yang memburuk sejalan dengan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Berbagai kondisi tersebut pada gilirannya mendorong penguatan nilai tukar dolar AS (*strong dolar*) dan memberikan tekanan depresiasi terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk nilai tukar Rupiah.

Sumber:
Laporan Perekonomian Indonesia 2023, ISSN 0522-2572 "Sinergi Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional"

In 2023, the Indonesian economy faced hard challenges, originating from weak global economic growth and widening growth divergence between countries. After recording high growth of 3.5% in 2022, the global economic growth in 2023 fell to 3.0%, and continue to slow down to 2.8% in 2024. The optimism for recovery in early 2023 was gradually fading, in line with the continuing scarring effect and increasing geopolitical-economic fragmentation. In 2023, the global economic performance was also characterized by growth divergence between developed countries, especially the United States (US), which has relatively high growth, and emerging Market and Developing Economies (EMDEs) countries, which are experiencing decline and stagnation. In EMDEs, China's growth slowed down, influenced by weakening consumption and declining performance in the property sector. Meanwhile, the economic performance of India and ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, and Philippines) remained stable.

Simultaneously with the slowing of economic growth, the world's disinflation process is progressing slowly, thus the inflation level is still above the target for developed countries. On the one hand, world inflation decreased to 6.8% in December 2023 from the highest level in Q2 2022. The decline in inflation is in line with the decline in energy and food prices, the easing of supply scarcity, and the impact of tightening central bank monetary policy in many countries. However, on the other hand, the decline in world inflation is slower than previously predicted. The strict labor market continues to cause inflation in developed countries that are still far above the target to be achieved, of 2%. Meanwhile, in developing countries, inflation in several countries is above target, such as Brazil and Mexico in Latin America and the Philippines in Asia. This is still in line with worsening risk perceptions of high uncertainty in global financial markets. These various conditions encouraged the strengthening of the US dollar exchange rate (*strong dollar*) and put depreciatory pressure on various world currencies, including the Rupiah exchange rate.

Source:
2023 Economic Report on Indonesia, ISSN 0522-2572 "Synergy Strengthening National Economic Resilience and Revival"



Kondisi Perekonomian Indonesia

Indonesian Economic Conditions

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak kondisi global yang menurun dan ketidakpastian yang tinggi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan III 2023 tetap baik ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah penurunan kinerja ekspor sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Konsumsi swasta, termasuk konsumsi di sektor jasa tetap kuat didorong masih tingginya keyakinan konsumen, terjaminnya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, serta stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang baik didukung pertumbuhan ekonomi yang solid di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat menjadi 4,7–5,5% pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat mencapai kisaran 4,8–5,6% pada 2025.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Kinerja transaksi berjalan tetap sehat ditopang oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan pada 2023 di tengah berlangsungnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global, penurunan 1,72% (yoy) sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

Perbankan pada Desember 2023 tumbuh 10,38% (yoy) didukung oleh *appetite* bank yang masih longgar dan permintaan pembiayaan yang mulai meningkat sejalan dengan kinerja korporasi yang masih tumbuh baik. Pembiayaan perbankan syariah juga terus meningkat mencapai 15,80% (yoy) pada Desember 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,03% (yoy), antara lain didukung oleh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang makin meningkat. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan terus membaik, dipengaruhi makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan

Indonesia's economy continues to grow well and is resilient to the impact of declining global conditions and high uncertainty. Indonesia's economic growth until the third quarter of 2023 remains strong, supported by strong domestic demand amidst declining export performance that is in line with the global economic slowdown. Private consumption, including consumption in the services sector, remains strong, driven by high consumer confidence, maintained purchasing power, in line with low inflation and fiscal policy stimulus, including the provision of subsidies and various social assistance programs. Investment also remains okay, driven by the continued completion of National Strategic Projects (PSN) and non-building investment. Spatially, good economic growth is supported by solid economic growth in almost all regions in Indonesia. Economic growth is predicted to increase to 4.7–5.5% in 2024. Continued economic improvement in 2024 will be mainly driven by domestic demand in line with the increase in salaries for State Civil Apparatus (ASN), the General Election, and the development of the New National Capital City (IKN). Economic growth is predicted to increase and reach 4.8–5.6% in 2025.

Indonesia's Balance of Payments (NPI) performance remains stable to support the resilience of Indonesia's external sector. The current account performance remains healthy, supported by the trade balance surplus in 2023 amidst the ongoing slowdown in global economic growth, a decline of 1.72% (yoy), in line with the Government's fiscal policy which remains directed as a shock absorber for the impact of global economic uncertainty on domestic economic resilience. In the future, Bank Indonesia will continue to strengthen the monetary policy mix and synergy with the Government (Central and Local) to ensure inflation remains under control in the range of 2.5±1% in 2024 and 2025.

In December 2023, banking grew 10.38% (yoy), supported by loose bank appetite and demand for financing that is starting to increase, in line with corporate performance which is growing well. Sharia banking financing also increased, reaching 15.80% (yoy) in December 2023. In the MSMEs segment, credit growth achieved 8.03% (yoy), supported, among other things, by the increasing disbursement of People's Business Credit (KUR). In the future, credit growth is predicted to continue to improve, influenced by increasing domestic economic activity, which has an impact on increasing financing needs from both corporations and households, including from the younger generation whose role is increasingly higher in the economy. With these



generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan kredit diperkirakan akan meningkat menjadi 10–12% pada 2024, serta 11–13% pada 2025.

Sumber:
Laporan Perekonomian Indonesia 2023, ISSN 0522–2572 “Sinergi Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”

developments, the credit growth is predicted to be increase to 10–12% in 2024, and 11–13% in 2025.

Source:
2023 Economic Report on Indonesia, ISSN 0522–2572 “Synergy Strengthening National Economic Resilience and Revival”

Perkembangan Industri Konstruksi dan Infrastruktur Nasional Development of the National Construction and Infrastructure Industry

Pembangunan infrastruktur yang masif dan merata menjadi salah satu modal utama Indonesia untuk bisa keluar dari *middle income trap* sekaligus memberikan *multiplier effect* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri konstruksi ke depannya juga diharapkan memiliki prospek yang baik, seiring dengan fundamental perekonomian nasional yang cukup tangguh.

Lapangan usaha konstruksi pada triwulan kedua 2023 mampu tumbuh mencapai 5,23% (yoy) dan berkontribusi 9,43% bagi PDB serta menjadi salah satu penopang utama PDB di samping industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Ekonomi Indonesia triwulan IV–2023 tumbuh sebesar 5,04%. Berdasarkan sektor, lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,33%, diikuti konstruksi sebesar 7,68%; dan pertambangan dan penggalian 7,46%. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 telah ditetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaannya harus berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam (SDA), kerentanan bencana, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dengan adanya pengembangan infrastruktur dinilai mendorong pertumbuhan Kawasan industri secara massif. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara telah memperluas Kawasan–kawasan industri disekitarnya. Kecepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan indeks infrastruktur yang menjadi landasan bagi peningkatan perekonomian. Tidak hanya infrastruktur energi, transportasi, sumber daya air, perumahan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat dua peran utama infrastruktur, pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. Infrastruktur yang semakin kompetitif dinilai menjadi kunci utama dalam menarik investasi ke Indonesia.

Massive and evenly distributed infrastructure development is one of Indonesia's main assets to exit the middle–income trap while providing a multiplier effect in encouraging national economic growth. The construction industry in the future is expected to have good prospects, in line with strong national economic fundamentals.

In the second quarter of 2023, the construction business sector was able to grow by 5.23% (yoy) and contributed 9.43% to GDP, and became one of the main supports for GDP, alongside the processing, agriculture, trade, and mining industries. Indonesia's economy in the fourth quarter of 2023 grew by 5.04%. Based on sectors, the sectors growing significantly are Transportation and Warehousing at 10.33%, followed by construction at 7.68%; and mining and quarrying at 7.46%. In the 2024 Draft State Budget (RAPBN), the infrastructure budget has been set forth amounted to Rp422.7 trillion, with the objective of encouraging accelerated and equitable development. In its implementation, infrastructure development shall be sustainable, with due regards to the carrying capacity of natural resources (SDA), disaster vulnerability, and the welfare of the surrounding community.

The infrastructure development is considered to drive massive growth in industrial areas. The construction of toll roads, ports, and airports expanded the surrounding industrial areas. The infrastructure development must be carried out at high speed to catch up with the infrastructure index, which is the basis for improving the economy. In addition, development shall be carried out for energy, transportation, water resources, housing, and information and communication technology. There are two main roles of infrastructure, firstly, infrastructure as a means of production and supporting economic growth, such as roads, toll roads, energy, and dams. Second, infrastructure as the fulfillment of basic services, such as the provision of drinking water, roads and bridges, housing, sanitation, and irrigation. Increasingly competitive infrastructure is considered to be the key to attracting investment to Indonesia.



Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 sejumlah Rp116,37 triliun. Dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan dapat rampung pada semester I Tahun 2024.

Pada 2023 Kementerian PUPR juga memfokuskan alokasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,34 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang, yang tersebar pada beberapa kegiatan padat karya, diantaranya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan. Di sisi lain, ke depan tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Sumber:

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia HM.4.6/427/SET.M.EKON.3/11/2023, 1 November 2023, Berita Resmi Statistik No.13/02/Th.XXVII, 5 Februari 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>

One instance of agency with an important role in infrastructure development is the Ministry of Public Works and Housing (PUPR). In 2023, the Ministry of PUPR received an allotted budget of Rp125.18 trillion. The amount is greater than the 2022 budget ceiling of Rp116.37 trillion. In implementing the infrastructure expenditure program for the 2023 fiscal year, the Ministry of PUPR will focus on completing ongoing construction, especially the National Strategic Project (PSN), which is targeted to finish in the first semester of 2024.

In 2023, the Ministry of PUPR also focused their budget allocations to boost economic growth through labor-intensive programs with an allotted budget of Rp14.34 trillion for the employment of 701 thousand people, spread across several labor-intensive activities, including in the fields of water resources, roads and bridges, residential infrastructure, and housing. However, in the future, the challenges of infrastructure development will be even harder, especially with funding needs that continue to increase every year.

Source:

Press Release from the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia HM.4.6/427/SET.M.EKON.3/11/2023, 1 November 2023, Official Statistics News No. 13/02/Th.XXVII, 5 February 2024, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023>

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Operational Review by Business Segment

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sejak didirikan 14 tahun yang lalu, PT PII telah mendapatkan beberapa kali perluasan mandat serta penambahan penugasan, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan, dan kredibel.

Melalui PP 55/2020, Pemerintah kembali memberikan perluasan mandat kepada PT PII untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penjaminan Pemerintah yang semakin meningkat serta dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka PT PII diberikan mandat untuk memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional, serta untuk memberikan penjaminan Pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Since its establishment 14 years ago, to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia, IIGF has received several mandate expansions and additional assignments, by providing guarantees that are carried out in an accountable, transparent, and credible process.

Pursuant to PP 55/2020, the Government again has expanded its mandate to IIGF to support Government policies to fulfill the increasing need for Sovereign guarantees, and to support the National Economic Recovery (PEN) Program due to the Covid-19 pandemic. Based on this Government Regulation, IIGF is mandated to provide Sovereign Guarantees in the infrastructure sector, carry out activities related to the Sovereign guarantees, and other activities related the project development that supports the national economy, as well as Sovereign guarantees in financing in other fields in addition to the infrastructure assigned by the Government.



Dengan semakin meningkatnya kebutuhan penjaminan Pemerintah, Pemerintah memandang perlunya penguatan mandat PT PII, khususnya untuk memberikan penjaminan di bidang lainnya selain infrastruktur serta optimalisasi pengawasan dan *monitoring* kegiatan penjaminan dan investasi PT PII untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. PMK ini merupakan penggantian dari PMK No. 95/PMK.08/2017 yang memuat ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, dan tata kelola pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur dan pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur oleh persero. Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII saat ini telah berkembang tidak hanya terbatas pada proyek KPBU, tetapi juga Penjaminan BUMN dalam rangka Program PEN dan Penjaminan dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah.

Selain itu, PT PII dilibatkan secara aktif dalam memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan proyek infrastruktur di berbagai sektor, dan mendukung pelaksanaan program PEN.

Sejalan dengan perluasan mandat dalam Anggaran Dasar dan penugasan Pemerintah kepada PT PII tersebut, kegiatan usaha PT PII membagi bisnis Perseroan menjadi 4 (empat) segmen usaha, yang meliputi (1) Penjaminan Proyek Infrastruktur; (2) Pengelolaan Dana; (3) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; dan (4) Lainnya.

Segmen Usaha Penjaminan Guarantee Segment

Segmen Penjaminan meliputi 2 (dua) kelompok besar kegiatan usaha, yaitu:

1. Penjaminan Infrastruktur yang terbagi ke dalam KPBU dan Non KPBU; dan
2. Non Infrastruktur yang terbagi ke dalam Penjaminan Pelaku Usaha Korporasi dan Penjaminan BUMN.

Uraian masing-masing kegiatan usaha serta profitabilitas segmen Penjaminan dapat dilihat di bawah ini.

With the increasing need for Sovereign guarantees, the Government sees the need to strengthen IIGF's mandate, particularly to provide guarantees in other areas besides infrastructure, and optimize supervision and monitoring of IIGF's guarantee and investment activities for the future. Therefore, the Minister of Finance stipulated Minister of Finance Regulation (PMK) No. 148/PMK.08/2022 on the Scope of Infrastructure Guarantee Management through Infrastructure Guarantee Business Entities. This PMK is an amendment to PMK No. 95/PMK.08/2017, which contains further provisions regarding the scope and governance of the activities in the context of Sovereign Guarantees in the infrastructure sector and financing in other sectors in addition to infrastructure by the company. IIGF's sovereign guarantee has developed, it is not only limited to PPP projects, but is also provided for SOEs Guarantee for the PEN Program and Government Food Reserve.

In addition, IIGF is actively involved in ensuring the sustainability of national strategic projects, one of which is the relocation of the New National Capital City (IKN), the development of infrastructure projects in various sectors, and implementation of the PEN program.

In line with the mandate's expansion in the Articles of Association and the Government's assignment to IIGF, IIGF's business activities divide the Company's business into four (4) business segments, which include (1) Infrastructure Project Guarantee; (2) Investment; (3) Project Preparation and Transaction Advisory; and (4) Others.

Guarantee Segment includes two (2) large business activities:

1. Infrastructure Guarantee, which is divided into PPP and Non-PPP; and
2. Non-Infrastructure, which is divided into Guarantees for Corporate Business Entities and Guarantees for SOEs.

The description of each business activity and profitability of the Guarantee segment is as follows.



Penjaminan Infrastruktur

Infrastructure Guarantee

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024, kebutuhan penyediaan infrastruktur di Indonesia hanya dapat terpenuhi sekitar 30% oleh APBN, ditambah lagi dengan dampak pandemi Covid-19 yang menambah tekanan kepada alokasi APBN untuk sektor infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah mengajak Badan Usaha untuk bekerja sama dalam melakukan penyediaan infrastruktur. Salah satu skema kerja sama yang saat ini didorong oleh Pemerintah adalah dengan skema KPBU seperti yang tertuang pada Perpres 38/2015 beserta seluruh peraturan & kebijakan turunannya yang menyediakan beberapa *fiscal tools* untuk dapat menarik minat badan usaha. Mengacu pada Perpres 38/2015, salah satu bentuk *fiscal tools* untuk KPBU adalah Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk dapat memberikan kenyamanan mitra Badan Usaha serta pihak lenders dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah. Sebagai BUPI, PT PII mendapat mandat dari Pemerintah untuk menjalankan kebijakan satu pelaksana (*Single Window Policy*) bagi Pemerintah dalam memberikan Penjaminan Pemerintah dengan memperhatikan kaidah-kaidah manajemen risiko sesuai dengan prinsip dari skema KPBU. Dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT PII berpartisipasi secara aktif sejak tahapan penyiapan proyek KPBU sampai dengan pelaksanaan proyek hingga masa konsesi KPBU berakhir. Partisipasi PT PII pada tahapan penyiapan proyek dilakukan melalui kegiatan pendampingan kepada PJPB seperti pelaksanaan audiensi, koordinasi, korespondensi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas (*capacity building*), strukturisasi proyek KPBU, dan membantu memastikan kelayakan hukum dan kelembagaan, teknis, finansial, lingkungan dan sosial dan kesesuaian terhadap prinsip alokasi risiko dari proyek KPBU. Setelah tahapan penyiapan dan transaksi, PT PII melakukan asistensi kepada PJPB dalam implementasi rencana mitigasi risiko mulai dari Konstruksi hingga berakhirnya periode penjaminan dengan melakukan pemantauan proyek melalui *Joint Monitoring Committee* (JMC)/Tim Pemantauan Bersama dengan para pemangku kepentingan terutama untuk memantau risiko-risiko proyek yang dialokasikan kepada PJPB. Sebagai bagian dari upaya mitigasi proyek, PT PII juga secara rutin mengadakan rapat atau mengirimkan hasil pemantauan proyek kepada PJPB atau perwakilannya. Selain itu, PT PII bersama para pemangku kepentingan lainnya secara aktif melakukan pemantauan terhadap risiko proyek yang menimbulkan kewajiban finansial bagi PJPB, misalnya risiko penyerapan air curah oleh Perumdah pada proyek SPAM Umbulan dan SPAM Kota Bandar Lampung dikarenakan keterlambatan pembangunan jaringan distribusi, risiko keterlambatan pengadaan tanah pada proyek jalan tol dikarenakan belum dapat diserahkannya tanah dari Pemerintah kepada Badan Usaha secara 100% pada batas waktu yang telah ditentukan, maupun kemungkinan adanya risiko politik pada proyek.

In accordance with the National 2019–2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), the need for infrastructure provision in Indonesia can only be met by approximately 30% of the State Budget. In addition, the COVID-19 pandemic heavily affects the State Budget for further pressure on the infrastructure sector. Therefore, the Government invites Business Entities to work together in providing infrastructure. One of the cooperation schemes currently being encouraged by the Government is the PPP scheme as stated in Presidential Decree 38/2015 and all its derivative regulations & policies, which provide several fiscal tools to attract the business entities' interests. With reference to Presidential Decree 38/2015, one form of the fiscal tool for PPP is a Sovereign Guarantee through the Infrastructure Guarantee Agency (BUPI) to provide convenience for Business Entity's partners and lenders in collaborating with the Government. As a BUPI, IIGF has a mandate from the Government to implement a Single Window Policy for the Government in providing Sovereign Guarantees taking into account the risk management principles in accordance with the PPP scheme principles. In carrying out guarantee activities, IIGF actively participates, from the PPP project preparation stage, project implementation, up to the PPP concession period ends. IIGF's participation in the project preparation stage is carried out via assistance to the GCA, such as holding hearings, coordination, correspondence, outreach and capacity building, structuring PPP projects, and helping to ensure legal and institutional, technical, financial, environmental and social feasibility, and conformity to the risk allocation of PPP projects. After the preparation and transaction phases, IIGF provides assistance to the GCA in implementing risk mitigation plans, starting from construction until the end of the guarantee period, by monitoring the project through the Joint Monitoring Committee (JMC) with stakeholders, especially to monitor project risks allocated to the GCA. As part of project mitigation efforts, IIGF regularly holds meetings or sends project monitoring results to the GCAs or their representatives. In addition, IIGF, in collaboration with other stakeholders, actively monitors project risks that may raise financial obligations for the GCA, e.g., the risk of bulk water absorption by Perumdah in the Umbulan SPAM and Bandar Lampung City SPAM projects due to delays in the construction of distribution networks, risks of delays in land acquisition for toll road projects due to the failure to handover 100% of the land from the Government to Business Entities within the targeted time limit, as well as the possibility of political risks in the project.



Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang mencabut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, PT PII dapat mendukung penjaminan 22 sektor proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang meliputi: Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat, Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan termasuk Bio Energi, Konservasi Energi, Pariwisata, Kesehatan, Lembaga Masyarakat, Ekonomi Fasilitas Perkotaan, Perumahan Rakyat, Transportasi, Jalan, Sumber Daya Air dan Irigasi, Telekomunikasi dan Informatika, Ketenagalistrikan, Sistem Pengelolaan Persampahan dan/atau Limbah Berbahaya dan Beracun, Fasilitas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga, Kesenian dan Budaya, Kawasan, Bangunan Gedung Negara, Ekosistem Industri, dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2009, PT PII memperoleh perluasan mandat untuk memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, Penjaminan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PII tidak lagi terbatas pada proyek infrastruktur Pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU. Perluasan mandat tersebut kemudian didukung dengan terbitnya PMK 101/2018 yang mulai berlaku di tahun 2018.

Penjaminan Baru

New Guarantee

Pada tahun 2023 PT PII memberikan 4 penjaminan baru dengan nilai total investasi proyek sebesar Rp27,9 triliun dan nilai penjaminan sebesar Rp4,4 triliun yang meliputi:

Penjaminan proyek infrastruktur:

1. Tol Akses Pelabuhan Patimban dengan Skema KPBU
2. PJU Kabupaten Lombok Barat dengan Skema KPBU
3. Tol JORR *Elevated* Cikunir Ulujami dengan Skema KPBU

Penjaminan non infrastruktur:

Penjaminan Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (PT RNI) dalam Rangka Cadangan Pangan Pemerintah.

With reference to the Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia No. 7 of 2023 on the Implementation of Public Private Partnership in Providing Infrastructure, which revokes the Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia No. 4 of 2015 jo. Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 on the Procedures for Implementing Public Private Partnership, IIGF shall support guarantees for 22 infrastructure project sectors with a PPP scheme which includes: Drinking Water, Centralized Wastewater Management System, Local Wastewater Management System, Oil and Gas and Renewable Energy including Bio Energy, Energy Conservation, Tourism, Healthcare, Correctional Facilities, Urban Facilities Economy, Public Housing, Transportations, Roadway, Water Resources and Irrigation, Telecommunications and Informatics, Electricity, Waste Management System and/or Hazardous and Toxic Waste, Education, Research and Development Facilities, Facilities and Infrastructure for Sports, Arts and Culture, Region, and State Building, Industrial Ecosystem, and Battery-powered Electric Vehicle.

Pursuant to Government Regulation No. 50 of 2016 on the Amendment to the Government Regulation No. 35 of 2009, IIGF received an expanded mandate to strengthen its role in supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia. Thus, Sovereign guarantees implemented by IIGF are no longer limited to government infrastructure projects under the PPP scheme. This mandate expansion was then supported by the issuance of PMK 101/2018 which came into effect in 2018.

In 2023, IIGF provided 4 new guarantees with an investment projects value of Rp27,9 trillion and a guaranteed value of Rp4,4 trillion, which includes:

Infrastructure project guarantee:

1. Patimban Port Access Toll under PPP Scheme
2. West Lombok Regency Public Street Lighting under the PPP Scheme
3. Cikunir Ulujami JORR *Elevated* Toll Road under PPP Scheme

Non-infrastructure guarantee:

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (PT RNI) Loan Guarantee for Government Food Reserves.



No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
11	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 60,1 km Located in West Java Province with a total length of 60.1 km	8,41	15 tahun 15 years
12	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total panjang 38,3 km Located in East Java Province with a total length of 38.3 km	12,93	15 tahun 15 years
13	Jalan Tol Serang-Panimbang Serang-Panimbang Toll Road	Terletak di Provinsi Banten dengan total 83,7 km Located in Banten Province 83.7 km long	8,58	15 tahun 15 years
14	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Jakarta - South Cikampek II Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Barat sepanjang 64 km Located in West Java Province, 64 km long	14,69	15 tahun 15 years
15	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Probolinggo-Banyuwangi Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km Located in East Java Province with a section length approximately 172.9 km	23,39	15 tahun 15 years
16	SPAM Kota Bandar Lampung Bandar Lampung City SPAM	Proyek penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung dengan kapasitas air 750 l/detik dan panjang pipa transmisi 22 km Drinking water supply project in Bandar Lampung City with a water capacity of 750 l/second and a transmission pipe length of 22 km	0,75	15 tahun 15 years
17	SPAM Semarang Barat West Semarang SPAM	Proyek penyediaan air minum di Kota Semarang dengan kapasitas 1.000 l/ detik Drinking water supply project in Semarang City with a capacity of 1,000 l/second	0,42	15 tahun 15 years
18	Kereta Api Makassar-Parepare Makassar-Parepare Train	Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan Area Layanan Sulawesi Selatan meliputi 5 Kabupaten/Kota: Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare Public Railway Infrastructure with the South Sulawesi Service Area covering 5 Regencies/Cities: Maros Regency, Pangkajene and Islands Regency, Barru Regency, Makassar City, and Parepare City	0,99	14 tahun sejak Tanggal Operasional Komersil (TOK) 2 14 years since Commercial Operation Date (COD) 2
19	Satelit Multifungsi Pemerintah Government Multifunctional Satellite	Satelit dengan teknologi HTS (<i>High Throughout Satellite</i>) dengan kapasitas 150 Gbps Satellite with HTS (High Throughout Satellite) technology with a capacity of 150 Gbps	6,42	12 tahun 12 years
20	Jalan Tol Semarang-Demak Semarang-Demak Toll Road	Terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 27 km Located in Central Java Province, 27 km long	5,44	15 tahun 15 years
21	Jalan Non Tol Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan East Sumatra Non-Toll Cross Road in South Sumatra Province	Terletak di sisi Timur Jalan Sumatera Selatan di Kota Palembang sepanjang 29,87 km Located on the East side of South Sumatra Roads in Palembang City, 29.87 km long	0,98	11 tahun 11 years
22	Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo Toll Road	Jalan tol ini menghubungkan Kota Solo Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kulon Progo DIY dengan panjang 96,5 km The toll road connects the cities of Solo (Central Java), Yogyakarta and Kulon Progo (Special Region of Yogyakarta), 96.5 km long	26,64	15 tahun 15 years
23	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Yogyakarta-Bawen Toll Road	Jalan tol ini melalui Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Sleman dengan panjang 75,82 km This toll road passes through Magelang Regency, Magelang City, Semarang Regency, Temanggung Regency, and Sleman Regency with a length of 75.82 km	14,26	15 tahun 15 years



No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan (setelah COD) Guarantee Term (after COD)
24	SPAM Kota Pekanbaru Pekanbaru City SPAM	Proyek penyediaan air minum di Kota Pekanbaru dengan kapasitas 750 lpd Drinking water supply project in Pekanbaru City with a capacity of 750 lps	0,50	15 tahun 15 years
25	SPAM Regional Jatiluhur I Jatiluhur I Regional SPAM	Proyek penyediaan air minum Regional dari Jatiluhur dengan kapasitas 4.750 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab. Karawang Regional drinking water supply project from Jatiluhur with a capacity of 4,750 lps to Special Capital Region of Jakarta Province, Bekasi Regency, Bekasi City, and Karawang Regency	1,68	10 tahun 10 years
26	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau East Sumatra Cross Road Preservation in Riau Province	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau East Sumatra Cross Road Preservation in Riau Province	0,53	11 tahun 11 years
27	SPAM Regional Karian Serpong Karian Serpong Regional SPAM	Proyek penyediaan air minum Regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.850 lpd ke Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Regional drinking water supply project from Karian Dam with a capacity of 4,850 lpd to Special Capital Region of Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City.	2,43	15 tahun 15 years
28	Jembatan Callender Hamilton Hamilton Callender Bridge	Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa Callender Hamilton Bridge Replacement and/or Duplication on Java Island	2,20	10 tahun 10 years
29	Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Street Lighting Equipment (APJ) in Madiun Regency, East Java	Pembangunan baru (tanpa <i>retrofit</i>), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. New construction (without retrofit), operation and maintenance of 7,459 points across National Roads, Main Regency Roads, and Urban Roads.	0,10	4 tahun 4 years
30	Proyek <i>Proving Ground</i> Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat Proving Ground Project for Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification (BPLJSKB) in Bekasi, West Java	Fasilitas pengujian di luar ruangan (<i>outdoor test</i>) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi <i>United Nations Agreement</i> Outdoor testing facilities comply with international standards that have adopted the United Nations Agreement	1,98	12 tahun 12 years
31	Tol Akses Patimban Patimban Access Toll Road	Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 km akan mendukung Pelabuhan Patimban dan pengembangan wilayah sekitarnya Patimban Access Toll Road with the length of 37.05 km, shall support Patimban Port and the development of the surrounding area	5,02	15 tahun 15 years
32	Penerangan Jalan Umum – Lombok Barat West Lombok Public Street Lighting	Fasilitas Penerangan Jalan Umum terhadap jalan sepanjang 545,1 km di 12.915 titik pada 10 Kecamatan Kabupaten Lombok Public Street Lighting Facilities alongside the length of 545.1 km of roads at 12,915 points in 10 Sub-Districts of Lombok Regency	0,09	7 tahun 7 years
33	Tol JORR Elevated Cikunir Ulujami JORR Elevated Cikunir Ulujami Toll Road	Jalan Tol yang bertujuan untuk mengurangi kapasitas dan kepadatan di Jalan Tol JORR-1 serta meningkatkan pelayanan jalan, menyediakan rute alternatif, dan memperkuat jaringan jalan tol di daerah Jabodetabek. The Toll Road aims to reduce capacity and congestion on the JORR-1 Toll Road as well as improve road services, provide alternative routes, and strengthen the toll road network in the Jabodetabek area.	21,26	15 tahun 15 years



Tabel Ringkasan Status Proyek Penjaminan Non-KPBU

Table: Non-PPP Guarantee Project Status

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan Guarantee Term
1	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mandalika Special Economic Zone (SEZ)	Pengembangan wilayah Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang terletak di kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Development of the Mandalika Special Economic Zone Tourism area which is located in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara	4,59	35 tahun 35 years
2	Hydropower Programme	Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro yang terletak di empat provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua) dengan total kapasitas 195 MW Hydroelectric and Mini Hydro Power Plants located in four provinces (South Sulawesi, Southeast Sulawesi, West Kalimantan, and Papua) with a total capacity of 195 MW	6,90	15 Tahun Sejak Pinjaman Efektif 15 Years Since Effective Loans
3	PLTP Dieng-2 & Patuha-2 GPP Dieng-2 & Patuha-2	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berlokasi di Dieng Jawa Tengah dan Gunung Patuha Jawa Barat, dengan kapasitas masing-masing sebesar 55 MW Geothermal Power Plants located in Dieng, Central Java, and Mount Patuha, West Java, with a capacity of 55 MW each	6,95	20 tahun 20 years
4	Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku- Papua dengan skema <i>Result-Based Lending</i> (RBL-KMP) Construction of the Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network with Result-Based Lending (RBL-KMP) Scheme	Terletak di Kalimantan dan Maluku-Papua, proyek pembangunan jaringan distribusi listrik ini ditargetkan untuk menambah sambungan listrik hingga 6,7 juta pelanggan. Located in Kalimantan and Maluku-Papua, the electricity distribution network construction project is targeted to increase electricity grid for up to 6.7 million customers.	30,6	20 tahun 20 years
5	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan skema <i>Result-Based Lending</i> (RBL-SNT) Development of Sulawesi and Nusa Tenggara Network Distribution with the Result-Based Lending Scheme (RBL-SNT)	Terletak di Sulawesi dan Nusa Tenggara, target dari Proyek ini adalah peningkatan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, the Project's target is to increase electricity connections for up to 7.7 million customers	29,79	15 Tahun 15 years
6	Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali Construction of East Java and Bali Distribution Network	Pembangunan sistem distribusi Jaringan Tegangan Menengah, Jaringan Tegangan Rendah, trafo, dan sambungan di wilayah Jawa Timur dan Bali Construction of distribution systems for Medium Voltage Networks, Low Voltage Networks, transformers, and connections in the East Java and Bali regions	17,47	20 tahun 20 years
7	Penjaminan Proyek Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah (<i>Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP</i>) Guarantee of the Transmission and Distribution Network Development Project in Western and Central Java (Sustainable and Reliable Energy Access Program/SREAP)	Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas <i>charging station</i> kendaraan listrik Gradual construction of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure for electric vehicles' charging station	40,87	20 tahun 20 years
8	Penjaminan Pembiayaan Proyek Pembangunan Pembangkit PLTU Tahap III Program 35.000 MW (PLTU Timor-1 2x50 MW) Financing Guarantee for the 35,000 MW Phase III SPP Power Plant Construction Project (SPP Timor-1 2x50 MW)	Pembangunan Pembangkit PLTU Tahap III Program 35.000 MW (PLTU Timor-1 2x50MW) Construction of SPP Phase III 35,000 MW Program (SPP Timor-1 2x50MW)	3,72	10 tahun 10 years



Ringkasan Status Penjaminan Proyek Non Infrastruktur – Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Status of Non-Infrastructure Project Guarantee – SOE Guarantee in the National Economic Recovery (PEN) Program.

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan Guarantee Term
1	Penjaminan Pemerintah atas Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2021 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sovereign Bond Guarantee III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2021 in the National Economic Recovery Program	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi Providing guarantees for the risk of default on bond payments	1,77	Seri A: 5 tahun Seri B: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years
2	Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Sovereign Loan Guarantee of PT Waskita Karya (Persero) in terms of National Economic Recovery Program	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar bunga pinjaman Providing guarantees for the risk of default on interest payments	8,08	3 tahun 3 years
3	Penjaminan Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*) Bonds IV Guarantee of PT Waskita Karya (Persero) for the National Economic Recovery*)	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar obligasi Providing guarantees for the risk of default on bond payments	2,13	Seri A: 5 tahun Seri B: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years
4	Penjaminan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Sukuk Mudharabah I Guarantee of PT Waskita Karya (Persero) for the National Economic Recovery	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar sukuk Providing guarantees for the risk of default on sukuk payments	1,15	Seri A: 5 tahun Seri B: 7 tahun Series A: 5 years Series B: 7 years
5	Penjaminan Pinjaman Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya PT Industri Kereta Api (Persero)*) Loan Guarantee for G20 Summit Electric Buses and Bandung and Surabaya BTS of PT Industri Kereta Api (Persero)*)	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman 53 unit Bus Listrik KTT G20 dan BTS Bandung & Surabaya Providing guarantees for the risk of default on loan payment for 53 units of the G20 KTT Electric Bus and BTS Bandung & Surabaya	0,15	4 tahun 4 years
6	Penjaminan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Perum DAMRI Working Capital Loans and Investment Loans Guarantee of Perum DAMRI	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman guna peremajaan armada dan <i>maintenance facility</i> Providing guarantees for the risk of loan default for fleet rejuvenation and facility maintenance	0,097	4 tahun 4 years
7	Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Len Industri (Persero) Working Capital Loan Guarantee of PT Len Industri (Persero)	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman Pelaksanaan 3 proyek penugasan dari kementerian Pertahanan RI Providing guarantees for the risk of loan default. Implementing 3 assignment projects from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia	2,60	4 tahun 4 years
8	Penjaminan Kredit Modal Kerja PT Pertamina (Persero) dalam rangka Talangan Pembayaran Dana Kompensasi dan Subsidi BBM dan LPG 3 Kg Working Capital Loan Guarantee of PT Pertamina (Persero) for Payment of Compensation Funds and Fuel Subsidies and 3 Kg LPG	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman pembayaran dana kompensasi dan subsidi BBM dan LPG 3 Kg Providing guarantees for the risk of default on loan payment of compensation funds and 3 kg fuel and LPG subsidies	47,19	2 tahun 2 years



Ringkasan Status Penjaminan Proyek Non Infrastruktur – Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program CPP

Status of Non-Infrastructure Project Guarantee – SOE Guarantee in the CPP Program

No.	Nama Proyek Project Name	Uraian Description	Nilai Proyek (Rp triliun) Project Value (Rp trillion)	Durasi Penjaminan Guarantee Term
1	Penjaminan Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Loan Guarantee in Implementing Government Food Reserves (CPP) in 2023	Pemberian Penjaminan atas risiko gagal bayar pinjaman untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2023 Providing guarantees for the risk of loan default for the Government Food Reserves (CPP) in 2023	1,50	Maks. 6 Bulan Max. 6 Months

Kontijensi dan Kapasitas Penjaminan

Contingencies and Guarantee Capacity

Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi Pemerintah karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata investor potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, kemampuan modal sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPBU infrastruktur.

Dalam melaksanakan penjaminan proyek-proyek infrastruktur, PT PII menggunakan ekuitas Perseroan sebagai kapasitas penjaminan yang terutama bersumber dari PMN. Sampai dengan 31 Desember 2023, PMN yang diterima Perseroan sebesar Rp9,085 triliun dengan rincian sebagai berikut:

The Government prioritizes the adequacy of guarantee capacity because it affects IIGF's credibility in the eyes of potential investors in developing infrastructure projects. Therefore, capital capability greatly determines the capacity to provide guarantees for infrastructure PPP projects.

In carrying out infrastructure projects, IIGF utilizes the Company's equity as the guarantee capacity, which is mainly sourced from SState Capital Injection ("PMN"). As of 31 December 2023, the Company received Rp9.085 trillion of PMN with the following details:

Referensi Reference	Jumlah Modal Disetor Additional Paid-Up Capital	Akumulasi Modal PT PII IIGF Capital Accumulation	Modal Dasar Authorized Capital
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 Government Regulation No. 35 of 2009	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp4 triliun Rp4 trillion
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2010 Government Regulation No. 88 of 2010	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp2 triliun Rp2 trillion	Rp4 triliun Rp4 trillion
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2011 Government Regulation No. 55 of 2011	Rp1,5 triliun Rp1.5 trillion	Rp3,5 triliun Rp3.5 trillion	Rp4 triliun Rp4 trillion
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2012* Government Regulation No. 68 of 2012*	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp4,5 triliun Rp4.5 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2015 Government Regulation No. 94 of 2015	Rp1,5 triliun Rp1.5 trillion	Rp6 triliun Rp6 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2016 Government Regulation No. 79 of 2016	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp7 triliun Rp7 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2017 Government Regulation No. 57 of 2017	Rp1 triliun Rp1 trillion	Rp8 triliun Rp8 trillion	Rp9 triliun Rp9 trillion
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2020** Government Regulation No. 79 of 2020**	Rp1,57 triliun Rp1.57 trillion	Rp9,57 triliun Rp9.57 trillion	Rp20 triliun Rp20 trillion
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2022 Government Regulation No. 53 of 2022	Rp1,08 triliun Rp1.08 trillion	Rp10,66 triliun Rp10.66 trillion	Rp20 triliun Rp20 trillion

*) Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp9 triliun.

**) Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 tanggal 19 November 2020., Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp20 triliun.

*) Based on the shareholders' resolution, stipulated in the notarial deed Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No. 145 dated 30 August 2012, the Government as shareholder approved an increase in the Company's authorized capital to Rp9 trillion.

**) Based on the shareholders' resolution, stipulated in the notarial deed Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. No. 14 dated 19 November 2020, the Government as shareholder approved an increase in the Company's authorized capital to Rp20 trillion.



Secara bertahap PT PII mendapat mandat untuk mengurangi ketergantungan kepada PMN dalam meningkatkan kapasitas penjaminan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("PP 78/2010").

Dalam berbagai diskusi yang dilakukan secara intensif dengan para mitra terkait, PT PII melakukan penyusunan kerangka penyediaan dukungan dan penjaminan bersama Pemerintah yang lebih terintegrasi.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham PT PII melalui KMK 497/2020 menyetujui peningkatan modal dasar PT PII menjadi Rp20 triliun, yang dilanjutkan dengan penambahan PMN kepada PT PII sebesar Rp1,57 triliun berdasarkan PP 79/2020 pada tanggal 30 Desember 2020. Inisiatif ini dilakukan guna memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas PT PII dalam rangka mendukung program PEN serta mendorong perekonomian nasional melalui penugasan Pemerintah kepada PT PII.

Nilai ekuitas Perseroan per Desember 2023 sebesar Rp15,96 triliun (termasuk tambahan PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN sebesar Rp 1,57 triliun). Sejak berdiri sampai dengan Desember tahun 2023 PT PII telah menjamin 50 Proyek dengan total Proyek KPBU dan non-KPBU berjumlah 41 proyek dengan nilai estimasi proyek sebesar Rp431,92 triliun yang terdiri dari Proyek KPBU & non-KPBU yang telah mencapai efektif penjaminan sebesar Rp362,22 triliun dan Proyek KPBU & non-KPBU yang telah selesai proses penandatanganan *Guarantee Agreement* (GA) sebesar Rp69,71 triliun serta 9 penjaminan proyek non infrastruktur dengan total nilai penjaminan sebesar Rp91 triliun.

Jumlah eksposur penjaminan atas proyek yang dijamin oleh PT PII per Desember 2023 ialah sebesar Rp91 triliun yang terdiri dari proyek Infrastruktur KPBU dan non-KPBU sebesar Rp83 triliun serta non-Infrastruktur sebesar Rp8 triliun, ekuitas PT PII tanpa memperhitungkan PMN PEN adalah sebesar Rp14,4 triliun dan *Gearing Ratio* sampai dengan Desember 2023 adalah 5,8x.

Gradually, IIGF received a mandate to reduce dependence on the State Capital Injection (PMN) in increasing its guarantee capacity, as stipulated in Presidential Regulation No. 78 of 2010 on the Infrastructure Guarantees in Public Private Partnership Carried Out Through Infrastructure Guarantee Agency ("PP 78/2010").

In various intensive discussions with related partners, IIGF prepared a more integrated framework for providing support and guarantees with the Government.

In 2020, the Minister of Finance, as IIGF's Shareholder, via KMK 497/2020 approved an increase in IIGF's authorized capital to Rp20 trillion, which was followed up by additional PMN to IIGF amounted to Rp1.57 trillion based on PP 79/2020 on 30 December 2020. This initiative was carried out to improve the capital structure and increase the capacity of IIGF to support the PEN program and encourage the national economy via government assignments to IIGF.

The Company's equity as of December 2023 was Rp15.96 trillion (including additional PMN for implementing PEN assignments of Rp1.57 trillion). Since its establishment, as of December 2023, PT PII has guaranteed 50 projects with a total of 41 PPP and Non-PPP Projects, with an estimated project value of Rp431.92 trillion, consisting of PPP & Non-PPP Projects which have achieved effective guarantees of Rp362.22 trillion, and PPP & Non-PPP Projects that have just finalized their *Guarantee Agreement(s)* (GA) of Rp69.71 trillion and 9 guarantee non-infrastructure projects with a total guarantee value of Rp91 trillion.

As of December 2023, the amount of guarantee exposure for projects guaranteed by IIGF was Rp91 trillion, consisting of PPP and Non-PPP Infrastructure projects of Rp83 trillion and Non-Infrastructure projects of Rp8 trillion. Therefore, IIGF's equity without taking into account PMN PEN was Rp14.4 trillion with a *Gearing Ratio* of 5.8x.



Appraisal Penjaminan Guarantee Appraisal

Dalam menetapkan kelayakan proyek KPBU dari aspek teknis dan finansial sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010 serta peraturan perubahan yang terkait), PT PII mengacu pada proses *appraisal* penjaminan yang bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi yang komprehensif atas dokumen Usulan Penjaminan proyek yang disampaikan oleh PJPK. Adapun proses *appraisal* proyek KPBU mengacu pada Kerangka Evaluasi *Appraisal* yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu, dimana PT PII melakukan evaluasi kelayakan proyek KPBU atas berbagai macam aspek, yaitu teknis, finansial, ekonomi, risiko, kapasitas PJPK, hukum, serta lingkungan dan sosial. Adapun proses evaluasi yang dilakukan merupakan proses evaluasi berbasis risiko, dimana risiko-risiko dari tiap aspek yang dievaluasi akan diidentifikasi, dianalisis, dialokasikan ke pihak yang paling mampu mengendalikan risiko, serta dimitigasi. Proses *appraisal* juga dapat memanfaatkan keahlian dari pihak-pihak yang independen untuk meningkatkan kualitas evaluasi sehingga diharapkan *output* dari proses appraisal dapat meningkatkan keberlangsungan dan bankabilitas proyek KPBU yang akan dijamin. Terkait dengan proses *appraisal* untuk proyek non-KPBU, PT PII mengacu pada masing-masing regulasi terkait fasilitas penjaminan yang akan diberikan dimana secara umum proses *appraisal* akan dilakukan terhadap aspek hukum, finansial, teknis dan risiko. Dalam proses *appraisal* ini, Divisi Project Appraisal, yang berada di bawah Direktur Bisnis, ditunjuk sebagai koordinator dari proses *appraisal* penjaminan.

Hingga akhir Desember 2023, proses *appraisal* telah dilakukan terhadap 5 proyek KPBU dan 3 proyek non-KPBU. Dimana untuk kelima proyek KPBU yang dilakukan evaluasi mencakup sektor jalan tol, jalan non tol, perumahan, dan transportasi darat sedangkan untuk ketiga Proyek non-KPBU dilakukan terhadap fasilitas pinjaman BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan, jasa angkutan dan transportasi, dan pangan.

In determining the PPP project feasibility from the technical and financial aspects as stipulated in statutory regulations (Presidential Decree 78/2010 and PMK 260/2010 and related amendment to the regulations), IIGF refers to the guarantee appraisal process, with the objective to carry out a comprehensive evaluation of the Guarantee Proposal document submitted by the GCA. PPP project appraisal refers to the Appraisal Evaluation Framework as updated from time to time, in which IIGF evaluates the feasibility of PPP projects on various aspects, i.e., technical, financial, economic, risk, GCA capacity, legal, as well as environmental, and social. The evaluation is in the form of a risk-based evaluation, in which the risks from each aspect evaluated will be identified, analyzed, and allocated to parties deemed capable of controlling the risks and mitigating them. The appraisal process can also utilize the expertise of independent parties to improve the evaluation quality. Thus, the output from the appraisal process shall increase the sustainability and bankability of the PPP project to be guaranteed. In terms of appraisal process for Non-PPP projects, IIGF refers to relevant regulation related to the guarantee facilities that will be provided, whereas in general the appraisal process will be carried out on legal, financial, technical, and risk aspects. In this appraisal process, the Project Appraisal Division, which is under the Business Director, is appointed as the coordinator of the guarantee appraisal process.

As of the end of December 2023, 5 PPP projects and 3 non-PPP projects have been appraised. The five PPP projects evaluated covered the toll road, non-toll road, housing, and land transportation sectors. The three non-PPP projects evaluated was carried for the SOEs loan facilities operating in the electricity, transport and transportation services, and food sectors.

Tabel Appraisal Penjaminan dalam Proyek KPBU dan Non-KPBU

Table: Guarantee Appraisal in PPP and non-PPP Projects

No.	Proyek KPBU PPP Project	No.	Proyek Non-KPBU Non-PPP Project
1	Jalan Non Tol Trans Papua Trans Papua Non-Toll Road	1	Penjaminan Pinjaman PT PLN Loan Guarantee for PT PLN
2	Jalan Tol Bogor-Serpong Bogor-Serpong Toll Road	2	Penjaminan Pinjaman PT RNI Loan Guarantee for PT RNI
3	APJ Kabupaten Lombok Barat West Lombok Regency Street Lighting Equipment	3	Penjaminan Pinjaman PT KAI Loan Guarantee for PT KAI
4	APJ Kota Denpasar Denpasar Street Lighting Equipment		
5	Rumah Susun Karawang Spuur Karawang Spuur Flats		



Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur – KPBU

Infrastructure Project Guarantee Portfolio – PPP

Sektor Jalan dan Jembatan

Roads and Bridges

Proyek Jalan Tol Batang – Semarang Batang-Semarang Toll Road



Lokasi : Provinsi Jawa Tengah

Location: Central Java Province

Nilai Proyek : Rp13,97 triliun

Project Value: Rp13.97 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Semarang Batang

SPV: PT Jasamarga Semarang Batang

Tahapan Proyek : Beroperasi sejak 21 Januari 2019

Project Phase: Operating since 21 January 2019

Proyek Tol Batang-Semarang merupakan salah satu proyek infrastruktur jalan tol skema KPBU pertama yang diberikan penjaminan oleh Pemerintah melalui PT PII. Proyek Jalan sepanjang 75 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur yang memiliki nilai investasi sebesar Rp13,97 triliun.

Pada tanggal 27 April 2016, Kementerian PUPR selaku PJPK dan BUP PT Jasamarga Semarang Batang menandatangani Perjanjian Kerja Sama Proyek di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Semarang Batang dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

The Batang-Semarang Toll Road Project is one of the first PPP scheme toll road infrastructure projects to be given Sovereign Guarantee via IIGF. The 75 km road project, which is part of the Trans-Java Toll Road that will connect Merak, Banten, to Banyuwangi, East Java has an investment value of Rp13.97 trillion.

On 27 April 2016, the Ministry of PUPR as the GCA and PT Jasamarga Semarang Batang as SPV, signed a Project Cooperation Agreement at the Office of the Ministry of Finance. Simultaneously, PT PII also signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Semarang Batang, and Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



Proyek Jalan Tol Pandaan – Malang Pandaan–Malang Toll Road Project



Lokasi : Provinsi Jawa Timur
Location: East Java Province

Nilai Proyek : Rp6,36 triliun
Project Value: Rp6.36 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Pandaan Malang
SPV: PT Jasamarga Pandaan Malang

Tahapan Proyek :
– Seksi 1-3 beroperasi sejak 13 Mei 2019
– Seksi 4 beroperasi sejak 30 Oktober 2019
– Seksi 5 beroperasi sejak 2 April 2020
Project Phase:
– Sections 1-3 have been operating since 13 May 2019
– Section 4 has been operating since 30 October 2019
– Section 5 has been operating since 2 April 2020

Proyek KPBU Jalan Tol Pandaan–Malang merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara–selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol–Pandaan dengan panjang 38,48 km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Dengan demikian, ruas jalan tol ini akan menjadi arteri utama dari banyak alternatif ruas jalan non–tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek ini dilaksanakan antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan BUP PT Jasamarga Pandaan Malang. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Pandaan Malang dengan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

The Pandaan–Malang Toll Road PPP project is part of the north–south road corridor plan in East Java Province as a continuation to the Gempol–Pandaan toll road with a length of 38.48 km. This toll road section will pass through three key areas in East Java, i.e., Pasuruan Regency, Malang Regency, and Malang City. Thus, this toll road section will become the main roads of many alternative non–toll road sections connecting the northern region with the southern region of East Java.

The signing of the Project Cooperation Agreement was carried out between the Ministry of PUPR as GCA and PT Jasamarga Pandaan Malang as the SPV. In addition, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang, and Recourse Agreement with Ministry of PUPR.



Proyek Jalan Tol Manado – Bitung Manado–Bitung Toll Road



Lokasi : Provinsi Sulawesi Utara
Location: North Sulawesi Province

Nilai Proyek: Rp4,95 triliun
Project Value: Rp4.95 trillion

PJPK: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha: PT Jasamarga Manado Bitung
SPV: PT Jasamarga Manado Bitung

Tahapan Proyek: Operasi Seksi 1 dan 2 A beroperasi sejak 28 September 2020 dan seksi 2 B sejak 25 Februari 2022
Project Phase: Operation of Section 1 and 2 A since September 28, 2020 and section 2 B since February 25, 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (Perpres 32/2011), Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari dan ke wilayah provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya merealisasikan rencana tersebut melalui Proyek Jalan Tol Manado–Bitung dengan nilai investasi mencapai Rp4,95 triliun. Dengan panjang 39 km, proyek jalan tol ini terbagi ke dalam dua seksi, yaitu seksi I sepanjang 14 km dari Manado–Airmadidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam proses pembangunannya dan seksi II sepanjang 25 km yang dibangun oleh BUP. Proyek ini dikerjakan dengan skema SBOT (*Supported Build Operate Transfer*) dengan masa konsesi 40 tahun, dimana Pemerintah menyediakan bantuan berupa dukungan konstruksi untuk seksi I sepanjang 14 km untuk membuat Proyek ini layak secara finansial.

Keberadaan proyek yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan mengurangi risiko–risiko kecelakaan untuk wilayah Sulawesi Utara.

Based on the Presidential Regulation No. 32 of 2011 on the 2011–2025 Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development, Bitung Port will be developed into a port for export–import activities to and from the North Sulawesi province. Therefore, the Government is attempts to actualize this plan through the Manado–Bitung Toll Road Project with an investment value of Rp4.95 trillion. With a length of 39 km, this toll road project is divided into two sections, i.e., section I of 14 km, from Manado–Airmadidi, in which the government is responsible for the construction process, and section II of 25 km, in which it will be built by the SPV. This project is carried out under the SBOT (Supported Build Operate Transfer) scheme with a 40–year concession period, where the Government provides assistance in the form of construction support for section I of 14 km to ensure that this project is financially feasible.

The project's existence, located in the North Minahasa Regency and Bitung City, has the objective to increase accessibility between regions in North Sulawesi Province and shall increase travel time efficiency and reduce the risk of accidents in the North Sulawesi region.



Proyek Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Balikpapan–Samarinda Toll Road



Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur
Location: East Kalimantan Province

Nilai Proyek : Rp11,99 triliun
Project Value: Rp11.99 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
SPV: PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Tahapan Proyek :
– Seksi 2, 3 dan 4 beroperasi sejak 17 Desember 2019
– Seksi 1 dan 5 beroperasi sejak Agustus 2021

Project Phase:
– Sections 2, 3, and 4 have been operating since 17 December 2019
– Sections 1 and 5 have been operating since August 2021

Terletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, proyek Jalan Tol Balikpapan–Samarinda sepanjang 97,99 km ini terdiri dari 5 seksi. Konstruksi seksi 1 dan 5 merupakan tanggung jawab Pemerintah, sedangkan konstruksi seksi 2–4 merupakan tanggung jawab BUP (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda). Nilai proyek ini mencapai Rp11,9 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Ruas jalan tol Balikpapan–Samarinda merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) jalan tol yang masuk ke dalam rencana sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur.

Keberadaan ruas tol Balikpapan–Samarinda tersebut dapat menjadi alternatif menyelesaikan permasalahan jalur lalu lintas yang padat dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Selain itu, Pembangunan ruas tol ini juga diharapkan meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan meningkatkan layanan/ akses mobilisasi bagi warga Kalimantan Timur.

Located in the administrative area of Balikpapan City, Kutai Kartanegara Regency, and Samarinda City, the 97.99 km Balikpapan–Samarinda Toll Road project consists of 5 sections. Construction of sections 1 and 5 is the Government's responsibility, and the construction of sections 2–4 is the responsibility of the SPV (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda). The project's value amounted to Rp11.9 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD.

The Balikpapan–Samarinda toll road section is one of the important corridors for the movement of people and goods in the East Kalimantan Province, and is considered one (1) of the seven (7) toll roads included in the East Kalimantan Province transportation system plan.

The presence of Balikpapan–Samarinda toll road can be an alternative to solving the problem of congested traffic lanes and increasing travel time efficiency. In addition to that, the construction of this toll road section shall enhance the social and economic growth in the East Kalimantan region and improve mobilization services/access for East Kalimantan residents.



Proyek Jalan Tol Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (Jakarta – Cikampek II *Elevated*) Sheikh Mohamed Bin Zayed Flyover Toll Road (Jakarta – Cikampek II *Elevated*) Project



Lokasi : Provinsi Jawa Barat

Location: West Java Province

Nilai Proyek : Rp16,23 triliun

Project Value: Rp16.23 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

SPV: PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Tahapan Proyek : Beroperasi sejak 12 Desember 2019

Project Phase: Operating since 12 December 2019

Proyek jalan tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* sepanjang 36,4 km ini memiliki nilai investasi sebesar Rp16,2 triliun. Proyek ini dibangun melalui skema KPBU dan merupakan proyek tol yang diberikan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII sebagai pelaksana *single window policy*.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek selaku BUP melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII dilakukan secara bersamaan pada 22 Februari 2017.

The 36.4 km long Jakarta – Cikampek II *Elevated* toll road project has an investment value of Rp16.2 trillion. This project was built by using PPP scheme and is a toll project that was provided with a Sovereign Guarantee via IIGF as the implementor of the single window policy.

On 5 December 2016, the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek as the SPV, signed the project Cooperation Agreement. Simultaneously, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, and Recourse Agreement with Ministry of PUPR on 22 February 2017.



Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road



Lokasi : Provinsi Jawa Timur
Location: East Java Province

Nilai Proyek : Rp12,93 triliun
Project Value: Rp12.93 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Waskita Bumi Wira
SPV: PT Waskita Bumi Wira

Tahapan Proyek : Operasi Parsial Seksi 1, 2 dan 3 beroperasi sejak 19 November 2020
Project Phase: Partially Operating Sections 1, 2, and 3 have been operating since 19 November 2020

Terletak di Provinsi Jawa Timur, Proyek jalan tol Krian-Legundi - Bunder - Manyar sepanjang 38,3 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp12,93 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Kementerian PUPR selaku PJPK dan PT Waskita Bumi Wira selaku BUP melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Waskita Bumi Wira dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan dilakukan pada 22 Februari 2017.

Located in East Java Province, the 38.3 km Krian-Legundi-Bunder-Manyar toll road project has an investment value of Rp12.93 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD.

On 5 December 2016, the Ministry of PUPR as GCA, and PT Waskita Bumi Wira as the SPV, signed a Project Cooperation Agreement at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Simultaneously, the Company signed a Guarantee Agreement with PT Waskita Bumi Wira, and Recourse Agreement with Ministry of PUPR on 22 February 2017.

Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road



Lokasi : Provinsi Jawa Barat
Location: West Java Province

Nilai Proyek : Rp8,4 triliun
Project Value: Rp8.4 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Citra Karya Jabar Tol
SPV: PT Citra Karya Jabar Tol

Tahapan Proyek : Operasi
Project Phase: Operating

Terletak di Provinsi Jawa Barat, Proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 60,1 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp8,4 triliun dengan durasi penjaminan sampai dengan 15 tahun setelah COD.

Pada tanggal 22 Februari 2017, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PUPR dengan PT Citra Karya Jabar Tol, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Citra Karya Jabar Tol, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

Located in West Java Province, the 60.1 km Cileunyi-Sumedang-Dawuan toll road project has an investment value of Rp8.4 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD.

On 22 February 2017, the Cooperation Agreement between the Ministry of PUPR and PT Citra Karya Jabar Tol was signed. Simultaneously, the Company also signed Guarantee Agreement with PT Citra Karya Jabar Tol, and the Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



Proyek Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi Probolinggo–Banyuwangi Toll Road Project



Lokasi : Provinsi Jawa Timur
Location: East Java Province

Nilai Proyek : Rp23,4 triliun
Project Value: Rp23.4 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
SPV: PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Proyek Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi ini memiliki nilai investasi mencapai Rp23,4 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD. Jalan tol ini akan melewati 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 km. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Banyuwangi.

The Probolinggo–Banyuwangi Toll Road project has an investment value of Rp23.4 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD. This toll road will pass through three (3) regencies, i.e., Probolinggo, Situbondo, and Banyuwangi regencies, with a road section length of approximately 172.9 km. The presence of this toll road will encourage the smooth flow of goods and people to and from Banyuwangi.

Proyek Jalan Tol Serang – Panimbang Serang–Panimbang Toll Road



Lokasi : Provinsi Banten
Location: Banten Province

Nilai Proyek : Rp8,57 triliun
Project Value: Rp8.57 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Wijaya Karya Serang Panimbang
SPV: PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Tahapan Proyek: Operasi Parsial Seksi 1 beroperasi sejak 16 November 2021
Project Phase: Partially Operating. Section 1 has been operating since 16 November 2021

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 ("Perpres 109/2020"), proyek jalan tol Serang–Panimbang sepanjang 83,7 km yang terletak di Provinsi Banten sepanjang 83,7 km ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi sebesar Rp8,6 triliun.

Pada tanggal 22 Februari 2017, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PUPR dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang, dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR dilakukan secara bersamaan.

As stated in Presidential Regulation No. 109 of 2020, the 83.7 km long Serang–Panimbang toll road project located in Banten Province is one of the National Strategic Projects with an investment value of Rp8.6 trillion.

On 22 February 2017, the Cooperation Agreement between the Ministry of PUPR and PT Wijaya Karya Serang Panimbang was signed. Simultaneously, the Company also signed Guarantee Agreement with PT Wijaya Karya Serang Panimbang, and the Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Jakarta-South Cikampek II Toll Road Project



Lokasi : Provinsi Jawa Barat
Location: West Java Province

Nilai Proyek : Rp14,7 triliun
Project Value: Rp14.7 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Japek Selatan
SPV: PT Jasamarga Japek Selatan

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Proyek jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan sepanjang 64 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp14,7 triliun dengan masa durasi penjaminan adalah sampai dengan 15 tahun setelah COD. Pembangunan proyek jalan tol Jakarta Cikampek II Selatan berawal di sekitar *interchange* Jatiasih, masuk ke wilayah Kota Bekasi dan berakhir di sekitar *interchange* Sadang, Kab. Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

The 64 km long Jakarta-South Cikampek II toll road project has an investment value of Rp14.7 trillion with a guarantee duration of up to 15 years after COD. The construction of the Jakarta South Cikampek II toll road project started around the Jatiasih interchange, to enter the Bekasi area, and will end around the Sadang interchange, Purwakarta Regency, West Java Province.

Proyek Jalan Tol Semarang-Demak Semarang-Demak Toll Road



Lokasi : Provinsi Jawa Tengah
Location: Central Java Province

Nilai Proyek: Rp5,4 triliun
Project Value: Rp5.4 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak
SPV: PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak

Tahapan Proyek: Operasi Parsial
Project Phase: Partial Operation

Berlokasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, proyek ini memiliki panjang jalan tol 27 km dengan nilai investasi sebesar Rp5,4 triliun yang ditanggung oleh BUP. Proyek berskema KPBU ini meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut.

Located in Semarang City up to Demak Regency, Central Java, this project is 27 km long with an investment value of Rp5.4 trillion, borne by the SPV. This PPP scheme project includes the Construction and Operation of the Semarang-Demak toll road, which is integrated with the Sea Walls.

Pada tanggal 23 September 2019, Menteri PUPR dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PT PPSD) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. Selain itu, di saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT PPSD, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII.

On 23 September 2019, the Minister of PUPR and PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PT PPSD) signed a Cooperation Agreement. In addition, the Company signed a Guarantee Agreement with PT PPSD, and Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



Proyek Jalan Non Tol Lintas Timur Sumatra di Provinsi Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel) East Sumatra Non-Toll Road in South Sumatra Province (Jalintim Sumsel) Project



Foto Hanya Ilustrasi
Illustrative Photo Only

Lokasi : Provinsi Sumatera Selatan
Location: South Sumatra Province

Nilai Proyek : Rp0,98 triliun
Project Value: Rp0.98 trillion

**PJPK :Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat**
GCA: Director General of Highways,
Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jalintim Adhi Abipraya
SPV: PT Jalintim Adhi Abipraya

**Tahapan Proyek : Operasi sejak 5
September 2023**
Project Phase: Operating since 5
September 2023

Proyek KPBU Preservasi Jalintim Sumsel merupakan proyek KPBU pertama di sektor Jalan non-tol di Indonesia, serta mendapatkan penjaminan Pemerintah melalui PT PII. Ruang lingkup skema KPBU Proyek ini meliputi Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan pada masa konstruksi serta masa layanan dan Pembiayaan Proyek oleh BUP.

Dengan nilai investasi sebesar Rp0,98 triliun, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan nilai waktu tempuh.

Pada tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jalintim Adhi Abipraya selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jalintim Adhi Abipraya dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

The South Sumatra Jalintim Preservation PPP Project is the first PPP project in the non-toll Road sector in Indonesia, and has received Sovereign Guarantees via IIGF. This Project PPP scheme covers Technical Planning, Construction, Operation and Maintenance during the construction period, as well as the service period and Project Financing by the SPV.

With an investment value of Rp0.98 trillion, this project shall affect the improvement of the economy by increasing connectivity between regions, especially those used as logistics routes, tourism, access roads to ports and airports, as well as saving Vehicle Operational Costs (BOK) and travel time.

On 3 August 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jalintim Adhi Abipraya as the SPV. On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with PT Jalintim Adhi Abipraya, and a Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road Project



Lokasi : Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Location: Central Java and Special Region of Yogyakarta Province

Nilai Proyek : Rp26,63 triliun

Project Value: Rp26.63 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Jogja Solo

SPV: PT Jasamarga Jogja Solo

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sepanjang 96,5 km ini dibangun dengan skema kerja sama *Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer* (DBFOMT) dengan masa konsesi selama 40 tahun sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pembangunan proyek infrastruktur jalan tol ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antara Solo, Yogyakarta, dan Kulon Progo, termasuk melayani akses Bandara NYIA Kulon Progo, meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol serta menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Solo selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jogja Solo dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

The 96.5 km Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road project was built using a Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT) cooperation scheme, with a concession period of 40 years since the Start Work Order (SPMK). The construction of this toll road infrastructure project has the objective to increase accessibility between Solo, Yogyakarta, and Kulon Progo, including providing access to the NYIA Kulon Progo Airport, increasing development of the area that the toll road passes and supporting local economic growth improvement.

On 9 September 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Solo as the SPV. On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Jogja Solo, and a Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Yogyakarta-Bawen Toll Road



Lokasi : Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

Location: Central Java and Special Region of Yogyakarta Province

Nilai Proyek : Rp14,25 triliun

Project Value: Rp14.25 trillion

PJPK : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Jasamarga Jogja Bawen

SPV: PT Jasamarga Jogja Bawen

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km ini terletak di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pembangunan proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama akses Semarang-Yogyakarta.

Pada tanggal 13 November 2020, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Proyek antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan PT Jasamarga Jogja Bawen selaku BUP. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jogja Bawen dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

The 75.82 km long Yogyakarta-Bawen Toll Road project is located in Central Java Province and Special Region of Yogyakarta Province. The construction of this project shall greatly impact the local economic growth in Central Java and Yogyakarta, and increase connectivity between regions, especially Semarang-Yogyakarta access.

On 13 November 2020, a Project Cooperation Agreement was signed between the Ministry of PUPR as GCA, and PT Jasamarga Jogja Bawen as the SPV. On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement with PT Jasamarga Jogja Bawen, and a Recourse Agreement with the Ministry of PUPR.



Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau East Sumatra Cross Road Preservation Project in Riau Province



Lokasi : Provinsi Riau

Location: Riau Province

Nilai Proyek : Rp0,53 triliun

Project Value: Rp0.53 trillion

PJPK : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

GCA: Director General of Highways, Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Adhi Jalintim Riau

SPV: PT Adhi Jalintim Riau

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau adalah proyek KPBK kedua di sektor Jalan Non-tol di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) jalan yang akan dipreservasi di Jalintim Riau dengan total seluruhnya mencapai 43 kilometer, yaitu Jalan Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)–Batas Kabupaten Pelalawan, Jalan Batas Pelalawan–Sikijang Mati, dan Jalan Sikijang Mati–Simpang Lago. Selain itu, dilakukan perbaikan 4 unit jembatan sepanjang 60 meter di Jalan Sikijang Mati–Simpang Lago serta pembangunan 1 unit fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Pada 12 April 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan atas Proyek Jalintim Riau.

The East Sumatra Cross Road Preservation Project in Riau Province is the second PPP project in the Non-Toll Road sector in Indonesia. There are three (3) roads that will be preserved in Jalintim Riau, with a total of 43 kilometers, i.e., Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)–Pelalawan Regency Border Road, Pelalawan Border–Sikijang Mati, and Sikijang Mati–Simpang Lago Road. In addition, 4 unit of bridges of 60 meters long will be repaired, on Sikijang Mati–Simpang Lago Road, with the additional construction of 1 Motor Vehicle Weighing Unit (UPPKB).

On 12 April 2021, a guarantee agreement was signed for the Riau Jalintim Project

Proyek Jembatan Callender Hamilton Callender Hamilton Bridge Project



Lokasi : Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

Location: Banten Province, West Java, Central Java, and East Java

Nilai Proyek : Rp2,2 triliun

Project Value: Rp2.2 trillion

PJPK : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

GCA: Director General of Highways, Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha : PT Baja Titian Utama

SPV: PT Baja Titian Utama

Tahapan Proyek : Operasi sejak 20 Desember 2023

Project Phase: Operating since 20 Desember 2023

Proyek Jembatan Callender Hamilton (CH) merupakan proyek penggantian dan/atau duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa dengan lingkup penggantian 33 unit jembatan dengan panjang eksisting 2.452,9 meter untuk koridor Jalan Nasional; duplikasi tanpa penggantian jembatan terhadap 4 unit jembatan dengan panjang eksisting 430 meter; duplikasi dengan penggantian jembatan terhadap 1 unit jembatan dengan panjang eksisting 50 meter; serta pengoperasian dan pemeliharaan untuk seluruh jembatan. Pada 6 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan perjanjian terkait penjaminan Pemerintah untuk proyek Jembatan CH ini.

The Callender Hamilton (CH) Bridge Project is a replacement and/or duplication project for the CH Bridge on Java Island, which covers the replacement of 33 bridge units with an existing length of 2,452.9 meters for the National Road corridor; duplication without bridge replacement of 4 bridge units with an existing length of 430 meters; duplication with bridge replacement of 1 bridge unit with an existing length of 50 meters; as well as operation and maintenance for all bridges. On 6 December 2021, an agreement was signed regarding the Sovereign guarantee for the CH Bridge project.



Proyek Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Patimban Port Access Toll Road Project



Foto Hanya Ilustrasi
Illustrative Photo Only

Lokasi: Provinsi Jawa Barat
Location: West Java Province

Nilai Proyek : Rp5,02 triliun
Project Value: Rp5.02 trillion

PJPK: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha: PT Jasamarga Akses Patimban
SPV: PT Jasamarga Akses Patimban

Tahapan Proyek : Pra-konstruksi
Project Phase: Pre-construction

Ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Jalan Tol Akses Patimban akan mendukung Pelabuhan Patimban dan pengembangan wilayah di sekitarnya. Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023.

Jalan Tol ini direncanakan akan memiliki panjang 37,05 km, dengan porsi BUJT sepanjang 14,11 km dan dukungan konstruksi dari Pemerintah sepanjang 22,94 km. Adapun nilai investasi proyek yang menjadi porsi BUJT adalah sebesar Rp5,02 triliun dan masa konsesi 50 tahun.

Designated as a National Strategic Project via Presidential Decree No. 109 of 2020, the Patimban Toll Road will support Patimban Port and the development of the surrounding area. The signing of the Toll Road Concession Agreement, Guarantee Agreement, and Project Recourse Agreement, on 24 January 2023.

This toll road is planned to be 37.05 km long, with a Toll Road SPV (BUJT) portion of 14.11 km and construction support from the Government of 22.94 km. The project investment value of Toll Road SPV (BUJT) portion is Rp5.02 trillion with a 50-year concession period.

Tol JORR Elevated Cikunir Ulujami Tol JORR Elevated Cikunir Ulujami



Foto Hanya Ilustrasi
Illustrative Photo Only

Lokasi: Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
Location: DKI Jakarta & West Java Province

Nilai Proyek : Rp21,27 triliun
Project Value: Rp21.27 trillion

PJPK: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
GCA: Ministry of Public Works and Housing

Badan Usaha: PT Jakarta Metro Expressway
SPV: PT Jakarta Metro Expressway

Tahapan Proyek : Pra-konstruksi
Project Phase: Pre-construction



Proyek jalan tol ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, mengurangi kemacetan, dan waktu tempuh pada jalan tol JORR-1 serta meningkatkan tingkat pelayanan jalan, menyediakan rute alternatif, dan memperkuat jaringan jalan tol di daerah Jabodetabek. Jalan tol ini akan menjadi bagian dari jalan tol Jabodetabek dengan *trase* sepanjang 21,5 km yang akan dibangun di atas ruas tol JORR eksisting.

Nilai investasi proyek adalah sebesar Rp21,27 triliun dengan masa konsesi 45 tahun. Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan pada 11 Oktober 2023, sedangkan Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres ditandatangani pada 17 Oktober 2023.

The toll road project has the objective of reducing capacity, reducing traffic and travel time at the JORR-1 Toll Road, as well as improving road services, providing alternative routes, and strengthening the toll road network in the Jabodetabek area. This toll road will be part of the Jabodetabek toll road with a 21.5 km road which will be built on the existing JORR toll road.

The project has an investment value of Rp21.27 trillion with a 45-year concession period. The Toll Road Concession Agreement was signed on 11 October 2023, while the Guarantee Agreement and Recourse Agreement were signed on 17 October 2023.

Sektor Telekomunikasi

Telecommunications

Palapa Ring Paket Barat Palapa Ring West Package



Lokasi : Bengkalis, Kepulauan Meranti, Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga
Location: Bengkalis, Meranti Islands, Natuna, Anambas Islands, Lingga

Nilai Proyek : Rp1,23 triliun
Project Value: Rp1.23 trillion

PJPK : Kementerian Komunikasi dan Informatika
GCA: Ministry of Communication and Information Technology

Badan Usaha : PT Palapa Ring Barat
SPV: PT Palapa Ring Barat

Tahapan Proyek : Beroperasi sejak 2 Maret 2018
Project Phase: Operating since 2 March 2018

Pada tanggal 29 Februari 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku PJPK dan PT Palapa Ring Barat selaku BUP di Kantor Kementerian Keuangan. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Ring Barat serta Perjanjian Regres antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT PII. Pada tanggal 10 November 2016, *financial close* proyek ini tercapai di mana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku *lender* menyalurkan kredit senilai Rp875 miliar kepada BUP.

On 29 February 2016, a Cooperation Agreement was signed between the Ministry of Communication and Information Technology (Kemenkominfo) as GCA, and PT Palapa Ring Barat as SPV at the Office of the Ministry of Finance. Simultaneously, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Palapa Ring Barat, and Recourse Agreement with the Ministry of Communication and Information Technology. On 10 November 2016, this project reached its financial close phase, in which PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the lender distributed credit worth Rp875 billion to the SPV.



Palapa Ring Paket Tengah Palapa Ring Central Package



Lokasi : Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi Papua Barat

Location: East Kalimantan Province, Sulawesi, Maluku Province, NTT Province, West Papua Province

Nilai Proyek : Rp1,1 triliun

Project Value: Rp1.1 trillion

PJPK : Kementerian Komunikasi dan Informatika

GCA: Ministry of Communication and Information Technology

Badan Usaha : PT Len Telekomunikasi Indonesia

SPV: PT Len Telekomunikasi Indonesia

Tahapan Proyek : Beroperasi sejak 21 Desember Maret 2018

Project Phase: Operating since 21 December March 2018

Pada tanggal 4 Maret 2016, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek senilai Rp1,1 triliun dilakukan antara Kemenkominfo selaku PJPK dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia. Pada kesempatan yang sama, PT PII yang merupakan pelaksanaan *single window policy* penyedia penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur juga menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah.

On 4 March 2016, a project Cooperation Agreement valued at Rp1.1 trillion was signed by the Ministry of Communication and Information Technology as the GCA, and PT Len Telekomunikasi Indonesia. On the same occasion, IIGF, which is the implementor of single window policy in providing Sovereign guarantees for infrastructure projects, also signed a Guarantee Agreement and Recourse Agreement for the Palapa Ring Central Package project.



Palapa Ring Paket Timur Palapa Ring East Package



Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat

Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat

Nilai Proyek : Rp5,1 triliun

Project Value: Rp5.1 trillion

PJPK : Kementerian Komunikasi dan Informatika

GCA: Ministry of Communication and Information Technology

Badan Usaha : PT Palapa Timur Telematika

SPV: PT Palapa Timur Telematika

Tahapan Proyek : Beroperasi sejak 29 Agustus 2019

Project Phase: Operating since 29 August 2019

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 ("Perpres 56/2018"), proyek ini merupakan proyek Infrastruktur Strategis Nasional, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Pada 29 September 2016 bertempat di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Menko Perekonomian, Menko Polhukam, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika selaku BUP dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemenkominfo selaku PJPK. Setelah penandatanganan tersebut, bertempat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan *Financial Close* Proyek Palapa Ring Paket Timur dan juga penyerahan Surat Efektif Penjaminan oleh PT PII pada 29 Maret 2017.

As stated in Presidential Regulation No. 56 of 2018, this project is a National Strategic Infrastructure project, which is also categorized as a National Priority Project. On 29 September 2016, at the State Palace, witnessed by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, Coordinating Minister for Economic Affairs, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Palapa Timur Telematika as the SPV and a Recourse Agreement with the Ministry of Communication and Information Technology as GCA. After the signing, at the Ministry of Communication and Informatics, the Financial Close for Palapa Ring East Package Project was carried out, and IIGF also submitted an Effective Guarantee Letter on 29 March 2017.



Satelit Multifungsi Pemerintah Government Multi-functional Satellite



Foto Hanya Ilustrasi
Illustrative Photo Only

Lokasi : Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia

Location: Throughout the Republic of Indonesia

Nilai Proyek : Rp6,42 triliun

Project Value: Rp6.42 trillion

PJPK : Kementerian Komunikasi dan Informatika

GCA: Ministry of Communication and Information Technology

Badan Usaha : PT Satelit Nusantara Tiga

SPV: PT Satelit Nusantara Tiga

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

Satelit Multi Fungsi merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur.

Pada tanggal 3 Mei 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku PJPK dan PT Satelit Nusantara Tiga selaku BUP melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah. Pada saat yang sama juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Satelit Nusantara Tiga serta Perjanjian Regres antara Kemenkominfo dengan PT PII. Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat luas, di antaranya untuk sektor pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan keamanan, pemerintah daerah, juga khususnya sektor keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), dalam rangka mengakselerasi realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

The Multi-Functional Satellite is the fourth PPP project in the telecommunications sector to receive Sovereign guarantee via IIGF after the Palapa Ring West, Central and East Packages.

On 3 May 2019, the Ministry of Communication and Information Technology as GCA, and PT Satelit Nusantara Tiga as SPV, signed a Government Multi-Functional Satellite Project Cooperation Agreement. Simultaneously, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Satelit Nusantara Tiga, and a Recourse Agreement with the Ministry of Communication and Information Technology. This project shall be useful and beneficial for the wider community, including in the education, health, political, legal, and security sectors, local government sector, specifically the financial sector, to support the acceleration of digitalization of ultra-micro financing (UMi) disbursement, to accelerate the actualization of inclusive finance throughout Indonesia.



Sektor Ketenagalistrikan Electricity

PLTU Batang Jawa Tengah Batang Central Java Steam Power Plant



Lokasi : Kabupaten Batang–Provinsi Jawa Tengah

Location: Batang Regency, Central Java Province

Nilai Proyek : Rp66,8 triliun

Project Value: Rp66.8 trillion

PJPK : PT PLN (Persero)

GCA: PT PLN (Persero)

Badan Usaha : PT Bhimasena Power Indonesia

SPV: PT Bhimasena Power Indonesia

Tahapan Proyek : Operasi penuh sejak 31 Agustus 2022

Project Phase: Full operation since August 31, 2022

PLTU Batang Jawa Tengah merupakan proyek infrastruktur skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010. Proyek ini merupakan langkah pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat. Proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW ini berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan nilai investasi sebesar US\$4 miliar atau lebih dari Rp40 triliun tersebut, proyek tersebut akan dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) dengan skema *Build Own Operate Transfer* selama masa konsesi 25 tahun.

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT BPI selaku BUP serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai PJPK. Pada bulan Juni 2016, *Financial Close* proyek ini dilaksanakan di Istana Negara yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

The Batang Central Java SPP is the first PPP scheme infrastructure project that was successfully realized by obtaining joint guarantee facilities from IIGF and the Government of Indonesia (Ministry of Finance) in accordance with the Presidential Decree 78/2010. This project is a government's measure to provide the electricity needs of the community. This 2 x 1,000 MW coal-fired power plant project is located in Batang Regency, Central Java. With an investment value of US\$4 billion, or equivalent to more than Rp40 trillion, the project will be built by PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) consortium with a Build Own Operate Transfer scheme over a 25 year concession period.

On 6 October 2011, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT BPI as the SPV, and Recourse Agreement with PT PLN (Persero) as GCA. In June 2016, the project reached its Financial Close, and was carried out at the State Palace witnessed by the President of the Republic of Indonesia Joko Widodo, the Coordinating Minister for Economic Affairs (as Chair of the Committee for the Acceleration of Priority Infrastructure Provision), the Minister of National Development Planning, the Minister of Finance, the Minister of Energy and Mineral Resources, the Minister of State-Owned Enterprises, and Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning.



Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun Street Lighting Equipment (APJ) in Madiun Regency



Lokasi : Kabupaten Madiun
Location: Madiun Regency

Nilai Proyek : Rp101 miliar
Project Value: Rp101 billion

PJPK : Pemerintah Kabupaten Madiun
GCA: Madiun Regency Government

Badan Usaha :
PT Tri Tunggal Madiun Terang
SPV:
PT Tri Tunggal Madiun Terang

Tahapan Proyek:
Operasional sejak 18 Juli 2023
Project Phase:
Operational since July 18, 2023

Proyek APJ di Kabupaten Madiun ("Proyek") merupakan pembangunan infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang dilaksanakan dengan skema KPBU. Ruang lingkup Proyek meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.459 titik yang tersebar antara lain 1.604 titik di jalan Nasional (arteri), 5.603 titik di jalan Kabupaten (lokal) dan 252 titik di jalan perkotaan (lingkungan). Nilai investasi Proyek sebesar Rp100,65 miliar dengan masa konstruksi selama 9 bulan dan periode kerja sama sampai dengan 10 tahun sejak tanggal operasi komersial.

Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Hal ini diharapkan dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU. Selain itu, dukungan PT PII kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung *green infrastructure*, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

The Street Lighting Equipment Project in Madiun Regency is the construction of Street Lighting Equipment which is implemented under the PPP scheme. The project covers new construction (without retrofit), operation and maintenance of 7,459 points spread throughout, including 1,604 points on National (main) roads, 5,603 points on Regency (local) roads, and 252 points on urban (environmental) roads. The project investment was valued at Rp100.65 billion with a construction period of 9 months and a collaboration period of up to 10 years from the date of commercial operation.

This project demonstrates IIGF's commitment to supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia in various project scales. This shall increase the number of other infrastructure projects that can be conducted by using the PPP scheme. In addition, IIGF's support for this project is also a commitment to supporting projects with energy saving benefits, i.e., green infrastructure, and to provide a significant impact on society, especially in Madiun Regency, East Java.



Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat West Lombok Regency Public Street Lighting



Foto Hanya Ilustrasi
Illustrative Photo Only

Lokasi : Kabupaten Lombok Barat
Location: West Lombok Regency

Nilai Proyek : Rp95 miliar
Project Value: Rp95 billion

PJPK : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
GCA: West Lombok Regency Government

Badan Usaha : PT Sinar Energi Indonesia
SPV: PT Sinar Energi Indonesia

Tahapan Proyek: Pra-Konstruksi
Project Phase: Pre-Construction

Proyek Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lombok Barat ("Proyek") merupakan Proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU di 200 ruas jalan sepanjang 545.1 km dan tersebar di 12.915 titik. Proyek ini memiliki nilai investasi Rp94.99 miliar dengan periode kerjasama 1 tahun konstruksi dan 10 tahun periode operasi komersial.

Proyek ini diharapkan mampu memberi manfaat dan mendorong peningkatan geliat aktivitas perekonomian masyarakat serta peningkatan minat investasi. Lebih lanjut, dengan dibangunnya Penerangan Jalan Umum akan sangat berdampak positif dari sisi keamanan di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

The West Lombok Regency Public Street Lighting Project is an infrastructure project under a PPP scheme on 200 roads with 545.1 km long, spread across 12,915 points. This project has an investment value of Rp94.99 billion with a collaboration period of 1 year of construction and 10-year commercial operation period.

This project shall be able to provide benefits and encourage community economic activity, as well as increase investment interest. Further, the construction of Public Street Lighting will have a very positive impact in terms of security in the West Lombok Regency.

Sektor Air Minum Drinking Water

SPAM Umbulan-Jawa Timur Umbulan East Java SPAM



Lokasi : Provinsi Jawa Timur
Location: East Java Province

Nilai Proyek : Rp2,06 triliun
Project Value: Rp2.06 trillion

PJPK : Gubernur Jawa Timur
GCA: Governor of East Java

Badan Usaha : PT Meta Adhya Tirta Umbulan
SPV: PT Meta Adhya Tirta Umbulan

Tahapan Proyek : Beroperasi sejak 31 Januari 2021
Project Phase: Operating since 31 January 2021

Untuk mengatasi krisis air dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih

The East Java Provincial Government tried finding a solution by utilizing the Umbulan spring in Umbulan Village, Winongan Sub-District, Pasuruan Regency to overcome the water crisis and meet the increasing needs of the community. Umbulan spring was chosen because of its



karena kemampuannya untuk memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dan sekitarnya.

Proyek SPAM Umbulan dibangun dengan menggunakan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPk dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku BUP. Nilai investasi Proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2,06 triliun dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp818 miliar dari Kementerian Keuangan. Pada 21 Juli 2016, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan sektor air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

production of 4,000 liters/second and it can meet the clean water needs of 1.8 million people in Surabaya City, Sidoarjo Regency, Gresik Regency, Pasuruan Regency, and Pasuruan City and its surroundings.

Umbulan SPAM project was built using a PPP scheme between the East Java Provincial Government as GCA and PT Meta Adhya Tirta Umbulan as the SPV. The investment value of Umbulan SPAM Project was Rp2.06 trillion, and the project received Feasibility Support of Rp818 billion from the Ministry of Finance. On 21 July 2016, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan and a Recourse Agreement with the Governor of East Java for the Umbulan SPAM Project. This project is in the water sector and is the first regional project to have a Sovereign guarantee via IIGF.

SPAM Kota Bandar Lampung Bandar Lampung City SPAM



Lokasi : Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Location: Bandar Lampung City, Lampung Province

Nilai Proyek : Rp750 miliar
Project Value: Rp750 billion

PJPk : Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung
GCA: Way Rilau Drinking Water Public Company, Bandar Lampung City

Badan Usaha : PT Adhya Tirta Lampung
SPV: PT Adhya Tirta Lampung

Tahapan Proyek :
Beroperasi sejak 13 Agustus 2020
Project Phase:
Operating since 13 August 2020

Proyek SPAM Kota Bandar Lampung diinisiasi karena Kota Bandar Lampung memerlukan peningkatan dan penyediaan air minum. Perumda Air Minum Way Rilau baru melayani sekitar 20% dari total penduduk Kota Bandar Lampung. Selain rendahnya tingkat pelayanan Perumda Air Minum Way Rilau, kendala kontur pada Kota Bandar Lampung yang berbukit-bukit juga mengakibatkan pendistribusian air minum belum merata. Nilai investasi SPAM Kota Bandar Lampung mencapai Rp750 miliar dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp258,8 miliar dari Kementerian Keuangan.

Perjanjian Kerjasama antara Perumda Air Minum Way Rilau selaku PJPk dan PT Adhya Tirta Lampung selaku BUP telah ditandatangani pada 14 Februari 2018. Pada kesempatan yang sama, PT PII juga telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres. *Financial Close* Proyek telah tercapai pada 13 Agustus 2018 dan Proyek telah mulai beroperasi sejak 13 Agustus 2020.

Bandar Lampung City SPAM project was initiated because Bandar Lampung City needed to improve and provide drinking water. Way Rilau Drinking Water Public Company only serves around 20% of the total population of Bandar Lampung City. In addition to the low service level of Way Rilau Drinking Water Public Company, the contour constraints of the hilly city of Bandar Lampung also resulted in uneven distribution of drinking water. The investment value of Bandar Lampung City SPAM was Rp750 billion, and it received Feasibility Support of Rp258.8 billion from the Ministry of Finance.

The Cooperation Agreement between Way Rilau Drinking Water Public Company as GCA and PT Adhya Tirta Lampung as SPV was signed on 14 February 2018. On the same occasion, IIGF also signed a Guarantee Agreement and Recourse Agreement. The Project's Financial Close was achieved on 13 August 2018 and the Project started operating on 13 August 2020.



SPAM Semarang Barat West Semarang SPAM



Lokasi : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Location: Semarang City, Central Java Province

Nilai Proyek : Rp417 miliar

Project Value: Rp417 billion

PJPK : Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang

GCA: Tirta Moedal Drinking Water Company (PDAM Tirta Moedal) Semarang

Badan Usaha : PT Air Semarang Barat

SPV: PT Air Semarang Barat

Tahapan Proyek : Beroperasi sejak 22 Mei 2021

Project Phase: Operating since 22 May 2021

Proyek SPAM Semarang Barat berkapasitas 1.000 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara Perumda Air Minum Tirta Moedal selaku PJPK dengan PT Air Semarang Barat selaku BUP. Nilai proyek SPAM Semarang Barat sebesar Rp417 miliar tanpa menggunakan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan. Area pelayanan SPAM Semarang Barat ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan yang terbagi dalam 5 (lima) zona wilayah layanan, yaitu Kecamatan Tugu (zona 1), sebagian Kecamatan Ngaliyan (zona 2 dan 3), serta Kecamatan Semarang Barat (zona 4 dan 5). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperluas cakupan sambungan perpipaan air minum dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) kurang lebih 37.000 SR, sehingga total SR yang dapat dilayani mencapai sekitar 71.500 SR pada tahun 2030. Banyaknya SR yang saat ini belum terlayani dikarenakan keterbatasan dana dan sumber air baku yang tersedia di dalam Kota Semarang. PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat pada 23 November 2018. Adapun *Financial Close* proyek ini dicapai pada tanggal 22 Mei 2019.

West Semarang SPAM project with a capacity of 1,000 liters/second was established by using a PPP scheme between Perumda Air Minum Tirta Moedal as GCA and PT Air Semarang Barat as the SPV. The West Semarang SPAM project was valued at Rp417 billion, without Feasibility Support from the Ministry of Finance. West Semarang SPAM service targets to serve three (3) Sub-Districts which are divided into five (5) service area zones, i.e., Tugu Sub-District (zone 1), part of Ngaliyan Sub-District (zones 2 and 3), and West Semarang Sub-District (zone 4 and 5). This project has the objective to improve service performance and expand the coverage of drinking water pipe connections by adding Home Connections (SR) of approximately 37,000 SR. Therefore, the total coverage reached 71,500 SR by 2030. The large number of SRs are currently unserved due to limited funds and raw water sources available in Semarang City. IIGF signed a Guarantee Agreement with PT Air Semarang Barat and a Recourse Agreement with Tirta Moedal Drinking Water Public Company for the West Semarang Drinking Water Public Company Project on 23 November 2018. The Financial Close of this project was achieved on 22 May 2019.



SPAM Kota Pekanbaru Pekanbaru City SPAM



Sumber: website PT PP Tirta Madani
Source: PT PP Tirta Madani website

Lokasi : Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Location: Pekanbaru City, Riau Province

Nilai Proyek : Rp500 miliar
Project Value: Rp500 billion

PJPK : Perumda Air Minum Tirta Siak Kota Pekanbaru

GCA: Tirta Siak Pekanbaru Drinking Water Public Company

Badan Usaha : PT PP Tirta Madani
SPV: PT PP Tirta Madani

Tahapan Proyek :

- Fase A – Operasi (30 September 2022)
- Fase B – Konstruksi

Project Phase:

- Phase A – Operating (30 September 2022)
- Phase B – Construction

Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek pembangunan dan pengoperasian SPAM Kota Pekanbaru berkapasitas 750 lpd dengan nilai investasi sebesar Rp500 miliar. Proyek SPAM Kota Pekanbaru merupakan proyek *Rehabilitate-Build-Operate-Transfer* (RBOT), di mana untuk Fase A telah beroperasi pada tanggal 30 September 2022 dan untuk Fase B sedang dalam tahap konstruksi.

Saat ini, Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru baru dapat melayani sekitar 9,3% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Proyek SPAM Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan Sambungan Langganan (SL) sebanyak ± 48.500 SL sehingga dengan pelanggan saat ini dapat mencapai kurang lebih 60.000 SL. Dengan demikian, Proyek SPAM Kota Pekanbaru dapat meningkatkan jumlah pelanggan Perumdam Kota Pekanbaru hingga hampir 4 kali lipat dari kondisi SL saat ini.

Pada tanggal 16 Desember 2020, penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek SPAM Pekanbaru dilaksanakan secara bersamaan.

Pekanbaru SPAM Project is a project for the construction and operation of the Pekanbaru City SPAM with a capacity of 750 lps and an investment of Rp500 billion. Pekanbaru City SPAM project is a *Rehabilitate-Build-Operate-Transfer* (RBOT) project, where Phase A has been operational since 30 September 2022, and Phase B is currently under construction.

Currently, Perumdam Tirta Siak Pekanbaru City can only serve approximately 9.3% of the Pekanbaru's population. Pekanbaru City SPAM project shall increase Subscription Connections (SL) by $\pm 48,500$ SL, targeting to reach approximately 60,000 SL. Thus, Pekanbaru City SPAM Project can increase the number of Pekanbaru's Perumdam customers by almost 4 times of the current SL numbers.

On 16 December 2020, the Cooperation Agreement, Guarantee Agreement, and Recourse Agreement for Pekanbaru City SPAM Project were signed simultaneously.



SPAM Regional Jatiluhur I Jatiluhur I Regional SPAM



Lokasi : Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang

Location: Special Capital Region of Jakarta Province, Bekasi City, Bekasi Regency, and Karawang Regency

Nilai Proyek : Rp1,67 triliun
Project Value: Rp1.67 trillion

PJPK : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya
GCA: Minister of Public Works and Housing, delegated to the Director General of Human Settlements

Badan Usaha : PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur
SPV: PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I merupakan proyek kerja sama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur di mana area pelayanannya akan mencakup Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Proyek dengan kapasitas 4.750 liter/detik ditargetkan akan menyalurkan air minum ke-380.000 sambungan rumah.

Pada 19 Februari 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama, Perjanjian Penjaminan dan untuk Proyek *unsolicited* ini telah mencapai *financial close* pada 1 April 2022 dan diberikan penjaminan oleh PT PII dimana durasi penjaminannya adalah 10 tahun sejak COD.

Jatiluhur I Regional SPAM Project is a cooperation project between the Minister of Public Works and Housing and PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur where the service area will cover Special Capital Region of Jakarta Province, Bekasi Municipal, Bekasi Regency, and Karawang Regency. This project with a 4,750 liters/second capacity is targeted to distribute drinking water to 380,000 households.

On 19 February 2021, a Cooperation Agreement and Guarantee Agreement were signed. This unsolicited project has reached financial close on 1 April 2022 and was given a guarantee by IIGF with a 10 years duration from COD.

SPAM Regional Karian Serpong Karian Serpong Regional SPAM



Foto Hanya Ilustrasi
Illustrative Photo Only

Lokasi : Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan

Location: Special Capital Region of Jakarta Province, Tangerang City, and South Tangerang City

Nilai Proyek : Rp2,43 triliun
Project Value: Rp2.43 trillion

PJPK : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pendelegasian kepada Dirjen Cipta Karya
GCA: Minister of Public Works and Housing, delegated to the Director General of Human Settlements

Badan Usaha : PT Karian Water Services
SPV: PT Karian Water Services

Tahapan Proyek : Pra-konstruksi
Project Phase: Pre-construction



Proyek SPAM Regional Karian Serpong merupakan proyek antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT Karian Water Services yang mencakup area Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Proyek penyediaan air minum regional dari Bendungan Karian dengan kapasitas 4.600 liter/detik ini ditargetkan akan menyalurkan air minum ke 539.400 sambungan rumah.

Pada 29 April 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama dan Perjanjian Penjaminan, dan untuk Perjanjian Regres ditandatangani pada 30 April 2021. Proyek SPAM Karian Serpong merupakan proyek ke-6 di sektor air minum yang diberikan penjaminan dan memiliki durasi penjaminan selama 15 tahun sejak COD.

Karian Serpong Regional SPAM Project is a project between the Minister of Public Works and Housing and PT Karian Water Services which covers the area of DKI Jakarta Province, Tangerang Municipal, and South Tangerang Municipal. This drinking water provision project for Karian Dam Region with a 4,600 liters/second capacity is targeted to distribute drinking water to 539,400 households.

On 29 April 2021, the Cooperation Agreement and Guarantee Agreement were signed, and the Recourse Agreement was signed on 30 April 2021. Karian Serpong Regional SPAM project is the 6th project in the drinking water sector to be given a guarantee with a guarantee duration of 15 years from COD.

Sektor Transportasi Transportation

Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare Makassar – Parepare Public Railway Infrastructure Implementation



Lokasi : Makassar – Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan
Location: Makassar–Parepare, South Sulawesi Province

Nilai Proyek : Rp989 miliar
Project Value: Rp989 billion

PJKP : Kementerian Perhubungan
GCA: Ministry of Transportation

Badan Usaha : PT Celebes Railway Indonesia
SPV: PT Celebes Railway Indonesia

Tahapan Proyek :
– TOK 1 – Operasi (12 Oktober 2022)
– TOK 2 – Operasi (28 Desember 2023)
– TOK 3 – Konstruksi
Project Phase:
– TOK 1 – Operating (12 October 2022)
– TOK 2 – Operating (28 December 2023)
– TOK 3 – Construction

Proyek Kereta Api Makassar–Parepare merupakan proyek pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan RI. Proyek KPBU ini mengadopsi skema *Build Operate Transfer* (BOT)/‘Bangun Guna Serah’ dengan nilai investasi sebesar Rp989 miliar, dengan masa kerja sama 16 tahun 3 bulan setelah Tanggal Operasi Komersial 1. Proyek dengan skema *Availability Payment* (AP) ini akan melayani area meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan antara PJKP dengan PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) pada tanggal 5 April 2019. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT CRI, dan penandatanganan Perjanjian Regres antara PJKP dengan PT PII.

Makassar–Parepare Train is the first project in the transportation sector within the scope of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. This PPP project adopts the Build Operate Transfer (BOT) scheme with an investment value of Rp989 billion, with a cooperation period of 16 years 3 months after Commercial Operation Date 1. The project with the Availability Payment (AP) scheme shall cover 5 regencies/cities in South Sulawesi Province, i.e., Maros Regency, Pangkajene and Islands Regency, Barru Regency, Makassar City, and Parepare City.

The GCA and PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI) signed the Cooperation Agreement on 5 April 2019. Simultaneously, IIGF signed a Guarantee Agreement with PT CRI, and Recourse Agreement with the GCA.



Pengembangan *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi

Proving Ground Development Roadworthiness Testing and Motor Vehicle Certification (BPLJSKB) in Bekasi



Lokasi : Provinsi Jawa Barat

Location: West Java Province

Nilai Proyek : Rp1,98 triliun

Project Value: Rp1.98 trillion

PJPK : Kementerian Perhubungan

GCA: Ministry of Transportation

Badan Usaha : PT Indonesia International Automotive Proving Ground

SPV: PT Indonesia International Automotive Proving Ground

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

Pengembangan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi merupakan proyek KPBU *Solicited* yang bertujuan sebagai tempat sertifikasi dan pengujian kendaraan yang mengadopsi sebagian standar *United Nation Regulation* (UNR) sebagai standar yang diakui secara regional/global yang terdiri dari trek kecepatan tinggi, pengujian rem, pengujian suara, pengujian *sidelap* dan fasilitas *testing* lainnya. Berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, proyek tersebut menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) dengan periode kerja sama selama 17 tahun yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 15 tahun masa operasi serta bentuk kerja sama meliputi *Design – Build – Finance – Maintenance – Transfer* (DBFMT).

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT PII, dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022.

The BPLJSKB Bekasi Proving Ground is a Solicited PPP project with the objective to have a place for certification and testing of vehicles that adopt several United Nations Regulation (UNR) standards that are regionally/globally recognized consisting of high speed tracks, brake testing, sound testing, *sidelap* testing, and other testing facilities. Located in Bekasi Regency, West Java, the project uses an Availability Payment scheme with a cooperation period of 17 years consisting of 2 years of construction and 15 years of operation. The cooperation is in the form of Design – Build – Finance – Maintenance – Transfer (DBFMT).

On 31 October 2022, the cooperation agreement between the Ministry of Transportation, IIGF, and PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) was signed.



Portofolio Penjaminan Proyek Infrastruktur – Non-KPBU

Non-PPP Infrastructure Project Guarantee Portfolio

Sektor Pariwisata

Tourism

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mandalika Special Economic Zone (SEZ).



Lokasi : Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Location: Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province

Nilai Proyek : Rp4,59 triliun

Project Value: Rp4.59 trillion

Nilai Pinjaman : USD248,3 juta

Loan Value: USD248.3 million

BUMN – Terjamin : Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)

SOE – Guaranteed: Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)

Kreditur/Penerima Jaminan : Asian Infrastructure Investment Bank

Creditor/Recipient
Guarantee: Asian Infrastructure Investment Bank

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

Sebagai salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia, proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar yang berkelanjutan untuk pengembangan tujuan wisata baru di wilayah Mandalika, Lombok. Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Nilai investasi untuk Proyek ini sebesar USD316,5 juta (Rp4,5 triliun) dengan pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar USD248,3 juta. Dengan menerapkan konsep *eco-green* dan *event based destination*, pembangunan dan pengembangan proyek di atas lahan seluas 1.175 Ha ini meliputi pengembangan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) antara lain: jaringan jalan, jaringan air bersih, normalisasi sungai, pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan dan fasilitas listrik, dan jaringan dan fasilitas gas.

As part of Indonesia's tourism development program, the Mandalika SEZ Tourism Area Development has the objective to provide sustainable basic infrastructure for the new tourist destinations in the Mandalika region, Central Lombok, West Nusa Tenggara (NTB) Province.

The investment value for this project is USD316.5 million (Rp4.5 trillion) with financing from the Asian Infrastructure Investment Bank of USD248.3 million. By implementing the *eco-green* concept and *event based destination*, the construction and development of this project on an area of 1,175 Ha includes the development of basic infrastructure: road network, clean water network, river normalization, wastewater treatment, waste disposal site, electricity networks and facilities, and gas networks and facilities.



Sektor Ketenagalistrikan Electricity

Hydropower Programme Hydropower Program



Lokasi : Kalimantan, Sulawesi, dan Papua
Location: Kalimantan, Sulawesi, and Papua

Nilai Proyek : Rp6,90 triliun
Project Value: Rp6.90 trillion

Nilai Pinjaman : EUR294,7 juta
Loan Value: EUR294.7 million

BUMN – Terjamin : PT PLN (Persero)
SOE – Guaranteed: PT PLN (Persero)

**Kreditur/Penerima Jaminan :
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)**
Creditor/Guarantee Recipient:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Sebagai bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019–2027 dan bagian dari Program 35.000 MW Pemerintah, *Hydropower Programme* ini bertujuan di antaranya untuk:

- Meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).
- Menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) atas penggunaan bahan bakar fosil baik pada saat *base load* dan terutama pada saat beban puncak serta meningkatkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) kepada pelanggan di sistem terkait.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung oleh PT PLN (Persero) dari KfW Bank sebesar EUR294,7 juta untuk pembiayaan 6 (enam) sub proyek di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pada tanggal 5 September 2019, PT PLN (Persero) dan KfW menandatangani Perjanjian Pinjaman yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN (Persero) serta Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dan KfW atas pinjaman langsung tersebut.

As part of the 2019–2027 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) and part of the Government's 35,000 MW Program, the Hydropower Program has the objective to:

- Increase the electrification ratio in the Central and Eastern Indonesia with the construction of Hydroelectric Power Plants (HPP) over Mini-Hydro Power Plants (MHPP).
- Reduce the Electricity Generation Cost (BPP) for the fossil fuel consumption, both at base load and specifically during peak load, and increase the Service Quality Level (TMP) to customers in the related system.

This project uses a direct loan scheme by PT PLN (Persero) from KfW Bank of EUR294.7 million to finance six (6) sub-projects in the Kalimantan, Sulawesi, and Papua regions.

On 5 September 2019, PT PLN (Persero) and KfW signed a Loan Agreement, followed by the signing of a Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT PLN (Persero) and a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and KfW for such direct loan.



Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 & Patuha 2 Geothermal Power Plant (GPP) Dieng 2 & Patuha 2



Lokasi : Dieng & Patuha

Location: Dieng & Patuha

Nilai Proyek : Rp6,95 triliun

Project Value: Rp6.95 trillion

Nilai Pinjaman : USD335 juta

Loan Value: USD335 million

BUMN – Terjamin : PT Geo Dipa Energi (Persero)

SOE – Guaranteed: PT Geo Dipa Energi (Persero)

Kreditur/Penerima Jaminan : Asian Development Bank (ADB)

Creditor/Guarantee Recipient: Asian Development Bank (ADB)

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

Proyek ini merupakan salah satu wujud upaya penyediaan listrik melalui pendayagunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) panas bumi yang direncanakan dapat mulai beroperasi pada tahun 2025.

Pada tanggal 19 Agustus 2020 PT PII dan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") menandatangani perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB) untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2, yang meliputi Penandatanganan Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* antara GeoDipa dan ADB, Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan GeoDipa.

Proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung dari ADB kepada GeoDipa sebesar USD335 juta untuk membiayai pembangunan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 dengan masing-masing kapasitas sebesar 55 MW. Penjaminan Proyek ini telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman pada 21 September 2020.

This project strives to provide electricity by utilizing geothermal New Renewable Energy (NRE), which is planned to begin operating in 2025.

On 19 August 2020, IIGF and PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GeoDipa") signed an agreement with the Asian Development Bank (ADB) for the Dieng Unit 2 and Patuha Unit 2 Geothermal Power Plants (GPPs) Development projects, which include the Signing of the Loan Agreement between GeoDipa and ADB, the Signing of the Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and the Signing of the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and GeoDipa.

This project uses a direct loan scheme from ADB to GeoDipa amounting to USD335 million to finance the construction of GPP Dieng Unit 2 and GPP Patuha Unit 2 with a capacity of 55 MW each. This Project Guarantee is effective at the same time as the effective date of the Loan Agreement on 21 September 2020.



Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP)

Construction of the Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network with Result-Based Lending (RBL-KMP) Scheme



Lokasi : Kalimantan dan Maluku-Papua
Location: Kalimantan and Maluku-Papua

Nilai Proyek : Rp30,61 triliun
Project Value: Rp30.61 trillion

Nilai Pinjaman : USD600 juta
Loan Value: USD600 million

BUMN – Terjamin : PT PLN (Persero)
SOE – Guaranteed: PT PLN (Persero)

Kreditur/Penerima Jaminan : Asian Development Bank (ADB)
Creditor/Guarantee Recipient: Asian Development Bank (ADB)

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan dengan Skema *Result-Based Lending* (RBL-KMP) yang berlokasi di Kalimantan, Maluku, dan Papua, dan ditargetkan untuk menambah sambungan listrik untuk 6,7 juta pelanggan.

Proyek ini merupakan bagian dari program jangka Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga listrik (RUPTL) PT PLN 2019–2028.

Keberadaan proyek ini nantinya diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional khususnya di Wilayah Timur Indonesia, meningkatkan kualitas hidup di Indonesia Timur melalui penggunaan listrik berkelanjutan serta mempromosikan tenaga surya dan penggunaan energi bersih.

Pada tanggal 16 Desember 2020, PT PII dan PT PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan ADB untuk Proyek RBL-KMP, yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2020 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PLN dengan ADB.

The Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Project is an electricity infrastructure project with a Result-Based Lending Scheme (RBL-KMP) located in Kalimantan, Maluku, and Papua, and is targeted to increase electricity connections for 6.7 million customers.

This project is part of the long-term program as stated in the 2019–2028 Electricity Supply Business Plan (RUPTL) of PT PLN.

The project shall support the Government's efforts to increase the National Electrification Ratio, especially in the Eastern Region of Indonesia, improve the quality of life in Eastern Indonesia via the use of sustainable electricity, and promote the use of solar power and clean energy.

On 16 December 2020, IIGF and PLN signed agreements with the Asian Development Bank (ADB) for the RBL-KMP Project, including a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and Guarantee Agreement between IIGF and PLN. Previously, on 8 December 2020, a Loan Agreement was signed between PT PLN and ADB.



Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema Result-Based Lending (RBL-SNT)

Development of Sulawesi and Nusa Tenggara Network Distribution with the Result-Based Lending Scheme (RBL-SNT)



Lokasi : Sulawesi dan Nusa Tenggara
Location: Sulawesi and Nusa Tenggara

Nilai Proyek : Rp29,79 triliun
Project Value: Rp29.79 trillion

Nilai Pinjaman : USD255 juta
Loan Value: USD255 million

SOE – Guaranteed: PT PLN (Persero)
BUMN – Terjamin : PT PLN (Persero)

Kreditur/Penerima Jaminan :
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Creditor/Guarantee Recipient:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Berlokasi di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Proyek RBL-SNT ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi dengan menjalankan program melistriki 433 desa di Wilayah Timur Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan strategi peningkatan akses listrik melalui perluasan jaringan listrik sehingga pada akhirnya dapat mendorong pencapaian target rasio elektrifikasi nasional 100% pada tahun 2021. Dengan pembiayaan sebesar USD310 juta dari KfW kepada PT PLN, proyek ini ditargetkan dapat meningkatkan sambungan listrik sampai dengan 7,7 juta pelanggan.

Selain itu, pembangunan proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sosial di wilayah Indonesia Timur; meningkatkan keandalan sistem, efisiensi sistem distribusi, dan pelayanan kelistrikan; serta memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Pada tanggal 16 Desember 2020, PT PII dan PT PLN menandatangani perjanjian dengan KfW untuk proyek RBL-SNT yang meliputi penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII, dan KfW, dan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN yang sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2020, PT PLN dan KfW telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman.

Located in Sulawesi and Nusa Tenggara, the RBL-SNT Project is one of the Government's efforts to increase the Electrification Ratio by electrifying 433 villages in the Eastern Region of Indonesia, especially disadvantaged, frontier, and outermost areas (3T), with a strategy of increasing access to electricity through electricity network expansion. Therefore, it ultimately encourage the achievement of the national electrification ratio target of 100% by 2021. With financing of USD310 million from KfW to PT PLN, this project shall increase electricity connections for up to 7.7 million customers.

In addition, the construction of this project shall contribute to sustainable economic and social development in the Eastern Indonesia region; improving system reliability, distribution system efficiency, and electricity services; as well as fulfilling the electricity needs in Nusa Tenggara and Sulawesi regions.

On 16 December 2020, IIGF and PLN signed agreements with KfW for the RBL-SNT project, including a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and KfW, and a Guarantee Agreement between IIGF. On 8 December 2020, PT PLN and KfW signed a Loan Agreement.



Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali Construction of East Java and Bali Distribution Network



Lokasi : Jawa Timur dan Bali
Location: East Java and Bali

Nilai Proyek : Rp17,47 triliun
Project Value: Rp17.47 trillion

Nilai Pinjaman : USD310 juta
Loan Value: USD310 million

BUMN – Terjamin : PT PLN (Persero)
SOE – Guaranteed: PT PLN (Persero)

Kreditur/Penerima Jaminan : Asian Infrastructure Investment Bank
Creditor/Guarantee Recipient: Asian Infrastructure Investment Bank

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Sistem kelistrikan wilayah Jawa Timur dan Bali merupakan sistem yang terinterkoneksi dengan sistem Jawa-Bali untuk melayani kebutuhan listrik di Jawa Timur, Madura, dan Bali.

The electricity system for the East Java and Bali regions is an interconnected system in Java-Bali to serve electricity needs in East Java, Madura, and Bali.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2019–2028, diperkirakan bahwa sampai dengan tahun 2024 akan ada penambahan pelanggan sekitar 713 ribu pelanggan dengan tambahan penjualan sebesar 13,9 TWh (*TerraWatt hour*). Dalam rangka mendukung tercapainya target tersebut, PT PLN perlu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi melalui penambahan jaringan ataupun *uprating* trafo.

As stated in PT PLN's 2019–2028 Electricity Supply Business Plan, it is estimated that by 2024 there will be approximately 713 thousand additional customers with additional sales of 13.9 TWh (*TerraWatt hour*). To support the target's achievement, PT PLN needs to repair and increase the efficiency and reliability of the distribution system via additional networks or uprating transformers.

Dalam hal ini, komitmen Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") untuk mendukung PT PLN dalam mengembangkan jaringan distribusi di wilayah Jawa Timur dan Bali, direalisasikan melalui pendanaan senilai AS\$310 juta untuk pembiayaan non-material distribusi utama pada pembangunan jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, trafo, dan sambungan pelanggan. Selain itu, Kementerian Keuangan dan PT PII juga turut serta memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan pada pinjaman dari AIIB tersebut. Pada tanggal 10 Februari 2021, perjanjian pinjaman dan perjanjian penjaminan telah ditandatangani.

In this case, the commitment of the Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB") to support PT PLN in constructing distribution networks in the East Java and Bali regions, was realized via funding of US\$310 million for main non-material distribution financing for the construction of medium voltage networks, low voltage networks, transformers, and customer connections. In addition, the Ministry of Finance and IIGF also provided support in the form of guarantees for the loan from AIIB. On 10 February 2021, the loan agreement and guarantee agreement were signed.



Pengembangan Jaringan Transmisi dan Distribusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah

Transmission and Distribution Network Development Project in Western and Central Java



Lokasi : Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Location: West Java and Central Java Provinces

Nilai Proyek : Rp40,87 triliun
Project Value: Rp40.87 trillion

Nilai Pinjaman : USD600 juta
Loan Value: USD600 million

BUMN – Terjamin : PT PLN (Persero)
SOE – Guaranteed: PT PLN (Persero)

Kreditur/Penerima Jaminan : Asian Development Bank
Creditor/Guarantee Recipient: Asian Development Bank

Tahapan Proyek : Konstruksi
Project Phase: Construction

Dalam upaya mencapai target penjualan dan penambahan pelanggan, Regional Jawa Madura Bali telah merencanakan program investasi jangka menengah dan pendek melalui penambahan kapasitas aset distribusi. Selain untuk mencapai sasaran penjualan, program investasi lainnya juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan operasional distribusi, di antaranya dengan penambahan jaringan tegangan menengah serta penambahan jumlah atau kapasitas transformator distribusi. PT PLN juga telah mempersiapkan beberapa program strategis untuk mendukung visi pemerintah untuk peningkatan energi terbarukan dengan target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025, di antaranya dengan program konversi energi sisi pelanggan, khususnya pada penggunaan peralatan rumah tangga dan kendaraan bertenaga listrik. Untuk itu, telah direncanakan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap untuk fasilitas *charging station* kendaraan listrik.

Pelaksanaan program tersebut melalui pendanaan pinjaman (*loan*) dari ADB sebesar USD600 juta. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pendapatan penjualan di Sub Regional JBB dan JBT, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas dan keandalan sistem transmisi dan distribusi yang tinggi. Pada tanggal 19 Mei 2022 PT PII dan PT PLN melaksanakan penandatanganan perjanjian dengan Asian Development Bank (ADB), yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan dengan ADB, dan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT PLN. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT PLN dengan ADB untuk pendanaan Proyek SREAP.

To achieve sales targets and increase customers, the Java Madura Bali Regional has planned a medium and short term investment program by increasing distribution asset capacity. In addition to achieving sales targets, other investment programs have the objective to increase the efficiency and reliability of distribution operations, including by adding medium voltage networks and increasing the number or capacity of distribution transformers. PT PLN has also prepared several strategic programs to support the government's vision to increase renewable energy with an NRE mix target of 23% by 2025, including a customer-side energy conversion program, especially in the utilization of household appliances and electric-powered vehicles. Therefore, the construction of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure for electric vehicles' charging station is gradually planned.

The program is implemented with loan from ADB amounted to USD600 million. By implementing this program, the sales capacity and income shall increase in JBB and JBT Sub-Regions. The customer satisfaction shall also increase via high quality and reliability of transmission and distribution systems. On 19 May 2022, IIGF and PT PLN signed agreements with the ADB, including a Guarantee Implementation Agreement between the Ministry of Finance and ADB, and Guarantee Agreement between IIGF and PLN. Previously, on 31 December 2021, a Loan Agreement was signed between PT PLN and ADB for the SREAP Project Financing.



Pembangunan PLTU Timor-1 (2x50 MW) Construction of SPP Timor-1 (2x50 MW)



Lokasi : Dusun Panaf, Desa Luifuleo, Kabupaten Kupang

Location: Panaf Hamlet, Luifuleo Village, Kupang Regency

Nilai Proyek : Rp3,72 triliun

Project Value: Rp3.72 trillion

Nilai Pinjaman : Rp2,75 triliun

Loan Value: Rp2.75 trillion

BUMN – Terjamin : PT PLN (Persero)

SOE – Guaranteed: PT PLN (Persero)

Kreditur/Penerima Jaminan : Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat

Creditor/Guarantee Recipient: Syndication of Bank Permata and Bank Muamalat

Tahapan Proyek : Konstruksi

Project Phase: Construction

PLTU Timor-1 merupakan salah satu proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap yang sudah direncanakan di dalam Rencana Usulan Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Saat ini kebutuhan sistem Timor (Kupang – Soe – Kefamenanu – Atambua) merupakan sistem yang paling besar di PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dapat terserap beban puncak 98,4 MW atau 42,46% dari jumlah daya terpasang sebesar 231,73 MW per tanggal 11 Februari 2021.

Penambahan kapasitas daya di Provinsi NTT dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Untuk Pulau Timor yang merupakan sistem ketenagalistrikan terbesar di NTT, penambahan kapasitas daya listrik diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan yang relatif cukup tinggi. Penambahan kapasitas ini juga diperlukan mengingat akan berakhirnya sewa pembangkit *Leased Marine Vessel Power Plant* (LMVPP) berbahan bakar minyak dengan kapasitas 60 MW pada bulan Desember 2021. Pembangunan PLTU Timor-1 menjadi satu-satunya langkah untuk memenuhi target sistem kelistrikan aman (*reserve margin* >30%) dalam jangka waktu yang dekat. Tanpa PLTU Timor-1, maka sistem akan berada pada status Siaga, (*reserve margin* <30%) dan meningkatnya risiko pemadaman jika terjadi gangguan atau pemeliharaan. Pembangkit listrik di NTT didominasi oleh bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan tingginya Biaya Pokok Produksi (BPP). PLTU Timor-1 menjadi pembangkit baseload dengan BPP rendah (indikasi BPP PLTU Timor-1 sebesar Rp1.228,51/kWh), sehingga berpotensi menurunkan BPP dan menjaga pasokan daya di Sistem Timor.

Pada tanggal 28 Desember 2022, PT PII dan PLN menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PLN yang selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022 telah diterbitkan Surat Jaminan Pemerintah atas Penjaminan Proyek PLTU Timor-1 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2022, PLN dan Sindikasi Bank Permata dan Bank Muamalat telah menandatangani perjanjian pinjaman atas pendanaan Proyek PLTU Timor-1.

SPP Timor-1 is one of the steam power plant development projects planned in the 2021–2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL). Currently, the need for the Timor system (Kupang – Soe – Kefamenanu – Atambua) is the largest system in the PLN Main Unit for the East Nusa Tenggara (NTT) Region, which can absorb a peak load of 98.4 MW or 42.46% of the total installed power of 231.73 MW as of 11 February 2021.

The addition of power capacity in NTT Province was necessary to increase the electrification ratio. For Timor Island, which is the largest electricity system in NTT, additional electricity capacity is needed to anticipate the relatively high growth in demand. This additional capacity is also necessary considering that the lease of 60 MW oil-fueled *Leased Marine Vessel Power Plant* (LMVPP) will end in December 2021. The construction of SPP Timor-1 is the only step to fulfill the target of a safe electricity system (*reserve margin* >30%) in the short-term. Without SPP Timor-1, the system will be on Standby status, (*reserve margin* <30%) and the risk of outages will increase if disruption or maintenance occurs. Electricity generation in NTT is dominated by oil fuel (BBM), which results in high Electricity Generation Cost (BPP). SPP Timor-1 is a baseload generator with a low BPP (indicated BPP for SPP Timor-1 is Rp1,228.51/kWh). Thus, it has the potential to reduce BPP and maintain power supply in the Timor System.

On 28 December 2022, IIGF and PT PLN signed a Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT PLN. Subsequently, on 29 December 2022, a Government Guarantee Letter for the SPP Timor-1 Project Guarantee was issued by the Director General of Financing and Risk Management, the Ministry of Finance. Previously, on 8 December 2022, PT PLN and the Syndication of Bank Permata and Bank Muamalat had signed a loan agreement for SPP Timor-1 PLTU Project Financing.



Penjaminan Korporasi Padat Karya Labor-Intensive Corporate Guarantee

Kegiatan Penjaminan Korporasi Padat Karya Labor-Intensive Corporate Guarantee Activities

Sejak tahun 2020, PT PII sebagai salah satu SMV Kementerian Keuangan mendapatkan perluasan mandat untuk dapat lebih berkontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui skema penjaminan untuk pelaku usaha korporasi, atau juga disebut korporasi padat karya. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap masyarakat.

Rincian pemberian perluasan mandat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 98/2020).
2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 43/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, dimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah terkait Pelaksanaan Program PEN Pemerintah dapat menugaskan Perseroan.
3. Pada tanggal 26 Oktober 2020 telah terbit Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional dimana Pemerintah memberikan Jaminan kepada Lembaga Keuangan dalam membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong perekonomian nasional berupa pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada BUMN, BUMD dan/atau Pemerintah Daerah melalui BUPI.
4. Pada tanggal 13 November 2020, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sehubungan dengan penugasan PT PII dalam skema penjaminan korporasi padat karya sebagai berikut:
 - a. KMK No. 522/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Melaksanakan Penjaminan Bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Since 2020, IIGF, as one of the Ministry of Finance's SMVs, has been assigned an extended mandate, to contribute more to the National Economic Recovery (PEN) program via a guarantee scheme for corporate business entities, or work-intensive corporations. This is part of the Government's policy to face the impact of the Covid-19 pandemic on the community.

The details of granting the mandate expansion are as follows:

1. On 28 July 2020, the Minister of Finance issued the Minister of Finance Regulation No. 98/PMK.08/2020 on the Procedures for Sovereign Guarantees to Corporate Business Entities through Appointed Guarantee Business Entity to Implement National Economic Recovery Program. (PMK 98/2020).
2. On 24 August 2020, the Government issued Government Regulation No. 43 of 2020 on the Amendment to the Government Regulation No. 23 of 2020 on the Implementation of the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economy Rescue, which is stated in Article 17 paragraph (2), for the direct Guarantees by the Government regarding the Implementation of the PEN Program, the Government can assign the Company.
3. On 26 October 2020, Presidential Regulation No. 103 of 2020 on the Central Government Guarantees for Development Financing to Encourage the National Economy and/or the National Economic Recovery Program, was issued, in which the Government provides Guarantees to Financial Institutions to finance development activities to encourage the national economy in the form of financing (loans) to SOEs, Local-Owned Enterprises, and/or Local Government via BUPI.
4. On 13 November 2020, a Minister of Finance Decree (KMK) was issued on the assignment of IIGF to the labor-intensive corporate guarantee scheme as follows:
 - a. Minister of Finance Decree No. 522/KMK.08/2020 on the Assignment to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) to Implement Joint Guarantees with Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia for Corporate Business Entities to Carry Out the National Economic Recovery Program.



- b. KMK No. 523/KMK.08/2020 tentang Penugasan Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Dukungan Loss Limit Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menindaklanjuti penugasan berdasarkan KMK tersebut, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antar para pihak sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 19 November 2020.
2. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan dukungan *loss limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Desember 2020.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT PII sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Desember 2020.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII sehubungan dengan Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 15 Februari 2021.

Pada tanggal 30 Desember 2020, PT PII telah menerima tambahan PMN sebesar Rp1,57 triliun sebagai bentuk dukungan kapasitas dalam rangka pelaksanaan dukungan *loss limit* dan penjaminan korporasi padat karya.

Untuk memberikan relaksasi atas program penjaminan korporasi padat karya kepada pelaku usaha, terdapat berbagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan maupun Perjanjian Kerja sama antara PT PII (Persero) dengan pihak eksternal pada tahun 2022 yang meliputi:

1. Telah dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 28 Januari 2022.
2. Pada tanggal 29 Maret 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 98/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

- b. Minister of Finance Decree No. 523/KMK.08/2020 on the Assignment to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) to Implement Government Guarantee Loss Limit Support to Carry Out the National Economic Recovery Program.

Pursuant to the KMK, cooperation agreement(s) were signed between the parties as follows:

1. Cooperation Agreement between the Ministry of Finance and IIGF implementing the assignment to provide loss limit support for the Sovereign Guarantee in the National Economic Recovery Program on 19 November 2020.
2. Cooperation Agreement between Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) and IIGF implementing the loss limit support for the Sovereign Guarantees for Corporate Business Entities in the National Economic Recovery Program on 15 December 2020.
3. Cooperation Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and IIGF in implementing joint guarantee assignments for the Sovereign Guarantee in the National Economic Recovery Program on 23 December 2020.
4. Cooperation Agreement between Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) and IIGF implementing the Joint Guarantees in the Sovereign Guarantee for Corporate Business Entities in the National Economic Recovery Program on 15 February 2021.

On 30 December 2020, IIGF received additional PMN amounted to Rp1.57 trillion as a form of capacity support to implement loss limit support and labor-intensive corporate guarantees.

To provide relaxation for the labor-intensive corporate guarantee program to business entities, there were various changes to the Minister of Finance Regulation and the Cooperation Agreement between IIGF (Persero) and external parties in 2022 which include:

1. Amendment to the Cooperation Agreement between Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) and IIGF Implementing Loss Limit Support for Sovereign Guarantees for Corporate Business Entities in the National Economic Recovery Program on 28 January 2022.
2. On 29 March 2022, the Minister of Finance issued the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 27/PMK.08/2022 on the Second Amendment to PMK 98/2020 on the Procedures for Sovereign Guarantees for Corporate Business Entities through Appointed Guarantee Business Entity in Implementing the National Economic Recovery Program.



3. Telah dilakukan Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 9 Juni 2022.
4. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penugasan Pemberian Dukungan Loss Limit dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 9 Juni 2022.
5. Telah dilakukan Addendum Ketiga Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Keuangan dan PT PII terkait Pelaksanaan Penugasan Pemberian Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 19 September 2022.
6. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Dukungan *Loss Limit* dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 14 November 2022.
7. Telah dilakukan Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) dan PT PII terkait Pelaksanaan Penjaminan Bersama dalam rangka Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Korporasi dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 14 November 2022.

Sesuai PMK 98/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 27/2022, peran serta fungsi PT PII dalam Skema Penjaminan Korporasi Padat Karya meliputi:

1. Verifikator data transaksi dan tagihan pembayaran IJP. PT PII melaporkan kepada Kementerian Keuangan hasil verifikasi administratif terhadap data transaksi penjaminan dan perhitungan IJP yang diajukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada Kementerian Keuangan.
2. Penyedia dukungan *loss limit*. Apabila terjadi klaim yang melebihi *threshold*, LPEI mengajukan klaim *loss limit* kepada PT PII. Klaim *loss limit* adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh PT PII kepada Penjamin (LPEI) sehubungan dengan dukungan *loss limit*.
3. Penyedia Penjaminan Bersama (*Co-Guarantor*). Dalam kondisi pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak berorientasi ekspor, maka Penjaminan Pemerintah akan dilakukan secara Bersama oleh LPEI dan PT PII.
4. Pengelolaan hak tagih atas klaim yang telah dibayarkan oleh Penjamin (Regres) untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman dalam hal terjadi klaim pada porsi dukungan *loss limit* dan Penjaminan Bersama dengan menunjuk pihak selaku *recovery agent and collecting agent* atas nama Penjamin.

3. Amendment to the Cooperation Agreement between the Ministry of Finance and IIGF on the Implementation of Joint Guarantees for Sovereign Guarantees in the National Economic Recovery Program on 9 June 2022.
4. Second Amendment to the Cooperation Agreement between the Ministry of Finance and IIGF on the Implementation of the Assignment for Providing Loss Limit Support for Sovereign Guarantees in the National Economic Recovery Program on 9 June 2022.
5. Third Amendment to Cooperation Agreement between the Ministry of Finance and IIGF on the Implementation of the Assignment for Providing Loss Limit Support for Sovereign Guarantees in the National Economic Recovery Program on 19 September 2022.
6. Second Amendment to the Cooperation Agreement between Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) and IIGF Implementing Loss Limit Support for Sovereign Guarantees for Corporate Entrepreneurs in the National Economic Recovery Program on 14 November 2022.
7. Second Amendment to the Cooperation Agreement between Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) and IIGF Implementing Joint Guarantees for the Sovereign Guarantees for Corporate Business Entities in the National Economic Recovery Program dated 14 November 2022.

In accordance with PMK 98/2020 as amended by PMK 27/2022, the role and function of IIGF in the Labor-Intensive Corporate Guarantee Scheme includes:

1. Transaction data verifier and guarantor of Guarantee Fee payment. IIGF reports the results of administrative verification of guarantee transaction data and Guarantee Fee calculations submitted by the Indonesian Export Financing Agency (LPEI) to the Ministry of Finance.
2. Loss limit support provider. Should there be a claim that exceeds the threshold, LPEI submits a loss limit claim to IIGF. The loss limit claim is the amount of money that must be paid by IIGF to the Guarantor (LPEI) in connection with the loss limit support.
3. Joint Guarantee Provider (*Co-Guarantor*). In the event that a guaranteed corporate entrepreneur is not export-oriented, the Sovereign Guarantee shall be carried out jointly by LPEI and IIGF.
4. Management of collection rights for claims that have been paid by the Guarantor (Recourse) to fulfill loan payment obligations in the event of a claim on the support portion loss limit and Joint Guarantee by appointing a party as recovery agent and collecting agent on behalf of the Guarantor.



5. Pemantauan atas Pengelolaan Regres yang dilakukan Penjamin, yaitu dengan melakukan pemantauan intensif atas proses pemulihan hak tagih piutang penjaminan, jika terdapat pembayaran klaim penjaminan.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Nilai Penjaminan yang diberikan sebesar Rp2,86 triliun dengan cakupan penjaminan sebesar Rp2,17 triliun termasuk cakupan porsi Penjaminan Bersama PT PII sebesar Rp987 miliar dari total transaksi sebanyak 27 penjaminan terdiri dari 11 Bank dan 27 Terjamin yang telah berpartisipasi serta disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perseroan.

5. Monitoring the Recourse Management carried out by the Guarantor, i.e., by intensive monitoring of the process of recovering the right to collect guarantee receivables, if there is payment of guarantee claims.

As of 31 December 2023, the Guarantee Value provided amounted to Rp2.86 trillion, with coverage of Rp2.17 trillion, including coverage of IIGF's Joint Guarantee of Rp987 billion from a total of 27 guarantee transactions, consisting of 11 Banks and 27 Guarantees, who have participated and approved by the Company to have loss limit support.

Penjaminan BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Cadangan Pangan Pemerintah

SOE Guarantee In Implementing the National Economic Recovery Program and Government Food Reserves

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Program ini diluncurkan oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana dalam pelaksanaannya, skema penjaminan dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Pada tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 ("PP 23/2020") tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau untuk Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagai langkah inisiasi penerapan program PEN. Berdasarkan Pasal 17 PP 23/2020 tersebut, Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan, yang mana dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka penjaminan langsung oleh Pemerintah. Menyusul penerbitan PMK No. 98/PMK.08/2020 mengenai Penjaminan Korporasi Padat Karya, Menteri Keuangan juga menerbitkan PMK No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara

The PEN Program has the objective to protect, maintain, and improve the economic capabilities of business entities from the real sector and the financial sector in running their businesses. This program was launched by the Government to support state financial policies to save the national economy.

The PEN Program is implemented via PMN, placement of Government funds and/or investment, and/or guarantee activities with a scheme determined by the Government whereas in its implementation, the guarantee scheme can be conducted directly by the Government and/or via one or several appointed business entity as guarantor.

On 11 May 2020, the Government issued Government Regulation No. 23 of 2020 ("PP 23/2020") on the National Economic Recovery Program to Support State Financial Policy for Handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic and/or to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability and National Economy Rescue, as an initial step to implement PEN program. Based on Article 17 of PP 23/2020, the Government can assign a Guarantee Business Entity, which is carried out based on the Decree of the Minister of Finance for direct guarantees by the Government. Following the issuance of PMK No. 98/PMK.08/2020 on Labor-Intensive Corporate Guarantee, the Minister of Finance also issued PMK No. 211/PMK.08/2020 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantees for State-Owned Enterprises



Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 22 Desember 2020. Sesuai dengan mandat dari Kementerian Keuangan, PT PII dapat berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah kepada BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau mendapatkan penugasan dalam rangka program PEN. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, PT PII telah menandatangani di antaranya 9 proyek terkait penjaminan BUMN dalam rangka Program PEN dan penjaminan dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah

for National Economic Recovery Program Implementation on 22 December 2020. In accordance with the mandate from the Ministry of Finance, IIGF can collaborate with the Ministry of Finance to provide Sovereign Guarantees to SOEs affected by the Covid-19 pandemic and/or receive assignments within the framework of the PEN program. As of December 31, 2023, IIGF has signed 9 projects related to SOE guarantees for the PEN Program and guarantees for the Government Food Reserves.

Portfolio Penjaminan BUMN dalam rangka Pelaksanaan Program PEN SOE Guarantee Portfolio for the PEN Program

Penjaminan Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Bond Guarantee III of PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan Guarantee Information

Nilai Obligasi Bond Value	Rp1,77 triliun Rp1.77 trillion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Wali Amanat Trustee	PT Bank Mega Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	5 dan 7 tahun 5 and 7 years

Kinerja operasional dan likuiditas PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Kondisi ini berdampak terhadap profil risiko kredit Waskita yang semakin meningkat sehingga berakibat pada penurunan kredit oleh lembaga pemeringkat. Pada akhirnya pihak perbankan secara bertahap mengurangi dukungan pendanaan kepada Waskita.

Operational performance and liquidity of PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ("Waskita") declined as a result of the prolonged Covid-19 pandemic. This condition affected Waskita's increasing credit risk profile, resulting in a credit reduction by the rating agency. In the end, the banking sector gradually reduced funding support to Waskita.

Oleh karena itu, Waskita berencana menerbitkan obligasi dalam rangka refinancing dan pemenuhan kebutuhan modal kerja. Agar rencana tersebut dapat tercapai, Waskita membutuhkan dukungan berupa penjaminan untuk meningkatkan peringkat obligasi sehingga dapat menarik minat investor pasar modal dan dapat mengoptimalkan penerbitan obligasi yang dilakukan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok obligasi III Waskita Karya tahun 2021. Pada tanggal 16 September 2022, pihak-pihak terkait telah menandatangani Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan.

Therefore, Waskita plans to issue bonds for refinancing and meeting working capital needs. To achieve the target, Waskita needs support in the form of guarantees to increase the bond rating to attract the interest of capital market investors and optimize the bond issuance. In this case, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee against the risk of default on the interest and principal of the 2021 Waskita Karya Bond III. On September 16 2022, the related parties have signed the Trustee Agreement, Guarantee Agreement, and Guarantee Implementation Agreement.



Penjaminan Pinjaman PT Waskita Karya (Persero)

Loan Guarantee of PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan

Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp8,08 triliun Rp8.08 trillion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kreditur Creditor	Sindikasi PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank BJB Syndication of PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank BJB
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	3 tahun 3 years

Agar kondisi perusahaan semakin membaik, Waskita terus melakukan upaya restrukturisasi keuangan secara menyeluruh, salah satunya adalah melalui penjaminan pemerintah atas pinjaman dan obligasi/sukuk. Untuk menambah modal kerja, Waskita memperoleh pinjaman dari sindikasi Bank dalam negeri yang modalnya akan digunakan untuk membiayai 148 proyek penugasan dari Pemerintah dalam rangka program PEN.

Untuk meningkatkan kelayakan dalam rencana pinjaman dari pihak Perbankan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek yang dikerjakan dan pemenuhan kewajiban Waskita, maka dibutuhkan penjaminan pemerintah. Jaminan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi program restrukturisasi keuangan Waskita. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Waskita dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, sedangkan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2021.

For the company's condition to improve, Waskita carries out comprehensive financial restructuring efforts, one of which is via Sovereign guarantees for loans and bonds/sukuk. To increase working capital, Waskita obtained a loan from a syndicate of domestic banks, which will be used to finance 148 assignment projects from the Government within the framework of the PEN program.

A sovereign guarantee is necessary to increase the feasibility of loan plans from banks to complete the projects and fulfill Waskita's obligations. This Sovereign guarantee shall provide a significant boost to Waskita's financial restructuring program. On 25 October 2021, Waskita and the Creditors signed the Loan Agreement. The Guarantee Agreement and Guarantee Implementation Agreement were signed on 29 October 2021.

Penjaminan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero)

Guarantee for Bond IV and Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero)

Informasi Penjaminan

Guarantee Information

Nilai Obligasi dan Sukuk Bond and Sukuk Value	Obligasi Rp2,13 triliun/Sukuk Rp1,15 triliun Bonds of Rp2.13 trillion/Sukuk of Rp1.15 trillion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Wali Amanat Trustee	PT Bank KB Bukopin Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	5 dan 7 tahun 5 and 7 years



Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Tahun 2022 dengan Jaminan Pemerintah merupakan bagian dari strategi penyehatan keuangan Waskita yang terintegrasi dan saling berkaitan serta merupakan penjaminan atas surat utang Waskita dalam Rangka PEN Tahap II yang merupakan tahap lanjutan dari penerbitan Obligasi III dengan Penjaminan Pemerintah yang telah ditandatangani pada 16 September 2021.

Penerbitan obligasi dan sukuk tersebut dalam rangka *refinancing* dan pemenuhan kebutuhan modal kerja Waskita. Dalam upaya pemberian dukungan kepada Waskita, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan terhadap risiko gagal bayar atas bunga dan pokok Obligasi IV dan Sukuk I Waskita tahun 2022 yang pada tanggal 22 April 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Wali Amanat, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan oleh Waskita, Kementerian Keuangan, PT PII dan Waliamanat.

Bond IV dan Sukuk Mudharabah I of Waskita in 2022 with Sovereign Guarantee are part of Waskita's integrated and interrelated financial restructuring strategy and are a guarantee for Waskita's debt securities in Phase II PEN, which is a follow-up to the issuance of Bond III with Sovereign Guarantee, signed on 16 September 2021.

The purpose of the issuance of bonds and sukuk is for refinancing and meeting Waskita's working capital needs. To provide support to Waskita, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee support against the risk of default on the interest and principal of Bond IV and Sukuk I of Waskita in 2022. On 22 April 2022, the Trustee Agreement, Guarantee Agreement and Guarantee Implementation Agreement were signed by Waskita, Ministry of Finance, IIGF, and the Trustee.

Penjaminan Pinjaman Bus Listrik PT Industri Kereta Api (Persero)

Electric Bus Loan Guarantee of PT Industri Kereta Api (Persero)

Informasi Penjaminan

Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp150 miliar Rp150 billion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	PT Industri Kereta Api (Persero)
Wali Amanat Trustee	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	4 tahun 4 years

Bertepatan dengan diselenggarakannya rangkaian agenda KTT G-20, dimana Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G-20, yang digelar di Provinsi Bali. Kementerian Perhubungan menyelenggarakan pengadaan penyediaan layanan transportasi umum bus listrik untuk mendukung Program G-20. Operator yang ditunjuk untuk menyediakan layanan bus listrik adalah Perum DAMRI. Perum DAMRI melalui LOA pada bulan Februari dan April 2022 telah menunjuk PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) untuk menyediakan bus listrik sebanyak 53 unit. Setelah dioperasikan pada KTT G-20, bus listrik tersebut selanjutnya akan dioperasikan di Kota Bandung sebanyak 1 koridor (14 unit) dan Kota Surabaya sebanyak 2 koridor (39 unit) dengan skema *Buy The Service* (BTS).

Dalam upaya pemberian dukungan penyediaan bus listrik kepada PT INKA, Kementerian Keuangan dan PT PII memberikan dukungan penjaminan yang dimana pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian, yang meliputi Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Muamalat, yang sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara PT INKA dengan Bank Muamalat untuk pendanaan pengadaan 53 unit bus listrik.

Coincided with the G-20 Summit agenda, where Indonesia held the G-20 Presidency for the first time in Bali Province. The Ministry of Transportation procured electric bus as public transportation services to support the G-20 Program. The operator appointed to provide electric bus services was Perum DAMRI. Perum DAMRI, via LOA in February and April 2022, has appointed PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) to provide 53 electric buses. After being utilized at the G-20 Summit, the electric buses would operate in Bandung City in 1 corridor (14 units) and Surabaya City in 2 corridors (39 units) under the *Buy The Service* (BTS) scheme.

To provide support for the provision of electric buses to PT INKA, the Ministry of Finance and IIGF provided guarantee support. On 30 December 2022, a Guarantee Agreement was signed by the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Muamalat. On 30 December 2022, a Loan Agreement was signed between PT INKA and Bank Muamalat to fund the procurement of 53 electric buses.



Penjaminan Pinjaman Perum DAMRI

Loan Guarantee for Perum DAMRI

Informasi Penjaminan

Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp97 miliar Rp97 billion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	Perum DAMRI
Kreditur Creditor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	4 tahun 4 years

Perum DAMRI merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang. Pandemi Covid-19 menyebabkan sektor transportasi darat mengalami tekanan yang cukup sulit dikarenakan masyarakat membatasi mobilitas mereka demi pencegahan penularan dari Covid-19 mengakibatkan penurunan drastis pada jumlah penumpang. Oleh sebab itu, Perum DAMRI memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah sebagai upaya memperkuat basis komersial perusahaan.

Pinjaman dari Bank Mandiri kepada Perum DAMRI akan difokuskan untuk mengembangkan trayek Angkutan Bandara dan Angkutan Antarkota melalui peremajaan armada di 35 trayek antarkota dan bandara yang terpilih karena memiliki *traffic* penumpang yang baik, serta mengembangkan Fasilitas Pemeliharaan Kendaraan (*Maintenance Facility*). Pada tanggal 30 Desember 2022, Perum DAMRI dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan Perum DAMRI ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

Perum DAMRI is a state-owned company that is engaged in the public transportation services sector. The Covid-19 pandemic has caused the land transportation sector to experience a pressure because people limit their mobility to prevent transmission of Covid-19, resulting in a drastic reduction in the number of passengers. Therefore, Perum DAMRI used loan facilities with Sovereign Guarantee as an effort to strengthen the company's commercial base.

The loan from Bank Mandiri to Perum DAMRI would be focused on developing Airport Transport and Intercity Transport routes by means of fleet rejuvenation on 35 intercity and airport routes selected, as these routes have good passenger traffic, and Vehicle Maintenance Facilities development. On 30 December 2022, Perum DAMRI and the Creditors signed a Loan Agreement, followed by a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and Perum DAMRI was signed on 30 December 2022.



Penjaminan Pinjaman PT Len Industri (Persero)

Loan Guarantee of PT Len Industri (Persero)

Informasi Penjaminan

Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Eqv. Rp2,64 triliun Equivalent to Rp2.64 trillion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	PT Len Industri (Persero)
Kreditur Creditor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Bank/Lembaga Keuangan Lainnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and Other Banks/Financial Institutions
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	4 tahun 4 years

PT Len Industri (PT Len) pada tahun 2021 s.d. 2022 menerima surat penunjukan proyek strategis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam rangka kemandirian penyediaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) oleh Industri Dalam Negeri. Penunjukan dari Kementerian Pertahanan ini selain untuk menjalankan 3 proyek tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan PT Len terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk menunjang pelaksanaan penunjukan atas 3 (tiga) proyek di atas PT Len membutuhkan fasilitas kredit perbankan, baik *Cash Loan* (CL) maupun *Non Cash Loan* (NCL). Oleh sebab itu, PT Len mengajukan permohonan pembiayaan fasilitas pinjaman dengan jaminan Pemerintah. Pada tanggal 30 Desember 2022, PT Len dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Pinjaman, selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan PT Len ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2022.

PT Len Industri (PT Len), in 2021 and 2022 received a letter of appointment for a strategic project from the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia for the independent provision of Main Defense System Equipment (Alutsista) by Domestic Industry. This appointment from the Ministry of Defense is to implement these 3 projects and as a form of PT Len's support for the National Economic Recovery (PEN) Program.

To support the implementation of the appointment of the three (3) projects above, PT Len requires banking credit facilities, both Cash Loans (CL) and Non Cash Loans (NCL). Therefore, PT Len submitted an application for loan financing with a sovereign guarantee. On 30 December 2022, PT Len and the Creditors signed a Loan Agreement, followed by a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT Len was signed on 30 December 2022.



Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero)

Loan Guarantee of PT Pertamina (Persero)

Informasi Penjaminan

Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp47,19 triliun Rp47.19 trillion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	PT Pertamina (Persero)
Kreditur Creditor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	2 tahun 2 years

PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") melalui Pertamina Patra Niaga (PPN) melaksanakan penugasan kegiatan *Public Service Obligation* (PSO) penyediaan dan pendistribusian kuota volume penyalur Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus (JBKP). Mengacu pada PMK No. 159/PMK.02/2022, dalam pelaksanaan penugasan kegiatan PSO, Pertamina dapat memperoleh Dana Kompensasi Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah atas kekurangan penerimaan Pertamina akibat selisih Harga Jual Eceran (HJE). Namun berdasarkan kondisi eksisting pembayaran Dana Kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintah baru dapat diselesaikan pada rata-rata 3 tahun. Terjadinya penundaan pembayaran Dana Kompensasi menyebabkan defisit pada *Operating Cash Flow* (OCF). Atas hal tersebut, Pertamina melakukan proses penyediaan KMK Dana Kompensasi dan Subsidi dengan debitur Bank Mandiri, BNI dan BRI dalam rangka upaya menjaga *cashflow* dalam mencegah terjadinya disrupsi operasional. Namun, fasilitas kredit yang diberikan oleh ketiga Bank tersebut sudah hampir mencapai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditentukan oleh OJK. Dengan memperhatikan kondisi BMPK Himbara, opsi yang dapat diupayakan oleh Pertamina adalah permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program PEN dari Kementerian Keuangan atas Fasilitas KMK tersebut, sehingga ketentuan BMPK tersebut dapat dikecualikan.

Pertamina mengajukan permohonan Fasilitas KMK Penjaminan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pada tanggal 30 Desember 2022, Pertamina dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi (Bank Mandiri, BNI dan BRI), selanjutnya Perjanjian Penjaminan antara Kementerian Keuangan, PT PII dan Bank Mandiri, serta Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dengan Pertamina ditandatangani secara bersamaan pada tanggal 30 Desember 2022.

PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), through Pertamina Patra Niaga (PPN), carries out Public Service Obligation (PSO) activities to provide and distribute volume quotas for distributors of Certain Fuel Types (JBT) and Special Fuel Types (JBKP). With reference to PMK No. 159/PMK.02/2022, in carrying out PSO assignments, Pertamina shall obtain Fuel Compensation Funds from the Government for the shortfall in Pertamina's revenues due to the difference in Retail Selling Prices (HJE). However, based on existing conditions, payments of Compensation Funds made by the Government can only be completed in an average of 3 years. The delay in payment of the Compensation Fund caused a deficit in Operating Cash Flow (OCF). Therefore, Pertamina carried out the process of provision of KMK Compensation and Subsidy Funds with Bank Mandiri, BNI, and BRI debtors to maintain cash flow to prevent operational disruption. However, the credit facilities provided by the three banks have almost reached the Maximum Credit Limit (BMPK) determined by the OJK. Taking into account the condition of the Himbara BMPK, the option is for Pertamina to request a Sovereign Guarantee KMK Facility through the PEN Program from the Ministry of Finance for the KMK Facility, so that the BMPK provisions can be excluded.

Pertamina applied for a Sovereign Guarantee KMK Facility through the PEN Program. On 30 December 2022, Pertamina and the Creditors signed a Syndicated Credit Agreement (Bank Mandiri, BNI, and BRI), followed by a Guarantee Agreement between the Ministry of Finance, IIGF, and Bank Mandiri, and the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and Pertamina, which were signed simultaneously on 30 December 2022.



Portfolio Penjaminan BUMN dalam rangka Cadangan Pangan Pemerintah SOEs Guarantee in the Government Food Reserves

Penjaminan Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Loan Guarantee of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Informasi Penjaminan Guarantee Information

Nilai Pinjaman Loan Value	Rp1,50 triliun Rp1.50 trillion
BUMN Terjamin SOEs Guaranteed	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Kreditur Creditor	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jangka Waktu Penjaminan Guarantee Period	Maksimal 6 bulan Maximum of 6 months

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ("PT RNI") merupakan BUMN yang bergerak dalam sektor usaha Pertanian dan Agroindustri, Peternakan dan Perikanan, serta Perdagangan dan Logistik. PT RNI berperan besar dalam upaya menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Program penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang merupakan program strategis pemerintah untuk mencapai tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama PT RNI Nomor 30/TS.03.03/K/2/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal Penugasan BUMN Pangan, yang turut melampirkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Kepala Badan Pangan Nasional Nomor SR-59/MBU/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Persetujuan Penugasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ("CPP") Tahun 2023, PT RNI memperoleh penugasan dari pemerintah untuk menyelenggarakan program CPP untuk 9 (sembilan) komoditas.

Guna menunjang penyelenggaraan CPP untuk menjaga stock dalam rangka stabilitas harga, PT RNI membutuhkan fasilitas kredit perbankan. Oleh sebab itu, PT RNI mengajukan permohonan pembiayaan fasilitas pinjaman dengan jaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2023 ("PMK 34/2023") dengan kreditur yaitu sindikasi Bank Himbara (Bank Mandiri, BNI dan BRI). Fasilitas kredit dari Bank Himbara sebesar Rp1,5 triliun akan digunakan untuk pendanaan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan CPP Tahun 2023, yaitu berupa pengadaan 3 (tiga) komoditas PT RNI dengan mekanisme perputaran usaha dan modal kerja yang ada. Adapun pengadaan 3 (tiga) komoditas CPP dengan detail sesuai Permohonan Jaminan adalah sebagai berikut: (i) Daging Ruminansia 6.520 Ton; (ii) Gula Konsumsi 144.500 Ton; dan (iii) Minyak Goreng 28.500 ton. Pada tanggal 3 Oktober 2023, PT RNI dan pihak Kreditur menandatangani Perjanjian Kredit, selanjutnya Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan antara PT PII dan PT RNI ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2023 yang selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 diterbitkan Surat Jaminan Pemerintah atas penjaminan pinjaman dalam rangka CPP.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ("PT RNI") is an SOE engaged in the Agriculture and Agro-Industry, Livestock and Fisheries, as well as Trade and Logistics sectors. PT RNI plays a major role in efforts to maintain national food security and sovereignty. The Government Food Reserve (CPP) program is a strategic government program to achieve the national food security and sovereignty. Based on the Letter from the Head of the National Food Agency to the President Director of PT RNI No. 30/TS.03.03/K/2/2023 dated 1 February 2023 on the Assignment of State-Owned Food Enterprises, attaching the Letter from the Minister of State-Owned Enterprises to the Head of the National Food Agency No. SR-59 /MBU/01/2023 dated 31 January 2023 on the Approval of the Assignment for the Implementation of Government Food Reserves ("CPP") in 2023, PT RNI received an assignment from the government to organize the CPP for nine (9) commodities.

To support the CPP implementation to maintain stock for price stability, PT RNI requires banking credit facilities. Therefore, PT RNI submitted a request for financing facility with a sovereign guarantee based on Minister of Finance Regulation No. 34/2023 with the creditors, i.e., Bank Himbara syndicate (Bank Mandiri, BNI, and BRI). Bank Himbara provided credit amounted to Rp1.5 trillion that will be used to fund the 2023 CPP assignment, i.e., in the form of procurement of three (3) PT RNI commodities with existing business turnover and working capital mechanisms. The procurement of three (3) CPP commodities under the Guarantee Request is detailed as follows: (i) Ruminant Meat of 6,520 Tons; (ii) Sugar for Consumption of 144,500 Tons; and (iii) Cooking Oil of 28,500 tons. On 3 October 2023, PT RNI and the Creditors signed a Credit Agreement. On 18 October 2023, the Guarantee Implementation Agreement between IIGF and PT RNI was signed. On 19 October 2023, a sovereign Guarantee Letter was issued for the loan guarantee within the framework of CPP.



Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project Preparation and Transaction Advisory Business Segment

Dengan pengalaman lebih dari 13 tahun, PT PII telah menjalankan peran serta usaha terbaiknya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU. Perkembangan dan pertumbuhan industri infrastruktur di Indonesia menuntut PT PII untuk terus adaptif terhadap kemajuan zaman dan berinovasi serta berkembang dalam menjalankan perannya demi mencapai hasil yang optimal serta pemerataan infrastruktur di Indonesia.

With more than 13 years of experience, IIGF has carried out its best role and endeavors in infrastructure development in Indonesia via Sovereign Guarantees provided for infrastructure projects in the PPP scheme. The development and growth of the infrastructure industry in Indonesia requires IIGF to continue to adapt to the times and innovate and develop to perform its role to achieve optimal results and equitable distribution of infrastructure in Indonesia.

Kegiatan Operasi dan Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Operations and Business Activities for PPP Project Preparation and Transaction Advisory

Pada tahun 2018, PT PII mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kegiatan usaha di samping memberikan jaminan pada proyek infrastruktur, yaitu dengan terlibat dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 180 tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan peraturan tersebut, PT PII mulai menjalankan segmen usaha baru, yakni Penyiapan dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU atau yang dikenal dengan *Project Development Facility* (PDF). Kegiatan PDF sejalan dengan rencana arah pengembangan Perseroan tahun 2018–2022 dan memungkinkan PT PII terlibat secara menyeluruh di dalam proses penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU. Proyek infrastruktur KPBU yang dapat menerima fasilitas PDF meliputi proyek KPBU Prioritas, Proyek KPBU Kilang Minyak, dan/atau Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan PDF dimaksud, PT PII telah menyiapkan struktur yang berorientasi pada Proyek serta menjaga independensi pengambilan keputusan di masing-masing fungsi (*Segregation of Function*) melalui pembentukan Divisi Inisiasi Bisnis yang didukung oleh dua hal, yaitu: Pengawasan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan penugasan tersebut dengan bekal pengalaman Proyek Infrastruktur selama PT PII beroperasi; dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam pengelolaan transaksi.

Melalui kegiatan PDF, PT PII terlibat dalam memberikan pendampingan kepada PJPk sejak tahap penyiapan dengan menyusun kajian prastudi kelayakan dan dokumen lelang sebelum proyek dilaksanakan. Di sisi transaksi, PT PII terus mendampingi PJPk mulai dari persiapan transaksi hingga tercapainya tahap pemenuhan pembiayaan (*financial close*). Keterlibatan PT PII sejak awal dan *secara end-to-end* diharapkan dapat turut memastikan aspek *bankability* dan *feasibility* proyek sehingga meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan.

In 2018, IIGF had the opportunity to conduct business activities in addition to providing guarantees for infrastructure projects, i.e., by being involved in project preparation and transaction advisory. This is in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 180 of 2020 on the PPP Project Preparation and Transaction Advisory for in Infrastructure Provision. Pursuant to the regulation, IIGF began running a new business segment, i.e., PPP Project Preparation and Transaction Advisory or known as Project Development Facility (PDF). PDF activities are in line with the Company's development plans for 2018–2022 and enable IIGF to be thoroughly involved in the process of providing infrastructure via the PPP scheme. PPP infrastructure projects that can receive PDF facilities include Priority PPP projects, Oil Refinery PPP Projects, and/or other PPP Projects that meet the criteria as stipulated in the regulation. In implementing the PDF, IIGF has prepared a Project-oriented structure and maintained the independence of decision making in each function (*Segregation of Function*) through the establishment of Business Initiation Division, which is supported by two matters: Competent human resources supervision to carry out the assignments based on Infrastructure Project during IIGF's operations; and Good Corporate Governance infrastructure in transaction managements.

Through PDF activities, IIGF is involved in providing assistance to GCA. The preparation stage begin by preparing pre-feasibility studies and tender documents before the project is implemented. In terms of transactions, IIGF accompanies GCA from the preparation of transaction preparation up to the financial close phase. IIGF's involvement from the start and end-to-end is expected to help ensure the bankability and feasibility aspects of the project thereby increasing the certainty of successful transactions with investors, which will lead to certainty of quality and sustainable infrastructure development.



Pelaksanaan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project Development Facility Implementation

Pada tahun 2023, PT PII melaksanakan penugasan untuk 12 Proyek KPBU PDF, namun terdapat 3 proyek yang penugasannya berakhir di pertengahan tahun 2023 sehingga jumlah proyek PDF efektif sampai dengan bulan Desember 2023 sebanyak 9 (sembilan) proyek.

In 2023, IIGF carried out 12 PDF assignments. However, there were 3 projects which ended in mid-2023, thereby the number of effective PDF projects as of December 2023 was nine (9) projects.

Pembangunan Proyek *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi Construction of the Bekasi BPLJSKB Proving Ground

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 1988, Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan pelaksana uji tipe kendaraan bermotor.

In accordance with the Minister of Transportation Decree No. 7 of 1988, the Roadworthiness Testing & Motor Vehicle Certification Center, which is under the Directorate General of Land Transportation is the implementor of motor vehicle tests.

BPLJSKB sudah memiliki sejumlah fasilitas peralatan uji *modern* dengan total 15 unit peralatan uji yang telah diakui dan mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Namun demikian, BPLJSKB belum mempunyai fasilitas *outdoor test* yaitu *proving ground* yang mengacu kepada standard ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (ASEAN MRA) yang mengadopsi sebagian standar *United Nation Regulation* (UNR) sebagai standar yang diakui secara regional/global.

BPLJSKB already has a number of modern test equipment facilities with a total of 15 test equipment units that are recognized and have received accreditation from the National Accreditation Committee. However, BPLJSKB does not yet have an outdoor test facility, i.e., proving ground, which refers to the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (ASEAN MRA) standard, which adopts some of the United Nation Regulation (UNR) standards that are locally/globally recognized

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berencana untuk mengadakan Kawasan *Proving Ground* Bekasi melalui skema KPBU untuk mendapatkan hasil pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan mengacu kepada standar internasional hingga dapat meningkatkan keselamatan berkendara guna meminimalkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor ketidaklaikan kendaraan bermotor dan dapat mengurangi emisi yang disebabkan oleh polusi dari kendaraan bermotor. Skema KPBU dinilai tepat dengan melibatkan partisipasi Badan Usaha dalam pembangunan, pengadaan, perawatan fasilitas dan peralatan pengujian tipe kendaraan.

To fulfill these requirements, the Directorate General of Land Transportation plans to organize the Bekasi Proving Ground Area via a PPP scheme to obtain more accurate motor vehicle type test results and refer to international standards to improve driving safety in order to minimize the number of accidents caused by motor vehicle unfitness factors and reduce emissions caused by pollution from motorized vehicles. The PPP scheme is considered appropriate by involving the participation of Business Entities in the construction, procurement, maintenance of vehicle type testing facilities and equipment.

Untuk ke depannya, fasilitas yang dimiliki oleh BPLJSKB akan semakin lengkap dengan adanya fasilitas uji kendaraan bermotor dalam ruangan (*indoor test*) maupun di luar ruangan (*outdoor test*).

In the future, BPLJSKB will have more comprehensive facilities with indoor and outdoor motor vehicle testing facilities.



Informasi Proyek Project Information

PJPK GCA	Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Director General of Land Transportation, Ministry of Transportation
Lokasi Proyek Project Location	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Bekasi Regency, West Java
Skema Proyek Project Scheme	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	- Merancang dan pembangunan Fasilitas Pengujian dan Fasilitas Penunjang; - Pengadaan Peralatan Pengujian dan Fasilitas Penunjang; - Pemeliharaan Fasilitas; dan - Peningkatan kapasitas (pelatihan) - Design and construction of Testing Facilities and Supporting Facilities; - Procurement of Testing Equipment and Supporting Facilities; - Facility Maintenance; and - Capacity building (training)
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	Availability Payment
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp1,98 triliun Rp1.98 trillion
Masa Kerja Sama Collaboration Period	17 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 17 years (including 2 years construction)
Tahapan Phase	Penugasan berakhir di Tahap Transaksi (tercapainya <i>Financial Close</i>) The assignment ended at the Transaction Stage (achievement of Financial Close)

Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Penugasan pada tanggal 19 Juli 2019, PT PII secara resmi ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi. Telah dilakukan penandatanganan perjanjian KPBU pada tanggal 31 Oktober 2022 antara Kementerian Perhubungan RI dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground sebagai BUP, kemudian status penugasan Proyek saat ini adalah telah berakhir sejak tanggal 27 Maret 2023 sehubungan dengan telah tercapainya perolehan pembiayaan (*Financial Close*).

Since the issuance of the Minister of Finance Decree (KMK) on Assignment on 19 July 2019, IIGF was officially assigned by the Ministry of Finance to provide Assistance in the Project Preparation and Transaction Advisory of BPLJSKB Bekasi Proving Ground PPP Project. PPP agreement was signed on 31 October 2022 between the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia and PT Indonesia International Automotive Proving Ground as the SPV. The Project assigned has ended on 27 March 2023 when it reached Financial Close.

Pembangunan Bandar Udara Singkawang Construction of Singkawang Airport

Berada di Provinsi Kalimantan Barat (kurang lebih 153 km dari Ibukota Provinsi, Kota Pontianak), Kota Singkawang memiliki masyarakat yang beragam dan harmonis yang berkontribusi terhadap keunikan Singkawang. Hal ini yang menjadikannya sebagai tujuan wisata budaya dan religi yang potensial. Selain itu, Kota Singkawang juga memiliki berbagai peluang investasi antara lain seperti industri 4.0, logistik (hub), depo gas, pertanian dan budidaya perairan (akuakultur) hingga kawasan hunian.

Located in West Kalimantan Province (approximately 153 km from the provincial capital, Pontianak), Singkawang City has a diverse and harmonious society that contributes to Singkawang's uniqueness. This is what makes Singkawang a potential cultural and religious tourism destination. In addition, Singkawang City also has various investment opportunities, including industry 4.0, logistics (hub), gas depot, agriculture, aquaculture, and residential areas.

Proyek Bandara Singkawang merupakan salah satu proyek nasional yang direncanakan dengan menggunakan skema KPBU sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 ("Permenhub No. 80/2020") dan termasuk dalam Program Prioritas Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

The Singkawang Airport Project is one of the national projects planned using a PPP scheme in accordance with Minister of Transportation Regulation No. PM.80 of 2020 on the 2020-2024 on the Strategic Plan of the Ministry of Transportation ("Ministry of Transportation Regulation No. 80/2020"), and is included in the 2018-2022 Singkawang City Priority Program.



Rencana lokasi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Singkawang sudah tercakup pada Rencana Induk Nasional Bandar Udara dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2019 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional, di mana Proyek dikategorikan sebagai Bandar Udara Pengumpan dengan Klasifikasi 4C dan penggunaan sebagai bandar udara domestik.

The location, utilization, hierarchy, and classification of Singkawang Airport are included in the National Airport Master Plan in the Minister of Transportation Decree No. 166 of 2019 on the National Airport Order, where the Project is categorized as a Feeder Airport with 4C Classification and used as a domestic airport.

Informasi Proyek Project Information

PJPK GCA	Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Director General of Civil Aviation, Ministry of Transportation
Lokasi Proyek Project Location	Kota Singkawang, Kalimantan Barat Singkawang City, West Kalimantan
Skema Proyek Project Scheme	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	• Menyusun DED untuk seluruh fasilitas dalam lingkup KPBU; • Membangun fasilitas lingkup KPBU untuk sisi udara, darat, termasuk fasilitas pendukung; • Membiayai seluruh dana yang diperlukan terkait pekerjaan yang dilakukan; • Mengoperasikan fasilitas bandara; • Pemeliharaan aset infrastruktur; • Serah terima seluruh aset kepada PJPK di akhir masa konsesi. • Preparing DED for all facilities within the PPP scope; • Constructing PPP facilities for the air and land side, including supporting facilities; • Financing all necessary funds related to the work carried out; • Operating airport facilities; • Maintenance of infrastructure assets; • Handover of all assets to the GCA at the end of the concession period.
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	User Charge
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp841 miliar Rp841 billion
Masa Kerja Sama Collaboration Period	32 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 32 years (including 2 years construction)
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Finalization of Pre-Feasibility Study Final Report)

Mempertimbangkan hasil realisasi atas instrumentasi pendanaan dan pembiayaan yang komprehensif pada Proyek, maka Bandara Singkawang merupakan proyek *brownfield* dengan penyediaan infrastruktur yang diistilahkan sebagai *blended finance* atau bauran pembiayaan yang terdiri atas APBN, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Pemberi Hibah. Dengan demikian, keberadaan Bandara Singkawang ini diharapkan mampu mendukung konektivitas dan mengakomodasi kebutuhan transportasi antardaerah dalam jangka waktu panjang yang turut berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Considering the realization of the comprehensive funding and financing instrumentation for the Project, Singkawang Airport is a brownfield project with infrastructure provision which is termed as blended finance, consisting of State Budget, Government Islamic Securities (SBSN), and Corporate Social Responsibility (CSR) from the Grantor. Thus, the existence of Singkawang Airport shall support connectivity and accommodate inter-regional transportation needs in the long-term, which will contribute to accelerating economic growth.

Pada tanggal 31 Januari 2020, PJPK mengajukan permohonan fasilitas PDF kepada Menteri Keuangan yang kemudian disetujui pada tanggal 6 September 2020 melalui surat Menteri Keuangan perihal persetujuan atas permohonan fasilitas PDF untuk Proyek. Menteri Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada 13 Januari 2021. Selanjutnya, keputusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan PDF proyek oleh PT PII.

On 31 January 2020, GCA submitted a request for PDF to the Minister of Finance, which was then approved on 6 September 2020 via a letter from the Minister of Finance regarding the approval of the PDF request for the Project. The Minister of Finance issued a KMK on the special assignments to IIGF as the appointed SOE on 13 January 2021. Further, this decision became the basis for IIGF in implementing the PDF.



Pembangunan SPAM Regional Wosusokas Tahap II

Construction of Wosusokas Regional SPAM

Sebagai salah satu target pembangunan untuk wilayah Jawa Tengah, pembangunan SPAM Regional Wosusokas merupakan upaya pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam hal penyediaan air bersih bagi masyarakat. SPAM Regional Wosusokas sendiri terbagi ke dalam 2 (dua) tahapan, di mana Tahap I dibangun melalui APBN *Loan* dan Tahap II direncanakan melalui skema KPBU. Proyek SPAM Wosusokas Tahap II rencananya akan memiliki kapasitas debit air sebesar 700 l/det dan *clear well* 2.500 m³ dengan rencana wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta.

As one of the development targets for the Central Java region, the construction of the Wosusokas Regional SPAM is an effort to fulfill the Government's obligations in terms of providing clean water for the community. Wosusokas Regional SPAM is divided into two (2) phases. Phase I was constructed by using State Budget Loan, and Phase II would be constructed via PPP scheme. Phase II of Wosusokas Regional SPAM project is planned to have a water discharge capacity of 700 l/sec and a clear well of 2,500 m³, with a planned service area covering Sukoharjo Regency and Surakarta City.

Informasi Proyek

Project Information

PJPK GCA	PT Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah (Perseroda)
Lokasi Proyek Project Location	Kab. Sukoharjo dan Kota Surakarta, Jawa Tengah Sukoharjo Regency and Surakarta City, Central Java
Skema Proyek Project Scheme	<i>Build-Operate-Transfer</i> (BOT) – <i>User Tariff</i>
Lingkup KPBU PPP Scope	- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air dengan kapasitas 700 l/det. - Pembangunan <i>clear well</i> 2.500 m³. - Pembangunan Jaringan Pipa Utama dan Jembatan Pipa. - Construction of a Water Treatment Plant with a capacity of 700 l/sec. - Construction of a 2,500 m³ clear well. - Construction of Main Pipe Networks and Pipe Bridges.
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	<i>User Tariff</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp1,2 triliun Rp1.2 trillion
Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 20 years (including 2 years construction)
Wilayah Pelayanan Service Area	Kab. Sukoharjo (200 l/det) Sukoharjo Regency (200 l/sec) Kota Surakarta (500 l/det) Surakarta City (500 l/sec)
Tahapan Phase	Penugasan PDF telah berakhir di tahap Penyiapan The PDF assignment ended in the Preparation phase

Dengan terdaptarnya Proyek KPBU SPAM Regional Wosusokas Tahap II dalam Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019 ("PP 79/2019") tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Provinsi Jawa Tengah, maka prioritas kebutuhan akan Proyek dapat segera dilaksanakan. Saat ini, proyek ini termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional dimana proyek/program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha tersebut bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pada tanggal 22 September 2020, Kementerian Keuangan menyetujui Permohonan fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK ke Kementerian Keuangan tanggal 30 Juli 2020. Pelaksanaan PDF Proyek oleh PT PII didasari atas terbitnya KMK penugasan khusus kepada PT PII pada 27 Mei 2021. Adapun penugasan PDF telah berakhir di tahap penyiapan Proyek pada pertengahan tahun 2023 ini.

By registering Wosusokas Regional SPAM Project Phase II under Presidential Regulation No. 79 of 2019 regarding the Acceleration of Regional Economic Development in Central Java Province, the project's priority needs can be promptly implemented. Currently, this project is included in the National Strategic Project category, where the project/program implemented by the Government, Local Government, and/or business entity is strategic in nature to increase growth and equitable development with the objective to enhance community welfare and regional development. On 22 September 2020, the Ministry of Finance approved the PDF Request for the Project in response to the PDF request letter submitted by the GCA to the Ministry of Finance on 30 July 2020. The PDF assignment to IIGF was based on the issuance of KMK on 27 May 2021. The PDF ended at the Project preparation stage in mid-2023.

Pembangunan Rusunawa Cisaranten

Construction of the Cisaranten Flats

Sehubungan dengan kebutuhan penduduk yang terus bertambah dan untuk menutupi *backlog* perumahan, Pemerintah berupaya menyediakan perumahan yang lebih baik bagi warga Bandung. Rencana tersebut direalisasikan melalui proyek Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung ("Rusunawa Cisaranten") dimana pembangunannya direncanakan melalui skema KPBU.

In connection with the growing population needs and to cover the housing backlog, the Government is trying to provide better housing for Bandung residents. This plan was realized through the Bandung Cisaranten Bina Harapan Flats project ("Rusunawa Cisaranten"), in which the construction was planned by using a PPP scheme.

Terdapat 454 kawasan kumuh yang tersebar di 30 kecamatan dan ada *backlog* perumahan sebanyak 416.072 unit rumah pada 2019 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada permintaan yang tinggi untuk perumahan umum di kota Bandung. Hal ini ditunjang juga dengan adanya daftar pemohon untuk Rusun MBR di kota Bandung yang disebutkan mencapai lebih kurang 3000 KK dan yang sudah diserahkan ke PJPk sebesar 324 KK (229KK di Ujung Berung dan 95 di Cingised).

There are 454 slum areas spread across 30 sub-districts and a housing backlog of 416,072 housing units in 2019. Therefore, there is high demand for public housing in Bandung. This is also supported by the list of applicants for MBR flats in Bandung, which have reached approximately 3,000 families, and of which, 324 families have been submitted to the GCA (229 families in Ujung Berung and 95 in Cingised).

Informasi Proyek

Project Information

PJPK GCA	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ("PUPR") Minister of Public Works and Housing ("PUPR")
Lokasi Proyek Project Location	Kelurahan Cisaranten Bina Harapan, Kota Bandung, Jawa Barat Cisaranten Bina Harapan Village, Bandung City, West Java
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	• Penyusunan <i>basic design</i> Rusun 5 tower • Pembangunan Rusun, Fasum, dan Fasos pendukung • Pembiayaan • Pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Rusun dan Fasum dan Fasos • Serah terima seluruh aset kepada PJPK di akhir masa konsesi. • Preparation of basic design for 5 tower flats • Construction of Flats, Public Facilities, and supporting Social Facilities • Financing • Operation and maintenance of Flats, Public Facilities, and Social Facilities buildings • Handover of all assets to the GCA at the end of the concession period.
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	<i>Availability Payment</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp 656,2 miliar Rp656.2 billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	6 tahun 9 bulan – termasuk 6 bulan prakonstruksi, 15 bulan konstruksi dan 5 tahun operasi 6 years 9 months – including 6 months of pre-construction, 15 months of construction, and 5 years of operation
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Finalization of Pre-Feasibility Study Final Report)

Pada tanggal 5 Juli 2021, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJKP kepada Kementerian Keuangan tanggal 30 Maret 2021. Pada tanggal 23 September 2021 Kementerian Keuangan dan PJKP menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada tanggal 19 Oktober 2021. Status penugasan Proyek saat ini adalah finalisasi Laporan Akhir Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.

On 5 July 2021, the Ministry of Finance approved the Request for PDF for the Project in response to the PDF request letter submitted by the GCA to the Ministry of Finance on 30 March 2021. On 23 September 2021, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement. Afterwards, the Ministry of Finance issued a KMK on a special assignment to IIGF as the SOE implementing the assignment on 19 October 2021. The current status of the Project assignment is the finalization of the Pre-Feasibility Study Final Report.



Pembangunan Rusunawa di KEK Sei Mangkei

Construction of Rusunawa in Sei Mangkei SEZ

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana untuk membangun rumah susun guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal untuk para pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan masyarakat yang akan direlokasi akibat adanya program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara atau bencana di Kabupaten Simalungun. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk merespon kebutuhan hunian tersebut adalah dengan melakukan pembangunan Rusunawa di KEK Sei Mangkei melalui skema KPBU.

The North Sumatra Provincial Government plans to build flats to meet the housing needs of workers in the Sei Mangkei Special Economic Zone (SEZ) and people who will be relocated due to the North Sumatra Provincial Government program or the disaster in Simalungun Regency. The North Sumatra Provincial Government responded to this housing need by constructing Rusunawa in the Sei Mangkei SEZ via a PPP scheme.

Informasi Proyek

Project Information

PJPK GCA	Gubernur Sumatera Utara Governor of North Sumatra
Lokasi Proyek Project Location	Kab. Simalungun, Sumatera Utara Simalungun Regency, North Sumatra
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)</i>
Lingkup KPBU Lingkup K PPP Scope PBU	• Penyusunan <i>detail design</i>, pembiayaan, dan pembangunan Rusunawa, Fasum dan Fasos pendukung; • Pengoperasian bangunan Rusunawa; • Pengoperasian Fasum dan Fasos; dan • Pemeliharaan bangunan Rusunawa, Fasum dan Fasos, dan jalan akses di dalam kawasan • Preparation of detailed design, financing and construction of Rusunawa, Public Facilities, and supporting Social Facilities; • Operation of Rusunawa buildings; • Operation of Public Facilities and Social Facilities; and • Maintenance of Rusunawa, Public and Social Facilities buildings, and access roads within the area
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	<i>Availability Payment</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Maksimal Rp523 miliar Maximum of Rp523 billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	17 tahun (termasuk 2 tahun konstruksi) 17 years (including 2 years construction)
Tahapan Phase	Penugasan telah berakhir di Tahap Penyiapan Proyek The assignment ended in the Preparation phase

Pada tanggal 23 Maret 2021, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang sebelumnya telah dikirimkan oleh PJPK kepada Kementerian Keuangan tanggal 2 Juli 2021. Pada tanggal 22 Oktober 2021 Kemenkeu dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada tanggal 26 November 2021. Status penugasan Proyek saat ini adalah telah berakhir sejak tanggal 24 Agustus 2023 sehubungan Surat Pengakhiran Fasilitas yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada Gubernur Sumatera Utara.

On 23 March 2021, the Ministry of Finance approved the Request for PDF for the Project in response to the PDF request letter submitted by the GCA to the Ministry of Finance on 2 July 2021. On 22 October 2021, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement. Afterwards, the Ministry of Finance issued a KMK on a special assignment to IIGF as the SOE implementing the assignment on 26 November 2021. The assignment ended on 24 August 2023, in connection with the Facility Termination Letter submitted by the Ministry of Finance to the Governor of North Sumatra.



Pembangunan TPAS Regional Piyungan

Construction of the Piyungan Regional Landfill

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PJPK) saat ini sedang mempersiapkan Proyek Pengembangan TPAS Regional Piyungan di lahan baru ($\pm 5,8$ ha) yang akan diadakan melalui skema KPBU dengan mempertimbangkan saat ini TPA eksisting (± 10 ha) yang sudah penuh dan telah ditutup pada tahun 2022, selain itu TPA Transisi (± 2 ha) yang dibangun tahun 2022 diproyeksikan hanya akan dapat digunakan hingga tahun 2025.

Proyek akan berupaya untuk mencapai tujuan berikut:

- Menyediakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan praktik terbaik internasional.
- Melibatkan pembiayaan swasta untuk investasi modal untuk pembiayaan Proyek mengingat kapasitas fiskal PJPK yang terbatas.
- Membawa pengalaman teknologi dan manajemen internasional ke dalam Proyek dan melakukan transfer pengalaman teknologi dan manajemen internasional ke dalam perekonomian Indonesia.
- Meningkatkan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
- Meningkatkan penanganan sampah residual yang membutuhkan penimbunan dengan kualitas yang dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:
 - Mengurangi volume lindi tambahan yang harus diolah.
 - Mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
 - Mengurangi potensi adanya agen penularan penyakit.
 - Mengurangi masalah gangguan bau yang dapat mengganggu warga dan menurunkan nilai tanah.

The Government of Special Region of Yogyakarta (CGA) is currently preparing the Piyungan Regional Landfill Development on new land (± 5.8 ha) which will be implemented via a PPP scheme, with due regards to the current existing landfill (± 10 ha) which is already full and will be closed in 2022. In addition, the Transitional TPA (± 2 ha) which was built in 2022 is forecasted to be able to operate until 2025.

The project strives to achieve the following objectives:

- Providing sustainable waste management using environmentally friendly waste processing technology in accordance with existing regulations in Indonesia and international best practices.
- Involving private financing for capital investment to finance the project considering the limited fiscal capacity of the GCA.
- Providing international technology and management experience into the Project and transferring international technology and management experience into the Indonesian economy.
- Increasing socio-economic and environmental benefits for local communities.
- Improving the handling of residual waste that requires quality landfilling that can produce the following benefits:
 - Reducing the volume of additional leachate that must be processed.
 - Reducing greenhouse gas (GHG) emissions.
 - Reducing the potential for disease transmission agents.
 - Reducing the problem of odor which can disturb residents and reduce land values.

Informasi Proyek

Project Information

PJPK GCA	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Governor of the Special Region of Yogyakarta
Lokasi Proyek Project Location	Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Sitimulyo Village, Piyungan Sub-District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta
Skema Proyek Project Scheme	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	- Melakukan desain, pembiayaan, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan infrastruktur penunjang; dan - Pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah dan infrastruktur penunjang - Carrying out design, financing, and construction of waste processing facilities and supporting infrastructure; and - Operation and maintenance of waste processing facilities and supporting infrastructure
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	Tipping Fee
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp370,6 miliar Rp370.6 billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun (1,5 tahun masa konstruksi dan 18,5 tahun masa operasi) 20 years (1.5 years of construction period and 18.5 years of operation period)
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek Project Preparation



Pada tanggal 12 Juli 2021, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang telah dikirimkan oleh PJPK. Pada tanggal 29 November 2021 Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana penugasan pada tanggal 16 Desember 2021. Saat ini proyek dalam proses penyusunan kajian kapasitas pengelolaan sampah Kabupaten/ Kota di Wilayah Kartamantul sebagai dampak dari arahan Desentralisasi Pengelolaan Sampah yang diterbitkan oleh Gubernur DIY.

Pembangunan Jaringan Gas Kota Batam Batam City Gas Network Development

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di Indonesia bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan bauran energi gas bumi hingga 33% di Tahun 2025, Upaya ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah dalam membangun kedaulatan dan kemandirian di bidang energi yang secara bertahap berdampak terhadap berkurangnya subsidi Pemerintah yang bersumber dari APBN, mewujudkan ketahanan energi nasional serta mendukung program diversifikasi energi dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dengan pengalihan penggunaan LPG tabung 3 kg, 12 kg, dan 50 kg.

Dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2019, jumlah konsumsi LPG bersubsidi di Kota Batam terus meningkat dari 28,991 MT hingga mencapai 36,412 MT atau meningkat sekitar 5,0% per tahun. Hal ini berdampak terhadap subsidi LPG dari Pemerintah yang turut meningkat dari Rp139 miliar di tahun 2015 menjadi Rp201,6 miliar di tahun 2019 atau sekitar 9,6% per tahun. Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi pengembangan jaringan gas rumah tangga di Kota Batam dengan menggunakan sumber daya nasional dan sekaligus berperan sebagai substitusi besaran subsidi yang diberikan Pemerintah. Oleh karena itu, rencana pengembangan jaringan gas rumah tangga di Kota Batam melalui skema KPBU merupakan salah satu *alternative* skema yang dapat dipertimbangkan.

Informasi Proyek Project Information

PJPK GCA	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources
Lokasi Proyek Project Location	Kota Batam Kota Batam
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Development of Natural Gas Distribution Network Infrastructure for Households
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	<i>User Charge</i>

On 12 July 2021, the Ministry of Finance approved the Request for PDF for the Project in response to the PDF request letter submitted by the GCA. On 29 November 2021, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement. Afterwards, the Ministry of Finance issued a KMK on a special assignment to IIGF as the SOE implementing the assignment on 16 December 2021. Currently, the project is in the process of feasibility study by the Regency/City on waste management capacity in the Kartamantul Region as a result of the Decentralization of Waste Management directive issued by the Governor of DIY.

The construction of a natural gas network for households in Indonesia aims to support the government's program to realize a natural gas energy mix of up to 33% in 2025. This effort is also a form of support for the Government's policy in establishing sovereignty and independence in the energy sector, which is gradually having an impact on reducing Government subsidies sourced from the State Budget, realizing national energy security, and supporting the energy diversification program in reducing dependence on LPG imports, by switching to the use of 3 kg, 12 kg, and 50 kg LPG cylinders.

In 2015 up to 2019, the amount of subsidized LPG consumption in Batam City increased from 28,991 MT to 36,412 MT, or increased by around 5.0% per year. This has an impact on LPG subsidies from the Government, which also increased from Rp139 billion in 2015 to Rp201.6 billion in 2019, or around 9.6% per year. Based on this data, there is potential for developing a household gas network in Batam City using national resources and at the same time acting as a substitute for the subsidies provided by the Government. Therefore, the alternative is to develop a household gas network in Batam City via a PPP scheme.



Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp2,98 triliun Rp2.98 trillion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	30 tahun 30 years
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Laporan Prastudi Kelayakan) Project Preparation (Business Case)

Pada tanggal 7 September 2021, Persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Batam telah diberikan sebagai respon atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek yang sebelumnya dikirimkan pada tanggal 9 Juni 2021.

On 7 September 2021, the Request for Project Development Facility of PPP Project for the Construction of the Gas Distribution Network for Batam City Households was approved, as a response to the Request for Project Development Facility which was previously submitted on 9 June 2021.

PT PII telah mengirimkan Kajian Kesiapan PT PII dalam melaksanakan penugasan PDF untuk kedua kota, Batam dan Palembang. Kajian tersebut memuat pemahaman mengenai kebutuhan Proyek, rencana pengembangan kajian di bidang hukum, teknis, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, risiko, dukungan dan rencana tindak lanjut. Selain itu, PT PII juga menyampaikan rencana pengelolaan sumber daya untuk mendukung penugasan tersebut terkait rencana waktu, sumber daya manusia, dan kebutuhan sinkronisasi proyek di 2 lokasi berbeda tersebut. Sebagai upaya meminimalisir kemungkinan hambatan terhadap progres proyek bagi PJPK, PT PII juga telah memasukkan kajian awal identifikasi kebutuhan regulasi. Pada tanggal 10 Juni 2022, Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan KMK mengenai penugasan khusus kepada PT PII selaku BUMN pelaksana Penugasan pada tanggal 15 Juli 2022. KMK menyatakan bahwa proyek jaringan gas Batam diharapkan bisa menyelesaikan masalah regulasi terlebih dahulu sehingga diberikan periode 30 bulan untuk hanya menyelesaikan tahapan penyiapan PDF terlebih dahulu. Saat ini proyek sedang dalam penyusunan Laporan Prastudi Kelayakan (*Business Case*).

IIGF has sent a Feasibility Study of IIGF in carrying out PDF for the two cities, Batam and Palembang. The study contains an understanding of the Project's needs, plans for developing studies in the fields of law, technical, economic, environmental, institutional, risk, support, and follow-up plans. In addition, IIGF also submitted a resource management plan to support this assignment regarding time management, human resources, and project synchronization needs in 2 different locations. To minimize possible obstacles to project progress for GCA, IIGF has also included an initial study to identify regulatory needs. On 10 June 2022, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement. Afterwards, the Ministry of Finance issued a KMK regarding special assignments to IIGF as the implementing SOE on 15 July 2022. KMK stated that the Batam gas network project shall be able to resolve regulatory issues, so that a 30-month period is given to complete the PDF phase. Currently, the project is preparing for a Business Case.

Pembangunan Jaringan Gas Kota Palembang

Development of the Palembang City Gas Network

Sebagai Ibukota Sumatera Selatan, kota Palembang merupakan pusat perekonomian dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perkebunan kelapa sawit, karet, dan pulp. Keberadaan infrastruktur jaringan pipa gas bumi dan potensi pasar pengguna jaringan gas menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk membangun jaringan gas rumah tangga dengan skema KPBU di Kota Palembang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah telah memberikan persetujuan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga Kota Palembang pada tanggal 7 September 2021 yang merupakan respons dari Surat Permohonan Pengajuan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek bersamaan dengan kota Batam pada tanggal 9 Juni 2021.

As the capital of South Sumatra, the Palembang city is an economic center with abundant natural resources, such as oil and natural gas, coal, palm oil, rubber, and pulp plantations. The natural gas pipeline network infrastructure and the potential market for gas network users is the basis for the Government's consideration of establishing a household gas network using a PPP scheme in Palembang City. As previously explained, the Government has approved the Request for Project Development Facility of PPP Project for the Construction of a Gas Distribution Network for Households in the Palembang City on 7 September 2021, which was a response to the Letter of Request for Project Development Facility in conjunction with the city of Batam on 9 June 2021.



Informasi Proyek Project Information

PJPK GCA	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Directorate General of Oil and Gas
Lokasi Proyek Project Location	Kota Palembang Palembang
Skema Proyek Project Scheme	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Development of Natural Gas Distribution Network Infrastructure for Households
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	User Charge
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp3,21 triliun Rp3.21 trillion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	30 tahun 30 years
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Penyusunan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan) Project Preparation (Preparation of Assignment Agreement and Implementation Agreement)

Pada tanggal 10 Juni 2022, Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk bersamaan dengan proyek jaringan gas Batam. Namun dikarenakan proses kajian dan penyusunan regulasi nasional hanya dimasukkan dalam PDF jaringan gas Batam, jaringan gas Palembang mengalami penundaan dan akhirnya diberikan amandemen Kesepakatan Induk pada tanggal 3 November 2022 disusul dengan KMK pada 28 November 2022. Amandemen ini membuat jaringan gas Palembang memiliki periode 48 bulan untuk tahapan penyiapan dan transaksi. Proyek Palembang diharapkan dapat berjalan *parallel* namun tetap mengacu pada hasil penyusunan regulasi di proyek jaringan gas Batam. Saat ini proyek sedang dalam tahapan penyusunan Perjanjian Laporan Pendahuluan (*Inception Report*).

On 10 June 2022, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement in conjunction with the Batam gas network project. However, due to the process of reviewing and drafting national regulations, the only city included is Batam. Palembang gas network experienced delays. Finally, an Amendment to the Master Agreement on 3 November 2022 was issued, followed by KMK on 28 November 2022. The amendment means that Palembang gas network has a 48-month period for the project preparation and transaction advisory. The Palembang project is hoped to be carried out in parallel with Batam gas network project, with due regards to the the results of the preparation of regulations. Currently, the project is in the stages of preparing an Assignment Agreement with PDPPI and an Implementation Agreement with GCA.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Management of State-Owned Assets (BMN)

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadikan status Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara. Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut tidak lantas menjadikan Jakarta ditinggalkan begitu saja tetapi Jakarta harus mempunyai rencana besar yang dituangkan dalam Penyiapan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta sekaligus untuk mengantisipasi dampak tidak terutilisasinya gedung/bangunan pemerintahan/aset BMN pasca pemindahan IKN dan agar terjadi optimalisasi peningkatan nilai aset BMN yang pada akhirnya dampak tersebut kembali untuk peningkatan Jakarta.

The move of the capital city from Jakarta to Nusantara at North Penajam Paser Regency, East Kalimantan, which will make Jakarta no longer the capital city of the country. The relocation of the State Capital does not mean that Jakarta is simply abandoned, but Jakarta must have an extensive plan outlined in the Preparation of the Grand Design Study for the City of Jakarta. This is also to anticipate the impact of non-utilization of government buildings/state assets after the transfer of IKN and to optimize the increase in BMN asset value that will impact on improving Jakarta.



Bahwa berdasarkan KMK Nomor 48/KM.8/2023 tentang Penugasan Khusus kepada PT PII untuk melaksanakan Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan BMN dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara, saat ini PT PII sedang melakukan Penyiapan Kajian *Grand Design* Kota Jakarta merupakan bagian atau tahap awal dari Fasilitas PDF tersebut.

Based on KMK No. 48/KM.8/2023 on the Special Assignment to IIGF to carry out Project Preparation and Transaction Advisory for the Use of State Property and/or Transfer of BMN for the Preparation, Development, and Relocation of the State Capital, PT PII is Preparing the Jakarta City Grand Design Study in its initial stage of the PDF Facility.

Informasi Proyek Project Information

PJPBMN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara Director General of State Assets Management
Lokasi Proyek Project Location	Jakarta
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	10 tahun 10 years
Tahapan Phase	Penyiapan Kajian <i>Grand Design</i> Kota Jakarta Preparation of the Grand Design Study for Jakarta City
Persetujuan Fasilitas Facility Approval	21 Februari 2023 February 21, 2023
KMK	24 Maret 2023 March 24, 2023
Perjanjian Penugasan Assignment Agreement	31 Mei 2023 May 31, 2023
Perjanjian Pelaksanaan Implementation Agreement	6 Juni 2023 June 6, 2023

SPAM Kabupaten Karo Karo Regency SPAM

Pemerintah Kabupaten Karo saat ini berupaya untuk meningkatkan penyediaan akses air minum untuk mengintegrasikan prioritas pembangunan infrastruktur air minum nasional. Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan capaian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ("RPJMD") Kabupaten Karo tahun 2022–2026 yaitu memperluas cakupan pelayanan SPAM dengan peningkatan maupun pembangunan baru serta pengelolaan aset secara efektif guna menurunkan tingkat kehilangan air hingga di bawah 25%. Sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan akses air minum yang selaras dengan prioritas pembangunan infrastruktur air minum nasional, saat ini Pemerintah Kabupaten Karo memiliki rencana untuk memperluas cakupan pelayanan SPAM melalui Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo.

Karo Regency Government is currently working to increase the provision of access to drinking water to integrate national drinking water infrastructure development priorities. The Karo Regency Government has determined the achievements contained in the 2022–2026 Karo Regency Medium–Term Development Plan ("RPJMD"), i.e., expanding the scope of SPAM services with improvements and new developments as well as effective asset management to reduce the level of water loss to below 25%. As an effort to increase the provision of drinking water access, in line with national drinking water infrastructure development priorities, the Karo Regency Government has plans to expand the SPAM services by means of Karo Regency SPAM PPP Project.



Informasi Proyek Project Information

PJPK GCA	Bupati Kabupaten Karo Regent of Karo
Lokasi Proyek Project Location	Kabupaten Karo Karo Regency
Skema Proyek Project Scheme	Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	• Optimalisasi Sistem Distribusi (minimum) • Optimalisasi Sistem Distribusi dan Perluasan Sistem Produksi (moderat) • Optimalisasi dan Peningkatan Sistem Produksi dan Distribusi (optimis) • Distribution System Optimization (minimum) • Distribution System Optimization and Production System Expansion (moderate) • Optimization and Improvement of Production and Distribution Systems (optimistic)
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	User Tariff
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp113,7 miliar Rp113,7 billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun 20 years
Tahapan Phase	Penyiapan Preparation

Pada tanggal 21 Februari 2023, Kementerian Keuangan menyetujui Fasilitas PDF untuk Proyek sebagai respons atas surat Permohonan PDF yang telah dikirimkan oleh PJPK. Pada tanggal 5 Juni 2023 Kementerian Keuangan dan PJPK menandatangani Kesepakatan Induk. Sejak diterbitkannya KMK Penugasan pada tanggal 19 Juni 2023, PT PII secara resmi ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kabupaten Karo. Selanjutnya, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penugasan antara Kementerian Keuangan dan PT PII pada tanggal 1 Agustus 2023 dan perjanjian pelaksanaan antara PT PII dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdair) Tirta Malem Kabupaten Karo selaku PJPK pada tanggal 2 Agustus 2023. Status proyek saat ini sedang dalam tahapan proses penyusunan Laporan Awal Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (FBC).

On 21 February 2023, the Ministry of Finance approved the Request for PDF for the Project in response to the PDF request letter submitted by the GCA. On 5 June 2023, the Ministry of Finance and GCA signed a Master Agreement. Since the issuance of the KMK on Assignment on 19 July 2023, IIGF was officially assigned by the Ministry of Finance to provide Assistance in the SPAM Karo Regency PPP Project. Further, an assignment agreement was signed between the Ministry of Finance and IIGF on 1 August 2023, and an implementation agreement between IIGF and the Tirta Malem Karo Regency Drinking Water Public Company (Perumdair) as GCA on 2 August 2023. The project is currently in the process of preparing the Preliminary Pre-Feasibility Study (FBC) Final Study Report.

Kapal Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) National Research and Innovation Agency (BRIN) Research Vessel

Pada tanggal 26 September Tahun 2017, *National Oceanic Research Consortium* (NORC), atau Konsorsium Riset Samudra Nasional dibentuk dengan tujuan agar kegiatan penelitian kelautan di Indonesia dapat menjadi satu kesatuan dan terkoordinasi dengan baik. Konsorsium riset tersebut beranggotakan 11 institusi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), dan beberapa Universitas. Konsorsium riset tersebut berkomitmen membangun kerjasama terkait program penelitian, pengembangan infrastruktur dan data kelautan. Untuk efisiensi dan efektivitas lembaga dan pembiayaan penelitian laut, kegiatan konsorsium riset dilakukan secara sinergis dan sistematis untuk menghasilkan program penelitian laut terpadu oleh semua pihak dengan mengaitkan interaksi antara laut dan atmosfer dengan dampak perubahan iklim. Oleh karenanya,

On 26 September 2017, the National Oceanic Research Consortium (NORC) was established with the objective to ensure that marine research activities in Indonesia can be united and well coordinated. The research consortium consists of 11 ministerial institutions, non-ministerial government institutions, and several universities. The research consortium is committed to establishing collaboration related to research programs, infrastructure development, and marine data. For the efficiency and effectiveness of marine research institutions and funding, research consortium activities are carried out synergistically and systematically to produce an integrated marine research program by all parties, by integrating the interaction between the ocean and the atmosphere with the impacts of climate change. Therefore, available resources must be well managed and well structured. The aforementioned



sumber daya yang tersedia harus dikelola dengan baik dan terstruktur. Sumber daya yang dimaksudkan termasuk dalam dua kategori utama: i) pusat data kelautan nasional sebagai tempat penyimpanan dan pertukaran data di sektor kelautan, dan ii) kapal penelitian yang baru dibangun atau kapal yang ada dan peralatan penelitian yang telah dimodernisasi. Konsorsium riset juga berkomitmen merumuskan *roadmap* penelitian kelautan berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional 2045 yang mencakup pengembangan sumber daya penelitian dan penguatan lembaga penelitian di sektor kelautan.

Untuk memenuhi kebutuhan riset tersebut, diperlukan modernisasi dan penambahan armada kapal dan fasilitas riset kelautan yang ada. Selain itu perlu adanya peningkatan dalam hal pengelolaan armada kapal dan kegiatan riset di bidang kelautan. Pemenuhan kebutuhan tersebut akan dilakukan dengan skema KPBU.

resources fall into two main categories: i) national marine data centers as a location for storing and exchanging data in the marine sector, and ii) newly built or existing research vessels and modernized research equipment. The research consortium is also committed to formulating a marine research roadmap based on the 2045 National Research Master Plan, which includes developing research resources and strengthening research institutions in the marine sector.

To fulfill these needs, modernization and additions to the existing fleet of ships and marine research facilities are required. In addition, there needs to be improvements in terms of ship fleet management and research activities in the maritime sector. The needs will be fulfilled by using a PPP scheme.

Informasi Proyek Project Information

PJPK GCA	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Head of the National Research and Innovation Agency
Lokasi Proyek Project Location	Sesuai wilayah operasi (<i>mobile</i>) di seluruh wilayah Indonesia In accordance with the operational areas (<i>mobile</i>) throughout Indonesia
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	1. Pembangunan dan pengelolaan kapal riset baru sebanyak 9 kapal, yaitu 5 unit Kapal Riset Litoral, 3 unit Kapal Riset Penjelajah Laut, dan 1 unit Kapal Riset Penjelajah Samudera; 2. Pengelolaan kapal riset Baruna Jaya I, III, VIII (kapal eksisting) dan IX (kapal baru yang pengadaannya masih berproses dengan skema PHLN); 3. Penyelenggaraan <i>Fleet Management Unit</i> ("FMU") sebagai suatu unit yang akan melaksanakan pengelolaan kapal riset baru ataupun eksisting; dan 4. Pengembangan bisnis riset industri pesisir, laut, dan samudera berbasis kapal riset dalam aspek membantu pemasaran yang dilakukan oleh BRIN 1. Construction and management of 9 new research vessels, i.e., 5 units of Littoral Research Vessels, 3 units of Sea Exploration Research Vessels, and 1 unit of Ocean Exploration Research Vessels; 2. Management of research vessels Baruna Jaya I, III, VIII (existing) and IX (new vessels) whose procurement is still in process under the PHLN scheme; 3. Fleet Management Unit ("FMU") as a unit that will manage new or existing research vessels; and 4. Development of the coastal, sea, and ocean research business based on research vessels in the aspect of helping marketing carried out by BRIN
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	<i>Availability Payment</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp 3,8 triliun Rp3.8 trillion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun 20 years
Tahapan Phase	Penyiapan Proyek (Penyusunan Laporan Insepsi Proyek) Project Preparation (Preparation of Inception Report)

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Kementerian Keuangan dan PJPK bersama-sama menandatangani Kesepakatan Induk Proyek Kapal Riset BRIN. KMK Penugasan kepada PT PII diperoleh pada tanggal 31 Agustus 2023 yang kemudian dilakukan penandatanganan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan pada tanggal 28 Desember 2023.

On 29 August 2023, the Ministry of Finance and GCA jointly signed the BRIN Research Vessel Project Master Agreement. The KMK Assignment to IIGF was obtained on 31 August 2023, followed by the signing of the Assignment Agreement and Guarantee Implementation Agreement on 28 December 2023.



Pembangunan SPAM Kota Denpasar

Construction of Denpasar City SPAM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Sewakadarma menyediakan layanan penyediaan air minum ke wilayah Tabanan dan Denpasar. Pada tahun 1971 melalui bantuan dari Pemerintah Australia di bawah 'Colombo Plan' telah dibangun jaringan fasilitas pasokan air, dan pada tahun 1975 juga dilakukan pemasangan sebagian besar pipa di jaringan PDAM. Namun, sejak saat itu belum ada peningkatan pembangunan jaringan air minum dan saat ini usia jaringan pipa tersebut sudah tua.

Seiring dengan terus meningkatnya jumlah bangunan dan pemukiman di kota Denpasar telah memperburuk masalah pasokan air minum. Pada tahun 2021, air minum yang dipasok PDAM hanya mampu memenuhi kebutuhan air minum sebanyak 67,91% dari jumlah penduduk atau sebanyak 493.433 jiwa dari total penduduk sebanyak 726.599. Selain itu, proporsi air tidak berekening/*Non-Revenued Water* (NRW) juga relatif tinggi.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Denpasar selaku PJPK *Ultimate* dan Perumdam Tirta Sewakadarma selaku PJPK mendorong pelaksanaan Proyek SPAM Kota Denpasar untuk mengatasi permasalahan air minum yang ada di Kota Denpasar. Proyek tersebut masuk dalam RPJMD Denpasar 2021-2026 dalam perwujudan pengembangan prasarana penyediaan air minum melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan.

Tirta Sewakadarma Drinking Water Public Company (Perumdam) provides drinking water supply services to the Tabanan and Denpasar areas. In 1971, with the assistance from the Australian Government under the 'Colombo Plan', a network of water supply facilities was built, and in 1975, most of the pipes in the PDAM network were installed. However, since then, there has been no increase in the construction of the drinking water network and the pipe network is now old.

As the number of buildings and settlements in Denpasar continues to increase, the drinking water supply problem has worsened. In 2021, drinking water supplied by PDAM was able to meet the drinking water needs of 67.91% of the total population or 493,433 people out of a total population of 726,599. In addition, the proportion of Non-Revenued Water (NRW) is also relatively high.

Therefore, the Denpasar Municipal, as the *Ultimate* GCA, and Tirta Sewakadarma Perumdam, as the GCA, encourage the SPAM Denpasar Project to overcome drinking water problems in Denpasar City. This project is included in the 2021-2026 Denpasar RPJMD to actualize the development of drinking water supply infrastructure through improving and equalizing piped and non-piped SPAM services.

Informasi Proyek

Project Information

PJPK GCA	Walikota Denpasar Mayor of Denpasar
Lokasi Proyek Project Location	Kota Denpasar Denpasar City
Skema Proyek Project Scheme	<i>Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer</i> (DBFOMT)
Lingkup KPBU PPP Scope	Bagian Unit Produksi - Penyempurnaan IPA dan Sumur Bor <i>Monitoring</i> dan Control Zona Air Minum Prima (ZAMP) untuk peningkatan kualitas air layak minum, kuantitas dan kontinuitas pelayanan Bagian Unit Distribusi dan Pelayanan - Revitalisasi Aset untuk Penurunan Kehilangan Air (NRW) - Pengembangan Unit Distribusi (Perluasan Pelayanan) Production Unit - Improvement of IPA and Well Drilling - Monitoring and Controlling the Prime Drinking Water Zone (ZAMP) to improve the quality, quantity, and continuity of service of drinking water Distribution and Service Unit - Asset Revitalization to Reduce Water Loss (NRW) - Distribution Unit Development (Service Expansion) *Direncanakan untuk dapat menyediakan layanan <i>Drinkable Water</i> *Direncanakan untuk dapat menyediakan layanan <i>Drinkable Water</i>
Mekanisme Pengambilan Investasi Investment Return Mechanism	<i>Revenue Sharing</i>
Estimasi Nilai Investasi Estimated Investment Value	Rp808,67 miliar Rp808.67 billion
Estimasi Masa Kerja Sama Estimated Collaboration Period	20 tahun termasuk masa konstruksi 4 tahun 20 years, including a 4-year construction period
Tahapan Phase	Penyiapan Preparation

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Kementerian Keuangan dan PJPk bersama-sama telah melakukan penandatanganan Kesepakatan Induk Proyek KPBu SPAM Kota Denpasar. Kemudian sebagai tindak lanjut atas penandatanganan surat tersebut, pada tanggal 10 November 2023 Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Penugasan dimana PT PII ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk melaksanakan PDF Proyek.

Pelaksanaan Jasa Konsultasi (Advisory)
Consultation Services (Advisory)

Di luar segmen usaha penjaminan dan PDF, PT PII telah mengembangkan segmen usaha baru di bidang jasa konsultasi (*advisory*) dengan peran utama menggali konsep dan peluang bisnis, baik dari sisi penugasan jenis baru maupun pelaksanaan jasa konsultasi. *Advisory* PT PII hadir untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pemilik proyek maupun *stakeholders* terkait agar dapat memperoleh pendampingan PT PII sejak tahapan awal proyek serta penguatan analisis utamanya pada aspek struktur dan alokasi risiko yang menjadi *added value* Perseroan. Sebagai bentuk komitmen dan upaya persiapan internal Perseroan untuk dapat terjun dalam bidang *advisory*, PT PII kemudian menyusun suatu Kajian Kesiapan, baik dari sisi kompetensi maupun kompetensi, serta identifikasi pemenuhan persyaratan yang diperlukan agar dapat melaksanakan *advisory* secara optimal.

Pada tahun 2021, PT PII mulai menjalankan kegiatan *advisory* melalui *pilot project* Pelabuhan New Palembang Tanjung Carat dimana Perseroan berperan sebagai "*Project Advisor*" melalui skema penunjukan langsung dari Kementerian Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan hasil keluaran berupa dokumen Identifikasi Proyek dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kesiapan Data Dukung untuk Studi Pendahuluan Proyek dan Studi Pendahuluan Pelabuhan Tanjung Carat. Berikut merupakan beberapa kegiatan *advisory* lainnya yang telah dilakukan Perseroan pada 2021-2022, yakni:

1. Penyusunan Pedoman Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU;
2. Pendampingan Kementerian Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut pada proses pengajuan dan perolehan penugasan *Project Development Facility* (PDF) Proyek KPBU Pelabuhan Tanjung Carat;
3. Pendampingan Kementerian Keuangan dalam penyusunan konsep dan penerbitan kerangka regulasi terkait penugasan fasilitasi bentuk baru dalam pengelolaan BMN di wilayah IKN Lama; dan
4. Jasa Konsultansi Proyek Pengembangan Terminal Peti Kemas di Pelabuhan Batu Ampar melalui penyusunan kajian hukum & kelembagaan, analisis struktur, analisis risiko, dan mekanisme *de-risking* Proyek.

On 23 October 2023, the Ministry of Finance and GCA jointly signed the PPP Denpasar City SPAM Project Master Agreement. As a follow-up to the signing of the letter, on 10 November 2023, the Ministry of Finance issued a KMK to Assign IIGF to implement the Project PDF.

In addition to the guarantee and PDF business segments, IIGF has developed a new business segment in the field of consulting services (advisory) with the main role of exploring business concepts and opportunities, both in terms of new types of assignments and the consulting services. IIGF Advisory is present to answer the needs and requests of project owners and related stakeholders, to obtain IIGF assistance from the early stages of the project and to strengthen the main analysis on structure and risk allocation aspects, which become added value to the Company. As a form of commitment and internal preparation efforts by the Company to be able to enter the advisory sector, IIGF prepared a Feasibility Study, both in terms of competition and competency, as well as identified the fulfillment of the requirements needed to implement advisory service optimally.

In 2021, IIGF started advisory activities through the New Palembang Tanjung Carat Port pilot project where the Company acted as a "Project Advisor" via a direct appointment scheme from the Ministry of Transportation c.q. Director General of Sea Transportation, with the output in the form of Project Identification and Preparation of Supporting Data Readiness Evaluation Documents for Project Preliminary Studies and Tanjung Carat Port Preliminary Studies. The Company has carried out several other advisory activities in 2021–2022 as follows:

1. Preparation of Pre-Feasibility Study for Road and Bridge Projects using the PPP Scheme;
2. Assistance from the Ministry of Transportation c.q. Director General of Sea Transportation in the process of submitting and obtaining the Project Development Facility (PDF) assignment for the Tanjung Carat Port PPP Project;
3. Assistance to the Ministry of Finance in drafting concepts and issuing regulatory frameworks related to the assignment of new forms of BMN management facilitation in the Old IKN area; and
4. Consultation Services for the Container Terminal Development Project at Batu Ampar Port via preparation of legal & institutional studies, structural analysis, risk analysis, and Project de-risking mechanisms.



Segmen Usaha Pengelolaan Dana Investment Segment

Kegiatan Operasi dan Usaha Pengelolaan Dana Operations and Investment Segment

Dalam segmen Pengelolaan Dana, Perseroan dapat melakukan kegiatan penempatan dana pada instrumen keuangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, di antaranya meliputi instrumen investasi pasar uang, obligasi, dan reksa dana dengan bobot penempatan yang dinamis dilakukan penyesuaian dengan kondisi pasar yang ada untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dengan risiko yang terukur.

Adapun sumber pendapatan usaha PT PII berasal dari aktivitas penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, serta dari aktivitas pengelolaan dana. Aktivitas pengelolaan dana ini merupakan pendukung proses kegiatan penjaminan dan PDF yang merupakan bisnis inti PT PII. Selain melakukan pengelolaan portofolio instrumen investasi, fungsi pengelolaan dana yang dilakukan meliputi pengelolaan likuiditas keuangan Perseroan dan menjaga kapasitas penjaminan oleh Perseroan.

In the Investment segment, the Company performs fund placement activities in financial instruments that have been stipulated in the provisions, including money market investment instruments, bonds and mutual funds, with dynamic placement weights adjusted to existing market conditions to obtain an optimal rate of return with measurable risks.

The source of IIGF's business income comes from guarantee activities, Project Preparation and Transaction Advisory, as well as from investment activities. This investment activity supports the guarantee and PDF activity process, which is IIGF's core business. In addition to managing the investment instrument portfolio, the investment function carried out includes managing the Company's financial liquidity and maintaining the Company's guarantee capacity.

Kebijakan Strategis dan Produktivitas Pengelolaan Dana Strategic Policy and investment Productivity

PT PII melakukan strategi pengelolaan dana yang lebih adaptif melalui perubahan bobot portofolio pengelolaan dana, yaitu menambah bobot penempatan pada instrumen obligasi.

Strategi Perseroan dalam pengelolaan dana dalam bentuk investasi adalah sebagai berikut:

1. Alokasi investasi sesuai Anggaran 2023 dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp932 miliar, telah mengikuti sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 148/PMK.08/2022.
2. Mengoptimalkan penempatan pada Bank sesuai dengan kebijakan dan limit yang telah ditetapkan dengan terus memperhatikan kecenderungan pergerakan tingkat suku bunga.

Portofolio investasi Perseroan sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri dari investasi atas deposito berjangka (44%) dan investasi atas pendapatan tetap (obligasi) (56%) dari total pengelolaan dana sebesar Rp15,8 triliun.

IIGF conduct its investment strategy to be more adaptive by changing the weight of the investment portfolio, i.e., increasing the weight of placements in bond instruments.

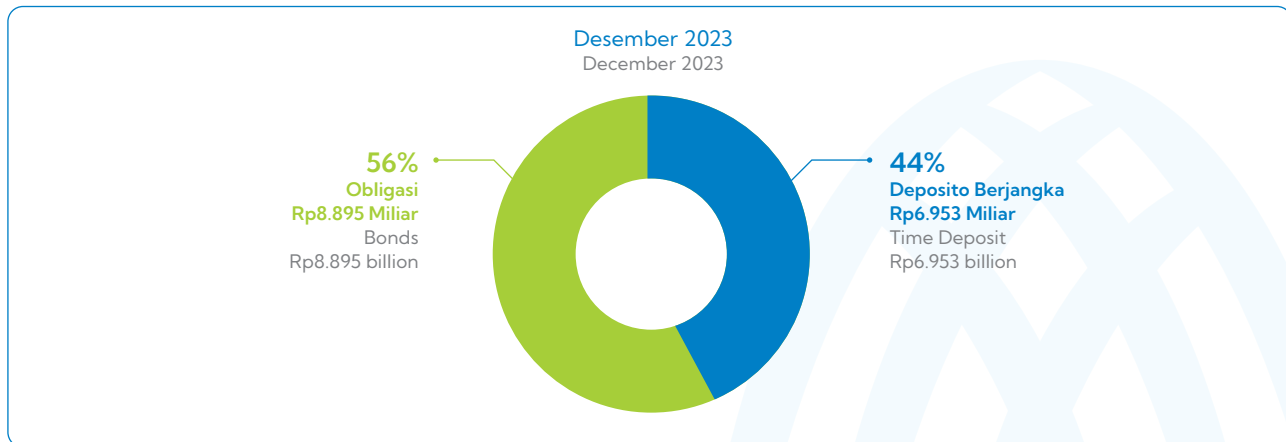
The Company's strategy in managing funds in the form of investment is as follows:

1. Based on 2023 Budget, the investment allocation to achieve Key Performance Indicators (KPI) of Rp932 billion, has followed the provisions required in PMK No. 148/PMK.08/2022.
2. Optimizing placements with the Bank in accordance with established policies and limits with due regards to the trends in interest rate movements.

The Company's investment portfolio as of 31 December 2023 consists of investment in time deposits (44%) and investment in fixed income (bonds) (56%) from total investment of Rp15.8 trillion.



Grafik Portofolio Investasi sampai dengan 31 Desember 2023
Graph: Investment Portfolio until 31 December 2023



1. Investasi pada deposito berjangka

Investasi dalam bentuk deposito pada setiap Bank Pemerintah tidak melebihi 25% dari jumlah modal Perseroan; dan pada setiap Bank di luar Bank Pemerintah tidak melebihi 10% dari jumlah modal Perseroan, dimana penempatan dilakukan pada Bank KBMI dengan minimal peringkat AA.

2. Investasi pada pendapatan tetap

Penempatan investasi pada obligasi pada setiap emiten untuk surat utang korporasi dan sukuk korporasi tidak melebihi 5% dari jumlah modal Perseroan dan seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah modal Perseroan.

Pada bulan Oktober 2022, Pemerintah menerbitkan PMK 148/PMK.08/2022 tentang Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang berlaku efektif pada tanggal 20 Oktober 2022. Dengan berlakunya PMK tersebut, maka PMK 95/PMK.08/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seluruh penempatan investasi pengelolaan dana Perseroan per 31 Desember 2023 telah sesuai dengan batas koridor ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 148/PMK.08/2022.

1. Investment in time deposits

Investments in the form of deposits in each Government Banks do not exceed 25% of the Company's total capital; and in each Bank other than Government Banks not exceeding 10% of the Company's total capital, where placements are made in Bank KBMI with a minimum of AA rating.

2. Investment in fixed income

Investment in bonds with each issuer for corporate debt securities and corporate sukuk does not exceed 5% of the Company's total capital and in total does not exceed 20% of the Company's total capital.

In October 2022, the Government issued PMK 148/PMK.08/2022 on the Scope of Sovereign Guarantee Management by Infrastructure Guarantee Business Entity, which became effective on 20 October 2022. With the enactment of the PMK, PMK 95/PMK.08/2017 is revoked and declared invalid.

All investments managed by the Company's funds as of 31 December 2023 are in accordance with the limits stipulated in the PMK No. 148/PMK.08/2022.



Segmen Lainnya Other Segments

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem infrastruktur, PT PII juga terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman terkait penyediaan proyek infrastruktur di Indonesia, sehingga PT PII dapat mewujudkan visinya untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dampak positif dari kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan *alternative* mulai terlihat dengan meningkatnya partisipasi investor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Namun demikian, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan menjadi tantangan tersendiri untuk penyediaan infrastruktur, khususnya yang menggunakan skema alternatif seperti KPBU. Oleh karena itu, PII menjadikan upaya pengembangan ekosistem infrastruktur sebagai salah satu pilar utama kegiatan Perseroan melalui pembentukan IIGF Institute. Inisiatif strategis ini merupakan upaya PT PII untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan melalui diseminasi pemahaman, perencanaan, dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU.

IIGF Institute bertugas untuk menjalankan fungsi *think tank* Perseroan, dan memiliki visi utama untuk menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk merealisasikan visi tersebut, kegiatan IIGF Institute berfokus pada Edukasi, Riset, Publikasi, serta Advokasi Kebijakan dan *Outreach*.

Edukasi Education

Melalui kegiatan *Capacity Building* dan penyelenggaraan *Certified PPP Professional* (CP3P), pelaksanaan program edukasi bertujuan untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan terkait dengan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait dengan skema KPBU.

Untuk menjalankan kegiatan *Capacity Building*, IIGF Institute berkolaborasi dengan Divisi Guidance and Consultation yang memegang peran penting sebagai fungsi terdepan dalam berhubungan dengan PJP dan calon PJP. Selain dengan pihak internal, IIGF Institute juga menjadi fasilitator pelaksana *capacity building* Kantor Bersama KPBU bekerja sama dengan pihak eksternal di antaranya, dalam hal ini Kementerian PPN/

To support the infrastructure ecosystem development, IIGF strives to increase understanding regarding the provision of infrastructure projects in Indonesia. Therefore, IIGF can actualize its vision to become a key SOE that is active in accelerating sustainable infrastructure development to improve the quality of life of the Indonesian citizen.

The positive impact of the Government's policy to accelerate infrastructure development through alternative financing schemes can be seen with the increasing participation of private investors in providing infrastructure. However, the limited knowledge and capacity of stakeholders and policymakers are some of the specific challenges in providing infrastructure, especially those using alternative schemes such as PPP. Therefore, IIGF strives to develop the infrastructure ecosystem as one of the main pillars of the Company's activities by establishing the IIGF Institute. This strategic initiative is IIGF's effort to enhance stakeholder capacity through dissemination of understanding, planning, and implementation of infrastructure provision using the PPP scheme.

The IIGF Institute has the functions to carry out the Company's think tank function, and has the main vision of creating a better infrastructure development ecosystem to encourage infrastructure development in Indonesia. The IIGF Institute's activities focus on Education, Research, Publications, Policy Advocacy, and Outreach to actualize this vision.

Via its Capacity Building activities and the Certified PPP Professional (CP3P), the educational programs have the objective to disseminate information and increase stakeholder knowledge related to alternative financing for infrastructure development, especially related to the PPP scheme.

To carry out the Capacity Building, the IIGF Institute collaborates with the Guidance and Consultation Division, which plays an important role as the leading function in dealing with GCAs and prospective GCAs. In addition to the internal parties, the IIGF Institute is also a facilitator for capacity building at PPP Joint Office in collaboration with external parties, including, in this case the Ministry of National Development Planning/



Bappenas serta mitra akademik nasional maupun daerah yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proyek yang direncanakan.

Hingga akhir tahun 2023, IIGF Institute mulai menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* (CB) secara tatap muka yang meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

Bappenas and national and regional academic partners who have knowledge or experience related to the planned project.

As of the end of 2023, the IIGF Institute began holding face-to-face *Capacity Building* (CB) activities which include various activities as follows:

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity
1	25 – 27 Januari 2023 January 25 – 27, 2023	CB KPBU Pengembangan Jalur MRT Jakarta Fase 4 (Fatmawati – Kp. Rambutan) dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) CB PPP Phase 4 MRT Jakarta Line Development (Fatmawati – Kp. Rambutan) with PT MRT Jakarta (Perseroda)
2	30 Januari 2023 January 30, 2023	CB KPBU Proyek PJU Kabupaten Banyumas CB PPP Banyumas Regency PJU Project
3	6 Februari 2023 February 6, 2023	CB KPDBU bagi DPRD Kabupaten Sampang Proyek RSUD Sampang CB KPDBU for Sampang Regency DPRD Sampang Hospital Project
4	14 Februari 2023 February 14, 2023	CB KPDBU Proyek APJ Kabupaten Ngawi CB KPDBU Ngawi Regency APJ Project
5	8 Maret 2023 March 8, 2023	CB KPDBU bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk Proyek PJU Kota Samarinda CB KPDBU for the Samarinda Municipal Government for the Samarinda PJU Project
6	10 Maret 2023 March 10, 2023	CB KPBU bagi Bank Kaltimara CB PPP for Bank Kaltimara
7	17 Mei 2023 May 17, 2023	CB KPBU dengan BPIW CB PPP with BPIW
8	30 Mei 2023 May 30, 2023	CB KPBU dengan Pemda DKI CB PPP with Special Capital Region of Jakarta Regional Government
9	20 – 21 Juni 2023 June 20–21, 2023	CB KPBU dengan PPIT Kemenhub <i>Batch</i> 1 CB PPP with PPIT of Ministry of Transportation Batch 1
10	4 – 5 Juli 2023 July 4–5, 2023	CB KPBU dengan PPIT Kemenhub <i>Batch</i> 2 CB PPP with PPIT of Ministry of Transportation Batch 2
11	18 Agustus 2023 August 18, 2023	CB KPBU dengan Bank BJB Bandung CB PPP with Bank BJB Bandung
12	13 November 2023 November 13, 2023	CB KPBU dengan Pemprov Jawa Timur CB PPP with East Java Provincial Government
13	18 Desember 2023 December 18, 2023	CB KPBU dengan GIZ dengan kurikulum TALP CB PPP with GIZ with TALP curriculum

Selain kegiatan *capacity building*, IIGF Institute juga berupaya meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di bidang infrastruktur guna memastikan tercapainya peningkatan kapasitas ekosistem infrastruktur atas skema KPBU.

Sejak tahun 2019, IIGF Institute telah resmi menjadi *Accredited Training Organization* (ATO) untuk *Certified PPP Professional* (CP3P) dari *Accredited Professional Manager Globally* (APMG). Program CP3P merupakan program sertifikasi kompetensi KPBU berstandar internasional yang dikembangkan oleh World Bank Group (WBG) bersama Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), dan Inter-American Development Bank (IDB) dan sebagian didanai oleh Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).

In addition to capacity building activities, the IIGF Institute also strives to increase the capacity of stakeholders in the infrastructure sector to ensure that infrastructure ecosystem capacity building under the PPP scheme are achieved.

Since 2019, IIGF Institute has officially become an *Accredited Training Organization* (ATO) for *Certified PPP Professionals* (CP3P) from *Accredited Professional Managers Globally* (APMG). The CP3P program is an international standard of PPP competency certification program developed by the World Bank Group (WBG) in collaboration with the Asian Development Bank (ADB), European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), Islamic Development Bank (IsDB), and the Inter-American Development Bank (IDB), and partially funded by the Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).



Program inovasi dari World Bank Group (WBG) tersebut memiliki visi bersama yaitu untuk mencapai peningkatan kinerja KPBU secara global. Pelaksanaan program CP3P bertujuan untuk membekali individu, para pemangku kepentingan, serta para profesional mengenai praktik-praktik terbaik KPBU level internasional. Para peserta yang telah mengikuti program tersebut diharapkan dapat menciptakan *framework* KPBU yang lebih optimal, meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan proyek KPBU yang berkualitas, meningkatkan kapabilitas dalam hal pendampingan penyiapan proyek serta mendapatkan peluang untuk mengembangkan bisnis pada proyek KPBU.

Program Sertifikasi CP3P dapat diikuti oleh kalangan umum dari berbagai disiplin ilmu ataupun sektor, terutama bagi para praktisi/profesional KPBU di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Praktisi KPBU, Investor, Operator dan Lembaga Keuangan, serta Konsultan (Keuangan, Hukum, dan Teknis) yang ingin memperoleh kredensial KPBU yang dapat diakui secara global.

Selama tahun 2023, ATO PT PII melalui IIGF Institute telah melaksanakan kegiatan Program CP3P *Foundation Level 3 batch*, *Preparation Level 1 batch* dan *Execution Level 1 batch* dengan tingkat kelulusan rata-rata 85,4%, sebagai berikut:

This innovation from the WBG has a shared vision, i.e., to achieve improved PPP performance globally. The CP3P program aims to equip individuals, stakeholders, and professionals in terms of PPP international best practices. The participants who have attended the program shall be able to create a more optimal PPP framework, increase their ability to generate quality PPP projects, increase their capabilities in terms of assisting project preparation, and obtain opportunities to develop business in the PPP projects.

CP3P Certification Program can be participated by the public from various disciplines or sectors, especially PPP practitioners/professionals in Ministries/Agencies and Local Governments, PPP Practitioners, Investors, Operators, and Financial Institutions, as well as Consultants (Finance, Legal, and Technical) who want to obtain PPP credentials that are internationally recognized.

In 2023, IIGF's ATO, through the IIGF Institute, has carried Foundation Level 3 batch, Preparation Level 1 batch and Execution Level 1 batch with an average pass rate of 85.4%, as follows:

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Peserta Participant
1	Course: 8–12 Mei 2023 Ujian: 16 Mei 2023 Course: 8–12 May 2023 Exam: 16 May 2023	CP3P <i>Foundation Batch 12</i>	Internal PT PII IIGF internal
2	Course: 22–24 Mei 2023 Ujian: 30 Mei 2023 Course: 22–24 May 2023 Exam: 30 May 2023	CP3P <i>Foundation Batch 13</i>	DJKN Kementerian Keuangan, PT SMF (Persero), PT Marathama Cipta Mandiri DJKN of the Ministry of Finance, PT SMF (Persero), PT Marathama Cipta Mandiri
3	Course: 10–12 Juli 2023 Ujian: 18 Juli 2023 Course: 10–12 July 2023 Exam: 18 July 2023	CP3P <i>Foundation Batch 14</i>	DJPK Kementerian Keuangan, PT SMI (Persero), PT MRT, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk DJPK of the Ministry of Finance, PT SMI (Persero), PT MRT, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
4	Course: 31 Juli – 4 Agustus 2023 Ujian: 22 Agustus 2023 Course: 31 July – 4 August 2023 Exam: 22 August 2023	CP3P <i>Preparation Batch 2</i>	PT SMF (Persero), Internal PT PII PT SMF (Persero), IIGF internal
5	Course: 6–10 November 2023 Ujian: 22 November 2023 Course: 6–10 November 2023 Exam: 22 November 2023	CP3P <i>Execution Batch 1</i>	PT SMF (Persero), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., Internal PT PII PT SMF (Persero), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., IIGF internal



Riset dan Publikasi

Research and Publication

Sejak tahun 2015 IIGF Institute telah melaksanakan berbagai riset yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti Kementerian dan Lembaga teknis terkait, pemilik proyek, akademisi dan universitas serta Lembaga Non-Pemerintahan. Hasil riset diharapkan dapat menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul dari proyek-proyek infrastruktur di berbagai sektor dengan luasnya cakupan masukan dan perspektif dari berbagai pihak. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, rincian kegiatan riset dan publikasi PT PII adalah sebagai berikut:

1. Riset Kajian Rencana Penerapan Jaminan Pendapatan Minimum (MRG)
Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Pendapatan Jalan Tol di Indonesia – Fase 2 Kajian Rencana Penerapan Jaminan Pendapatan Minimum (MRG) Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Pendapatan Jalan Tol di Indonesia – Fase 3 Kerangka Konseptual Pengembangan KPBU Skala Kecil Sebagai Opsi Moda Dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah di Indonesia
 - a. Kajian Tinjauan Kritis Multipihak Untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Kajian Studi Pendahuluan Proyek KPBU Kantor DJP Kalibata
 - c. Kajian Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Daerah Dengan Skema KPBU Melalui Perspektif Tata Kelola Kolaboratif
2. Publikasi
 - a. Buku Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif Seri 1 – Optimalisasi Dana Pensiun untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
 - b. Buku Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif Seri 2 – Dana Filantropi Untuk Pembangunan di Indonesia
 - c. Buku Seri Kajian Skema Pembiayaan Inovatif Seri 3 – Skema Pembiayaan Kreatif dan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur
 - d. Buku Kajian Kritis Jalan Tol Vol 1 – Perspektif Kebijakan dalam Pembangunan Jalan Tol di Indonesia
 - e. Buku Kajian Kritis Jalan Tol Vol 2 – Pengelolaan Aspek Teknis dalam Perancangan dan Pembangunan Jalan Tol
 - f. Buku Kajian Kritis Jalan Tol Vol 3 – Keberlanjutan dalam Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol
 - g. *Journal of Infrastructure Policy and Management Volume 6* Edisi 1 dan 2.

Since 2015, IIGF Institute has carried out various research involving stakeholders such as related technical Ministries and Institutions, project owners, academics, and universities, as well as Non-Governmental Institutions. The results from the research shall be able to answer various kinds of problems that arise from infrastructure projects in various sectors with a wide range of inputs and perspectives from various parties. Thus, it shall encourage a better infrastructure development in Indonesia. In 2023, details of IIGF's research and publication activities are as follows:

1. Research of the Plan for Implementing Minimum Revenue Guarantee (MRG)
As an Instrument for Mitigating Toll Road Revenue Risk in Indonesia – Phase 2 Research of Plan for Implementing Minimum Revenue Guarantee (MRG) as an Instrument for Mitigating Toll Road Road Revenue Risk in Indonesia – Phase 3 Conceptual Framework for the Development of Small Scale PPPs as a Mode Option for Providing Regional Infrastructure in Indonesia
 - a. Multi-stakeholders Critical Feasibility Study for Drinking Water Supply Systems (SPAM)
 - b. Preliminary Study of the Kalibata DJP Office PPP Project
 - c. Review of the Regional Infrastructure Provision Using the PPP Scheme via a Collaborative Governance Perspective
2. Publication
 - a. Innovative Financing Scheme Review Book Series 1 – Optimizing Pension Funds for Infrastructure Development in Indonesia
 - b. Innovative Financing Scheme Review Book Series 2 – Philanthropy Fund for Development in Indonesia
 - c. Innovative Financing Scheme Review Book Series 3 – Creative and Innovative Financing Schemes for Infrastructure Development
 - d. Toll Road Critical Review Book Vol 1 – Policy Perspectives in Toll Road Development in Indonesia
 - e. Toll Road Critical Review Book Vol 2 – Technical Aspects Management in Toll Road Design and Construction
 - f. Toll Road Critical Review Book Vol 3 – Sustainability in the Toll Road Operations and Maintenance
 - g. *Journal of Infrastructure Policy and Management Volume 6* Issues 1 and 2.



Advokasi Kebijakan dan Outreach Policy Advocacy and Outreach

Untuk memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan, PT PII melalui IIGF Institute menyelenggarakan berbagai kegiatan melalui kolaborasi dengan mitra strategis di level nasional dan internasional untuk mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan yang lebih baik antara lain, K/L (Kementerian/Lembaga), Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Institusi sejenis lainnya.

Hingga akhir tahun 2023, IIGF Institute telah menjalin kerja sama dengan 36 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), yaitu wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman serta harmonisasi kebijakan. Melalui UNIID diharapkan dapat mengakomodir seluruh potensi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi di bidang pembangunan dan penyediaan Infrastruktur.

Sepanjang tahun 2023, kegiatan *outreach* yang dilaksanakan meliputi:

IIGF, via the IIGF Institute, organizes various activities in collaboration with strategic partners at the national and international levels to encourage better policy formulation and implementation to expand the involvement of the stakeholders, including Ministries/Agencies, Universities, Research Institutions, and other similar institutions.

As of the end of 2023, the IIGF Institute has collaborated with 36 colleges/universities throughout Indonesia, which are members of the University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), i.e., a forum for sharing information and experiences as well as harmonizing policies. UNIID shall accommodate all the potential of colleges/universities in the infrastructure development and provision sector.

In 2023, outreach activities carried out include:

No.	Kegiatan Activity	Topik/Tema dan Case Study Topic/Theme and Case Study	Universitas University
1	Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-24 24 th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR)	Peluang dan Tantangan Pengembangan Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kota Samarinda Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha <i>Availability Payment</i> (KPBU-AP) Opportunities and Challenges for Developing Public Street Lighting (PJU) Projects in Samarinda City with the Public Private Partnership <i>Availability Payment</i> (KPBU-AP) Scheme	Universitas Mulawarman Mulawarman University
2	INFI-ers Connectivity Talk (INCoTalk)	Kajian Kritis Pembangunan Jalan Tol di Indonesia Critical Study of Toll Road Development in Indonesia	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University
3	Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-25 Edisi World Water Forum 2024 25 th Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) World Water Forum 2024 Edition	<i>Amplifying Partnership: A Collaborative Drive To Strengthen Indonesia's Water Sector</i>	Universitas Brawijaya Brawijaya University



Profitabilitas Per Segmen

Segmentation Profitability

Komponen Pendapatan Usaha

Components of Revenues

Sejalan dengan perluasan mandat dalam Anggaran Dasar dan penugasan Pemerintah kepada PT PII tersebut, kegiatan usaha PT PII membagi bisnis Perseroan menjadi 4 (empat) segmen usaha, yang meliputi (1) Penjaminan Proyek Infrastruktur; (2) Pengelolaan Dana; (3) Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; dan (4) Lainnya.

Penjelasan segmen dibagi berdasarkan struktur pendapatan, yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan Penjaminan; Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi; serta Pengelolaan Dana. Selain itu PT PII juga memiliki Pendapatan Lain-lain yang turut berkontribusi dalam pendapatan Perseroan. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai operasi dan bisnis Perseroan.

In line with the mandate's expansion in the Articles of Association and the Government's assignment to IIGF, IIGF's business activities divide the Company's business into four (4) business segments, which include (1) Infrastructure Project Guarantee; (2) Investment; (3) Project Preparation and Transaction Advisory; and (4) Others.

The segment is divided based on the income structure, and classified into three (3) large groups, i.e., Guarantee; Project Preparation and Transaction Advisory; and Investment. In addition, IIGF also has Other Income contributing to the Company's income. The objective is to provide a clearer picture of the Company's operations and business.

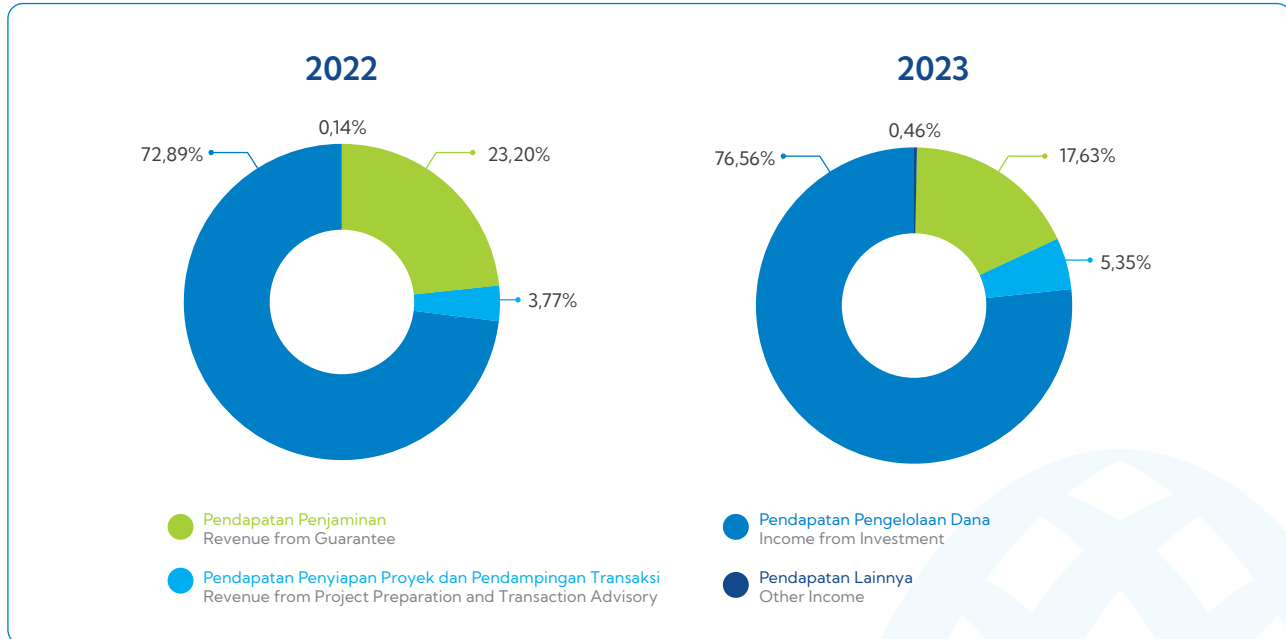
Tabel Komponen dan Komposisi Pendapatan Usaha (Rp Juta)

Table: Components and Composition of Revenues (Rp Million)

Jenis Type	2023		2022	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Pendapatan Penjaminan Revenue from Guarantee	232.354	17,63	252.574	23,20
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory	70.530	5,35	41.099	3,77
Pendapatan Pengelolaan Dana Income from Investment	1.009.080	76,56	793.702	72,89
Pendapatan Lainnya Other Income	6.042	0,46	1.477	0,14
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	1.318.006	100,00	1.088.852	100,00



Grafik Komposisi Pendapatan Per Segmen
Graph: Revenue Composition by Segment



Walaupun segmen Penjaminan merupakan bisnis utama PT PII, namun pendapatan Pengelolaan Dana merupakan kontributor utama pendapatan PT PII dengan kontribusi mencapai 76,56%, kemudian diikuti dengan pendapatan penjaminan sebesar 17,63%, selanjutnya pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi di tahun 2023.

In 2023, even though the Guarantee segment is IIGF's main business, the income from investment is the main contributor to IIGF's revenue, with its contribution reaching 76.56%, followed by revenue from guarantee of 17.63%, and revenue from Project Preparation and Transaction Advisory.

Profitabilitas dan Kinerja Keuangan Per Segmen Profitability and Financial Performance by Segment

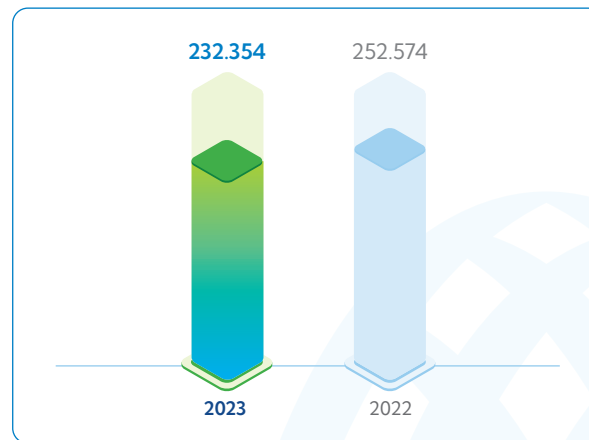
Pendapatan Segmen Penjaminan Revenue from Guarantee

Pada tahun 2023 pendapatan yang diperoleh segmen penjaminan sebesar Rp232,35 miliar menurun 8,01% dibandingkan perolehan di tahun 2022 sebesar Rp252,57 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pendapatan provisi dan komisi di tahun 2023 sebesar Rp24,5 miliar menurun 76,03% dibandingkan perolehan di tahun 2022 sebesar Rp101,99 miliar yang utamanya disebabkan terdapat beberapa proyek yang sebelumnya ditargetkan sebagai penjaminan baru di tahun 2023 bergeser pelaksanaan penjaminannya ke tahun 2024.

In 2023, the revenue from the guarantee segment was Rp232.35 billion, decreased by 8.01% compared to 2022, which was Rp252.57 billion. This decline was caused by fees and commission revenue in 2023 amounting to Rp24.5 billion, which decreased by 76.03% compared to revenue in 2022 of Rp101.99 billion. This was mainly due to several project shifting, which previously were budgeted in 2023, and shifted into 2024.



Grafik Pendapatan Segmen Penjaminan (Rp Juta)
Graph: Revenue from Guarantee (Rp million)

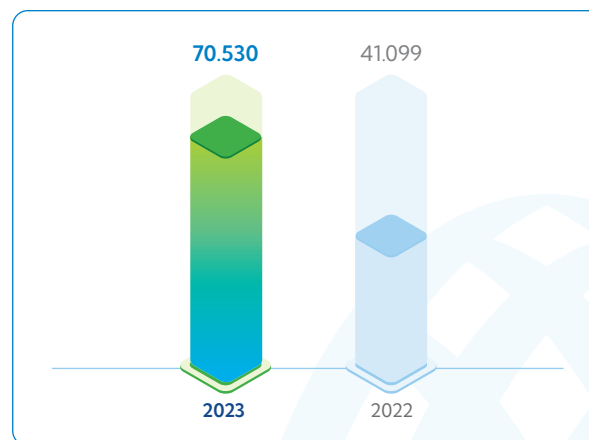


Pendapatan Segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory

Pada tahun 2023 pendapatan yang diperoleh segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi sebesar Rp70,53 miliar meningkat 71,61% dibandingkan perolehan di tahun 2022 sebesar Rp41,10 miliar. Peningkatan ini utamanya berkontribusi oleh proyek pemanfaatan BMN IKN yang baru berjalan di tahun 2023.

In 2023, the revenue from the project preparation and transaction advisory was Rp70.53 billion, increased by 71.61% compared to the income in 2022, which was Rp41.10 billion. This increase was mainly due to the BMN IKN utilization project, which started in 2023.

Grafik Pendapatan Segmen Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (Rp Juta)
Graph: Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory (Rp million)





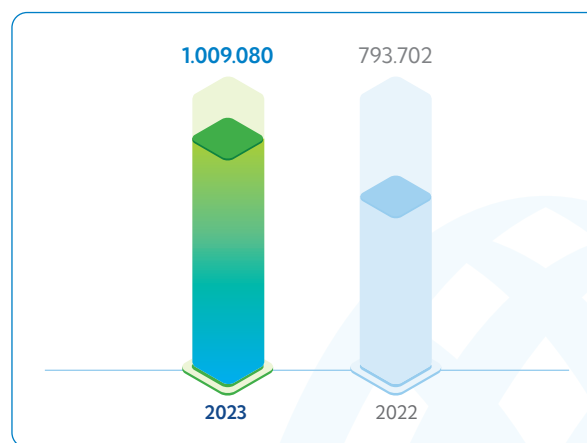
Pendapatan Segmen Pengelolaan Dana

Income from Investments

Pada tahun 2023 pendapatan yang diperoleh segmen pengelolaan dana sebesar Rp1,01 triliun meningkat 27,14% dibandingkan perolehan di tahun 2022 sebesar Rp793,70 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6,7% yang dikontribusi oleh kenaikan tingkat suku bunga deposito berjangka sejalan dengan kenaikan rata-rata suku bunga acuan.

In 2023, the income from investments was Rp1.01 trillion, increased by 27.14% compared to 2022, which was Rp793.70 billion. This increase was mainly due to an increase in the average rate of return on investment of 6.7%, which was contributed by an interest rate increase on time deposits, in line with the increase in the average benchmark interest rate.

Grafik Pendapatan Segmen Pengelolaan Dana (Rp Juta)
Graph: Income from Investments (Rp million)



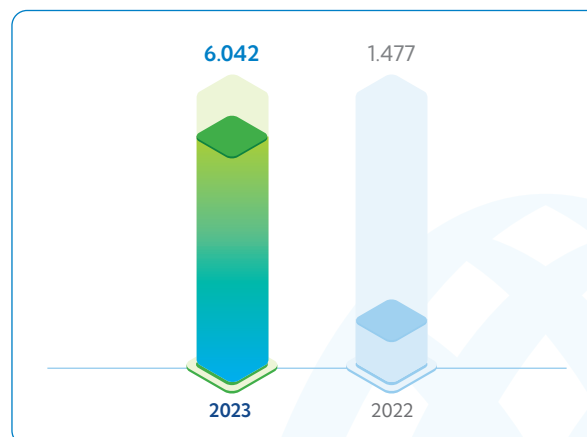
Pendapatan Segmen Lainnya

Other Income

Pada tahun 2023 pendapatan yang diperoleh segmen lainnya sebesar Rp6,04 miliar meningkat 309,07% dibandingkan perolehan di tahun 2022 sebesar Rp1,48 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan bunga regres selama tahun 2023.

In 2023, income obtained by other segments amounted to Rp6.04 billion, increased by 309.07% compared to revenues in 2022 of Rp1.48 billion. The increase is mainly influenced by the increase in recourse interest revenue in 2023.

Grafik Pendapatan Segmen Lainnya (Rp Juta)
Graph: Other Income (Rp million)





Tinjauan Keuangan

Financial Review

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) dengan rekan penanggung jawab adalah Jimmy Pangestu, S.E. dan Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA auditor independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2024 dan 27 Februari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan Perseroan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia.

The performance discussion and analysis in this annual report refers to the Financial Reports for the years ending on 31 December 2023 and 2022, which have been audited by Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), with Jimmy Pangestu, S.E. and Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA independent auditor, as the partner in charge, in their respective reports dated 28 February 2024 and 27 February 2023 with an unqualified opinion in all material respects.

The Company's financial reports have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants.

Analisis Posisi Keuangan

Financial Position Analysis

Jumlah aset PT PII pada tahun 2023 adalah sebesar Rp16,41 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp443,25 miliar, dan jumlah ekuitas sebesar Rp15,96 triliun.

In 2023, IIGF's total assets, total liabilities, and total equities amounted to Rp16.41 trillion, Rp443.25 billion, and Rp15.96 trillion.

Tabel Posisi Keuangan (Rp juta)
Table: Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Aset Assets	16.406.049	15.555.081	5,47	850.968
Liabilitas Liabilities	443.249	401.612	10,37	41.637
Ekuitas Equity	15.962.800	15.153.469	5,34	809.331

Aset

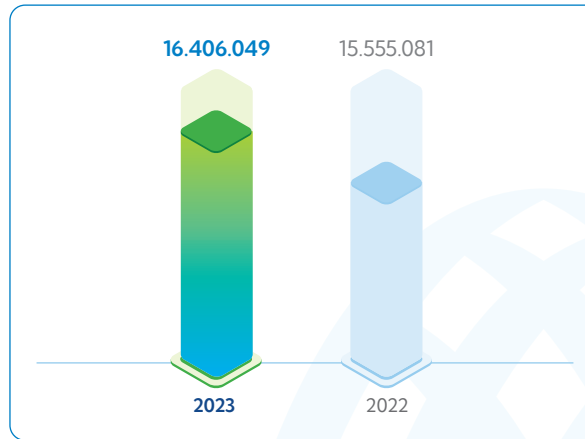
Assets

Total Aset tahun 2023 mencapai Rp16,41 triliun, mengalami peningkatan 5,41% dibandingkan total aset tahun 2022 sebesar Rp15,56 triliun. Peningkatan total aset PT PII disebabkan oleh adanya kenaikan investasi yang signifikan. Capaian ini berada 101% di atas target RKAP 2023 sebesar Rp16,25 triliun.

In 2023, the Total Assets achieved Rp16.41 trillion, increased by 5.41% compared to the Total Assets in 2022 of Rp15.56 trillion. IIGF's total assets increased due to a significant increase in investment. This achievement is 101% above the 2023 RKAP target of Rp16,25 trillion.



Grafik Perkembangan Aset (Rp juta)
Graph: Asset Development (Rp million)



Tabel Aset (Rp juta)
Table: Assets (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents	121.488	134.306	(9,54)	(12.818)
Investasi Investment	15.793.649	15.008.164	5,23	785.485
Piutang usaha setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai Account receivables net of allowance for impairment losses	327.575	294.720	11,15	32.855
Piutang lainnya Other receivables	11.444	9.885	15,77	1.559
Biaya dibayar dimuka dan uang muka Prepaid expenses and advances	3.106	2.826	9,91	280
Aset tetap Fixed assets	13.551	4.896	176,78	8.655
Aset hak-guna Right-of-use assets	45.314	12.573	260,41	32.741
Aset takberwujud Intangible assets	4.287	5.470	(21,63)	(1.183)
Beban tangguhan Deferred expenses	4.333	5.663	(23,49)	(1.330)
Pajak dibayar dimuka Prepaid income tax	5.030	2.015	149,63	3.015
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	70.903	69.194	2,47	1.709
Uang jaminan yang dapat dikembalikan Refundable deposit	5.369	5.369	0,00	0
Jumlah Aset Total Assets	16.406.049	15.555.081	5,47	850.968

Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents

Jumlah kas dan setara kas tahun 2023 adalah sebesar Rp121,49 miliar menurun 9,54% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp134,31 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

In 2023, the total cash and cash equivalents amounted to Rp121.49 billion, decreased by 9.54% compared to 2022, which was Rp134.31 billion. This decrease was mainly due to an increase in deposit placements with maturity periods of more than 3 months to 1 year.



Investasi Investment

Jumlah investasi tahun 2023 adalah sebesar Rp15,79 triliun meningkat 5,23% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp15,01 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

The total investment in 2023 was Rp15.79 trillion, increased by 5.23% compared to 2022, which was Rp15.01 trillion. This increase was mainly due to an increase in deposit placements with maturity periods of more than 3 months to 1 year.

Piutang Usaha Account Receivables

Jumlah piutang usaha tahun 2023 adalah sebesar Rp327,58 miliar meningkat 11,15% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp294,72 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan bunga deposito yang disebabkan penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

In 2023, the total account receivables amounted to Rp327.58 billion, increased by 11.15% compared to 2022, which was Rp294.72 billion. This increase was mainly influenced by an increase in deposit interest of the deposit placements with maturity periods of more than 3 months to 1 year.

Piutang Lainnya Other Receivables

Jumlah piutang lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp11,44 miliar meningkat 15,77% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp9,89 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh piutang atas jasa konsultasi pendampingan proyek pembangunan terminal petikemas di pelabuhan Batu Ampar yang baru diterima pembayarannya di tahun 2024.

In 2023, the total other receivables amounted to Rp11.44 billion, increased by 15.77% compared to 2022, which was Rp9.89 billion. The increase was mainly due to receivables for consulting services for the container terminal development project at Batu Ampar port, which would be paid in 2024.

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid expenses and advances

Jumlah biaya dibayar dimuka dan uang muka tahun 2023 adalah sebesar Rp3,11 miliar meningkat 9,91% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp2,83 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan atas penambahan biaya dibayar dimuka terkait pembayaran premi asuransi selama 2023.

In 2023, the total of prepaid expenses and advances was Rp3.11 billion, increased by 9.91% compared to 2022, which was Rp2.83 billion. This increase was mainly influenced by an increase in additional prepaid costs related to insurance premium payments in 2023.

Aset Tetap Fixed Assets

Jumlah aset tetap tahun 2023 adalah sebesar Rp13,55 miliar meningkat 176,78% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp4,90 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh dilaksanakan proses renovasi gedung kantor PT PII di tahun 2023.

In 2023, the total fixed assets amounted to Rp13.55 billion, increased by 176.78% compared to 2022, which was Rp4.90 billion. This increase was mainly influenced by the leasehold improvement of IIGF's office building in 2023.

Aset Hak Guna Right-of-Use Assets

Jumlah aset hak guna tahun 2023 adalah sebesar Rp45,31 miliar meningkat 260,41% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp12,57 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan aset hak guna gedung terkait dengan kontrak baru sewa gedung untuk periode September 2023 sampai dengan Agustus 2026.

In 2023, the total right-of-use assets amounted to Rp45.31 billion, increased by 260.41% compared to 2022, which was Rp12.57 billion. This increase was mainly influenced by the addition of Right-of-Use Assets related to new building rental contracts from September 2023 to August 2026.



Aset Takberwujud

Intangible Assets

Jumlah aset takberwujud tahun 2023 adalah sebesar Rp4,29 miliar menurun 21,63% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp5,47 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terdapat penambahan aset takberwujud di tahun 2023 yang statusnya sudah habis masa manfaatnya.

In 2023, the Intangible assets amounted to Rp4.29 billion, decreased by 21.63% compared to 2022, which was Rp5.47 billion. This decrease was mainly because of the addition of intangible assets in 2023 whose life had expired.

Beban Tangguhan

Deferred Expenses

Jumlah beban tangguhan tahun 2023 adalah sebesar Rp4,33 miliar menurun 23,49% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp5,66 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan provisi terkait beban tangguhan untuk proyek RS Zainoel Abidin dan PJU Surakarta.

In 2023, the deferred expenses was Rp4.33 billion, decreased by 23.49% compared to 2022, which was Rp5.66 billion. This decrease was mainly due to additional provisions related to deferred expenses for Zainoel Abidin Hospital and Surakarta Public Street Lighting projects.

Pajak Dibayar Dimuka

Prepaid Income Tax

Jumlah pajak dibayar dimuka tahun 2023 adalah sebesar Rp5,03 miliar meningkat 149,63% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp2,02 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh restitusi atas PPN 2022 yang baru diterima di bulan Januari 2024.

In 2023, the prepaid income tax amounted to Rp5.03 billion, increased by 149.63% compared to 2022, which was Rp2.02 billion. This increase was mainly influenced by refunds for 2022 VAT, which were received in January 2024.

Aset Pajak Tangguhan

Deferred Tax Assets

Jumlah aset pajak tangguhan tahun 2023 adalah sebesar Rp70,90 miliar meningkat 2,47% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp69,19 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan provisi utamanya provisi piutang selama tahun 2023.

In 2023, the deferred tax assets amounted to Rp70.90 billion, increased by 2.47% compared to 2022, which was Rp69.19 billion. This increase was mainly influenced by additional provisions, especially provisions for receivables in 2023.

Uang Jaminan Yang Dapat Dikembalikan

Refundable Deposit

Jumlah uang jaminan yang dapat dikembalikan tahun 2023 adalah sebesar Rp5,37 miliar sama dengan jumlah di tahun 2022.

The amount of security deposit that can be returned in 2023 was Rp5.37 billion, the same amount as in 2022.

Liabilitas

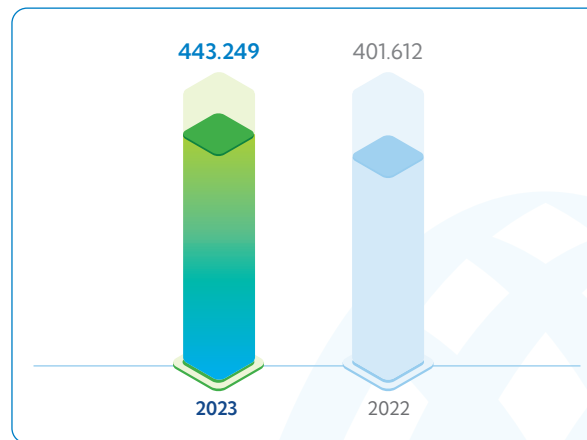
Liabilities

Total liabilitas tahun 2023 mencapai Rp443,25 miliar, mengalami peningkatan 10,37% dibandingkan total aset tahun 2022 sebesar Rp401,61 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penambahan liabilitas sewa pembiayaan terkait dengan kontrak baru sewa gedung dari periode September 2023 sampai dengan Agustus 2026. Capaian ini berada 102% di atas target RKAP 2023 sebesar Rp8 miliar.

In 2023, the total liabilities achieved Rp443.25 billion, increased by 10.37% compared to the Total Assets in 2022 of Rp401.61 billion. This increase was influenced by the addition of leasing liabilities related to new building rental contracts from September 2023 to August 2026. This achievement is 102% above the 2023 RKAP target of Rp8 billion.



Grafik Perkembangan Liabilitas (Rp juta)
Graph: Liabilities (Rp million)



Tabel Liabilitas (Rp juta)
Table: Liabilities (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Utang usaha Account payable	14.045	9.993	40,55	4.052
Utang pajak Taxes payable	3.846	3.780	1,75	66
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain Accrued expenses, provisions, and other payables	162.669	135.669	19,90	27.000
Pendapatan tangguhan Unearned income	130.836	169.932	(23,01)	(39.096)
Liabilitas sewa pembiayaan Financial lease liabilities	46.200	8.546	440,60	37.654
Pinjaman penerusan Two-step loans	55.127	55.127	0,00	0
Liabilitas imbalan kerja Employee benefits obligation	30.526	18.565	64,43	11.961
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	443.249	401.612	10,37	41.637

Utang Usaha

Account Payables

Jumlah utang usaha tahun 2023 adalah sebesar Rp14,05 miliar meningkat 40,55% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp9,99 miliar. Peningkatan sehubungan dengan pekerjaan renovasi kantor di tahun 2023.

In 2023, the total account payables amounted to Rp14.05 billion, increased by 40.55% compared to 2022, which was Rp9.99 billion. Increase in line with leasehold improvement in 2023.

Utang Pajak

Taxes Payable

Jumlah utang pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp3,85 miliar meningkat 1,75% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp3,78 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan hutang pph 21, PPH 4(2) dan PPN sejalan dengan transaksi operasional Perseroan.

In 2023, the total taxes payable was Rp3.85 billion, increased by 1.75% compared to 2022, which was Rp3.78 billion. This increase was mainly influenced by fluctuations, because of an increase in Income Tax 21, Income Tax Article 4(2), and VAT payables, in line with the Company's operational transactions.



Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain

Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables

Jumlah biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain tahun 2023 adalah sebesar Rp162,67 miliar meningkat 19,90% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp135,67 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya yang masih harus dibayar terkait dengan beban konsultan PDF di bulan Desember 2023.

The accrued expenses, provisions, and other payables in 2023 amounted to Rp162.67 billion, increased by 19.90% compared to 2022, which was Rp135.67 billion. This increase was mainly influenced by an increase in accrued expenses related to PDF consultant in December 2023.

Pendapatan Tangguhan

Unearned Income

Jumlah pendapatan tangguhan tahun 2023 adalah sebesar Rp130,84 miliar menurun 23,01% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp169,93 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh amortisasi atas pendapatan tangguhan penjaminan dan korporasi.

In 2023, the unearned income was Rp130.84 billion, decreased by 23.01% compared to 2022, which was Rp169.93 billion. The decrease was mainly due to amortization of guarantee and corporate unearned income.

Liabilitas Sewa Pembiayaan

Financial Lease Liabilities

Jumlah liabilitas sewa pembiayaan tahun 2023 adalah sebesar Rp46,20 miliar meningkat 440,60% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp8,55 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan liabilitas sewa pembiayaan terkait dengan kontrak baru sewa gedung untuk periode September 2023 sampai dengan Agustus 2026.

Total finance lease liabilities in 2023 amounted to Rp46.20 billion, increased by 440.60% compared to 2022, which was Rp8.55 billion. This increase was mainly influenced by the addition of leasing liabilities related to new building rental contracts from September 2023 to August 2026.

Pinjaman Penerusan

Two-Step Loans

Jumlah pinjaman penerusan tahun 2023 adalah sebesar Rp55,13 sama dengan jumlah di tahun 2022.

In 2023, the two-step loans amounted to Rp55.13, the same amount as in 2022.

Liabilitas Imbalan Kerja

Employee Benefits Obligations

Jumlah liabilitas imbalan kerja tahun 2023 adalah sebesar Rp30,53 miliar meningkat 64,43% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp18,57 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pengakuan akrual liabilitas imbalan kerja bulanan.

In 2023, the employee benefits obligation was Rp30.53 billion, increased by 64.43% compared to 2022, which was Rp18.57 billion. This increase was mainly influenced by the accrual of monthly employee benefits obligations.

Ekuitas

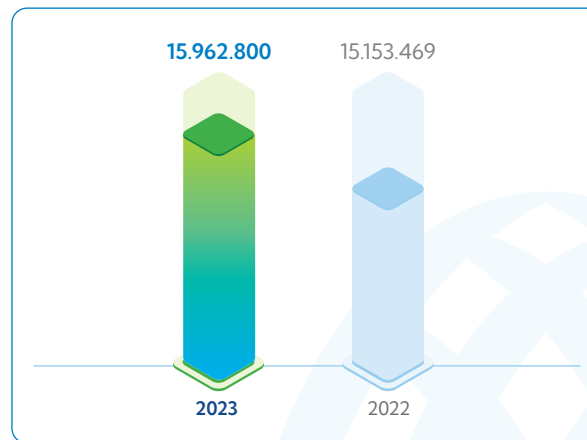
Equity

Total Ekuitas tahun 2023 mencapai Rp15,96 triliun, mengalami peningkatan 5,34% dibandingkan Total Ekuitas tahun 2022 sebesar Rp15,15 triliun. Peningkatan ini utamanya berasal dari kenaikan laba belum direalisasikan sebesar Rp 116,34 miliar atau 438,85% dari tahun 2022, dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp657,28 miliar atau 15,49% dari tahun 2022.

In 2023, the Total Equity reached Rp15.96 trillion, increased by 5.34% compared to the Total Equity in 2022 amounted to Rp15.15 trillion. This increase mainly was due to an increase in unrealized profit of Rp116.34 billion or 438.85% from 2022, and unappropriated retained earnings of Rp657.28 billion or 15.49% from 2022.



Grafik Perkembangan Ekuitas (Rp juta)
Graph: Equity (Rp million)



Tabel Ekuitas (Rp juta)
Table: Equity (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Modal saham Share capital	10.655.000	10.655.000	0	0
Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealized gain from financial assets at fair value through other comprehensive income	142.008	20.605	589,19	121.403
Keuntungan aktuarial, setelah pajak Gain from actuarial, net of tax	849	5.907	(85,63)	(5.058)
Saldo laba ditentukan penggunaannya – cadangan wajib Retained earnings appropriated – statutory reserve	264.478	228.769	15,61	35.709
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	4.900.465	4.243.188	15,49	657.277
Jumlah Ekuitas Total Equity	15.962.800	15.153.469	5,34	809.331

Modal Saham Share Capital

Jumlah modal saham tahun 2023 adalah sebesar Rp10,66 triliun sama dengan jumlah di tahun 2022.

In 2023, the share capital amounted to Rp10.66 trillion, the same amount as in 2022.

Laba Belum Direalisasi Unrealized Gain

Jumlah laba belum direalisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp142,01 miliar meningkat 589,19% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp20,61 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan *mark to market* dari Obligasi AFS.

The unrealized gain in 2023 was Rp142.01 billion, increased by 589.19% compared to 2022, which was Rp20.61 billion. This increase was mainly influenced by an increase in the mark to market of AFS Bonds.



Keuntungan Aktuarial, Setelah Pajak

Gain from Actuarial, Net of Tax

Jumlah keuntungan aktuarial, setelah pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp0,85 miliar menurun 85,63% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp5,91 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh efek OCI atas penyesuaian provisi imbalan kerja.

Total gain from actuarial, net of tax in 2023 was Rp0.85 billion, decreased by 85.63% compared to 2022, which was Rp5.91 billion. This decrease was mainly due to the OCI effect on adjustments to employee benefit provisions.

Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya – Cadangan Wajib

Retained Earnings Appropriated – Statutory Reserve

Jumlah saldo laba ditentukan penggunaannya – cadangan wajib tahun 2023 adalah sebesar Rp264,48 miliar meningkat 15,61% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp228,77 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebesar Rp35 miliar.

The retained earnings appropriated – statutory reserve in 2023 amounted to Rp264.48 billion, increased by 15.61% compared to 2022, which was Rp228.77 billion. This increase was mainly influenced by the addition of the net profit allowance for statutory reserves of Rp35 billion.

Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Unappropriated Retained Earnings

Jumlah saldo laba belum ditentukan penggunaannya – cadangan wajib tahun 2023 adalah sebesar Rp4,90 triliun meningkat 15,49% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp4,24 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh laba tahun berjalan 2023.

The unappropriated retained earnings – statutory reserve in 2023 amounted to Rp4.90 trillion, increased by 15.49% compared to 2022, which was Rp4.24 trillion. This increase was mainly influenced by income for the year in 2023.

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Profit or Loss and Other Comprehensive Income

PT PII tahun di tahun 2023 berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp835,82 miliar meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp714,17 miliar. Sedangkan, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp116,35 miliar meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp278,07 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan yang signifikan dari pendapatan usaha yang berkontribusi oleh pendapatan penjaminan sebesar Rp232,35 miliar, pendapatan penyiapan proyek & pendampingan transaksi (PDF) sebesar Rp70,53 miliar, pendapatan pengelolaan dana Rp1.009,08 miliar dan pendapatan lainnya sebesar Rp6,04 miliar. Peningkatan dari penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2023 utamanya disebabkan oleh kenaikan harga pasar obligasi atas penempatan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.

In 2023, IIGF recorded income for the year of Rp835.82 billion, increased by 17.03% compared to 2022, which was Rp714.17 billion. Meanwhile, total comprehensive income for the year in 2023 is Rp116.35 billion, an increase compared to 2022 of Rp278.07 billion. This increase was mainly influenced by a significant increase in operating income, contributed by revenue from guarantee of Rp232.35 billion, revenue from project preparation and transaction advisory of Rp70.53 billion, investment's income of Rp1,009.08 billion, and other income of Rp6.04 billion. In 2023, the increase in comprehensive income for the year was mainly due to an increase in the market price of bonds for investment, which were measured at fair value through other comprehensive income.



Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Rp juta)
Table: Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Pendapatan Revenues	1.318.005	1.088.852	21,05	229.153
Beban Usaha Operating Expenses	(482.467)	(386.216)	24,92	(96.251)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	835.539	702.636	18,91	132.903
Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefit	282	11.537	(97,56)	(11.255)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	835.821	714.173	17,03	121.648
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak Other comprehensive profit/(loss) for the year, net of tax	116.345	(278.069)	(141,84)	394.414
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	952.166	436.104	118,33	516.062

Pendapatan Revenues

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada bagian "Tinjauan Operasi per Segmen Usaha" dalam bab ini pendapatan PT PII didapatkan dari pendapatan Penjaminan, pendapatan Pengelolaan Dana, dan pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi. Jumlah pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp1,32 triliun meningkat 21,05% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp1,09 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kontribusi dari pendapatan pengelolaan dana yang meningkat disebabkan dari penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun selama tahun 2023 dan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6.7% atau 91 bps di atas rata-rata suku bunga acuan

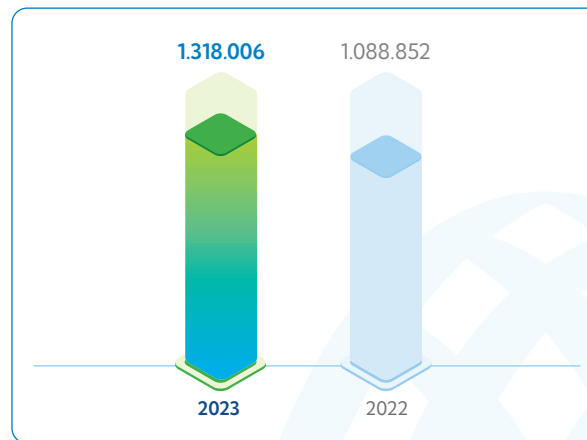
As explained in detail in the "Operations Highlight by Business Segment" section in this chapter, IIGF's revenue is derived from Guarantee revenue, income from investment, and revenue from project preparation and transaction advisory. The total revenue in 2023 was Rp1.32 trillion, increased by 21.05% compared to 2022, which was Rp1.09 trillion. This increase was mainly influenced by the contribution from investment's income, which increased due to the placement of deposits with maturity periods of more than 3 months to 1 year during 2023 and an average investment return rate of 6.7% or 91 bps above the average of reference interest rate

Tabel Pendapatan (Rp juta)
Table: Revenues (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Pendapatan Penjaminan Revenue from Guarantee	232.354	252.574	(8,01)	(20.220)
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Revenue from Project Preparation and Transaction Advisory	70.530	41.099	71,61	29.431
Pendapatan Pengelolaan Dana Income from Investments	1.009.080	793.702	27,14	215.378
Pendapatan lainnya Other income	6.042	1.477	309,00	4.564
Jumlah Pendapatan Total Revenues	1.318.006	1.088.852	21,05	229.154



Grafik Pendapatan (Rp juta)
Graph: Revenues (Rp million)



Beban Usaha

Operating Expenses

Jumlah beban usaha tahun 2023 adalah sebesar Rp482,47 miliar meningkat 24,92% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp386,22 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan beban pajak final yang seiring dengan peningkatan pendapatan pengelolaan dana tahun 2023.

In 2023, the total operating expenses amounted to Rp482.47 billion, increased by 24.92% compared to 2022, which was Rp386.22 billion. This increase was mainly influenced by the increase in final tax expenses, which was in line with the income from investment increase in 2023.

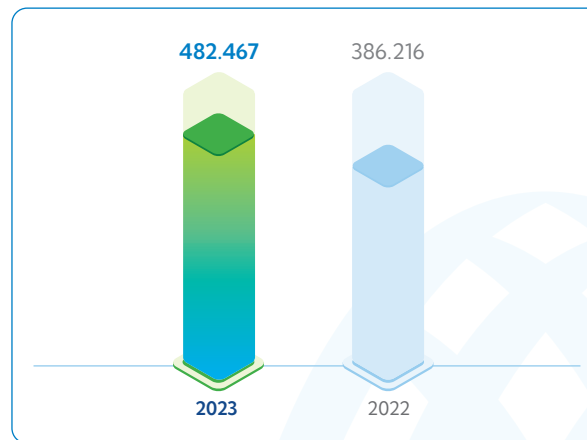
Tabel Beban Usaha (Rp juta)

Table: Operating Expenses (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	139.546	98.960	41,01	40.586
Umum dan Administrasi General and Administrative	127.059	113.441	12,00	13.618
Penjaminan Guarantee	77.192	82.379	-6,30	-5.187
Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Project preparation and transaction advisory	76.928	49.357	55,86	27.571
Pengembangan Usaha Business Development	35.617	31.258	13,95	4.359
Kerugian Penurunan Nilai Impairment Losses	16.775	2.000	738,75	14.775
Beban Bunga (Termasuk Beban Bunga Sewa Pembiayaan) Interest Expenses (Including Finance Lease Interest)	5.712	6.404	(10,81)	(692)
Penyusutan Depreciation	3.163	4.526	(30,11)	(1.363)
Amortisasi Amortization	2.145	1.774	20,91	371
(Kerugian)/Keuntungan Kurs, Bersih Foreign Exchange (Loss)/Gain, Net	64	(338)	(118,93)	402
Penghasilan Keuangan, Kotor Finance Income, Gross	(1.428)	(1.816)	(21,37)	388
Lain-lain Others	(306)	(1.729)	(82,30)	1.423
Jumlah beban usaha Total operating expenses	482.467	386.216	24,92	96.251



Grafik Beban Usaha (Rp juta)
Graph: Operating Expenses (Rp million)



Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan tahun 2023 adalah sebesar Rp835,54 miliar meningkat 18,91% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp702,64 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6,7% yang dikontribusi oleh kenaikan tingkat suku bunga deposito berjangka sejalan dengan kenaikan rata-rata suku bunga acuan.

Total profit before income tax in 2023 was Rp835.54 billion, increased by 18.91% compared to 2022, which was Rp702.64 billion. This increase was mainly due to an increase in the average rate of return on investment of 6.7%, which was contributed by an interest rate increase on time deposits, in line with the increase in the average benchmark interest rate.

Laba Tahun Berjalan Profit for the Year

Jumlah laba tahun berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp835,82 miliar meningkat 17,03% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp714,17 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan utamanya pendapatan pengelolaan dana yang disebabkan oleh penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun selama tahun 2023 dan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6.7% atau 91 bps di atas rata-rata suku bunga acuan.

The total profit for the year in 2023 was Rp835.82 billion, increased by 17.03% compared to 2022, which was Rp714.17 billion. This increase was mainly influenced by the increase of main revenue, investment's income, because of the placement of deposits with maturity periods of more than 3 months to 1 year during 2023 and an average investment return rate of 6.7% or 91 bps above the average of reference interest rate.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan di tahun 2023 adalah sebesar Rp116,35 miliar lebih besar sebesar Rp394,41 miliar dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar (Rp278,07) miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pasar obligasi atas penempatan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Total other comprehensive income for the year in 2023 was Rp116.35 billion, increased by Rp394.41 billion compared to 2022, which was (Rp278.07) billion. This increase was mainly influenced by the increase in the market price of bonds for investment, which were measured at fair value through other compressive income.



Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Comprehensive Income for the Year

Jumlah laba komprehensif tahun 2023 adalah sebesar Rp952,17 miliar meningkat 118,33% dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp436,10 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan utamanya pendapatan pengelolaan dana yang disebabkan oleh penempatan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun selama tahun 2023 dan rata-rata tingkat pengembalian investasi sebesar 6.7% atau 91 bps di atas rata-rata suku bunga acuan dan kenaikan harga pasar obligasi atas penempatan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

In 2023, total comprehensive income in 2023 was Rp952.17 billion, increased by 118.33% compared to 2022, which was Rp436.10 billion. This increase was mainly influenced by the increase of main revenue, investment's income, because of the placement of deposits with maturity periods of more than 3 months to 1 year during 2023 and an average investment return rate of 6.7% or 91 bps above the average of reference interest rate, and increase in the market price of bonds for investment, which were measured at fair value through other comprehensive income.

Analisis Arus Kas

Cash Flow Analysis

Jumlah Kas dan Setara Kas PT PII tahun 2023 adalah sebesar Rp121,49 miliar menurun 9,54% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp134,31 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan arus kas pada aktivitas investasi di tahun 2023.

In 2023, the total Cash and Cash Equivalents of IIGF amounted to Rp121.49 billion, decreased by 9.54% compared to 2022, which was Rp134.31 billion. This decline was mainly due to decrease in cash flow from investing activities in 2023.

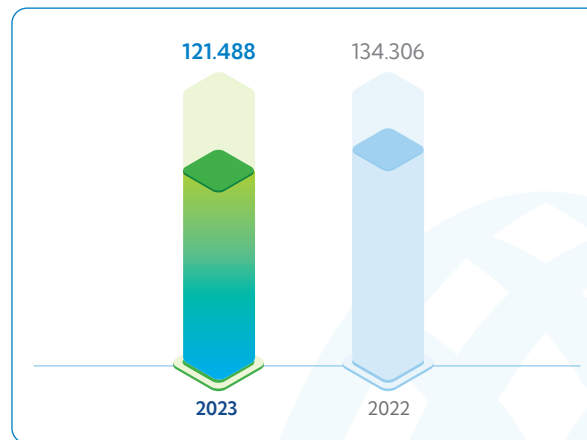
Tabel Arus Kas (Rp juta)

Table: Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	821.988	684.035	20,17	137.954
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flow used in investing activities	(676.863)	(7.344.891)	(90,78)	6.668.028
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows (used in)/provided from financing activities	(157.942)	901.215	(117,53)	(1.059.158)
Penurunan bersih kas dan setara kas Net decrease in cash and cash equivalents	(12.818)	(5.759.642)	(99,78)	5.746.824
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at beginning of the year	134.306	5.893.948	(97,72)	(5.759.642)
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at end of the year	121.488	134.306	(9,54)	(12.818)



Grafik Kas dan Setara Kas (Rp juta)
Graph: Cash and Cash Equivalents (Rp million)



Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2023 sebesar Rp821,99 miliar, meningkat 20,17% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp684,03 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan laba sebelum pajak sebesar 18,91% dibandingkan dengan tahun 2022.

The net cash flow provided from operating activities in 2023 amounted to Rp821.99 billion, increased by 20.17% from 2022, which was Rp684.03 billion. This increase was influenced by an 18.91% increase in profit before tax compared to 2022.

Tabel Arus Kas Dari Aktivitas Operasi (Rp juta)
Table: Cash Flow from Operating Activities (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Laba sebelum pajak penghasilan ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas: Profit before income tax add items not affecting cash flows:	835.539	702.636	18,91	132.903
- Beban penyusutan Depreciation expenses	3.163	4.526	(30,11)	(1.363)
- Beban kerugian penurunan nilai Impairment losses	16.775	2.000	738,75	14.775
- Beban amortisasi Amortization expenses	2.145	1.774	20,93	371
- Beban penyesuaian imbalan kerja Expense from provision for employee benefits obligation	6.057	3.387	78,82	2.670
- Beban amortisasi aset hak-guna Right-of-use assets amortization expense	18.237	18.860	(3,30)	(623)
- Beban bunga sewa pembiayaan Finance lease interest expense	1.785	2.475	(27,90)	(690)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities	883.701	735.658	20,12	148.043
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: Changes in operating assets and liabilities:	(61.713)	(51.624)	19,54	-10.089
(Kenaikan)/penurunan aset operasi: (Increase)/decrease in operating assets:				
- Piutang Usaha Account Receivables	(49.629)	(127.503)	(61,08)	77.874
- Piutang Lainnya Other Receivables	(1.560)	851	(283,29)	(2.411)



Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
- Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	(281)	3.909	(107,20)	(4.190)
- Beban Tangguhan Deferred Expenses	1.330	1.908	(30,32)	(578)
- Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Tax	(3.015)	(402)	650,01	(2.613)
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: (Decrease)/increase in operating liabilities:				
- Utang Usaha Account Payables	4.052	2.620	54,64	1.432
- Utang Pajak Taxes Payable	66	(642)	(110,26)	708
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables	27.000	70.387	(61,64)	(43.387)
- Pembayaran Manfaat Imbalan Kerja Payment of Employee Benefit	(580)	(1.567)	(62,96)	987
- Pendapatan Tangguhan Unearned Income	(39.096)	(1.185)	3.199,21	(37.911)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	821.988	684.034	20,17	137.954

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Di tahun 2023, Perseroan mencatat penggunaan kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp676,86 miliar menurun 90,78% dibandingkan tahun 2022 dengan perolehan kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp7,34 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penempatan investasi obligasi baru selama tahun 2023.

In 2023, the Company recorded a net cash flow used in investing activities of Rp676.86 billion, which decreased by 90.78% compared to 2022 with net cash flow provided from investing activities of Rp7.34 trillion. This was mainly due to a decrease in the placement of new bond investments in 2023.

Tabel Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (Rp juta)

Table: Cash Flow from Investing Activities in (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Penempatan investasi Placement for investments	(664.082)	(7.339.609)	(90,95)	6.675.527
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud Acquisition of fixed assets and intangible assets	(12.781)	(5.282)	141,97	(7.499)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flow used in investing activities	(676.863)	(7.344.891)	(90,78)	6.668.028



Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Cash Flow in Financing Activities

Di tahun 2023, kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp157,94 miliar, menurun 117,53% dibandingkan pada tahun 2022 Perseroan membukukan perolehan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp901,22 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak terdapat penambahan penerimaan modal saham selama tahun 2023.

In 2023, the net cash from financing activities amounted to Rp157.94 billion, decreased by 117.53% compared to 2022 with net cash flow provided from financing activities of Rp901.22 billion. This was mainly due to no additional share capital received in 2023.

Tabel Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (Rp juta)

Table: Cash Flow from Financing Activities in (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
Penerimaan modal saham Share capital received	-	1.085.000	(100,00)	(1.085.000)
Pembayaran dividen Dividend payment	(142.835)	(156.351)	(8,64)	13.516
Pembayaran sewa Payment for lease	(15.108)	(27.434)	(44,93)	12.326
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flow (used in)/provide from financing activities	(157.943)	901.215	(117,53)	(1.059.158)





Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Solvency and Collectability of Receivables

Sebagai BUPI yang memberikan penyediaan penjaminan, risiko likuiditas pada Perseroan juga berhubungan dengan adanya kemungkinan Perseroan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansial atas klaim yang telah diajukan maupun potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perseroan dalam perjanjian penjaminan. Perseroan mengelola dan mengawasi risiko likuiditas untuk kewajiban finansial dengan menyesuaikan portofolio investasi dengan kewajiban finansial untuk klaim yang telah diajukan atau profil jatuh tempo dari potensi klaim. Perseroan secara rutin melakukan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan likuiditas.

Analisa ini, disertai dengan kebutuhan investasi yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan investasi yang konservatif, membantu Perseroan dalam mengelola risiko likuiditas dengan tepat.

As a BUPI that provides guarantees, the Company's liquidity risk is related to the possibility of the Company being unable to fulfill its financial obligations for claims that have been filed, or potential claims on the risks covered by the Company in the guarantee agreement. The Company manages and monitors liquidity risk for financial liabilities by matching the investment portfolio with financial liabilities for filed claims or the maturity profile of potential claims. The Company regularly analyzes and identifies liquidity needs.

This analysis, along with clear investment needs in accordance with prevailing regulations and a conservative investment policy, helps the Company to manage liquidity risk appropriately.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Short-Term Solvency

Perseroan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari Rasio Kas dan Rasio Lancar untuk mengukur kemampuannya dalam memenuhi liabilitas/utang jangka pendek. Rasio Kas menjelaskan kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (aset yang paling likuid) yang dimiliki. Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan Perseroan untuk membayar utang dengan menggunakan aset lancar. Perseroan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

The Company uses liquidity ratios consisting of Cash Ratio and Current Ratio to measure its ability to fulfill short-term liabilities/debts. Cash Ratio described the Company's ability to pay off its short-term liabilities with cash and cash equivalents (the most liquid assets). Current Ratio is a ratio used to assess the Company's ability to pay debts using current assets. The Company has high liquidity in the form of cash and cash equivalents and investments.

Tabel Kinerja Rasio Likuiditas
Table: Liquidity Ratio Performance

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	8.814	10.133	(13,01)
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	7.414	8.582	(12,00)

Dari rasio-rasio likuiditas, tingkat likuiditas Perseroan pada tahun 2023 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio lancar mengalami penurunan dari 8.582 menjadi 7.414 di tahun 2023, sedangkan rasio kas mengalami penurunan dari 10.133 menjadi 8.814 di tahun 2023.

From the liquidity ratios, the Company's liquidity level in 2023 recorded a decline compared to the previous year. The current ratio has decreased from 8,582 to 7,414 in 2023, while the cash ratio has decreased from 10,133 to 8,814 in 2023.



Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Long-Term Solvency

Hingga akhir tahun 2023, Perseroan tidak memiliki utang jangka panjang yang substansial untuk mendukung kepemilikan aset. Saldo utang jangka panjang Perseroan berupa pinjaman penerusan senilai Rp55,13 miliar yang dipergunakan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas dan teknis operasi Perseroan melalui dukungan Bank Dunia (World Bank). Selebihnya adalah liabilitas imbalan kerja sebesar Rp30,53 miliar. Pokok pinjaman penerusan akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas. Selebihnya seluruh kegiatan untuk kepemilikan aset masih dibiayai oleh modal Perseroan.

Tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka Panjang dapat dilihat dari rasio solvabilitas.

Tabel Kinerja Rasio Solvabilitas
Table: Solvency Ratio Performance

Uraian Description	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease (%)
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Liabilities to Assets (%)	2,70	2,58	4,65
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Liabilities to Equity (%)	2,78	2,65	4,91

Dengan jumlah utang jangka panjang yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah aset yang besar, dapat disimpulkan bahwa Perseroan memiliki tingkat solvabilitas yang sangat baik.

Tingkat solvabilitas berdasarkan rasio liabilitas terhadap aset dan ekuitas tahun 2023 sebesar 2,70% dan 2,78%.

As of the end of 2023, the Company does not have a substantial long-term debt to support asset ownership. The balance of the Company's long-term debt is in the form of two-step loans amounting to Rp55.13 billion, which is used for the improvement and development of the Company's capacity and technical operations with the support of the World Bank. The remaining balance comes from the employee benefits obligation of Rp30.53 billion. The principal of the two-step loans will be repaid in semi-annual instalments after a grace period of nine (9) years from the date of the first withdrawal, and will mature in 2034. The Company has fulfilled the loan agreement's covenant. The rest of the activities for asset ownership are still financed by the Company's capital.

The Company's ability to fulfill its long-term liabilities is reflected in the solvency ratio.

With the insignificant amount of long-term debt compared to the amount of assets, it can be concluded that the Company has a very good rate of solvency.

The solvency level based on liabilities to assets and equity in 2023 was 2.70% and 2.78%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan

Company's Collectability Level of Receivables

Hingga akhir tahun 2023, Piutang Perseroan berasal dari piutang bunga yang belum diterima, piutang regres, piutang penjaminan, dan piutang penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Piutang Perseroan didominasi oleh piutang bunga yang belum diterima dan piutang regres yang mencakup 42,10% dan 28,10% dari total piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian telah dihitung sesuai dengan persyaratan penurunan nilai PSAK 71. Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang usaha sebesar Rp23.350.000 mengalami penurunan nilai dan telah dicadangkan Rp18.775.000. Piutang regres adalah segala pembayaran klaim yang telah dilakukan Perseroan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPB kepada BU atas proyek SPAM kota Bandar Lampung dan Pekanbaru serta Palapa Ring Timur. Piutang bunga atas regres sebesar Rp5.787.549 dicatat pada bunga yang belum diterima. Meski demikian, Perseroan tidak mengalami dinamika pada tingkat kolektibilitasnya baik kolektibilitas piutang jangka pendek maupun jangka panjang.

As of the end of 2023, the Company's receivables come from unearned interest receivables, recourse receivables, guarantee receivables, and project preparation and transaction advisory receivables. The Company's receivables were dominated by unearned interest receivables and recourse receivables which accounted for 42.10% and 28.10% of total trade receivables. Expected credit losses have been calculated in accordance with the impairment loss requirements in PSAK 71. As of 31 December 2023, trade receivables amounted to Rp23,350,000 were impaired and Rp18,775,000 have been reserved. Recourse receivables are all claim payments that have been made by the Company, due to the non-fulfilment of GCA's financial obligations to the Business Unit for the SPAM in Bandar Lampung and Pekanbaru and Palapa Ring Timur projects. Interest receivable on recourse amounted to Rp5,787,549 and was recorded as unearned interest. However, the Company did not experience any dynamics in its short-term and long-term receivables collectability level.



Struktur Modal Capital Structure

Perseroan melakukan pengelolaan modal dalam rangka melindungi kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Dengan demikian, Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Guna memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, Perseroan melakukan penelaahan dan pengelolaan struktur permodalan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perseroan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis.

Perseroan dapat mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal dengan melakukan penyesuaian jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

The Company manages its capital to protect its ability to maintain its business continuity. Thus, the Company shall provide returns to shareholders and benefits to other stakeholders, and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of such capital.

To ensure optimal capital structure and returns for shareholders, the Company reviews and manages its capital structure by considering several factors, i.e., the future capital requirements and capital efficiency of the Company, past and projected future profits, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic investment opportunities.

The Company may maintain or adjust its capital structure by adjusting the amount of dividends distributed to shareholders, returning capital to shareholders, issuing new shares, or selling assets to reduce the amount of debt.

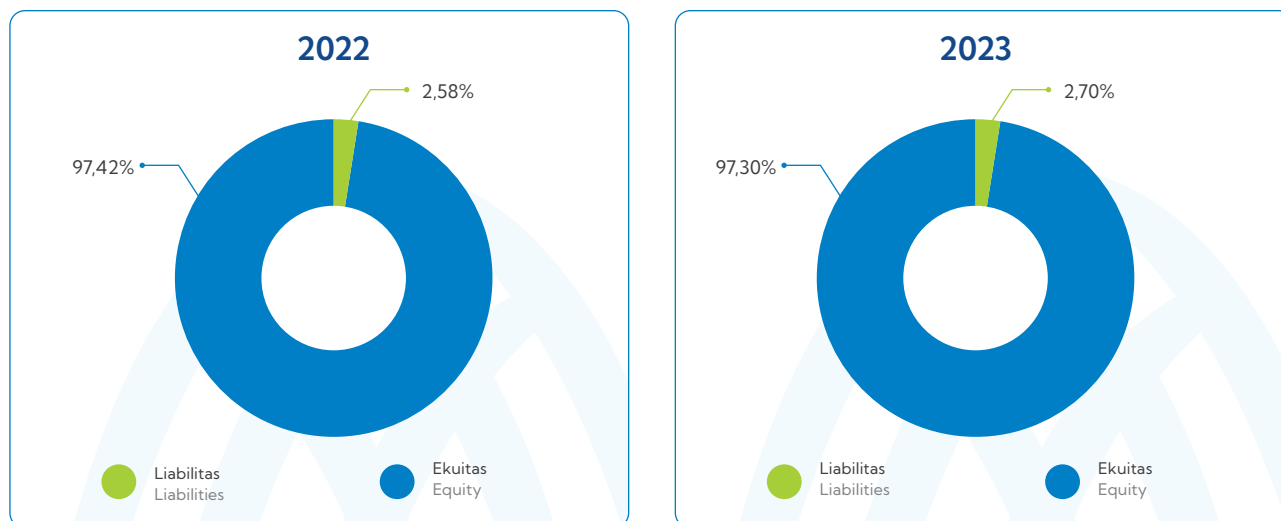
Tabel Komponen dan Komposisi Struktur Modal

Table: Capital Structure and Its Composition

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp juta) (Rp million)	%	Nominal (Rp juta) (Rp million)	%	Nominal (Rp juta) (Rp million)	%
Liabilitas Liabilities	443.249	2,70	401.612	2,58	41.637	4,89
Ekuitas Equity	15.962.800	97,30	15.153.469	97,42	809.331	95,11
Aset Assets	16.406.049	100,00	15.555.081	100,00	850.968	100,00



Grafik Komposisi Struktur Modal
Graph: Capital Structure Composition



Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan usaha saat ini dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa yang akan datang serta untuk memenuhi kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator.

The capital management policy has the objective of ensuring that the Company has an efficient capital structure, has strong capital to support the current business development strategy, and maintains business continuity in the future, as well as fulfills the capital adequacy determined by the regulator.

Dasar Pemilihan Kebijakan Struktur Modal

Basis for Choosing a Capital Structure Policy

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

To maintain or adjust its capital structure, the Company may adjust the amount of dividends distributed to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce the amount of debt.

Perseroan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perseroan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

The Company reviews and maintains its capital structure to ensure optimal capital structure and returns for shareholders, by considering the future capital requirements and capital efficiency of the Company, past and projected future profits, projected operating cash flows, projected capital expenditures, and projected strategic investment opportunities. The Company may use internal funding to reduce debt, to maintain or adjust the capital structure.



Realisasi Investasi Barang Modal Capital Expenditure Realization

PT PII melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa aset dalam penyelesaian, prasarana kantor, peralatan komputer, peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan. Secara umum, tujuan investasi barang modal yang dilakukan Perseroan adalah untuk mendukung kinerja operasional Perseroan sehingga aktivitas pekerjaan berjalan secara optimal, efektif, dan efisien.

IIGF invests in capital goods in the form of fixed assets, such as construction in progress, office infrastructure, computer equipment, office equipment, furniture, and fixture. In general, the capital expenditure has the objective to support the Company's operational performance to work optimally, effectively, and efficiently.

Investasi Barang Modal Capital Goods Investment

Pada tahun 2023 investasi barang modal PT PII berupa aset tetap, aset hak guna, serta aset takberwujud yaitu sebesar Rp11,82 miliar meningkat 822,56% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,28 miliar. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penambahan aset tetap terkait renovasi kantor di tahun 2023.

In 2023, IIGF's investment in capital goods in the form of fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets amounted to Rp11.82 billion, increased by 822.56% compared to 2022, which was Rp1.28 billion. The increase was mainly due to addition of fixed assets related to leasehold improvement in 2023.

Tabel Jenis, Tujuan, dan Nilai Investasi Barang Modal Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan Aset Takberwujud
Table: Type, Purpose, and Value of Capital Investment in Fixed Assets, Right-of-Use Assets, and Intangible Assets

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Expenditure	Realisasi Kegiatan Investasi (Rp juta) Investment Realization (Rp million)		Kenaikan/ Penurunan Increase/ Decrease (%)
	2023	2022	
Aset Kepemilikan Langsung Direct Ownership Assets			
- Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	10.142	680	1.391,47
- Prasarana kantor Leasehold improvement	614	-	100,00
- Peralatan komputer Computer equipment	841	493	70,59
- Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Office equipment, furniture, and fixtures	221	108	104,63
Jumlah Total	11.818	1.281	822,56
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets			
- Gedung Kantor Office Building	50.978	-	(100,00)
Aset Tak Berwujud Non-Tangible Assets			
- Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	482	3.852	(87,49)
- Piranti Lunak Software	480	149	222,15
Sub Jumlah Subtotal	963	4.001	(75,93)
Total Realisasi Investasi Total Investment Realization	12.781	5.282	141,97

Perseroan melakukan realisasi investasi barang modal dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud yang digunakan untuk operasional Perseroan, di mana seluruhnya dibeli dengan sumber dana yang berasal dari dana sendiri.

The Company realized investment in capital goods in the form of fixed assets and intangible assets used for the Company's operations, in which everything were purchased with own fund.



Dengan capaian realisasi investasi di tahun 2022, maka jumlah Aset Tetap dan Aset Takberwujud PT PII di tahun 2023 adalah sebesar Rp12,78 miliar meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp5,28 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan utamanya dikarenakan penambahan aset terkait dengan renovasi kantor di tahun 2023.

In 2022, under the achievement of investment realization, the total Fixed Assets and Intangible Assets of IIGF amounted to Rp12.78 billion, increased compared to 2022 of Rp5.28 billion. The increase was mainly due to additional assets related to leasehold improvement in 2023.

Tabel Aset Tetap (Rp juta)

Table: Fixed Assets (Rp million)

Uraian Description	Saldo awal Beginning balance	Penambahan Additions	Pelepasan Disposals	Reklasifikasi Reclassifica- tion	Saldo akhir Ending balance
Harga Perolehan Acquisition Cost					
Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	-	10.142	-	(9.992)	151
Prasarana kantor Leasehold improvement	20.868	614	-	9.992	31.474
Peralatan komputer Computer equipment	14.214	841	-	-	15.055
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Office equipment, furniture, and fixtures	11.030	221	-	-	11.251
Sub Jumlah Subtotal	46.112	11.818	-	-	57.930
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation					
Prasarana kantor Leasehold improvement	(20.364)	(909)	-	-	(21.273)
Peralatan komputer Computer equipment	(10.279)	(1.987)	-	-	(12.266)
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan Office equipment, furniture, and fixtures	(10.573)	(266)	-	-	(10.839)
Sub Jumlah Subtotal	(41.216)	(3.163)	-	-	(44.379)
Nilai Buku Value	4.896	8.655	-	-	13.551

Tabel Aset Takberwujud (Rp juta)

Table: Intangible Assets (Rp million)

Uraian Description	Saldo awal Beginning balance	Penambahan Additions	Pelepasan Disposals	Reklasifikasi Reclassifica- tion	Saldo akhir Ending balance
Harga Perolehan: Acquisition Cost:					
Gedung Kantor Office Building					
Aset dalam penyelesaian Construction in progress assets	49	482	-	(434)	97
Piranti lunak Software	13.863	480		434	14.778
Jumlah Harga Perolehan Total Acquisition Cost					
Akumulasi Amortisasi: Amortization Accumulation:					
Piranti Lunak Software	(8.442)	(2.145)	-	-	(10.588)
Nilai Buku Value	5.470	(1.183)	-	-	4.287



Ikatan Material Investasi Barang Modal

Material Commitments for Capital Expenditure Investment

Hingga akhir tahun 2023, PT PII tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai tujuan dari ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, dan mata uang yang menjadi denominasi.

As of the end of 2023, IIGF has no material commitments for capital expenditure investment. Therefore, there is no information on the purpose of the commitments, the source of funds to fulfill the commitments, and the currency of denomination.

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2024

Comparison between 2023 Target and Realization and Year 2024 Performance Projection

Perbandingan Laba Rugi dan Posisi Keuangan Target RKAP 2023 dan Realisasi 2023, serta Proyeksi RKAP 2024.

Comparison of Profit and Loss and Financial Position of 2023 RKAP Target and 2023 Realisation, and 2024 RKAP Projection.

Target, Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Laba Rugi

Target, Realization, and Projections of Income and Profit or Loss

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pendapatan dan Laba Rugi Tahun 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 (Rp miliar)

Table: Comparison between 2023 Target and Realization of Income and Profit or Loss and 2024 Projections (Rp billion)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 RKAP Target	Realisasi 2023 Realization 2023	Target RKAP 2024 2024 RKAP Target	Realisasi 2023: Target RKAP 2023 Realization: 2023 RKAP Target	Proyeksi 2024 Terhadap Realisasi 2023 2024 Forecast to 2023 Realization
Pendapatan usaha Operating revenues	1.251,30	1.318,01	1.384,46	105%	105%
Beban usaha Operating expenses	(478,36)	(482,47)	(515,68)	101%	106%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	772,94	835,54	868,78	108%	104%
Manfaat pajak penghasilan Income tax benefit	16,29	0,28	15,62	2%	5579%
Laba tahun berjalan Profit for the year	789,23	835,82	884,4	106%	106%
Laba komprehensif tahun berjalan Comprehensive income for the year	771,14	952,17	900,3	123%	95%



Realisasi pendapatan usaha tahun 2023 tercapai sebesar Rp1,32 triliun atau 105% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2023 sebesar Rp1,25 triliun. Sedangkan, untuk target RKAP 2024, PT PII memproyeksikan pendapatan usaha sebesar Rp1,38 triliun atau sama dengan realisasi tahun 2023.

Adapun realisasi laba tahun berjalan 2023 tercapai sebesar Rp0,84 triliun atau 106% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2023 sebesar Rp0,79 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2024, PT PII memproyeksikan laba tahun berjalan sebesar Rp0,88 triliun atau tumbuh hingga 106% dari realisasi tahun 2023.

In 2023, the operating revenues amounted to Rp1.32 trillion or 105% of the 2023 RKAP target, which was Rp1.25 trillion. For 2024 RKAP Target, IIGF projected to achieve operating revenues of Rp1.38 trillion, or the same amount as the realization in 2023.

In 2023, the profit for the year amounted to Rp0.84 trillion or 106% of the 2023 RKAP target, which was Rp0.79 trillion. For 2024 RKAP Target, IIGF projected to achieve profit for the year of Rp0.88 trillion, or growing up to 106% of the realization in 2023.

Target, Realisasi dan Proyeksi Posisi Keuangan

Target, Realization, and Projections of Financial Position

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Posisi Keuangan 2023 serta Proyeksi Tahun 2024 (Rp miliar)

Table: Comparison of 2023 Financial Position Target and Realization and 2024 Projections (Rp billion)

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 RKAP Target	Realisasi 2023 Realization 2023	Target RKAP 2024 2024 RKAP Target	Realisasi 2023: Target RKAP 2023 2023 Realization: 2023 RKAP Target	Proyeksi 2024 Terhadap Realisasi 2023 2024 Forecast to 2023 Realization
Aset Assets	16.247,15	16.406,05	17.194,60	101%	105%
Liabilitas Liabilities	435,04	443,25	491,65	102%	111%
Ekuitas Equity	15.812,11	15.962,80	16.702,95	101%	105%
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	16.247,15	16.406,05	17.194,60	101%	105%

Pada posisi keuangan, realisasi aset tahun 2023 tercapai sebesar Rp16,41 triliun atau 101% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2023 atas aset sebesar Rp16,25 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2024, PT PII memproyeksikan aset sebesar Rp17,19 triliun atau meningkat 105% dari realisasi tahun 2023. Realisasi ekuitas tercapai sebesar Rp15,96 triliun atau 101% jika dibandingkan dengan penetapan target RKAP 2023 atas ekuitas sebesar Rp15,81 triliun. Sedangkan untuk target RKAP 2024, PT PII memproyeksikan ekuitas sebesar Rp16,70 triliun atau meningkat hingga 105% dari realisasi tahun 2023.

In 2023, in terms of financial position, the assets amounted to Rp16.41 trillion or 101% of the 2023 RKAP target, which was Rp16.25 trillion. For 2024 RKAP Target, IIGF projected to have assets of Rp17.19 trillion, or growing up to 105% of the realization in 2023. The equity achieved Rp15.96 trillion or 101% of the 2023 RKAP target, which was Rp15.81 trillion. For 2024 RKAP Target, IIGF projected to achieve equity of Rp16.70 trillion, or growing up to 105% of the realization in 2023.



Target, Realisasi dan Proyeksi Struktur Modal

Target, Realization, and Projection of Capital Structure

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal 2023 serta Proyeksi Tahun 2024

Table: Comparison of 2023 Capital Structure Target and Realization and 2024 Projections

Uraian Description	Target RKAP 2023 2023 RKAP Target		Realisasi 2023 2023 Realization		Realisasi 2023: Target RKAP 2023 Realisasi 2023: Target RKAP 2023	Proyeksi 2024 2024 Projections	
	Nominal (Rp miliar) (Rp billion)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp miliar) (Rp billion)	Komposisi Composition (%)		Nominal (Rp miliar) (Rp billion)	Komposisi Composition (%)
Liabilitas Liabilities	435,04	2,68%	443,25	2,70	102%	491,65	2,86%
Ekuitas Equity	15.812,11	97,32%	15.962,80	97,30	101%	16.702,95	97,14%
Aset Assets	16.247,15	100,00	16.406,05	100,00	101%	17.194,60	100,00

Realisasi Struktur Modal tahun 2023 adalah sebesar Rp16,41 triliun dengan pencapaian 101% dari target RKAP 2023. Pencapaian ini didukung oleh kenaikan saldo laba selama tahun 2023. Sedangkan untuk target RKAP 2024, PT PII memproyeksikan struktur modal sebesar Rp17,19 triliun atau meningkat hingga 101% dari realisasi tahun 2023.

In 2023, the Capital Structure amounted to Rp16.41 trillion, or 101% of the 2023 RKAP target. This achievement was supported by an increase in retained earnings in 2023. For 2024 RKAP Target, IIGF is projected to achieve a capital structure of Rp17.19 trillion, or increased up to 101% of the realization in 2023.

Proyeksi Kebijakan Dividen

Forecast of Dividend Policy

Terkait proyeksi kebijakan dividen diputuskan mengacu pada Keputusan RUPS didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The projection of dividend policy shall refer to the GMS Resolution, based on the prevailing laws and regulations.



Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Dividend Sharing Policy

PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara, di mana modal ditempatkan dan disetor adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham. Dengan demikian, pembagian dividen sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Republik Indonesia. Besaran dividen yang didistribusikan kepada Pemegang Saham ditentukan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan selaku RUPS.

IIIGF is a State-Owned Enterprise, in which the issued and paid-up capital is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia as a shareholder. Therefore, the dividend distributed fully belongs to the Government of the Republic of Indonesia. The amount of dividends distributed to Shareholders is determined based on the decree of the Ministry of Finance as the GMS.

Pembagian Dividen Di Tahun 2022 dan 2023

Dividend Distribution in 2022 and 2023

Pada tahun 2023, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No.22 tanggal 19 Mei 2023, Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2022 sebesar 20% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp142.834.724.200 yang telah dibayarkan pada 9 Juni 2023.

In 2023, based on the Deed of Notary Arry Supratno, S.H., No. 22 dated 19 May 2023, the Shareholders, through the Company's Annual General Meeting of Shareholders on 19 May 2023, have approved the dividend distribution for 2022 amounting to 20% of the Company's net profit, or equivalent to Rp142,834,724,200, which was paid on 9 June 2023.

Pada tahun 2022, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 22 tanggal 20 Juni 2022, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2021 sebesar 25% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp156.350.534.000 atau yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2022.

In 2022, based on the Deed of Notary Arry Supratno, S.H., No. 22 dated 20 June 2022, the Shareholders, via the Company's Annual General Meeting of Shareholders on 20 June 2022, have approved the dividend distribution for 2021 amounting to 25% of the Company's net profit, or equivalent to Rp156,350,534,200, which was paid on 29 June 2022.

Tabel Pembagian Dividen tahun buku 2022-2023

Table: Dividend Distribution for the 2022-2023 Fiscal Year

Keterangan Description	2023	2022
Total Dividen (Rp juta) Total Dividend (Rp million)	142.835	156.351
Jumlah Saham (lembar) Shares	10.655.000	10.655.000
Rasio Pembayaran Dividen Ratio of Dividend Payment	20%	25%
Dividen per Saham (Rp) Dividend Per Share (Rp)	0,01	0,01
Tanggal Pengumuman Dividen Date of Dividend Announcement	19 Mei 2023 May 19, 2023	20 Juni 2022 June 20, 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Date of Dividend Payment	9 Juni 2023 June 9, 2023	29 Juni 2022 June 29, 2023



Kontribusi kepada Negara Contribution to the State

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan yang dibebankan bagi setiap Wajib Pajak di negara ini akan dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk digunakan sebagai pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, tak terkecuali pengeluaran yang bertujuan dengan pembangunan negara.

Taxes have a key role in the state's life, because the levies charged for each taxpayer in this country will be used for the people welfare and prosperity, including as state revenue to finance all expenses, which include expenses for the development of the state.

PT PII sebagai salah satu BUMN memiliki peran sebagai *agent of value creator* dan *agent of development* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke Negara. Oleh karena itu, komitmen PT PII kepada Negara terwujud dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai Wajib Pajak melalui pembayaran pajak serta dividen. Jumlah setoran pajak tahun 2023 sebesar Rp188.158 juta meningkat 35,24% dari tahun 2022 sebesar Rp139.546 juta. Peningkatan terutama dipengaruhi oleh beban pph final.

IIGF, as one of the SOEs, plays a role as an agent of value creator and agent of development which shall be able to contribute revenues to the State. Therefore, IIGF's contribution to the State is realized in compliance with the Company's obligations as a Taxpayer via the payment of taxes and dividends. In 2023, tax payments amounted to Rp188,158 million, increased by 35.24% compared to 2022, which was Rp139.546 million. The increase was mainly influenced by final income tax expense.

Sebagai Pemotong Pajak, Perseroan secara aktif berperan serta dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak-pajak seperti pph 21, 22, 23, 4 ayat 2, 26 dan ppn pungut dan *offshore*.

As a Tax Withholder, the Company actively participates in withholding, depositing, and reporting the taxes, such as income tax articles 21, 22, 23, 4 paragraph 2, and 26, and VAT collected, and offshore.

Tabel Setoran Pajak (Rp juta)
Table: Tax Payment (Rp million)

Jenis Pajak Tax	2023	2022	Peningkatan/Penurunan Increase/Decrease	
			%	Nominal
PPH Final Final Income Tax	139.546	98.960	41,01	40.586
PPH 21 Income Tax 21	35.804	28.719	24,67	7.084
PPH 22, 23, 4 ayat 2 dan 26 Income Tax Articles 22, 23, 4 paragraphs 2, and 26	3.249	3.165	2,67	85
PPN pungut dan <i>offshore</i> VAT collected and offshore	9.559	8.288	15,34	1.271
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Paid	188.158	139.132	35,24	49.026

Selain pembayaran pajak kepada Negara, adapun kontribusi lain PT PII terhadap Negara secara tidak langsung melalui peningkatan APBN yaitu PT PII telah menyumbang dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2023. Pembahasan mengenai pembagian dividen telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya yaitu bagian Kebijakan Dividen.

In addition to paying taxes to the State, IIGF's other contribution to the State is indirectly via an increase in the State Budget, i.e., IIGF has contributed dividends to the Government of the Republic of Indonesia in 2023. The dividend distribution has been described in the previous sub-chapter, i.e., the Dividend Policy.

PT PII tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama 3 tahun terakhir.

IIGF received no guilty verdict from the highest tax court regarding any tax matters for the last 3 years.



Aspek Pemasaran Marketing Aspect

Sesuai dengan mandat Pemerintah yang tertuang dalam PP No. 35/2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.50/2016 tentang Perubahan Kedua atas Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua yang isinya adalah ketiga mandat: (1) memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur; (2) melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional; dan 3) memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah.

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah tersebut, PT PII terus melanjutkan pengembangan perluasan lingkup atas kegiatan usaha dari tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan Penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantee*) di bidang infrastruktur dan selain infrastruktur, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan proyek sesuai penugasan Pemerintah. Beberapa pengembangan usaha tersebut antara lain:

1. PT PII telah melaksanakan kegiatan pendampingan atas persiapan dan pelaksanaan transaksi proyek KPBU melalui penugasan *Project Development Facility* (PDF) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sejak tahun 2018, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan tidak lagi hanya terbatas pada penjaminan KPBU, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap persiapan hingga pelaksanaan transaksi proyek KPBU di Indonesia.
2. PT PII melaksanakan Jaminan Pemerintah Bersama Menteri Keuangan atas risiko gagal bayar dari Badan Usaha Milik Negara/BUMN yang melakukan pinjaman dan obligasi untuk pengembangan infrastruktur. Pemberian Jaminan Pemerintah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan/PMK No. 101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama Atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar Dari Badan Usaha Milik Negara Yang Melakukan Pinjaman Dan/Atau Penerbitan Obligasi Untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.
3. Pada tahun 2020, secara formal terlibat aktif dalam sinergi Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan penyediaan infrastruktur KPBU melalui Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia sesuai Nota Kesepakatan 7 Kementerian/Lembaga pada 18 September 2020.

In accordance with the Government's mandate as stipulated in Government Regulation No. 35/2009, as amended by Government Regulation No. 50/2016 on the Second Amendment to the Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company (Persero) in the Infrastructure Guarantee sector, as amended by Government Regulation No. 55 of 2020 on the Second Amendment, which contains three mandates: (1) Providing sovereign guarantee in the infrastructure sector; (2) Conducting activities related to the sovereign guarantee implementation, as well as other activities related to the project development to support the national economy; and 3) Providing sovereign guarantee in other sectors' financing in addition to infrastructure based on Government's assignments.

As an implementation of the Government Regulation, IIGF develops the expansion of the scope of business activities from previous years by providing sovereign guarantees in the field of infrastructure and non-infrastructure, as well as other activities related to project development as assigned by the Government. The business development includes:

1. IIGF has carried out assistance for the preparation and implementation of PPP project transactions via the assignment of the Project Development Facility (PDF) from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Since 2018, the scope of the Company's business activities is no longer limited to PPP guarantees, but also assistance, both in the preparation stage and the transaction phase for PPP projects in Indonesia.
2. IIGF is engaged in the provision of Sovereign Guarantee with the Minister of Finance for the risk of default of State-Owned Enterprises/SOEs that make loans and bonds for infrastructure development. The provision of the Sovereign Guarantee is in accordance with the Minister of Finance Regulation/PMK No. 101/PMK.08/2018 on the Procedures for Providing and Implementing Joint Sovereign Guarantees or Through Infrastructure Guarantee Business Entities against the Risk of Default from State-Owned Enterprises that Take Out Loans and/or Issue Bonds to Finance Infrastructure Provision.
3. In 2020, formally involved in the synergy of Ministries/ Institutions to implement PPP infrastructure provision via the Joint Office of PPP of the Republic of Indonesia in accordance with the Memorandum of Understanding of 7 Ministries/Institutions on 18 September 2020.



4. PT PII juga berperan serta dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberian Penjaminan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program PEN. Pemberian penjaminan tersebut diatur dalam PMK No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 211/2020") dan PMK 98/2020.
5. Berdasarkan PMK No. 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ("PMK 30/2021"), PT PII kembali mendapat perluasan mandat untuk memberikan penjaminan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan PSN dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan PSN. Terkait dengan pemanfaatan PMN PEN untuk penjaminan sesuai dengan PMK 211/2020.
6. Dalam rangka mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Menteri Keuangan bersama-sama PT PII menyediakan Penjaminan Infrastruktur atas kewajiban finansial PJPK yang ditimbulkan oleh risiko infrastruktur dan tertuang dalam Perjanjian KPBU IKN untuk dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan pemerintah.
7. Pada tahun 2023, PT PII melaksanakan penugasan Pemerintah memberikan penjaminan kepada BUMN PT RNI dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Penugasan tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan/KMK No. 151/KM.9/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Penugasan Kepada PT PII Untuk Melakukan Penjaminan Pemerintah Secara Bersama atas Pinjaman PT RNI dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
8. Selain itu, berdasarkan KMK No. 239/KM.8/2023 tanggal 28 Desember 2023 PT PII memperoleh penugasan untuk melakukan Penjaminan Pemerintah secara bersama atas Pinjaman PT KAI untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung ("KCJB"). Hal ini diatur dalam PMK 89/2023 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana KCJB diundangkan pada tanggal 11 September 2023.
4. IIGF also participates in the National Economic Recovery (PEN) Program via the provision of Sovereign Guarantees to State-Owned Enterprises implementing the PEN program. The provision of these guarantees is regulated in PMK No. 211/PMK.08/2020 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantees for State-Owned Enterprises for National Economic Recovery Program Implementation ("PMK 211/2020") and PMK 98/2020.
5. Pursuant to PMK No. 30/PMK.08/2021 on the Procedures for Providing Central Sovereign Guarantees to Accelerate the National Strategic Projects (PSN) ("PMK 30/2021"), PT PII has again received an expanded mandate to provide guarantees for Political Risks that may obstruct the PSN and may have a financial impact on the Business Entities implementing the PSN. On the utilization of PEN PMN for guarantees in accordance with PMK 211/2020.
6. To support the development of the Capital City of Nusantara in North Penajam Paser, East Kalimantan, the Ministry of Finance issued PMK 220/PMK.08/2022 on the Government Support for Public Private Partnership and Creative Financing to Accelerate Infrastructure Provision in the Capital City of Nusantara. The Minister of Finance, in collaboration with IIGF, provides Infrastructure Guarantee for GCA's financial obligations arising from infrastructure risks and contained in the IKN's PPP Agreement to be implemented based on the sovereign guarantee agreement.
7. In 2023, IIGF carried out the Government's assignment to provide guarantees to SOE PT RNI in the context of organizing the Government Food Reserve. The assignment refers to the Decree of the Minister of Finance/KMK No. 151/KM.9/2023 dated 4 September 2023 on the Assignment to IIGF to Perform Joint Sovereign Guarantee for the Loan of PT RNI in Implementing the Government Food Reserve.
8. In addition, pursuant to KMK No. 239/KM.8/2023 dated 28 December 2023, IIGF was assigned to provide joint Sovereign Guarantee for PT KAI's Loan to Accelerate the Implementation of Infrastructure and Facilities for Fast Trains between Jakarta and Bandung ("KCJB"). This is regulated in PMK 89/2023 on the Procedures for Sovereign Guarantee for the Acceleration of the KCJB Infrastructure and Facilities promulgated on 11 September 2023.



Selain melaksanakan perluasan bidang usaha, PT PII melakukan inisiatif strategis bersama *development partners* dan melakukan penguatan kepada mitra perusahaan baik melalui Nota Kesepakatan maupun program kolaborasi bersama melalui 3 program utama, antara lain:

1. Pengembangan Proyek

Aktivitas pengembangan proyek bertujuan untuk mendapatkan *pipeline* proyek yang kredibel untuk proses penjaminan dilakukan, dilakukan melalui sosialisasi dan penyaringan potensi *pipeline* dengan melibatkan kantor vertikal Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. PT PII juga mengembangkan PPP *Smart Hub*, sebuah *platform* untuk pengembangan KPBU skala kecil yang melibatkan Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Nasional dan Internasional, Bank Pembangunan Daerah, asosiasi pelaku industri, dan *development partners*. Diversifikasi ke KPBU sektor baru juga dilakukan dengan melakukan beberapa program penguatan kapasitas baik dari sisi kesiapan sektor dan PJP.

2. Penguatan Struktur Penjaminan

Penyiapan struktur penjaminan merupakan aktivitas penting dalam memastikan aspek *bankability* dan *credit worthiness* dapat tercapai. PT PII secara aktif melakukan penguatan struktur penjaminan dan mitigasi risiko untuk sektor KPBU eksisting dan sektor baru dengan mitra strategis PJP, perbankan dan investor. PT PII juga melakukan peninjauan kerjasama *co/re guarantee* dengan lembaga multilateral dan bilateral. Melanjutkan inisiatif ESG bersama Kementerian Keuangan yang sudah dimulai sejak tahun 2022, PT PII menyusun *framework* dan mempersiapkan implementasi evaluasi penyiapan proyek PDF dan evaluasi penjaminan berbasis ESG. Selain itu, PT PII menjajaki upaya penguatan mekanisme regres penjaminan proyek daerah melalui penerapan skema pemulihan piutang regres penjaminan melalui pemotongan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) daerah (skema *intercept regress*).

3. Kolaborasi Strategis dalam Penguatan Kemitraan Bisnis Perusahaan

Beberapa jenis kolaborasi penting dilakukan oleh PT PII, diantaranya kerjasama dengan *development partners* untuk *matchmaking* bantuan penyiapan proyek (*technical assistant*) dan *capacity building* berskala internasional, kerjasama penguatan kapabilitas PJP (*capability building*) dalam pembiayaan kreatif pada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan sebagai mitra bisnis utama perusahaan, dan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dalam pengembangan instrumen pasar modal untuk mendukung pembiayaan kreatif pada sektor infrastruktur publik.

In addition to carrying out the expansion of business sectors, IIGF carries out strategic initiatives with development partners and strengthens partner companies both through Memorandum of Understanding(s) and joint collaboration through 3 main programs, among others:

1. Project Development

Project development activities have the objective of obtaining a credible project pipeline for the guarantee process, carried out through socialization and screening of potential pipelines by involving the vertical offices, i.e., the Ministry of Finance and Bank Indonesia. IIGF also developed PPP Smart Hub, a platform for small-scale PPP development involving Local Governments, National and International Financial Institutions, Regional Development Banks, industry associations, and development partners. Diversification into new PPP sectors is also conducted by holding several capacity building programs both in terms of sector readiness and GCA.

2. Strengthening Guarantee Structuring

The preparation of the guarantee structure is important to ensure bankability and creditworthiness aspects can be achieved. IIGF actively strengthens the guarantee structure and risk mitigation for the existing PPP sector and new sectors with GCA strategic partners, banks, and investors. IIGF is also exploring co-/re-guarantee cooperation with multilateral and bilateral institutions. Continuing the ESG initiative with the Ministry of Finance that has started since 2022, IIGF developed a framework and prepared the PDF project preparation evaluation and ESG-based guarantee evaluation. In addition, IIGF is exploring efforts to strengthen the local project guarantee regress mechanism via the implementation of a guarantee regress receivables recovery scheme by cutting regional Transfer to Region and Village Fund (TKDD) (intercept regress scheme).

3. Strategic Collaboration to Strengthen the Company's Business Partnership

IIGF has carried out several types of important collaborations, including cooperation with development partners for matchmaking of project development assistance (technical assistant) and international capacity building, cooperation to strengthen the capability of GCA (capability building) in creative financing at the Ministry of PUPR and the Ministry of Transportation as the company's main business partners, and cooperation with the Indonesia Stock Exchange in developing capital market instruments to support creative financing in the public infrastructure sector.



Pangsa Pasar Market Share

Pada tahun 2023, strategi pengembangan *pipeline* KPBU meliputi beberapa tahapan antara lain: *initial project identification*, *scanning* terhadap potensi proyek-proyek KPBU dari berbagai sumber yang menghasilkan *Longlist Projects* dan *Shortlist Project*, dan pelaksanaan *pre-screening* yang merupakan proses persiapan pelaksanaan penyingkiran/*screening* yang berfokus pada aspek kesiapan dokumentasi proyek, komitmen PJPK, identifikasi profil risiko proyek, potensi atas keberlanjutan proyek sampai dengan tahapan proses penjaminan diselesaikan. PT PII terus memperkuat pangsa pasar PT PII, yang terdiri dari:

1. Kementerian/Lembaga/Badan yang sesuai mandatnya melaksanakan pengembangan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU dan *blended financing*.
2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengembangan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU baik KPBU reguler dan KPBU skala kecil, penerbitan obligasi daerah, dan *blended financing*.
4. BUMN/BUKD/Perguruan Tinggi Negeri/Lembaga Penyiaran Publik/Badan Layanan Umum yang sesuai regulasi sektoral dapat bertindak mewakili pemerintah dalam kontrak kerjasama investasi yang melaksanakan skema pembiayaan kreatif, antara lain kemitraan KPBU, dan *blended financing*.
5. BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur publik dan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya menerbitkan obligasi, pinjaman kepada lembaga multilateral atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

Pada tahun 2023, PT PII menerima permohonan pendampingan penjaminan proyek dan formulir penyingkiran proyek sebanyak 11 proyek yang terdiri dari 5 sektor baru, antara lain sektor Sumber Daya Air dan Irigasi, Kesehatan, Transportasi (Bandar Udara, Terminal dan Pelabuhan) dan Sistem Pengelolaan Persampahan dan/atau Limbah Berbahaya dan Beracun serta Perumahan Rakyat. Selain itu, pendampingan penjaminan yang dilakukan tidak berfokus pada wilayah Jawa dan Sumatera, melainkan di wilayah timur Indonesia antara lain 8 proyek daerah dengan sebaran wilayah di Lombok Tengah dan Lombok Timur, Balikpapan, Samarinda, Denpasar, Tabanan, dan Bitung.

Adapun daftar *Screening Form* (SF) KPBU yang telah disampaikan oleh PJPK sebagaimana tabel di bawah ini.

In 2023, the PPP pipeline development strategy includes several stages: initial project identification, scanning of potential PPP projects from various sources that result in Longlist Projects and Shortlist Projects, and pre-screening, which is a preparatory process for screening that focuses on aspects of project documentation readiness, GCA commitment, identification of project risk profiles, potential for project sustainability until the guarantee process stage is completed. IIGF keeps strengthening the Company's market share, which consists of:

1. Ministries/Institutions/Agencies, that in accordance with their mandate, conduct public infrastructure development through creative financing schemes, including PPP partnerships and blended financing.
2. Ministries/Institutions/Local Governments that implement National Strategic Projects in accordance with prevailing regulations.
3. Local Governments that implement public infrastructure development via creative financing schemes, including PPP partnerships, both regular PPP and small-scale PPP, local bond issuance, and blended financing.
4. SOEs/Local-Owned Enterprises/State Universities/Public Broadcasting Institutions/Public Service Agencies that, in accordance with sectoral regulations, can act on behalf of the government in investment cooperation contracts with creative financing schemes, including PPP partnerships and blended financing.
5. SOEs that have been assigned by the government to provide public infrastructure and government programs by issuing bonds, loans to multilateral institutions, or loans to financial institutions.

In 2023, IIGF received 11 requests for project guarantee assistance and project screening forms, which consists of 5 new sectors, including Water Resources and Irrigation, Health, Transportation (Airports, Terminals, and Ports) and Waste Management Systems and/or Hazardous and Toxic Waste, as well as Public Housing. In addition, the guarantee assistance carried out does not focus on the Java and Sumatra regions, but in the Eastern Indonesia, including 8 local projects in Central Lombok and East Lombok, Balikpapan, Samarinda, Denpasar, Tabanan, and Bitung.

The list of PPP Screening Forms (SF) that have been submitted by GCA is shown in the table below.



No.	Nama Proyek Project Name	Tanggal Perolehan Date Obtained
1	Pelabuhan Baubau Baubau Port	13 Januari 2023 January 13, 2023
2	Waste Management (WM) Piyungan	16 Januari 2023 January 16, 2023
3	Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis Toll Road	14 Juni 2023 June 14, 2023
4	Daerah Irigasi (DI) Komerling Komerling Irrigation Area (DI)	30 Agustus 2023 August 30, 2023
5	Tol Gilimanuk – Mengwi Gilimanuk – Mengwi Toll Road	8 Oktober 2023 October 8, 2023
6	RSUD Samarinda Samarinda Local Hospital	20 September 2023 September 20, 2023
7	Alat Penerangan Jalan (APJ) Ngawi Ngawi Street Lighting Equipment (APJ)	11 Agustus 2023 August 11, 2023
8	Bandar Udara Singkawang Singkawang Airport	28 November 2023 November 28, 2023
9	Terminal Tipe A Purabaya Purabaya Terminal Type A	29 November 2023 November 29, 2023
10	Relokasi RSUD MHZ Sampang Relocation of Sampang MHZ Local Hospital	8 Desember 2023 December 8, 2023
11	Jembatan Sitingau Lauik Sitingau Lauik Bridge	20 Desember 2023 December 20, 2023

PT PII telah menjamin 50 proyek yang terdiri dari 41 proyek penjaminan infrastruktur dan 9 penjaminan non infrastruktur dengan total nilai investasi proyek yang dijamin sebesar Rp497 triliun. Selain itu, PT PII juga telah menerbitkan 27 sertifikat penjaminan korporasi dalam rangka PEN dan penjaminan korporasi senilai Rp2,5 triliun. Khususnya pada tahun 2023 PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan terhadap 3 (tiga) proyek Infrastruktur dan 1 proyek Non Infrastruktur, yaitu:

1. Proyek Tol Akses Patimban pada tanggal 24 Januari 2023;
2. Proyek PJU Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 12 Oktober 2023;
3. Proyek Tol JORR *Elevated* Cikunir – Ulujami pada tanggal 17 Oktober 2023; dan
4. Proyek Cadangan Pangan Pemerintah pada tanggal 4 September 2023.

Seluruh proses penjaminan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT PII.

Strategi Pemasaran Marketing Strategy

PT PII menjalankan pemasaran dan komunikasi terhadap produk bisnis perusahaan melalui beberapa aktivitas seperti keterlibatan aktif dalam Kantor Bersama KPBU Indonesia, komunikasi langsung dengan calon PJPK potensial, dan para pemangku kepentingan terkait, serta sosialisasi dan terlibat dalam forum, seminar, baik nasional dan internasional, melaksanakan *media briefing* serta promosi melalui media sosial. Untuk memasarkan dan mengkomunikasikan produk bisnis perusahaan berbagai kegiatan dilaksanakan secara hibrid, luring maupun secara daring (*online*).

As of 2023, IIGF has guaranteed 50 projects consisting of 41 infrastructure guarantee projects and 9 non-infrastructure guarantee with a total guaranteed project investment value of Rp497 trillion. In addition, IIGF has also issued 27 corporate guarantee certificates for PEN and corporate guarantees amounted to Rp2.5 trillion. Specifically in 2023, IIGF signed Guarantee Agreements for three (3) PPP projects and 1 Non-PPP project:

1. Patimban Access Toll Project on 24 January 2023.
2. West Lombok Regency Street Lighting project on 12 October 2023.
3. JORR *Elevated* Cikunir-Ulujami Toll Project on 17 October 2023, and
4. Government Food Reserve Project/CPP on 4 September 2023.

The whole guarantee process has been carried out in accordance with the prevailing policies at IIGF.

IIGF implements marketing and communication of the company's business products through several activities, such as active involvement in the Indonesian PPP Joint Office, direct communication with potential GCA candidates, and related stakeholders, as well as socialization and involvement in forums, seminars, both national and international, media briefings, and promotion through social media. To market and communicate the company's business products, various activities are carried out in a hybrid manner, offline and online.



Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perseroan juga berupaya memanfaatkan aplikasi dan *platform* digital untuk mendukung kegiatan pemasaran Perseroan dan sosialisasi mengenai skema KPBU dan peran PT PII kepada pemangku kepentingan.

PT PII mendukung PJPK dalam penyiapan proyek KPBU, PT PII secara aktif telah mempertemukan kebutuhan PJPK dalam penyusunan dokumen studi dengan *development partners* yang dapat memberikan bantuan teknis dalam penyusunan studi tersebut. Dengan demikian, kualitas dan kecepatan penyiapan proyek secara keseluruhan diharapkan dapat mengalami peningkatan.

Sepanjang tahun 2023, PT PII secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam bentuk pemberian serta peningkatan pemahaman mengenai skema KPBU kepada calon PJPK dan potential investor baik untuk KPBU regular di tingkat pusat, daerah maupun KPBU IKN. Guna memperoleh *pipeline* potensial yang kredibel, PT PII aktif berkoordinasi dengan potensial PJPK untuk menindak lanjuti pemenuhan catatan pada berbagai proses penjaminan dalam bentuk *workshop*, FGD maupun koordinasi lintas instansi/lembaga serta berpartisipasi mendukung kegiatan proyek yang dilaksanakan PJPK seperti *market sounding* dan lainnya.

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalannya, PT PII terus melakukan pemetaan atas potensi Penjaminan Pemerintah dengan tetap mengacu kepada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Daftar Rencana Proyek KPBU/PPP Book Bappenas, Daftar rencana Proyek Strategis Nasional, dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah, dokumen perencanaan dari sektor infrastruktur terkait, dan interaksi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan sebagainya.

Selanjutnya, PT PII akan menyusun *pipeline project* dan merumuskan strategi dengan melakukan analisis terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh proyek tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung perusahaan sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan hingga akhirnya ditentukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan demi mendukung kesinambungan kinerja usaha sampai pada akhirnya menempatkan posisi Perseroan dalam pasar Penjaminan dan Infrastruktur. Strategi pemasaran tersebut didukung dengan alokasi anggaran dan sumber daya yang efisien, sehingga Perseroan dapat mengimplementasikan rencana dengan lebih terstruktur dan optimal.

In line with the rapid development of technology, the Company strives to utilize digital applications and platforms to support the Company's marketing activities and socialization of the PPP scheme and the role of IIGF to stakeholders.

IIGF supports the GCA in the preparation of PPP projects. IIGF has actively met the needs of GCA to prepare study documents with development partners who can provide technical assistance in preparing the study. Thus, the overall quality and speed of project preparation shall improve.

In 2023, IIGF actively disseminated and provided mentoring by providing and increasing understanding of the PPP scheme to prospective GCA and potential investors for regular PPP at the central, local, and IKN PPP levels. To obtain a credible potential pipeline, IIGF actively coordinates with potential GCA to follow up on the fulfillment of notes on various guarantee processes in the form of workshops, FGDs, and cross-agencies/institutions coordination, and participates in supporting project activities carried out by GCA, such as market sounding, etc.

In line with the business sector, IIGF continues to map the potential for Sovereign Guarantee while still referring to documents issued by the Government, such as the List of PPP Plans (Bappenas PPP Book), List of planned National Strategic Projects, central and local government planning documents, planning documents from related infrastructure sectors, interaction and communication with various stakeholders, etc.

Further, IIGF will develop a project pipeline, and formulate a strategy by analyzing the opportunities and challenges that will be faced under such projects. This categorization was necessary to support the business in accordance with the business sector of the Company, until the activities that need to be carried out are determined to support the sustainability of business performance to ultimately position the Company in the Guarantee and Infrastructure market. The marketing strategy is supported by an efficient allocation of budget and resources, allowing the Company to implement the plan in a more structured and optimized manner.



Informasi Material Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

Investasi

Investment

Pada tahun 2023, PT PII melakukan kegiatan investasi yang telah diuraikan dalam sub bab Realisasi Investasi Barang Modal. Jenis mata uang yang digunakan adalah mata uang Rupiah. Sumber dana investasi merupakan alokasi dana internal Perseroan/RKAP tahun 2023.

In 2023, IIGF performed the investment described in the Capital Goods Investment Realization sub-chapter. The currency used is Rupiah. The source of investment funds was the allocation of the 2023 internal Company's funds/RKAP.

Ekspansi

Expansion

Pada tahun 2023, PT PII tidak melakukan aktivitas ekspansi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2023, IIGF did not conduct any expansion activities. Thus, there was no information on the objective and value of the transaction.

Divestasi

Divestment

Pada tahun 2023, PT PII tidak melakukan aktivitas divestasi, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2023, IIGF did not conduct any divestment activities. Thus, there was no information on the objective and value of the transaction.

Akuisisi

Acquisition

Pada tahun 2023, PT PII tidak melakukan aktivitas akuisisi perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan dan nilai transaksi.

In 2023, IIGF did not conduct any company acquisition activities. Thus, there was no information on the objective and value of the transaction.

Restrukturisasi Utang/Modal

Debt/Capital Restructuring

Pada tahun 2023, PT PII tidak melakukan restrukturisasi baik utang maupun modal. Sehingga tidak terdapat informasi terkait hal tersebut.

In 2023, IIGF did not restructure any debt or capital. Therefore, there is no information related to such matter.



KPI atau Indeks Kinerja Utama (IKU) Korporasi

Corporate Key Performance Index (KPI)

Pada tahun 2023 capaian kinerja yang diukur berdasarkan realisasi dan nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) Korporasi yang sebelumnya telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun untuk informasi atas realisasi, capaian IKU, dan Nilai Kinerja di tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

In 2023, performance achievement is assessed based on the Corporate Key Performance Index (KPI) previously approved by the Shareholders. The information on the realisation, achievement of KPIs, and Performance in 2023 is described in the following table:

Tabel Capaian IKU (Korporasi) Tahun 2023

Table: 2023 (Corporate) KPI Achievement

Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Indicator Key Performance	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieved	Bobot Capaian Weight Achieved
Mandat dan Keuangan Mandates & Financial	Optimalisasi Nilai Pemegang Saham / <i>Shareholder Value</i> Optimization of Shareholder Value / Shareholder Value	Margin Laba Bersih Net Profit Margin	5,0%	Persentase Percentage	63%	63%	100,54%	5,03%
	Penjaminan yang berkelanjutan Sustainable guarantee	Jumlah penerbitan Penjaminan atas <i>small scale</i> KPBU PPP small scale Guarantee issuance	5,0%	Perjanjian penjaminan nilai Value of guarantee agreement	2	1	50,00%	2,50%
		Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan Increase in project investment value generated through guarantees	5,0%	Nilai Mark	Rp43,2 triliun Rp43.2 trillion	Rp27,9 triliun Rp27.9 trillion	64,58%	3,23%
		Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai <i>financial close</i> Providing support for secured projects to reach financial close	5,0%	Persentase Percentage	60%	85%	120,00%	6,00%
	Penyediaan Penjaminan KPBU yang <i>prudent</i> Provision of prudent PPP Guarantee	Jumlah proyek yang diselesaikan <i>appraisal</i> Number of projects that completed appraisal	5,0%	Memo Evaluasi Evaluation Memo	5	5	100,00%	5,00%
	Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif Effective project preparation and transaction advisory	Penyelesaian <i>milestones</i> penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi <i>secara</i> tepat waktu dan leverage biaya penugasan yang optimal Completion of project preparation and transaction advisory's milestone in timely manner and optimal assignment cost leverage	5,0%	Indeks Index	3,75	2	53,33%	2,67%



Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Indicator Key Performance	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieved	Bobot Capaian Weight Achieved
	Optimalisasi sinergi BUMN/ Lembaga Kementerian Keuangan Optimization of synergies between SOEs/ Institutions under the Ministry of Finance	Kegiatan <i>Joint Program</i> yang melibatkan seluruh BUMN/ Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint Program involving all SOEs/Institutions under the Ministry of Finance.	5,0%	Proyek/ Program Project/ Program	1	3	120,00%	6,00%
Stakeholders	Pemahaman <i>Stakeholders</i> yang efektif Effective understanding of stakeholders	Pencapaian tingkat pemahaman PJPk dan <i>stakeholders</i> lainnya yang baik Achieving a good level of GCA's and other stakeholders' understanding	5,0%	Indeks Index	3,9	4,26	109,23%	5,46%
	Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar yang tinggi High reputation and market trust	<i>Rating</i> Perusahaan <i>Sovereign</i> Sovereign Company Rating	5,0%	<i>Rating</i>	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equivalent to the Government of Indonesia's Rating	Setara dengan Peringkat Pemerintah Indonesia Equivalent to the Government of Indonesia's Rating	100,00%	5,00%
	Peningkatan kapasitas dan penguatan IIGF Institute IIGF Institute's capacity building and strengthening	Meningkatkan peran aktif IIGF Institute sebagai <i>Center of Excellence</i> untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU melalui peningkatan level akreditasi ATO level <i>execution</i> Enhancing IIGF Institute's active role as a Center of Excellence for infrastructure financing with PPP schemes by increasing ATO accreditation at the execution level.	5,0%	Level	Akreditasi ATO level Accreditation of Execution Level	Pelaksanaan 1 Program <i>Certified PPP Professional</i> (CP3P) Level <i>Execution</i> First Execution of Certified PPP Professional (CP3P) Program Level Execution	120,00%	6,00%
Proses Bisnis Internal Internal Business Process	<i>Enterprise Risk Management</i> yang kuat Strong Enterprise Risk Management	Risiko korporasi yang terkendali Controlled corporate risk	8,0%	Persentase Percentage	8%	10%	120,00%	9,60%
	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Implementation	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Score) GCG Score	10,0%	GCG Score	87,5	90,04	102,90%	10,29%
	Pengelolaan Risiko Penjaminan yang Efektif Effective Guarantee Risk Management	Tingkat pengendalian risiko klaim atas proyek yang masuk dalam kategori aman The risk control of claims on projects that are considered as safe	10,0%	Persentase Percentage	92%	93%	100,59%	10,06%
	Optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran Budget usage optimization and efficiency	BOPO*)	7,0%	Persentase Percentage	38%	37%	104,56%	7,32%



Kategori Performansi Performance Category	Sasaran Strategis Strategic Target	Indikator Kinerja Utama Indicator Key Performance	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achieved	Bobot Capaian Weight Achieved
Pembelajaran dan Pertumbuhan Training and Development	Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas Human resources management with quality and integrity	Peningkatan indeks <i>engagement</i> karyawan yang optimal Optimal employee engagement index improvement	6,0%	Score Engagement (absolut)	73%	79%	108,97%	6,54%
		Pembentukan struktur kepegawaian berbasis kompetensi Establishment of a competency-based personnel structure	4,0%	Persentase Percentage	100%	100%	100,00%	4,00%
	Pengembangan teknologi informasi yang sistematis dan handal Systematic and reliable information technology development	Penyelesaian IT <i>Masterplan</i> 2023–2027 Completion of 2023–2027 IT Masterplan	5,0%	Persentase Percentage	100%	120%	120,00%	6,00%
Total			100%					100,70%

Prospek Usaha Business Prospect

Pada tahun 2024 Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,0 persen, sementara proyeksi World Bank sedikit lebih rendah sebesar 4,9 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan belanja pemerintah. Konsumsi privat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,10 persen pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan pendapatan rumah tangga dan kredit konsumsi (Danareksa Sekuritas). Peningkatan pendapatan rumah tangga didorong oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial dari pemerintah sedangkan peningkatan kredit konsumsi didorong oleh suku bunga yang rendah dan kemudahan akses kredit. Belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat sebesar 6,62 persen pada tahun 2024, didorong oleh persiapan pemilihan umum dan peningkatan belanja infrastruktur. Peningkatan belanja pemerintah akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan barang dan jasa.

The International Monetary Fund (IMF) expects Indonesia's economy in 2024 to grow by 5.0 per cent, while the World Bank's projection is slightly lower at 4.9 per cent. Indonesia's economic growth will be supported by strong domestic consumption and government expenditure. Private consumption is expected to grow by 5.10 per cent in 2024, supported by rising household income and consumption credit (Danareksa Sekuritas). The increase in household income will be encouraged by the increase in minimum wage and social assistance from the government while the increase in consumption credit will be encouraged by low interest rates and easy access to credit. Government expenditure is expected to increase by 6.62 percent in 2024, driven by election preparations and increased infrastructure expenditure. Increased government expenditure will support Indonesia's economic growth by creating jobs and increasing demand for goods and services.



Salah satu fokus utama Pemerintah adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia yang dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.

Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pembangunan infrastruktur, keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian proyek infrastruktur ambisius telah diluncurkan, menciptakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ini telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya seperti energi, telekomunikasi, dan air. Inisiatif proyek-proyek strategis seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar telah meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Dalam pidato Presiden tentang RAPBN 2024 Pemerintah mengalokasikan Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk sektor infrastruktur. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sebesar Rp392 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur konektivitas dan mobilitas, jaringan irigasi dan bendungan, infrastruktur bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta pembangunan IKN.

Sumber:

<https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>,
https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia,
<https://investasi.kontan.co.id/news/anggaran-infrastruktur-tahun-2024-jadi-rp-4227-triliun-begitu-prospek-emitennya>

One of the Government's main focuses is to improve accessibility and connectivity across Indonesia, which is reflected by the rapid development of toll roads. The infrastructure project is one of the strategic projects in addition to the railway line that has opened access to remote areas. The infrastructure's presence not only facilitates mobility of the community, but also reduces logistics costs, opens up new investment opportunities, and strengthens connectivity between regions.

Indonesia has experienced significant progress in the infrastructure development sector. The Government's heavy involvement in advancing this sector has been the key to driving sustainable economic growth. In recent years, a series of ambitious infrastructure projects have been launched, creating positive impacts on various aspects of the community's lives and the national economy.

Data from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) shows that the completion of these infrastructure projects has had a positive impact on local economic growth. Better access to economic centers improves the local competitiveness, attracts private sector investment, and creates new jobs.

Infrastructure development is not only in the transportation sector, but also in other sectors, such as energy, telecommunications, and water. Strategic project initiatives, such as the construction of dams and large-scale power plants have increased energy availability, supported industrial sustainability, and improved Indonesia's global competitiveness.

In the President's speech on the 2024 Draft State Budget (RAPBN), the Government allocated Rp422.7 trillion in the Draft State Budget (RAPBN) for the infrastructure sector. This amount increased compared to the infrastructure budget in the 2023 State Budget, i.e., Rp392 trillion. The budget will be used for the infrastructure development of connectivity and mobility, irrigation networks and dams, energy and food infrastructure, equal access to information and communication technology, and IKN development.

Sources:

<https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>,
https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia,
<https://investasi.kontan.co.id/news/anggaran-infrastruktur-tahun-2024-jadi-rp-4227-triliun-begitu-prospek-emitennya>



Untuk mengantisipasi prospek bisnis dan peluang di tahun 2024 Perseroan telah menyiapkan langkah-langkah strategis antara lain:

1. Tetap fokus pada pemantapan bisnis Penjaminan baik skema KPBU maupun non-KPBU yang tidak hanya terkonsentrasi pada jumlah namun pada peningkatan nilai kebermanfaatannya dengan menciptakan sinergi yang berkesinambungan dengan berbagai *stakeholder* terkait.
2. Melanjutkan pelaksanaan pemantauan aktif atas proyek-proyek yang telah efektif penjaminan guna dapat mengantisipasi serta memitigasi risiko secara bersama-sama dengan para PJPK.
3. Pengembangan *pipeline* proyek untuk menghadapi kondisi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, berfokus pada:
 - a. Pendampingan Proyek melalui *matchmaking* berupa dukungan yang bersumber dari anggaran pemerintah, dukungan dari *development partners* dan sumber lainnya
 - b. *Roadshow*/Sosialisasi kepada calon PJPK baru (sektor baru dan KPBU skala kecil)
 - c. Penguatan kolaborasi dengan *strategic partners*
 - d. Inisiasi pengembangan produk atau program baru
4. Mendukung kredibilitas Pengembangan *pipeline* proyek Penjaminan KPBU dan identifikasi Penjaminan Kredit Perseroan. *Improvement* dalam proses bisnis lainnya dengan melaksanakan semua komunikasi mandat Perseroan dan pelaksanaan pengembangan bisnis dan pengembangan produk.
5. Melakukan pemetaan produk penjaminan dan mengkoordinasikan pengembangan produk penjaminan serta usaha bisnis lainnya seperti identifikasi produk baru, pelaksanaan riset kebutuhan produk, mengidentifikasi pemangku kepentingan, pengembangan konsep produk, pengembangan siklus bisnis dan produk, dan pengujian produk.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah atau pihak yang dipandang relevan bagi pengembangan kebijakan, produk penjaminan, dan usaha bisnis lainnya (misalnya Bappenas, Kementerian Keuangan, lembaga pembiayaan, investor, dan lain-lain);
7. Melakukan kemitraan untuk peningkatan kapasitas ekosistem, termasuk pengembangan sektor, dan peningkatan pemangku kepentingan serta mendukung penguatan bisnis Perseroan;
8. Mempersiapkan Perseroan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi dan peran Penjaminan Pemerintah dalam Pembangunan Proyek KPBU IKN.

To anticipate business prospects and opportunities in 2024, the Company has prepared strategic measures, among others:

1. Focusing on strengthening the Guarantee business for both PPP and non-PPP schemes, which are not only concentrated on numbers but on increasing useful value by creating sustainable synergies with various relevant stakeholders.
2. Conducting active monitoring of projects that have been effectively guaranteed to anticipate and mitigate, in collaboration with the GCAs.
3. Developing the project pipeline to face the General Election and Local Head Election conditions, with a focus on:
 - a. Project Assistance through *matchmaking* in the form of support sourced from the government budget, support from development partners, and other sources.
 - b. *Roadshow*/Socialization to potential new GCAs (new sectors and small-scale PPPs)
 - c. Strengthening collaboration with strategic partners
 - d. New product or program development initiatives
4. Supporting the credibility of the development of the Company's PPP guarantee and credit guarantee pipeline. Improving other business processes by carrying out all the company's mandated communications and executing business development and product development.
5. Mapping guarantee products and coordinating guarantee product development and other business ventures, such as identifying new products, conducting product needs research, identifying stakeholders, developing product concepts, developing business and product cycles and testing products.
6. Coordinating with Government agencies or parties deemed relevant for the development of policies, guarantee products, and other business ventures (e.g. Bappenas, Ministry of Finance, financing institutions, investors, etc.);
7. Establishing partnerships for ecosystem capacity building, including sector development, and stakeholders' enhancement, to support the strengthening of the Company's business;
8. Preparing the Company to be able to optimize the sovereign guarantee contribution and role in the Development of IKN's PPP Projects.



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or with Affiliates/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transaction with Conflict of Interest

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

As of 31 December 2023, there were no transactions with a conflict of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Transaction with Affiliated/Related Parties

Pihak-Pihak Berelasi

Related Parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

- Entitas di bawah pengendalian Perseroan;
- Entitas asosiasi;
- Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- Entitas di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan iii di atas;
- Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
- Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

The Company performs transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Disclosure of Related Party", which are defined as:

- Entities under the Company's control;
- Associates;
- Investors who have voting rights, which give the investor significant influence;
- Entities under the control of investors described in point iii above;
- Key employees and their family members; and
- Entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government.

Sifat Pihak Berelasi

Nature of Related Parties

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perseroan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahannya dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perseroan.
- Bank-bank BUMN dan entitas-entitas nonbank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendalian oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perseroan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito berjangka dan obligasi.

- The Government of the Republic of Indonesia is the Company's shareholder.
- The Board of Directors consists of people who have the authority and responsibility for planning, directing, and controlling the Company's activities.
- State-owned banks and state-owned non-bank entities are related parties because they are entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia, in which the Company places investments in the form of time deposits and bonds.



Kewajaran Transaksi

Fairness of Transactions

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perseroan menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas wajar sesuai dengan PSAK Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi secara wajar. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All transactions with related parties are in accordance with the terms and conditions agreed by both parties. Thus, the Company considers that all transactions are within reason, in line with the PSAK No. 7 on Disclosure of Related Parties. This indicates that the Company has conducted transactions with related parties fairly. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Reason for the Transaction

Transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan profesional dengan tujuan menguntungkan kedua belah pihak (*efficient related party transaction*). Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non pengendali.

Affiliate transactions are carried out based on the principle of mutual need and professionalism, with the objective of efficient related-party transactions. Related-party transactions are efficient if they benefit controlling shareholders and non-controlling shareholders.

Nama Pihak Afiliasi/Berelasi yang Bertransaksi dan Sifat serta Tujuan Transaksi

Name of Affiliates/Related Parties carrying out the Transaction and Nature and Objective of the Transaction

Entitas Entity	Hubungan Relation	Sifat dan Tujuan Transaksi Nature and Objective of the Transaction
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemegang Saham Shareholders	Investasi, Piutang Usaha, Pinjaman Penerusan, Pendapatan, Beban Bunga Investments, Account Receivables, Two-Step Loans, Revenue, Interest Expenses
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Biaya yang masih harus dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-Lain, Beban Penjaminan Accrued expenses, Provisions and Other Payables, Guarantee Expenses
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Kas dan Setara Kas, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Revenue
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Kas dan Setara Kas, Investasi, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Investments, Revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Investments, Account Receivables, Revenue
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Kas dan Setara Kas, Investasi, Pendapatan, dan Piutang Usaha Cash and Cash Equivalents, Investments, Revenue, and Account Receivables
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Kas dan Setara Kas, Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Cash and Cash Equivalents, Investments, Account Receivables, Revenue
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Investasi, Pendapatan, dan Piutang Usaha Investments, Revenue, dan Account Receivables
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Investments, Account Receivables, Revenue
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Investments, Account Receivables, Revenue
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Investasi, Piutang Usaha, Pendapatan Investments, Account Receivables, Revenue
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Investasi, Pendapatan Investments, Revenue



Entitas Entity	Hubungan Relation	Sifat dan Tujuan Transaksi Nature and Objective of the Transaction
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Investasi, Pendapatan Investments, Revenue
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Investasi, Pendapatan Investments, Revenue
PT Pegadaian (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Pendapatan, dan Investasi Revenues, and Investments
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Piutang Usaha, Pendapatan, dan Investasi Account Receivables, Revenue, and Investments
PT Pertamina (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Piutang Usaha, Pendapatan Account Receivables, Revenue
PT Len Industri (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Piutang Usaha, Pendapatan Account Receivables, Revenue
Perusahaan Umum Damri	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Piutang Usaha, Pendapatan Account Receivables, Revenue
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Piutang Usaha, Pendapatan Account Receivables, Revenue
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Pendapatan Revenues
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Pendapatan Revenues
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Pendapatan Revenues
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas Sepengendali/BUMN Entities under common control/SOEs	Pendapatan Revenues
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Manajemen Kunci Key Management	Kompensasi dan Remunerasi manajemen kunci Key management Compensation and Remuneration

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

Related Party Balances and Transactions

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Saldo dan transaksi pihak afiliasi/berelasi di tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

In the course of business, the Company performs transactions with related parties. Affiliates/related party balances and transactions in 2023 and 2022 are as follows:

Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
Table: Value of the Related Parties Transactions

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balances of Related Parties in Assets	2023		2022		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Aset Percentage to Total Assets	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Aset Percentage to Total Assets	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Aset Percentage to Total Assets
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	114.933	0,70%	113.693	0,73%	1.240	1,09%
Investasi Investment	15.693.649	95,66%	13.189.144	84,79%	2.504.505	18,99%
Piutang Usaha Account Receivables	186.381	1,13%	180.595	1,16%	5.786	3,20%
Sub Jumlah Subtotal	15.880.030	96,79%	13.369.739	85,95%	2.510.291	18,78%



Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balances of Related Parties in Liabilities	2023		2022		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Aset Percentage to total Liabilities	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Aset Percentage to total Liabilities	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Aset Percentage to total Liabilities
Pinjaman Penerusan Two-Step Loans	55.127	12,44%	55.127	13,73%	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain Accrued Expenses, Provisions, and Other Payables	2.366	0,53%	7.903	1,97%	(5.537)	(70,06)

Saldo Pihak Berelasi dalam Pendapatan Balances of Related Parties in Revenues	2023		2022		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Pendapatan Percentage to total Revenues	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Pendapatan Percentage to total Revenues	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Pendapatan Percentage to total Revenues
Pendapatan Revenues	1.088.147	82,56%	885.858	81,36%	202.289	22,84

Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Usaha Balances of Related Parties in Operating Expenses	2023		2022		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Beban Usaha Percentage to the Total Operating Expenses	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Beban Usaha Percentage to the Total Operating Expenses	Nominal (Rp juta) (Rp million)	Persentase dari jumlah Beban Usaha Percentage to the Total Operating Expenses
Beban Penjaminan Guarantee Expenses	(3.171)	(0,66%)	7.903	2,05%	(11.074)	(140,12)
Beban Bunga Interest Expense	3.928	0,81%	3.928	1,02%	-	-
Kompensasi dan Remunerasi Manajemen Kunci Key Management Compensation and Remuneration	27.990	5,80%	21.817	5,65%	6.173	28,29



Kebijakan Perseroan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Company Policy on Review Mechanisms for Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

Seluruh transaksi pihak berelasi/afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers), sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perseroan telah mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2015).

Di tahun 2023, tidak terdapat transaksi material terkait transaksi pihak berelasi. PT PII bukan merupakan Perseroan yang memperdagangkan ekuitasnya kepada umum. Seluruh saham PT PII dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian seluruh transaksi telah diketahui oleh pemegang saham.

All related party/affiliate transactions above are affiliate transactions carried out to generate operating revenues that are performed regularly, repeatedly, and/or continuously. As stated in the Audited Financial Report for the 2023 fiscal year, as audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network), as an effort to ensure the level of fairness of transactions and conformity with generally accepted accounting standards in Indonesia. The Company has disclosed transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (2015 Revision).

In 2023, there were no material transactions related to related party transactions. IIGF is not a Public Company that trades its equity to the public. All of IIGF's shares are owned by the Republic of Indonesia. Therefore, all transactions are made known to the shareholders.

Keterlibatan Organ Perseroan dalam Proses Review Transaksi Pihak Berelasi

Involvement of the Company's Organs in the Review of Related Party Transactions

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perseroan melibatkan Organ Perseroan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, Dewan Komisaris berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2023, telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan pada Catatan 24.

Review mechanism for transactions with related parties is through the audit process, conducted by internal and external auditors. In the audit, the Company involves the Company's Organs including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related divisions.

Based on the review conducted by the Audit Committee, the Board of Commissioners has a role in providing advice and input to the Board of Directors, so that transactions with related parties shall be carried out in accordance with the arms-length principle.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties in 2023 have been conducted through adequate procedures and have been carried out in accordance with generally accepted business practices that comply with the arms-length principle. More detailed information regarding related party transactions is disclosed in the Company's Financial Statements in Note 24.



Perubahan Peraturan serta Dampaknya Terhadap Perusahaan

Regulation Changes and the Impacts on the Company

Di tahun 2023, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

In 2023, there were several laws and regulations with significant impacts on the Company, as can be seen in the table below:

No.	Nama Peraturan Regulation	Dampaknya Terhadap PT PII secara Kualitatif dan/atau Kuantitatif Impact on IIGF, Qualitatively and/or Quantitatively
1.	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi Government Regulation No. 58 of 2023 on Income Tax Withholding Rates of Article 21 on Income Related to Work, Services, or Activities of Individual Taxpayers	PT PII melakukan penyesuaian atas tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. IIGF adjusted the withholding rate of Income Tax Article 21.
2.	Peraturan Menteri Keuangan No. 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Minister of Finance Regulation No. 34 of 2023 on the Procedures for the Provision of Sovereign Guarantees Within the Context of the Implementation of Government Food Reserves	PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan melaksanakan Penjaminan Pemerintah Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah. IIGF, as the Guarantor Business Entity implements the Sovereign Guarantee for the Government Food Reserves.
3.	Peraturan Menteri Keuangan No. 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara. Minister of Finance Regulation No. 53 of 2023 on Management of State Assets and Assets in Possession in Nusantara Capital City.	PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur melaksanakan penugasannya untuk mendukung akselerasi Pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara dengan memperhatikan ketentuan tersebut. IIGF, as the Infrastructure Guarantee Agency, carries out its assignment to support the acceleration of infrastructure development in the Capital with due regards to these provisions.
4.	Peraturan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung Minister of Finance Regulation No. 89 of 2023 on the Procedures for Providing Sovereign Guarantees to Accelerate the Fast Train Infrastructure and Facilities Between Jakarta and Bandung	PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan melaksanakan Penjaminan Pemerintah Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung IIGF, as the Infrastructure Guarantee Agency, carried out the Sovereign Guarantee for the Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung
5.	Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 112/PMMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Minister of Finance Regulation No. 136 of 2023 on the Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 112/PMMK.03/2022 on Taxpayer Identification Numbers for Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers, and Government Agency Taxpayers.	Tidak terdapat implikasi langsung kepada PT PII. Namun PT PII melakukan penyesuaian database Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi Nomor Induk Kependudukan There were no direct implications for IIGF. However, IIGF adjusted the Taxpayer Identification Number database to the Citizenship Identification Number
6.	Peraturan Menteri keuangan No. 176 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan Minister of Finance Regulation No. 176 of 2023 on the Corporate Social Responsibility of Limited Liability Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance	PT PII melakukan penyesuaian terhadap pedoman dan tata cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. IIGF adjusted to the guidelines and procedures in implementing Corporate Social Responsibility.
7.	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Minister of Manpower Decree No. 88 of 2023 on Guidelines for the Prevention of and Response to Sexual Harassment in the Workplace	PT PII melakukan penyesuaian regulasi internal dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. IIGF adjusted the internal regulations regarding the Sexual Violence Prevention and Management in the Workplace.
8.	Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024 Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 818 of 2023 on 2024 Provincial Minimum Wages	PT PII melakukan penyesuaian upah minimum karyawan pada tahun 2024 IIGF will adjust the minimum wage for employees in 2024



Perubahan Kebijakan Akuntansi

Amendment to Accounting Principles

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Reason for the Amendment to Accounting Principles

Kebijakan akuntansi Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

The company's accounting policies are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The financial statements preparation in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires estimations and assumptions. It also requires management to make decisions in the process of applying the Company's accounting policies. Areas that are complex or require a higher authorized decision, or areas where assumptions and estimates could have a significant impact on the financial statements.

Perseroan melakukan *review* berkelanjutan kebijakan akuntansi terhadap perkembangan revisi Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan Perseroan. Berikut adalah penerapan standar akuntansi keuangan baru dan revisi (PSAK) yang telah diterbitkan tetapi belum diterapkan.

The company reviews the accounting policies continuously with the development of revised Financial Accounting Standards that are relevant to the company. The following is the application of new and revised financial accounting standards (PSAK) that have been issued but not yet implemented.

Pada tahun 2023, Perseroan tidak menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dalam Laporan Keuangan.

In 2023, the Company did not implement any changes in accounting policies in the Financial Statements.

Uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya

Changes in Accounting Policy and Their Impact

Standar Akuntansi Baru yang Telah Disahkan namun Belum Berlaku Efektif

Accounting Standard Issued but Not Yet Effective

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments, and interpretations, which are not yet effective for the fiscal year beginning on 1 January 2023:

- Amendments to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with covenants;
- Amendments to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of current or non-current liabilities; and
- Amendments to PSAK 73: "Lease" regarding lease liabilities in sale and leaseback transactions.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74; "Kontrak Asuransi"; dan
- PSAK 74; "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan 71 Informasi Komparatif.

The standard shall be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.

- PSAK 74; "Insurance Contracts"; and
- PSAK 74; "Insurance Contracts" on Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 Comparative Information.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

The above standards will be effective on 1 January 2025. From 1 January 2024, references to each PSAK and ISAK shall be amended as issued by DSAK-IAI.



Dampak atas Standar yang telah Diterbitkan tetapi Belum Diterapkan

Impact of Standards Issued to be Implemented

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

As of the issuance date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new standards and revisions, on the Company's financial statements.





Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Fact and Information After the Accounting Reporting Date

a) Perjanjian Penjaminan KPBU

Pada tanggal 27 Februari 2024, Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Surya Sapta Agung Tol selaku BU untuk Proyek Tol Kediri-Tulungagung.

a) PPP Guarantee Agreement

On 27 February 2024, the Company signed a guarantee agreement with PT Surya Sapta Agung Tol as the Business Entity for the Kediri-Tulungagung Toll Project.

b) Perjanjian Penjaminan BUMN

Pada tanggal 25 Januari 2024, Perseroan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka Proyek Kereta Api Cepat Jakarta dan Bandung dengan nilai investasi sebesar Rp10,256 miliar sehingga berdampak pada peningkatan nilai investasi proyek infrastruktur yang dijamin oleh Perseroan.

b) SOE Guarantee Agreement

On 25 January 2024, the Company signed a guarantee agreement for the loan of PT Kereta Api Indonesia (Persero) for the Jakarta Bandung High Speed Rail Project with an investment value of Rp10.256 billion, resulted in an increase in the investment value of infrastructure projects guaranteed by the Company.

Realisasi Dana Penawaran Umum

Utilization of Funds from Public Offerings

Sampai dengan 31 Desember 2023, status PT PII bukan merupakan *Listed Company* dan belum melakukan penawaran umum, sehingga tidak ada informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

As of 31 December 2023, IIGF is not a Listed Company and has not made any public offering. Hence, there is no information related to the total revenue, fund usage plan, fund usage details, balance, and date of the approval of the GMS on the change in the use of funds.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Setelah Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) terbit memuat informasi tidak terdapat peristiwa yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi di tahun 2023.

After the publication of the Financial Statements for the 2023 fiscal year, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network), there is no information that contains extraordinary and rare events in 2023.





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance





Pendahuluan Introduction

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta membangun suatu lingkungan bisnis yang profesional, transparan, berintegritas, dan efisien yang dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Perseroan.

Sebagaimana perkembangan penerapan GCG, Perseroan menempatkan GCG dalam koridor pembangunan berkelanjutan atau *sustainability development*, yang diharapkan dapat berdampak positif baik bagi Perseroan sendiri maupun bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar lokasi usahanya.

Dengan penyelenggaraan operasional yang berbasis pada tata kelola perusahaan yang baik dan *best practices* ini, Perseroan berharap dapat berkontribusi pada terciptanya suatu iklim usaha yang mengakomodir persaingan yang sehat di Indonesia serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu bagi Perseroan, implementasi GCG yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku universal disertai penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif diharapkan akan memfasilitasi setiap elemen untuk melaksanakan tugasnya sesuai etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta membangun hubungan yang berlandaskan etika antara pemangku kepentingan dan Perseroan.

Prinsip GCG GCG Principles

Prinsip GCG yang diadopsi ke dalam sistem dan struktur GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan ini diterapkan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai Perseroan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan menetapkan kejelasan fungsi, wewenang, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ Perseroan, guna mencapai kinerja yang berkesinambungan.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company is part of the Company's commitment to protect the interests of stakeholders and to build a professional, transparent, integral, and efficient business environment that can enhance and optimize the Company's value.

As GCG practices evolve, the Company positions GCG within the framework of sustainable development, which is expected to have positive impacts on both the Company itself and the communities and environment surrounding its business locations.

Through operations based on good corporate governance and best practices, the Company hopes to contribute to the creation of a business climate that accommodates healthy competition in Indonesia as well as sustainable economic growth and stability, ultimately providing the greatest possible benefits to the entire society.

For the Company, implementing GCG that emphasizes the application of universally accepted corporate governance principles, accompanied by effective supervision and control systems, is expected to facilitate every element in performing their duties in accordance with work ethics and responsible decision-making. This approach supports integrity in financial reporting, appropriate risk management, and the development of ethical relationships between stakeholders and the Company.

The GCG principles adopted into the Company's system and structure are as follows:

1. Transparency Principle

The principle of transparency is applied in the decision-making process and in disclosing material and relevant information about the Company.

2. Accountability Principle

The principle of accountability is implemented by establishing clarity of functions, authorities, execution, and accountability of each corporate organ, aiming to achieve sustainable performance.



3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan melalui kepatuhan Perseroan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, termasuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.

4. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian diwujudkan melalui penyelenggaraan kepengurusan Perseroan yang profesional serta bebas benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip korporasi.

5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip keadilan dan kesetaraan ini diterapkan dengan melindungi kepentingan serta memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Responsibility Principle

The principle of responsibility is manifested through the Company's compliance with various applicable laws and regulations and sound corporate principles, including fulfilling responsibilities to the surrounding community and the environment.

4. Independency Principle

The principle of independency is realized through the professional management of the Company, free from conflicts of interest and influences/pressures from any party that are not in violation with applicable laws and corporate principles.

5. Fairness Principle

The principle of fairness and equality is applied by protecting the interests and fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di atas secara berkesinambungan diharapkan dapat membangun suatu fundamental bisnis yang kuat dan berdaya saing bagi Perseroan sehingga Perseroan dapat terus menjaga prospek pertumbuhan kinerja untuk jangka panjang bagi para *stakeholders* dan membangun citra positif sebagai perusahaan yang akuntabel di mata publik luas.

The continuous application of the above GCG principles is expected to build a strong and competitive business foundation for the Company, enabling it to maintain long-term performance growth prospects for stakeholders and build a positive image as an accountable company for the public.

Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG Objectives and Benefits of Implementing GCG

Secara umum, penerapan GCG di lingkungan Perseroan menjadi bagian dari strategi transformatif untuk membangun sebuah korporasi yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan GCG memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan untuk membangun daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, agar dapat menjaga eksistensi dan pertumbuhan secara berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien serta efektif selain juga memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ dalam Perseroan;
3. Mengatur hubungan kerja antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
4. Mendorong agar setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab sosial yang tinggi;
5. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional;
6. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*;
7. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan;
8. Memperbaiki Budaya Kerja Perseroan; dan
9. Meningkatkan citra baik Perseroan.

In general, the implementation of GCG within the Company's environment is an integral part of a transformative strategy aimed at building a healthy and sustainable corporation. Therefore, the implementation of GCG has the following objectives and targets:

1. Optimizing the Company's value to establish strong competitiveness both nationally and internationally, in order to maintain sustainable existence and growth;
2. Promoting professional, efficient, and effective management of the Company while empowering its functions and enhancing the independence of its organs;
3. Regulating the working relationship between the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
4. Encouraging decision-making and implementation based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as high social responsibility;
5. Creating a professional human resources base;
6. Increasing accountability to stakeholders;
7. Preventing deviations in Company management;
8. Improving the Company's work culture; and
9. Enhancing the Company's positive image.



Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan GCG Perseroan

Legal Basis and Policy for GCG Implementation

Untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung secara efektif, Perseroan telah menerapkan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum terkait implementasi GCG, yaitu di antaranya:

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya;
3. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No.35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 28/PMK.06/2013 tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya melalui:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

To ensure effective implementation, the Company has adopted GCG in accordance with the legal regulations that serve as the basis for GCG implementation, which include:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2003 on State Finance;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, along with its amendments;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, along with its amendments;
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, as amended by Government Regulation No. 23 of 2022 on the Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of State-Owned Enterprises (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector, as last amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 55 of 2020 on the Second Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 on the State Capital Injection of the Republic of Indonesia for the Establishment of State-Owned Enterprises (Persero) in the Infrastructure Guarantee Sector.
6. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 28/PMK.06/2013 on the Preparation, Submission, and Amendment of Long-Term Plans and Work Plans and Budgets for State-Owned Enterprises (Persero) under the Ministry of Finance;
7. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises (Persero) under the Ministry of Finance, and its amendments:
 - a. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 59/PMK.06/2016 on Amendments to Minister of Finance Regulation No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
 - b. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 135/PMK.06/2017 on the Second Amendment to Minister of Finance Regulation No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Companies (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.



8. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.06/2018 terkait Pelaporan, Perubahan dan Pemantauan Penggunaan Tambahan PMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 197/PMK.06/2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
11. Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan No. 556/KMK.01/2020 terkait Pedoman Pengelolaan Komunikasi di lingkungan Kemenkeu;
13. Anggaran Dasar Perseroan; dan
14. Pedoman kebijakan dan aturan pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan yang berlaku di Perseroan;

Kebijakan Policy	Isi Content	
Pedoman Tata kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Guidelines	Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) oleh segenap Organ Perseroan dan Insan Perseroan, meliputi:	Policies and procedures serve as the operational foundation for implementing Good Corporate Governance (GCG) principles by all Company Organs and Company Personnel, including:
	1. BAB I Pendahuluan 2. BAB II Organ Perseroan 3. BAB III Tata Kelola Manajemen Risiko 4. BAB IV Tata Kelola Pengendalian Internal 5. BAB V Kode Etik dan Benturan Kepentingan 6. BAB VI Pengadaan Barang dan Jasa 7. BAB VII Tata Kelola Informasi 8. BAB VIII Manajemen Mutu 9. BAB IX Tata Kelola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Perseroan 10. BAB X Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 11. BAB XI Kebijakan dan Pelaporan Pelanggaran 12. BAB XII Pengukuran dan Pelaporan Pelaksanaan 13. BAB XIII Tata Kelola Perusahaan yang Baik Penutup	1. CHAPTER I Introduction 2. CHAPTER II Corporate Organs 3. CHAPTER III Risk Management Governance 4. CHAPTER IV Internal Control Governance 5. CHAPTER V Code of Conduct and Conflict of Interest 6. CHAPTER VI Procurement of Goods and Services 7. CHAPTER VII Information Governance 8. CHAPTER VIII Quality Management 9. CHAPTER IX Stakeholder Relationship Governance 10. CHAPTER X Long-Term Plan and Corporate Work Plan and Budget 11. CHAPTER XI Policy and Whistleblowing 12. CHAPTER XII Measurement and Reporting of Good Corporate Governance Implementation 13. CHAPTER XIII Conclusion
Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Work Procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual)	Tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta organ di bawahnya masing-masing, meliputi:	Work procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors regulating the implementation of working relationships among the Board of Commissioners and Board of Directors along with their respective sub-organs, including:
	1. BAB I Pendahuluan 2. BAB II Dewan Komisaris 3. BAB III Direksi 4. BAB IV Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perseroan 5. BAB V Penilaian, Evaluasi dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perseroan	1. CHAPTER I Introduction 2. CHAPTER II Board of Commissioners 3. CHAPTER III Board of Directors 4. CHAPTER IV Work Relationships Among Company Organs 5. CHAPTER V Good Corporate Governance Assessment, Evaluation, and Implementation at the Company



Kebijakan Policy	Isi Content			
Kebijakan Kode Etik Code of Conduct Policy	Tata aturan hubungan internal Perseroan (antar Insan Perseroan) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Adapun isinya meliputi:			Internal Company Relations Regulations (among Company Personnel) and Relationships with Stakeholders in carrying out Company Activities. The contents include:
	1. BAB I	Pendahuluan	1. CHAPTER I	Introduction
	2. BAB II	Pernyataan Nilai Perseroan	2. CHAPTER II	Company Core Values Statement
	3. BAB III	Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perseroan	3. CHAPTER III	Corporate Code of Conduct and Ethics Guidelines
	4. BAB IV	Petunjuk Pelaksanaan	4. CHAPTER IV	Implementation Guidelines
	5. BAB V	Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran	5. CHAPTER V	Violation Reporting and Sanctions
	6. BAB VI	Penutup	6. CHAPTER VI	Conclusion
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi:			Reference and guidelines for the Company's Audit Committee in carrying out its duties and authorities, including:
	1. BAB I	Pendahuluan	1. CHAPTER I	Introduction
	2. BAB II	Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Kode Etik	2. CHAPTER II	Duties, Responsibilities, Authorities, and Code of Conduct
	3. BAB III	Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan	3. CHAPTER III	Work Relationship Patterns, Membership, and Term of Office
	4. BAB IV	Tata Kerja dan Prosedur Kerja	4. CHAPTER IV	Workflow and Procedures
	5. BAB V	Penganggaran dan Pembiayaan	5. CHAPTER V	Budgeting and Financing
	6. BAB VI	Penutup	6. CHAPTER VI	Conclusion
Piagam Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Charter	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko Perseroan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi:			Reference and guidelines for the Company's Risk Monitoring Committee in carrying out its duties and authorities, including:
	1. BAB I	Pendahuluan	1. CHAPTER I	Introduction
	2. BAB II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	2. CHAPTER II	Duties, Responsibilities, and Authorities
	3. BAB III	Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan	3. CHAPTER III	Work Relationship Patterns, Membership, and Term of Office
	4. BAB IV	Tata Kerja dan Prosedur Kerja	4. CHAPTER IV	Workflow and Procedures
	5. BAB V	Penganggaran dan Pembiayaan	5. CHAPTER V	Budgeting and Financing
	6. BAB VI	Penutup	6. CHAPTER VI	Conclusion
Piagam Audit Internal Internal Audit Charter	Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional Perseroan sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup:			Internal Audit operating procedures in carrying out its function of reviewing and testing the Company's operations as a business organization, which broadly includes:
	1. BAB I	Pendahuluan	1. CHAPTER I	Introduction
	2. BAB II	Struktur, Persyaratan, dan Independensi Auditor Internal	2. CHAPTER II	Structure, Requirements, and Independence of Internal Auditors
	3. BAB III	Cakupan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Auditor Internal	3. CHAPTER III	Scope, Authority, and Responsibilities of Auditors
	4. BAB IV	Proses Penugasan Audit Internal	4. CHAPTER IV	Internal Audit Assignment Process
	5. BAB V	Penutup	5. CHAPTER V	Conclusion
Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Policy	Merupakan kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Isi dari Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut:			Policy regulating the mechanism of reporting violations that occur within the Company's environment. The contents of the Violation Reporting System Policy are as follows:
	1. BAB I	Pendahuluan	1. CHAPTER I	Introduction
	2. BAB II	Pelaporan Pelanggaran	2. CHAPTER II	Whistleblowing
	3. BAB III	Pihak Terkait Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran	3. CHAPTER III	Parties Involved in Managing Whistleblowing
	4. BAB IV	Penanganan Pelaporan Pelanggaran	4. CHAPTER IV	Handling of Whistleblowing
	5. BAB V	Perlindungan Pelapor dan Terlapor	5. CHAPTER V	Protection for Whistleblowers and Reported Parties
	6. BAB VI	Dokumentasi, Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi	6. CHAPTER VI	Documentation, Socialization, Monitoring, and Evaluation



Kebijakan Policy	Isi Content			
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Kebijakan ini mengatur mengenai batasan penerimaan dan pemberian gratifikasi, serta pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi yang berlaku bagi Insan Perseroan. Isi dari pedoman sebagai berikut:		This policy regulates the limits of accepting and giving gratuities, as well as reporting the acceptance and refusal of gratuities applicable to Company Personnel. The guidelines' contents are as follows:	
	1. BAB I	Pendahuluan	1. CHAPTER I	Introduction
	2. BAB II	Pengendalian Gratifikasi	2. CHAPTER II	Gratuity Control
	3. BAB III	Dokumentasi, Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi	3. CHAPTER III	Documentation, Socialization, Monitoring, and Evaluation
	4. BAB IV	Penutup	4. CHAPTER IV	Conclusion
Pedoman Sistem Pengendalian Internal Pedoman Sistem Pengendalian Internal	Pedoman pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Perseroan, meliputi:		Guidelines for the implementation of internal control applied within the Company's environment include:	
	1. BAB I	Pendahuluan	1. CHAPTER I	Introduction
	2. BAB II	Implementasi Sistem Pengendalian Internal	2. CHAPTER II	Implementation of Internal Control Systems
	3. BAB III	Tugas dan Tanggung Jawab	3. CHAPTER III	Duties and Responsibilities

Kebijakan Perseroan tersebut ditinjau dan dievaluasi secara berkala oleh Perseroan untuk menjaga relevansinya dengan perkembangan bisnis Perseroan dan ketentuan perundangan yang berlaku bagi Perseroan. Kebijakan tersebut disusun dengan memperhatikan metodologi, *best practices* dan jika diperlukan, dapat melibatkan karyawan Perseroan untuk menyerap aspirasi dan ide-ide melalui penyelenggaraan *focus group discussion*. Kebijakan tersebut juga dirumuskan melalui sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses bisnis tertentu dengan unit khusus penyiapan dokumen proses bisnis (*Organization Design*).

The Company's policy is periodically reviewed and evaluated to maintain its relevance with the Company's business developments and legal provisions applicable to the Company. This policy is formulated considering methodologies, best practices, and if necessary, may involve Company employees to absorb aspirations and ideas through the conduct of focus group discussions. The policy is also formulated through synergy between business units responsible for implementing specific business processes and specialized units in preparing business process documents (*Organization Design*).

Struktur Tata Kelola Perseroan

Structure of Corporate Governance

Perseroan telah memiliki Struktur Tata Kelola Perusahaan yang memadai yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, berikut dengan organ pendukungnya. Perseroan juga dilengkapi oleh infrastruktur Tata Kelola yang mendukung penyelenggaraan tata kelola secara efektif, yaitu antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tata tertib yang mengatur kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

The Company has an adequate Corporate Governance Structure which includes the Board of Commissioners, Board of Directors, and their supporting organs. The Company is also equipped with governance infrastructure supporting effective governance, such as policies and procedures, management information systems, and regulations governing the clarity of the roles and functions of each organizational structure.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1, yang mengatur organ-organ utama Perseroan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

The Company's Corporate Governance Structure complies with the provisions of Law No. 40 of 2007 Chapter I regarding General Provisions Article 1, which regulates the main organs of the Company, consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.



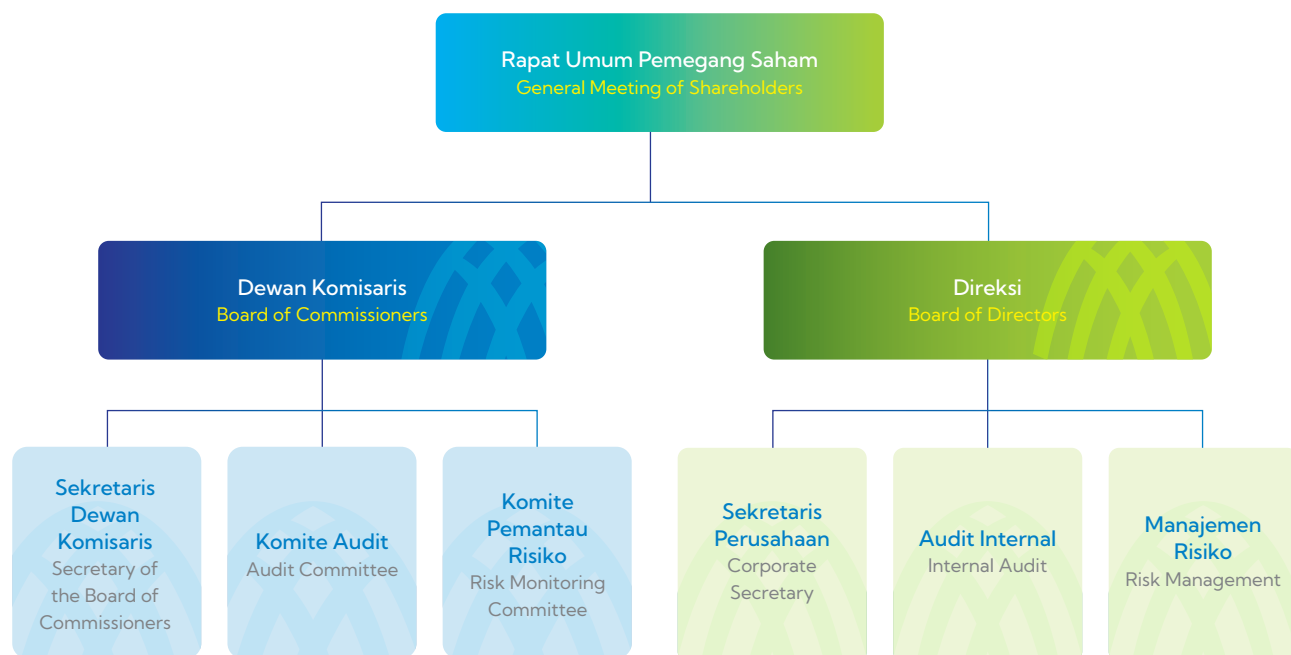
Berikut penjelasan fungsi masing-masing organ utama Perseroan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The following provides explanation of the functions of each main organ within the Company:

1. The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is the Company's organ with authority that are not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Commissioners is the Company's organ responsible for general and/or specific oversight as specified in the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.
3. The Board of Directors is the Company's organ with full authority and responsibility on managing the Company's affairs for the Company's interests, in line with the Company's purpose and objectives, and representing the Company, both in and out of court, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Struktur Tata Kelola Perseroan Corporate Governance Structure of the Company





Strategi Menciptakan Tata Kelola Terbaik dan Berkelanjutan

Strategies for Creating Best and Sustainable Governance

Perseroan memiliki komitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas penerapan GCG di segenap aspek Perseroan. Sepanjang tahun 2023, sejumlah inisiatif implementasi GCG telah dilaksanakan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan dukungan dari pihak independen, yakni antara lain:

1. Internalisasi kebijakan kode etik dalam berbagai kesempatan kepada seluruh Insan Perseroan serta pembaharuan Pakta Integritas Tahunan karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022 (*Assessment GCG*) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi *Area of Improvement* (Aol) GCG sesuai hasil *assessment GCG* Tahun Buku 2021;
4. Pelaksanaan *stakeholders survey* guna memperoleh *feedback* dari *stakeholders* terkait kinerja PT PII;
5. Audit *Surveillance I* terkait sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 yang diperoleh PT PII sejak tahun 2022 untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa dari PT Chesna, dengan hasil tidak terdapat ketidaksesuaian yang bersifat mayor maupun minor;
6. Penyampaian diseminasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh Insan Perseroan;
7. Pemutakhiran kebijakan terkait GCG yaitu kebijakan pengendalian gratifikasi, kebijakan pelaporan pelanggaran, dan kebijakan tata kelola dokumen;
8. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait GCG yaitu kebijakan kode etik, kebijakan pengendalian gratifikasi, kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan tata kelola dokumen kepada seluruh karyawan serta jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PII;
9. Pelaksanaan kegiatan *Talkshow Forum Governance Risk and Compliance* (GRC) dengan tema "Membangun Budaya Organisasi/Perseroan dalam Mencegah Korupsi dan Penyipuan"; dan
10. Partisipasi dalam ajang penghargaan terkait GCG.

The Company is committed to promoting sustainable business growth through enhancing the quality of GCG implementation across all aspects of the Company. Throughout the year 2023, several GCG implementation initiatives have been carried out, both independently and with the support of independent parties, including:

1. Internalized the code of conduct policy on various occasions to all Company Personnel and updated the Annual Integrity Pact of employees, Board of Directors, and the Board of Commissioners;
2. Conducted the Assessment of Good Corporate Governance Implementation for the 2022 Fiscal Year (GCG Assessment) by the Finance and Development Supervisory Agency;
3. Implemented follow-up actions on Good Corporate Governance Area of Improvement (Aol) recommendations based on the results of the 2021 Fiscal Year GCG assessment;
4. Conducted a stakeholder survey to obtain feedback from stakeholders regarding IIGF's performance;
5. Surveillance Audit I related to the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification obtained by IIGF since 2022 for the Procurement of Goods & Services scope from PT Chesna, with no major or minor non-conformities found;
6. Disseminated the gratuity control program to all Company Personnel;
7. Updated GCG-related policies, namely the gratuity control policy, whistleblowing system policy, and document governance policy;
8. Conducted policy socialization related to GCG, namely the code of conduct policy, gratuity control policy, whistleblowing system policy, and document governance policy to all employees as well as the Board of Directors and the Board of Commissioners of IIGF;
9. Organized a Talkshow Forum on Governance Risk and Compliance (GRC) with the theme "Building Organizational/ Company Culture in Preventing Corruption and Bribery";
10. Participated in GCG-related award events.



Prestasi Perseroan dalam Implementasi GCG di Tahun 2023

Company Achievements on GCG Implementation in 2023

Komitmen Perseroan dalam menjalankan GCG secara berkelanjutan, terbukti memberikan dampak positif bagi Pemegang Saham dan peningkatan kinerja Perseroan.

The Company's commitment to implementing sustainable GCG has proven to have a positive impact on shareholders and the Company's performance improvement.

Beberapa penghargaan yang diterima antara lain:

1. PPP Agency of the Year 2023 (*The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards*)
2. Indonesia Best CEO Award 2023 kategori *Infrastructure Support Financing*, Best CSR & TJSL kategori *Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023 (The Economics Best 50 Most CEO Awards 2023)*;
3. Winner: ASEAN GRC Award, Runner-up: Public Initiative Award (*Enterprise Risk Management Academy (ERMA) ASEAN Risk Awards 2023*);
4. Social Innovation: kategori Silver (*Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2023*);
5. *The Best GRC for Corporate Culture 2023, The Best GRC for Corporate Finance 2023, The Best CEO for GRC Excellence 2023 (GRC & Performance Excellence Award 2023)*; dan
6. *Top GRC Award #5, The Most Committed GRC Leader 2023 (Top GRC Awards 2023)*.

Some of the awards received include:

1. PPP Agency of the Year 2023 (*The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards*)
2. Indonesia Best CEO Award 2023 in the *Infrastructure Support Financing* category, Best CSR & TJSL in the *Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023* category (*The Economics Best 50 Most CEO Awards 2023*);
3. Winner: ASEAN GRC Award, Runner-up: Public Initiative Award (*Enterprise Risk Management Academy (ERMA) ASEAN Risk Awards 2023*);
4. Social Innovation: Silver category (*Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2023*);
5. *The Best GRC for Corporate Culture 2023, The Best GRC for Corporate Finance 2023, The Best CEO for GRC Excellence 2023 (GRC & Performance Excellence Award 2023)*; and
6. *Top GRC Award #5, The Most Committed GRC Leader 2023 (Top GRC Awards 2023)*.

Skor Penilaian Assessment Atas Penerapan GCG di Perseroan

Assessment Score of GCG Implementation at the Company

Wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan, juga dibuktikan dengan hasil skor penilaian GCG pada tahun buku 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun buku 2022. Berikut hasil penilaian atas penerapan GCG dalam 5 (lima) tahun terakhir:

The Company's commitment to implementing GCG sustainably is also evidenced by the assessment score of GCG implementation in the 2023 fiscal year, which saw an improvement compared to the 2022 fiscal year. Below are the assessment results for GCG implementation over the past 5 years:



Tahun Year	Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	Kualitas Quality	Pelaksana Penilai Assessors
2023*	90,036	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Finance and Development Supervisory Agency
2022	88,170	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Finance and Development Supervisory Agency
2021	89,060	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Finance and Development Supervisory Agency
2020	89,120	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Finance and Development Supervisory Agency
2019	89,082	Sangat Baik Very Good	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Finance and Development Supervisory Agency

* Hasil *assessment* GCG tahun 2023, dijelaskan lebih lanjut pada sub bab Evaluasi Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini

* The results of the 2023 GCG assessment are further elaborated in the sub-section on Corporate Governance Compliance Evaluation in the Corporate Governance section of this Annual Report.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ dengan kewenangan tertinggi dalam proses pengambilan keputusan penting yang memprioritaskan kepentingan Perseroan serta dilakukan secara wajar dan transparan. Kewenangan RUPS tidak didelegasikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas-batas yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In accordance with the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority organ in the process of making important decisions that prioritize the Company's interests and is conducted in a fair and transparent manner. The authority of the GMS is not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits stipulated in the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Dasar Penyelenggaraan RUPS Basis for GMS Implementation

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilaksanakan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut perubahannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
5. Anggaran Dasar Perseroan.

The Company's GMS is carried out with reference to the provisions, among others:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and its amendments;
3. Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
4. Minister of Finance Decree No. 505/KMK.06/2020 on the Guidelines for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance; and
5. Company's Articles of Association.



Hak dan Wewenang RUPS

Rights and Authorities of GMS

Sebagaimana tercantum dalam PMK No.88/PMK.06/2015 disebutkan bahwa hak RUPS, antara lain:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya; dan
4. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan juga dalam PMK No.88/PMK.06/2015 bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan/atau anggaran dasar.

As stated in PMK No. 88/PMK.06/2015, the rights of the GMS include:

1. Attending and voting in the GMS, provided that one share entitles its holder to cast one vote;
2. Obtaining material information about the Company, in a timely, measured, and regular manner;
3. Receiving a distribution of the Company's profits allocated to Shareholders in the form of dividends, and the remaining assets from liquidation, proportional to the number of shares owned; and
4. Having other rights based on the articles of association and laws and regulations.

The PMK No. 88/PMK.06/2015 also stated that the GMS is an organ in the Company that has the rights that are not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners, within the scope stipulated in the law and/or articles of association.

Jenis-Jenis Pelaksanaan RUPS

Types of GMS

Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20, Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan setiap tahun meliputi Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

In line with Article 20 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders consists of:

1. Annual General Meeting of Shareholders, held every year, including the General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the Annual Report and the Annual General Meeting of Shareholders regarding the Approval of the Company's Work Program and Budget.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders, i.e., General Meeting of Shareholders held at any time based on the need for the Company's interests.

Prosedur Pelaksanaan RUPS

GMS Procedure

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan Tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

The Board of Directors shall organize the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders preceded by an invitation to the GMS. The GMS summons shall be delivered within a period of at most fourteen (14) days before the date the GMS is held, excluding the date of the summons and the date of the GMS. The summon to the GMS shall be made by registered mail and/or by advertisement in a newspaper. The summon to the GMS shall state the date, time, place, and agenda of the Meeting, as well as a notification that the materials to be discussed in the GMS are available at the Company's office from the date of the invitation to the GMS until the date of the GMS.



RUPS dapat dilaksanakan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar menentukan lain.

The GMS may be held if at least 51% (fifty-one per cent) of the total number of shares with voting rights are present or represented in the GMS, unless the prevailing laws and/or the article of association specify otherwise.

Pelaksanaan RUPS Perseroan Tahun 2023

Company's GMS in 2023

Selama tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022;
2. RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024; dan
3. RUPS Luar Biasa Tahun 2023.

In 2023, the Company conducted GMS consisting of:

1. Annual GMS to Approve the Annual Report for the 2022 Fiscal Year;
2. Annual GMS to Approve the Company's Work Program and Budget in 2024; and
3. Extraordinary GMS in 2023.

Berikut penjelasan dari masing-masing pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2023:

The following is an elaboration of each Annual GMS and Extraordinary GMS in 2023:

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022

Annual GMS to Approve the Annual Report for the 2022 Fiscal Year

Tanggal Undangan RUPS	GMS Invitation Date	2 Mei 2023 2 May 2023
Tanggal & Waktu RUPS	GMS Date & Time	19 Mei 2023 19 May 2023
Lokasi	Location	Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Meeting Room of the Directorate General of State Assets Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 10 Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4 Jakarta
Pimpinan RUPST	AGMS Chairman	Rionald Silaban, SH
Kuorum	Quorum	100%
Pihak Independen	Independent Party	• Arry Supratno, SH Notaris Notary • Jimmy Pangestu KAP PAF

Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi Atas Pelaksanaan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022

Agenda, Resolutions, and Follow-up or Realisation of the GMS Annual Report for the 2022 Fiscal Year

Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yang mencakup: a. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022; dan b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk: a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022; dan b. Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan 1. Approving the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year, including: a. Ratifying the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year; and b. Granting full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management carried out during the 2022 Fiscal Year, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the Annual Report including the Company's Financial Statements	1. Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 <u>telah disahkan</u> oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung.



Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
1. Approval of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year, which includes: - Ratification of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year; and - Granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management carried out during the 2022 Fiscal Year.	1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp714.173.621.000,- (tujuh ratus empat belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu Rupiah) untuk dialokasikan sebagai: - Cadangan wajib sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp35.708.681.050,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh Rupiah); - Dividen sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih atau sebesar Rp142.834.724.200 (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus Rupiah); dan - Sisanya sebesar 535.630.215.750 (lima ratus tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara dipisahkan oleh Bendahara umum Negara. 2. Approving the use of net income for the 2022 fiscal year amounting to Rp714,173,621,000 (seven hundred fourteen billion one hundred seventy-three million six hundred twenty-one thousand rupiah) to be allocated as: - Mandatory reserve of 5% (five per cent) of net income or Rp35,708,681,050 (thirty-five billion seven hundred eight million six hundred eighty-one thousand fifty rupiah); - Dividend of 20% (twenty per cent) of net income or Rp142,834,724,200 (one hundred forty-two billion eight hundred thirty-four million seven hundred twenty-four thousand two hundred rupiah); and - The remaining amount of Rp535,630,215,750 (five hundred thirty-five billion six hundred thirty million two hundred fifteen thousand seven hundred fifty rupiah) shall be designated as retained earnings. Dividend payments shall be made immediately in accordance with Minister of Finance Regulation No. 179/PMK.02/2022 Procedure of Payment of Non-Tax State Revenue from the Result of Separated State Assets.	1. The Annual Report that consist of the Financial Statements and the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions carried out in the 2022 Fiscal Year, has been approved by the Shareholders at the GMS. 1. Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 2. Pembayaran dividen telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan RUPS penetapan besaran dividen, dimana Perseroan telah menyetorkan dividen tersebut pada tanggal 9 Juni 2023. 1. Shareholders have determined the utilization of net income for the 2022 fiscal year through the General Meeting of Shareholders for the Annual Report for the 2022 Fiscal Year. 2. Dividend has been paid, in accordance with the provisions in the Minister of Finance Regulation No. 179/PMK.02/2022, which is not more than one (1) month after the date of the GMS Resolution determining the amount of dividends. The Company deposited the dividends on 9 June 2023.



Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
3. Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2022. Determination of the salary/honorarium and allowances/facilities of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2023 Fiscal Year, as well as the payment of Tantiem based on the performance of the 2022 Fiscal Year.	3. Penetapan keputusan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2022 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. 3. Determination of the adjustment of the salary/honorarium and benefits/facilities of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2022 performance, which would be determined separately through a Shareholder Resolution to be carried out circularly.	1. Pemegang Saham telah menetapkan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor KMK-174/KM.6/2023 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2022 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023. 1. The Shareholders have determined the adjustment of the salary/honorarium and allowances/facilities of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2022 performance via the General Meeting of Shareholders of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year, in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. KMK-174/KM.6/2023 on the Approval to Pay Tantiem for the 2022 Fiscal Year and Determination of the Board of Directors' Salary, Board of Commissioners' Honorarium, Allowances, and Facilities Provided to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year.

RUPS Tahunan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2024

Annual GMS to Approve the Company's Work Program and Budget in 2024

Tanggal Undangan RUPS	GMS Invitation Date	28 November 2023
Tanggal & Waktu RUPS	GMS Date & Time	20 Desember 2023 20 December 2023
Lokasi	Location	The Westin Jakarta Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. C-22A RT/RW 002/005 Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Pimpinan RUPST	AGMS Chairman	Rionald Silaban, SH
Kuorum	Quorum	100%
Pihak Independen	Independent Party	Arry Supratno, SH Notaris Notary



Agenda, Keputusan dan Tindak Lanjut atau Realisasi Atas Pelaksanaan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2024

Agenda, Resolutions, and Follow-up or Realisation of the GMS 2024 Work Program and Budget of the Company

Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2024 Approval of the Company's 2024 Work Program and Budget	Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2024 Approving and ratifying: The Company's 2024 Work Program and Budget	RKAP 2024 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung 2024 RKAP has been ratified by the Shareholders during the GMS
Persetujuan atas Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan Tahun 2024 Approval of the Company's Management Performance Contract in 2024	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan Tahun 2024 Approving and ratifying the Company's Management Performance Contract in 2024	Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan 2024 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung The Company's Management Performance Contract in 2024 has been ratified by the Shareholders at the GMS
Persetujuan atas Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024 Approval of the Company's Board of Commissioners' Performance Contract in 2024	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024 Approving and ratifying the Company's Board of Commissioners' Performance Contract in 2024	Kontrak Kinerja Dewan Komisaris 2024 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung The Board of Commissioners' Performance Contract in 2024 has been ratified by the Shareholders at the GMS

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2023

Extraordinary GMS in 2023

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Luar Biasa dapat diadakan sepanjang waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Pemegang Saham tidak menyelenggarakan secara fisik RUPS Luar Biasa, akan tetapi dengan menerbitkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sebanyak 3 (tiga) Keputusan, yaitu:

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, Extraordinary GMS can be held at any time based on the need for the Company's interests. In 2023, the Shareholders did not physically organize an Extraordinary GMS, but instead issued three (3) circular Shareholder Resolutions:

31 Januari 2023 31 January 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Dismissal and Appointment of Members of the Board of the Company
22 Februari 2023 22 February 2023	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham* dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into Share Capital* and Amendment to the Articles of Association of the Company
19 Juni 2023 19 June 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company

*) Penambahan Penyertaan Modal Negara tersebut telah diterima Perseroan pada tahun 2022

*) The Company received this additional State Capital Injection in 2022



Keputusan RUPS Sebelumnya dan Tindak Lanjutnya

Previous GMS Resolution and Follow-up

Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS tahun buku 2021 yang diselenggarakan tahun 2022 telah dilaksanakan. Berikut Keputusan RUPS tahun buku 2021 yang diselenggarakan di tahun 2022 dan tindak lanjutnya:

All recommendations from the GMS Resolution for the 2021 fiscal year held in 2022 have been implemented. The following is the GMS Resolution for the 2021 fiscal year held in 2022 and its follow-up:

Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 Annual GMS to Approve the Annual Report for the 2021 Fiscal Year	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk: - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021; dan - Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan. - Approving the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year, including: - Ratifying the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year; and - Granting full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervision and management carried out during the 2021 Fiscal Year, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the Annual Report including the Company's Financial Statements. - Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp625.402.136.000,- (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus dua juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) untuk dialokasikan sebagai: - Cadangan wajib sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp31.270.106.800,- (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu delapan ratus Rupiah); - Dividen sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp156.350.534.000,- (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah); dan - Sisanya sebesar Rp437.781.495.200,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan. - Pembayaran dividen agar segera dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. - Approving the use of net income for the 2021 fiscal year amounting to Rp625,402,136,000 (six hundred twenty-five billion four hundred two million one hundred thirty-six thousand rupiah) to be allocated as: - Mandatory reserve of 5% (five per cent) of net income or Rp31,270,106,800 (thirty-one billion two hundred seventy million one hundred six thousand eight hundred rupiah); - Dividend of 25% (twenty per cent) of net income or Rp156,350,534,000 (one hundred fifty-six billion three hundred fifty million five hundred thirty-four thousand rupiah); and - The remaining amount of Rp437,781,495,200 (four hundred thirty-seven billion seven hundred eighty-one million four hundred ninety-five thousand two hundred rupiah) shall be designated as retained earnings. - Dividend payments shall be made immediately in accordance with prevailing laws and regulations.	Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan serta pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung. The Annual Report that consist of the Financial Statements and the granting of full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions carried out in the 2021 Fiscal Year, and has been approved by the Shareholders at the GMS. - Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 - Pembayaran dividen telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2017, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah tanggal keputusan RUPS penetapan besaran dividen, dimana Perseroan telah menyetorkan dividen tersebut pada tanggal 29 Juni 2022. - Shareholders have determined the utilization of net income for the 2021 fiscal year via the General Meeting of Shareholders for the Annual Report for the 2021 Fiscal Year. - Dividend has been paid, in accordance with the provisions in the Minister of Finance Regulation No. 190/PMK.02/2017, which is not more than one (1) month after the date of the GMS Resolution determining the amount of dividends. The Company deposited the dividends on 29 June 2022.



Agenda	Keputusan Decisions	Tindak Lanjut Follow Up
	3. Penetapan keputusan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2021 akan ditetapkan secara terpisah melalui keputusan Pemegang Saham yang akan dilakukan secara sirkuler. 3. Determination of the adjustment of the salary/honorarium and benefits/facilities of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2021 performance, which would be determined separately through a Shareholder Resolution to be carried out circularly.	3. Pemegang Saham telah menetapkan penyesuaian gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2021 melalui Surat Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor KMK-135/KM.6/2022 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2021 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. 3. The Shareholders have determined the adjustment of the salary/honorarium and allowances/facilities of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year, as well as the payment of tantiem based on the 2021 performance via the General Meeting of Shareholders of the Annual Report for the 2021 Fiscal Year, in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia No. KMK-135/KM.6/2022 on the Approval to Pay Tantiem for the 2021 Fiscal Year and Determination of the Board of Directors' Salary, Board of Commissioners' Honorarium, Allowances, and Facilities Provided to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year.
RUPS Luar Biasa Persetujuan RJP Tahun 2023-2027 Extraordinary GMS for 2023 - 2027 RJP Approval	Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perseroan Tahun 2023 - 2027 yang diajukan oleh Direksi. Approving and ratifying the Company's Long-Term Plan for 2023-2027 as proposed by the Board of Directors.	RJPP 2023-2027 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung tanggal 15 Desember 2022 2023-2027 RJPP has been approved and ratified by the Shareholders during the GMS on 15 December 2022.
RUPS Tahunan Persetujuan RKAP Tahun 2023 Annual GMS for 2023 RKAP Approval	Menyetujui dan mengesahkan: 1. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun 2023; 2. Persetujuan atas Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan Tahun 2023; dan 3. Persetujuan atas Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023. Approving and ratifying: 1. Approval of the Company's 2023 Work Program and Budget; 2. Approval of the Company's Management Performance Contract in 2023; and 3. Approval of the Company's Board of Commissioners' Performance Contract in 2023.	RKAP 2023, Kontrak Kinerja Manajemen Perseroan 2023 dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris 2023 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung tanggal 15 Desember 2022 The 2023 RKAP, the 2023 Management Performance Contract, and the 2023 Board of Commissioners' Performance Contract were ratified by the Shareholders during the GMS on 15 December 2022.



Direksi Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tugas dan tanggung jawab secara kolegal terkait kepengurusan Perseroan. Bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola Perseroan atas kepentingan Perseroan merealisasikan visi dan misi. Direksi juga memiliki peran vital dalam memastikan keberlangsungan aktivitas bisnis serta operasional Perseroan, memastikan kinerja optimal dan nilai tambah optimal bagi Pemegang Saham. Selain menjalankan tugas secara kolegal, anggota Direksi juga dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan bidang yang dipimpinnya.

The Board of Directors serves as an organ within the Company responsible for collegially performs duties and responsibilities concerning the Company's management. As representatives of the Company, the Board of Directors assumes full responsibility for managing the Company in pursuit of its vision and mission. The Board of Directors play a crucial role in sustaining the Company's business activities and operations, optimizing performance, and maximizing value for Shareholders. Alongside their collegial responsibilities, individual members of the Board of Directors may also carry out specific tasks and decisions within their respective areas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Board of Directors Appointment and Dismissal

Sebagai Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, dan perubahannya melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 59/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 135/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Seluruh Direksi Perseroan merupakan individu profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

As a State-Owned Enterprise under the Ministry of Finance, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors are regulated by the Company's Articles of Association and Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, along with its subsequent amendments:

1. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 59/PMK.06/2016 on the Amendment to Minister of Finance Regulation No. 78/PMK.06/2015 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance;
2. Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 135/PMK.06/2017 on the Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) Under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

All members of the Company's Board of Directors are qualified professionals who meet the criteria for appointment as specified above.

Masa Jabatan Direksi Board of Directors Term of Office

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan bahwa RUPS dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

In accordance with the Company's Articles of Association, the term of office for the Board of Directors members is established at 5 (five) years and may be extended for 1 (one) additional term, subject to possible dismissal by the GMS at any time.



Komposisi Direksi

Board of Directors Composition

Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi. Berikut Komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2023:

In 2023, the composition of the Board of Directors remained unchanged. The following is the composition of the IIGF's Board of Directors as of December 31, 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	Diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 890/KMK.06/2019 tanggal 29 November 2019 dan diangkat kembali melalui KMK No. 340/KMK.06/2022 Initially appointed according to the Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 890/KMK.06/2019 dated November 29, 2019 and subsequently reappointed through KMK No. 340/KMK.06/2022.	• Periode ke 1 29 November 2019 s.d 3 Desember 2022 • Periode ke 2 4 Desember 2022 s.d. 3 Desember 2027 • 1st Period: November 29, 2019 to December 3, 2022 • 2nd Period: December 4, 2022 to December 3, 2027
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 127/KMK.06/2020 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 127/KMK.06/2020	23 Maret 2020 s.d. 22 Maret 2025 March 23, 2020 to March 22, 2025
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 14/KMK.06/2022 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 14/KMK.06/2022	17 Januari 2022 s.d. 16 Januari 2027 January 17, 2022 to January 16, 2027

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sehingga diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, cepat, dan menjunjung tinggi independensi semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

The determination of the composition and number of members of the Board of Directors is adjusted to the Company's requirements, aiming for effective, accurate, and prompt decision-making while upholding independence solely for the benefit of the Company.

Independensi Direksi

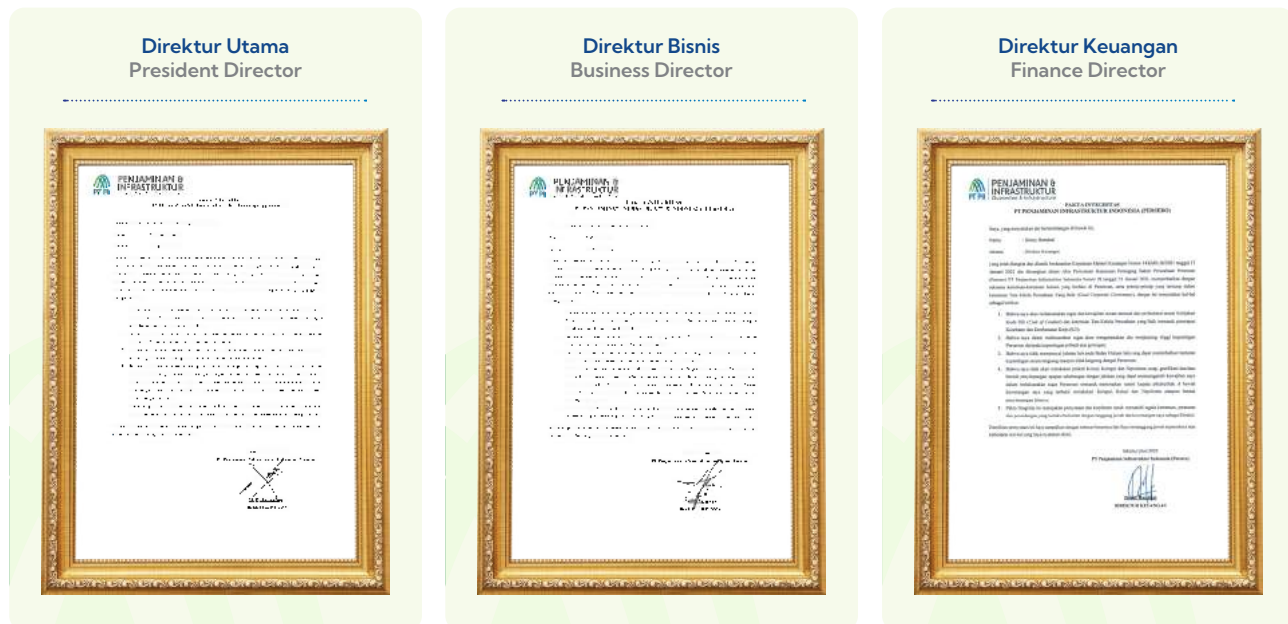
Board of Directors Independence

Perseroan menganggap independensi Direksi sebagai satu hal penting yang harus dijaga agar setiap anggota Direksi dapat bertindak secara optimal demi kepentingan Perseroan. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan telah menetapkan ketentuan bahwa selain Direksi, pihak lain dilarang melakukan intervensi atau campur tangan dalam kepengurusan Perseroan. Setiap anggota Direksi diharapkan mampu membuat keputusan secara objektif, bebas dari benturan kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Selain itu, setiap anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi mereka dalam mengurus Perseroan.

The Company considers the independence of the Board of Directors as crucial for ensuring that each member can function effectively in the Company's best interests. In order to uphold this principle, the Company has established regulations prohibiting any external parties, apart from the Board of Directors, from intervening or interfering in the Company's management. Every member of the Board of Directors is expected to make decisions objectively, devoid of conflicts of interest, and unaffected by external influences. Furthermore, each member of the Board of Directors is forbidden from engaging in activities that could compromise their independence in managing the Company.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2023 telah menyatakan independensinya dalam Pakta Integritas yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

Each member of the Board of Directors who served in 2023 has affirmed their independence by signing an Integrity Pact at the commencement of their appointment, and renewed at the beginning of each year.



Kebijakan Tata Laksana Kerja Direksi Board Manual

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi merujuk pada Kebijakan Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Pokok-pokok yang diatur dalam *Board Manual* terkait Direksi antara lain adalah:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
3. Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi
4. Benturan kepentingan
5. Kekosongan jabatan dan pelimpahan wewenang
6. Pemberhentian sementara dan pengunduran diri Direksi
7. Organ Pendukung Direksi
8. Pelaporan
9. Penilaian Kinerja Direksi
10. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
11. Program Pengenalan Perusahaan
12. Program Pelatihan Direksi
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri
14. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
15. Penetapan Penghasilan Direksi

Board Manual Perseroan lebih lengkapnya dapat dilihat atau diunduh pada *website* Perseroan <https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan>.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors refers to the Work Procedure Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors (*Board Manual*).

The provisions outlined in the *Board Manual* pertaining to the Board of Directors as follows:

1. General Provisions
2. Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors
3. Meetings and Decision Making of the Board of Directors
4. Conflict of Interest
5. Vacancy and Delegation of Authority
6. Temporary Dismissal and Resignation of the Board of Directors
7. Supporting Organ of the Board of Directors
8. Reporting
9. Performance Assessment of the Board of Directors
10. Actions of the Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners or GMS
11. Company Induction Program
12. Board of Directors Training Program
13. Overseas Service Travel
14. Communication and Correspondence System between the Board of Directors and the Board of Commissioners
15. Determination of Income for the Board of Directors

The Company's *Board Manual* is accessible for viewing or downloading on the Company's *website* at <https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan>.



Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Directors

Terkait pengelolaan dan pengurusan Perseroan, maka sesuai Anggaran Dasar, Direksi mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi berwenang untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
 - b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
 - g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Related to the management and administration of the Company, the Board of Directors has the following duties, responsibilities and authorities as follows:

1. Carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, as well as representing the Company both inside and outside the court on all matters and events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association, and/or further restrictions or directions agreed by the Shareholders based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors is authorized to:
 - a. Determining the Company's management policy;
 - b. Regulating the transfer of power from the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company in and out of court;
 - c. Regulating the transfer of power from the Board of Directors to one or several employees of the Company either individually or jointly or to other persons, to represent the Company in and out of court;
 - d. Regulating the provisions concerning the Company's employment including the determination of salaries, pensions or old age security and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions or old age security and other income for employees that exceed the obligations stipulated by laws and regulations, must obtain prior approval from the General Meeting of Shareholders;
 - e. Appointing and dismissing the Company's employees based on the Company's personnel regulations and prevailing laws and regulations;
 - f. Appointing and dismissing the Corporate Secretary;
 - g. Performing all actions and other deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, as well as representing the Company in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association and/or the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.



3. Direksi berkewajiban untuk:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- d. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
- e. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perseroan;
- f. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
- g. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;
- h. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
- i. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf butir d dan e dan dokumen Perseroan lainnya;
- l. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;

3. The Board of Directors is obligated to:

- a. Striving and ensuring the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes, objectives, and business activities;
- b. Preparing the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, and its amendments, as well as submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders for ratification by the General Meeting of Shareholders;
- c. Providing explanations to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
- d. Preparing the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, and Minutes of the Board of Directors Meeting;
- e. Preparing the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents;
- f. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submitting them to a Public Accountant for audit;
- g. Submitting the Annual Report, including the Financial Statements, to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification, as well as reporting on the Company's rights not recorded in the books, such as the result of receivables write-off;
- h. Providing explanations to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report;
- i. Submitting the approved Balance Sheet and Income Statement to the Minister in charge of Law and Human Rights, as required by laws and regulations;
- j. Reporting changes in the composition of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights;
- k. Maintaining the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners Meeting, Minutes of the Board of Directors Meeting, Annual Report, financial documents of the Company as referred to in points d and e of this paragraph and other Company's documents;
- l. Safeguarding at the Company's domicile: Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of the Board of Commissioners Meeting, Minutes of the Board of Directors Meeting, Annual Report, financial documents, and other Company documents;



- m. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - n. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
 - o. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
 - p. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
 - q. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) organisasi Perseroan;
 - r. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
6. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang telah diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
- m. Developing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, particularly the functions of management, recording, storage, and supervision;
 - n. Providing periodic reports in accordance with the manner and time prescribed by applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders;
 - o. Preparing the Company's organizational structure complete with details and duties;
 - p. Providing explanations on all matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
 - q. Preparing and stipulating the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of the Company's organization;
 - r. Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in these Articles of Association and those stipulated by the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations.
4. In carrying out their duties, the Board of Directors devoting their full energy, thoughts, attention, and devotion to the duties, obligations, and achievement of the Company's objectives;
5. In performing their duties, members of the Board of Directors require to comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations, along with implementing the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
6. Each member of the Board of Directors must in good faith and with full responsibility perform their duties for the interests and business of the Company with due observance of the applicable laws and regulations;
7. Each member of the Board of Directors is personally liable if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties for the interest and business of the Company, unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:
 - a. The loss was not caused by their fault or their negligence;
 - b. Has carried out management in good faith and prudence for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - c. Has no conflict of interest either directly or indirectly over the management actions that resulted in the loss; and
 - d. Has taken actions to prevent the incidence or continuation of such loss.
8. Undertaking actions by members of the Board of Directors, other than those decided upon in the Board of Directors Meetings, remains the personal responsibility of the individual concerned until the action receives approval in the Board of Directors Meeting.



Pembagian Tugas Direksi

Division of Duties of the Board of Directors

Sejalan dengan *Board Manual*, salah satu kewajiban Direksi adalah menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/SK/PII-BOD/0522 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Direksi Perseroan, Direksi PT PII menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

According to the Board Manual, if the GMS does not determine the division of duties and authorities, it is the obligation of the Board of Directors to establish it. Therefore, following the Decree of the Board of Directors No. 006/SK/PII-BOD/0522 on the Division of Duties and Authorities of the Company's Board of Directors, the Board of Directors establishes the division of duties for each member as follows:

Jabatan Position	Tugas Direksi Board of Directors Duties	
Direktur Utama President Director	- Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama yang dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya - Mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengurusan/pengelolaan Perseroan oleh anggota Direksi lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan. - Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi pengawasan intern, sekretariat perusahaan, manajemen risiko, hukum dan kepatuhan serta inisiasi bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Utama sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi - Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi	- Utilizing the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company, provided that all actions by the President Director have obtained approval in Board of Directors Meetings or other applicable provisions - Coordinating the implementation of the Company's management function by other members of the Board of Directors, aligning with the policies established by the General Meeting of Shareholders and/or the Company's Articles of Association - Supervising the responsibilities of the Business Director and Finance Director - Leading and overseeing the implementation of tasks related to internal control, corporate secretariat, risk management, legal compliance, business initiation, and other functions within the President Director purview, as specified in the Board of Directors Decree on Organizational Structure - Providing input, considerations, or suggestions in formulating the Company's strategy, policies, and/or decision-making processes of the Board of Directors.
Direktur Keuangan Finance Director	- Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya - Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi keuangan dan perbendaharaan, investasi, sumber daya manusia, pengembangan organisasi, layanan Perseroan, pengadaan, teknologi informasi, penjaminan non-KPBU dan pemantauan proyek dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Keuangan sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi - Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi	- Representing the Company in activities related to functions falling under the purview of the Finance Director, as outlined in the Board of Directors Decree on Organizational Structure or based on decisions made during Board of Directors Meetings or other applicable provisions - Leading and overseeing the execution of tasks pertaining to finance and treasury, investment, human resources, organizational development, corporate services, procurement, information technology, non-Public Private Partnership (PPP) guarantee, project monitoring, and other functions within the authority of the Finance Director, as specified in the Board of Directors Decree on Organizational Structure - Providing input, considerations, or suggestions in determining the Company's strategy, policies, and/or decision-making processes of the Board of Directors.



Jabatan Position	Tugas Direksi Board of Directors Duties	
Direktur Bisnis Business Director	1. Mewakili Perseroan untuk kegiatan terkait fungsi yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi atau berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau ketentuan yang berlaku lainnya. 2. Memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang terkait dengan fungsi bimbingan dan konsultasi bisnis, penilaian proyek (baik teknis, finansial, maupun lingkungan dan sosial), penjaminan KPBU dan edukasi pemangku kepentingan serta pengembangan ekosistem bisnis dan fungsi lainnya yang ada pada garis komando Direktur Bisnis sesuai dengan SK Direksi tentang Struktur Organisasi. 3. Memberikan bahan masukan, pertimbangan atau saran-saran dalam menentukan strategi, kebijakan Perseroan dan/atau pengambilan keputusan Direksi.	1. Representing the Company in activities related to functions falling under the purview of the Business Director, as stipulated in the Board of Directors' Decree on Organizational Structure or based on decisions made during Board of Directors Meetings or other applicable provisions. 2. Leading and overseeing the implementation of tasks pertaining to business guidance and consultation, project appraisal (including technical, financial, environmental, and social aspects), PPP guarantee, stakeholder knowledge, business ecosystem development, and other functions within the authority of the Business Director, as outlined in the Board of Directors Decree on Organizational Structure. 3. Providing input, considerations, or suggestions in determining the Company's strategy, policies, and/or decision-making processes of the Board of Directors.

Benturan Kepentingan dan Rangkap Jabatan

Conflict of Interest and Concurrent Position

Selaras dengan *Board Manual*, para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perseroan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan di Perseroan, anggota Direksi diminta untuk menandatangani Pakta Integritas pada awal masa pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun, yang memuat pernyataan bahwa Direksi tidak memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

According to the Board Manual, members of the Board of Directors are forbidden from engaging in actions that present conflicts of interest or result in personal gains, whether directly or indirectly, from the decisions and operations of the Company, apart from legitimate income.

Board of Directors members are restricted from concurrently serving in the following capacities:

1. Members of the Board of Directors at State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and Private-Owned Enterprises;
2. Members of the Board of Commissioner/Supervisory Board Member at a State-Owned Enterprise;
3. Other structural and functional roles within central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions as stipulated by laws and regulations;
5. Roles in political party management and/or candidates for legislative and/or Regional Head/Deputy Regional Head positions; and/or
6. Other positions that could potentially lead to conflicts of interest.

In order to mitigate conflicts of interest within the Company, the Board of Directors members are mandated to sign an Integrity Pact at the commencement of their appointment term, with renewal required at the start of each subsequent year. This Pact includes a statement from the Board of Directors, ensuring the absence of any conflicts of interest in the implementation of their duties.



Selama tahun 2023, seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan serta tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang. Direksi Perseroan memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

Throughout 2023, none of the Board of Directors members had conflicts of interest or potential conflicts of interest with the Company, nor did they hold any prohibited concurrent positions. The Board of Directors is committed to preventing potential conflicts of interest and consistently positioning itself to avoid such conflicts in all situations.

Rapat Direksi Board of Directors Meetings

Rapat Direksi dilaksanakan sebagai sarana pengambilan keputusan dan/atau pembahasan dan diskusi mengenai hal-hal terkait kepengurusan Perseroan. Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala, paling kurang satu kali dalam satu bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

1. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
2. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
3. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

Dalam Rapat Direksi, Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.

Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

The Board of Directors meetings serve as a forum for decision-making and/or discussion of matters concerning the Company's management. These meetings occur regularly, typically at least once a month. Additionally, the Board of Directors Meetings may be convened at any time if:

1. Considered necessary by one or more members of the Board of Directors;
2. Upon the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or
3. Upon the written request of 1 (one) or more Shareholders, jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

During the Board of Directors Meeting, the Board of Directors has the option to invite the Board of Commissioners.

Board of Directors Meetings may also be conducted via teleconference, video conference, or other electronic media facilities enabling all participants to directly see and/or hear each other and engage in the meeting.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2023 Frequency of the Board of Directors Meetings in 2023

Selama tahun 2023, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 82 kali rapat yang terdiri dari rapat internal Direksi sebanyak 65 kali rapat dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 17 kali rapat.

In 2023, the Board of Directors conducted 82 meetings, comprising 65 internal meetings of the Board of Directors and 17 joint meetings with the Board of Commissioners.



Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal dan Gabungan Direksi Tahun 2023

Attendance Rate of the Board of Directors in Internal and Joint Meetings of the Board of Directors in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi Attendance of the Board of Directors in Internal Meetings of the Board of Directors			Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris) Attendance of the Board of Directors in Joint Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners)		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	65	65	100%	17	17	100%
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	65	64	99%	17	17	100%
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	65	65	100%	17	17	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Average Attendance Rate of the Board of Directors				99%			100%
Frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat internal maupun rapat gabungan bersama Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebijakan rapat yang diatur dalam Board Manual. The frequency and attendance rate of the Board of Directors at internal meetings and joint meetings with the Board of Commissioners has adhere to the meeting policy outlined in the Board Manual.							

Tingkat Kehadiran Direksi dalam RUPS Tahun 2023

Attendance Rate of the Board of Directors in GMS Year 2023

Tanggal Date	Agenda	Realisasi Realization		
		Muhammad Wahid Sutopo	Andre Permana	Donny Hamdani
19 Mei 2023 19 May 2023	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 AGMS Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year	√	√	√
20 Desember 2023 20 December 2023	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2024 AGMS Company's 2024 Work Plan & Budget (RKAP)	√	√	√

Agenda Rapat Internal Direksi Tahun 2023

Agenda for Internal Meetings of the Board of Directors in 2023

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda
1	3 Januari 2023 3 January 2023	Pembahasan Rencana Penguatan IIGF Institute Discussion on IIGF Institute Strengthening Plan
2	3 Januari 2023 3 January 2023	Pemberian Tanggapan terkait Amandemen PPJT Proyek Providing Responses Related to Toll Road Concession Agreement (PPJT) Project Amendments
3	9 Januari 2023 9 January 2023	Pembahasan IKU Direksi Tahun 2023 Discussion on the Board of Directors KPIs for 2023
4	24 Januari 2023 24 January 2023	Update Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Update on the Signing of Project's Guarantee Agreement and Recourse Agreement



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda
5	20 Februari 2023 20 February 2023	Pembahasan Appraisal Proyek dan Penerbitan <i>Draft</i> GA Proyek Discussion on Project Appraisal and Issuance of GA Draft Project
6	21 Februari 2023 21 February 2023	Pembahasan Appraisal Proyek dan Penerbitan <i>Draft</i> GA Proyek [Lanjutan] Discussion on Project Appraisal and Issuance of GA Draft Project [Continuation]
7	21 Februari 2023 21 February 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Januari 2023 Discussion on the Management Report for January 2023
8	23 Februari 2023 23 February 2023	Pembahasan <i>In Principal Approval</i> Proyek Discussion on the In Principal Approval of Project
9	23 Februari 2023 23 February 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Januari 2023 [Lanjutan] Discussion on the Management Report for January 2023 [Continuation]
10	21 Maret 2023 21 March 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Februari 2023 Discussion on the Management Report for February 2023
11	21 Maret 2023 21 March 2023	Pembahasan Evaluasi Klaim Penjaminan atas Proyek Discussion on the Evaluation of Guarantee Claims on the Project
12	27 Maret 2023 27 March 2023	Pembahasan <i>Strategy, Target and Positioning</i> IIGF Institute Discussion on the Strategy, Targets, and Positioning of the IIGF Institute
13	27 Maret 2023 27 March 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Februari 2023 [Lanjutan] Discussion on the Management Report for February 2023 [Continuation]
14	28 Maret 2023 28 March 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Februari 2023 [Lanjutan] Discussion on the Management Report for February 2023 [Continuation]
15	10 April 2023 10 April 2023	Pembahasan Penugasan PDF Proyek Discussion on the PDF Project Assignment
16	10 April 2023 10 April 2023	<i>Update</i> Struktur Penjaminan Proyek Update on the Project Guarantee Structure
17	13 April 2023 13 April 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Maret 2023 Discussion on the Management Report for March 2023
18	17 April 2023 17 April 2023	Pembahasan Appraisal Proyek Discussion on the Project Appraisal
19	11 Mei 2023 11 May 2023	Pembahasan Appraisal Proyek dan <i>Structuring</i> Proyek Discussion on Project Appraisal and Structuring
20	12 Mei 2023 12 May 2023	Pembahasan Appraisal Proyek dan <i>Structuring</i> Proyek [Lanjutan] Discussion on Project Appraisal and Structuring [Continuation]
21	16 Mei 2023 16 May 2023	Pembahasan Usulan Imbal Jasa Penjaminan Proyek Discussion on the Project's Guarantee Fee Proposal
22	17 Mei 2023 17 May 2023	Pembahasan Klaim Penjaminan dan Regres Proyek Discussion on Project's Guarantee Claim and Recourse
23	22 Mei 2023 22 May 2023	Pembahasan Rencana Pemberian Jaminan Pinjaman Langsung Discussion on the Direct Loans and Loans Guarantee Plan
24	23 Mei 2023 23 May 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode April 2023 Discussion on the Management Report for April 2023
25	24 Mei 2023 24 May 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode April 2023 [Lanjutan] Discussion on the Management Report for April 2023 [Continuation]
26	31 Mei 2023 31 May 2023	Pembahasan Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Discussion on the Evaluation Results of Project Guarantee Claims
27	6 Juni 2023 6 June 2023	Pembahasan <i>In Principal Approval</i> Proyek Discussion on the In Principal Approval of Project
28	12 Juni 2023 12 June 2023	Pembahasan <i>Progress Report</i> Implementasi Program TJSL PT PII Tahun 2023 Discussion on the Progress Report on the Implementation of the IIGF CSR Program in 2023
29	20 Juni 2023 20 June 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Mei 2023 Discussion on the Management Report for May 2023
30	26 Juni 2023 26 June 2023	Pembahasan <i>Update</i> Realisasi Program CSR PT PII Tahun 2023 Discussion on the Realization Update of IIGF CSR Program in 2023



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda
31	26 Juni 2023 26 June 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Mei 2023 [Lanjutan] Discussion on the Management Report for May 2023 [Continuation]
32	3 Juli 2023 3 July 2023	Pembahasan Penerbitan <i>In Principal Approval</i> Proyek Discussion on the In Principal Approval Issuance
33	4 Juli 2023 4 July 2023	Pembahasan Pembayaran Klaim Penjaminan Discussion on the Payment of Guarantee Claim
34	17 Juli 2023 17 July 2023	Pembahasan Penugasan PDF Proyek Discussion on the PDF Assignment
35	17 Juli 2023 17 July 2023	<i>Update Project Database</i> dan Kaitan dengan Aspek <i>Knowledge Management</i> Update on Project Database and Link to Knowledge Management Aspects
36	20 Juli 2023 20 July 2023	Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Evaluation Results of Project Guarantee Claims
37	21 Juli 2023 21 July 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Juni 2023 Discussion on the Management Report for June 2023
38	26 Juli 2023 26 July 2023	Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Evaluation Results of Project Guarantee Claims
39	1 Agustus 2023 1 August 2023	Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Evaluation Results of Project Guarantee Claims
40	3 Agustus 2023 3 August 2023	Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek
41	4 Agustus 2023 4 August 2023	Pelaksanaan Kajian Reformasi Sektor SPAM IIGF Institute Implementation of the IIGF Institute SPAM Sector Reform Review
42	11 Agustus 2023 11 August 2023	<i>Update</i> Proyek dan Proses Penjaminan Proyek Project Update and Project Guarantee Process
43	18 Agustus 2023 18 August 2023	Pembahasan Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek Discussion on Payment of Project Guarantee Claims
44	23 Agustus 2023 23 August 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Juli 2023 Discussion on the Management Report for July 2023
45	28 Agustus 2023 28 August 2023	Pembayaran Klaim Proyek Project Claim Payments
46	29 Agustus 2023 29 August 2023	Evaluasi Permohonan Penjaminan Pemerintah Proyek Evaluation of Project Sovereign Guarantee Application
47	1 September 2023 1 September 2023	Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali (<i>Restatement</i>) AD PT PII Approval of Amendment and Restatement of IIGF AD
48	14 September 2023 14 September 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Agustus 2023 Discussion on the Management Report for August 2023
49	14 September 2023 14 September 2023	Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Signing of Project's Guarantee Agreement and Recourse Agreement
50	21 September 2023 21 September 2023	Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Evaluation Results of Project Guarantee Claims
51	27 September 2023 27 September 2023	Penyampaian RKAP PT PII Tahun 2024 Submission of IIGF's 2024 RKAP
52	3 Oktober 2023 3 October 2023	Pembahasan <i>Signing</i> Proyek Discussion on Project Signing
53	13 Oktober 2023 13 October 2023	Pembahasan <i>Signing</i> Proyek [Lanjutan] Discussion on Project Signing [Continuation]
54	18 Oktober 2023 18 October 2023	Rencana Penerbitan Jaminan Pemerintah atas Proyek Plan for Issuance of Sovereign Guarantee for the Project
55	24 Oktober 2023 24 October 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode September 2023 Discussion on the Management Report for September 2023
56	26 Oktober 2023 26 October 2023	Penetapan Status Pembayaran Klaim Penjaminan Proyek Determination of Project Guarantee Claims Payment Status



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda
57	21 November 2023 21 November 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode Oktober 2023 Discussion on the Management Report for October 2023
58	23 November 2023 23 November 2023	Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Evaluation Results of Project Guarantee Claims
59	18 Desember 2023 18 December 2023	Pembahasan Laporan Manajemen periode November 2023 Discussion on the Management Report for November 2023
60	19 Desember 2023 19 December 2023	Pra <i>Signing</i> Penjaminan Proyek Pre-Signing of Project Guarantee
61	19 Desember 2023 19 December 2023	Penyampaian Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Submission of Project Guarantee Claim Evaluation Results
62	21 Desember 2023 21 December 2023	Rencana Penjaminan dan Hasil Evaluasi Permohonan Penjaminan Pemerintah Guarantee Plan and Evaluation Results of Sovereign Guarantee Application
63	22 Desember 2023 22 December 2023	Penyiapan Penugasan PDF Proyek Preparation for PDF Project Assignment
64	22 Desember 2023 22 December 2023	Rencana Penandatanganan Penjaminan Pemerintah Sovereign Guarantee Signing Plan
65	27 Desember 2023 27 December 2023	Penyampaian Usulan Penetapan Pembayaran Klaim Proyek dan Hasil Evaluasi Klaim Penjaminan Proyek Submission of Proposed Determination of Project Claim Payment and Evaluation Results of Project Guarantee Claims





Agenda Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris

Agenda for the Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners

Informasi agenda rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dijelaskan pada sub bab Dewan Komisaris (agenda Rapat) dalam Bab Tata Kelola Perusahaan di dalam Laporan Tahunan ini.

Details regarding the agenda of the joint meetings involving both the Board of Directors and the Board of Commissioners are explained within the Board of Commissioners subsection (Meeting Agenda) in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Rencana Rapat Direksi tahun 2024

Board of Directors Meeting Plan for 2024

Sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, Direksi akan melakukan rapat Direksi antara lain meliputi (i) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan paling tidak sebulan sekali; (ii) Laporan Manajemen paling tidak sebulan sekali; (iii) Rapat Pembahasan Proyek maupun hal lainnya, tentatif setiap bulannya; dan (iv) Rapat Penyusunan RKAP atau RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan agenda antara lain:

1. Evaluasi kinerja dan laporan Perseroan;
2. Usulan peluang bisnis dan risikonya;
3. Isu perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar bagi usaha dan kinerja Perseroan; dan/atau
4. Arah dan strategi pengembangan dan peningkatan usaha bisnis Perseroan.

According to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2024, the Board of Directors will convene various meetings, including: (i) Joint Meetings with the Board of Commissioners held at least once per month; (ii) Management Report sessions also held monthly; (iii) Project Discussion Meetings and other related discussions tentatively scheduled each month; and (iv) RKAP Preparation Meetings or Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) pursuant with relevant regulations. These meetings will cover agendas such as:

1. Evaluation of the Company's performance and reports;
2. Suggest potential business opportunities and risks;
3. Significant changes in the business environment affecting the Company's operations and performance; and/or
4. Directions and strategies for the development and improvement of the Company's business.

Pelatihan Direksi

Board of Directors Training

Kebijakan pelatihan Direksi diatur dalam *Board Manual*. Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Direksi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepemimpinan serta menghadapi dinamika pasar dan industri yang terus berkembang.

The training policy for the Board of Directors is outlined in the Board Manual. The Company provides extensive opportunities for Board of Directors members to participate in competency development programs aimed at expanding their expertise and knowledge. This initiative supports the effective implementation of their duties, functions, and responsibilities in leadership roles, enabling them to navigate the evolving dynamics of the market and industry.



Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

During 2023, the Board of Directors has conducted the following training:

Nama Name	Jabatan Position	Program Pelatihan Training Program	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	<i>Workshop of Water Innovative Finance Theme Side Event Road to the 10th World Water Forum 2024</i>	20 Maret 2023 20 March 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Directorate General of Infrastructure Financing for Public Works and Public Housing, Ministry of Public Works and Housing	Bandung
		<i>High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs</i>	29 Maret 2023 29 March 2023	Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Financial Sector Policies, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance	Bali
		<i>Seminar on Financing Transition in ASEAN</i>	29 – 30 Maret 2024 29 – 30 March 2024	Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Financial Sector Policies, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance	Bali
		<i>Coaching Leadership for BOD & Deputy Director</i>	11 September 2023 11 September 2023	IIGF	Jakarta
		<i>Benchmarking dan Konfirmasi Beberapa Lembaga di Malaysia terkait KPBU</i> Benchmarking and Confirmation of Several Institutions in Malaysia related to PPPs	15 – 17 November 2023 15 – 17 November 2023	Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan Directorate of Government Support and Infrastructure Financing Management, Ministry of Finance	Kuala Lumpur
		<i>Global Cities Studies / Site Visit, Sydney & Melbourne Australia</i>	12 – 15 Desember 2023 12 – 15 December 2023	IIGF	Sydney
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	<i>Leading the Way In Sustainable Infrastructure</i>	21 Agustus 2023 21 August 2023	The Asset	Singapore
		<i>Coaching Leadership for BOD & Deputy Director</i>	11 September 2023 11 September 2023	IIGF	Jakarta
		<i>The 7th Asia Urban Lighting Workshop</i>	19 – 21 September 2023 19 – 21 September 2023	The Asset	Seoul
		<i>The 2nd Brawijaya Economics and Finance International Conference (BEFIC)</i>	2 November 2023 2 November 2023	Universitas Brawijaya Brawijaya University	Malang
		<i>MDB Project Plaza 2023 – Leaping into a Green Beyond Global Crisis</i>	28 – 29 November 2023 28 – 29 November 2023	Ministry of Trade, Industry, and Energy & Ministry of Economy and Finance Korea	Seoul
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	<i>The IIA's 2023 International Conference Amsterdam & Paris On-Site Learning</i>	9 – 12 Juli 2023 9 – 12 Juli 2023	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII) Professional Internal Auditors in Indonesia (PAII)	Amsterdam
		<i>Coaching Leadership for BOD & Deputy Director</i>	11 September 2023 11 September 2023	IIGF	Jakarta



Program Pengenalan Direksi Board of Directors Induction Program

Kebijakan program pengenalan Direksi diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan Perseroan diberikan kepada Direksi yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai oleh Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Perseroan berada pada Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan Perseroan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan; dan/atau
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2023 tidak terjadi pergantian atau penambahan Direksi baru, sehingga tidak diselenggarakan program pengenalan Perseroan bagi Direksi baru.

The policy for the Board of Directors induction program is outlined in the Board Manual. This program is provided to newly appointed Board of Directors members. The program may include presentations, meetings, visits to the Company, document reviews, or other suitable activities as determined by the Company. The Corporate Secretary is responsible for organizing this induction program.

The Company's Induction Program materials include:

1. Implementation of corporate governance principles within the Company;
2. Company overview covering its purpose, nature, and scope of operations, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic concerns;
3. Details about delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Explanation of the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, along with matters that are prohibited; and/or
5. Applicable laws and regulations concerning the Company's business operations.

In 2023, there were no changes or additions to the Board of Directors, resulting in the absence of an induction program for new Board of Directors within the Company.

Penilaian Atas Kinerja Masing-Masing Komite yang Berada di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Performance Evaluation of Each Committee under the Board of Directors and its Assessment Criteria

Sejak tahun 2018, Perusahaan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) dalam rangka memastikan bahwa rencana strategis teknologi informasi sejalan dengan rencana bisnis Perseroan dan kegiatan terkait TI. Informasi lebih lanjut mengenai Komite Pengarah TI dijelaskan dalam Bab Tinjauan Pendukung Bisnis, sub-bab Teknologi Informasi (TI) dalam laporan tahunan ini.

Since 2018, the Company has formed an Information Technology Steering Committee (IT Steering Committee) to ensure alignment between the information technology strategic plan and the Company's business plan as well as IT-related activities. Further details about the IT Steering Committee can be found in the Business Support Overview chapter, specifically in the Information Technology (IT) sub-chapter of this annual report.



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif dan bertindak secara independen dalam melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas kebijakan Perseroan, jalannya kepengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan. Sesuai dengan fungsi pengawasan yang diembannya tersebut, Dewan Komisaris juga bertugas memastikan Perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG di segenap aspek bisnisnya serta di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

The Board of Commissioners holds collective responsibility and operates independently in overseeing both general and/or specific aspects of the Company's policies, management direction, and providing guidance to the Board of Directors for the Company's benefit. Alongside its supervisory role, the Board of Commissioners is entrusted with ensuring the comprehensive integration of GCG principles throughout all levels and divisions of the Company's structure.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris Board of Commissioners Appointment and Dismissal

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris PT PII telah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The appointment and dismissal of IIGF's Board of Commissioners adhere to the guidelines outlined in Minister of Finance Regulation No. 197/PMK.06/2019, on Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of Company Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri penjaminan, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

Each member of the Board of Commissioners possesses the necessary competencies to ensure the Board of Commissioners' effectiveness. These competencies encompass expertise in accounting, finance, strategic planning, business acumen, managerial experience and depth, understanding of the guarantee industry, comprehension of regulations, as well as risk management and control.

Masa Jabatan Dewan Komisaris Board of Commissioners Term of Office

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.06/2019 dan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pursuant to the Minister of Finance Regulation No. 197/PMK.06/2019 and the Company's Articles of Association, the term of service of the Board of Commissioners members is established at 5 (five) years, with the possibility of reappointment for an additional term. Dismissal of Board of Commissioners members can occur at any time upon the decision of the GMS, provided valid reasons are stated.

Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition

Pada tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Informasi Perubahan Dewan Komisaris selama tahun 2023 dijelaskan pada Bab Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Berikut Komposisi Dewan Komisaris PT PII per 31 Desember 2023:

In 2023, changes occurred in the composition of the Board of Commissioners. Details regarding the changes in the Board of Commissioners during 2023 were explained in the Report of the Board of Commissioners' Chapter of this Annual Report. The composition of the IIGF's Board of Commissioners as of December 31, 2023, is provided below:



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Rina Widiyani Wahyuningdyah	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 216 of 2023 dated 19 June 2023	19 Juni 2023 – 18 Juni 2028 19 June 2023 – 18 June 2028
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia No. 861/KMK.06/2018 dan diangkat kembali melalui KMK No. 720/KMK.06/2019. Initially appointed according to the Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 861/KMK.06/2018 and subsequently reappointed through KMK No. 720/KMK.06/2019	• Periode ke 1: 21 Desember 2018 s.d 31 Desember 2019. • Periode ke 2: 19 Agustus 2019 s.d. 18 Agustus 2024. • 1st Period: 21 Desember 2018 to 31 Desember 2019. • 2nd Period: 19 August 2019 to 18 August 2024.
Iqbal Islami	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 33/KMK.06/2023 tanggal 31 Januari 2023 Minister of Finance Decree (MoFD) of the Republic of Indonesia No. 33/KMK.06/2023 dated 31 January 2023	31 Januari 2023 – 30 Januari 2028 31 January 2023 – 30 January 2028

Jumlah dan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Jumlah dan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan serta diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komisaris Independen dan Independensi Dewan Komisaris

Independent Commissioner and Board of Commissioners Independence

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

According to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, an Independent Commissioner is the Board of Commissioners' member who does not have affiliations with the Board of Directors, other Board of Commissioners, and controlling shareholders. They are also devoid of any business or other connections that might affect their ability to act independently or act solely in the Company's interests.

Hingga per tanggal 31 Desember 2023, Pemegang Saham Perseroan belum mensyaratkan adanya Komisaris Independen mengingat keberadaannya belum diperlukan di Perseroan. Namun, Perseroan tetap mengedepankan independensi dan profesionalitas sebagai aspek utama yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris guna meminimalisir benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan memastikan setiap keputusan diambil seobjektif mungkin tanpa pengaruh dari pihak manapun. Berikut status Independensi Dewan Komisaris Tahun 2023:

As of December 31, 2023, the Company's Shareholders have not deemed it necessary to appoint an Independent Commissioner as their presence has not yet needed within the Company. However, the Company maintains its focus on independence and professionalism as the primary attributes required of Board of Commissioners members to mitigate conflicts of interest in decision-making and ensure that decisions are made objectively, free from external influence. Below is the Board of Commissioners' independence status in 2023:



Kriteria Criteria	Status Independensi Independence Status		
	Rina Widiyanti Wahyuningdyah	Mariatul Aini	Iqbal Islami
Bukan Anggota Direksi Perseroan Not serving as a member of the Company's Board of Directors	√	√	√
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Does not have any business relations or other associations that might influence decision-making.	√	√	√
Bukan pemegang saham mayoritas Perseroan atau karyawan yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perseroan Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to the majority shareholder of the Company	x	√	x
Bukan karyawan atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perseroan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not an employee or previously held an executive position within the Company or any affiliated company, at least 3 (three) years prior to joining the Board of Commissioners.	√	√	√
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perseroan atau perusahaan afiliasi, atau karyawan yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not a material professional advisor or primary consultant to the Company or any affiliated entities, or have been directly associated with such service provider as an employee, for at least three (3) years before assuming a role as a member of the Board of Commissioners.	√	√	√
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perseroan atau perusahaan afiliasi atau karyawan dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. Not a major supplier or customer of the Company or any affiliated company, or an employee directly or indirectly associated with a significant supplier or customer.	√	√	√

√: tidak ada hubungan not affiliated
x: terdapat hubungan affiliated

Berdasarkan tabel status independensi Dewan Komisaris Tahun 2023, terdapat 2 (dua) Dewan Komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham, namun dapat dipastikan hubungan afiliasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.

In 2023, the independence status table of the Board of Commissioners indicated that 2 (two) Commissioners has affiliations with Shareholders. However, it was determined that these affiliations did not violate any laws or regulations. The Board of Commissioners is committed to avoiding potential conflicts of interest or positioning themselves to prevent any potential conflicts of interest in all situations.

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris

Statement of Independence of the Commissioner

Berdasarkan tabel Status Independensi Dewan Komisaris tahun 2023, Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi kriteria independensi dan telah menandatangani surat pernyataan independensi yang diperbarui secara berkala. Pernyataan independensi Dewan Komisaris dinyatakan dalam Pakta Integritas Dewan Komisaris yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

According to the Board of Commissioners' Independence Status table in 2023, the Company's Board of Commissioners has fulfilled the independence criteria and regularly updated and signed a statement of independence. This statement is outlined in the Board of Commissioners' Integrity Pact, signed at the commencement of their appointment and renewed annually.



Berikut Pakta Integritas Dewan Komisaris Perseroan tahun 2023.

The following represents the Integrity Pact of the Company's Board of Commissioners in 2023.

Rina Widiyanti Wahyuningdyah



Mariatul Aini



Iqbal Islami



Kebijakan Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris Board Manual

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) dan Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir diperbaharui pada tahun 2022. *Board Manual* dan Pedoman Dewan Komisaris disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners are regulated further in the Board Manual and the Board of Commissioners Policy which was last updated in 2022. The Board Manual and Board of Commissioners' Policy are prepared based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, direction by the Shareholders and the best practices of Good Corporate Governance.

Berikut pokok-pokok yang dimuat dalam *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris adalah terkait:

1. Ketentuan Umum
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris
3. Benturan Kepentingan
4. Kekosongan Jabatan Dewan Komisaris
5. Pengunduran Diri Dewan Komisaris
6. Ketentuan Pengawasan Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Ketentuan Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
9. Ketentuan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris

The contents of the Board Manual related to the Board of Commissioners are as follows:

1. General Provisions
2. Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Commissioners
3. Conflicts of Interest
4. Vacant Position of the Board of Commissioners
5. Board of Commissioners Resignation
6. Supervising Provisions for the Board of Commissioners
7. Board of Commissioners Meetings
8. Decision-Making Provisions of the Board of Commissioners
9. Performance Assessment Provisions for the Board of Commissioners
10. Board of Commissioners Supporting Organs



11. Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris atas RKAP
12. Penunjukan KAP sebagai Auditor Eksternal
13. Program Pelatihan Dewan Komisaris
14. Program Pengenalan Perseoran kepada Dewan Komisaris
15. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
16. Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris

Ketentuan lanjutan dari *Board Manual* yang diakomodir dalam Pedoman Dewan Komisaris adalah pedoman pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Pedoman pelaksanaan tugas umum Dewan Komisaris
2. Pedoman pembagian tugas Dewan Komisaris
3. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RJP yang disampaikan kepada Direksi
4. Pedoman pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas rancangan RKAP atau perubahan RKAP yang disampaikan kepada Direksi
5. Pedoman pelaksanaan tugas pemberian arahan Dewan Komisaris
6. Pedoman pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris
7. Tugas terkait potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris
8. Tugas terkait praktik tata kelola perusahaan yang baik Perseroan

Board Manual Perseroan lebih lengkapnya dapat dilihat atau diunduh pada *website* Perseroan <https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan>.

11. Reporting on the Supervision of the RKAP by the Board of Commissioners
12. Appointment of Public Accounting Firm as External Auditor
13. Board of Commissioners Training Program
14. Induction Program for the Board of Commissioners
15. Communication and Correspondence System between the Board of Directors and the Board of Commissioners
16. Determination of Income for the Board of Commissioners

Additional provisions outlined in the Board Manual, which are included in the Board of Commissioners Policy, pertain to guidelines for implementing duties, specifically:

1. Guidelines for implementing the general responsibilities of the Board of Commissioners
2. Guidelines for the division of duties of the Board of Commissioners
3. Guidelines for implementing the responsibilities of the Board of Commissioners in approving the RJP draft submitted to the Board of Directors
4. Guidelines for executing the responsibilities of the Board of Commissioners in approving the RKAP draft or changes to the RKAP submitted to the Board of Directors
5. Guidelines for executing the responsibilities of providing guidance to the Board of Commissioners
6. Guidelines for implementing the supervisory responsibilities of the Board of Commissioners
7. Duties concerning potential conflicts of interest involving the Board of Commissioners
8. Duties concerning the implementation of the Company's good corporate governance practices

The Company's Board Manual is accessible for viewing or downloading on the Company's website at <https://ptpii.co.id/manual-kebijakan-perusahaan>.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris

Duties, Authorities, and Responsibilities of the Board of Commissioners

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

The duties, authorities, and responsibilities of the Board of Commissioners are outlined in the Company's Articles of Association as follows:

1. Supervising the management policy and overseeing the general management, including the Company's business conducted by the Board of Directors, and providing advice to them. This involves supervising the implementation of the Company's Long-Term Plan, Work Plan, and Budget, as well as adhering to the Articles of Association, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and relevant laws and regulations, all for the benefit of the Company and in alignment with its purposes and objectives.



2. Dewan Komisaris berwenang untuk:

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- f. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
- i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
- j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- k. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dewan Komisaris berkewajiban/bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan
- b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.

2. The Board of Commissioners is authorized to:

- a. Observing books, letters, and other documents, verifying cash and other securities, and auditing the Company's assets;
- b. Accessing the grounds, buildings, and offices utilized by the Company;
- c. Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all matters concerning the Company's management;
- d. Understanding all policies and actions that have been or will be undertaken by the Board of Directors;
- e. Requesting the Board of Directors and/or other officials under their purview with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meetings;
- f. Appointing and dismissing the secretary of the Board of Commissioners, if deemed necessary;
- g. Temporarily suspending members of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
- h. Establishing additional committees apart from the Audit Committee, as deemed necessary, considering the Company's capabilities;
- i. Employing experts for specific matters and durations at the Company's expense, when deemed necessary;
- j. Executing management actions of the Company under specific circumstances and for a defined period, as per the provisions of the Articles of Association;
- k. Participating in Board of Directors Meetings and offering perspectives on discussed matters;
- l. Implementing other supervisory authorities, ensuring alignment with laws and regulations, the Articles of Association, and/or the General Meeting of Shareholders Resolutions.

3. The Board of Commissioners is obliged/responsible for:

- a. Providing advice to the Board of Directors in the management of the Company;
- b. Examining, reviewing, and signing the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;
- c. Offering opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders concerning the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
- d. Monitoring the development of the Company's activities and providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any significant issues for the Company's management;



- e. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
- f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- g. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
- h. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- i. Membentuk Komite Audit.
- j. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- k. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- l. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/ atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- m. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- n. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/ atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- o. Menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris dan dituangkan di dalam Keputusan Dewan Komisaris.

- e. Promptly reporting to the General Meeting of Shareholders if there are indications of declining performance of the Company;
- f. Examining and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report;
- g. Providing explanations, opinions, and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested;
- h. Preparing the annual work program and including it in the Company's Work Plan and Budget;
- i. Establishing an Audit Committee;
- j. Proposing a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders;
- k. Preparing minutes of the Board of Commissioners Meeting and maintain the copy;
- l. Reporting to the Company regarding their and/or their family's share ownership in the Company and other Companies;
- m. Providing a report on the supervisory duties performed during the past fiscal year to the General Meeting of Shareholders;
- n. Fulfilling other obligations in the context of supervisory and advisory duties, ensuring compliance with laws and regulations, the Articles of Association, and/or the General Meeting of Shareholders resolutions;
- o. Organizing the division of duties among members of the Board of Commissioners as outlined in the Board of Commissioners Resolutions.

Pembagian Tugas Masing-Masing Dewan Komisaris

Division of Duties of Each Board of Commissioners

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan No. KEP-06/KOM/PII/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 yaitu sebagai berikut:

The division of duties among members of the Board of Commissioners was carried out based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-02/KOM/PII/04/2020 dated April 28, 2020, last amended by No. KEP-06/KOM/PII/07/2023 dated July 31, 2023, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Duties Description
Rina Widiyani Wahyuningdyah	Komisaris Utama President Commissioner	1. Mengkoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris; dan 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	1. Sebagai Ketua Komite Audit; 2. Bidang Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, IIGF Institute, Corporate Strategy & Finance, Human Capital, dan Corporate Service & Procurement; dan 3. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
		1. Serving as Chairman of the Audit Committee; 2. Matters that are related to Internal Audit, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, IIGF Institute, Corporate Strategy & Finance, Human Capital, and Corporate Service & Procurement; and 3. Implementing duties related to remuneration and nomination policies.



Nama Name	Jabatan Position	Uraian Tugas Duties Description
Iqbal Islami	Komisaris Commissioner	1. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; 2. Bidang <i>Guidance & Consultation, Underwriting, Environment & Social</i>, Inisiasi Bisnis, Manajemen Risiko Korporasi, Manajemen Risiko Proyek dan Klaim, Penilaian Proyek, dan Penjaminan non KPBU; dan 3. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi. 1. Serving as Chairman of the Risk Monitoring Committee; 2. Providing <i>Guidance & Consultation, Underwriting, Environment & Social</i>, Business Initiation, Corporate Risk Management, Project and Claims Risk Management, Project Appraisal, and non-PPP Guarantee; and 3. Performing duties related to remuneration and nomination policies.

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Types of Decisions Requiring Board of Commissioners Approval

Sejalan dengan *Board Manual*, jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa penjaminan bersama, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, penyewaan aset dan kerja sama lainnya yang perlu dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya dengan ruang lingkup, nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
3. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan, menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang termasuk pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Memindahtangankan aset tetap yang dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, ganti rugi, dan penyertaan modal dengan ketentuan:
 - i. Berupa aset selain tanah dan/atau bangunan; dan atau
 - ii. Berupa aset dengan nilai di bawah 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan;
6. Penghapusan aset karena pemusnahan atau sebab-sebab lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menetapkan struktur organisasi;
8. Melakukan transaksi sebagaimana huruf b termasuk tindakan-tindakan lainnya yang diambil dalam rangka menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, dengan nilai transaksi sama atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

According to the Board Manual, the types of decisions requiring the approval of the Board of Commissioners include:

1. Utilizing fixed assets as collateral for short-term credit drawdown;
2. Establishing partnerships with businesses or other entities through joint guarantees, management contracts, licensing agreements, asset leasing, and other collaborations deemed necessary by the Company to fulfill its objectives and goals within a specified scope, value, or duration set by the GMS;
3. Unless otherwise mandated by laws and regulations, accepting or extending medium to long-term loans, including loans granted to the Company's subsidiaries;
4. Writing off bad debts and dead inventory;
5. Disposing of fixed assets through sale, exchange, compensation, or equity participation, subject to the following conditions:
 - i. In the form of assets other than land and/or buildings; and/or
 - ii. In the form of assets with a value less than 50% (fifty percent) of the Company's net assets;
6. Removing assets from the records due to destruction or other reasons in accordance with applicable laws and regulations;
7. Establishing the Company's organizational structure;
8. Engaging in transactions as specified in point b, including other actions carried out within the framework of the Company's core business activities, with a transaction value equal to or exceeding 25% (twenty-five percent) and less than 50% (fifty percent) of the Company's equity value.



Benturan Kepentingan dan Rangkap Jabatan Conflict of Interest and Concurrent Position

Selaras dengan *Board Manual*, Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau kegiatan Perseroan, selain penghasilan yang sah.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

1. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara;
2. menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris; dan/atau
3. menduduki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan di Perseroan, anggota Dewan Komisaris diminta untuk menandatangani Pakta Integritas pada awal masa pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun yang memuat pernyataan bahwa Dewan Komisaris menjamin tidak adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Selama tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perseroan. Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun, meskipun pada tahun 2023, terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan. Namun dapat dipastikan rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan. Informasi rangkap jabatan Dewan Komisaris disajikan di Bab Profil Perusahaan pada sub bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings

Kebijakan rapat Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris dapat melaksanakan rapat Dewan Komisaris (rapat internal) dan rapat bersama Direksi (rapat gabungan).

In accordance with the Board Manual, the Board of Commissioners is forbidden from engaging in actions that create conflicts of interest or derive personal benefits from decision-making and/or the Company's operations, apart from legitimate income.

Board of Commissioners members are restricted from concurrently serving in the following capacities:

1. As a member of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise;
2. In positions prohibited by laws and regulations from being concurrently held by Board of Commissioners members; and/or
3. In any other roles that could potentially lead to conflicts of interest with the Company.

In order to mitigate conflicts of interest within the Company, the Board of Commissioners members are mandated to sign an Integrity Pact at the commencement of their appointment term, with renewal required at the start of each subsequent year. This Pact includes a statement from the Board of Commissioners, ensuring the absence of any conflicts of interest in the implementation of their duties.

Throughout 2023, all members of the Board of Commissioners had no conflicts of interest or potential conflicts of interest with the Company. The Board of Commissioners is committed to preventing potential conflicts of interest and consistently positioning itself to avoid such conflicts in all situations. Despite having several members holding concurrent positions in 2023, it was ensured that these positions did not violate any laws or regulations. Details regarding the concurrent positions of the Board of Commissioners are provided in the Board of Commissioners Profile sub-chapter within the Company Profile Chapter of this Annual Report.

The Board of Commissioners meetings policy is outlined in the Board Manual. These meetings related to the implementation of the Board of Commissioners' duties and functions. The Board of Commissioners may conduct the Board of Commissioners meetings (internal meetings) and with the Board of Directors (joint meetings).



Rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat gabungan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

The Board of Commissioners meetings, including both internal and joint meetings, can be held at least once a month or as needed upon the request of one or several Board of Commissioners members, the Board of Directors, or upon written request from one or several Shareholders, representing at least one-tenth of the total voting shares. Such requests must specify the agenda items for discussion.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2023

Frequency of the Board of Commissioners Meetings in 2023

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 31 kali, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 14 kali dan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 17 kali.

In 2023, the Board of Commissioners conducted 31 meetings, comprising 14 internal meetings of the Board of Commissioners and 17 joint meetings with the Board of Directors.

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Gabungan Tahun 2023

Attendance Rate of the Board of Commissioners in Internal and Joint Meetings in 2023

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance of the Board of Commissioners in Internal Meetings of the Board of Commissioners			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan (Dewan Komisaris dan Direksi) Attendance of the Board of Commissioners in Joint Meetings (Board of Commissioners and Board of Directors)		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Awan Nurmawan Nuh ¹	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%	8	8	100%
Rina Widiyani Wahyuningdyah ²	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%	9	9	100%
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	14	14	100%	17	17	100%
Wahyu Utomo ³	Komisaris Commissioner	2	2	100%	1	1	100%
Iqbal Islami ⁴	Komisaris Commissioner	12	12	100%	16	16	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance Rate of the Board of Commissioners				100%	100%		
Frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal maupun rapat gabungan bersama Direksi telah sesuai dengan kebijakan rapat yang diatur dalam <i>Board Manual</i> . The frequency and attendance rate of the Board of Commissioners at internal meetings and joint meetings with the Board of Directors has adhere to the meeting policy outlined in the Board Manual.							

¹ berhenti menjabat sejak 19 Juni 2023

² menjabat sejak 19 Juni 2023

³ berhenti menjabat sejak 31 Januari 2023

⁴ menjabat sejak 31 Januari 2023

¹ resigned since 19 June 2023

² served since 19 June 2023

³ resigned since 31 January 2023

⁴ served since 31 January 2023



Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahun 2023

Attendance Rate of the Board of Commissioners in GMS Year 2023

Tanggal Date	Agenda	Realisasi Realization			
		Awan Nurmawan Nuh	Rina Widiyanti Wahyuningdyah	Mariatul Aini	Iqbal Islami
19 Mei 2023 19 May 2023	RUPS Tahunan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 AGMS Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year	√	**	√	√
20 Desember 2023 20 December 2023	RUPS Tahunan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) Tahun 2024 AGMS Company's 2024 Work Plan & Budget (RKAP)	*	√	√	√

* berhenti menjabat sejak 19 Juni 2023

** menjabat sejak 19 Juni 2023

* resigned since 19 June 2023

** served since 19 June 2023

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting Agenda

Berikut agenda rapat yang telah dibahas selama tahun 2023 baik rapat internal maupun rapat gabungan:

The following meeting agenda was discussed during both internal meetings and joint meetings in 2023:

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris 2023

Board of Commissioners Meeting Agenda in 2023

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda	
1.	16 Januari 2023 16 January 2023	1. Persetujuan revisi <i>Board Manual</i> edisi Tahun 2022 2. Usulan IKU Individu Direksi Tahun 2023 3. Evaluasi RKAP Tahun 2022 dan Pelaksanaan RKAP Tahun 2023 4. Evaluasi capaian IKU Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022	1. Approval of the revised 2022 edition of the Board Manual 2. Proposed KPIs for Individual Board of Directors in 2023 3. Evaluation of RKAP Year 2022 and Implementation of RKAP Year 2023 4. Evaluation on the KPIs achievement of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2022
2.	26 Januari 2023 26 January 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Desember 2022 2. Persetujuan usulan IKU Individu Direksi Tahun 2023 3. <i>Monitoring</i> AOI GCG Assessment PT PII Tahun 2021 dan <i>update progress</i> GCG Assessment Tahun Buku 2022 4. <i>Update</i> proses audit Laporan Keuangan dan IKU Dewan Komisaris dan Direksi oleh PricewaterhouseCoopers	1. Management Report Highlights for December 2022 period 2. Approval on the proposal for the Board of Directors' Individual KPIs for 2023 3. Monitoring AOI GCG Assessment of IIGF in 2021 and update on GCG Assessment progress for 2022 Fiscal Year 4. Update on the audit process of the Financial Statements and BOC BOD KPIs by Pricewaterhouse Coopers
3.	24 Februari 2023 24 February 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Januari 2023 2. <i>Update</i> hasil Rapat Organ Dewan Komisaris agenda evaluasi PDF dan CSR PT PII	1. Management Report Highlights for January 2023 period 2. Result Updates on the Board of Commissioners Organ Meeting on the PDF and CSR evaluation agenda of IIGF
4.	24 Maret 2023 24 March 2023	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Februari 2023	Management Report Highlights for February 2023 period
5.	27 April 2023 27 April 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Periode Maret 2023 2. <i>Update</i> progres Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 3. Evaluasi pencapaian IKU Dewan Komisaris dan Direksi periode Triwulan I Tahun 2023	1. Management Report Highlights for March 2023 Period 2. Progress Updates on the Annual Report for the 2022 Fiscal Year 3. Evaluation on the achievement of the KPIs of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 1 st quarter of 2023
6.	24 Mei 2023 24 May 2023	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode April 2023	Management Report Highlights for April 2023 period



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda	
7.	26 Juni 2023 26 June 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Mei 2023 2. Gejala Penurunan Kinerja periode Mei 2023 3. <i>Update</i> progres ESG PT PII & <i>Project Database System</i>	1. Management Report Highlights for May 2023 period 2. Signs of Performance Decline for May 2023 period 3. IIGF's ESG progress update & Project Database System
8.	25 Juli 2023 25 July 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Juni 2023 2. Gejala Penurunan Kinerja periode Juni 2023 3. Evaluasi pencapaian IKU Dewan Komisaris dan Direksi periode Triwulan II Tahun 2023	1. Management Report Highlights for June 2023 period 2. Signs of Performance Decline for June 2023 period 3. Evaluation on the KPIs achievement of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2nd quarter of 2023
9.	16 Agustus 2023 16 August 2023	1. Tata kelola rapat Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris PT PII 2. Gejala Penurunan Kinerja periode Juli 2023	1. Meetings Governance on the Board of Commissioners and IIGF's Board of Commissioners 2. Signs of Performance Decline for July 2023 period
10.	24 Agustus 2023 24 August 2023	1. <i>Update</i> Rapat Teknis agenda IT <i>Master Plan</i> , Progres AOI GCG 2022, Evaluasi CSR dan <i>Restatement</i> AD PT PII 2. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Juli 2023	1. Technical Meeting Updates on IT Master Plan agenda, GCG 2022 AOI Progress, CSR Evaluation and IIGF AD Restatement 2. Management Report Highlights for July 2023 period
11.	25 September 2023 25 September 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Agustus 2023 2. <i>Update</i> Hasil Rapat Teknis agenda evaluasi pedoman pengadaan dan Proyek SPAM Lampung 3. Pembahasan RAB Dewan Komisaris 4. Gejala Penurunan Kinerja periode September 2023	1. Management Report Highlights for August 2023 period 2. Update regarding the Technical Meeting Outcomes on the evaluation of procurement guidelines and the Lampung SPAM Project agenda 3. Discussion of the Board of Commissioners' Budget Plan (RAB) 4. Signs of Performance Decline for September 2023 period
12.	11 Oktober 2023 October 11, 2023	1. Pembahasan RKAP PT PII Tahun Buku 2024 2. Gejala Penurunan Kinerja periode September 2023 3. Evaluasi pencapaian IKU Dewan Komisaris dan Direksi periode Triwulan III Tahun 2023	1. Discussion of IIGF's RKAP for the 2024 Fiscal Year 2. Signs of Performance Decline for September 2023 period 3. Evaluation on the KPIs achievement of the Board of Commissioners and Board of Directors for the 3 rd quarter of 2023
13.	23 November 2023 November 23, 2023	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Oktober 2023	Management Report Highlights for October 2023 period
14.	Desember 2023 December, 2023	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode November 2023	Management Report Highlights for November 2023 period

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi 2023

Agenda for the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda	
1.	31 Januari 2023 31 January 2023	1. Evaluasi RKAP PT PII Tahun 2022 (Laporan Manajemen periode Desember 2022) 2. Penetapan IKU Individual Direksi Tahun 2023	1. Evaluation of IIGF's 2022 RKAP (Management Report for December 2022 period) 2. Determination of the Board of Directors' Individual KPIs for 2023
2.	28 Februari 2023 28 February 2023	1. Laporan Manajemen periode Januari 2023 2. <i>Update Monitoring</i> tindak lanjut Audit internal dan eksternal periode Tahun Buku 2022	1. Management Report for January 2023 2. Update Monitoring on the follow-up of internal and external Audits for the Fiscal Year 2022 period.
3.	29 Maret 2023 29 March 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Februari 2023 2. Rencana Pengembangan Karir/Sukses Manajemen 3. <i>Update</i> hasil pelaksanaan <i>employee engagement survey</i>	1. Management Report Highlights for February 2023 2. Management Career Development/Succession Plan 3. Update on the results of the employee engagement survey
4.	28 April 2023 28 April 2023	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen periode Maret 2023 2. <i>Update</i> Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022	1. Management Report Highlights for March 2023 period 2. Update on the Preparation of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat Date of Meeting	Agenda Agenda	
5.	12 Mei 2023 12 May 2023	Pembahasan remunerasi & tantiem Dewan Komisaris dan Direksi periode Tahun 2022 & 2023	Discussion of remuneration & tantiem for the Board of Commissioners and Board of Directors for the 2022 & 2023 period
6.	13 Mei 2023 13 May 2023	Persiapan RUPST Tahun Buku 2022	Preparation of AGMS for the 2022 Fiscal Year
7.	25 Mei 2023 25 May 2023	Highlight Laporan Manajemen periode April 2023	Management Report Highlights for April 2023 period
8.	27 Juni 2023 27 June 2023	1. Highlight Laporan Manajemen periode Mei 2023 2. Pembahasan stakeholder engagement survey Tahun 2022	1. Management Report Highlights for May 2023 period 2. Discussion of stakeholder engagement survey in 2022
9.	17 Juli 2023 17 July 2023	Pembahasan Proyek Penjaminan Palapa Ring	Discussion on Palapa Ring Guarantee Project
10.	28 Juli 2023 28 July 2023	Highlight Laporan Manajemen periode Juni 2023	Management Report Highlights for June 2023
11.	25 Agustus 2023 25 August 2023	1. Highlight Laporan Manajemen Juli 2023 2. Evaluasi CSR periode Semester I 2023 3. Evaluasi Kebijakan IT Master Plan Semester I 2023	1. Management Report Highlights for July 2023 period 2. CSR evaluation for the 1st semester of 2023 3. Evaluation of IT Master Plan Policy for the 1st semester 2023
12.	27 September 2023 27 September 2023	1. Highlight Laporan Manajemen Periode Agustus 2023 2. Gejala Penurunan Kinerja Agustus 2023 3. Perubahan dan Pernyataan Kembali (Restatement) Anggaran Dasar Perseroan 4. Kebijakan WBS dan Pengendalian Gratifikasi	1. Management Report Highlights for August 2023 Period 2. Signs of Performance Decline on August 2023 3. Amendment and Restatement of the Company's Articles of Association 4. WBS Policy and Gratification Control
13.	13 Oktober 2023 13 October 2023	Pembahasan RKAP Tahun Buku 2024	Discussion of RKAP for the fiscal year 2024
14.	26 Oktober 2023 26 October 2023	Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Terbatas 1. Pembahasan Persetujuan RKAP PT PII Tahun Buku 2024 2. Highlight Laporan Manajemen periode September 2023	Limited Joint Meetings of Board of Directors and Board of Commissioners 1. Discussion on Approval of IIGF's RKAP for the 2024 Fiscal Year 2. Management Report Highlights for September 2023
15.	17 November 2023 17 November 2023	Persiapan Pra RUPST RKAP Tahun Buku 2024	Preparation of Pre-AGMS RKAP for the 2024 Fiscal Year
16.	24 November 2023 24 November 2023	Highlight Laporan Manajemen periode Oktober 2023	Management Report Highlights for October 2023
17.	18 Desember 2023 18 December 2023	1. GR RUPS RKAP Tahun Buku 2024 2. Highlight Laporan Manajemen Periode November 2023	1. Rehearsal for GMS RKAP for the 2024 fiscal year 2. Management Report Highlights for November 2023 Period

Pelatihan Dewan Komisaris Board of Commissioners Training

Kebijakan pelatihan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk berpartisipasi dalam program pengembangan kompetensi guna menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dan dalam memberikan nasihat yang relevan terhadap rencana strategis yang disiapkan Direksi Perseroan.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan pelatihan sebagai berikut:

The training policy for the Board of Commissioners is outlined in the Board Manual. The Company provides extensive opportunities for Board of Commissioners members to participate in competency development programs aimed at expanding their expertise and knowledge. This initiative supports the implementation of their duties, functions, and responsibilities, as well as the provision of pertinent advice on strategic plans formulated by the Board of Directors.

During 2023, the Board of Commissioners has conducted the following training:



Nama Name	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation
Rina Widiyani Wahyuningdyah ¹	Workshop Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dalam Menghadapi Dinamika Global Tahun Anggaran 2023 Workshop on the Good Corporate Governance Implementation in Facing Global Dynamics Fiscal Year 2023	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance	26 September 2023 26 September 2023
	<i>Awareness Building on Legal Risk Management Based on ISO 31022 : 2020</i>	CRMS Indonesia	19 Desember 2023 19 December 2023
Mariatul Aini	Workshop Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dalam Menghadapi Dinamika Global Tahun Anggaran 2023 Workshop on the Good Corporate Governance Implementation in Facing Global Dynamics Fiscal Year 2023	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance	26 September 2023 26 September 2023
	<i>Awareness Building on Legal Risk Management Based on ISO 31022 : 2020</i>	CRMS Indonesia	19 Desember 2023 19 December 2023
Wahyu Utomo ²	<i>Climate change & Energy Policy making for longterm</i>	Harvard Kenedy School, Executive education admission	5-10 Maret 2023 5-10 March 2023
Iqbal Islami ³	Workshop Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dalam Menghadapi Dinamika Global Tahun Anggaran 2023 Workshop on the Good Corporate Governance Implementation in Facing Global Dynamics Fiscal Year 2023	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Financial Education and Training Agency, Ministry of Finance	26 September 2023 26 September 2023
	<i>Executive Training "Corporate Governance: Essentials for a New Business Era"</i>	The Wharton School of the University of Pennsylvania	19-22 September 2023 19-22 September 2023
	<i>High Impact Leadership</i>	Columbia Business School, Columbia University	11-15 Desember 2023 11-15 December 2023

¹ menjabat sejak 19 Juni 2023

² berhenti menjabat sejak 31 Januari 2023

³ menjabat sejak 31 Januari 2023

¹ served since 19 June 2023

² resigned since 31 January 2023

³ served since 31 January 2023

Program Pengenalan Dewan Komisaris Board of Commissioners Induction Program

Kebijakan program pengenalan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Program pengenalan Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai oleh Perseroan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan Perseroan berada pada Sekretaris Perusahaan.

Materi Program Pengenalan Perseroan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

The policy for the Board of Commissioners' induction program is outlined in the Board Manual. This program is provided to newly appointed Board of Commissioners members. The program may include presentations, meetings, visits to the Company, document reviews, or other suitable activities as determined by the Company. The Corporate Secretary is responsible for organizing this induction program.

The Company's Induction Program materials include:

1. Implementation of corporate governance principles within the Company;
2. Company overview covering its purpose, nature, and scope of operations, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic concerns;
3. Details about delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;



4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan; dan/atau
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan telah mengadakan program pengenalan Dewan Komisaris baru yaitu Sdri. Rina Widiyanti Wahyuningdyah sebagai Komisaris Utama pada tanggal 5 Juli 2023 dan Sdr. Iqbal Islami sebagai Komisaris pada tanggal 30 Maret 2023.

4. Explanation of the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, along with matters that are prohibited; and/or
5. Applicable laws and regulations concerning the Company's business operations.

In 2023, the Company conducted an induction program for the new Board of Commissioners, including Mrs. Rina Widiyanti Wahyuningdyah as President Commissioner on July 5, 2023, and Mr. Iqbal Islami as Commissioner on March 30, 2023.

Keputusan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Sepanjang Tahun 2023

Decree and Recommendation by the Board of Commissioners in 2023

Hingga 31 Desember 2023, Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2023, the Board of Commissioners has issued Board of Commissioners Decrees with the following details:

No.	Nomor Surat Keputusan Decree No.	Tanggal Date	Perihal Subject
1	KEP-01/KOM/PII/02/2023	9 Februari 2023 9 February 2023	Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perseroan The Division of Duties of the Company's Board of Commissioners
2	KEP-02/KOM/PII/02/2023	9 Februari 2023 9 February 2023	Pemberhentian dan Penetapan Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan Dismissal and Determination of Chairman of the Risk Monitoring Committee of the Company
3	KEP-03/KOM/PII/02/2023	9 Februari 2023 9 February 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan Dismissal and Appointment of the Risk Monitoring Committee Member of the Company
4	KEP-04/KOM/PII/05/2023	19 Mei 2023 19 May 2023	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit Perseroan Extension of Service of the Audit Committee Members of the Company
5	KEP-06/KOM/PII/07/2023	31 Juli 2023 31 July 2023	Pembagian Tugas Dewan Komisaris Perseroan Division of Duties of the Board of Commissioners of the Company
6	KEP-07/KOM/PII/08/2023	21 Agustus 2023 21 August 2023	Perubahan atas Keputusan Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor KEP-04/KOM/PII/08/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris Amendment to the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. KEP-04/KOM/PII/08/2022 on the Extension of Service of the Board of Commissioners' Secretary

Selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi atas usulan Direksi yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, antara lain Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022, RKAP Tahun Buku 2024, Persetujuan dari Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has provided recommendations on proposals from the Board of Directors requiring shareholder approval, such as the Approval of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year, the RKAP for the 2024 Fiscal Year, and the Approval of Foreign Duty Travel.



Persetujuan Dewan Komisaris Board of Commissioners Approval

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris tidak menerima usulan dari Direksi atas tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, sehingga tidak ada informasi terkait tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

Throughout 2023, the Board of Commissioners did not receive any proposals from the Board of Directors for actions requiring the approval of the Board of Commissioners or the GMS. Consequently, there was no information related to actions by the Board of Directors requiring the approval of the Board of Commissioners, as stipulated in the Articles of Association and Board Manual.

Realisasi Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2023 Realization of the Board of Commissioners Work Program in 2023

No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
Aspek Perencanaan Planning Aspect			
1	Penyusunan dan penetapan usulan RKA Dewan Komisaris Th 2024 Preparation and ratification of the 2024 Long-Term Plan of the Board of Commissioners	Agustus August	Rancangan RKA disusun pada bulan Oktober 2023 dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris No. S-48/PII/DK/1023 tanggal 27 Oktober 2023 The RKAP draft was prepared in October 2023 and submitted to the Board of Directors through the Board of Commissioners' letter No. S-48/PII/DK/1023 dated 27 October 2023
2	Penyusunan dan penetapan usulan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris th 2024 Preparation and determination of the proposed Performance Contract of the Board of Commissioners of 2024	September	Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2024 telah disampaikan kepada RUPS dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP tahun 2024 The proposed Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners for 2024 was submitted to the GMS and was stipulated during the GMS Approval of the 2024 RKAP
3	Penelaahan dan persetujuan atas usulan RKAP dan atau RJPP Review and approval on the proposed Company's Work Plan and Budget (RKAP) and or Long-Term Plan (RJPP)	Oktober October	Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan dan memberikan masukan atas konsep RKAP 2024 kepada Direksi melalui surat No. S-44/PII/DK/1022 tanggal 13 Oktober 2022 yang telah seluruhnya diakomodasi oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan tanggapan atas RKAP 2024 kepada RUPS melalui surat no S-50//PII/ DK/1123 tanggal 2 November 2023
4	Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP PT PII tahun 2024 Submission of the Board of Commissioners' response to the GMS on the RKAP and/or RJPP Drafts of IIGF in 2024	Oktober–November October–November	The Board of Commissioners has reviewed and provided input on the 2024 RKAP concept to the Board of Directors through letter No. S-44/PII/DK/1022 dated October 13, 2022, which was fully accommodated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also provided feedback on the 2024 RKAP to the GMS through letter No. S-50/PII/DK/1123 dated 2 November 2023.
Aspek Pengawasan Supervisory Aspect			
5	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya Supervision/advice on risk management policy and its implementation	Februari February	Rapat berkala dengan divisi Risk Management (RM) mengenai sistem kebijakan manajemen risiko yang dilaksanakan setiap triwulanan Periodic meetings were held with the Risk Management (RM) division regarding the risk management policy system on a quarterly basis
6	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Supervision/advice on the policy and implementation of internal control system	Februari February	Rapat berkala dengan divisi Internal Audit (IA) dan/atau RM mengenai sistem pengendalian internal yang dilaksanakan setiap triwulanan Periodic meetings were held with the Internal Audit (IA) and RM divisions regarding the internal control system on a quarterly basis



No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
7	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan SDM dan pelaksanaannya Supervision/advice on HR policies and its implementation	Maret March	<i>Update progress</i> atas pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan SDM beserta pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan manajemen Perseroan Progress updates on supervising and advising on HR policies and their implementation were regularly provided every month during the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the agenda focus on highlighting the Company's management report
8	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya Supervision/advice on IT policy and its implementation	Maret March	<i>Update progress</i> atas pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan TI dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan manajemen Perseroan, secara khusus pembahasan terkait IT <i>master plan</i> dilakukan saat rapat gabungan dengan Direksi pada bulan Agustus 2023 Progress updates on supervising and advising on IT policies and implementation were regularly conducted every month during the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the agenda focus on highlighting the Company's management report. Specifically, discussions related to the IT master plan were held during the joint meeting with the Board of Directors in August 2023
9	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan PT PII Tahun 2022 Submission of responses to IIGF Annual Report 2022	April	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT PII Tahun 2022 telah disampaikan kepada Manajemen pada bulan April 2023 The Board of Commissioners' response to IIGF's 2022 Annual Report was submitted to Management in April 2023
10	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya Supervision/provision of advice on quality and service policies and its implementation	Agustus August	Pengawasan atas Evaluasi kebijakan mutu dan pelayanan dilakukan pada setiap rapat triwulanan melalui komite pemantau risiko dan divisi <i>monitoring</i> klaim, serta pembahasan juga dilakukan dalam rapat rutin bulanan dengan Direksi Supervision on the Evaluation of quality and service policies was conducted at every quarterly meeting through the risk monitoring committee and claims monitoring division, and discussions were also held in regular monthly meetings with the Board of Directors
11	Pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait perusahaan Supervision on the effectiveness of external and internal audits and the implementation of complaint reviews related to the company	Agustus August	Rapat berkala setiap triwulanan dengan Divisi Internal Audit mengenai efektivitas audit eksternal dan internal dilaksanakan Regular quarterly meetings with the Internal Audit Division on the effectiveness of external and internal audits were conducted
12	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya Supervision/advice on procurement policy and its implementation	September	Telah dilaksanakan rapat dewan komisaris mengenai kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya pada bulan September tahun 2022 Board of Commissioners meeting on procurement policy and its implementation was held in September 2022
13	Pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3 Supervision on the Board of Directors compliance with laws and regulations and Agreements with Third Parties	November	Rapat terkait kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3 telah dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2023 Meetings concerning the Board of Directors' compliance with laws and regulations and Agreements with Third Parties were held in August 2023



No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
14	Respon atas permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS Response on the request for feedback/ explanation from the Board of Directors/GMS	Paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/ penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap Within a maximum of 14 days upon receiving the request for response/ explanation from the Board of Directors/GMS is fully received	Seluruh permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS telah ditanggapi tepat waktu, paling lambat 14 hari setelah permohonan tanggapan/penjelasan dari Direksi/RUPS diterima lengkap All requests for responses/explanations from the Board of Directors/GMS were responded to in a timely manner, no later than 14 days after the complete request for responses/ explanations from the Board of Directors/GMS was received
15	Pemantauan kinerja Direksi Monitoring the performance of the Board of Directors	Bulanan Monthly	Rapat rutin gabungan Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengenai laporan manajemen bulanan sepanjang tahun 2023 Regular joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors on monthly management reports were conducted throughout 2023
16	Pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Komisaris Implementation of monthly Board of Commissioners meetings	Bulanan Monthly	Selama periode tahun 2023 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 14 kali During the period of 2023, 14 regular meetings of the Board of Commissioners were held
17	Pembahasan gejala penurunan kinerja Discussion of signs of performance decline	Bulanan dan sesuai kebutuhan Monthly and as needed	Pembahasan gejala penurunan kinerja (jika ada dalam 1 bulan berjalan) dilaksanakan setiap bulan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Discussion regarding signs of performance decline (if any in the current month) was conducted every month in a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors
18	Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya Supervision of accounting policies and preparation of financial statements and its implementation	Triwulanan Quarterly	Rapat kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan pada bulan November tahun 2023 Accounting policy meetings and preparation of financial statements were conducted in November 2023.
19	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation of the RKAP implementation	Triwulanan Quarterly	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2023 pada semester I dan semester II telah disampaikan kepada RUPS The Board of Commissioners' Supervisory Report on the Implementation of the 2023 RKAP in the first and second semesters was submitted to the GMS
20	Monitoring atas kegiatan IIGF Institute Monitoring of IIGF Institute activities	Semesteran Every semester	Update progress atas pengawasan kegiatan IIGF Institute dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan manajemen Perseroan Progress updates on the supervision of IIGF Institute activities and their implementation were regularly provided every month during the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the agenda focus on highlighting the Company's management report
21	Evaluasi atas kegiatan CSR Evaluation of CSR activities	Semesteran Every semester	Update progress atas evaluasi kegiatan CSR dilakukan secara rutin setiap bulan saat rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda <i>highlight</i> laporan manajemen Perseroan Progress updates on the evaluation of CSR activities were regularly conducted every month during the joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, focus on highlighting the Company's management report
22	Penelaahan pengusulan remunerasi Direksi Review of the remuneration proposal of the Board of Directors	Sesuai permintaan Direksi As requested by the Board of Directors	Menyampaikan Usulan atas perhitungan tantiem tahun 2022 dan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023 kepada RUPS pada tanggal 12 Mei 2023 melalui surat No. SR-01/PII/DK/0523 A proposal for calculating tantiem in 2022 and adjusting the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023 was submitted to the GMS on May 12, 2023, through letter No. SR-01/PII/DK/0523



No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
23	Monitoring atas proyek yang telah dijamin Monitoring of guaranteed projects	Sesuai jadwal Divisi Project Monitoring As scheduled Project Monitoring Division	Rapat berkala dengan Direksi terkait laporan bulanan dan rapat berkala dengan divisi RM mengenai pantauan risiko atas proyek yang telah dijamin yang dilaksanakan setiap triwulanan Periodic meetings with the Board of Directors regarding monthly reports and with the RM division regarding risk monitoring of guaranteed projects were conducted on a quarterly basis
24	Pembahasan terkait transaksi atau Tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/ RUPS Discussion related to transactions or actions within the scope of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai kebutuhan As needed	Sepanjang tahun 2023 tidak ada transaksi atau tindakan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Throughout 2023, there were no transactions or actions related to the Company's business that required the approval of the Board of Commissioners
25	Pemantauan pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris Pemantauan pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris	Sesuai kebutuhan As needed	Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan yang diterima oleh Dewan Komisaris Throughout 2023, no complaints related to the Company were received by the Board of Commissioners
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
26	Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Submission of reports on the implementation of the Board of Commissioners duties and responsibilities	Triwulanan Quarterly	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS secara tepat waktu setiap periode Triwulan Reports on the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities were timely submitted to the GMS every Quarter
27	Penyampaian laporan pengawasan RKAP Tahun 2022-2023 Submission of 2022-2023 Company's RKAP supervisory report	Semesteran Every semester	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2023 pada semester I dan semester II telah disampaikan kepada RUPS The Board of Commissioners' Supervisory Report on the Implementation of the RKAP for the year 2023 was submitted to the GMS in both the first and second semesters.
28	Penyampaian laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris Submission of KPIs achievement report of the Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan realisasi capaian IKU Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS setiap periode Triwulan The report on the Board of Commissioners' KPIs achievement was submitted to the GMS every Quarter
Aspek Monitoring & Evaluasi Penerapan GCG Aspek Monitoring & Evaluasi Penerapan GCG			
29	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommendation by Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2021	Januari January	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 dilaksanakan per semester sepanjang tahun 2023. Seluruh AOI Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2023 The follow-up monitoring of the implementation of BPKP's AOI GCG recommendations in 2021 was conducted every semester throughout 2023. By December 2023, all AOIs from the Board of Commissioners had been addressed.
30	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP Assessment on the implementation of GCG in 2022 by BPKP	Januari January	Penilaian penerapan GCG tahun 2022 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP acara <i>exit meeting assessment</i> atas penerapan GCG PT PII tahun 2022 dengan nilai skor keseluruhan adalah 88,17 The assessment of GCG implementation in 2022 by BPKP was concluded, following the report from the assessment conducted during the exit meeting of IIGF's GCG implementation in 2022. The overall score obtained was 88.17.



No.	Program Kerja Work Program	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
31	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2022 Monitoring the follow up implementation of GCG AOI recommended by BPKP in 2022	Semesteran Every semester	Penilaian penerapan GCG tahun 2022 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP acara <i>exit meeting assessment</i> atas penerapan GCG PT PII tahun 2022 dengan nilai skor keseluruhan adalah 88,17 The assessment of GCG implementation in 2022 by BPKP was concluded, based on the report from the assessment conducted during the exit meeting of IIGF's GCG implementation in 2022. The overall score obtained was 88.17.
Aspek Audit atas Laporan Keuangan Audit Aspect of Financial Statements			
32	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Th 2023 Procurement of PAF to Audit the 2023 Financial Statements	April-Mei April-May	Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS
33	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Th 2023 kepada RUPS Proposal on the appointment of PAF to audit the 2023 Financial Statements to the GMS	Juni June	Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada RUPS usulan penunjukan KAP untuk Melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 melalui surat No. S-52/PII/DK/1123 tanggal 8 November 2023 The Board of Commissioners has submitted to the GMS the proposal for the appointment of PAF to Conduct a General Audit of the Financial Statements of the Company for the 2023 Fiscal Year through letter No. S-52/PII/DK/1123 dated November 8, 2023
Aspek Lainnya Other Aspects			
34	Penelaahan atas pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris Review on complaints received by the Board of Commissioners	Sesuai kebutuhan/ pengaduan Based on needs/ complaints	Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang diterima oleh Dewan Komisaris Throughout 2023, there were no complaints received by the Board of Commissioners
35	Peningkatan kompetensi Anggota Dewan Komisaris Improving the competency of the Board of Commissioners	Sesuai jadwal Based on schedule	Rancangan RKA disusun pada bulan Oktober 2023 dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris No. S-48/PII/DK/1023 tanggal 27 Oktober 2023 Throughout 2023, the Board of Commissioners has attended both domestic and abroad trainings and seminars

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Performance Assessment

Dalam rangka memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kontribusi Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan pada kebijakan Perseroan dan praktik tata kelola yang disepakati.

In order to ensure effective and sustainable corporate governance, as well as to enhance the Board of Commissioners' contributions, the Board of Commissioners periodically assesses the Board of Commissioners performance in accordance with the Company's policies and established governance practices.

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Performance Assessment Policies and Procedures

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS. Kebijakan mengenai penilaian serta evaluasi kinerja Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.88/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017, dan *Board Manual* Perseroan. Berdasarkan kebijakan tersebut pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui metode pengukuran

The Shareholders conduct the Board of Commissioners' performance assessment during the General Meeting of Shareholders (GMS). The policy guiding this assessment refers to Minister of Finance Regulation No. 88/PMK.06/2015, Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017, and the Company's Board Manual. In accordance with these policies, the performance evaluation of the Board of Commissioners



kinerja yang terintegrasi, yang merupakan penerjemahan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dewan Komisaris ke dalam seperangkat Sasaran Strategis. Pencapaian Sasaran Strategis diukur melalui Indikator Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya.

is carried out using an integrated performance measurement method. This method aligns the duties, functions, and responsibilities of the Board of Commissioners into a set of Strategic Objectives. These Strategic Objectives are assessed using Performance Achievement Indicators (Key Performance Indicators) determined by the General Meeting of Shareholders annually.

Kriteria Penilaian kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

Penilaian kinerja Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris
Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris menggunakan kriteria yang diatur dalam KPI 2023 Dewan Komisaris Kolegial sebagai berikut:
 - Hasil Penilaian Independen atas Penerapan GCG pada PT PII Tahun 2023.
 - Persentase arahan Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti oleh Direksi
 - Jumlah pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal
 - Persentase pemberian tanggapan (respons) atas permohonan persetujuan/ rekomendasi dari Direksi yang tepat waktu
 - Pelaporan
2. Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG Aspek Dewan Komisaris
Penilaian kinerja GCG tahun buku 2023 di Perseroan menggunakan kriteria standar alat uji yang ada di Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Aspek Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Dewan Komisaris mengikuti program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.
- Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP atau perubahan RJPP dan rancangan RKAP atau perubahan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
- Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

The performance assessment of the Board of Commissioners utilizes the following criteria:

1. Board of Commissioners collegial performance assessment
The collegial performance assessment of the Board of Commissioners is based on the criteria outlined in the 2023 KPIs of Collegial Board of Commissioners, as follows:
 - Independent Assessment Results of GCG Implementation at IIGF in 2023.
 - Percentage of directives from the Board of Commissioners followed up by the Board of Directors.
 - Number of supervisions on the implementation of follow-up recommendations from both internal and external auditors.
 - Percentage of timely responses to requests for approval/ recommendations from the Board of Directors.
 - Reporting
 2. Performance evaluation of GCG assessment results in the Board of Commissioners Aspect
The Company's performance assessment of GCG for the fiscal year 2023 adheres to the standardized criteria outlined in the test tool specified in Minister of Finance Decree No. 505/KMK.06/2020 on Guidelines for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in Corporate.
- The Board of Commissioners Aspects are as follow:
- The Board of Commissioners participates in ongoing training and learning programs.
 - The Board of Commissioners establishes a clear division of duties, authorities, and responsibilities, and identifies the necessary factors to support the implementation of its responsibilities.
 - The Board of Commissioners approves the draft of Company's Long-Term Plan (RJPP) or changes to the RJPP, and the draft of Company's Work Plan and Budget (RKAP) or changes to the RKAP submitted by the Board of Directors.
 - The Board of Commissioners provides guidance to the Board of Directors regarding the implementation of Company's plans and policies.



- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan asosiasi.
- Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan bakal calon anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
- Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas dan operasional Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.
- The Board of Commissioners oversees the Board of Directors' implementation of Company's plans and policies.
- The Board of Commissioners supervises the implementation of subsidiary/associate company management policies.
- The Board of Commissioners participates in nominating candidates for Board of Directors members, evaluates the performance of the Board of Directors (individually and collegially), proposes tantiem/performance incentives for both the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations, and considers the performance of both bodies.
- The Board of Commissioners takes action regarding potential conflicts of interest involving itself.
- The Board of Commissioners monitors and ensures the effective and sustainable implementation of Good Corporate Governance practices.
- The Board of Commissioners arranges effective Board of Commissioners meetings and attends them in accordance with legal provisions.
- The Board of Commissioners appoints a Secretary to support its duties and operations.
- The Board of Commissioners has an effective Board of Commissioners Committee.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment Results of the Board of Commissioners

Berikut hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2023:

Below is the performance assessment result conducted for the Board of Commissioners in 2023:

Penilaian Kinerja Kolegal (KPI Dewan Komisaris) Collegial Performance Assessment

Tercapai 104,57% dari target 100%.
Achieved 104.57% of the target 100%.

Penilaian Kinerja Hasil Assessment GCG Performance Evaluation of GCG Assessment Results

91,03% (Sangat Baik) dari Target 87,50% (Sangat Baik)
91.03% (Very Good) of Target 87.50 (Very Good)

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

The evaluation outcomes of both the collective performance of the Board of Commissioners and the individual performance of each Board of Commissioners Members are integral aspects of the compensation and incentive structure for the Board of Commissioners Members.

Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors Performance Assessment

Dalam rangka memastikan memastikan bahwa Direksi dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan efektif, maka Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut:

In order to ensure the effective implementation of its roles and responsibilities, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the following policies:



1. Peraturan Menteri Keuangan No.88/PMK.06/2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2017; dan
3. *Board Manual* Perseroan.

Pengukuran kinerja Direksi disusun dengan menggunakan metode pengukuran kinerja yang terintegrasi yang merupakan penerjemahan Visi, Misi, dan strategi Perseroan ke dalam seperangkat Sasaran Strategis. Pencapaian Sasaran Strategis diukur dalam Indikator Pencapaian Kinerja (Indikator Kinerja Utama) baik secara individual maupun kolegal. Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham dan dibahas dalam forum RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors Performance Assessment Criteria

Penilaian kinerja Direksi menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja kolegal Direksi

Penilaian kinerja kolegal Direksi menggunakan kriteria yang diatur dalam KPI Direksi 2023 Kolegal sebagai berikut:

- Margin laba bersih
- Jumlah penerbitan Penjaminan atas *small scale* KPBU
- Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan
- Pemberian dukungan terhadap proyek yang telah dijamin untuk mencapai *financial close*
- Jumlah proyek yang diselesaikan *appraisal*
- Penyelesaian *milestones* penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara tepat waktu dan *leverage* biaya penugasan yang optimal
- Kegiatan *Joint Program* yang melibatkan seluruh BUMN/ Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan
- Pencapaian tingkat pemahaman PJKP dan *stakeholders* lainnya yang baik
- *Rating* Perusahaan *Sovereign*
- Meningkatkan peran aktif IIGF Institute sebagai *Center of Excellence* untuk Pembiayaan Infrastruktur dengan skema KPBU melalui peningkatan level akreditasi ATO *level execution*
- Risiko Korporasi yang terkendali
- Tata kelola perusahaan yang baik (GCG *score*)
- Tingkat pengendalian risiko klaim atas proyek yang masuk dalam kategori aman
- Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
- Peningkatan indeks *engagement* karyawan yang optimal
- Pembentukan struktur kepegawaian berbasis kompetensi
- Penyelesaian IT *Master Plan* 2023 – 2027

1. Minister of Finance Regulation No.88/PMK.06/2015;
2. Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2017; and
3. The Company's Board Manual.

The performance evaluation of the Board of Directors utilizes an integrated measurement method that aligns the Company's Vision, Mission, and strategy with a set of Strategic Objectives. These Strategic Objectives are assessed using Performance Achievement Indicators (Key Performance Indicators), both individually and collegially. The procedure for evaluating the Board of Directors' performance is conducted by the Board of Commissioners before being presented to the Shareholders and discussed in the GMS forum.

The performance assessment of the Board of Directors utilizes the following criteria:

1. Board of Directors collegial performance assessment

The collegial performance assessment of the Board of Directors is based on the criteria outlined in the 2023 KPIs of Collegial Board of Directors, as follows:

- Net profit margin
- Number of Guarantees issued for small-scale Public Private Partnership (PPP)
- Growth in project investment value facilitated through guarantees
- Assistance provided to guaranteed projects to achieve financial close
- Number of projects completed appraisal
- Timely completion of project preparation and transaction advisory assignment milestones and optimal assignment cost leverage
- Joint program activities involving all State-Owned Enterprises/Institutions under the Ministry of Finance
- Attainment of a good understanding of Government Contracting Agency (GCA) and other stakeholders
- Sovereign Company Rating
- Enhancement of the active role of the IIGF Institute as a Center of Excellence for Infrastructure Financing with PPP scheme through increased ATO accreditation levels at the execution stage
- Controlled Corporate Risks
- Good Corporate Governance (GCG *score*)
- The level of risk control claims on projects classified as safe category
- Operating Expenses Operating Income (BOPO)
- Improved optimal employee engagement index
- Establishment of a competency-based employment structure
- Completion of the IT Master Plan for 2023 – 2027



2. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi

Penilaian kinerja individu Direksi menggunakan kriteria yang diatur dalam KPI 2023 Direksi Individu sebagai berikut:

2. Individual performance assessment of each member of the Board of Directors

The individual performance assessment of the Board of Directors is based on the criteria outlined in the 2023 KPIs of Individual Board of Directors as follows:

Keterangan Description	Direktur Utama President Director	Direktur Bisnis Business Director	Direktur Keuangan Finance Director
Margin laba bersih Net profit margin	√	√	√
Pencapaian tingkat pemahaman PJPk dan stakeholders lainnya yang baik Attainment of a good understanding of Government Contracting Agency (GCA) and other stakeholders	√	√	√
Rating Perusahaan <i>Sovereign</i> Sovereign Company Rating	√	√	√
Risiko Korporasi yang terkendali Controlled Corporate Risks	√	√	√
Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses Operating Income	√	√	√
Peningkatan indeks <i>engagement</i> karyawan yang optimal Improved optimal employee engagement index	√	√	√
Pembentukan struktur kepegawaian berbasis kompetensi Establishment of a competency-based employment structure	√	√	√
Jumlah penerbitan Penjaminan atas <i>small scale</i> KPBU Number of Guarantees issued for small-scale Public Private Partnership (PPP)	-	√	-
Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan Growth in project investment value facilitated through guarantees	√	√	√
Pemberian dukungan terhadap proyek KPBU yang telah dijamin untuk mencapai <i>financial close</i> Assistance provided to guaranteed projects to achieve financial close	-	-	√
Jumlah proyek yang diselesaikan <i>appraisal</i> Number of projects completed appraisal	-	√	-
Tingkat pengendalian risiko klaim atas proyek yang masuk dalam kategori aman The level of risk control claims on projects classified as safe category	-	-	√
Penyelesaian IT <i>Master Plan</i> 2023 – 2027 Completion of the IT Master Plan for 2023 – 2027	-	-	√
Tingkat capaian pendapatan pengelolaan dana Achievement rate of fund management income	-	-	√
Penyelesaian <i>milestones</i> penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi secara tepat waktu dan <i>leverage</i> biaya penugasan yang optimal Timely completion of project preparation and transaction advisory assignment milestones and optimal assignment cost leverage	√	-	-
Kegiatan Joint Program yang melibatkan seluruh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan Joint program activities involving all State-Owned Enterprises/Institutions under the Ministry of Finance	√	-	-
Reputasi PT PII IIGF Reputation	√	-	-



Keterangan Description	Direktur Utama President Director	Direktur Bisnis Business Director	Direktur Keuangan Finance Director
Akreditasi ATO ATO Accreditation	-	√	-
Tata kelola perusahaan yang baik (GCG score) Good Corporate Governance (GCG score)	√	-	-
Penyampaian Kajian Penerapan ESG dan penyusunan sistem (Kebijakan/ <i>Framework</i> /Pedoman/Dokumen lainnya) untuk penerapan ESG dalam penjaminan KPBU Submission of ESG Implementation Review and system development (Policy/ <i>Framework</i> /Guidelines/other Documents) for ESG implementation in PPP guarantee	-	√	-
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Utama Completion of follow-up on internal and external audit results of the Main Directorate	√	-	-
Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Utama Completion of follow-up as directed by the Commissioner of the Main Directorate	√	-	-
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Bisnis Completion of follow-up on internal and external audit results of the Business Directorate	-	√	-
Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Bisnis Completion of follow-up as directed by the Commissioner of the Business Directorate	-	√	-
Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal Direktorat Keuangan Completion of follow-up on internal and external audit results of the Finance Directorate	-	-	√
Penyelesaian tindak lanjut sesuai arahan Komisaris Direktorat Keuangan Completion of follow-up as directed by the Commissioner of the Finance Directorate	-	-	√

Keterangan:
√ : termasuk kriteria penilaian
- : tidak termasuk kriteria penilaian

Description:
√ : includes assessment criteria
- : not included in the assessment criteria

3. Penilaian kinerja hasil *assessment* GCG Aspek Direksi

Penilaian kinerja GCG tahun buku 2023 di Perseroan menggunakan kriteria standar alat uji yang ada di Keputusan Menteri Keuangan No. 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Aspek Direksi sebagai berikut:

- Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- Direksi melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas
- Direksi menyusun perencanaan perusahaan.

3. Performance evaluation of GCG assessment results in the Board of Directors Aspect

The Company's performance assessment of GCG for the fiscal year 2023 adheres to the standardized criteria outlined in the test tool specified in Minister of Finance Decree No. 505/KMK.06/2020 on Guidelines for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in Corporate Companies (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance.

The Board of Directors Aspects are as follow:

- The Board of Directors conducts ongoing training and learning programs.
- The Board of Directors ensures a clear division of duties, authorities, and responsibilities.
- The Board of Directors develops Company plans.



- Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.
- Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
- Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
- Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.
- Direksi *memonitor* dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
- Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.
- Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Direksi menyelenggarakan pengawasan internal.
- Direksi menyelenggarakan fungsi kesekretariatan perusahaan.
- Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- The Board of Directors contributes to achieving the Company's performance targets.
- The Board of Directors conducts operational and financial control over the implementation of Company plans and policies.
- The Board of Directors manages the Company in compliance with prevailing laws, regulations, and the articles of association.
- The Board of Directors fosters value-added relationships for the Company and stakeholders.
- The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest among Board of Directors members and management under its purview.
- The Board of Directors ensures the Company implements information disclosure and communication in accordance with laws and regulations, and submits information to the Board of Commissioners and Shareholders in a timely manner.
- The Board of Directors schedules and attends Board of Commissioners meetings as required by statutory provisions.
- The Board of Directors conducts internal supervision.
- The Board of Directors carries out the Company's secretarial functions.
- The Board of Directors arranges the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and other General Meetings of Shareholders (GMS) in compliance with laws and regulations.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Performance Assessment Results of the Board of Directors

Berikut hasil penilaian kinerja Direksi tahun 2023:

Below is the performance assessment result conducted for the Board of Directors in 2023:

Penilaian Kinerja Kolegial Collegial Performance Assessment	Penilaian Kinerja Hasil <i>Assessment</i> GCG Performance Evaluation of GCG Assessment Results
100,70 dari target 100%. 100.70 of target 100%.	93,85% (Sangat Baik) dari Target 87,50 (Sangat Baik) 93.85% (Very Good) of Target 87.50 (Very Good)

Adapun hasil penilaian kinerja Direksi secara individual adalah sebagai berikut:

The individual performance assessment results of the Board of Directors are outlined below:

Nama Name	Jabatan Position	Skor Pencapaian KPI KPI Achievement Score
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	102,31% dari target 100% 102.31% of target 100%
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	104,92% dari target 100% 104.92% of target 100%
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	102,58% dari target 100% 102.58% of target 100%

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing masing Anggota Direksi secara individual menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Direksi.

The evaluation outcomes of both the collective performance of the Board of Directors and the individual performance of each Board of Directors Members are integral aspects of the compensation and incentive structure for the Board of Directors Members.



Penilaian Kinerja Komite Di bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

Hingga 31 Desember 2023, Komite di bawah Dewan Komisaris PT PII terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Secara berkala Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.

Kriteria Penilaian Komite dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan masing masing Komite. Adapun dasar penilaian kinerja Komite mencakup:

1. Realisasi laporan pelaksanaan tugas Komite sesuai program kerja Komite dan piagam komite
2. Frekuensi rapat yang dilakukan Komite sehingga dapat membantu fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris.
3. Tingkat kehadiran Komite

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG. Untuk periode tahun buku 2023, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta Piagam Komite Audit. Pelaksanaan kinerja Komite Audit juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat khusus Komite Audit sebanyak 9 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dirinci lebih lanjut di bagian pembahasan Komite Audit pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris meningkatkan kualitas pengawasan melalui pemberian nasihat profesional kepada Dewan Komisaris terkait pengelolaan *Enterprise Risk Management* (ERM). Untuk periode tahun buku 2023, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta Piagam Komite Pemantau Risiko. Pelaksanaan kinerja Komite Pemantau Risiko juga diukur dari tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 9 kali serta telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana dirinci di bagian pembahasan Komite Pemantau Risiko pada bab ini dari Laporan Tahunan ini.

Until December 31, 2023, the Committees under the IIGF's Board of Commissioners comprised the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee. The Board of Commissioners regularly oversees and assesses the performance of the Committees under its purview.

The Committee Assessment Criteria are based on the realization and fulfillment of the work program outlined in the Committee Work Plan and Budget, which is reported to the Board of Commissioners in each Committee's report. The assessment of Committee performance is based on:

1. Realization of the report on the fulfillment of the Committee's responsibilities in line with its work program and Committee charter
2. The frequency of Committee meetings conducted to support the supervisory and advisory roles of the Board of Commissioners
3. The Committee's attendance rate.

The Audit Committee was formed to enhance the Board of Commissioners' oversight function regarding the Company's management in alignment with Good Corporate Governance (GCG) principles. For the 2023 fiscal year period, the Company's Audit Committee fulfilled its duties and responsibilities in accordance with the applicable laws, regulations, and the Audit Committee Charter. The performance of the Audit Committee was also evaluated based on its attendance at the Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company's Audit Committee has convened special meetings nine times and conducted various activities to implement its duties and responsibilities, as further elaborated in the Audit Committee discussion section of this chapter in the Annual Report.

The establishment of the Risk Monitoring Committee aimed to improve the Board of Commissioners' supervision quality by offering professional advice to the Board of Commissioners on Enterprise Risk Management (ERM). For the 2023 fiscal year period, the Company's Risk Monitoring Committee fulfilled its duties and responsibilities in compliance with the applicable laws, regulations, and the Risk Monitoring Committee Charter. The performance of the Risk Monitoring Committee was also assessed based on its attendance at the Board of Commissioners meetings and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company's Risk Monitoring Committee has convened 9 meetings and conducted various activities as part of its duties, as outlined in the Risk Monitoring Committee discussion section in this chapter of the Annual Report.



Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Working Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dalam rangka terciptanya hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya persamaan persepsi dan komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan dan menyepakati prinsip dasar dalam hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang diatur dalam *Board Manual* Bagian IV Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perseroan.

The Board of Commissioners and the Board of Directors need to have a common perception and communication to create an integrated, sustainable, and accountable working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Therefore, the Board of Commissioners and the Board of Directors establish and agree on the basic principles in the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stipulated in the Board Manual Section IV Working Relationship between the Company's Organs.

Pedoman tersebut mengatur antara lain:

1. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Rapat Umum Pemegang Saham
3. Respon atas Peluang Bisnis dan Isu Terkini.
4. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal
6. Penambahan Penyertaan Modal Negara
7. Program Pengenalan Perseroan
8. Program Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri
10. Tata Komunikasi dan Korespondensi antara Direksi dan Dewan Komisaris
11. Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi
12. Etika Berusaha

The Manual regulates, among others:

1. Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
2. General Meeting of Shareholders
3. Responses to Business Opportunities and Current Issues.
4. Actions of the Board of Directors Requiring Approval of the Board of Commissioners or the GMS
5. Appointment of Public Accounting Firm (KAP) as External Auditor
6. Additional State Capital Participation
7. Company Introduction Program
8. Training Program of the Board of Commissioners and Board of Directors
9. International Business Trip
10. Communication and Correspondence between the Board of Directors and the Board of Commissioners
11. Remuneration Establishment of the Board of Commissioners and Board of Directors
12. Business Ethics

Informasi Keberagaman

Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

Untuk memperoleh masukan dan pandangan yang lebih komprehensif dalam rangka pengambilan keputusan yang objektif dan optimal, maka Perseroan memiliki ketentuan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya memperkaya sudut pandang, keberagaman komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi aspek operasional serta memajukan usaha Perseroan, dan meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan.

The Company has provisions for diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors to obtain more comprehensive input and perspective to make objective and optimal decisions. Not only enriching perspectives, the diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall provide added value to the operational aspects, advance the Company's business, and improve the Corporate Governance quality.



Penentuan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mempertimbangkan aspek keberagaman keahlian, kompetensi, pengetahuan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan *gender* sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The establishment of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors considered the diversity in expertise, competence, knowledge, educational background, work experience, and gender, as required in the implementation of the duties and authorities of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tercermin pada tabel di bawah ini:

The diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is depicted in the table below:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2023

The Diversity of the Composition of the Board of Commissioners in 2023

Jabatan Position	Terdapat 3 (tiga) orang Komisaris yaitu yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) anggota Komisaris There are three (3) Commissioners, i.e., one (1) President Commissioner and two (2) Commissioners
Usia Age	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif, yaitu 52 tahun – 60 tahun. The members of the Board of Commissioners are in a fairly productive age range, i.e., 52–60 years.
Gender	Keberagaman <i>gender</i> terdiri dari 2 (orang) Perempuan dan 1 (satu) orang Laki-laki. The Board of Commissioners consists of two (2) Female Commissioners and one (1) Male Commissioner.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Sarjana dan <i>Magister</i> dengan berbagai bidang pendidikan seperti Hukum, <i>Science</i> Agribisnis, Bidang Ilmu Tanah, Ekonomi Akuntansi, dan <i>Business Administrasi Finance</i> . The education level of the Board of Commissioners includes Bachelor's and Master's in various sectors, such as Law, Agribusiness Science, Land Science, Accounting Economics, and Business Administration Finance.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Administrasi, Akuntansi, Pengendalian Kredit, Risiko, Operasional, Hukum dan Audit. Diverse work experience, including Officer and/or Senior Executive or other key positions in Finance, Administration, Accounting, Credit Control, Risk, Operations, Legal, and Audit.

Keberagaman Komposisi Direksi Tahun 2023

The Diversity of the Composition of the Board of Directors in 2023

Jabatan Position	Terdapat 3 (tiga) orang Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur Bisnis There are three (3) Directors, i.e., the President Director, Finance Director, and Business Director.
Usia Age	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang produktif, yaitu 45 tahun – 54 tahun. The members of the Board of Directors are in a fairly productive age range, i.e., 45–54 years.
Pendidikan Education	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana, <i>Magister</i> dan Doktor dengan berbagai bidang pendidikan seperti Manajemen, Akuntansi, <i>Risk Management</i> , <i>Project Finance</i> , Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik bidang Manajemen Proyek The education level of the Board of Directors includes a Bachelor's, Master's, and Doctorate in various sectors, such as Management, Accounting, Risk Management, Project Finance, Electrical Engineering, Civil Engineering, and Project Management Engineering.
Pengalaman Kerja Work Experience	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain Direksi, Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada di Bidang Keuangan, Akuntansi, <i>Business Development</i> , <i>Risk & Compliance</i> dan Audit. Diverse work experience, including Directors and/or Senior Executives or other key positions in Finance, Accounting, Business Development, Risk & Compliance, and Audit.



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan terkait nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada PMK No. 197/2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan dan PMK No. 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").

Kriteria bakal calon anggota Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat umum:
Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Syarat Khusus:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki integritas dan moral yang baik;
 - c. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
 - d. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan; dan
 - f. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
3. Syarat Lain:
 - a. Bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan, paling kurang 1 (satu) tahun;
 - d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris; dan

Policies related to the nomination and selection of members of the Board of Commissioners and Board of Directors refer to PMK No. 197/2019 on the Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, and PMK No. 78/PMK.06/2015 on Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of a Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, as amended several times, lastly by the Minister of Finance Regulation No. 135/PMK.06/2017 ("PMK 78/2015").

The criteria for candidates of the Board of Commissioners are as follows:

1. General requirements:
Individuals who are capable of performing legal actions.
2. Specific requirements:
 - a. Physically and mentally healthy;
 - b. Have integrity and good morals;
 - c. Have a strong will and high dedication;
 - d. Understand the Company's management issues relating to one of the management functions;
 - e. Have adequate knowledge of the Company's sector; and
 - f. Can provide sufficient time to carry out his/her duties.
3. Other requirements:
 - a. Shall not be a party official, member of the legislative, and/or shall not be in the process of nomination for a legislative candidate;
 - b. Shall not be a head/deputy head of a region and/or shall not be running for the candidate of head/deputy head of a region;
 - c. Shall not serve as a member of the Board of Directors of the Company concerned, for at least one (1) year;
 - d. Not currently holding a position, that, based on statutory regulations is prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Commissioners, unless signing a statement letter of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Commissioners; and



- e. Tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Kriteria bakal calon anggota Direksi, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;
2. Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan;
3. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan Perseroan;
4. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
5. Memiliki *leadership* yang baik;
6. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
7. Memiliki integritas dan moral yang baik;
8. Cakap melakukan perbuatan hukum;
9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan; dan
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.

Persyaratan lain untuk dapat dipilih sebagai anggota Direksi, yaitu:

1. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
2. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
3. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada instansi/ Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah, anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan/atau perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
4. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi; atau
5. tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada Perseroan selama 2 (dua) periode berturut-turut.

- e. Shall not serve as a member of the Board of Commissioners on said Company for two (2) consecutive service periods.

The criteria for candidates of the Board of Directors are as follows:

1. Have an understanding of management and corporate governance;
2. Have the ability to formulate and implement strategic policies in developing the Company;
3. Have the ability to develop the Company;
4. Have adequate expertise and knowledge in the field that will be his/her responsibility;
5. Have good leadership;
6. Have good reputation during his/her previous assignments;
7. Have integrity and good morals;
8. Is capable of taking legal action;
9. Have never been declared bankrupt or become a member of the Board of Commissioners/Directors who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within five (5) years before the nomination; and
10. Have never been punished for committing a crime which is detrimental to the state's finances and/or those related to the financial sector within five (5) years before the nomination.

Other requirements to be elected as a member of the Board of Directors:

1. shall not be a party official, member of the legislative, and/or shall not be in the process of nomination for a legislative candidate;
2. shall not be a head/deputy head of a region and/or shall not be running for the candidate of head/deputy head of a region;
3. not currently serving as an official at central and/or local government agencies/institutions, member of the Board of Commissioners/Supervisory Board at SOEs, member of the Board of Directors at SOEs and/or companies, unless signing a statement letter of willing to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors;
4. not currently holding a position, that, based on statutory regulations is prohibited to be concurrent with the position of a member of the Board of Directors unless signing a statement letter of willingness to resign from the position if elected as a member of the Board of Directors; or
5. shall not serve as a member of the Directors of the Company for two (2) periods consecutively.

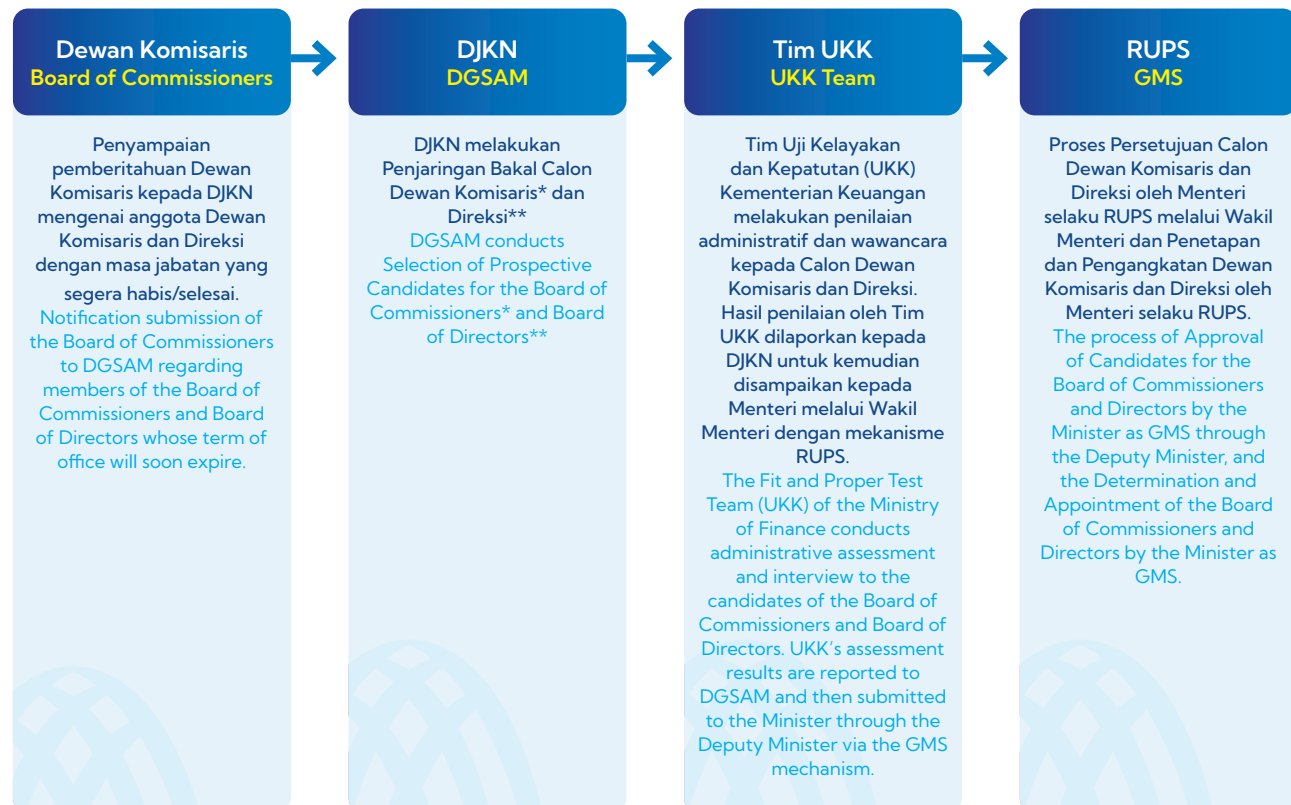


Tahapan dan Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Stages and Procedures for Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

Berikut tahapan nominasi hingga pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

The following are the stages of nomination up to the appointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors:



* Pelaksanaan tahapan penjaringan Bakal Calon ditujukan untuk memperoleh Bakal Calon Dewan Komisaris. Bakal Calon Dewan Komisaris Perseroan diseleksi dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural Pemerintah;
4. Pejabat Fungsional Pemerintah; atau
5. Orang perseorangan lain yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.

Untuk Bakal Calon Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Kementerian Keuangan, mereka ditetapkan sesuai keputusan Menteri dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Pertimbangan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (TPKOMWAS).

** Pelaksanaan tahapan penjaringan Bakal Calon ditujukan untuk memperoleh Bakal Calon Direksi. Bakal Calon Direksi Perseroan diseleksi dari:

1. Internal Perseroan, terdiri atas anggota Direksi; dan/atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa.
2. Eksternal Perseroan, dalam hal:
 - Dewan Komisaris tidak menyampaikan usulan bakal calon yang berasal dari internal kepada DJKN.
 - Dari hasil penilaian akhir oleh Tim UKK terhadap Bakal Calon dari internal Perseroan tidak diperoleh calon yang memenuhi kualifikasi.

* The Candidate selection stage has the objective to obtain Candidates for the Board of Commissioners. Candidates for the Company's Board of Commissioners are selected from:

1. Former Directors of SOEs;
2. Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs;
3. Government Structural Officials;
4. Government Functional Officers; or
5. Other individuals who are considered capable of becoming members of the Board of Commissioners.

For Candidates of the Board of Commissioners who come from structural officers and functional officials of the Ministry of Finance, they are set forth in accordance with the Minister's decree by taking into account recommendations from the Advisory Team for the Board of Commissioners at State-Owned Enterprises and the Supervisory Board at Public Service Agency (TPKOMWAS).

**The Candidate selection stage has the objective to obtain Candidates for the Board of Directors. Candidates for the Company's Board of Directors are selected from:

1. Company's internal, consisting of members of the Board of Directors; and/or officers one level below the Board of Directors or officers with special achievements.
2. Company's external, in the event that:
 - The Board of Commissioners does not submit proposals for internal candidates to the DGSAM.
 - The final assessment by the UKK Team of the Candidates from the Company's internal did not result in candidates who meet the qualifications.



Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, besaran gaji dan tunjangan Direksi dirumuskan dan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk dimintakan persetujuannya.

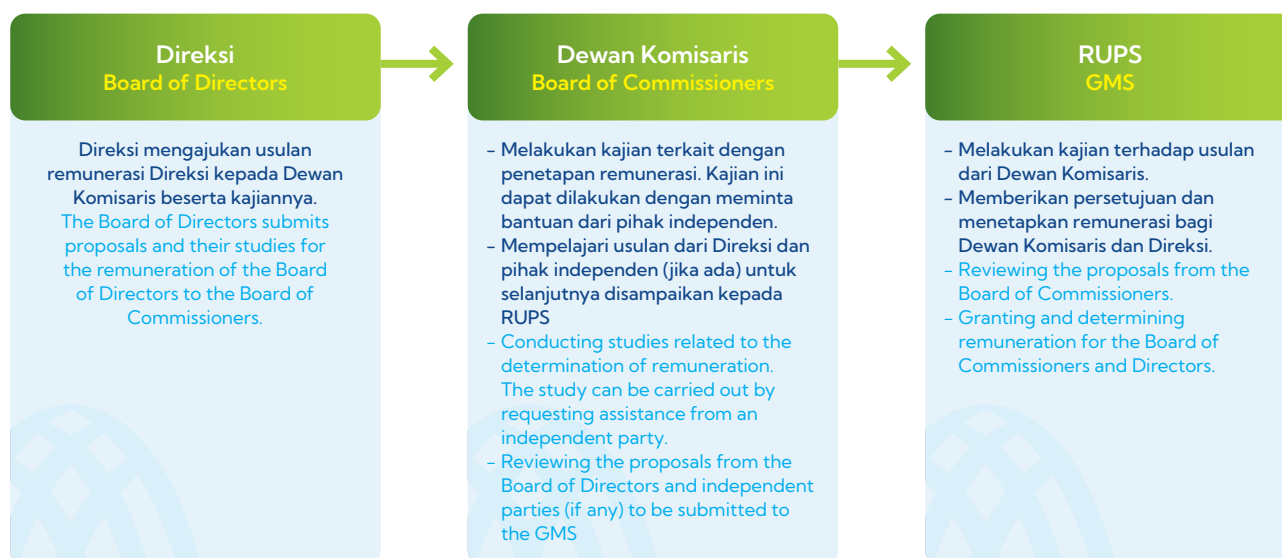
The remuneration policy of the Board of Commissioners and Directors of the Company refers to Article 96 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Meanwhile, the salary and allowances for the Board of Directors are formulated and submitted for approval by the Board of Commissioners to the GMS.

Kewenangan tersebut dapat diberikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 sedangkan petunjuk teknis tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan ("PMK 200/2018").

This authority can be granted to the Board of Commissioners based on Article 96 paragraph 2 of Law No. 40 of 2007, while the technical guidelines on the remuneration policy of the Board of Commissioners and Board of Directors are further regulated in the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 200/PMK.06/2018 on the Procedures for Determining the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance ("PMK 200/2018").

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Determination Procedure for the Board of Commissioners and Board of Directors



Indikator untuk Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners' and Board of Directors' Indicators for Determining Remuneration

Perseroan berpedoman pada keputusan dari RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perseroan yang mencakup aspek-aspek berikut ini:

1. Penghasilan tahun sebelumnya.
2. Tingkat inflasi.
3. Kinerja operasi dan keuangan Perseroan serta pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, termasuk pertimbangan atas sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
5. Kewajaran dengan *peer* perusahaan lainnya.
6. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Company refers to GMS Resolution by taking into account the results of the study conducted by the Company which includes the following aspects:

1. Previous year's income.
2. Inflation rate.
3. The Company's operating and financial performance and the *Key Performance Indicator*'s (KPI) achievement.
4. The Company's financial condition and capability, including consideration of the Company's long-term goals and strategies.
5. Fairness with other peer companies.
6. Prevailing laws and regulations.



Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Structure and Components of Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023 telah dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2023 dalam agenda penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023 serta pembayaran Tantiem berdasarkan kinerja Tahun Buku 2022 juncto Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor KMK-174/KM.6/2023 tentang Persetujuan Pembayaran Tantiem Tahun Buku 2022 dan Penetapan Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, Tunjangan, dan Fasilitas yang Diberikan Kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 ("KMK-174/2023"), dengan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The provision of remuneration to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2023 has been implemented based on the Annual General Meeting of Shareholders Resolution for the 2022 Fiscal Year held on 19 May 2023 with the agenda of determining the salary/honorarium and allowances/facilities of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2023 Fiscal Year, as well as the payment of Tantiem based on the performance of the 2022 Fiscal Year in conjunction with the Resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company No. KMK-174/KM.6/2023 on the Approval of Tantiem Payment for 2022 Fiscal Year and Determination of the Board of Directors' Salary, Board of Commissioners' Honorarium, Allowances, and Facilities Provided to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year ("KMK-174/2023"), with the remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors consisting of:

Keterangan Description	Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure	Struktur Remunerasi Direksi Board of Directors' Remuneration Structure
Struktur Remunerasi Jangka Pendek Short-Term Remuneration Structure	- Honorarium - Tunjangan - Fasilitas Tantiem/Insentif Kinerja - Penghasilan Lainnya - Honorarium - Allowances - Tantiem/Performance Incentives - Other Income	- Gaji - Tunjangan - Fasilitas Tantiem/Insentif Kinerja - Penghasilan Lainnya - Salary - Allowances - Tantiem/Performance Incentives - Other Income
Struktur Remunerasi Jangka Panjang Long-Term Remuneration Structure	Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan jangka Panjang untuk Dewan Komisaris As of the end of 2023, the Company has not implemented Remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Commissioners	Hingga akhir tahun 2023, Perseroan belum menerapkan Remunerasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan jangka Panjang untuk Direksi As of the end of 2023, the Company has not implemented Remuneration that takes into account the Company's long-term performance for the Board of Directors

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022 dan 2023

Remuneration Component of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2022 and 2023

Komponen Remunerasi & Fasilitas Lain Remuneration Component & Other Facilities	Jumlah diterima dalam 1 (Satu) Tahun (dalam ribuan Rupiah) Amount received in One (1) Year (in thousand Rupiah)	
	2023	2022
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	8.609.071	7.086.592
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	19.381.195	14.730.815
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors	27.990.266	21.817.407



Sesuai dengan KMK-174/2023, komponen gaji anggota Direksi lainnya adalah sebesar 90% dari gaji Direktur Utama dan honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

In accordance with KMK-174/2023, the salary component of other members of the Board of Directors is 90% of the President Director's salary, and the honorarium of the President Commissioner is 45% of the President Director's salary. The honorarium for members of the Board of Commissioners is set forth at 90% of the Honorarium of the President Commissioner.

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Non-Performance Bonus and Stock Options

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat Bonus Non Kinerja dan penawaran Opsi Saham yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi di PT PII.

As of the reporting period, there is no Non-Performance Bonus and Stock Options offered to the members of IIGF's Board of Commissioners and Board of Directors.

Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioner's Supporting Organs

Hingga akhir tahun 2023, organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Komite Audit; dan
3. Komite Lainnya yaitu Komite Pemantau Risiko.

As of the end of 2023, the supporting organs of the Board of Commissioners consist of:

1. Board of Commissioners' Secretary
2. Audit Committee
3. Other Committee, i.e., Risk Monitoring Committee.

Organ pendukung Dewan Komisaris PT PII telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.88/PMK.06/2015 pasal 28.

The supporting organs of the IIGF's Board of Commissioners are in accordance with the stipulated as governed in the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 Article 28.





Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain. Saat ini, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Muhammad Nahdi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/08/2019 dan diperpanjang masa tugasnya melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/KOM/PII/08/2022. Sekretaris Dewan Komisaris mengemban tugas pokok untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan pengelolaan Perseroan. Berikut Profil Sekretaris Dewan Komisaris PT PII:

The Company has appointed a Secretary of the Board of Commissioners who functions as a liaison between the Board of Commissioners and other parties. Currently, the Secretary of the Board of Commissioners is Mr. Muhammad Nahdi, pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-03/KOM/PII/08/2019, and his term of office is extended pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-04/KOM/PII/08/2022. The Secretary of the Board of Commissioners has the main duty to provide administrative and secretarial support to the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors regarding the Company's management. The profile of IIGF's Secretary of the Board of Commissioners is as follows:

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary of Board of Commissioners



Muhammad Nahdi

Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Secretary

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	49 tahun per 31 Desember 2023	49 years old as of 31 December 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Bandung, 20 Maret 1975	Bandung, 20 March 1975
Periode Jabatan Term of Office	Period ke-2, dengan masa Jabatan 15 Agustus 2022 s.d 14 Agustus 2025	Second period, with term of office from 15 August 2022 up to 14 August 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background:	<i>Master (S2) of Commerce (Advanced) Program Majoring Applied Finance di Business, Economics and Law (BEL) Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia (2006).</i>	Master of Commerce (Advanced) Program Majoring in Applied Finance at Business, Economics, and Law (BEL) Faculty, University of Queensland, Brisbane, Australia (2006).
Riwayat Jabatan Career History	Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penilaian Usaha II/Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II di Direktorat Penilaian Kekayaan Negara/Direktorat Penilaian, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007–2012), Kepala Bidang Penilaian di Kantor Wilayah DJKN Riau–Sumatera Barat–Kepulauan Riau, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam di Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Served as Head of Business Valuation Section II/Head of Business Valuation Standardization Section II at the Directorate of State Assets Valuation/Directorate of Valuation, Directorate General of State Assets Management (DGSAM), Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2007–2012), Head of Valuation Division at the Riau–West Sumatra–Riau Islands Office of DGSAM, DGSAM, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and Head of Sub-Directorate of Business and Natural Resources Valuation Standardization at the Directorate of Valuation, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) (2017–sekarang).	He also serves as a Member of the Indonesian Valuation Standards Committee (KPSPI) (2017–present).



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tasks and Responsibilities of the Board of Commissioners' Secretary

Secara garis besar, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris;
3. Mengoordinasi tugas-tugas administratif, kesekretariatan dan protokoler Dewan Komisaris;
4. Mengoordinasi dan tindak lanjut atas permintaan dan/atau pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan dan eksternal yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Mengoordinasi penyusunan rancangan anggaran dan menyampaikan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
6. Mengoordinasi penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi Rapat Umum Pemegang Saham; dan
7. Mengoordinasi dan tindak lanjut atas tugas lain yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite di bawah Dewan Komisaris.

Generally, the Secretary of the Board of Commissioners is responsible for:

1. Assisting the Board of Commissioners in preparing the minutes of the Board of Commissioners' meetings;
2. Coordinating the Board of Commissioners' meetings;
3. Coordinating the administrative, secretarial, and protocol duties of the Board of Commissioners;
4. Coordinating and following up on requests and/or collection of data/information from and/or to the Company's management and external parties not covered by the duties of the Committee, including information on rules and regulations relevant to the Board of Commissioners' duties and responsibilities;
5. Coordinating the budget preparation and submitting the Annual Budget of the Board of Commissioners;
6. Coordinating the suggestions and opinions regarding the agenda and materials of the General Meeting of Shareholders; and
7. Coordinating and following up on other tasks not covered by the duties of the Committees under the Board of Commissioners.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Competency Development of the Board of Commissioners' Secretary

Perseroan memberikan kesempatan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

The Company provides the opportunity for the Secretary of the Board of Commissioners to participate in competency development program to improve his/her insight and knowledge to support the duties of the Secretary of the Board of Commissioners, so that it is always relevant to the latest developments in the Company's business.

Pada tahun 2023 tepatnya di bulan Juni, Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan melakukan pelatihan *E-Learning Digital Literacy* yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan *Learning Center*.

In June 2023, the Secretary of the Board of Commissioners of the Company participated in the E-Learning Digital Literacy training organized by the Ministry of Finance Learning Center.

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023

Report on the Duties of the Secretary of the Board of Commissioners in 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sebagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Program Kerja Sekretaris Dewan Komisaris. Berikut realisasi program kerja Sekretaris Dewan Komisaris 2023:

In 2023, the Secretary of the Board of Commissioners has conducted activities as an implementation of his/her duties and responsibilities with reference to the Work Program of the Secretary of the Board of Commissioners. The work program realization of the Secretary of the Board of Commissioners in 2023 is as follows:



No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
Aspek Pelaksanaan Aspect			
1	Penyusunan RKA Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2024 Preparation of the Secretary of the Board of Commissioners 2024 Work Program & Budget (RKA)	Juli-Agustus July-August	Rancangan RAB dan RKA disusun pada bulan Oktober 2023 dan disampaikan kepada Direksi melalui surat Dewan Komisaris No. S-48/PII/DK/1022 tanggal 27 Oktober 2023 RAB and RKA drafts were prepared in October 2023 and submitted to the Board of Directors via the Board of Commissioners' Letter No. S-48/PII/DK/1022 dated 27 October 2023
2	Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2024 Preparation of 2024 RKA for the Board of Commissioners	Agustus August	
3	Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2024 Preparation of the proposed 2024 Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners	Agustus-September August-September	Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris tahun 2024 telah disampaikan kepada RUPS dan ditetapkan saat RUPS Persetujuan RKAP tahun 2024 Proposed Performance Contract (IKU) of the Board of Commissioners for 2024 has been submitted to the GMS and stipulated during the GMS Approval of the 2024 RKAP
4	Penelaahan atas usulan RKAP dan atau RJPP PT PII Tahun 2024 Review of the proposed IIGF's RKAP and/or RJPP in 2024	September-Oktober September-October	Sekretaris Dewan Komisaris telah memberikan revidi atas penelaahan Dewan Komisaris terkait masukan atas konsep RKAP 2024 kepada Direksi melalui surat No. S-44/PII/DK/1022 tanggal 13 Oktober 2022 yang telah seluruhnya diakomodasi oleh Direksi.
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP Tahun 2024 Preparation of materials for the Board of Commissioners' responses to the GMS on the 2024 RKAP and/or RJPP draft	Oktober October	Dewan Komisaris juga memberikan tanggapan atas RKAP 2024 kepada RUPS melalui surat no S-50/PII/ DK/1123 tanggal 2 November 2023 The Secretary of the Board of Commissioners has reviewed the Board of Commissioners' input regarding the 2024 RKAP draft to the Board of Directors via Letter No. S-44/PII/DK/1022 dated 13 October 2022, which has been fully accommodated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also provided feedback on the 2024 RKAP to the GMS via Letter No. S-50/PII/DK/1123 dated 2 November 2023.
Aspek Pengawasan Supervisory			
6	Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute Monitoring IIGF Institute's activities	Mei dan Desember May and December	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held monthly in the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
7	Penelaahan atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya Review of quality and service policies and their implementation	Agustus August	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held monthly in the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
8	Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris Internal meetings of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Selama periode tahun 2023 telah dilaksanakan rapat rutin Dewan Komisaris sebanyak 14 kali In 2023, 14 meetings of the Board of Commissioners were held
9	Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi The Board of Commissioners meeting is implemented, by inviting the Board of Directors	Bulanan Monthly	Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 17 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi In 2023, 17 joint meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors were held
10	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation of the RKAP implementation	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Implemented every month during the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.
11	Evaluasi atas kegiatan CSR CSR evaluation	Semesteran Every six months	Dilaksanakan per semester dan laporan pelaksanaan pengawasan RKAP telah dikirim Dewan Komisaris kepada RUPS Implemented per semester and the report on the implementation of RKAP supervision has been sent by the Board of Commissioners to the GMS



No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
12	Penelaahan terkait transaksi atau Tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/ RUPS Review of transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners/ GMS	Sesuai disposisi As per disposition	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Held monthly in the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
13	<i>Monitoring</i> atas proyek yang telah dijamin Monitoring of projects that have been guaranteed	Sesuai jadwal Divisi Project Monitoring As scheduled by the Project Monitoring Division	Dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris Monthly during the internal meeting of the Board of Commissioners
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
14	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2022 Submission of responses to the 2022 Annual Report	April	Tanggapan atas Laporan Tahunan 2022 disampaikan sesuai jadwal Responses to the 2022 Annual Report submitted as scheduled
15	Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Preparation of report on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners	Triwulanan Quarterly	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulan tahun 2023 Report on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners has been sent to the GMS quarterly in 2023
16	Penyusunan laporan realisasi IKU Preparation of IKU realization report	Triwulanan Quarterly	Laporan realisasi IKU telah dikirimkan ke RUPS per periode triwulanan IKU realisation report has been sent to the GMS quarterly
17	Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris Preparation of the Secretariat of the Board of Commissioners' report	Triwulanan Quarterly	Laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris dilaksanakan per triwulanan The report of the Secretariat of the Board of Commissioners is carried out quarterly
18	Penyusunan laporan pengawasan RKAP Preparation of RKAP monitoring report	Semesteran Every six months	Laporan pengawasan RKAP telah dikirimkan ke RUPS per periode semesteran RKAP monitoring report has been sent to the GMS quarterly
19	<i>Monitoring</i> atas proyek yang telah dijamin Monitoring of projects that have been guaranteed	Sesuai jadwal Divisi Project Monitoring As scheduled by the Project Monitoring Division	<i>Monitoring</i> atas proyek yang telah dijamin dilaksanakan setiap bulan saat pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Monitoring of projects that have been guaranteed is carried out monthly in the internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
Aspek Penerapan GCG GCG Aspect			
20	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 Monitoring the follow-up of the implementation of GCG AOI recommendations by BPKP in 2021	Januari January	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 dilaksanakan per semester sepanjang tahun 2023. Seluruh AOI Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti sampai dengan Desember tahun 2023 Monitoring of the follow-up to the GCG AOI recommendations by BPKP in 2021 was carried out every six months in 2023. All AOIs of the Board of Commissioners have been followed up until December 2023.
21	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 GCG assessment in 2022	Januari January	Penilaian penerapan GCG tahun 2022 oleh BPKP telah selesai dilaksanakan berdasarkan berita pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP acara <i>exit meeting assessment</i> atas penerapan GCG PT PII tahun 2022 dengan nilai skor keseluruhan adalah 88,17 The assessment of the 2022 GCG by BPKP has been completed based on the minutes of the GCG Implementation in 2022 by BPKP at the exit meeting assessment of IIGF's GCG implementation in 2022 with an overall score of 88.17.
22	Pembahasan draf <i>Annual Report</i> tahun 2022 Discussion of the 2022 Annual Report draft	Februari-Maret February-March	Draf <i>Annual Report</i> tahun 2022 dilaksanakan pembahasan bulan April The 2022 Annual Report draft was discussed in April



No.	Uraian Kegiatan Description	Jadwal Schedule	Realisasi Realization
23	Pembaharuan <i>Board Manual</i> Board Manual Update	Agustus August	Rapat pembaharuan <i>board manual</i> dilakukan pada bulan Januari 2023 Board Manual update meeting in January 2023
24	Pengadaan Penilai GCG Tahun 2023 Procurement of GCG Assessor in 2023	November	Dilaksanakan sesuai jadwal Carried out as scheduled
25	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2022 Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommendations by BPKP in 2022	Semesteran Every six months	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP tahun 2022 dilaksanakan sesuai jadwal Monitoring the follow-up of the implementation of AOI GCG recommendations by BPKP in 2022 is conducted as scheduled
26	Peningkatan kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris Competency improvement of the Secretary of the Board of Commissioners and staff of the Secretary of the Board of Commissioners	Sesuai jadwal As scheduled	Sepanjang tahun 2023, pelatihan dan seminar yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris di dalam negeri dihadiri secara virtual In 2023, the Secretary of the Board of Commissioners attended domestic training virtually

Komite Audit Audit Committee

Tujuan Dewan Komisaris membentuk Komite Audit adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, terutama untuk memastikan bahwa Perseroan telah dikelola secara efektif dan efisien oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai maksud dan tujuan pendirian Perseroan sehingga dapat diperoleh hasil dan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lain Perseroan.

The purpose of the Board of Commissioners in establishing the Audit Committee is to support the supervisory function by the Board of Commissioners, particularly to ensure that the Company has been managed effectively and efficiently by the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association, as well as the intended purpose and objectives of the Company's establishment, thereby achieving sustainable results and benefits for Shareholders and other stakeholders of the Company.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit Appointment and Dismissal of the Audit Committee

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Komite Audit telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam piagam Komite Audit yaitu:

- Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
- Mampu berkomunikasi secara efektif.

The appointment and dismissal of the Audit Committee members are conducted by the Board of Commissioners. The appointment of Audit Committee members complies with the criteria specified in the Audit Committee charter, as follows:

- Possess good integrity, competency, and sufficient work experience in the field of supervision/audit;
- Able to communicate effectively;



3. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa attestasi, jasa non-attestasi dan/atau jasa konsultansi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.
5. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
7. Tidak mempunyai kepentingan dan ubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Audit.

3. Audit Committee members from outside the Company are prohibited from having blood-related and marital relationships up to the third degree, both in direct and collateral lines, with members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors;
4. Not an employee of Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, or other parties providing attestation services, non-attestation services, and/or other consulting services to the Company within the last 6 months;
5. Not an individual who has worked for the Company and has the authority and responsibility to plan, lead, or control and supervise the Company's activities within the last 6 months;
6. Does not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities;
7. Does not have any other interests or relationships that could affect their ability to act independently as a member of the Audit Committee.

Masa Jabatan Komite Audit

Audit Committee Term of Office

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

The Board of Commissioners members who also serve as members of the Audit Committee have a term of office not exceeding their tenure as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.

Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Audit yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Meanwhile, the term of office for members of the Audit Committee who do not hold positions as members of the Board of Commissioners is set for a maximum of 3 (three) years and may be extended for one additional term, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate their membership at any time.

Susunan Keanggotaan Komite Audit 2023

Composition of Audit Committee in 2023

Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan anggota Komite Audit. Berikut Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2023:

During 2023, there were no changes in the membership of the Audit Committee. Below is the composition of the Audit Committee as of 31 December 2023:

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Position in the Audit Committee	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment	Masa Jabatan Length of Service	Periode Jabatan Term of Office
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Audit Chairman of Audit Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 Board of Commissioners Decree No. KEP-03/KOM/PII/04/2020 dated 28 April 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term of office as a member of the Board of Commissioners	ke-2 2 nd



Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Position in the Audit Committee	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment	Masa Jabatan Length of Service	Periode Jabatan Term of Office
Marsiyati	-	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP- 05/KOM/PII/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 Board of Commissioners Decree No. KEP-05/KOM/PII/06/2020 dated 17 June 2020	17 Juni 2020 – 16 Juni 2023 17 June 2020 – 16 June 2023	Ke-1 1 st
			Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP- 04/KOM/PII/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 Board of Commissioners Decree No. KEP-04/KOM/PII/05/2023 dated 19 May 2023	17 Juni 2023 – 16 Juni 2026 17 June 2023 – 16 June 2026	ke-2 2 nd
Ferry Irawan	Pihak Independen Independent Party	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KOM/PII/09/2022 tanggal 1 Oktober 2022 Board of Commissioners Decree No. KEP-06/KOM/PII/09/2022 dated 1 October 2022	1 Oktober 2022– 30 September 2025 1 October 2022– 30 September 2025	Ke-1 1 st

Susunan anggota Komite Audit telah sesuai dengan yang diatur dalam PMK No.88/PMK.06/2015 pasal 45 yaitu, berasal dari anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan pihak independen sebagai Anggota dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai ketua yang dijabat oleh Sdri. Mariatul Aini;
- 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi yaitu Sdr. Ferry Irawan sebagai anggota; dan
- 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang usaha Perseroan yaitu Sdri. Marsiyati sebagai anggota.

The Audit Committee's composition adheres to Article 45 of PMK No. 88/PMK.06/2015, with the Chairman being a member of the Board of Commissioners and independent individuals serving as Members, with the following details:

- 1 (one) Commissioner as the Chairman, held by Mrs. Mariatul Aini;
- 1 (one) independent party with expertise in finance or accounting, Mr. Ferry Irawan, as a member; and
- 1 (one) individual with expertise in the Company's business sector, Mrs. Marsiyati, as a member.

Profil Komite Audit 2023

Profile of the Audit Committee 2023



Mariatul Aini

Ketua Komite Audit/Komisaris
Chairman of the Audit Committee/Commissioner

Profil Sdr. Mariatul Aini sebagai Ketua Komite Audit disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.

The profile of Mrs. Mariatul Aini as the Chairman of the Audit Committee is presented in the Board of Commissioners' profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Marsiyati

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia	Depok, West Java, Indonesia
Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2023	47 years old as of 31 December 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Bogor, 24 Juni 1976	Bogor, 24 June 1976
Periode Jabatan Term of Office	- 17 Juni 2020 – 16 Juni 2023, Periode ke-1 - 17 Juni 2023 – 16 Juni 2026, Periode ke-2	- 17 June 2020 to 16 June 2023, 1st Period - 17 June 2023 to 16 June 2026, 2nd Period
Riwayat Pendidikan Education	Magister (S2) bidang Administrasi Publik dari Institut STIAM I (2010)	Master degree in Public Administration from STIAM I Institute (2010)
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki pengalaman luas di bidang pengawasan dan pembinaan <i>Special Mission Vehicle</i> di bawah Kementerian Keuangan (2015 – saat ini), bidang analisis investasi Pemerintah (2015 – saat ini), bidang penerapan <i>risk management</i> (2019 – saat ini) serta manajemen kinerja (2019 – saat ini).	She has extensive experience in supervision and guidance in Special Mission Vehicles under the Ministry of Finance (2015 – present), in the field government investment analysis (2015 – present), in the field of risk management implementation (2019 – present), as well as performance management (2019 – present).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Kepala Seksi pada Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.	Section Head at the Directorate of State Assets, Ministry of Finance.



Ferry Irawan

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat, Indonesia	Depok, West Java, Indonesia
Usia Age	48 tahun per 31 Desember 2023	48 years old as of 31 December 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Depok, 2 Februari 1975	Depok, 2 February 1975
Periode Jabatan Term of Office	1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025, Periode ke-1	1 October 2022 to 30 September 2025, 1 st Period
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan (2000), Magister (S2) (2004) dan Doktor (S3) (2006) bidang Ekonomi Moneter, keduanya diraih dari Universitas Indonesia.	Bachelor in Economics majoring in Financial Management (2000), Master (2004), and Doctorate (2006) in Monetary Economics, both achieved from the University of Indonesia.



Riwayat Jabatan Career History	Pernah bertugas di Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (2006–2011) dan juga pernah bertugas pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (2011–2017). Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pengajar di Program Pascasarjana/Program <i>Magister</i> Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2007–sekarang).	Previously served at the Fiscal Risk Management Center, Fiscal Policy Agency (2006–2011) and also served at the Center for Macroeconomic Policy, Fiscal Policy Agency (2011–2017). Additionally, He has been serving as a lecturer at the Postgraduate Program/Master Program in Public Policy Planning, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2007–present).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Deputy for Coordination of Macroeconomic and Financial Affairs, Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit

Statement of Independence of the Audit Committee Members

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Audit Committee have met all independence criteria and are capable of carrying out their duties independently, upholding the interests of the Company and cannot be influenced by any party.

Aspek Independensi Independence Aspect	Mariatul Aini	Marsiyati	Ferry Irawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Not having financial relationships with the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Not having ownership of shares in the company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Not having family relationships with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or fellow Audit Committee members	√	√	√

√ : Independen Independent
x: Tidak Independen Not Independent

Pedoman Kerja Komite Audit

Audit Committee Guidelines

Komite Audit melaksanakan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Audit yang disusun mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

The Audit Committee carries out its duties based on the Audit Committee Charter, which is prepared in accordance with Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, and Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs) under the Supervision of the Ministry of Finance.



Ruang lingkup Piagam Komite Audit antara lain mengatur terkait:

1. Latar belakang dan dasar pembentukan;
2. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan kode etik;
3. Pola hubungan kerja;
4. Struktur dan persyaratan keanggotaan;
5. Masa jabatan;
6. Program kerja tahunan;
7. Rapat;
8. Penanganan pengaduan dan pelaporan;
9. Program pengenalan anggota baru dan evaluasi kinerja; dan
10. Penganggaran dan pembiayaan.

The scope of the Audit Committee Charter includes regulations regarding:

1. Background and basis of establishment;
2. Duties, responsibilities, authorities, and code of conduct;
3. Working relationship patterns;
4. Membership structure and requirements;
5. Term of office;
6. Annual work program;
7. Meetings;
8. Handling of complaints and reporting;
9. Induction program for newly appointed members and performance evaluation; and
10. Budgeting and financing.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite Audit diberikan kewenangan yang sejalan dengan lingkup tugas, kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, terutama terkait kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

To support the effectiveness of its tasks, the Audit Committee is granted authority that aligns with the scope of duties, obligations, and responsibilities of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association, especially concerning activities that require the attention of the Board of Commissioners.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit dimuat dalam Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*), yaitu adalah:

The provisions regarding the tasks and responsibilities of the Audit Committee are contained in the Audit Committee Charter, which includes:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya.
3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
5. Memastikan telah terdapat prosedur pengkajian (*review*) yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

1. Ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditor tasks.
2. Providing recommendations regarding the improvement of the Company's management control system and its implementation.
3. Assessing the implementation of activities and the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and external auditors.
4. Providing recommendations regarding the improvement of management control systems and their implementation.
5. Ensuring that satisfactory review procedures are in place for all information issued by the Company.
6. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.



Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit

Division of Duties and Responsibilities within the Audit Committee Membership

Dalam rangka memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta terhadap penerapan rekomendasi tindak lanjut atas hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses untuk dalam penyajian pelaporan keuangan yang andal.

Sehubungan dengan hal itu, Komite Audit memberikan pendapat dan saran/masukan profesional kepada Dewan Komisaris melalui sejumlah kegiatan berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas piagam auditor internal.
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi atas rencana audit tahunan, pelaksanaan dan pelaporan hasil audit internal, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
4. Menyusun kerangka acuan kerja (*term of reference*) bagi pengadaan auditor eksternal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dengan standar audit yang berlaku, menilai kinerja dan kualitas hasil audit, dan mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku.
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan, standar, dan pedoman akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas proses penyusunan laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta rencana jangka panjang Perseroan dengan melakukan penelaahan dan evaluasi atas laporan keuangan interim dan tahunan serta laporan manajemen periodik.
10. Melakukan penelaahan atas informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pihak lain dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan.

In order to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditor tasks, the Audit Committee monitors and evaluates the planning and implementation of audits as well as the implementation of follow-up recommendations based on audit results to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of processes for reliable financial reporting.

In this regard, the Audit Committee provides opinions and professional advice to the Board of Commissioners through a number of activities related to but not limited to:

1. Evaluating policies and implementation of internal control systems.
2. Reviewing and evaluating the internal auditor Charter.
3. Reviewing and evaluating the annual audit plan, implementation, and reporting of internal audit results, as well as the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on internal auditor findings.
4. Drafting terms of reference for the appointment of external auditors and providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external auditors to be presented to the General Meeting of Shareholders.
5. Monitoring and evaluating the suitability of the implementation of external auditor audits with applicable audit standards, assessing the performance and quality of audit results, and proposing termination of employment relationships with external auditors to the Board of Commissioners if there is strong evidence that the external auditor's independence is compromised or it is proven that the external auditor did not conduct audits in accordance with applicable audit standards.
6. Monitoring the implementation of follow-up actions on findings and recommendations from external auditors conducted by the Board of Directors.
7. Reviewing and evaluating the suitability of policies, standards, and accounting guidelines used with generally accepted accounting principles.
8. Monitoring and evaluating the process of preparing financial statements to ensure that the financial statements prepared by management fairly present the financial condition and results of the Company's operations in accordance with applicable financial accounting standards.
9. Monitoring and evaluating the preparation and implementation of the Company's work plans and budgets as well as the Company's long-term plans by reviewing and evaluating interim and annual financial statements and periodic management reports.
10. Reviewing information issued by the Company to other parties and the Company's compliance with regulations.



11. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
12. Melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
13. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaan kerja tim investigasi pelaporan pelanggaran, atas pengaduan yang berkaitan dengan terlapor anggota Direksi, anggota atau organ Dewan Komisaris.
14. Menyusun pedoman kerja Komite Audit yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris.
15. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
16. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

11. Ensuring satisfactory review procedures are in place for all information issued by the Company.
12. Reviewing and examining complaints related to reported Director members, members, or organs of the Board of Commissioners.
13. Supervising and directing the work of the investigation team on reporting violations, regarding complaints related to reported Director members, members, or organs of the Board of Commissioners.
14. Drafting Audit Committee work guidelines as a reference in carrying out its duties and responsibilities and submitting them to the Board of Commissioners for approval through a decision of the Board of Commissioners.
15. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.
16. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Program Pelatihan/Peningkatan Kompetensi Training/Competency Development Program

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Audit untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Audit agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan

The Company provides opportunities for Audit Committee members to participate in competency development programs to broaden their insights and knowledge, supporting the implementation of their duties to ensure they remain relevant to the latest developments in the Company's business activities.

Kegiatan peningkatan pelatihan/kompetensi yang diikuti anggota Komite Audit sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The training/competency development activities attended by Audit Committee members throughout 2023 are as follows:

Nama Name	Topik Pelatihan Topic of Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Training Period
Mariatul Aini	<i>Managing Legal Risk</i>	CRMS	19 Desember 2023 19 December 2023
Marsiyati	<i>The IIA's International Conference Amsterdam & Paris On-Site Learning</i>	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII) Professional Internal Auditors in Indonesia (PAII)	8-16 Juli 2023 8-16 July 2023

Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting

Sejalan dengan Kebijakan rapat yang diatur dalam Piagam Komite Audit, penyelenggaraan rapat Komite Audit memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit ketua dan seorang anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh anggota Komite Audit yang hadir.

In line with the meeting policy outlined in the Audit Committee Charter, the conduct of Audit Committee meetings is regulated by the following provisions:

1. The Audit Committee conducts meetings at least once a month or in accordance with the minimum meeting requirements set forth in the Company's Articles of Association.
2. Audit Committee meeting can only be conducted if attended by at least the chairman and one member.
3. Decisions made during Audit Committee meetings are considered valid if approved by more than half of the attending Audit Committee members.



4. Setiap anggota Komite Audit bebas menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapa pun.
5. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada), dan keputusan rapat.
7. Risalah rapat tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

4. Each Audit Committee member is free to express their professional opinions on each agenda item without any intervention.
5. Decisions made during Audit Committee meetings are based on deliberation for consensus.
6. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting which includes the time and place of the meeting, the agenda of the meeting, the attended participants, the topics discussed, differences of opinion (if any), and the decisions of the meeting.
7. The minutes of the meeting were signed by all members of the Audit Committee who attend the meeting and submitted in written by the Audit Committee to the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2023

Frequency of the Audit Committee Meetings in 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 9 kali rapat.

Throughout 2023, the Company's Audit Committee conducted 9 meetings.

Tingkat Kehadiran Komite Audit Dalam Rapat Komite Audit

Attendance Rate of the Audit Committee in Audit Committee Meetings

Nama Name	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting		
	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Mariatul Aini	9	9	100%
Marsiyati	9	9	100%
Ferry Irawan	9	9	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Komite Audit Average Attendance Rate of the Audit Committee			100%

Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2023

Realization of the Audit Committee Work Program in 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Audit, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2023, the Company's Audit Committee has carried out various activities as part of its planned work program, with the following details:

No.	Uraian Kegiatan Activity Description	Jadwal Pelaksanaan Implementation Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
Aspek Perencanaan Planning Aspect			
1	Penyusunan RKA KA Tahun 2024 Preparation for the RKA KA for 2024	Juli-Agustus July-August	30 Agustus 2023 30 August 2023
2	Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2023 Material preparation for Board of Commissioners RKA for 2023	Juli-Agustus July-August	30 Agustus 2023 30 August 2023
3	Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2024 Proposal preparation for the Board of Commissioners Performance Contract for 2024	Agustus - September August-September	6 November 2023 6 November 2023



No.	Uraian Kegiatan Activity Description	Jadwal Pelaksanaan Implementation Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
4	Penelaahan atas usulan RKAP dan atau RJPP PT PII Tahun 2024 Review of the proposed RKAP and/or RJPP for IIGF for 2024	September – Oktober September–October	Rapat Organ BOC: 7 Oktober 2023 Rapat BOC: 11 Oktober 2023 Rapat BOC–BOD: 13 & 26 Oktober 2023 Board of Commissioners Organ Meeting: 7 October 2023 Board of Commissioners Meeting: 11 October 2023 Board of Commissioners – Board of Directors Meeting: 13 & 26 October 2023
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP dan atau RJPP Tahun 2024 Material preparation for the Board of Commissioners response to the GMS on the RKAP and/or RJPP drafts for 2024	Oktober October	17 November & 18 Desember 2023 17 November & December 18 2023
6	Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal Review of the Annual Internal Audit Work Plan (PKAT)	Desember December	15 Januari 2024 15 January 2024
Aspek Pengawasan Supervision Aspect			
7	Reviu atas laporan hasil Audit Internal Review of the results of Internal Audit reports	Triwulanan Quarterly	30 Januari 2023, 27 April 2023, 25 Agustus 2023, 3 November 2023 30 January 2023, 27 April 2023, 25 August 2023, 3 November 2023
8	Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal Monitoring the follow-up actions on recommendations from internal and external audits	Triwulanan Quarterly	21 Januari 2023, 17 April 2023, 22 Juli 2023 & 25 Oktober 2023 21 January 2023, 17 April 2023, 22 July 2023 & 25 October 2023
9	Penyiapan usulan bahan rapat bulanan Dewan Komisaris Preparation of materials for monthly meetings of the Board of Commissioners	Bulanan Monthly	Dilaksanakan tiap bulan sebelum Rapat BOC Every month before the Board of Commissioners Meeting
10	Penelaahan atas pengaduan terkait perusahaan Review of complaints related to the Company	Sesuai disposisi Dewan Komisaris As instructed by the Board of Commissioners	Tidak terdapat pengaduan selama tahun 2023 No complaints received throughout 2023
11	Penelaahan atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya Review of accounting policies and financial reporting, and their implementation	Februari February	23 November 2023 23 November 2023
12	Penelaahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Review of internal control system policies and implementation	Februari February	21 Januari 2023, 17 April 2023, 22 Juli 2023 & 25 Oktober 2023 21 January 2023, 17 April 2023, 22 July 2023 & 25 October 2023
13	Evaluasi atas kegiatan CSR Evaluation of CSR activities	Juni June	10–12 Februari 2023 & 19 Agustus 2023 10–12 February 2023 & 19 August 2023
14	Penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya Review of procurement policies and their implementation	Agustus August	18 September 2023 18 September 2023
15	Penelaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per- UU–an dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga Review of the Board of Directors compliance with laws and agreements with Third Parties	November November	18 September 2023 18 September 2023
16	Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute Monitoring activities of the IIGF Institute	Mei & Desember May & December	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Conducted concurrently with the BOC–BOD Meeting
17	Penelaahan atas gejala penurunan kinerja Review of performance decline indicators	Sesuai disposisi Dewan Komisaris As instructed by the Board of Commissioners	Dilaksanakan tiap bulan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris Conducted monthly in conjunction with the BOC Meeting
18	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP Evaluation of RKAP implementation	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi IA & divisi terkait Conducted quarterly together with the Internal Audit Division and related divisions
19	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Review of transactions or actions within the authority of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai disposisi Dewan Komisaris As instructed by the Board of Commissioners	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris Conducted concurrently with the BOC Meeting
20	Monitoring atas proyek yang telah dijamin Monitoring of guaranteed projects	Sesuai disposisi Dewan Komisaris As instructed by the Board of Commissioners	11 Februari, 27 Maret, 20 September, & 16 Desember 2023 11 February, 27 March, 20 September, & 16 December 2023



No.	Uraian Kegiatan Activity Description	Jadwal Pelaksanaan Implementation Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
21	Penelaahan atas Laporan Bulanan Manajemen ke Dewan Komisaris/ Pemantauan kinerja Direksi Review of Monthly Management Reports to the Board of Commissioners/Performance Monitoring of the Board of Directors	Bulanan Monthly	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Conducted concurrently with the BOC-BOD Meeting
22	Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan ke RUPS Review of Quarterly Management Reports to the GMS	Triwulanan Quarterly	17 Februari 2023, 3 Mei 2023, 3 Juli 2023, 9 Agustus, 31 Oktober 2023 17 February 2023, 3 May 2023, 3 July 2023, 9 August, 31 October 2023
23	Penelaahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 Review of the Company's Annual Report for 2022	April	18 April 2023 18 April 2023
Aspek Penerapan GCG GCG Implementation Aspect			
24	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2021 Monitoring the implementation progress of GCG recommendations from BPKP in 2021	Januari January	Rapat Organ Dewan Komisaris: 14 Januari 2023 Rapat BOC: 26 Januari 2023 Rapat BOC-BOD: 31 Januari & 28 Februari 2023 Board of Commissioners Organ Meeting: 14 January 2023 BOC Meeting: 26 January 2023 BOC-BOD Meeting: 31 January & 28 February 2023
25	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP Implementation of the GCG application assessment for 2022 by BPKP	Januari January	12 Januari s.d. 28 Februari 2023 12 January to 28 February 2023
26	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2022 Monitoring the follow-up actions on AOI GCG recommendations from BPKP in 2022	Juni & Desember June & December	Rapat Organ Dewan Komisaris: 14 Januari, 9 Maret & 19 Agustus 2023 Rapat BOC: 24 Agustus 2023 Board of Commissioners Organ Meeting: 14 January, 9 March & 19 August 2023 BOC Meeting: 24 August 2023
Aspek Audit atas Laporan Keuangan Financial Report Auditing Aspect			
27	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Tahun 2023 kepada RUPS Monitoring the progress of the Financial Statements audit implementation for 2022 by the Public Accountant Firm (PAF)	Januari-Februari January-February	Rapat BOC-BOD: 28 Februari 2023 Rapat Komite Audit: 9 Maret 2023 Board of Commissioners - Board of Directors Meeting: 28 February 2023 Audit Committee Meeting: 9 March 2023
28	Penelaahan rencana audit LK Tahun 2023 oleh KAP Review of the audit results for the 2022 Financial Statements from PAF	Februari February	24 Februari 2023 24 February 2023
29	Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan audit LK Tahun 2022 oleh KAP Monitoring of the progress of the implementation of the audit of financial statements in 2022 by PAF	April-Mei April-May	12 Juli 2023 12 July 2023
30	Penelaahan atas laporan hasil audit LK Tahun 2022 dari KAP Review of the audit report of the 2022 financial statements from PAF	June	8 November 2023 8 November 2023
31	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Tahun 2023 Review of the 2023 Financial Statement audit plan by PAF	Desember December	23 November 2023 23 November 2023
Aspek Lainnya Other Aspects			
32	Pembahasan draf <i>Annual Report</i> tahun 2022 Discussion of the draft Annual Report for 2022	Februari-Maret February-March	19 April 2023 19 April 2023
33	<i>Self Assessment</i> Kinerja Komite Audit Self-assessment of the Audit Committee's Performance	Desember December	16 Agustus 2023 & 25 Januari 2024 16 August 2023 & 25 January 2024
34	Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit Enhancement of Audit Committee members' competencies	Sesuai Jadwal As scheduled	Ketua Komite Audit: 19 Desember 2023 Chairman of the Audit Committee: 19 December 2023 Audit Committee Members: 8-16 July 2023



Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Hingga diterbitkannya Laporan Tahunan 2023 ini, PT PII belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/PII/04/2020 tanggal 28 April 2020 tentang pembagian tugas Dewan Komisaris.

As of the publication of this 2023 Annual Report, IIGF does not have a Nomination and Remuneration Committee. However, the Nomination and Remuneration function is carried out jointly by all members of the Board of Commissioners, in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-02/KOM/PII/04/2020 dated April 28, 2020, on the Segregation of Duties of the Board of Commissioners.

Komite Lainnya

Other Committees

Sebagai wujud kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.88/PMK.06/2015 pasal 28 tentang organ pendukung Dewan Komisaris, Perseroan membentuk Komite Lain yaitu Komite Pemantau Risiko yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko pada Perseroan tanggal 27 Januari 2018.

In compliance with the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 88/PMK.06/2015 article 28 concerning supporting organs of the Board of Commissioners, the Company has established other committees, namely the Risk Monitoring Committee, which was established based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-01/KOM/PII/01/2018 on the Establishment of the Risk Monitoring Committee of the Company dated 27 January 2018.

Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha Perseroan paling kurang dengan melakukan: a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi Manajemen Risiko.

The Risk Monitoring Committee is established to assist the Board of Commissioners. The Risk Monitoring Committee is tasked with conducting periodic assessments and providing recommendations on the Company's business risks, at least by conducting: a. evaluation of the compliance between risk management policies and their implementation; and b. monitoring and evaluating the performance of the Company's work units responsible for Risk Management.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Pemantau Risiko

Appointment and Dismissal of the Risk Monitoring Committee

Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam piagam Komite Pemantau Risiko yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pemantauan manajemen risiko.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan keuangan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

The appointment and dismissal of members of the Risk Monitoring Committee are carried out by the Board of Commissioners. The appointment of the Risk Monitoring Committee members has complied with the requirements stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter, including:

1. Have good integrity, competence, and sufficient work experience in the field of risk management monitoring.
2. Have sufficient knowledge to read and understand risk management implementation reports and financial reports.
3. Able to communicate effectively.
4. Provide sufficient time to carry out their duties.



5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
 6. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan manajemen risiko Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 8. Tidak mempunyai kepentingan dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
5. External members of the Risk Monitoring Committee are prohibited from having familial ties, including blood relations and consanguinity up to the third degree, both in the direct line and collateral line, with members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
 6. Not an employee of the Company and do not have the authority and responsibility to plan, lead, or control and supervise the Company's risk management activities in the last 6 (six) months.
 7. Do not have any direct or indirect business relationships related to the Company's business activities.
 8. Do not have any other interests and relationships that may affect their ability to act independently as members of the Risk Monitoring Committee.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Term of Office

Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan yang tidak lebih dari masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sementara itu, masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang tidak merangkap jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Board of Commissioners who concurrently serve as members of the Risk Monitoring Committee have a term of office not exceeding their term of appointment as members of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the term of office of Risk Monitoring Committee members who do not concurrently hold positions as members of the Board of Commissioners is determined for a maximum of 3 (three) years and may be extended for one subsequent period, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko 2023

Risk Monitoring Committee Membership 2023

Pada tahun 2023, terdapat pergantian Ketua Komite Pemantau Risiko dengan adanya pergantian Dewan Komisaris, sehingga Ketua Komite Pemantau Risiko saat ini dijabat oleh Sdr. Iqbal Islami menggantikan Sdr. Wahyu Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Komisaris.

In 2023, there was a change in the Chairman of the Risk Monitoring Committee following a transition in the Board of Commissioners. Consequently, the Chairman of the Risk Monitoring Committee is currently Mr. Iqbal Islami, replacing Mr. Wahyu Utomo who previously served as Chairman of the Risk Monitoring Committee and Commissioner.

Disamping itu pada tahun 2023 tepatnya pada 9 Februari terdapat pergantian anggota Komite Pemantau Risiko yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. Iqbal Islami menjadi Sdr. Belis Siswanto, sehingga susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

In addition, on 9 February 2023, there was a change in the membership of the Risk Monitoring Committee, with Mr. Iqbal Islami being replaced by Mr. Belis Siswanto. As a result, the composition of the Risk Monitoring Committee membership as of 31 December 2023, is as follows:



Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in Company	Jabatan Komite Pemantau Risiko Position in the Risk Monitoring Committee	Dasar Pengangkatan Decree of Appointment	Masa Jabatan Length of Service	Periode Jabatan Term of Office
Iqbal Islami	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko Chairman of Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/KOM/PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 Board of Commissioners Decree No. KEP-02/KOM/PII/02/2023 dated 9 February 2023	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following the term as Commissioner	Ke-1 1 st
Ahmad Ghufron	-	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KOM/PII/009/2022 tanggal 1 Oktober 2022 Board of Commissioners Decree No. KEP-05/KOM/PII/009/2022 dated 1 October 2022	1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025 1 October 2022 to 30 September 2025	Ke-1 1 st
Belis Siswanto	-	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of the Risk Monitoring Committee	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/KOM/PII/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 Board of Commissioners Decree No. KEP-03/KOM/PII/02/2023 dated 9 February 2023	9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2026 9 February 2023 to 8 February 2026	Ke-1 1 st

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan yang diatur dalam PMK No.88/PMK.06/2015 pasal 46 yaitu, berasal dari Anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan Pihak Independen di luar Perseroan sebagai anggota, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai ketua yaitu yang dijabat oleh Sdr. Iqbal Islami;
- 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko yaitu Sdr. Ahmad Ghufron sebagai anggota; dan
- 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan yaitu Sdr. Belis Siswanto sebagai anggota.

The composition of the Risk Monitoring Committee members is in accordance with the provisions of PMK No.88/PMK.06/2015 article 46, originating from Board of Commissioners as Chairman and Independent Parties outside the Company as members, with details as follows:

- 1 (one) Commissioner as chairman, held by Mr. Iqbal Islami;
- 1 (one) person with expertise in risk management, Mr. Ahmad Ghufron as a member; and
- 1 (one) person with expertise in finance, Mr. Belis Siswanto as a member.

Profil Komite Pemantau Risiko 2023

Profile of the Risk Monitoring Committee 2023



Iqbal Islami

Ketua Komite Pemantau Risiko/Komisaris
Chairman of the Risk Monitoring Committee/Commissioner

Profil Sdr. Iqbal Islami sebagai Ketua Pemantau Risiko disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.

Mr. Iqbal Islami's profile as the Risk Monitoring Chairman is presented in the Board Commissioner profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.



Ahmad Ghufon

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia	East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Usia Age	52 tahun per 31 Desember 2023	52 years old as of 31 December 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Pekalongan, 15 April 1971	Pekalongan, 15 April 1971
Periode Jabatan Term of Office	Periode ke-1 dengan Masa Jabatan 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2025	1 st Period, with Term of Office from 1 October 2022 to 30 September 2025
Riwayat Pendidikan Education	Magister (S2) bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2009). Selain itu memiliki sertifikasi profesi, yaitu <i>Certified Enterprise Risk Governance (CERG)</i> , <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> , <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> , dan <i>Certified Strategy Execution Professional (CSEP)</i>	Master of Accounting from the University of Indonesia (2009). Besides, He holds professional certifications, such as <i>Certified Enterprise Risk Governance (CERG)</i> , <i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i> , <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> , and <i>Certified Strategy Execution Professional (CSEP)</i>
Riwayat Jabatan Career History	Beliau memiliki pengalaman di bidang manajemen risiko, audit internal, pengendalian internal, tata kelola, manajemen kinerja, pengadaan barang dan jasa, transformasi organisasi, serta komite pengawasan. Selain itu, sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT PII, beliau juga pernah menduduki berbagai jabatan di Inspektorat Jenderal Menteri Keuangan, yaitu menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan (2016–2021), Kepala Bagian Organisasi dan Kinerja (2015–2016)	He possesses experience in risk management, internal audit, internal control, governance, performance management, procurement of goods and services, organizational transformation, and oversight committees. Additionally, prior to his tenure as a Member of the Risk Monitoring Committee at IIGF, He held several positions at the Inspectorate General of the Ministry of Finance as the Section Head of Organization and Analysis of Supervisory Results (2016–2021) and as the Section Head of the Organization and Performance (2015–2016).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Inspektur VII, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan	Inspector VII, Inspectorate General, Ministry of Finance



Belis Siswanto

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Tangerang Selatan, Banten, Indonesia	South Tangerang, Banten, Indonesia
Usia Age	53 tahun per 31 Desember 2023	53 years old as of 31 December 2023



Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Kediri, 15 Juni 1970	Kediri, 15 June 1970
Periode Jabatan Term of Office	Periode ke-1 dengan masa jabatan 9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2026	1 st Period, with Term of Office from 9 February 2023 to 8 February 2026
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1996), Magister (S2) Ilmu Administrasi, Manajemen Ekonomi Publik dari Universitas Indonesia (2003) Master of Commerce in Economics dari KEIO University (2005)	Bachelor of Economics majoring in Accounting from Brawijaya University (1996), Master in Public Administration, Public Economic Management from the University of Indonesia (2003), Master of Commerce in Economics from KEIO University (2005)
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2019–2022	He has served as Head of the Regional Office of the Directorate General of Taxation of Nusa Tenggara at the Directorate General of Taxation from 1997 to 2022
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Inspektur I, Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan	Inspector I, Inspectorate General, Ministry of Finance

Pernyataan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Statement of Independence of Risk Monitoring Committee Members

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perusahaan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

All members of the Risk Monitoring Committee have met all independence criteria and are able to carry out their duties independently, upholding the Company's interests and not influenced by any party.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Table of Risk Monitoring Committee Independence in 2023

Aspek Independensi Independence Aspect	Iqbal Islami	Ahmad Ghufro	Belis Siswanto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relationship with the board of commissioners and directors	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan No share ownership relationship in the Company	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko No family relationship with the board of commissioners, directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee	√	√	√

√ : Independen Independent
x: Tidak Independen Not Independent

Piagam Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 2018 dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Perseroan dan sampai dengan tahun 2022 Piagam Komite Pemantau Risiko sudah diperbaharui menjadi edisi ketiga.

The Risk Monitoring Committee was first established on March 15, 2021, and it follows the Risk Monitoring Committee Charter in the performance of its duties and responsibilities referring to the Decree of the Board of Commissioners No. KEP-03/PII/KOM/03/2018 on the Company's Risk Monitoring Committee Charter, and until 2022, the Charter of the Risk Monitoring Committee has been renewed for the 3rd edition.



Pokok pokok yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain adalah terkait

1. Latar belakang dan dasar pembentukan;
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
3. Struktur dan persyaratan keanggotaan,
4. Rapat;
5. Pola kerja;
6. Pelaporan;
7. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

The main points regulated in the of the Risk Monitoring Committee Charter include:

1. Background and basis of establishment;
2. Duties, responsibilities, and authorities;
3. Structure and membership requirements;
4. Meetings;
5. Work patterns;
6. Reporting;
7. Membership tenure of the Risk Monitoring Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities

Komite Pemantau Risiko mengemban tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perseroan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian intern Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
2. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
3. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.
4. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen risiko Perseroan.
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam Perseroan.
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perseroan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

The Risk Monitoring Committee carries out tasks and responsibilities to:

1. Understand the Company's risk management, including various risks faced by the Company, strategies, systems, and the Company's risk management policies, internal controls of the Company, including policies, methodologies, and infrastructure.
2. Evaluate various risk measurement models used by the Company and provide further improvement recommendations.
3. Monitor the compliance of various policies and implementations of the Company's risk management.
4. Monitor various potential risks faced by the Company.
5. Evaluate various risk management policies of the Company.
6. Coordinate the implementation and supervision of the existence and effectiveness level of each component of Enterprise Risk Management (ERM) within the Company.
7. Measure the effectiveness of each component of ERM implemented in the Company.
8. Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners based on statutory regulations.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Division of Duties and Responsibilities within the Risk Monitoring Committee Membership

Pedoman Komite Pemantau Risiko Edisi Ketiga mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, yaitu untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama terkait pemantauan dan penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Perseroan dalam kaitannya dengan penerapan manajemen risiko, serta memberikan pendapat profesional dan rekomendasi yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

The 3rd Edition Guidelines of the Risk Monitoring Committee regulate the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee, which is to assist the Board of Commissioners in carrying out duties and functions, particularly related to monitoring and assessing the implementation of good corporate governance within the Company concerning the application of risk management, as well as providing professional opinions and recommendations related to but not limited to:



1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko.
3. Melakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh Perseroan.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan.
5. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko.
6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

1. Evaluate the suitability between risk management policies and their implementation.
2. Monitor and evaluate the performance of Company units responsible for risk management.
3. Review and evaluate reports on the implementation of risk management made by the Company.
4. Monitor the adequacy of processes for identifying, measuring, monitoring, controlling, and risk management information systems conducted by the Company.
5. Evaluate the Company's compliance with applicable laws and regulations related to risk management.
6. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Program Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Training and/or Competency Development Program

Perseroan memberikan kesempatan anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program peningkatan kompetensi guna meningkatkan wawasan dan pengetahuannya yang menunjang pelaksanaan tugas anggota Komite Pemantau Risiko agar senantiasa relevan dengan perkembangan terkini dari aktivitas bisnis Perseroan.

The Company provides opportunities for members of the Risk Monitoring Committee to participate in competency enhancement programs to improve their insights and knowledge that support the execution of the Risk Monitoring Committee's duties to remain relevant to the latest developments in the Company's business activities.

Kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Competency enhancement activities attended by members of the Risk Monitoring Committee throughout 2023 are as follows:

Nama Name	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time of Implementation
Iqbal Islami	<i>Leadership Program Corporate Governance: Essentials for a New Business Era</i>	The Wharton School of the University of Pennsylvania	17 - 22 September 2023 17 - 22 September 2023
Ahmad Ghufroon	<i>The IIA's International Conference Amsterdam & Paris On-Site Learning</i>	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII) Indonesian Institute of Internal Auditors (IIA)	8 - 16 Juli 2023 8 - 16 July 2023
Belis Siswanto	<i>The IIA's International Conference Amsterdam & Paris On-Site Learning</i>	Lembaga Profesi Auditor Internal Indonesia (PAII) Indonesian Institute of Internal Auditors (IIA)	8 - 16 Juli 2023 8 - 16 July 2023

Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meeting

Kebijakan rapat Komite Pemantau Risiko mengacu kepada Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko wajib menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

The policy of the Risk Monitoring Committee meeting refers to the Risk Monitoring Committee Charter, where the Risk Monitoring Committee is required to hold meetings regularly at least once a month.



Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings in 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 51 kali rapat yang terdiri dari rapat komite sebanyak 9 kali, rapat dengan organ Dewan Komisaris sebanyak 12 kali, rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 13 kali, dan rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 17 kali.

Throughout 2023, the Company's Risk Monitoring Committee held a total of 51 meetings, consisting of 9 committee meetings, 12 meetings with the Board of Commissioners, 13 meetings with the Board of Directors, and 17 meetings with both the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko

Attendance Rate of the Risk Monitoring Committee in Risk Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meetings		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Iqbal Islami	9	9	100%
Ahmad Ghufroon	9	9	100%
Belis Siswanto	9	9	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko Average Attendance Rate of the Risk Monitoring Committee			100%

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Realization of the Risk Monitoring Committee Work Program in 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Pemantau Risiko Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya yang telah direncanakan dalam program Kerja Komite Pemantau Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2023, the Company's Risk Monitoring Committee has conducted various activities as part of its duties and responsibilities planned in the Risk Monitoring Committee Work Program, with the following details:

No.	Uraian Kegiatan Activity Description	Jadwal Pelaksanaan Implementation Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
Aspek Perencanaan Planning Aspect			
1.	Penyusunan RKA KPR Tahun 2024 Preparation of the 2024 RKA KPR	Juli – Agustus July – August	30 Agustus 2023 30 August 2023
2.	Penyiapan Bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2024 Preparation of RKA Materials for the Board of Commissioners in 2024	Agustus August	30 Agustus 2023 30 August 2023
3.	Penyiapan Bahan Usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2024 Preparation of Proposal Materials for the 2024 Board of Commissioners Performance Contracts	Agustus – September August– September	6 November 2023 6 November 2023
4.	Penelaahan atas Usulan RKAP dan/atau RJPP PT PII Tahun 2024 Proposal Review of the 2024 RKAP and/ or RJPP IIGF	September – Oktober September – October	Rapat Organ Dewan Komisaris: 7 Oktober 2023 Rapat BOC: 11 Oktober 2023 Rapat BOC-BOD: 13 & 26 Oktober 2023 BOC Organ Meeting: 7 October 2023 Board of Commissioners Meeting: 11 October 2023 Board of Commissioners–Board of Directors Meeting: 13 & 26 October 2023



No.	Uraian Kegiatan Activity Description	Jadwal Pelaksanaan Implementation Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
5.	Penyiapan Bahan Tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas Rancangan RKAP dan/atau RJPP Tahun 2024 Preparation of Materials for the Board of Commissioners' Response to the Shareholders Meeting on the 2024 RKAP and/or RJPP Drafts	Oktober October	17 November & 18 Desember 2023 17 November & 18 December 2023
Aspek Pengawasan Supervision Aspect			
6	Penelaahan atas Laporan Manajemen Risiko Review of Risk Management Reports	Januari dan Juli January and July	18 Januari & 22 Juli 2023 18 January & 22 July 2023
7	Pengawasan/Pemberian Nasihat atas Kebijakan TI dan Pelaksanaannya Supervision/Advisory on IT Policy and Implementation	Maret March	22 Mei, 19 Agustus, 24 Agustus & 25 Agustus 2023 22 May, 19 August, 24 August & 25 August 2023
8	Penelaahan Kebijakan dan Peraturan-Peraturan yang Terkait dengan Kegiatan Usaha Perusahaan dengan Fokus pada Aspek Manajemen Risiko Review of Policies and Regulations Related to Company Business Activities with a Focus on Risk Management Aspects	Mei May	22 Mei, 24 Juni, 19 Agustus, 24 Agustus, 18 September, 20 September, 25 September, 4 Oktober & 22 November 2023 22 May, 24 June, 19 August, 24 August, 18 September, 20 September, 25 September, 4 October & 22 November 2023
9	Monitoring atas Kegiatan IIGF Institute Monitoring of IIGF Institute Activities	Mei dan Desember May and December	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat BOC-BOD Conducted concurrently with Board of Commissioners-Board of Directors Meetings
10	Evaluasi atas Kegiatan CSR Evaluation of CSR Activities	Juni dan Desember June and December	11 Februari 2023 11 February 2023
11	Evaluasi atas Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko yang Disusun dan Dilaksanakan oleh Perusahaan Evaluation of Company's Risk Management Policies and Strategies Developed and Implemented by the Company	Juli July	22 Juli 2023 22 July 2023
12	Pengawasan terhadap Implementasi Penjaminan Korporasi PEN dan Skema Penjaminan BUMN Supervision of Implementation of PEN Corporate Guarantee and State-Owned Enterprise Guarantee Schemes	Juli July	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat BOC-BOD Conducted concurrently with Board of Commissioners-Board of Directors Meetings
13	Penelaahan Rencana Kerja Divisi Risk Management Tahun 2024 Review of Risk Management Division Work Plan 2024	Desember December	25 Januari 2024 25 January 2024
14	Pelaksanaan Rapat Bulanan KPR Implementation of Monthly Risk Monitoring Committee Meetings	Bulanan Monthly	Dilaksanakan setiap bulan, baik KPR sendiri maupun bersama dengan divisi terkait Held every month, both by the committee itself and together with relevant divisions
15	Me-review Laporan Manajemen Bulanan dengan Fokus pada Aspek Manajemen Risiko Review of Monthly Management Reports with a Focus on Risk Management Aspects	Bulanan Monthly	Dilaksanakan tiap bulan bersamaan dengan Rapat BOC Held every month concurrently with Board of Commissioners Meetings



No.	Uraian Kegiatan Activity Description	Jadwal Pelaksanaan Implementation Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
16	Rapat dengan Divisi-Divisi Terkait Aspek Risiko dari Masing-Masing Divisi Meeting with Risk Aspect Related Divisions of Each Division Meeting with Relevant Divisions	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan Divisi RM & Rapat BOC-BOD Held concurrently with RM Division Discussion & Board of Commissioners-Board of Directors Meetings
17	Pembahasan dengan Divisi Risk Management Discussion with Risk Management Division	Triwulanan Quarterly	18 Januari, 14 April, 22 Juli, 25 Oktober 2023 & 25 Januari 2024 18 January, 14 April, 22 July, 25 October 2023 & 25 January 2024
18	Monitoring dan Evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya Monitoring and Evaluation of Risk Management Policies and Implementation	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi RM Conducted quarterly together with RM Division
19	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan RKAP untuk Aspek Pengelolaan Risiko Evaluation of RKAP Implementation for Risk Management Aspect	Triwulanan Quarterly	Dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan Divisi RM & divisi terkait Conducted quarterly together with RM Division & relevant divisions
20	Monitoring atas Proyek yang Telah Dijamin Guaranteed Projects Monitoring	Sesuai Jadwal Divisi Project Monitoring According to Project Monitoring Division Schedule	11 Februari, 27 Maret, 20 September, & 16 Desember 2023 11 February, 27 March, 20 September, & 16 December 2023
21	Pembahasan Gejala Penurunan Kinerja Discussion of Performance Decline Signs	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As Directed by Board of Commissioners	Dilaksanakan tiap bulan bersamaan dengan Rapat BOC Conducted monthly concurrently with Board of Commissioners Meetings
22	Penelaahan Aspek Risiko atas Pemberian Tanggapan (<i>Response</i>) kepada Direksi/RUPS Review of Risk Aspects on Responses to Directors/GMS	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As Directed by Board of Commissioners	Dilaksanakan di setiap penyusunan naskah tanggapan Dewan Komisaris kepada Direksi/RUPS Conducted in every preparation of response draft from the Board of Commissioners to the Directors/GMS
23	Pembahasan terkait Transaksi atau Tindakan dalam Lingkup Kewenangan Dewan Komisaris/RUPS Discussion of Transactions or Actions within the Authority Scope of the Board of Commissioners/GMS	Sesuai Disposisi Dewan Komisaris As Directed by Board of Commissioners	Dilaksanakan bersamaan dengan Rapat BOC Conducted concurrently with Board of Commissioners Meetings
Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
24.	Penyusunan Laporan Triwulanan Komite Pemantau Risiko Preparation of Quarterly Risk Monitoring Committee Reports	Triwulanan Quarterly	Disusun dan disampaikan tiap triwulan, yaitu pada: Triwulan I: Memo-03/PII/DK-KPR/0423 tanggal 28 April 2023 Triwulan II: Memo-04/PII/DK-KPR/0723 tanggal 31 Juli 2023 Triwulan III: Memo-05/PII/DK-KPR/1023 tanggal 31 Oktober 2023 Triwulan IV: Memo-01/PII/DK-KPR/0124 tanggal 22 Januari 2024 Prepared and submitted every quarter, as follows: Quarter I: Memo-03/PII/DK-PR/0423 dated 28 April 2023 Quarter II: Memo-04/PII/DK-KPR/0723 dated 31 July 2023 Quarter III: Memo-05/PII/DK-PR/1023 dated 31 October 2023 Quarter IV: Memo-01/PII/DK-KPR/0124 dated 22 January 2024
Aspek Penerapan GCG Application of GCG Aspect			
25.	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG Rekomendasi BPKP Tahun 2021 Monitoring of Follow-Up Actions on Implementation of AOI GCG Recommendations by BPKP in 2021	Januari January	Rapat Organ Dewan Komisaris: 14 Januari 2023 Rapat BOC: 26 Januari 2023 Rapat BOC-BOD: 31 Januari & 28 Februari 2023 Board of Commissioners Organ Meeting: 14 January 2023 BOC Meeting: 26 January 2023 Board of Commissioners-Board of Directors Meeting: 31 January & 28 February 2023



No.	Uraian Kegiatan Activity Description	Jadwal Pelaksanaan Implementation Schedule	Realisasi Kegiatan Realization
26.	Pelaksanaan Penilaian Penerapan GCG Tahun 2022 oleh BPKP Implementation of GCG Application Assessment in 2022 by BPKP	Januari January	12 Januari – 28 Februari 2023 12 January to 28 February 2023
27.	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaksanaan AOI GCG Rekomendasi BPKP Tahun 2022 Monitoring of Follow-Up Actions on Implementation of AOI GCG Recommendations by BPKP in 2022	Juni dan November June and November	Rapat Organ Dewan Komisaris: 14 Januari, 9 Maret & 19 Agustus 2023 Rapat BOC: 24 Agustus 2023 Board of Commissioners Organ Meeting: 14 January, 9 March & 19 August 2023 Board of Commissioners Meeting: 24 August 2023
Aspek Lainnya Other Aspects			
28.	Pembahasan Draf Annual Report Tahun 2022 Discussion of the 2022 Annual Report Draft	Februari – Maret February– March	19 April 2023 19 April 2023
29.	Self Assessment Kinerja Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Performance Self-Assessment	Desember December	16 Agustus 2023 & 25 Januari 2024 16 August 2023 & 25 January 2024
30.	Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko Enhancement of Risk Monitoring Committee Member Competencies	Sesuai Jadwal As Scheduled	Ketua Komite Pemantau Risiko: 17 s.d. 22 September 2023 Anggota Komite Pemantau Risiko: 9 s.d. 15 Juli 2023 Risk Monitoring Committee Chair: 17 to 22 September 2023 Risk Monitoring Committee Members: 9 to 15 July 2023

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat Perseroan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Perseroan membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan dengan tugas utama untuk menjaga citra positif Perseroan dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara Perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan juga memastikan kepatuhan Perseroan dalam memenuhi aspek keterbukaan.

The Corporate Secretary is a Company's official who is specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary, and is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism. The Company established the Corporate Secretary with the main function of maintaining the Company's positive image by establishing good communication and relationships between the Company, shareholders, and other stakeholders. The Corporate Secretary also ensures the Company complies with the transparency aspect.

Pejabat Sekretaris Perusahaan dan Dasar Pengangkatan Corporate Secretary Officer and Basis of Appointment

Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Corporate Secretary & Communication yang dipimpin oleh pejabat setingkat Executive Vice President. Saat ini Divisi Corporate Secretary & Communication dijabat oleh Sdr. Yunan Novaris Arifdianto berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-025/DIR/HC/0821 tanggal 6 September 2021.

The Corporate Secretary function is led by Mr. Yunan Novaris Arifdianto as an Executive Vice President of Corporate Secretary & Communication Division appointed based on the Decree of the Board of Directors No SK-025/DIR/HC/0821 dated 6 September 2021.



Yunan Novaris Arifidianto

Sekretaris Perusahaan dan Komunikasi
Corporate Secretary and Communication

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Domisili Domicile	Jatikarya Bekasi, Indonesia	Jatikarya Bekasi, Indonesia
Usia Age	51 tahun per 31 Desember 2023	51 years old as of 31 December 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Yogyakarta, 23 Januari 1972	Yogyakarta, 23 January 1972
Periode Jabatan Term of Office	Menjabat sejak: 6 September 2021	Served in the office since 6 September 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1997), <i>Magister (S2) Master of Business Administration</i> dari Institut Teknologi Bandung (2023)	Bachelor of Law from Gadjah Mada University (1997), Master of Business Administration from Institut Teknologi Bandung (2023)
Riwayat Jabatan Career History	Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2013. Sebelumnya, beliau merupakan SVP Guidance and Consultation serta pernah menjabat sebagai SVP Project Legal Service, SVP Project Monitoring and Claim serta SVP Corporate Legal Service. Beliau juga berkarier di beberapa perusahaan di antaranya menjabat sebagai Senior Legal Counsel PT Pertamina (Persero) (2010–2013), Legal Manager and Corporate Secretary PT Infokom Elektrindo member of PT Media Nusantara Citra Tbk (2006–2009), Business Development PT Flash Mobile/Infokom Subsidiary Company (2006–2009), Legal Manager PT Elektrindo Nusantara (2002–2006).	Joined the Company in 2013. Previously, he was SVP of Guidance and Consultation, and has served as SVP of Project Legal Service, SVP of Project Monitoring and Claims, and SVP of Corporate Legal Service. He also served in several companies, including Senior Legal Counsel of PT Pertamina (Persero) (2010–2013), Legal Manager and Corporate Secretary of PT Infokom Elektrindo, member of PT Media Nusantara Citra Tbk (2006–2009), Business Development of PT Flash Mobile/Infokom Subsidiary Company (2006–2009), Legal Manager of PT Elektrindo Nusantara (2002–2006).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan	Has no concurrent positions internally or externally

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah didasarkan pada Kualifikasi Sekretaris Perusahaan yang mencakup:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu mendukung kinerja/tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pengalaman yang diperlukan berkaitan dengan usaha Perseroan;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai di bidang hukum, keuangan, tata kelola perusahaan, manajerial, komunikasi dan keterampilan interpersonal yang baik; dan
4. Berdomisili di Indonesia.

The appointment of the Corporate Secretary is based on the Qualifications of the Corporate Secretary, which include:

1. Is capable of taking legal action;
2. Has an educational background that shall support the performance/duties and responsibilities, and has the necessary experience related to the Company's business;
3. Has adequate knowledge and understanding in the fields of law, finance, corporate governance, managerial, and communication, with good interpersonal skills; and
4. Is domiciled in Indonesia.

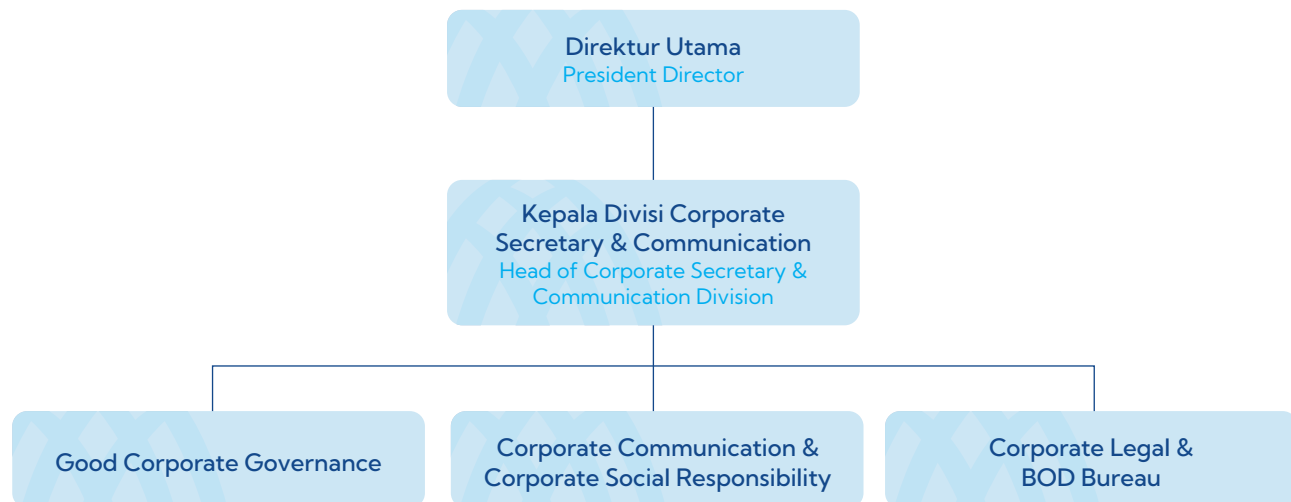


Kedudukan dan Keberadaan Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary's Position and Existence

Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi Perseroan berada langsung di bawah Direktur Utama dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

In the Company's organizational structure, the Corporate Secretary is directly under the President Director, with the following Organizational Structure:



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tasks and Responsibilities of the Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan dalam menjembatani komunikasi antara organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan *stakeholders*, hubungan kelembagaan serta kepatuhan terhadap hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

The Corporate Secretary is responsible for coordinating communication between the Company's organs, interactions with stakeholders, institutional relationships, and ensuring compliance with laws and good corporate governance.

Berikut tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan:

1. Mengelola kegiatan kesekretariatan Perseroan termasuk mengelola dokumen Perseroan;
2. Pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penguatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan;
3. Penghubung antar Organ Perseroan;
4. Memastikan pelaksanaan pembinaan hubungan dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah dan non pemerintah, institusi lain, pemegang saham serta *stakeholders* lainnya;
5. Mengawasi kegiatan *corporate branding* di dalam maupun luar lingkungan kerja Perseroan;
6. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* Perseroan;
7. Pemberian saran hukum kepada Perseroan, termasuk (i) pelaksanaan penyusunan, perumusan, dan penyelesaian peraturan, perjanjian dan kerja sama Perseroan; (ii) inventarisasi dokumentasi hukum; (iii) konsultasi dan bantuan hukum untuk kepentingan Perseroan dan karyawan di dalam maupun di luar pengadilan;

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary:

1. Managing the Company's secretarial activities including the Company's documents;
2. Organizing activities, monitoring, and strengthening the Good Corporate Governance principles within the Company;
3. Liaison between the Company's Organs;
4. Ensuring the establishment of relationships with external parties, including government and non-government agencies, other institutions, shareholders, and other stakeholders;
5. Supervising corporate branding activities inside and outside the Company's working environment;
6. Coordinating the implementation of the Corporate Social Responsibility activities;
7. Providing legal advice to the Company, including (i) preparation, formulation, and completion of regulations, agreements, and cooperation of the Company; (ii) inventory of legal documentation; (iii) consultation and legal assistance for the interest of the Company and employees in and out of court;



8. Memimpin proses kajian peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap bisnis Perseroan; 9. Memastikan asesmen dan mitigasi risiko telah dilakukan pada Divisi Corporate Secretary & Communication; 10. Menyusun dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Divisi Corporate Secretary & Communication; dan 11. Peningkatan kompetensi SDM Divisi Corporate Secretary and Communication.	8. Leading the review process of laws and regulations that affect the Company's business; 9. Ensuring risk assessment and mitigation has been conducted by the Corporate Secretary & Communication Division; 10. Preparing and supervising the work program and budget of the Corporate Secretary & Communication Division; and 11. Enhancing the competence of the Corporate Secretary and Communication Division's human resources.

Program Pengembangan Kompetensi Competence Development Program

Perseroan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Informasi mengenai kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti pejabat Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Company provides opportunities for the Corporate Secretary to participate in various competency development that can support the implementation of the Corporate Secretary function. Information regarding training and competency improvement attended by Corporate Secretary officials in 2023 is as follows:

No.	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Time
1	<i>Leading Innovation Culture: Fostering Innovation Culture</i>	Corporate Innovation Asia (CIAS)	30 January 2023 30 Januari 2023
2	<i>Competency Based Interview – Batch 1</i>	Divisi Human Capital and Organizational Development Human Capital and Organizational Development Division	3 Maret 2023 3 March 2023
3	<i>Webinar Sharing Session SMAP ISO 37001:2016 "Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai Bagian Penegakan Integritas dan Pencegahan Suap"</i> SMAP ISO 37001:2016 Webinar Sharing Session "Implementation of an Anti-Bribery Management System (SMAP) as Part of Integrity Enforcement and Bribery Prevention"	Divisi Risk Management Risk Management Division	15 Maret 2023 15 March 2023
4	Forum GRC dalam rangka Hakordia 2023 GRC Forum for 2023 World Anti-Corruption Day	Divisi Internal Audit, Risk Management dan Corporate Secretary and Communication Internal Audit, Risk Management, and Corporate Secretary and Communication	4 Desember 2023 4 December 2023

Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Job Description of the Corporate Secretary

Pada tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Berikut rincian kegiatan Sekretaris Perusahaan pada periode tersebut:

In 2023, the Corporate Secretary has carried out several activities that are part of the duties, responsibilities, and functions of the Corporate Secretary. The following are details of the Corporate Secretary's activities during the period:



Aktivitas/Kegiatan Activity	Keterangan Description
Pengelolaan Dokumen Perseroan Document Governance Company	Kegiatan pengelolaan dokumen Perseroan yang dilakukan di tahun 2023 termasuk dokumen hukum, daftar khusus, dan dokumen korespondensi Perseroan The Company's document management activities conducted in 2023 include legal documents, special lists, and correspondence documents of the Company.
Penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Holding the Board of Directors and Board of Commissioners Meetings and General Meeting of Shareholders (GMS)	Rincian kegiatan penyelenggaraan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS di tahun 2023 adalah sebagai berikut: - Rapat Direksi sebanyak 65 kali - Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 17 kali - RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 19 Mei 2023 - RUPS RKAP Tahun 2024 pada Tanggal 20 Desember 2023 Details of the activities of holding the Board of Directors and Board of Commissioners Meetings as well as the GMS in 2023 are as follows: - 65 Board of Directors' meetings - 17 Joint Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors - GMS of the 2022 Fiscal Year Annual Report on 19 May 2023 - GMS of the 2024 RKAP on 20 December 2023
Kewajiban Pelaporan Reporting Obligations	- Penyampaian Laporan Manajemen Bulanan kepada Dewan Komisaris. - Penyampaian Laporan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2023 kepada para Pemegang Saham. - Penyampaian Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2022 kepada Pemegang Saham dan menayangkan pada situs web Perseroan. - Submission of Monthly Management Report to the Board of Commissioners. - Submission of Good Corporate Governance Assessment Report for the 2023 Fiscal Year to Shareholders. - Submission of the 2022 Annual Report to Shareholders and posting it on the Company's website.
Koordinasi Kegiatan terkait penerapan GCG Coordination of GCG activities	Kegiatan terkait penerapan GCG yang dilakukan di tahun 2023 antara lain: - Penilaian atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2022 - Sosialisasi dan diseminasi atas program pengendalian gratifikasi - Sosialisasi Kebijakan Kode Etik - Pemutakhiran atas Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan Pelaporan Pelanggaran, dan Kebijakan Tata Kelola Dokumen - Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan - <i>Monitoring</i> dan evaluasi atas pemenuhan <i>area of improvement</i> atas hasil penilaian GCG tahun buku 2022 - Sosialisasi atas Kebijakan Tata Kelola Dokumen kepada seluruh karyawan - Penyelenggaraan kegiatan <i>Talkshow</i> Forum GRC - Membangun Budaya Organisasi/Perusahaan dalam mencegah Korupsi dan Penyuapan, dengan peserta Insan Perseroan serta perwakilan dari <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan In 2023, the activities related to the GCG include: - Assessment of the Good Corporate Governance for the 2022 Fiscal Year - Socialisation and dissemination of the gratification control program - Dissemination of the Code of Conduct - Update of Gratification Control Policy, Whistleblowing Policy, and Document Governance Policy - Socialisation of Gratification Control Policy and Whistleblowing Policy to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees - Monitoring and evaluation of the fulfillment of areas of improvement on the GCG assessment for the 2022 fiscal year - Socialization of the Document Governance Policy to all employees - Organizing a GRC Forum Talkshow - Establishing an Organisation/Company Culture to Prevent Corruption and Bribery, with participants from the Company and representatives from the Ministry of Finance's Special Mission Vehicles (SMVs).
Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pemberian saran hukum kepada Perseroan Ensuring compliance with law and advising legal issues to the Company	Kegiatan terkait pemenuhan pemberian saran hukum kepada Perseroan yang dilakukan di tahun 2023 antara lain: - Kajian/Analisa terhadap peraturan perundangan yang berpengaruh terhadap Perseroan; - Pendapat hukum terhadap kondisi/isu yang dihadapi Perseroan; - Penelaahan Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerahasiaan dan Surat Keputusan Direksi; dan - Pembuatan Akta dan pengurusan perizinan Perseroan. Activities related to the fulfillment of legal advice to the Company in 2023 include: - Review/Analysis of laws and regulations that affect the Company; - Legal opinion on conditions/issues faced by the Company; - Review of Cooperation Agreements, Memorandum of Understanding, Confidentiality Agreements, and the Board of Directors' Decrees; and - Deed drafting and Company's licenses.



Aktivitas/Kegiatan Activity	Keterangan Description
Program meningkatkan citra Perseroan (<i>image building</i>) dan hubungan dengan <i>stakeholder</i> Programs to enhance the Company's image (image building) and relationship with stakeholders	Telah dilaksanakan kegiatan terkait komunikasi Perseroan di sepanjang tahun 2023, yaitu di antaranya: - Publikasi informasi Perseroan melalui media massa dan media sosial; - Penguatan komunikasi dan relasi dengan media dan <i>stakeholders</i>; - Pengelolaan strategi komunikasi Perseroan; - Pelaksanaan kegiatan Perseroan yang melibatkan <i>stakeholders</i> guna memperkuat citra dan reputasi Perseroan; - Pelaksanaan <i>Stakeholder Survey</i>; dan - Pembaruan informasi pada <i>Website</i> Perseroan. Activities related to the Company's communication in 2023 included: - Publication of the Company's information via mass media and social media; - Strengthening communication and relations with the media and stakeholders; - Management of the Company's communication strategy; - The Company's activities involving stakeholders to strengthen the Company's image and reputation; - Stakeholder Survey; and - Information update on the Company's Website.
Koordinasi kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perseroan Coordinating the Corporate Social Responsibility activities	Divisi Corporate Secretary and Communication telah menyelenggarakan kegiatan CSR yang tepat sasaran sesuai agenda kegiatan CSR Perseroan untuk tahun 2023. The Corporate Secretary and Communication Division organized targeted CSR activities in accordance with the Company's CSR agenda in 2023.

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Evaluation of Duties Carried Out Corporate Secretary

Kebijakan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan tertuang dalam *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disepakati dan disahkan oleh manajemen Perseroan. Indikator pelaksanaan evaluasi tugas Sekretaris Perusahaan didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

The policy for evaluating the Corporate Secretary's duties is contained in the Key Performance Indicators (KPI) that have been agreed and authorized by the Company's management. Indicators for the evaluation of the Corporate Secretary's tasks are based on the Corporate Secretary's duties and responsibilities.

Realisasi pencapaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2023 mencapai sebesar 113% dari target yang ditetapkan sebelumnya 100%.

The realization of the Corporate Secretary's performance achievement in 2023 reached 113% of the previously set target of 100%.

Indikator KPI yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

The KPI indicators used to evaluate the performance of the Corporate Secretary include the following criteria:

1. Optimalisasi Sinergi BUMN/Lembaga Kementerian Keuangan;
2. Pencapaian tingkat pemahaman Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan *stakeholders* lainnya yang baik;
3. Peningkatan Citra dan Reputasi Perusahaan melalui program komunikasi konvensional maupun digital;
4. Pengelolaan Program CSR;
5. Optimalisasi Pelaksanaan Kepatuhan Hukum;
6. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan dan Protokol;
7. Pelaksanaan Tata Kelola yang baik;
8. Pengendalian Risiko Divisi; dan
9. Program *Engagement* dan Budaya Perusahaan.

1. Optimization of Synergies between SOEs/Institutions under the Ministry of Finance;
2. Achieving a good level of Government Contracting Agency (GCA) and other stakeholders' understanding;
3. Improved Company Image and Reputation via conventional and digital communication programs;
4. CSR Program Management;
5. Optimization of Legal Compliance;
6. Secretarial and Protocol Functions;
7. Good Corporate Governance Implementation;
8. Risk Control of Divisions; and
9. Corporate Engagement and Culture Program.



Unit Audit Internal Internal Audit Unit

Unit Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Divisi Audit Internal atau yang selanjutnya disebut Divisi Internal Audit. Perseroan membentuk Divisi Internal Audit dengan peran sebagai mitra strategis profesional, independen, obyektif, bertanggung jawab dan dapat menjadi penasihat yang terpercaya (*trusted advisor*) bagi Direksi dan jajaran Manajemen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan. Divisi Internal Audit meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan layanan asuransi dan konsultasi berbasis risiko yang dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan independen.

Pelaksanaan Audit Internal diharapkan dapat membantu Perseroan mendeteksi lebih dini permasalahan dan kelemahan di dalam unit kerja terutama bila terjadi penurunan atau penyimpangan terhadap kinerja dalam rangka mencapai sasaran Perseroan khususnya pelaksanaan RKAP tahun berjalan. Hasil penelaahan Audit Internal kemudian dirangkum dan dibuatkan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan jajaran manajemen (*early warning system*).

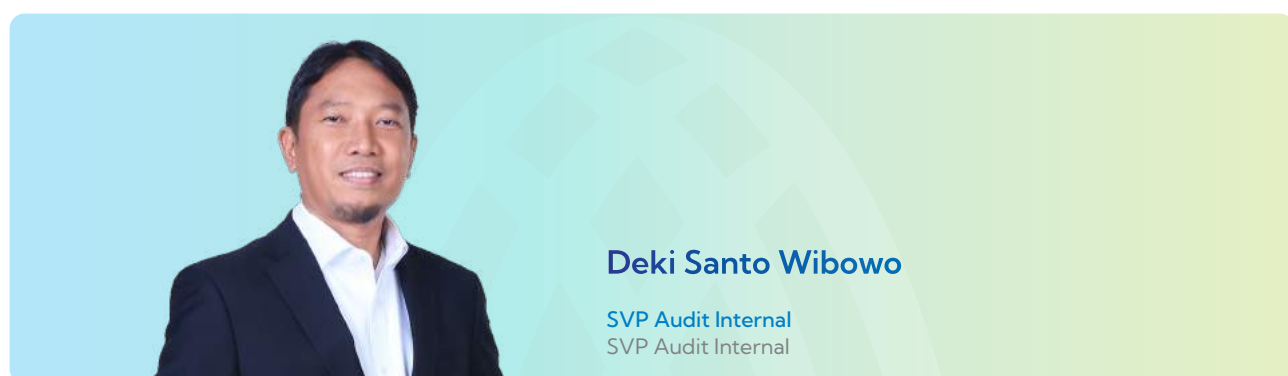
The Company's Internal Audit Unit is operated by the Internal Audit Division, hereafter referred to as the Internal Audit Division. The Internal Audit Division was established by the Company with the purpose to serve as a professional, independent, objective, and responsible strategic partner, capable of acting as a trusted advisor to the Board of Directors and Management in achieving the Company's vision, mission, and objectives. The Internal Audit Division enhances and protects the organization's value by delivering risk-based assurance and consulting services in a systematic, objective, and independent manner.

The implementation of Internal Audit aims to assist the Company in promptly identifying issues and vulnerabilities within the operational units, particularly in instances of declining or deviating performance, with the objective of attaining the Company's goals, notably the realization of the Work Plan and Budget (RKAP) for the current year. Subsequently, the findings from the Internal Audit assessment are summarized, and improvement recommendations are presented to the Board of Directors and management, serving as an early warning system.

Profil Pejabat Internal Audit dan Dasar Pengangkatan Profile of Internal Audit Officer and Decree of Appointment

Divisi Internal Audit dipimpin oleh SVP Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Perseroan telah menunjuk Deki Santo Wibowo untuk menjabat SVP Internal Audit sejak tanggal 5 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-004/DIR/HC/0220 dan Surat Dewan Komisaris SR-01/PII/ DK/0220.

The Internal Audit Division is led by the Senior Vice President (SVP) Internal Audit, who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Mr. Deki Santo Wibowo was appointed as SVP Internal Audit on March 5, 2020, in accordance with Board of Directors Decree SK-004/DIR/HC/0220 and Board of Commissioners Letter SR-01/PII/DK/0220.



Deki Santo Wibowo

SVP Audit Internal
SVP Audit Internal

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia	Indonesia
Usia Age	47 tahun per 31 Desember 2023	47 years as of 31 December 2023
Domisili Domicile	Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Central Jakarta, DKI Jakarta
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Jakarta, 7 Desember 1976	Jakarta, 7 December 1976
Periode Jabatan Term of Office	Menjabat sejak: 6 September 2021	Serving since: 6 September 2021
Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999)	Bachelor of Accounting from the Faculty of Economics, University of Indonesia (1999).



Sertifikasi Sertifikasi	- <i>Certified Internal Auditor (CIA)</i> dari <i>The Institute of Internal Auditors (IIA)</i> (2014) - <i>Certified Public Accountant (CPA)</i> dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011) - <i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i> dari <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> (2013) - <i>Certified Enterprise Risk Governance (CERG)</i> dari <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> (2017) - <i>Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – Foundation Certificate</i> dari Pearson Vue (2019) - <i>Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)</i> – dari <i>The Institute of Internal Auditors (IIA)</i> (2022) - <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE)</i> dari BPKP – GIA Corpu (2022)	- <i>Certified Internal Auditor (CIA)</i> from <i>The Institute of Internal Auditors (IIA)</i> (2014) - <i>Certified Public Accountant (CPA)</i> from the <i>Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI)</i> (2011) - <i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i> from the <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> (2013) - <i>Certified Enterprise Risk Governance (CERG)</i> from the <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> (2017) - <i>Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – Foundation Certificate</i> from Pearson Vue (2019) - <i>Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)</i> – from <i>The Institute of Internal Auditors (IIA)</i> (2022) - <i>Certified Internal Audit Executive (CIAE)</i> from BPKP – GIA Corpu (2022).
Riwayat Jabatan Career History	Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Organization Development (OD) di PT PII. Pengalaman di bidang audit dan keuangan termasuk sebagai Auditor Internal maupun Auditor Eksternal selama lebih dari 20 tahun. Karier sebagai Auditor Internal ditempuhnya selama 8 tahun sebagai ICS Compliance Head. Sebelum berkarir sebagai Auditor Internal, beliau berkarir di beberapa Kantor Akuntan Publik dan perusahaan terbuka selama kurang lebih 19 tahun	He previously held the position of Head of the Organization Development (OD) Division at IIGF. He has over 20 years of experience in audit and finance, serving as both an Internal Auditor and External Auditor. His career as an Internal Auditor lasted for 8 years as ICS Compliance Head. Before transitioning to Internal Audit, He worked in various Public Accounting Firms and public companies for approximately 19 years.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan	He does not hold concurrent positions within or outside the Company

Struktur Organisasi dan Kedudukan Internal Audit

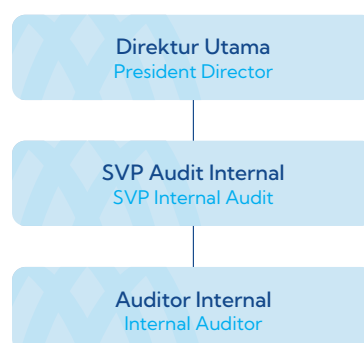
Organizational Structure and Position of Internal Audit

Divisi Internal Audit dipimpin oleh SVP Internal Audit yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Divisi Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

The Internal Audit Division is headed by the SVP Internal Audit, who directly reports to the President Director. Auditors within the Internal Audit Division directly report to the Head of Internal Audit Division.

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit

The Organizational Structure of the Internal Audit Division



Divisi Internal Audit dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan proses dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Perseroan serta memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan rencana, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi. Sebagai bagian pelaksanaan tugasnya, maka Divisi Internal Audit dapat melakukan pertemuan langsung dengan Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menyampaikan laporan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan hasil dan proses pengawasan.

The establishment of the Internal Audit Division aimed to oversee the implementation of processes and activities across all departments within the Company, providing suggestions for improvement aligned with plans, programs, and policies established by the Board of Directors. As part of its responsibilities, the Internal Audit Division may convene with the President Director, Board of Commissioners, and Audit Committee to present reports concerning various aspects of oversight outcomes and processes.



Piagam Internal Audit

Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Internal Audit Perseroan merujuk pada Piagam Internal Audit terbitan ketiga yang disahkan pada Desember 2019 oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Piagam tersebut disusun mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 88/PMK/06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pengawasan Menteri Keuangan.

Piagam Internal Audit tersebut antara lain mengatur tentang:

- Latar Belakang
- Tujuan
- Visi dan Misi Audit Internal
- Struktur, Persyaratan dan Independensi Auditor Internal
- Cakupan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Auditor Internal
- Perencanaan Penugasan Audit Internal
- Eksekusi Penugasan di Lapangan (*Fieldwork*)
- Pelaporan Hasil Penugasan Audit Internal
- Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal
- Penutup.

In performing their duties, the Internal Audit Division refers to the 3rd edition of the Internal Audit Charter which was approved in December 2019 by the Board of Directors and Board of Commissioners. The Charter was prepared in reference to the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 88/PMK/06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in Company Companies (Persero) under the Supervision of the Minister of Finance.

The Internal Audit Charter regulates the following matters:

- Background
- Objective
- Internal Audit Vision and Mission
- Internal Auditor Structure, Requirements and Independence
- Scope, Authority and Responsibility of Internal Auditors
- Internal Audit Assignment Planning
- Implementation of Assignments in the Fieldwork
- Reporting of Internal Audit Assignment Results
- Follow-up on Internal Audit Recommendations
- Closing.

SDM dan Sertifikasi Profesi

Human Resources and Professional Certification

Kualitas hasil pengawasan oleh Internal Audit ditentukan oleh kompetensi SDM-nya. Untuk itu, sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perkembangan industri. Berikut ini informasi sertifikasi profesi yang dimiliki personil Fungsi Internal Audit hingga akhir tahun 2023:

The quality of supervision results by Internal Audit is determined by the competence of its human resources. For this reason, professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, especially related to compliance with laws and regulations and industry developments. The following is information on professional certifications held by personnel of the Internal Audit Function until the end of 2023:

Jabatan Jabatan	Jumlah (orang) Total (Person)	Kualifikasi Qualification	
		Pendidikan Education	Sertifikasi Certification
SVP Internal Audit SVP Internal Audit	1	S1	Merujuk ke bagian Profil pejabat Internal Audit Refer to the Internal Audit Officer Profile section
VP Internal Audit VP Internal Audit	1	S2	- Kompetensi Praktisi Audit Internal Bersertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Yayasan Pendidikan Internal Audit (2023) - <i>Certificate of Competence in Governance, Risk Management & Compliance</i> dari LSP GRK (Governansi Manajemen dan Risiko Kepatuhan) (2023) - Competency of Certified Internal Audit Practitioner from the Professional Certification Institution of the Internal Audit Education Foundation (2023) - Certificate of Competence in Governance, Risk Management & Compliance from LSP GRK (Governance, Management, and Compliance Risk) (2023)
M Internal Audit M Internal Audit	1	S1	Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Lanjutan dari Dewan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (2022) Qualified Internal Auditor Advanced Level Certification from the Qualified Internal Auditor Certification Board Auditor (2022)
AM Internal Audit AM Internal Audit	1	S1	Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> dari Dewan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (2023) Qualified Internal Auditor Certification from the Qualified Internal Auditor Certification Board (2023)
Jumlah Total	4		



Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program

Perseroan memberikan kesempatan kepada personil Divisi Internal Audit untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan Divisi Internal Audit. Berikut kegiatan program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh SVP Audit Internal dan karyawan Divisi Internal Audit pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Company provides opportunities for personnel in the Internal Audit Division to participate in various competency development activities that can support the implementation of the Internal Audit Division. The following are the competency development program activities attended by the SVP Internal Audit and employees of the Internal Audit Division in 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
Deki Santo Wibowo	SVP	<i>Leading Innovation Culture : Fostering Innovation Culture</i>	Corporate Innovation Consulting (CIAS)
		Webinar <i>Sharing Session</i> SMAP ISO 37001:2016 "Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai Bagian Penegakan Integritas dan Pencegahan Suap"	Divisi Risk Management PT PII IIGF Division of Risk and Management
		Webinar <i>Sharing Session</i> SMAP ISO 37001:2016 "Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) as Part of Integrity Enforcement and Bribery Prevention"	
		<i>The IIA's 2023 International Conference</i>	Corporate Innovation Consulting (CIAS)
		<i>Amsterdam & Paris On-Site Learning</i>	Institute of Internal Auditors (IIA)
		<i>GRC Summit 2023 Master Class & Seminar</i>	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
		Workshop Pengembangan Dokumen Proses Bisnis Divisi Internal Audit (sistem pengendalian internal, <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP), dan audit kinerja) Workshop Development of Internal Audit Division Business Process Documents (internal control system, <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP), and performance audits)	Divisi Internal Audit PT PII & Insight Consulting IIGF Internal Audit Division & Insight Consulting
Oke Darmawireja	VP	Forum GRC 2023 : Membangun Budaya Perusahaan dan Mencegah Korupsi dan Penyuapan Forum GRC 2023: Building Company Culture and Preventing Corruption and Bribery	Divisi Internal Audit (IA), Corporate Secretary and Communication (CSC) dan Risk Management (RM) PT PII IIGF Internal Audit Division (IA), Corporate Secretary and Communication (CSC), and Risk and Management (RM)
		<i>Leading Innovation Culture : Fostering Innovation Culture</i>	Corporate Innovation Consulting (CIAS)
		<i>Training Investment Banking</i>	TAP Kapital Indonesia
		Workshop Finansial dan <i>Legal Merger</i> , Akuisisi, dan Valuasi Bisnis Workshop Financial and Legal Merger, Acquisition, and Business Valuation	Intrinsics
		Pelatihan dan Asesmen Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) Training and Assessment Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		<i>Financial Statement Fraud Risk Analysis & Prevention</i>	Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
		<i>Implementing GRC</i>	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)



Nama Name	Jabatan Position	Topik Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer
		Workshop Pengembangan Dokumen Proses Bisnis Divisi Internal Audit (sistem pengendalian internal, <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP), dan audit kinerja) Workshop Development of Internal Audit Division Business Process Documents (internal control system, Quality Assurance and Improvement Program (QAIP), and performance audits)	Divisi Internal Audit PT PII & Insight Consulting IIGF Internal Audit Division & Insight Consulting
Ken Auva Maulida	M	Webinar <i>Sharing Session</i> SMAP ISO 37001:2016 "Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai Bagian Penegakan Integritas dan Pencegahan Suap" Webinar <i>Sharing Session</i> SMAP ISO 37001:2016 "Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) as Part of Integrity Enforcement and Bribery Prevention"	Divisi Risk Management PT PII IIGF Risk and Management Division
		Workshop Pengembangan Dokumen Proses Bisnis Divisi Internal Audit (sistem pengendalian internal, <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP), dan audit kinerja) Workshop Development of Internal Audit Division Business Process Documents (internal control system, Quality Assurance and Improvement Program (QAIP), and performance audits)	Divisi Internal Audit PT PII & Insight Consulting IIGF Internal Audit Division & Insight Consulting
		Forum GRC 2023 : Membangun Budaya Perusahaan dan Mencegah Korupsi dan Penyuapan Forum GRC 2023: Building Company Culture and Preventing Corruption and Bribery	Divisi Internal Audit (IA), Corporate Secretary and Communication (CSC) dan Risk Management (RM) PT PII IIGF Division of Internal Audit (IA), Corporate Secretary and Communication (CSC), and Risk and Management (RM)
Faisal Dita Nurulloh	AM	Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) Tingkat Manajerial Qualified Internal Auditor (QIA) Managerial Level Certification	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Seminar Nasional Internal Audit 2023 (SNIA) National Internal Audit Seminar 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
		Webinar <i>Sharing Session</i> SMAP ISO 37001:2016 "Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai Bagian Penegakan Integritas dan Pencegahan Suap" Webinar <i>Sharing Session</i> SMAP ISO 37001:2016 "Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) as Part of Integrity Enforcement and Bribery Prevention"	Divisi Risk Management PT PII IIGF Risk and Management Division
		Tingkat Komponen Dalam Negeri Domestic Component Level	Mairodi Training
		Workshop Pengembangan Dokumen Proses Bisnis Divisi Internal Audit (sistem pengendalian internal, <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP), dan audit kinerja) Workshop Development of Internal Audit Division Business Process Documents (internal control system, Quality Assurance and Improvement Program (QAIP), and performance audits)	Divisi Internal Audit PT PII & Insight Consulting IIGF Internal Audit Division & Insight Consulting
		Forum GRC 2023 : Membangun Budaya Perusahaan dan Mencegah Korupsi dan Penyuapan Forum GRC 2023: Building Company Culture and Preventing Corruption and Bribery	Divisi Internal Audit (IA), Corporate Secretary and Communication (CSC) dan Risk Management (RM) PT PII IIGF Internal Audit Division (IA), Corporate Secretary and Communication (CSC), and Risk and Management (RM)



Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit Tahun 2023

Report on the Implementation of Internal Audit Duties and Responsibilities in 2023

Sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Internal Audit Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit atas Proses Penjaminan Pinjaman Proyek Non – KPBU
2. Audit atas Proses Penentuan Imbal Jasa Penjaminan Proyek KPBU
3. Audit atas Proses Pengembangan *Pipeline* dan Penyaringan Penjaminan
4. Audit atas Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
5. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Tingkat Entitas Tahun 2023
6. Rapat Audit Internal

Kebijakan rapat Divisi Internal Audit mengacu pada Piagam Internal Audit dan Pedoman Administrasi Internal Audit. Sejalan dengan kebijakan tersebut, frekuensi rapat Divisi Internal Audit sebagai berikut:

- Rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan tingkat frekuensi bulanan dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada kebijakan rapat Direksi dan Komisaris, Piagam Audit Internal serta Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Laporan Manajemen dan Rapat Kegiatan Audit Internal
- Rapat dengan Direktur Utama dengan tingkat frekuensi setiap selesai diselenggarakannya *exit meeting* penugasan audit internal dan sewaktu waktu jika diperlukan mengacu pada Piagam Audit Internal dan Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Pembahasan Laporan Penugasan Audit Internal
- Rapat dengan Komite Audit dengan tingkat frekuensi triwulanan dan sewaktu-waktu jika diperlukan mengacu pada Piagam Audit Internal dan Pedoman Administrasi Audit Internal yaitu Rapat Evaluasi Kegiatan Audit Internal

Selama tahun 2023, Divisi Internal Audit telah melakukan rapat sebanyak 118 kali yang terdiri dari rapat internal sebanyak 72 kali dan berpartisipasi sebagai peserta rapat ataupun menyampaikan presentasi dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

As part of their duties and responsibilities, the Company's Internal Audit Division has carried out several activities as follows:

1. Audit of Non-PPP Project Guarantee Processes
2. Audit of PPP Project Guarantee Fee Determination Processes
3. Audit of Pipeline Development and Guarantee Screening Processes
4. Audit of Anti-Bribery Management System (SMAP) Implementation
5. Evaluation of Entity Level Control Implementation for the Year 2023
6. Internal Audit Meetings

The internal audit division meeting policy refers to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines. In line with this policy, the frequency of internal audit division meetings is as follows:

- Meetings with the Board of Directors and Board of Commissioners with a monthly frequency and as needed, referring to the Board of Directors and Commissioners meeting policy, Internal Audit Charter, and Internal Audit Administration Guidelines, namely Management Report Meetings and Internal Audit Activity Meetings
- Meeting with the President Director with a frequency of every completion of internal audit assignment exit meetings and as needed, referring to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines, namely Internal Audit Assignment Report Discussion Meetings
- Meeting with the Audit Committee with a quarterly frequency and as needed, referring to the Internal Audit Charter and Internal Audit Administration Guidelines, namely Internal Audit Activity Evaluation Meetings

During 2023, the Internal Audit Division held meetings 118 times, consisting of 72 internal meetings and participating as meeting attendees or presenting at meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee with the following attendance frequencies:

Uraian Description	Rapat Direksi Board of Directors Meeting	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting
Frekuensi Rapat Meeting Frequency	20	17	9



7. Selain tugas di atas sepanjang tahun 2023 Divisi Internal Audit juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut:
- Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 - Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Tahun 2022 s.d. 2023 Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta
 - Pemeriksaan Terinci Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Proyek KPBU Tahun 2022 s.d. 2023 Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, daerah, dan luar negeri
 - Pemutakhiran Data Entitas Pemeriksaan Periode Tahun 2023
 - Pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 - Penilaian Indonesian *Corporate Accountability Index* (ICORPAX)
 - Evaluasi atas Optimalisasi Pemanfaatan KPBU
 - Asesmen Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 - Evaluasi Program Program Peningkatan Produk Dalam Negeri Triwulan IV tahun 2023
 - Pendampingan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
 - Pengumpulan Data dan Informasi terkait Pemberian Dukungan Pemerintah pada PT PII
 - Pendampingan dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan dan audit kepatuhan Perseroan tahun buku 2023, serta pendampingan dalam pelaksanaan penilaian atas capaian Indikator Kinerja Utama Korporasi, Direksi, dan Dewan Komisaris, oleh Kantor Akuntan Publik
 - Melaksanakan Penilaian Kapabilitas Divisi Internal Audit Periode 2023
 - Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal maupun eksternal
 - Melaksanakan pelaporan kegiatan audit dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit kepada Komite Audit per triwulan
 - Berperan aktif mendukung tim Sekretaris Perusahaan dalam meyakinkan kelancaran pelaksanaan evaluasi dan penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

7. In addition to the above tasks throughout 2023, the Internal Audit Division also participated in the following activities:
- Assistance to the Supreme Audit Agency (BPK)
 - Preliminary Performance Examination of Project Management Effectiveness Collaboration between Public Private Partnership (PPP) in 2022 to 2023 for Accelerating Infrastructure Development and Regional Development at the Ministry of Finance as Fiscal Manager, Ministry of National Development Planning/Bappenas, and Other Related Institutions in DKI Jakarta
 - Detailed Performance Examination of Project Management Effectiveness Collaboration between PPP in 2022 to 2023 for Accelerating Infrastructure Development and Regional Development at the Ministry of Finance as Fiscal Manager, Ministry of National Development Planning/Bappenas, and Other Related Institutions in DKI Jakarta, regions, and abroad
 - Updating Entity Examination Data for the 2023 Period
 - Assistance to the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)
 - Assessment of the Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX)
 - Evaluation of Optimization of PPP
 - Assessment of Good Corporate Governance (GCG) Implementation
 - Evaluation of Domestic Product Improvement Programs for the Fourth Quarter of 2023
 - Assistance to the Inspectorate General of the Ministry of Finance
 - Collection of Data and Information related to Government Support to IIGF
 - Assistance in conducting audits on the Financial Statement and compliance of the Company for the fiscal year of 2023, as well as assistance in conducting assessment on the Corporate, Board of Directors, and Board of Directors' Key Performance Indicator achievement by Public Accounting Firm.
 - Implementation of Internal Audit Division Capability Assessment for the 2023 Period
 - Implementation of follow-up monitoring activities on internal and external audit recommendations
 - Reporting audit activity and the follow-up monitoring of audit recommendations to the Audit Committee quarterly
 - Actively support the Corporate Secretary team in ensuring the smooth implementation of evaluation and assessment of Good Corporate Governance (GCG) by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)



i. Penyelenggaraan Webinar Forum GRC 2023: Membangun Budaya Perusahaan dan Mencegah Korupsi dan Penyuapan j. Penyelenggaraan Workshop Pengembangan Dokumen Proses Bisnis Divisi Internal Audit (sistem pengendalian internal, <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP), dan audit kinerja) k. Penyusunan rancangan Pedoman QAIP dan Audit Kinerja (berkoordinasi dengan BPKP) l. Pelaksanaan konsultansi untuk Divisi Procurement m. Menjadi narasumber kunjungan benchmark dari Satuan Pengawas Intern (SPI) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) ke PT PII terkait peningkatan kapabilitas Divisi Internal Audit n. Membantu Komite Audit dalam melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan auditor eksternal dan internal o. Melakukan pendampingan selaku koordinator audit atau penugasan lain yang dilakukan oleh auditor eksternal p. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan melakukan Audit Internal atas Implementasi SMAP.	i. Organizing the GRC Forum 2023 Webinar: Building Corporate Culture and Preventing Corruption and Bribery j. Organizing Workshop Development of Internal Audit Division Business Process Documents (internal control system, <i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP), and performance audits) k. Preparation of QAIP and Performance Audit Guideline drafts (coordinated with BPKP) l. Consultancy implementation for the Procurement Division m. Acting as a benchmarking visit resource person from the Internal Audit Unit (SPI) of PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) to IIGF regarding the improvement of Internal Audit Division capabilities n. Assisting the Audit Committee in monitoring and evaluating follow-up actions on external and internal auditor findings o. Providing assistance as the coordinator of audits or other assignments conducted by external auditors p. Active participation in the implementation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) by conducting Internal Audits on SMAP Implementation.

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Internal Audit

Performance Evaluation of Internal Audit Duties

Kebijakan evaluasi pelaksanaan tugas Internal Audit tertuang dalam *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah disepakati dan disahkan oleh manajemen Perseroan. Indikator pelaksanaan evaluasi tugas Internal Audit didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Internal Audit.

Realisasi pencapaian kinerja Internal Audit tahun 2023 mencapai sebesar 120,8% dari target yang ditetapkan sebelumnya 100%.

Indikator KPI yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Internal Audit mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penyelesaian penugasan audit internal selama tahun 2023
2. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas laporan audit
3. Pencegahan kerugian negara dan/atau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Eksternal Auditor (BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)
4. Implementasi *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) Divisi Internal Audit
5. Pencapaian hasil penilaian GCG yang memuaskan
6. Pemahaman atas penerapan pengendalian internal dalam proses bisnis Perusahaan

The Internal Audit task performance evaluation policy is outlined in the Key Performance Indicators (KPI) agreed upon and authorized by the Company's management. Internal Audit task performance evaluation indicators are based on Internal Audit duties and responsibilities.

The realization of Internal Audit performance achievement in 2023 reached 120.8% of the previously set target of 100%.

The KPI indicators used to evaluate Internal Audit performance include several criteria as follows:

1. Completion of internal audit assignments during 2023
2. Monitoring the completion of follow-up actions on audit reports
3. Prevention of state losses and/or completion of follow-up actions on recommendations of External Auditors (BPK/BPKP/Inspectorate General of the Ministry of Finance)
4. Implementation of *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP) by the Internal Audit Division
5. Achievement of satisfactory GCG assessment results
6. Understanding of internal control application in Company business processes



7. Pemutakhiran dokumen proses bisnis Divisi Internal Audit 8. Peran Divisi Internal Audit sebagai <i>Trusted Advisor</i> melalui pendampingan eksternal atau konsultasi internal 9. Pengendalian risiko Divisi Internal Audit 10. Implementasi program <i>engagement</i> dan internalisasi program budaya Perusahaan pada Divisi Internal Audit.	7. Updating Internal Audit Division business process documents 8. The role of the Internal Audit Division as a Trusted Advisor through external assistance or internal consultancy 9. Internal Audit Division risk control 10. Implementation of engagement programs and internalization of Company culture programs in the Internal Audit Division.

Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Divisi Internal Audit

Quality Guarantee Report on Capability Self-Assessment of Internal Audit Division

Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas tata kelola Perusahaan yang baik, Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas Divisi Internal Audit Perseroan, sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2023 Divisi Internal Audit menyelesaikan penilaian mandiri kapabilitas Divisi Internal Audit Periode 2023 mengacu pada Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas SPI Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil penilaian mandiri, kapabilitas Divisi Internal Audit PT PII Periode 2023 berada pada level 3 (*integrated*) dengan catatan. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan Divisi Internal Audit PT PII telah menunjukkan bahwa Praktik Profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, Divisi Internal Audit mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

In order to encourage the acceleration of good corporate governance quality improvement, the Board of Directors must maintain and evaluate the quality of the Company's Internal Audit Division. As a form of the Company's commitment to achieving this, in 2023, the Internal Audit Division completed the self-assessment of the 2023 Internal Audit Division Capability in accordance with the Corporate SPI Self-Assessment Technical Guidelines issued by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP). Based on the results of the self-assessment, the capability of IIGF Internal Audit Division for the 2023 Period is at level 3 (integrated) with notes. With these results, it can be concluded that the IIGF Internal Audit Division has demonstrated that Professional Practices and internal audit have been uniformly established and aligned with standards, the Internal Audit Division is able to assess the efficiency, effectiveness, and economic of a program/activity and able to provide consultation on governance, risk management, and internal control.



Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*) Internal Control System

Perseroan menerapkan 3 (tiga) aspek pengendalian internal, yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan. Kerangka kerja pengendalian internal yang berlaku di PT PII diatur dalam Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang mengadopsi COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control Integrated Framework* (2013). Selain itu Perseroan menerbitkan Kebijakan Pengelolaan Proses Bisnis Berbasis Pengendalian Internal untuk memberikan panduan agar pelaksanaan pengelolaan proses bisnis dapat dilakukan secara efisien, efektif, konsisten, terstandarisasi dan sistematis sesuai dengan sistem pengendalian internal yang terintegrasi (COSO *Internal Control - Integrated Framework* (2013)).

Sebagaimana diatur dalam COSO *Internal Control - Integrated Framework* (2013), pengendalian internal merupakan sebuah sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, serta karyawan dalam sebuah perusahaan, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO *Internal Control - Integrated Framework* (2013) terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian, yakni meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*); dan
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Penerapan sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2023 yang mengacu pada COSO *Internal Control - Integrated Framework* (2013) dijelaskan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Aspek Lingkungan Pengendalian merupakan suatu kondisi dalam perusahaan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian berdampak pada kesadaran akan pentingnya penerapan pengendalian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan serta menjaga lingkungan pengendalian yang mengarah pada terbentuknya perilaku positif dan kondusif untuk memfasilitasi penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat dalam lingkungan kerjanya. Upaya tersebut diwujudkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.

The Company implements three (3) internal control aspects, i.e., operational control, financial control, and compliance. The Company adopts COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)-*Internal Control-Integrated Framework* (2013) as the applicable internal control system. In addition, the Company issued an Internal Control-Based Business Process Management Policy to provide guidance so that the implementation of business process management shall be carried out efficiently, effectively, consistently, standardized, and systematically, in accordance with an integrated internal control system (COSO *Internal Control-Integrated Framework* (2013)).

As regulated in the COSO *Internal Control-Integrated Framework* (2013), internal control is a system or process carried out by the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and employees in a company, to provide reasonable assurance regarding the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with prevailing laws and regulations.

COSO *Internal Control-Integrated Framework* (2013) consists of five (5) control components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication; and
5. Monitoring.

The internal control system in 2023 is implemented with reference to the COSO *Internal Control-Integrated Framework* (2013), and described as follows:

1. Control Environment

The Control Environment aspect is a condition within the company that affects the effectiveness of internal control. The control environment has an impact on the awareness of the importance of implementing control by the people involved.

Management is responsible for creating and maintaining a control environment that leads to the establishment of positive and conducive behavior, to facilitate a sound internal control and management system in the working environment. These efforts are realized by:

- a. Upholding of integrity and ethical values.
- b. Commitment to competence.
- c. Conducive leadership.



- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Independensi Dewan Komisaris
- e. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- g. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- h. Perwujudan peran Internal Audit yang efektif.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Aspek Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian proses identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan. Penilaian risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perseroan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Proses penilaian risiko dimulai dengan menetapkan maksud dan tujuan Perseroan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar Perseroan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian yang diperlukan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa arahan pimpinan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi telah dilakukan selama proses penilaian risiko.

Kebijakan pengendalian dirumuskan untuk memberikan arah kegiatan yang seharusnya dikerjakan serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan prosedur. Prosedur dalam hal ini adalah rangkaian urutan tindakan, yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dengan menggunakan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kegiatan pengendalian diselenggarakan dengan memperhatikan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi Perseroan, dan setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Aktivitas pengendalian dilakukan pada seluruh kegiatan Perseroan
- b. Aktivitas pengendalian dikaitkan dengan proses penilaian risiko untuk mengendalikan tingkatan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko.
- c. Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis melalui persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh manajemen

- d. Independence of the Board of Commissioners
- e. Establishment of an organizational structure in accordance with the needs.
- f. Appropriate delegation of authorities and responsibilities.
- g. Formulation and implementation of sound policies on human resource development.
- h. Realization of an effective Internal Audit role

2. Risk Assessment

Risk assessment is a series of processes to identify and analyze risks that may potentially hinder the achievement of the Company's objectives. Risk assessment is carried out to determine the impact of identified risks on the achievement of the Company's goals and objectives, as a reference in developing the necessary control activities to minimize risks. The risk assessment process begins with establishing clear and consistent goals and objectives of the Company, identifying the risks efficiently and effectively that may hinder the achievement of these objectives, both internal and external, and finally, conducting an analysis to determine the impact of risks and the necessary controls.

3. Control Activities

Control activities are policies and procedures to assist in ensuring that the leadership's direction to minimize the identified risks has been carried out during the risk assessment process.

Control policies are formulated to provide direction for activities that should be conducted and serve as guidelines for the procedures' preparation. In this case, procedures are a series of sequences of actions, carried out by one or several people, using certain equipment and time in implementing certain activities. Control activities are organized by taking into account the size, complexity, and nature of the Company's duties and functions, and shall at least have the following characteristics:

- a. Control activities are carried out in all the Company's activities
- b. Control activities are linked to the risk assessment process to control the level of likelihood and impact of risk occurrence.
- c. Written policies and procedures are established via the approval of authorized officials in accordance with prevailing policies and regulations; and
- d. Procedures that have been established shall be implemented by management.



Selain itu, untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis yang ada, Perseroan melakukan evaluasi atas rangkaian kegiatan pengendalian yang diterapkan. Rangkaian kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Review atas kinerja Perseroan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik aset.
- e. Pemisahan fungsi.
- f. Pelaksanaan atau otorisasi atas kejadian dan transaksi
- g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- h. Pembatasan akses atas sumber daya yang dimiliki
- i. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan kumpulan data yang telah diolah dan digunakan untuk menjadi referensi bagi pengambilan keputusan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perseroan. Sementara itu, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dengan demikian, sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan yang terstruktur dan sistematis mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib menyampaikan laporan yang memiliki informasi yang relevan serta akurat dan andal baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut harus disimpan dan kemudian dikomunikasikan kepada pimpinan Perseroan dan jajaran terkait lainnya di seluruh perusahaan yang memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian atas kualitas sistem Pengendalian Internal Perseroan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan, serta melalui evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit dan revidu lainnya.

In addition, to ensure its relevance to existing business developments, the Company shall evaluate the series of implemented control activities. The control activities consist of a series of:

- a. Review of the Company's performance.
- b. Human resources development.
- c. Control of the information system management.
- d. Physical control of assets.
- e. Separation of functions.
- f. Implementation or authorization of events and transactions
- g. Accurate and timely recording of transactions and events
- h. Restrictions on access to owned resources
- i. Proper documentation of control events and transactions

4. Information and Communication

Information is data collection that has been processed and used as a reference for decision-making in implementing the Company's duties and functions. Meanwhile, communication is the process of delivering messages or information using certain symbols or signs either directly or indirectly to obtain feedback.

Thus, the information and communication system is a process of presenting structured and systematic reports on operational, financial, and compliance activities. The Company must submit reports that have relevant, accurate, and reliable information, both financial and non-financial, relating to internal and external events. Such information shall be stored and communicated to the Company's management and other relevant staff in the company, who may require the information in a form that enables them to carry out their internal control and operational responsibilities.

5. Monitoring

Monitoring is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control system within a certain period. Monitoring is conducted on an ongoing basis, as well as through separate evaluations, and follow-up recommendations on the results of audits and other reviews.



Pemantauan berkelanjutan terdiri dari kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, evaluasi terpisah berupa kegiatan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu yang mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah dapat diselenggarakan secara mandiri, *reviu*, dan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal serta mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

Continuous monitoring consists of regular management activities, supervision, comparison, reconciliation, and other actions related to the duties implementation. A separate evaluation is an assessment of the quality of internal control system performance with a certain scope and frequency that considers the results of risk assessment and the effectiveness of continuous monitoring procedures. Independent separate evaluations can be organized. Reviews and tests of the effectiveness of the internal control system may consider the scope and frequency of evaluation, methodology, and resources.

Pelaksana Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System Implementation

Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perseroan. Divisi Internal Audit membantu Direktur Utama untuk menilai keandalan dan kecukupan pengendalian internal Perseroan dan tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan (*compliance*), keandalan pelaporan keuangan (*reporting*), serta efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan (*operation*), tetapi juga aspek lainnya yang berdampak pada tata kelola perusahaan (*governance*).

The Board of Directors is responsible for conducting a good internal control system to achieve the Company's objectives. The Internal Audit Division assists the President Director in assessing the reliability and adequacy of the Company's internal control, which is not only limited to compliance with laws and regulations (*compliance*), reliability of financial reporting (*reporting*), and efficiency and effectiveness of the Company's operations (*operations*), but also other aspects with an impact on corporate governance (*governance*).

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan

Operational, Financial, and Compliance Control Systems

Pengendalian Internal PT PII diterapkan atas 3 (tiga) aspek utama, yaitu pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan. Adapun langkah-langkah pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan yang dilakukan oleh PT PII, antara lain meliputi :

1. Pengendalian Operasional
 - Identifikasi dan penilaian risiko operasional
 - Pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur operasional berbasis pengendalian internal
 - Penetapan tanggung jawab dan *Job Description* bagi pelaksana prosedur operasional
 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap keefektifan prosedur operasional oleh Divisi Internal Audit
 - *Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait keefektifan prosedur operasional oleh Divisi Internal Audit

IIGF implements three (3) Internal Control aspects, i.e., operational control, financial control, and compliance. The operational, financial, and compliance control measures carried out by IIGF include, among others:

1. Operational Control
 - Identification and assessment of operational risks
 - Development and application of operational policies and procedures based on internal control
 - Determination of responsibilities and Job Description for operational procedure implementors
 - Regular monitoring and evaluation of the effectiveness of operational procedures by the Internal Audit Division
 - Monitoring the follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to the effectiveness of operational procedures by the Internal Audit Division.



2. Pengendalian Keuangan

- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan
- Penetapan prosedur pemantauan dan verifikasi terhadap pencatatan transaksi keuangan
- Pelaksanaan proses rekonsiliasi berkala untuk memastikan keakuratan informasi keuangan
- Penetapan mekanisme reviu kepatuhan oleh Divisi Risk Management dan evaluasi oleh auditor internal serta auditor eksternal untuk menjaga keandalan informasi keuangan
- *Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait keandalan informasi keuangan oleh Divisi Internal Audit

3. Pengendalian Kepatuhan

- Identifikasi peraturan, regulasi, dan kebijakan yang relevan dengan operasi Perseroan
- Pengembangan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang sesuai dengan persyaratan hukum dan kebijakan Perseroan
- Pemantauan dan penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan oleh auditor internal serta auditor eksternal
- Sosialisasi kepada insan Perseroan tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan tersebut
- Monitoring pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi auditor internal dan eksternal terkait kepatuhan oleh Divisi Internal Audit

2. Financial Control

- Accurate and timely reporting of events and transactions to ensure the availability of relevant and reliable information for decision-making.
- Establishment of monitoring and verification procedures for financial transaction reporting
- Regular reconciliation process to ensure the accuracy of financial information
- Establishment of a compliance review mechanism by the Risk Management Division and evaluation by internal and external auditors to maintain the reliability of financial information.
- Monitoring the follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to the reliability of financial information by the Internal Audit Division

3. Compliance Control

- Identification of rules, regulations, and policies relevant to the Company's operations
- Development of compliance policies and procedures in line with the legal requirements and Company's policies
- Monitoring and assessment of compliance with regulations and policies by internal and external auditors
- Socialization to the Company's personnel on the prevailing regulations and policies and the importance of compliance with such regulations and policies
- Monitoring the follow-up improvements to the recommendations of internal and external auditors, related to compliance by the Internal Audit Division

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Review of the Effectiveness of Internal Control Systems

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perseroan. Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai.

Pada tahun 2023, evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas (*entity level control*) dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit meliputi seluruh pengendalian tingkat entitas yang terdapat di dalam lingkungan Perseroan.

The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to ensuring that corporate governance is well implemented as a basis for achieving the objective of maintaining and increasing the Company's value. One of the implementations of good corporate governance is to ensure that the internal control system runs adequately.

In 2023, the Internal Audit Division evaluated the entity level control system, covering all entity level control within the Company.



Berikut penjelasan metodologi yang digunakan untuk menilai kecukupan penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas:

1. Penelaahan dokumen dan data;
2. Observasi dan wawancara dengan manajemen dan karyawan; dan
3. Survei penerapan dengan manajemen dan karyawan.

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) di Perseroan pada umumnya telah dirancang dan diterapkan dengan kategori baik dengan capaian skor 90,17 untuk mendukung efektifitas sistem dan kebijakan pengendalian internal.

The following is an elaboration of the methodology to assess the adequacy of the entity level control system implementation:

1. Review of documents and data;
2. Observation and interviews with management and employees; and
3. Survey for management and employees.

Based on the evaluation, the Entity Level Control at the Company generally was designed and implemented well, with a score of 90.17, to support the effectiveness of internal control systems and policies.

Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal

Report of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control

Berdasarkan audit yang telah dilakukan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat temuan atau kelemahan material terkait kepatuhan perundang-undangan maupun kepatuhan terhadap pengendalian internal.

Based on the audit conducted by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of the PricewaterhouseCoopers network) on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the year ended 31 December 2023, there were no findings or material deficiencies related to statutory compliance or compliance with internal control.

Studi Banding/Benchmarking

Benchmarking

Dalam rangka untuk mengukur dan membandingkan kinerja terhadap aktivitas atau kegiatan serupa pada unit kerja yang sejenis pada perusahaan lain, PT PII telah mengikuti Konferensi Nasional Audit Internal yang diselenggarakan oleh *The Institute of Internal Auditors* Indonesia (IIA Indonesia).

IIGF attended the National Conference on Internal Audit organized by the Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA Indonesia) to assess and compare performance against similar activities or activities in similar working units in other companies.

Selain itu perwakilan Divisi Internal Audit Perseroan juga aktif sebagai pengurus dan anggota dari Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern Badan Usaha Milik Negara (FKSPI BUMN).

In addition, representatives of the Company's Internal Audit Division are also active as administrators and members of the Communication Forum for Internal Audit Units of State-Owned Enterprises (FKSPI BUMN).

Pada 8 Maret 2023, Divisi Internal Audit PT PII menjadi narasumber kunjungan dari Satuan Pengawas Intern (SPI) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) terkait peningkatan kapabilitas Divisi IA.

On 8 March 2023, IIGF's Internal Audit Division became a speaker for a visit from the Internal Supervisory Unit (SPI) of PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) related to the improvement of Internal audit Division capabilities.



Monitoring Tindak Lanjut Temuan Monitoring Follow-Up on Findings

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, Divisi Internal Audit melakukan pemantauan dan menindaklanjuti tanggapan atas rekomendasi dari hasil audit internal & eksternal melalui prosedur peninjauan dan verifikasi atas perkembangan status tindakan perbaikan yang dijalankan oleh unit kerja terkait.

Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk menilai secara objektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan melakukan pemeriksaan kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh unit kerja terkait.

Dokumen Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal didistribusikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Perseroan telah menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi audit internal yang jatuh tempo pada tahun 2023 dan tidak terdapat temuan baik dari auditor internal maupun auditor eksternal yang menimbulkan kerugian negara.

The Internal Audit Division monitors and follows up on responses to recommendations from internal & external audit results through procedures review and verification on the status of corrective actions progress carried out by the relevant work units to ensure the effectiveness of the internal control system.

The monitoring has the objective to objectively assess the extent to which the recommendation of findings have been implemented, and to check the accuracy of both written and physical data in the field on follow-up reports submitted by related working units.

The Follow-up Report on Internal and External Audit Recommendations is distributed to the President Director and Audit Committee periodically, at least once every three (3) months. The Company has completed 100% of the follow-up of internal audit recommendations due in 2023, and there were no findings from both internal and external auditors that caused losses to the State.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait Hasil Penelaahan atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit telah melakukan telaah terhadap hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern PT PII yang dilakukan Divisi Audit Internal pada 6 November sampai dengan 8 Desember 2023, dengan ruang lingkup penilaian meliputi seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT PII selama periode tahun 2023.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) di PT PII pada umumnya telah dirancang dan diterapkan dengan kategori baik dengan capaian skor 90,17, sehingga implementasi Sistem Pengendalian Internal dianggap memadai.

In 2023, the Board of Directors and the Board of Commissioners or the Audit Committee have reviewed the evaluation results of the effectiveness of IIGF's internal control system, conducted by the Internal Audit Division, from 6 November to 8 December 2023, with the scope of the assessment covering all entity level control processes within IIGF for the 2023 period.

The evaluation resulted in the Entity Level Control at IIGF which generally was designed and implemented well, with a score of 90,17. Therefore, the Internal Control System is considered to have been implemented adequately.



Audit Eksternal/Akuntan Publik

External Audit/Public Accountant

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan PT PII dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.

The independent supervisory function of IIGF's finance is monitored by carrying out an External Audit by a Public Accounting Firm.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

Mechanism to Appoint and Determine Public Accountants

1. Dewan Komisaris menerbitkan Surat Pengadaan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan kepada Direktur Utama
 2. Pengadaan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Divisi Corporate Service & Procurement (Divisi CSP) sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa
 3. Direktur Utama menerbitkan Surat Usulan Penunjukkan KAP sesuai dengan hasil pengadaan yang dilakukan oleh Divisi CSP kepada Dewan Komisaris
 4. Dewan Komisaris menerbitkan Surat Usulan Penunjukkan KAP kepada Pemegang Saham
 5. Pemegang Saham menetapkan KMK Penunjukkan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan
 6. Direktur Utama menerbitkan Surat Penunjukkan kepada KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan.
1. The Board of Commissioners issues a Procurement Letter to the President Director, for a Public Accountant Firm to exercise an audit of the Financial Statements
 2. The Procurement of the Public Accounting Firm is organized by the Corporate Service & Procurement Division (CSP Division), in accordance with the guidelines for the procurement of goods and services
 3. The President Director issues a Proposal Letter for the Appointment of KAP to the Board of Commissioners, in accordance with the procurement result organized by the CSP Division
 4. The Board of Commissioners issues a Letter of Proposal for the KAP Appointment to the Shareholders
 5. Shareholders determine KMK for the KAP appointment to conduct a general audit of the Financial Statements
 6. The President Director issues a Letter of Appointment to the KAP to conduct a general audit of the Financial Statements.

Daftar Akuntan Publik

Public Accountant's Lists

Sebagai komitmen pengungkapan kepatuhan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.01/2021 tanggal 14 Desember 2021, berikut informasi mengenai KAP Laporan Keuangan Perusahaan dalam 5 (lima) tahun berturut-turut.

As a commitment to disclose compliance with the Minister of Finance Regulation No. 186/PMK.01/2021 dated 14 December 2021, the following is KAP for the Company's Financial Statements in five (5) consecutive years.

Nama Kantor Akuntan Publik dan Nama Akuntan Publik Dalam Periode 2018–2023

Public Accounting Firm and Public Accountants in 2018–2023

Periode Period	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Public Accountant's Name	Lingkup Penugasan Scope of Appointment	Komisi yang Dibayarkan Commission Paid
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of the PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Jimmy Pangestu, S.E. Izin Praktek Akuntan Publik No.: AP.1124 License of Public Accountant No.: AP.1124	Jasa audit laporan keuangan, Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement audit services, Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp 1.055.000.000



Periode Period	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Public Accountant's Name	Lingkup Penugasan Scope of Appointment	Komisi yang Dibayarkan Commission Paid
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1.2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of the PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1.2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA Izin Praktek Akuntan Publik No.: AP.0229 License of Public Accountant No.: AP.0229	Jasa audit laporan keuangan, Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement audit services, Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp 981.852.850
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of the PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA Izin Praktek Akuntan Publik No.: AP.0229 License of Public Accountant No.: AP.0229	Jasa audit laporan keuangan, Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement audit services, Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp865.000.000
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of the PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA Izin Praktek Akuntan Publik No.: AP.0229 License of Public Accountant No.: AP.0229	Jasa audit laporan keuangan, Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement audit services, Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp860.000.000
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of the PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA Izin Praktek Akuntan Publik No.: AP.0222 License of Public Accountant No.: AP.0222	Jasa audit laporan keuangan, Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement audit services, Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp864.000.000
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) No. Izin: KEP-241/KM.1/2015 Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (member of the PricewaterhouseCoopers) No. Permit: KEP-241/KM.1/2015	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA Izin Praktek Akuntan Publik No.: AP.0222 License of Public Accountant No.: AP.0222	Jasa audit laporan keuangan, Jasa audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan internal control (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris. Financial statement audit services, Compliance audit services in accordance with regulations and internal control (PSA 62), and Assurance Engagement Services on Key Performance Indicators ("KPI") of the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.	Rp800.000.000



Manajemen Risiko Perusahaan

Company's Risk Management

Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dengan strategi dan proses bisnis. Manajemen risiko diterapkan secara proaktif dan memandang ke depan guna mendukung Perseroan dalam mengantisipasi, memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan.

The Company implements a risk management system that is integrated with business strategies and processes. Risk management is implemented in a proactive and forward-looking manner to support the Company in anticipating, maximizing shareholder value, managing capital comprehensively, and ensuring profitability and sustainable growth of the Company's business.

Dasar Kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko

Risk Management Policy Basis

Perseroan memiliki sejumlah kebijakan terkait manajemen risiko, yaitu antara lain:

1. *Operation Manual* PT PII;
2. *Enterprise Risk Management Framework* PT PII;
3. *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Control Matrix*
4. *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Management Exercise*;
5. Instruksi Kerja Pelaksanaan dan Dokumentasi Proses *Risk Control Self Assessment (RCSA)*

The Company has several policies related to risk management, among others:

1. IIGF's *Operation Manual*;
2. IIGF's *Enterprise Risk Management Framework*;
3. *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Control Matrix*
4. *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Management Exercise*;
5. Work Instruction for the Implementation and Documentation of the *Risk Control Self Assessment (RCSA)* Process.

Secara umum, kebijakan Perseroan terkait manajemen risiko dirumuskan dengan mengacu pada Kerangka Manajemen Risiko yang mengadopsi standar ISO 31000:2018. Berdasarkan dokumen tersebut, Kerangka Manajemen Risiko Korporasi PT PII didefinisikan sebagai berikut:

1. Pembentukan prinsip dan standar umum bagi praktik Manajemen Risiko untuk memungkinkan pemahaman umum atas Manajemen Risiko;
2. Selera dan toleransi risiko (*risk appetite and tolerance*) yang disepakati oleh manajemen dalam menentukan ukuran tingkat risiko;
3. Mengadopsi kerangka manajemen risiko yang mendefinisikan proses manajemen risiko yang diterapkan pada bisnis secara umum; dan
4. Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam implementasi Manajemen Risiko.

Generally, the Company's policies related to risk management are formulated with reference to the Risk Management Framework adopting the ISO 31000:2018 standard. Based on the document, IIGF's Corporate Risk Management Framework is defined as follows:

1. Establishment of common principles and standards for Risk Management practices to enable a common understanding of Risk Management;
2. Risk appetite and tolerance agreed upon by management in determining the size of the risk level;
3. Adoption of a risk management framework that defines the risk management processes applied to the business in general; and
4. Accountability and responsibility in the Risk Management.

Kerangka ini merupakan pendekatan yang terstruktur dan konsisten untuk mengarahkan dan mempersiapkan organisasi agar dapat mengendalikan risiko dan perubahan yang dapat mempengaruhi organisasi. Selain itu, Kerangka Manajemen Risiko merupakan pendekatan holistik yang diterapkan dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi Perseroan sehingga tetap selaras dengan *risk appetite* Perseroan di tengah situasi bisnis yang semakin dinamis.

The Framework is a structured and consistent approach to direct and prepare the organization to control risks and changes that may affect the organization. In addition, the Risk Management Framework is a holistic approach applied in managing the various risks faced by the Company so that it remains aligned with the Company's risk appetite amidst an increasingly dynamic business condition.



Prinsip-Prinsip Pengelolaan Manajemen Risiko

Risk Management Principles

Selain itu, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi panduan dalam menerapkan sistem manajemen risiko di lingkungan Perseroan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manajemen Risiko berperan dalam menciptakan dan melindungi nilai Perseroan;
2. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, yang harus diterapkan dalam semua aktivitas, proses dan sistem, dan dipertimbangkan dengan informasi terbaik yang tersedia dalam setiap pengambilan keputusan;
3. Manajemen Risiko adalah dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, dan disesuaikan sejalan dengan pencapaian tujuan Perseroan;
4. Manajemen Risiko adalah proses yang digerakkan manusia dan budayanya yang secara inklusif dijalankan di seluruh organisasi; dan
5. Manajemen Risiko adalah penggerak untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.

In addition, the Company implements risk management principles that guide the application of the risk management system within the Company, as elaborated below:

1. Risk Management plays a role in creating and protecting the Company's value;
2. Risk Management is an integral part of all organizational processes, which must be applied in all activities, processes, and systems, and considered with the best available information in every decision making;
3. Risk Management is dynamic, iterative, responsive to change, and customized, in line with the achievement of the Company's objectives;
4. Risk Management is an inclusive people and culture driven process across the organization; and
5. Risk Management is the driver to create an adaptable and developing organization.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Fungsi Manajemen Risiko

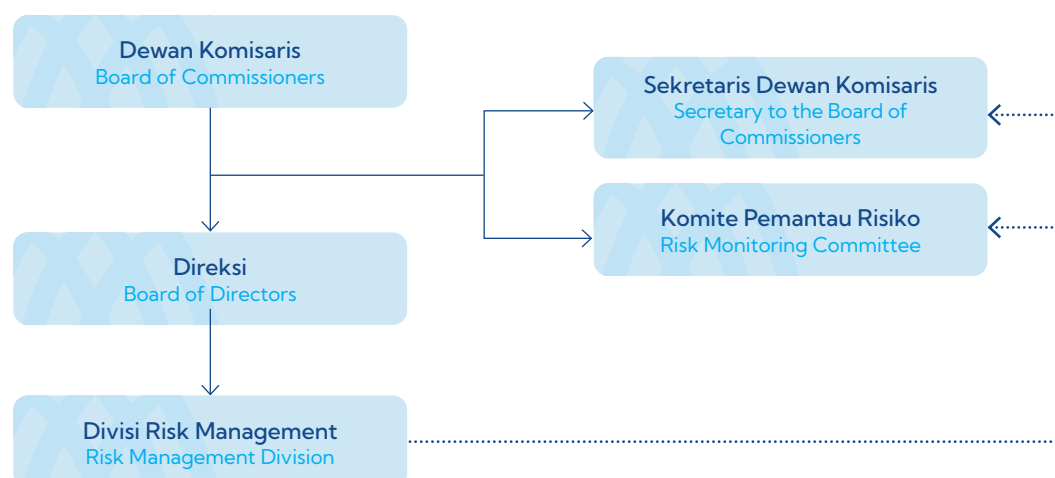
Organizational Structure and Position of Risk Management Function

Fungsi Manajemen Risiko di Perseroan dijalankan oleh Divisi Risk Management, dipimpin oleh Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama melalui proses internal. Berikut bagan yang menggambarkan struktur organisasi Divisi Risk Management serta hubungan komunikasi dan pelaporan setiap unsur dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya:

The Risk Management function in the Company is carried out by the Risk Management Division, chaired by the Head of Division who is appointed and dismissed by the President Director in an internal process. The following chart illustrates the organizational structure of the Risk Management Division along with the reporting and communication links between each component in carrying out its duties, responsibilities and functions:

Struktur Organisasi Divisi Risk Management

Organizational Structure of Risk Management Division





Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya, Kepala Divisi Risk Management bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komite Pemantau Risiko untuk memperoleh masukan dan arahan dalam pelaksanaan aktivitas manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala. Tim Manajemen Risiko bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Risk Management.

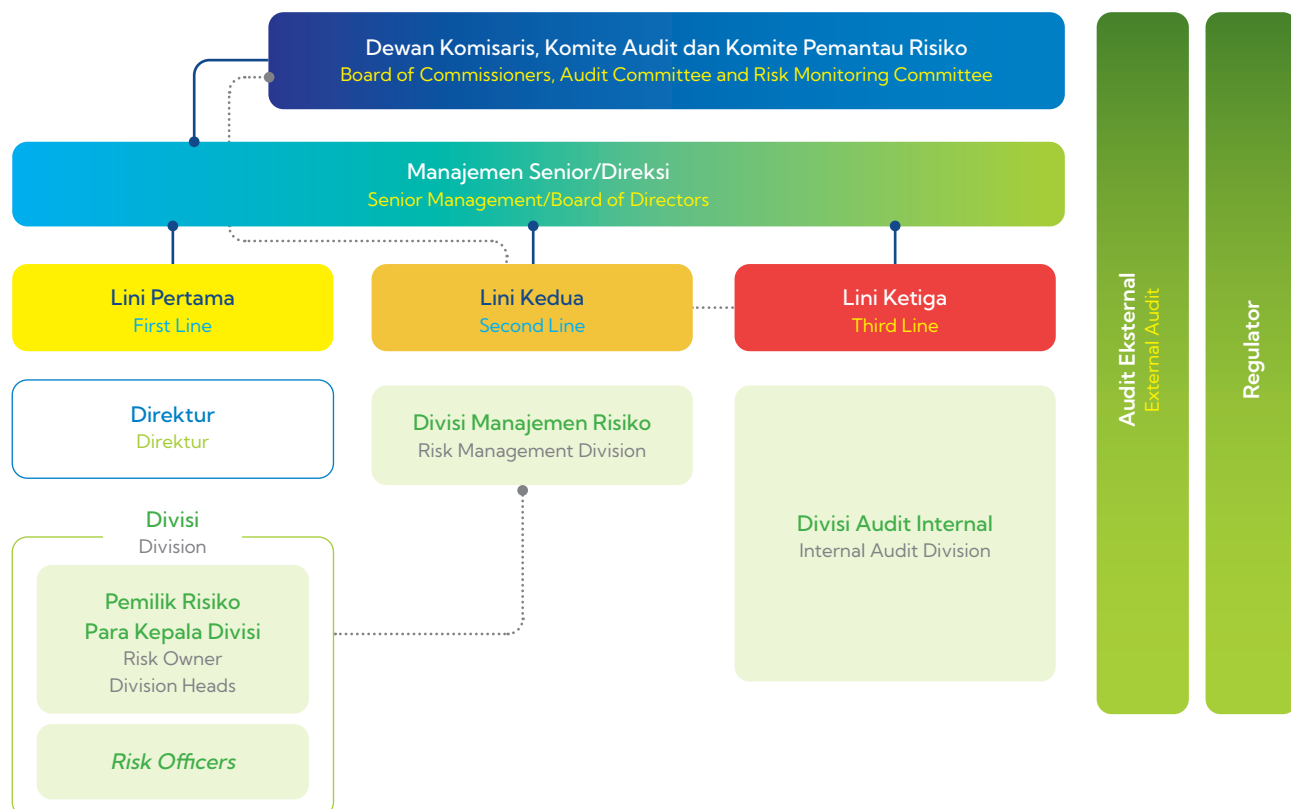
In carrying out its duties and functional responsibilities, the Head of the Risk Management Division reports directly to the President Director and coordinates with the Risk Monitoring Committee to obtain input and direction in the risk management activities, which are reported periodically. The Risk Management team is directly responsible to the Head of the Risk Management Division.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Risk Management Governance Structure

Penerapan Manajemen Risiko menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh individu dan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi, sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan masing-masing. Tata Kelola Manajemen Risiko yang diterapkan di Perseroan mengadopsi Model 3 Garis (*Three Lines Model*) yang menggambarkan hubungan kerja sama dan komunikasi dari seluruh unsur-unsur di Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko, serta para Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan *Risk Officer* yang berada di setiap divisi. Berikut struktur tata kelola manajemen risiko PT PII:

Risk Management is implemented as part of the responsibility of all individuals and elements within the organization, in accordance with their respective positions, functions, and authorities. The Company implemented Risk Management Governance that adopted a Three Lines Model, illustrating the cooperation and communication relationships of all elements in the Company including the Board of Commissioners, the Board of Directors, Internal Audit, Risk Management function and the Risk Owners, as well as and Risk Officers in each division. The following is IIGF's risk management governance structure:





Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai struktur Tata Kelola Manajemen Risiko di PT PII:

1. Dewan Komisaris yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko.
2. Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Keuangan.
3. Divisi Risk Management yang terdiri dari Kepala Divisi Risk Management yang dibantu oleh Deputy Senior Manager dan Assistant Manager Manajemen Risiko.
4. *Risk Owner* atau Pemilik Risiko yaitu para Kepala Divisi/*Senior Leaders* yang bertindak sebagai pengelola risiko di setiap divisi.
5. *Risk Officer* yaitu para staf yang terpilih pada setiap Divisi yang membantu Pemilik Risiko dan Tim dalam melaksanakan proses manajemen risiko di setiap divisi dengan dukungan Tim Divisi Risk Management.
6. Seluruh Staf yang mendukung pelaksanaan proses manajemen risiko di seluruh unit kerja dan divisi masing-masing.

The following is a further description of IIGF's Risk Management Governance structure:

1. Board of Commissioners, supported by the Risk Monitoring Committee.
2. Board of Directors, consisting of the President Director, Business Director, and Finance Director.
3. Risk Management Division, consisting of the Head of Risk Management Division, assisted by Deputy Senior Manager and Risk Management Assistant Manager.
4. Risk Owners, i.e., Head of Division/Senior Leaders who act as risk managers in each division.
5. Risk Officers, i.e., selected staff in each Division who assist the Risk Owner and Team in implementing the risk management process in each division, supported by the Risk Management Division Team.
6. All Staff who support the risk management process in all working units and their respective divisions.

Profil Pejabat Kepala Risk Management

Profile of Head of Risk Management

Direksi telah menunjuk Sdri. Rian Ditha Prasetianti untuk menduduki jabatan Kepala Divisi Risk Management. Berikut Profil Kepala Divisi Risk Management PT PII:

The Board of Directors has appointed Mrs. Rian Ditha Prasetianti, to be the Head of Risk Management Division. The profile of IIGF's Head of Risk Management Division is as follows:



Rian Ditha Prasetianti

Kepala Divisi Risk Management
Head of the Risk Management Division

Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia	Indonesian
Usia Age	45 tahun per 31 Desember 2023	Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia	45 years old as of 31 December 2023
Tempat/Tanggal Lahir Place/Date of Birth	Jakarta, 15 Agustus 1978	Jakarta, 15 August 1978
Periode Jabatan Term of Office	Menjabat sejak: 2 Januari 2023	Served in the office since: 2 January 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Indonesia (2000)	Bachelor of Economics Accounting, University of Indonesia (2000)
Sertifikasi Certification	- <i>Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level</i> - Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level Risk Management Certification Level 3 by Risk Management Certification Agency



Riwayat Jabatan Career History	Bergabung dengan PT PII sejak 2 Januari 2023 sebagai Kepala Divisi Risk Management. Sebelumnya, mengawali karier sebagai Auditor pada salah satu Big 4 Kantor Akuntan Publik, kemudian pernah menjabat di beberapa bank di Indonesia sebagai Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management dan terakhir sebagai Head, Operational Risk Governance and Advisory.	Joined IIGF on 2 January 2023 as Head of the Risk Management Division. Previously, as Head of the Risk Management Division. Previously, started his career as an Auditor at one of the Big 4 Public Accounting Firms, then served in several banks in Indonesia as Senior Operational Risk Officer, Head of Supply Chain Management, and prior to this position as Head of Operational Risk Governance and Advisory.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan di Perseroan maupun di luar Perseroan	Has no concurrent positions internally or externally

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of the Head of Risk Management

1. Memimpin pengembangan kerangka kerja manajemen risiko korporat (ERM *Framework*) yang diimplementasikan melalui Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko Perusahaan yang terus dipelihara dan diperbaiki secara berkesinambungan (*Continuous Improvement*);
2. Mendukung proses pengambilan keputusan dalam pemberian penjaminan proyek infrastruktur, terutama dari aspek manajemen risiko Perseroan;
3. Memimpin pelaksanaan proses kajian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur standar Perseroan yang berlaku;
4. Melaksanakan dokumentasi dan konsultasi proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh pemilik dan pengelola risiko di setiap divisi; dan
5. Menyusun laporan manajemen risiko secara periodik dan menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Selain menjalankan peran fungsi Manajemen Risiko, Divisi Risk Management PT PII juga bertugas memberikan pendampingan dan konsultasi terkait proses kepatuhan sebagai bagian dari implementasi GCG dan pengendalian internal.

1. Leading the development of the ERM Framework implemented in the Company's Risk Management Process, under continuous improvement;
2. Supporting the decision making process in guarantee infrastructure projects, especially in terms of the Company's risk management;
3. Heading the compliance assessment process with the Company's standard policies and procedures;
4. Documenting and providing consultation of risk management processes carried out by risk owners and managers in each division; and
5. Preparing regular risk management reports and submitting them to the Board of Directors and Board of Commissioners via the Risk Monitoring Committee.

In addition to carrying out the Risk Management function, IIGF's Risk Management Division also has the duty to provide assistance and consultation regarding the compliance process as part of the GCG and internal control implementation.





Jika audit internal dilakukan setelah suatu transaksi dilakukan, maka sebaliknya pengkajian atas kepatuhan (*compliance review*) diterapkan sebagai salah satu alat pengelola risiko sebelum sebuah transaksi dilakukan. Salah satu tugas dari fungsi kepatuhan (*compliance*) adalah memastikan terpenuhinya prasyarat sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta proses penjaminan di dalam proyek. Dalam pengawasan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, fungsi kepatuhan bertugas memberikan peringatan dini kepada manajemen terkait potensi risiko yang dapat diterima Perseroan.

Selain itu, berdasarkan PMK No. 260/PMK.011/2010 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Perseroan, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Divisi Risk Management, menyusun Acuan Alokasi Risiko yang menjadi acuan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam proyek KPBU dalam mengalokasikan risiko kepada pihak yang tepat, serta menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Compliance review is used as one of the risk management methods prior to the execution of a transaction, in contrast to internal audit, which is carried out after the transaction has been completed. One of the tasks of the compliance function is to ensure the fulfillment of prerequisites related to the procurement of goods and services and the project's guarantee process. In monitoring compliance aspects and conformity with prevailing regulations, the compliance function is tasked with providing early warning to management regarding potential risks that may be exposed to the Company.

In addition, pursuant to PMK No. 260/PMK.011/2010 of 2010 on the Guidelines for the Infrastructure Guarantee in Public Private Partnership (PPP), the Company, in this case coordinated by the Risk Management Division, prepared Risk Allocation Guidelines as a reference for the Government Contracting Agency (GCA) in PPP projects to allocate risks to the right parties, as well as prepare risk mitigation plans to provide infrastructure in accordance with the community's needs.

SDM dan Sertifikasi Profesi

Human Resources and Professional Certification

Per tanggal 31 Desember 2023, Divisi Risk Management didukung oleh 3 (tiga) karyawan dengan tingkat Pendidikan dan Sertifikasi Profesi sebagai berikut:

As of 31 December 2023, the Risk Management Division is supported by three (3) employees, with the levels of education and professional certification as follows:

Jabatan Position	Jenjang Pendidikan Education	Sertifikasi Certification	Jumlah Personel Personnel
Kepala Manajemen Risiko Head of Risk Management	S1 Bachelor Degree	2	1
Deputi Senior Manager Manajemen Risiko Risk Management Deputy Senior Manager	S2 Master Degree	4	1
Assistant Manager Manajemen Risiko Risk Management Assistant Manager	S1 Bachelor Degree	1	1
Jumlah Total			3

Berikut pengungkapan informasi sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan yang bertugas di Divisi Risk Management hingga akhir tahun 2023:

The information regarding the professional certifications held by employees in the Risk Management Division until the end of 2023 is disclosed as follows:

Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Sertifikasi Number of Certification
<i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Certified Risk Management Professional (CRMP) from Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)	1
<i>Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)</i> dari <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1
<i>Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)</i> dari <i>Enterprise Risk Management Academy (ERMA)</i> Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP) from the Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1



Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Sertifikasi Number of Certification
Certified Risk Management Officer (CRMO) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Certified Risk Management Officer (CRMO) from Risk Management Professional Certification Agency (LSPMR)	1
Certified GRC Professional dari LSP GRK Certified GRC Professional from LSP GRK	1
Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level Certified PPP Professional (CP3P) Foundation Level	2

Sistem Manajemen Risiko Perseroan Company's Risk Management System

Perseroan menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management/ERM*) yang disusun secara holistik dan terintegrasi yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan manajemen risiko secara efektif dan efisien. Kerangka Kerja ERM telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/PII-BOD/0321 tanggal 4 Maret 2021. Penyusunan kerangka kerja tersebut merupakan perwujudan komitmen Perseroan dalam penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi sehingga dapat memberikan panduan untuk penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai standar internasional ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines* yaitu dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan merumuskan langkah-langkah mitigasi terkait tantangan dan dampak terhadap ketidakpastian.

The Company uses the Enterprise Risk Management (ERM) approach, which is prepared holistically and is integrated as a reference to carry out risk management effectively and efficiently. The ERM Framework has been approved through Board of Directors' Decree No. 003/SK/PII-BOD/0321 dated 4 March 2021. The framework preparation was the reflection of the Company's commitment to implementing risk management in the organization in a broad and integrated manner to provide guidance for the risk management implementation in a systematic and measurable manner in accordance with the international standard, ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines, i.e., in identifying, analyzing, assessing, and formulating mitigation actions related to challenges and impacts on uncertainty.

Tujuan dan Kerangka Kerja Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) Objectives and Framework of Enterprise Risk Management (ERM)

Perseroan menerapkan ERM dengan tujuan untuk:

1. Mengembangkan PT PII menjadi organisasi yang tangguh menghadapi risiko dalam mencapai visi dan misi korporasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua aktivitas bisnis PT PII;
2. Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan profil risiko/pengembalian (*risk/return*) yang ditetapkan;
3. Memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
4. Meningkatkan reputasi PT PII di mata pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Pernyataan Misi Manajemen Risiko, yaitu "*tone at the top*", bertujuan untuk mengkomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII dan menegaskan bahwa manajemen puncak Perusahaan akan mengarahkan kegiatan Manajemen Risiko di seluruh tingkatan organisasi.

The Company implements ERM with the objective to:

1. Develop IIGF as a risk resilient organization to achieve the corporate vision and mission through a comprehensive evaluation of the risks inherent in all IIGF's business activities;
2. Support risk-based decision making by management in achieving healthy business growth by considering the established risk/return profile;
3. Fulfill the Good Corporate Governance principles by creating prudent strategies and processes; and
4. Enhance IIGF's reputation from the perspective of shareholders and stakeholders.

The Risk Management Mission Statement, "*tone at the top*", aims to communicate IIGF's vision, principles, and mandate, and confirms that the Company's top management will direct Risk Management at all levels of the organization.



Sementara itu, misi yang ingin dicapai melalui penerapan ERM adalah untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko melalui penyediaan alat dan metodologi yang tepat untuk dapat mengelola risiko secara eksplisit sehingga tercapai tujuan dari penerapan pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko di lingkungan PT PII.

Bersamaan dengan itu, penerapan ERM juga ditujukan untuk menciptakan organisasi sadar risiko melalui:

1. Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan;
2. Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi;
3. Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis); dan
4. Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

Meanwhile, ERM implementation has the mission to understand the main risks faced by the organization and facilitate the Risk Management process through the provision of appropriate tools and methodologies to manage risks explicitly, in order to achieve the objective of implementing a consistent approach to risk management within IIGF.

Simultaneously, ERM is implemented to create a risk-aware organization through:

1. Establishment of a risk-based management system, which manages all major risks through practices in all business activities and decision making;
2. Risk management at all levels in the organization;
3. Clear accountability and independence in carrying out compliance reviews and monitoring of all activities (all business process owners); and
4. Adoption of widely accepted international standards.

Kategori Risiko

Risk Category

PT PII telah membuat klasifikasi risiko yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko Strategis, mencakup semua risiko yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi.
2. Risiko Finansial, mencakup semua risiko yang terkait dengan risiko pasar dan risiko likuiditas.
3. Risiko Operasional, mencakup semua risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis Perusahaan.

IIGF has created a risk classification as follows:

1. Strategic Risk, includes all risks related to strategy planning, execution, and monitoring.
2. Financial Risk, includes all risks associated with market and liquidity risk.
3. Operational Risk, includes all risks arising from the Company's business functions.





Taksonomi risiko (menunjukkan rincian dari sumber risiko yang mungkin terjadi) dan definisi risiko yang tercakup dalam kerangka ERM ini adalah sebagai berikut:

1. Kategori Risiko Strategis

Risiko tersebut muncul dari kegagalan untuk menentukan dan melaksanakan strategi bisnis PT PII secara akurat, kegagalan membuat keputusan bisnis secara akurat, atau kegagalan untuk dapat menanggapi perubahan eksternal. Strategi dan Perencanaan: Risiko ini muncul akibat penentuan konteks strategi dan isu perencanaan yang lemah dari PT PII sehingga berpotensi mempengaruhi nilai-nilai strategis PT PII dan performa sebagai sebuah organisasi.

2. Kategori Risiko Keuangan

Kategori ini mengklasifikasikan risiko yang dapat muncul akibat ketidakmampuan PT PII untuk memenuhi target pendapatannya, kerugian dari penempatan dana investasi, dan ketidakmampuan PT PII untuk memperoleh pendanaan baru, baik dari kreditur ataupun dari pemegang saham. Sub kategori risiko keuangan adalah:

a. Risiko Pasar (e.g. tingkat bunga, kurs)

Risiko ini menggabungkan risiko yang dihasilkan dari pergerakan yang merugikan dari faktor pasar yang meliputi suku bunga dan selisih kurs serta harga ekuitas.

b. Risiko Likuiditas dan Kredit

Risiko ini berhubungan dengan isu likuiditas dan kredit yang terkait dengan aset dan pendapatan PT PII.

3. Kategori Risiko Operasional

Risiko pada kategori ini umumnya terjadi pada pelaksanaan fungsi bisnis PT PII. Risiko ini fokus pada risiko yang timbul dari orang, sistem, dan proses dimana Perusahaan beroperasi (termasuk aktivitas penyediaan penjaminan sebagai bisnis utama PT PII).

a. Operasional Umum

Risiko pada sub kategori ini umumnya terkait dengan ketidakmampuan PT PII untuk mengoperasikan fungsi bisnisnya secara efisien, yang menyebabkan kerugian operasional dari kegiatan di luar penyediaan penjaminan.

b. Penyediaan Penjaminan

Risiko pada sub kategori ini mengklasifikasikan risiko operasional yang terkait dengan peran PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI).

c. Hukum dan Kepatuhan

Risiko pada sub kategori ini terkait dengan ketidakpatuhan PT PII sebagai korporasi terhadap standar hukum atau regulasi yang dapat berdampak pada nilai-nilai strategis dan kinerja PT PII sebagai sebuah organisasi.

The risk taxonomy (details of the possible sources of risk) and risk definitions covered in this ERM framework are as follows:

1. Strategic Risk Category

Such risks come from failure to accurately determine and execute IIGF's business strategy, failure to decide the business accurately, or failure to respond to external changes.

Strategy and Planning: This risk arises from IIGF's weak determination of strategic context and planning issues, potentially affecting IIGF's strategic values and performance as an organization.

2. Financial Risk Category

This category classifies risks that may arise from IIGF's inability to meet its revenue targets, losses from investments, and IIGF's inability to obtain new financing, either from creditors or shareholders. Sub-categories of financial risk:

a. Market Risk (e.g., interest rate, exchange rate)

This risk combines risks resulting from adverse movements in market factors, including interest rates, foreign exchange, and equity prices.

b. Liquidity and Credit Risk

This risk is connected to liquidity and credit issues associated with IIGF's assets and income.

3. Operational Risk Category

This risk generally happens in the IIGF's business functions. This risk focuses on risks arising from the people, systems, and processes by which the Company operates (including guarantee provision activities as IIGF's main business).

a. General Operations

Risks in this sub-category are related to IIGF's inability to operate its business functions efficiently, leading to operational losses from activities outside the guarantee provision.

b. Guarantee Provision

Risks in this sub-category classify operational risks associated with IIGF's role as an Infrastructure Guarantee Agency.

c. Law and Compliance

Risks in this sub-category are related to IIGF's non-compliance as a corporation with legal or regulatory standards that may impact IIGF's strategic values and performance as an organization.

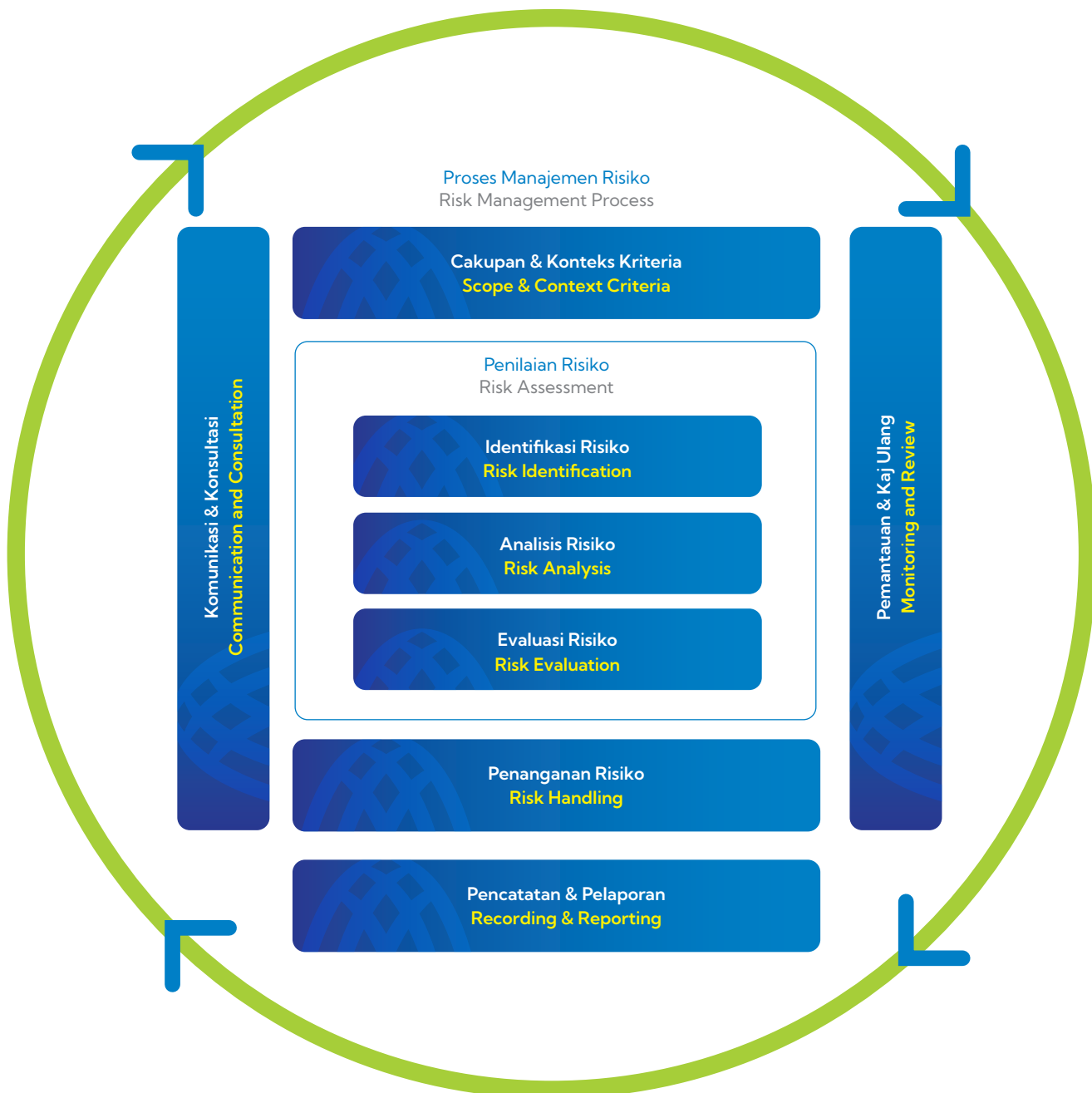


Proses Manajemen Risiko yang Berlaku di PT PII

Risk Management Process Applicable at IIGF

Proses Manajemen Risiko merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta diintegrasikan ke dalam struktur, operasi, dan proses organisasi. Proses manajemen risiko meliputi penerapan yang sistematis dan berkesinambungan pada kegiatan dan proses komunikasi dan konsultasi, penentuan konteks, penilaian, penanganan, pemantauan dan kaji ulang serta pencatatan dan pelaporan risiko.

The Risk Management process is vital in management and decision making, and is integrated into the organizational structure, operations, and processes. The risk management process includes the systematic and continuous application of communication and consultation activities and processes, context determination, assessment, handling, monitoring, and review, as well as recording and reporting of risks.





Mengacu pada standar ISO 31000:2018, Proses Manajemen Risiko di PT PII dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Cakupan, Konteks, dan Kriteria

Penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria adalah tahapan yang harus dilakukan untuk menyesuaikan proses Manajemen Risiko guna mendukung penilaian dan perlakuan risiko secara efektif dan relevan dengan lingkungan organisasi dan operasional Perseroan. Secara garis besar, proses bisnis yang berjalan di PT PII saat ini terdiri dari:

- a. Penjaminan KPBU;
- b. Penjaminan Non-KPBU;
- c. Pendampingan Penyiapan dan Transaksi;
- d. *Capacity Building*; dan
- e. Pengelolaan penempatan dana (investasi).

Menilik dinamika bisnis dan kebutuhan pemangku kepentingan, terdapat potensi penambahan mandat dan proses bisnis lain yang perlu dikaji dampaknya terhadap strategi, operasi dan keuangan Perseroan.

2. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi adalah tahapan yang dilaksanakan baik secara internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko melalui interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik dalam bentuk rapat berkala, rapat insidental atau *ad hoc*, *Focus Group Discussion* (FGD); dan diskusi reguler antara fungsi Manajemen Risiko dengan para Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dan *Risk Officer*.

3. Penilaian Risiko

Tahapan penilaian risiko mencakup identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dijalankan secara sistematis dengan tujuan untuk menentukan kemungkinan dan dampak terjadinya suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sehingga dapat dilakukan penanganan risiko secara tepat.

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko adalah tahapan yang dilakukan untuk menentukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan manfaat paling optimal bagi PT PII dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi.

5. Pemantauan dan Kaji ulang Risiko

Pemantauan risiko adalah kegiatan pemantauan rutin terhadap kinerja proses Manajemen Risiko atas perencanaan dan harapan atas proses Manajemen Risiko. Sementara itu, kaji ulang risiko merupakan kegiatan peninjauan secara berkala atas kondisi terkini dan pada fokus tertentu.

With reference to the ISO 31000:2018 standard, IIGF's Risk Management Process is described as follows:

1. Scope, Context, and Criteria

The determination of scope, context, and criteria is a key phase to adjust the Risk Management process to support the assessment and treatment of risks effectively and relevant to the organizational and operational environment of the Company. Generally, IIGF's current business processes consist of:

- a. PPP Guarantee;
- b. Non-PPP Guarantee;
- c. Project Development Assistance;
- d. Capacity Building; and
- e. Investment Management.

Analyzing business dynamics and stakeholder requirements, there are prospective changes to additional requirements and business procedures that must be evaluated for their impacts on the Company's strategy, operations, and finances.

2. Communication and Consultation

Communication and consultation are phases carried out internally and externally to ensure the effectiveness of risk management by interacting with stakeholders, in the form of regular meetings, incidental or *ad hoc* meetings, Focus Group Discussions (FGDs); and regular discussions between the Risk Management function, Risk Owners, and Risk Officers.

3. Risk Assessment

The risk assessment stage includes the identification, analysis, and evaluation of risks conducted systematically to determine the likelihood and impact of an event that obstructs the achievement of organizational goals or objectives so that appropriate risk management can be carried out.

4. Risk Handling

Risk handling is a phase to determine the right actions that can provide the most optimal benefits for IIGF in dealing with identified risks.

5. Risk Monitoring and Review

Risk monitoring is a regular monitoring activity of the Risk Management's performance on the planning and expectations. Meanwhile, risk review is a regular activity to review current conditions with a particular focus.



6. Pencatatan dan Pelaporan Risiko

Proses Manajemen risiko beserta hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Pelaporan risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola organisasi yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta membantu pemenuhan tugas dan tanggung jawab para Direksi dan Dewan Komisaris.

6. Risk Recording and Reporting

The Risk Management process and its results shall be documented and reported via appropriate mechanisms. Risk reporting is an integral part of organizational governance that is implemented to improve the quality of communication with stakeholders, and to fulfill the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Penetapan Tingkat Risiko

Risk Level Determination

Perseroan telah menetapkan tingkat risiko yang mungkin dapat diterima Perseroan dan digunakan dalam pengukuran risiko. Tingkat risiko sedang berarti merujuk pada potensi risiko yang mungkin dapat diterima dengan beberapa pertimbangan tambahan mengenai manfaat yang akan diperoleh. Berikut matriks tingkat risiko yang akan digunakan dalam evaluasi risiko:

The Company determined the level of risk that may be acceptable to the Company and is used in risk measurement. Moderate risk level refers to a potential risk that may be acceptable with some additional considerations in terms of obtained benefits. The following risk level matrix will be used in the risk evaluation:

Kemungkinan Risiko Potential Risk	Dampak Risiko dalam hal Materialisasi Risiko Impact in the Event of Risk Materializing				
	Tidak Signifikan Not Significant	Minor	Moderate	Major	Berbahaya Catastrophic
Sangat Rendah Very Low	Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Menengah Moderate
Rendah Low	Rendah Low	Rendah Low	Menengah Moderate	Menengah Moderate	Menengah Moderate
Sedang Medium	Rendah Low	Menengah Moderate	Menengah Moderate	Tinggi High	Tinggi High
Tinggi High	Menengah Moderate	Menengah Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High
Sangat Tinggi Very High	Menengah Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High	Tinggi High

Pedoman Penanganan Risiko

Risk Management Guidelines

Tujuan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan adalah agar Perseroan dapat melakukan penanganan risiko secara tepat sehingga dapat ditentukan aktivitas pengelolaan risiko selanjutnya. Penanganan risiko dipersiapkan dengan memperhatikan selera risiko yang diterjemahkan ke dalam matriks tingkat risiko. Di bawah ini merupakan pedoman penanganan risiko untuk setiap tingkat risiko untuk dijadikan acuan dalam menentukan langkah mitigasi terhadap setiap risiko yang teridentifikasi.

The Company implements a risk management system with the objective to enable the Company to handle risks appropriately so that further risk management activities can be determined. Risk handling is prepared with due regards to the risk appetite, which is translated into a risk level matrix. Below are risk handling guidelines for each risk level to be used as a reference in determining the mitigation steps for each identified risk.



Tingkat Risiko Level Risk	Penanganan Risiko	Handling Risk
Rendah Low	- Menerima risiko dengan pemantauan yang konstan. - Minimal, kontrol detektif dapat ditentukan untuk risiko tersebut. - Penanganan risiko dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, bila memungkinkan.	- Accepting the risk with constant monitoring. - Minimally, detective controls can be defined for the risk. - Risk management implemented within 6 months, if possible.
Sedang Medium	- Mengurangi tingkat risiko, bila dimungkinkan. - Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. - Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, bila memungkinkan.	- Reducing the risk level, if possible. - Preventive controls can be defined for the risk. - If the expenses of addressing the risk outweigh the benefits, accept the risk. Risk management fully implemented within 3 months, if possible.
Tinggi High	- Mengurangi tingkat risiko, bila memungkinkan. - Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut. Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut. - Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan secepatnya, bila memungkinkan. Mensyaratkan pemantauan risiko secara bulanan.	- Reducing the risk level, if possible. - If the expenses of addressing the risk outweigh the benefits, accept the risk. Preventive controls can be defined for the risk. - Risk management fully implemented at the soonest, if possible. Requiring monthly risk monitoring.

Risiko-Risiko Utama yang Dihadapi oleh Perusahaan

Company's Major Risks

Dalam menjalankan usahanya, PT PII terekspos pada sejumlah risiko utama, di antaranya:

In conducting its business, IIGF is exposed to several major risks, including:

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Risiko Description Risk	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Handling
1. Risiko Tidak Tercapainya Target Penjaminan Risk of Not Achieving Guarantee Target	Dalam menjalankan peran sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), Perseroan menghadapi risiko-risiko antara lain terkait dengan target <i>pipeline</i> proyek, termasuk tertundanya/ tidak berlanjutnya proyek ke tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan dan perjanjian regres untuk proyek KPBU, dan tidak terbitnya penugasan untuk penjaminan Non KPBU.	Secara umum: - Melakukan pemrosesan proses penjaminan yang terstruktur melalui <i>Operation Manual</i>, Kebijakan dan SOP. - Menentukan potensi target proyek sesuai dengan prioritas dan potensi penjaminan (<i>pipeline clustering & screening</i>) dengan komprehensif dan bersinergi dengan pelaksana penyiapan proyek/PDF dan mitra terkait, termasuk menyiapkan antisipasi alternatif <i>pipeline</i> dan PJPK proyek sebagai upaya menjaga pencapaian target penjaminan. - Melakukan <i>monitoring</i> periodik atas status pemrosesan proyek atau penugasan sehingga didapatkan gambaran dan tindak lanjut yang diperlukan - Melaksanakan <i>program capacity building</i> dalam rangka membangun pemahaman dan sinergi para <i>stakeholders</i> proyek untuk menyiapkan kapasitas PJPK dalam mengelola proyek dan proses penjaminan. - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan. Untuk penjaminan KPBU, contohnya: PJPK, mitra Kantor Bersama KPBU dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk sinkronisasi penentuan target dan timeline proyek serta proses penjaminan, utamanya terkait komitmen PJPK dalam kesiapan perangkat, organisasi, pemenuhan/ penyelesaian dokumentasi proyek dan proses KPBU sesuai catatan evaluasi penjaminan. Sementara untuk penjaminan non KPBU, contohnya: Kementerian Keuangan dan calon BUMN Terjamin. - Memastikan kebutuhan PJPK atas skema Penjaminan untuk Proyek dan pemahaman atas struktur penjaminan yang sesuai kebutuhan calon investor dan <i>lender</i> melalui proses <i>Market Sounding</i>, proses <i>Aanwijzing</i> dan <i>One on One meeting</i> sebelum finalisasi proses lelang. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pencapaian target penjaminan maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik.



Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Risiko Description Risk	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Handling
	In carrying out its role as an Infrastructure Guarantee Agency, the Company faces risks, including project pipeline targets, delays/non-continuation of projects to the stage of signing guarantee agreements and recourse agreements for PPP projects, and non-issuance of assignments for Non-PPP guarantees.	In general: - Performing structured processing of guarantee and PDF processes using Operation Manuals, Policies, and SOPs. - Determining the potential project targets in accordance with prioritization and guarantee potential (pipeline clustering & screening) comprehensively, in synergy with project/PDF preparation implementers and related partners, including preparing alternative pipeline and GCA to maintain the achievement of guarantee targets. - Conducting periodic monitoring of the status of project processing or assignments to obtain an overview and necessary follow-ups - Carrying out capacity building to build understanding and synergy among project stakeholders to prepare GCA's capacity in managing the project and guarantee process. - Communicating and coordinating with relevant stakeholders, for PPP and PDF guarantees: GCA, PPP Joint Office partners, and other relevant government agencies to synchronize the determination of project targets and time lines, and the guarantee process, mainly related to GCA's commitment in the readiness of equipment, organization, fulfillment/completion of project documentation, and PPP processes in accordance with the guarantee evaluation notes; for Non-PPP guarantees: Ministry of Finance and prospective Guaranteed SOEs. - Ensuring GCA's needs for the Guarantee scheme for the Project and understanding of the guarantee structure that suits the needs of potential investors and lenders via the Market Sounding process, Aanwijzing process, and One-on-one meeting prior to finalizing the auction process. By managing and handling the guarantee target achievement, the risk level can be better managed.
2. Risiko Tidak Tercapainya Target Project Development Facility (PDF) Risk of Not Achieving Project Preparation and Transaction Advisory (PDF) Target	Perseroan mendapatkan mandat untuk menjalankan fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi yang disebut <i>Project Preparation and Transaction Advisory</i> (PDF). Dalam pelaksanaan PDF ini memiliki banyak dinamika yang dapat mengakibatkan risiko tidak tercapainya target untuk PDF. The Company received a mandate to implement a Project Preparation and Transaction Advisory (PDF). The PDF implementation is very dynamic that can result in the risk of not achieving the PDF target. not achieving the PDF target.	Pengelolaan dan Penanganan Risiko: Secara umum: - Melakukan pemrosesan PDF sesuai dengan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). - Memetakan <i>champion</i> pihak PJPK sejak awal, utamanya yang dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan atas proyek dan persetujuan atas dokumen - Melakukan <i>monitoring</i> periodik atas milestone proyek sehingga didapatkan gambaran, tindak lanjut hingga eskalasi yang dibutuhkan - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan seperti PJPK, Kementerian Keuangan dan instansi pemerintah terkait lainnya - Melakukan seleksi terhadap konsultan pendamping yang berpengalaman dan memiliki kompetensi yang memadai untuk menunjang proses penyiapan dan pendampingan yang efektif - Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam upaya menyelesaikan <i>obstacles</i> proyek yang lebih luas melalui rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk penugasan Pra PDF dan jangka waktu PDF yang dapat diperpanjang sampai dengan 2 tahun setelah <i>Commercial Operation Date</i> (COD) Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pencapaian target PDF maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. Risk Management and Handling: In general: - Processing PDF in accordance with the Policy and Standard Operating Procedures (SOP). - Mapping GCA champions since the beginning, particularly those that can help accelerate project decision-making and document approval. - Conducting periodic monitoring of project milestones to obtain an overview, follow-up, and escalation required - Communicating and coordinating with relevant stakeholders, such as GCA, Ministry of Finance, and other relevant government agencies. - Selecting experienced and competent facilitating consultants to support effective preparation and assistance. - Involvement of the Ministry of Finance to resolve wider project obstacles through the draft Minister of Finance Regulation for Pre-PDF assignment and PDF term, which can be extended up to 2 years after Commercial Operation Date (COD). By managing and handling the achievement of PDF targets, the level of risk can be better managed.



Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Risiko Description Risk	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Handling
3. Risiko Likuiditas akibat Terjadinya Klaim Penjaminan Liquidity Risk due to the Guarantee Claims	PT PII memiliki eksposur potensi klaim dalam hal penjaminan yang dilakukan telah dinyatakan efektif. Ketika terjadi klaim, Perseroan perlu memastikan ketersediaan likuiditas jangka pendek untuk proses pembayaran klaim. IIIGF is exposed to potential claims if the guarantee has been declared effective. When a claim occurs, the Company needs to ensure the availability of short-term liquidity to pay the claim.	a. Melakukan penjabaran <i>Risk Mitigation Plan</i> (RMP) Proyek menjadi <i>Key Risk Indicators</i> (KRI) guna dijadikan dasar pemantauan proyek secara berkala. b. Melakukan pemantauan proyek secara berkala untuk mengidentifikasi potensi keterjadian klaim yang dilaporkan bulanan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. c. Melakukan proses verifikasi internal nilai klaim yang diajukan (melalui Memo Evaluasi Klaim) untuk memastikan akurasi dan validitas klaim. d. Melakukan <i>monitoring</i> posisi penempatan dana secara berkala untuk mendukung likuiditas terhadap potensi klaim. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pemrosesan klaim maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. a. Elaborating the Project Risk Mitigation Plan (RMP) into Key Risk Indicators (KRI) to serve as the basis for regular project monitoring. b. Conducting regular project monitoring to identify potential claim occurrences that are reported monthly to the Board of Directors and Board of Commissioners. c. Internally verifying the value of claims submitted (using the Claim Evaluation Memo) to ensure the accuracy and validity of claims. d. Periodically monitoring the position of investment to support liquidity against potential claims. By managing and handling claims processing, the risk level can be better managed.
4. Risiko Kredit atas Tagihan Regres Credit Risk on Recourse Invoice	Setelah dilakukannya proses pembayaran klaim, Perseroan juga menghadapi risiko terkait pemulihan pembayaran regres. Risiko ini berkaitan dengan tidak terpulihkannya hak regres karena ketidakmampuan PJPK atau BUMN Terjamin untuk membayar regres. After the claim payment process, the Company faces risks related to the recovery of recourse payments. This risk connects with the non-recovery of recourse rights due to the inability of GCA or Guaranteed SOEs to pay recourse.	a. Melakukan workshop regres bersama dengan PJPK dan/ atau BUMN Terjamin untuk mengetahui alur, tata cara serta penganggaran/penyelesaian regres. b. Memastikan adanya klausul terkait regresi yang dituangkan pada Perjanjian Regres dan Perjanjian Pelaksanaan Regres. c. Melakukan <i>monitoring</i> dan proyeksi atas kemampuan finansial PJPK dan/atau BUMN Terjamin dalam membayar regres. d. Melakukan eskalasi kepada pemangku kepentingan terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dll, jika diperlukan. e. Memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di dalam Perjanjian Regres jika terdapat sengketa terkait pembayaran regres. f. Telah diadakan pembahasan dengan Kemenkeu khususnya terkait skema intercept regres yang ada pada draft RPKM. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait hak tagih regres maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. a. Holding recourse workshops together with GCA and/or Guaranteed SOEs to understand the flow, procedures, and budgeting/settlement of recourse. b. Ensuring the existence of recourse-related clauses as outlined in the Recourse Agreement and Recourse Implementation Agreement. c. Monitoring and forecasting the financial capability of GCA and/or Guaranteed SOEs in paying the recourse. d. Escalating to relevant stakeholders, including the Ministry of Home Affairs, Ministry of SOEs, Ministry of Finance, etc., if necessary. e. Ensuring there is a dispute resolution mechanism in the Recourse Agreement if there is a dispute related to recourse payment. f. Discussions have been held with the Ministry of Finance, specifically regarding the intercept recourse scheme in the RPKM draft. By managing and handling recourse rights, the risk level can be better managed.



Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Risiko Description Risk	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Handling
5. Risiko Ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku Risk of Non-compliance with prevailing laws and regulations	Risiko ini berkaitan dengan terdapat tindakan korporasi maupun insan Perseroan yang tidak sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain terdapat peraturan perundang-undangan baru atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak ke Perseroan belum teridentifikasi sedini mungkin, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman insan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini dapat berakibat sanksi dari Penegak Hukum maupun teguran dari Pemerintah (regulator) atau Pemegang Saham This risk is the risk of corporate and human actions that are not in accordance with prevailing laws and regulations. Some of the causes include new laws and regulations or changes in laws and regulations that affect the Company and have not been identified as early as possible, resulting in ignorance or lack of understanding of the Company's personnel regarding the prevailing regulations. This may result in sanctions from Law Enforcement or reprimands from the Government (regulator) or Shareholders.	a. Melakukan <i>monitoring</i> regulasi dan legal isu yang berdampak langsung pada Perseroan secara bulanan dan melakukan <i>update</i> daftar/list regulasi yang berdampak pada Perseroan. b. Sosialisasi regulasi yang berlaku untuk meningkatkan <i>awareness</i> bagi Insan Perseroan. c. Penggunaan konsultan hukum (jika diperlukan), untuk membantu interpretasi atau mempelajari dampak/konsekuensi dari suatu hukum dan regulasi. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait ketidakpatuhan hukum dan regulasi maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. a. Monitoring the regulations and legal issues that have a direct impact on the Company monthly and updating the list of regulations that affect the Company. b. Socialization of prevailing regulations to increase awareness of the Company's personnel. c. Use of legal consultants (if necessary), to assist in the interpretation or study the impact/consequences of laws and regulations. By managing and handling non-compliance with laws and regulations, the risk level can be better managed.
6. Risiko Penurunan Nilai Investasi dan Pendapatan Pengelolaan Dana akibat Tingkat Suku Bunga Risk of Decrease in Investment Value and Fund Management Income due to Interest Rate Risk	Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi secara negatif akibat perubahan suku bunga pasar yang <i>unfavourable</i>. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi dan pendapatan pengelolaan dana Interest rate risk is the risk that future cash flows or fair value of financial instruments fluctuate negatively due to unfavorable changes in the market interest rates. This may result in a decline in investment value and fund management income.	a. Menetapkan strategi investasi dengan mempertimbangkan: - Kondisi pasar, proyeksi pergerakan suku bunga ke depan, makro ekonomi, dan kebutuhan likuiditas Perseroan - Komposisi penempatan dana (<i>portfolio mix</i>) dan jangka waktu yang optimal dari tingkat pengembalian dan risiko yang terukur b. <i>Review</i> berkala dengan Direksi atas strategi investasi. c. Pengelolaan portofolio melalui mekanisme tender masih dilakukan oleh Perseroan untuk mendapatkan suku bunga tertinggi yang ditawarkan dan menjaga akuntabilitas penempatan dana. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait pasar maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. a. Establishing an investment strategy by considering: - Market conditions, projections of future interest rate movements, macroeconomics, and the Company's liquidity needs. - The portfolio mix and the optimal period of return with measurable risk. b. Regular review with the Board of Directors on the investment strategy. c. Portfolio management through tender mechanism is conducted by the Company to obtain the highest interest rate offered and maintain accountability of fund placement. By managing and handling the market, the risk level can be better managed.



Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Risiko Description Risk	Pengelolaan dan Penanganan Risiko Risk Management and Handling
7. Risiko Tidak Tersedianya Kapasitas Penjaminan Risk of Unavailability of Guarantee Capacity	Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan penjaminan, Perseroan senantiasa perlu memastikan kapasitas penjaminan yang dihitung dengan menggunakan pendekatan <i>Gearing Ratio</i>. Risiko ini berkaitan dengan terlampauinya batasan <i>Gearing Ratio</i> sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu PMK No.148/PMK.8/2022 serta selera risiko Perseroan. The Company always ensures the guarantee capacity calculated using the <i>Gearing Ratio</i> approach in carrying out its functions and duties in providing guarantees. This risk is related to the <i>Gearing Ratio</i> exceeding its limit, in accordance with the prevailing regulations, i.e., PMK No. 148/PMK.8/2022, and the Company's risk appetite.	a. Melakukan kajian kapasitas penjaminan pada setiap akan dilakukannya penjaminan untuk suatu proyek sehingga didapatkan gambaran kondisi <i>Gearing Ratio</i>. b. Melakukan seleksi <i>pipeline</i> proyek penjaminan dan proses strukturisasi penjaminan proyek untuk dapat memanfaatkan kapasitas secara optimal. c. Melakukan pemantauan berkala terhadap outlook <i>gearing ratio</i> dan dalam hal indikasi perhitungan <i>Gearing Ratio</i> PT PII mencapai 80% dari batasan regulasi dapat dilakukan upaya penambahan Penyertaan Modal Negara ataupun alternatif pembiayaan lainnya. Dengan dilakukannya pengelolaan dan penanganan terkait kapasitas penjaminan maka tingkat risiko dapat lebih terkelola dengan baik. a. Conducting a guarantee capacity study every time a project guarantee will be implemented, to obtain the overview of the <i>Gearing Ratio</i>. b. Selecting the pipeline of guarantee projects and structuring the project guarantee process to optimally utilize capacity. c. Conducting regular monitoring of the <i>gearing ratio</i> outlook and if it is indicated that IIGF's <i>Gearing Ratio</i> reaches 80% of the regulatory limit, efforts shall be carried out to increase State Capital Participation or other alternative financing. By managing and handling guarantee capacity, the level of risk can be better managed.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2023

Report on the Duties and Responsibilities of the Risk Management Function in 2023

Sepanjang tahun 2023, Divisi Risk Management telah melaksanakan sejumlah aktivitas yang merupakan bagian dari tugas, tanggung jawab, dan fungsi Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran pada Buku Acuan Alokasi Risiko Tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. No. 260/PMK.011/2010, Pasal 11;
2. Melaksanakan *review* atas Dokumen Proses Bisnis PT PII;
3. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penjaminan telah mengikuti prosedur internal (Pedoman/Kebijakan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
4. Melaksanakan verifikasi atas penilaian kepatuhan (*Compliance Check*) untuk memastikan proses penempatan dana investasi telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PMK 148/2022 dan prosedur internal;
5. Melakukan *review* terhadap pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertentu untuk memastikan bahwa proses telah mengikuti ketentuan dan prosedur internal yang berlaku;
6. Penyusunan materi dalam kepesertaan di ajang kompetisi praktik manajemen risiko dan/atau bidang GRC di tingkat nasional maupun internasional;
7. Memfasilitasi proses identifikasi, penanganan, pemantauan dan pelaporan risiko Perusahaan secara berkelanjutan dengan melibatkan *Risk Officer* dan *Risk Owner*;

In 2023, the Risk Management Division carried out several activities that are part of the duties, responsibilities, and functions, of Risk Management:

1. Updating the 2023 Risk Allocation Reference Book, in accordance with the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia. No. 260/PMK.011/2010, Article 11;
2. Reviewing IIGF's Business Process Documents;
3. Verifying the Compliance Check to ensure that the guarantee process has followed the applicable internal procedures (Guidelines/Policies and Standard Operating Procedures/SOPs);
4. Verifying Compliance Check to ensure that the investment placement process has followed the prevailing regulatory provisions, i.e., PMK 148/2022 and internal procedures;
5. Reviewing the procurement of goods and services with a certain value to ensure that the process has followed the prevailing provisions and internal procedures;
6. Preparing materials for participation in competitions on risk management practices and/or GRC at national and international levels;
7. Facilitating the process of identification, handling, monitoring, and reporting of the Company's risks continuously by involving Risk Officers and Risk Owners;



8. Melaksanakan pengembangan <i>Risk Register</i> menjadi <i>Risk Control Matrix</i>; 9. Melaksanakan pengembangan <i>Key Control Self Assessment</i> (KCSA) dan <i>Key Risk Indicators</i> (KRI); 10. Melaksanakan pengembangan model & kerangka untuk penilaian tingkat maturitas ERM dengan mengacu kepada beberapa referensi diantaranya KMK Nomor 105/KMK.01/2022, RIMS, ISO 31000 dan <i>best practice</i>; dan 11. Implementasi dan Pemeliharaan Sertifikasi atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadopsi dari ISO 37001:2016 atas area Pengadaan Barang dan Jasa sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.	8. Developing Risk Register into a Risk Control Matrix; 9. Developing Key Control Self Assessment (KCSA) and Key Risk Indicators (KRI); 10. Implementing the development of models & frameworks for ERM maturity level assessment with reference to several sources, including KMK No. 105/KMK.01/2022, RIMS, ISO 31000 and best practices; and 11. Implementing and Maintaining Certification on Anti-Bribery Management System (ABMS) adopted from ISO 37001:2016 for Procurement of Goods and Services as part of the commitment to Good Corporate Governance.

Penjelasan Mengenai Hasil Telaah yang Dilakukan atas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2023

Explanation of Review Result Carried out over Risk Management System in 2023

Untuk mewujudkan pengelolaan risiko yang efektif, Perseroan telah melakukan penilaian atas pelaksanaan manajemen risiko melalui beberapa mekanisme, di antaranya dengan mengakomodir aspek Manajemen Risiko ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Korporasi, audit dengan pendekatan berbasis risiko, *review* implementasi dan pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan secara berkala. Divisi Risk Management secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat melalui pengawasan dan pemantauan pergerakan tingkat risiko dalam profil risiko Perseroan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perseroan kemudian melakukan analisis terhadap efektivitas perencanaan pengelolaan risiko yang sudah dirumuskan dan diterapkan. Hasil laporan profil risiko ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara berkala dengan realisasi KPI penurunan risiko mencapai 10% dari target 8% pada tahun 2023.

To achieve successful risk management, the company has evaluated the application of risk management through numerous approaches, including accommodating aspects of Risk Management into the Corporate's Key Performance Indicator (KPI), audits with a risk-based approach, regular reviews and monitoring, and reporting to stakeholders. The Risk Management Division evaluates the effectiveness of the corporate Risk Management system through supervision and monitoring of risk level movements in the Company's risk profile. Based on the results, the Company then analyses the effectiveness of the risk management plan that has been formulated and implemented. The results of this risk profile report are submitted to the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly with the realization of risk reduction KPIs of 10% of the 8% target by 2023.

Pengawasan Aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi

Active Supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors

Perseroan senantiasa mengkaji efektivitas penerapan manajemen risiko, antara lain melalui Laporan Manajemen Risiko dan pemantauan atas perkembangan mitigasi risiko yang disampaikan setiap semester oleh Divisi Risk Management kepada Direktur Utama selaku anggota Direksi yang membawahi Divisi Risk Management. Kemudian, secara berkala Perseroan menyampaikan Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris yang antara lain memuat informasi mengenai perkembangan penerapan sistem manajemen risiko di Perseroan, termasuk informasi mengenai status tindak lanjut pelaksanaan mitigasi. Laporan dibuat secara komprehensif sehingga memberikan gambaran komitmen dari Perseroan untuk menurunkan tingkat risikonya.

The Company reviews the effectiveness of risk management, among others, through the Risk Management Report and monitoring of risk mitigation progress submitted every semester by the Risk Management Division to the President Director as the member of the Board of Directors in charge of the Risk Management Division. Further, the Company submits a Management Report to the Board of Commissioners which contains information on the progress of the risk management system implementation in the Company, including information on the status of follow-up on mitigation. The report is made comprehensively to illustrate the Company's commitment to reducing its risk level.



Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan risiko Perseroan, Dewan Komisaris juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko serta memberikan masukan dan saran terkait efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Kemudian, secara berkala diadakan rapat dan diskusi bersama antara Divisi Risk Management dan Komite Pemantau Risiko guna membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan tindak lanjut atas masukan yang disampaikan.

In addition, to strengthen the Company's risk management, the Board of Commissioners established a Risk Monitoring Committee to assist the Board of Commissioners in supervising risk management as well as providing input and advice regarding the effectiveness of risk management in the Company. Periodically, joint meetings and discussions are held between the Risk Management Division and the Risk Monitoring Committee to discuss the implementation and work programs related to risk management and follow up on the inputs submitted.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait Hasil Penelaahan atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Direksi dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik manajemen risiko secara berkesinambungan, terutama pada area-area yang mencakup kapabilitas sumber daya, teknologi, dan metodologi yang dikembangkan sesuai *best practice* mengingat tantangan dan tuntutan dunia usaha, termasuk harapan para pemangku kepentingan terus meningkat di tengah situasi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

The Board of Commissioners has supervised and monitored the effectiveness of risk management. Based on the supervision results, the Board of Directors is considered to have shown a strong commitment to enhancing the quality of the risk management practices continuously, especially in areas that include resource capabilities, technology, and methodologies developed in accordance with best practices, considering the challenges and demands of the business world, including the increasing expectations of stakeholders amidst uncertain economic and business situations.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko antara lain dengan sosialisasi dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan ISO 37001:2016. Penerapan SMAP diimplementasikan dengan adanya sertifikasi SMAP di PT PII dengan ruang lingkup Area Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2023 juga dilakukan pengembangan peta risiko untuk proses bisnis utama dalam pelaporan. Dari sisi *human capital* dilakukan penilaian kompetensi teknis dan non teknis dengan salah satu pilar di kompetensi teknis adalah manajemen risiko.

Some recommendations for improvements have been made in an effort to improve the quality of risk management, which include the socialization and application of the Anti-Bribery Management System (ABMS) based on ISO 37001:2016. The ABMS is implemented with an ABMS certification at IIGF with the scope of the Procurement of Goods and Services. In 2023, a risk map was also developed for the main business processes in reporting. In terms of human capital, technical and non-technical competency assessments are carried out and risk management is included as one of the pillars of technical competency.

Dengan pendampingan oleh Divisi Risk Management, *Risk Officer* diharapkan dapat meningkatkan perannya untuk membantu para pemilik risiko (*Risk Owner*) dalam mengelola, menjalankan, dan memantau pelaksanaan proses manajemen risiko di setiap divisi dan unit kerja masing-masing.

With assistance from the Risk Management Division, Risk Officers shall enhance their role to assist risk owners in managing, implementing, and monitoring the risk management processes in each division and working unit.

Hasil pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko melalui penerapan Proses Manajemen Risiko Korporat dengan metodologi *Risk-Control Self Assessment* (RCSA) menunjukkan bahwa pengendalian risiko Perseroan untuk risiko-risiko di atas Rendah telah sepenuhnya memadai.

The results of risk management monitoring via the Corporate Risk Management Process with the Risk-Control Self Assessment (RCSA) methodology showed that the Company's risk control for risks above Low is fully adequate.



Informasi Sanksi Administratif Tahun Buku Information on Administrative Sanctions for the Fiscal Year

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi dari regulator dalam bentuk apapun dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (*material event*).

In 2023, the Company did not receive any form of administrative sanction from regulators, and was never sanctioned by regulators for being unable to announce material events within the prescribed time frame.

Sanksi Administratif Yang Dihadapi Entitas Anak Administrative Sanction Imposed on the Subsidiaries

Hingga per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki entitas anak sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi Sanksi administratif yang melibatkan Entitas Anak.

As of 31 December 2023, the Company does not have any subsidiaries. Therefore, the Company does not disclose information on administrative sanctions involving Subsidiaries.





Informasi Permasalahan Hukum

Information on Legal Issues

"Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris & anggota Direksi PT PII yang sedang menjabat tidak memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana".

"In 2023, current members of IIGF's Board of Commissioners and Board of Directors did not face any legal issues, either civil or criminal".

Permasalahan Hukum Perseroan

Company's Legal Issues

Selama tahun 2023, PT PII tidak menghadapi permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

In 2023, there have been no legal issues faced by IIGF, both civil and criminal.

Anak Perseroan

Subsidiaries

Hingga Akhir Tahun 2023, Perseroan belum memiliki entitas anak sehingga Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai perkara hukum yang melibatkan Entitas Anak.

As of the end of 2023, the Company does not have any subsidiaries. Therefore, the Company does not disclose information on legal issues involving the Subsidiaries.

Perkara Hukum Lainnya

Miscellaneous Legal Issues

Selama tahun 2023, PT PII tidak terlibat dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isu perburuhan, ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, komersial, persaingan, atau lingkungan serta tidak terdapat kasus ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap hukum, aturan, dan peraturan berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir.

In 2023, IIGF was not involved in any legal issues related to labor, employment, consumer, bankruptcy, commercial, competition, or environmental matters. There were no instances of non-compliance/violation of laws, rules, and regulations related to significant or material related party transactions in the last three years.



Kode Etik Perusahaan Code of Conduct

Sebagai bagian dari pelaksanaan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("Good Corporate Governance atau GCG"), Perseroan telah merumuskan Kode Etik Perseroan yang merupakan salah satu elemen penting yang berlaku mengikat bagi seluruh karyawan Perseroan, termasuk jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Kode Etik Perseroan diatur dalam Kebijakan Kode Etik PT PII yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 008/SK/PII-BOD/1222 dan No. KEP-09/KOM/ PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan tanggal 30 Desember 2022.

Kebijakan Kode Etik Perseroan merupakan sekumpulan komitmen etika perilaku yang disusun dan digunakan sebagai pedoman untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan bertingkah laku berdasarkan prinsip kesadaran etis (*ethical sensibility*), berpikir etis (*ethical reasoning*), dan berperilaku etis (*ethical conduct*) sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Nilai-nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture

Dalam rangka memperkuat identitas dan kinerja Perseroan, PT PII memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*. Nilai-nilai budaya ini mencerminkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lingkungan organisasi Perseroan. Penjabaran masing-masing nilai budaya dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

As part of the Good Corporate Governance ("GCG") practices, the Company formulated the Company's Code of Conduct, which is one of the important elements that applies bindingly to all Company's employees, including the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Company's Code of Conduct is regulated in IIGF's Code of Conduct, which has been approved via the Joint Decree of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners No. 008/ SK/PII-BOD/1222 and No. KEP-09/KOM/ PII/12/2022 on the Ratification of the Company's Code of Conduct dated 30 December 2022.

The Company's Code of Conduct contains a set of commitments to ethical behavior, formulated and referred to as a manual to influence, shape, stipulate, and carry out consistent behavior based on ethical sensibility, ethical reasoning, and ethical conduct, as part of efforts to realize the vision, mission, and values of the Company.

Pokok-Pokok dalam Kebijakan Kode Etik Perseroan The Company's Code of Ethics Principles

Pokok-pokok yang diatur dalam Pedoman Kode Etik meliputi:

1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Nilai-nilai Perseroan;
3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja;
9. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
10. Pelaporan keuangan;

The key points regulated in the Code of Conduct include:

1. Statement of commitment of the Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Corporate values;
3. Compliance with Laws and Regulations;
4. Conflict of Interest;
5. Professional Work Ethics;
6. Ethics in Engaging with Stakeholders;
7. Involvement in political activity;
8. Commitment to the Occupational Health and Safety and Environment;
9. Equal opportunity to get a job and promotion;
10. Financial reporting;



11. Memberi dan menerima hadiah, jamuan dan sumbangan;
12. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perseroan dan Kerahasiaan Informasi;
13. Mekanisme penegakan Kebijakan Kode Etik Perusahaan; dan
14. Pelaporan dan sanksi atas pelanggaran.

11. Giving and receiving gifts, entertainment, and donations;
12. Commitment to Protecting the Company's Assets and Confidentiality of Information;
13. Enforcement of the Company's Code of Conduct; and
14. Reporting and sanctions for violations.

Pengungkapan Kepatuhan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Compliance Disclosure that the Code of Conduct Applies to All Levels of the Organization

Kebijakan Kode Etik telah disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 008/SK/PII-BOD/1222 dan No. KEP-09/KOM/ PII/12/2022 tentang Pengesahan Kebijakan Kode Etik Perseroan tanggal 30 Desember 2022. Kebijakan Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Insan PT PII di semua level organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan.

The Code of Conduct, which has been approved via the Joint Decree of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners No. 008/SK-BOD/1222 and No. KEP-09/KOM/PII/12/2022 on the Ratification of the Company's Code of Conduct dated 30 December 2022. The Code of Conduct applies to all IIGF personnel at all levels of the organization, starting from the Board of Commissioners, Directors, and the Company's employees.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kebijakan Kode Etik

Socialization and Dissemination of Code of Conduct

Kebijakan Kode Etik Perseroan diungkapkan dan/atau disebarkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Perseroan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua karyawan dengan mudah setiap saat. Untuk karyawan baru, sosialisasi Kebijakan Kode Etik Perseroan dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pengenalan kepada karyawan baru dengan pembahasan mengenai Kebijakan Kode Etik serta menyediakan materi tertulis baik melalui email atau dokumen elektronik lainnya yang berisi informasi tentang Kode Etik Perseroan yang didistribusikan kepada mereka.

The Company's Code of Conduct is disclosed and/or disseminated to all parties in the Company through various communication channels owned by the Company, including by means of information technology accessible by all employees at any time. For new employees, the socialization of the Company's Code of Conduct is carried out by organizing introduction activities for new employees, discussing the Code of Conduct and providing written materials, either via email or other electronic documents containing information about the Company's Code of Conduct distributed to them.

Adapun untuk sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal, hal tersebut disampaikan dalam bentuk diseminasi informasi pada media sosial Perseroan mengenai komitmen dan kebijakan Perseroan, mengunggah dokumen Kebijakan melalui *website* Perseroan, ataupun surat dan bentuk sosialisasi lain yang disampaikan kepada mitra usaha/*vendor* atau pemangku kepentingan melalui media komunikasi yang ada ataupun melalui klausul dalam perjanjian/kontrak.

External stakeholders are socialized through the publication of information about the Company's commitments and policies on its social media platforms, uploading the Code of Conduct on the Company's website, or letters and other forms of socialization delivered to business partners/vendors or stakeholders via existing communication media, or clauses in agreements/contracts.



Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik Enforcement of the Code of Conduct

Untuk mewujudkan perilaku Insan PT PII yang berlandaskan etika bisnis, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan, antara lain melalui:

1. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap langkah Perseroan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbaharui setiap awal tahun;
2. Untuk karyawan baru, Perseroan memberikan pedoman Kode Etik Perseroan dan menegaskan kewajiban mereka untuk menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan; dan
3. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan Peraturan Perusahaan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Upaya penegakan Pedoman Perilaku dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Insan PT PII yang diperbaharui setiap tahun.
2. Sosialisasi melalui saluran komunikasi yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua karyawan dengan mudah setiap saat.
3. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
4. Pelaporan Daftar Khusus (Kepemilikan saham) Dewan Komisaris dan Direksi
5. Pelaporan Gratifikasi kepada KPK
6. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
7. Mengungkapkan saluran pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada *website* Perseroan
8. Memberikan sanksi tegas bagi Insan Perseroan yang terbukti melanggar Kode Etik Perseroan.

In order to ensure that IIGF employees behave in a way that aligns with corporate ethics, many strategic initiatives are implemented, including:

1. The commitment of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Employees to implement Good Corporate Governance in every Company's step is stated in the Integrity Pact, which is renewed at the beginning of each year.
2. For new employees, the Company provides guidance on the Code of Conduct and confirms their obligation to sign a commitment to compliance with the Company's Code of Conduct.
3. Exemplary leadership by having attitudes and behaviours that do not conflict with the Company's policies and regulations in regards to Good Corporate Governance.

Enforcement of the Code of Conduct are organized in various ways:

1. Signing of the Integrity Pact by all IIGFT's personnel, renewed annually.
2. Socialization through the Company's communication channels, including via information technology that is easily accessible by all employees at all times.
3. State's Official Wealth Report (LHKPN)
4. Report of Shareholdings of the Board of Commissioners and the Board of Directors
5. Gratification Report to KPK
6. Establishment of Gratification Control Unit
7. Disclosing the Whistleblowing System on the Company's website
8. Imposing strict sanctions for the Company's personnel who are proven to have violated the Company's Code of Conduct.

Sanksi dan Pelaporan Sanctions and Reporting

Dalam hal terdapat pelanggaran Kebijakan Kode Etik, Insan Perseroan ataupun pihak lainnya berkewajiban melaporkan setiap indikasi terjadinya perilaku yang melanggar Kebijakan Kode Etik Perseroan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) sebagaimana dimaksud dalam kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran Perseroan.

Perseroan menghormati hak membela diri dari Insan Perseroan yang diduga melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

In the event of a violation of the Code of Conduct, the Company's personnel or other parties shall report any indication of behavior that violates the Company's Code of Conduct to the Whistleblowing Management Team (TP3) as referred to in the policy related to the Company's whistleblowing system.

The Company respects the right of self-defense of the Company's employees who are suspected of committing violations and respects their explanations for consideration in determining the form of disciplinary consequences to be imposed.



Apabila berdasarkan proses investigasi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan terbukti bahwa Insan Perseroan yang dilaporkan melakukan pelanggaran, maka Insan Perseroan tersebut akan diberikan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pihak yang berwenang di dalam Perseroan akan mengenakan sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana atas pelanggaran Kebijakan Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran Lisan;
2. Surat Peringatan Pertama (SP-I);
3. Surat Peringatan Kedua (SP-II);
4. Surat Peringatan Ketiga (SP-III); hingga
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perseroan menyediakan fasilitas saluran pelaporan pelanggaran melalui:

- a. *Website* Perseroan dengan alamat <https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran>
- b. Surat, dengan alamat sebagai berikut:
Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
- c. *Email* : pelaporan@iigf.co.id
- d. Kotak Surat Pelaporan di lingkungan kantor Perseroan.

Mekanisme penanganan pelanggaran Kebijakan Kode Etik dilaksanakan mengacu pada Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

Based on the investigation process in accordance with the prevailing Company's provisions, if it is proven that the Company's employees have committed violations, such Company's employees shall be given sanctions in accordance with the level of violation. The Company's authorities will impose sanctions in accordance with those stipulated in the Company's Regulations or the provisions of the prevailing laws and regulations, which, for violations of this Code of Conduct may be subject to sanctions in the form of:

1. Verbal Warning;
2. Warning Letter I (SP I);
3. Warning Letter II (SP II).
4. Warning Letter III (SP-III); up to
5. Termination of Employment (PHK).

The Company provides violation reporting channel via:

- a. The Company's website at <https://ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran>
- b. Mail, to the following address:
Whistleblowing Management Team
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place Building, 7th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
- c. Email : pelaporan@iigf.co.id
- d. Reporting Mailbox in the Company's office

The mechanism for handling violations of the Code of Conduct is organized with reference to the Company's Whistleblowing System Policy.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Beserta Sanksi yang Diberikan Code of Ethics Violations and Imposed Sanctions

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak mencatat adanya pelanggaran atas kode etik maupun sanksi yang diberikan, hal ini mencerminkan tingginya pemahaman para karyawan akan pentingnya kode etik.

In 2023, the Company did not record any violations of the code of conduct or imposed sanctions. This reflects employees' good understanding of the importance of the code of conduct.



Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Policy on Providing Performance-Based Long-Term Compensation To Management and/or Employees

Hingga akhir tahun 2023, PT PII belum menerapkan skema kompensasi berbasis jangka panjang kepada Manajemen dan/atau Karyawan karena kondisi Perseroan saat ini tidak mendukung penerapan skema tersebut. Hal ini disebabkan karena saham PT PII sepenuhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, PT PII tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) atau oleh manajemen (*Management Stock Option Program/MSOP*). Dengan demikian, tidak tersedia informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga pelaksanaan (*exercise*).

As of the end of 2023, IIGF has not implemented any long-term based compensation scheme for the Management and/or Employees, as the Company's current condition does not support the implementation of such scheme. This is because IIGF's shares are fully (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, IIGF does not have an Employee Stock Option Program (ESOP), or a Management Stock Option Program (MSOP). Hence, there is no information related to the total share of ESOP/MSOP and its realization, time frame, eligible employee and/or management requirements, and the exercise price.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

PT PII telah merumuskan kebijakan yang berfokus pada Pencegahan Korupsi, yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan yaitu yang diatur dalam berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi;
2. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
3. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
4. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Kebijakan ini mencakup serangkaian program dan prosedur untuk memastikan integritas, kepatuhan, dan keberlanjutan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, PT PII juga telah merancang suatu program dan atau prosedur yang komprehensif dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan Perseroan. Program ini dibuat dengan tujuan menggalang komitmen bersama serta memastikan bahwa setiap elemen Perseroan terlibat aktif dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi dan gratifikasi.

IIGF has formulated a policy that focuses on Corruption Prevention, stipulated in the company's internal policies in various policies as follows:

1. Gratification Control Policy;
2. Anti-Bribery Management System (SMAP) Guidelines;
3. State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines;
4. Whistleblowing System Policy.

These policies include a set of programs and procedures to ensure the integrity, compliance, and sustainability of good corporate governance principles. In addition, IIGF has also designed a comprehensive program and/or procedure to support the eradication of corruption within the Company. This program was created to drive joint commitment and ensure that every element of the Company is actively involved in preventing and eradicating corruption and gratification practices.



Program dan Prosedur Pencegahan Korupsi

Corruption Prevention Programs and Procedures

Berikut serangkaian program PT PII dalam rangka mencegah dan memberantas praktik-praktik korupsi:

1. **Sosialisasi dan Pelatihan:** Perseroan menyelenggarakan program pelatihan dan sosialisasi rutin untuk seluruh karyawan agar memahami risiko korupsi, serta mengetahui tindakan pencegahan yang harus diambil.
2. **Kode Etik dan Kebijakan Internal:** Perseroan memiliki Kode Etik yang jelas dan kebijakan internal terkait pemberantasan korupsi. Dokumen-dokumen ini memberikan panduan dan norma-norma perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi.
3. **Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Pelapor:** Implementasi mekanisme pengaduan yang dapat diakses dengan mudah dan memberikan perlindungan bagi pelapor. Langkah-langkah konkret untuk memastikan kerahasiaan dan tanpa retribusi terhadap pelapor yang melaporkan diberlakukan.
4. **Audit dan Pemeriksaan Internal:** Perseroan rutin melakukan audit dan pemeriksaan internal untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi, mengevaluasi efektivitas kontrol internal, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. **Sanksi dan Tindakan Disipliner:** Penetapan sanksi dan tindakan disipliner yang jelas terhadap pelanggaran kebijakan anti korupsi. Langkah-langkah ini memberikan sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas.
6. **Komitmen Pemimpin dan Penyelenggara:** Pemimpin organisasi dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program anti korupsi menunjukkan komitmen tinggi dan memberikan contoh melalui perilaku dan keputusan mereka.

The following are a series of IIGF's programs to prevent and eradicate corrupt practices:

1. **Dissemination and Training:** The Company conducts regular training and socialization programs for all employees to understand the risks of corruption, as well as the preventive measures to be taken.
2. **Code of Conduct and Internal Policy:** The Company has a clear Code of Conduct and internal policies related to corruption eradication. These documents provide guidance and norms of behavior expected of all members of the organization.
3. **Complaint Mechanism and Whistleblower Protection:** A grievance mechanism that is easily accessible and provides protection for whistleblowers. Concrete measures to ensure confidentiality and no retribution against whistleblowers are enforced.
4. **Audit and Internal Audit:** The Company regularly conducts internal audits and controls to identify potential corruption risks, evaluate the effectiveness of internal controls, and ensure compliance with established policies and procedures.
5. **Sanctions and Disciplinary Actions:** The establishment of clear sanctions and disciplinary actions against violations of anti-corruption policies. These measures strongly signal that corrupt practices will not be tolerated and will be dealt with firmly.
6. **Commitment of Leaders and Organizers:** Organizational leaders and those involved in implementing the anti-corruption program shall demonstrate high commitment and set an example using their behaviour and decisions.

Sosialisasi dan Pelatihan Anti Korupsi

Anti-Corruption Socialization and Training

Dalam memberikan pemahaman dan pembekalan pengetahuan mengenai Korupsi beserta turunannya, Perseroan memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi karyawan PT PII. Sosialisasi terkait Anti Korupsi dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 berupa Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Adapun pelatihan yang diberikan kepada Insan PT PII terkait Anti Korupsi dilakukan melalui *Talkshow* Forum GRC-Membangun Budaya Organisasi/Perusahaan dalam mencegah Korupsi dan Penyusupan, dengan peserta Insan Perseroan serta perwakilan dari *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan tanggal 4 Desember 2023.

In providing understanding and provision of knowledge about Corruption and its derivatives, the Company provides training and socialization for IIGF employee. Socialization related to Anti-Corruption was held on 12 October 2023 in the form of the Socialization of Gratification Control Policy and Whistleblowing System Policy. IIGF provided training to the personnel related to Anti-Corruption via the GRC Forum Talkshow - Establishing an Organization/Company Culture in Preventing Corruption and Bribery, with participants from the Company's personnel and representatives from the Ministry of Finance's Special Mission Vehicles (SMVs) on 4 December 2023.



Laporan Insiden Korupsi Tahun 2023

Corruption Incident Report in 2023

Hingga akhir 31 Desember 2023, tidak terdapat insiden korupsi yang dilakukan oleh Insan PT PII sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

As of the end of 31 December 2023, there were no incidents of corruption committed by IIGF personnel, as reflected in the following table:

Jenis Insiden Incident Type	Jumlah insiden Number of incidents
Insiden Korupsi Corruption	Nihil None
Insiden Korupsi yang Terbukti yang Mengakibatkan Karyawan Diberhentikan atau Dihukum Karena Korupsi Proven Incidents of Corruption that Result in Employees Being Dismissed or Convicted of Corruption	Nihil None
Insiden Korupsi yang Terbukti yang Mengakibatkan Kontrak Dengan Mitra Bisnis Diakhiri atau Tidak Diperbarui Proven Incidents of Corruption that Resulted In Contracts with Business Partners Being Terminated or Not Renewed Due to Corruption-Related Offenses	Nihil None

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Policy

Program Pengendalian Gratifikasi Perseroan diterapkan sejalan dengan penegakan Kode Etik Perseroan dan menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan selalu mengedepankan pengelolaan Perseroan yang amanah, serta menjunjung tinggi prinsip transparan dan akuntabilitas sehingga memastikan pengelolaan usaha yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penerapan kebijakan gratifikasi ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai GCG utama Perseroan, yakni *integrity* dan *transparency*. kepada seluruh karyawan agar timbul pemahaman untuk menjalankan tugasnya sesuai etika bisnis terbaik, rasa saling percaya dan tanggung jawab saat berinteraksi dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan.

Guna mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan yang bersih, sehat dan akuntabel, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang terakhir dimutakhirkan pada tahun 2023. Kebijakan tersebut mengatur lebih lanjut penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan.

The Company's Gratification Control Program is implemented in line with the enforcement of the Company's Code of Conduct, and is a vital part of implementing good corporate governance. The Company prioritizes trustworthy management of the Company, and upholds the principles of transparency and accountability to ensure business management that is free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN). The gratification policy is implemented to instill the Company's main GCG values, i.e., integrity and transparency, to all employees. Therefore, there is an understanding to carry out their duties according to the best business ethics, mutual trust, and responsibility, when interacting with customers, vendors, partners, and all stakeholders.

The Company's Board of Directors and Board of Commissioners issued a Gratification Control Policy, which was lastly updated in 2023 to realize a clean, healthy, and accountable management of the Company's business. The policy further regulates the gratification control implementation within the Company.

Media Pelaporan Gratifikasi

Gratification Reporting Media

Pelaporan gratifikasi Perseroan dapat dilakukan melalui media *email* kepada Unit Pengendalian Gratifikasi dengan alamat: up.gratifikasi@iigf.co.id

The Company's gratification reporting can be conducted through email to the Gratification Control Unit at up.gratifikasi@iigf.co.id



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Socialization

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen di antara seluruh Insan Perseroan untuk mendukung penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Perseroan telah melakukan sosialisasi atas kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan baik melalui kegiatan tatap muka maupun dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada di Perseroan. Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan diseminasi atas program pengendalian gratifikasi kepada seluruh karyawan dengan menggunakan media komunikasi internal (*email* dan *yammer*), serta melakukan sosialisasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi secara tatap muka baik yang dilaksanakan dalam program pengenalan kepada karyawan yang baru bergabung di PT PII maupun kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan bersamaan dengan Sosialisasi Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dilakukan juga kepada pemangku kepentingan melalui unggahan komitmen pengendalian Gratifikasi Perseroan dalam media sosial Perseroan.

To build awareness and commitment of the Company's personnel to support the Gratification Control Guidelines implementation, the Company has disseminated the gratification control policy to the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees, through face-to-face activities and by utilizing existing communication media in the Company. In 2023, the Company disseminated the gratification control program to all employees using internal communication media (email and yammer), and conducting face-to-face socialization of the Gratification Control Policy, in the introduction program for employees who have just joined IIGF, and to all employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners, in conjunction with the Socialization of the Whistleblowing System Policy.

Socialization of Gratification Control is also conducted to stakeholders by uploading the Company's Gratification control commitment on the Company's social media.

Laporan Pengendalian Gratifikasi 2023

Gratification Control Report in 2023

Selama tahun 2023, Perseroan menerima 10 laporan gratifikasi dengan rincian sebagai berikut:

In 2023, the Company received 10 gratification reports with the following details:

Jenis Laporan Gratifikasi Type of Gratification Report	Jumlah Laporan Total Reports	Status Laporan Status Reports
Penolakan Refusal	-	
Penerimaan Admission	10	
- Makanan Meals	6	Diserahkan kepada Panti Sosial dan Tenaga Alih Daya Perseroan Handed over to social centers and outsourced workers of the Company
- Alat Ibadah Worship Equipment	1	Diserahkan untuk dimanfaatkan di Masjid terdekat Handed over to be utilized at the nearest Mosque
- Honorarium Narasumber Honorarium for Speakers	3	Ditetapkan menjadi Milik Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Declared by the Corruption Eradication Commission to be State Property
Jumlah Laporan Gratifikasi Total of Gratification Reports	10	

Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Anti-Bribery Management System (ABMS) Guidelines

Sebagai bentuk komitmen atas anti korupsi dan anti penyuapan, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Inisiasi Penerapan SMAP di PT PII telah dimulai sejak tahun 2021 pada standar yang berlaku, yaitu SNI ISO 37001:2016.

As a form of commitment to anti-corruption and anti-bribery, the Company implements an Anti-Bribery Management System (ABMS). ABMS has been initiated at IIGF since 2021 on the applicable standard, i.e., SNI ISO 37001:2016.



Pada tahun 2022, Perseroan melaksanakan proses sertifikasi SMAP, dan pada tanggal 30 Maret 2022 Perseroan mendapatkan sertifikat penerapan SMAP dari PT Chesna yang berlaku hingga tanggal 29 Maret 2025. Sertifikat SMAP yang telah diperoleh Perseroan adalah untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa.

Dalam upaya mempertahankan Sertifikasi ISO 37001:2016, pada tanggal 28 Maret 2023, Perseroan melaksanakan Audit *Surveillance* I. Audit *surveillance* dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan senantiasa berkomitmen menerapkan dan memelihara SMAP secara konsisten dan sesuai dengan sasaran SMAP yang ditetapkan, sehingga Perseroan dapat mempertahankan sertifikasi SMAP dalam lingkup pengadaan barang dan jasa.

Untuk memastikan efektivitas penegakan kebijakan tersebut, Perseroan secara berkala mensosialisasikan kebijakan anti korupsi dan anti penyuapan. Perseroan juga memanfaatkan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan mengajak dan menghimbau seluruh insan Perseroan untuk mendukung upaya pencegahan penyuapan dengan menunjukkan sikap integritas tinggi dan komitmen menjalankan prinsip 4 No's, yaitu *No Bribery*, *No Kick Back*, *No Indecent Gifts*, dan *No Luxurious Hospitality*.

In 2022, the Company carried out the ABMS certification process. On 30 March 2022, the Company received a certificate of ABMS from PT Chesna, which is valid until 29 March 2025. The Company obtained an ABMS certificate for the scope of Procurement of Goods and Services.

In an effort to maintain ISO 37001:2016 Certification, on 28 March 2023, the Company conducted a Surveillance Audit I. The surveillance audit was conducted to ensure that the Company is always committed to implementing and maintaining ABMS consistently and in accordance with the ABMS objectives set forth. Therefore, the Company can maintain SMAP certification in the procurement of goods and services.

The Company regularly disseminates its anti-corruption and anti-bribery policies to ensure the effectiveness of policy enforcement. The Company also seize the commemoration of World Anti-Corruption Day by inviting and calling on all Company personnel to support bribery prevention by demonstrating high integrity and commitment to the 4 No's principle, i.e., No Bribery, No Kick Back, No Indecent Gifts, and No Luxurious Hospitality.

Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). State's Official Wealth Report (LHKPN) Guidelines.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah merumuskan pedoman mengenai pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur dalam Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Perseroan yang dimutakhirkan pada tahun 2021.

Ketentuan tersebut mengatur secara jelas mengenai karyawan Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaan, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

As a State-Owned Enterprise, the Company has formulated guidelines regarding the State Official Wealth Report (LHKPN), which is regulated in the Company's State Official Wealth Reporting Guidelines updated in 2021.

The provisions regulate clearly the Company's employees who shall report their assets, the procedures for submission, the managing work unit, and sanctions that shall be imposed on employees who do not carry out their reporting obligations.

Pengelola LHKPN LHKPN Management

Pelaksanaan pemantauan dan koordinasi terkait dengan LHKPN di lingkungan Perseroan dilakukan oleh Unit Pengelola LHKPN atau UPL yang dikelola oleh divisi yang membidangi fungsi Sumber Daya Manusia. UPL terdiri dari Koordinator UPL dan Administrator Instansi dan/atau Administrator Unit Kerja. Tugas Koordinator UPL dalam hal ini meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN para wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN.

The monitoring and coordination related to LHKPN within the Company is carried out by the LHKPN Management Unit or UPL, managed by the division in charge of the Human Resources function. UPL consists of the UPL Coordinator and Agency Administrator and/or Administrator Working Unit. The tasks of the UPL Coordinator in this case include:

1. Coordinating with the Corruption Eradication Commission (KPK) related to monitoring and evaluation of compliance with the fulfillment of LHKPN report obligations of LHKPN personnel who shall report and announce LHKPN.



2. Mengingatkan wajib lapor untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
3. Memantau Admin Instansi dan/atau Admin Unit dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor;
4. Memberikan atau melaksanakan koordinasi terkait pendampingan atau konsultasi penggunaan aplikasi untuk pengisian LHKPN bagi wajib lapor.
5. Melaporkan kepada pimpinan tertinggi Perseroan mengenai adanya wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau terlambat menyampaikan LHKPN untuk mendapatkan arahan; dan
6. Membuat laporan pelaksanaan penyampaian LHKPN secara periodik berdasarkan Tanda Terima yang disampaikan oleh wajib lapor.

Admin Instansi dan/atau Admin Unit Kerja memiliki tugas :

1. Sebagai data entry yaitu melakukan pemutakhiran data Wajib Lapor;
2. Sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib Lapor yang dilakukan oleh Admin Unit;
3. Memberikan himbauan atau sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib Lapor;
4. Mengaktifkan akun sehingga Wajib Lapor dapat menggunakan modul *e-Filling*;
5. Membuat Akun Admin Unit apabila dibutuhkan; dan
6. Melakukan pengarsipan dokumen tanda terima Wajib Lapor.

Wajib Lapor Mandatory Reporters

Sesuai kebijakan, Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan dengan pangkat *Executive Vice President* atau lebih tinggi.

Sanksi atas Kelalaian Pelaporan LHKPN Sanctions for Failure to Report LHKPN

Sejalan dengan Pedoman LHKPN, bagi Wajib Lapor yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kekayaannya diberikan sanksi diantaranya mengacu pada Peraturan Perusahaan maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Laporan LHKPN LHKPN Report

Pada tahun 2023, UPL telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada karyawan melalui *email* berupa dokumen sosialisasi dan link video *tutorial* pengisian laporan via e-lhkpn.

2. Reminding the LHKPN reporters to comply with the obligation to submit and announce LHKPN;
3. Monitoring the Agency Administrator and/or Unit Administrator in managing mandatory data reporting;
4. Providing or coordinating assistance or consultation on the use of applications for filling out LHKPN for mandatory reporters.
5. Reporting to the highest Company's leader the mandatory reporters who do not submit LHKPN or are late in submitting LHKPN for further direction; and
6. Delivering reports on the LHKPN reporting implementation regularly based on Receipts submitted by mandatory reporters.

The Agency Administrator and/or Working Unit Administrator has the following duties:

1. As data entry, to update the data of Mandatory Reporters;
2. As a verifier in the e-Registration module, i.e., validating the updating of Mandatory Reporting data by the Unit Administrator;
3. Providing directions or socialization related to LHKPN obligations and technical guidance on procedures for filling out LHKPN to Mandatory Reporters;
4. Activating the account so that the Mandatory Reporter can use the e-Filling module;
5. Creating a Unit Administrator Account if necessary; and
6. Filing the Mandatory Reporting receipt document.

In accordance with the policy, Mandatory Reporters of LHKPN within the Company are the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees with the rank of Executive Vice President or higher.

In line with the LHKPN Guidelines, Mandatory Reporters who are negligent in carrying out their wealth reporting obligations shall be imposed sanctions, with reference to the Company's Regulations and other provisions stipulated by authorized officials.

In 2023, UPL socialized and provided technical guidance on LHKPN to employees via email in the form of socialization documents and links to video tutorials for filling out reports via e-lhkpn.

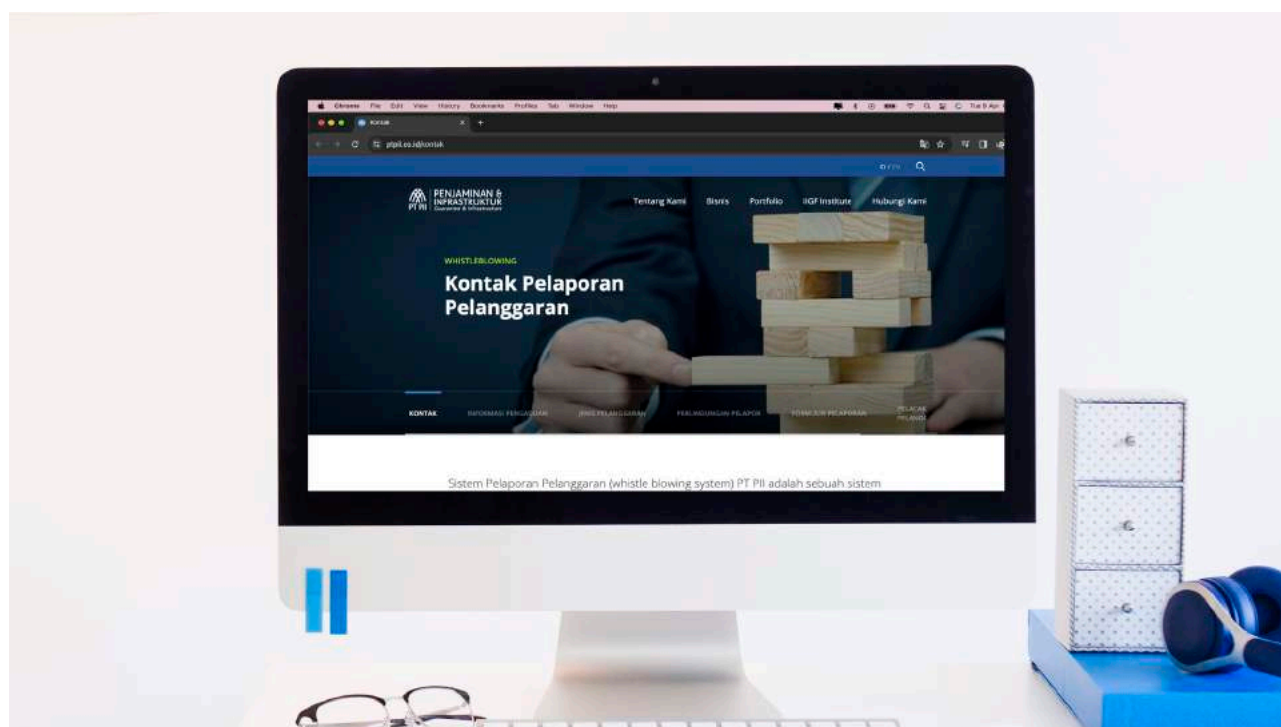


Pelaporan LHKPN yang dilaksanakan PT PII pada tahun 2023 untuk periode tahun 2023, seluruh Wajib Lapo telah melaksanakan pelaporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%. Berikut informasi Wajib Lapo yang melaporkan kekayaannya beserta jabatannya:

In 2023, IIGF carried out LHKPN reporting, and all Mandatory Reporters reported their wealth with a 100% compliance rate. The following are the Mandatory Reporters who report their wealth and their positions:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lapo Report Date
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama President Director	26 Maret 2024 26 March 2024
Andre Permana	Direktur Bisnis Business Director	28 Maret 2024 28 March 2024
Donny Hamdani	Direktur Keuangan Finance Director	21 Maret 2024 21 March 2024
Rina Widiyanti Wahyuningdyah	Komisaris Utama President Commissioner	18 Februari 2024 18 February 2024
Mariatul Aini	Komisaris Commissioner	29 November 2023 29 November 2023
Iqbal Islami	Komisaris Commissioner	28 Februari 2024 28 February 2024
Tanti Hidayati	Deputi Direktur Deputy Director	21 Februari 2024 21 February 2024
Pratomo Ismujatmika	Deputi Direktur Deputy Director	11 Maret 2024 11 March 2024
Muhammad Ridho	Deputi Direktur Deputy Director	06 Maret 2024 06 March 2024
Ria Frilina	Executive Vice President	14 Maret 2024 14 March 2024
Yunan Novaris A	Executive Vice President	18 Februari 2024 18 February 2024
Yuki Mahardhito A. W.	Executive Vice President	24 Desember 2023 24 December 2023

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System





Perseroan mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) sebagai rangkaian kebijakan Perseroan dalam memberantas terjadinya praktik korupsi, suap, dan praktik kecurangan lain serta meningkatkan komitmen manajemen terhadap implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan budaya pelaporan atas suatu penyimpangan (*fraud*), Perseroan telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran nomor CSC.003/KEB/V.02/2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 September 2023.

Berdasarkan kebijakan tersebut, penerapan WBS di lingkungan Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan panduan pelaksanaan dalam menangani Pelaporan Pelanggaran dari Insan Perseroan dan Pemangku Kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif
2. Mendorong setiap Insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, kebijakan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Insan Perseroan yang dipandang dapat merugikan dan/atau membahayakan Perseroan, baik terhadap bisnis Perseroan, keuangan, lingkungan, gedung kantor, kondisi kerja, reputasi Perseroan dan lainnya;
3. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perseroan apabila mekanisme pengendalian internal sebagaimana telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan atau diberlakukan untuk mencegah pelanggaran/penyimpangan dan/atau penyalahgunaan oleh Insan Perseroan;
4. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pelapor atas potensi hukuman, tindakan balasan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran, dengan berdasarkan itikad baik dan bukti yang memadai;
5. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas; dan
6. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan kinerja karyawan maupun organisasi.

The Company developed a Whistleblowing System (WBS) as a series of the Company's policies in combating the corrupt practices, bribery, and other fraud practices that may occurred as well as increasing management's commitment to good corporate governance and a culture of reporting fraud. The Company compiled and established a Whistleblowing System Policy No. CSC.003/KEB/V.02/2023, which was signed by the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners on 19 September 2023.

Based on the policy, WBS implementation within the Company has the following objectives:

1. Providing guidelines for handling Whistleblowing from the Company's Personnel and Stakeholders to ensure the implementation of an effective mechanism for resolving whistleblowing.
2. Encouraging all Company personnel and other Stakeholders to submit/report violations and/or deviations from the code of conduct, laws and regulations, standard operating procedures, policies, and other violations committed by Company personnel that are deemed to be detrimental and/or harmful to the Company, to the Company's business, finances, environment, office buildings, working conditions, reputation, etc.;
3. Minimizing the possibility of risks that may harm the Company if the internal control mechanism as determined cannot be implemented or enforced to prevent violations/ deviations and/or abuse by the Company's personnel;
4. Enhancing the confidence of each Company Personnel and other Stakeholders regarding the protection provided by the Company to the Whistleblower against potential punishment, retaliation, or unreasonable, and unfair treatment to the Whistleblower if the person concerned discloses the violation, based on good faith and adequate evidence;
5. Supporting the actualization of a culture of openness, accountability, and integrity; and
6. Improving the effectiveness of good corporate governance, internal control, and employee and organizational performance.



Sosialisasi WBS

WBS Information Dissemination

Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran seluruh karyawan maupun pihak terkait lainnya untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran guna meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran lain yang mungkin muncul, Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi terkait WBS baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal.

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosialisasi kepada Insan Perseroan dan para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan WBS. Kegiatan sosialisasi tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Acara (Event) Sosialisasi

a. Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (WBS)

Pada 12 Oktober 2023, Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) bersama dengan Unit Pengendali Gratifikasi mengadakan sosialisasi kebijakan gratifikasi dan WBS untuk karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Anggota TP3 hadir sebagai narasumber memaparkan poin-poin pengelolaan WBS sesuai dengan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran terbaru. Di dalam acara sosialisasi ini disampaikan pula mekanisme pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor.

b. Sharing Session SMAP

Materi yang dibahas antara lain terkait WBS, penerapan SMAP sebagai upaya pencegahan suap yang dilaksanakan pada 15 Maret 2023 dan dihadiri oleh karyawan Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris. Narasumber yang dihadirkan dalam webinar ini adalah:

- Derina (*Executive vice president* Kepatuhan PT PLN (Persero))
- Yuwono Dwisilo Sucipto (*Bendahara Umum DPP Indonesia ISO Expert Association*)
- Erry Riyana (*Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003 – 2007*).

c. Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Divisi Corporate Secretary & Communication (CSC) pada 13 Juni 2023, materi yang dibahas antara lain sistem pelaporan pelanggaran (WBS) Perseroan, pedoman perilaku dan etika bisnis dan pengendalian gratifikasi.

d. Forum Governance Risk and Compliance (GRC) 2023

Sebagai wujud komitmen dalam penerapan GCG serta dalam rangka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), pada 4 Desember 2023 tim GRC Perseroan yang merupakan gabungan antara perwakilan TP3, Divisi

The Company conducts socialization related to WBS to both internal and external parties to provide understanding and awareness to all employees and other related parties to report all forms of violations to minimize the occurrence of violations that may arise.

In 2023, the Company conducted a series of socialization with the Company's employees and stakeholders to introduce the WBS. The socialization included the following:

1. Socialization

a. Socialization of the Whistleblowing (WBS) Management System

On 12 October 2023, the Whistleblower Management Team (TP3), in collaboration with the Gratification Control Unit, held a socialization of the gratification policy and WBS for the Company's employees, the Board of Directors, and the Board of Commissioners. TP3 members were present as speakers to explain the WBS management keys in line with the latest Whistleblowing System Policy. In this socialization, the mechanism of whistleblowing and whistleblower protection were also conveyed.

b. SMAP (ABMS) Sharing Session

The material discussed included WBS, ABMS implementation as an effort to prevent bribery, and the enforcement of integrity and prevention of bribery, held on 15 March 2023, and attended by the Company's employees, Board of Directors, Board of Commissioners, and Organs of the Board of Commissioners. The speakers for the webinar were:

- Derina (*Executive Vice President of Compliance of PT PLN (Persero)*)
- Yuwono Dwisilo Sucipto (*General Treasurer of DPP Indonesia ISO Expert Association*)
- Erry Riyana (*Commissioner of the Corruption Eradication Commission (KPK) 2003–2007*)

c. Dissemination of the Code of Conduct

The socialization was organized by the Corporate Secretary & Communication (CSC) Division on 13 June 2023. The material discussed included the Company's whistleblowing system (WBS), code of conduct, business ethics, and gratification control.

d. 2023 Governance Risk and Compliance (GRC) Forum

As a form of commitment to the GCG implementation and to celebrate World Anti-Corruption Day (Hakordia), on 4 December 2023, the Company's GRC team, i.e., a combination of TP3 representatives, Corporate Secretary



Corporate Secretary and Communication (CSC), Divisi Internal Audit (IA) dan Divisi Risk Management (RM) menyelenggarakan *talkshow* Forum GRC dengan tema "Membangun Budaya Perseroan dalam Mencegah Korupsi dan Penyuapan". Acara ini dihadiri oleh karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan *stakeholders* Perseroan antara lain perwakilan Kementerian Keuangan dan *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

Talkshow dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan yaitu Bapak Awan Nurmawan Nuh (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan) dan Ibu Rina Widiyani Wahyuningdyah (Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Keuangan). Salah satu materi yang disampaikan di dalam *talkshow* antara lain terkait penerapan integritas dalam bentuk pembangunan budaya *speak up* & saling mengingatkan yang dapat mendukung berjalannya sistem WBS yang optimal. Selain itu disampaikan juga pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan pelapor di dalam Perseroan.

- e. Sosialisasi Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Sosialisasi dengan tema "Antikorupsi, Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, Benturan Kepentingan dan Sistem Pengendalian Intern" ini dilaksanakan oleh Direktorat KND Kementerian Keuangan dan diikuti oleh perwakilan karyawan Perseroan pada 9 Juni 2023, materi yang dibahas antara lain :
 - Penguatan Lini Pertama dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan
 - Anti gratifikasi dan Kesederhanaan
 - Penanganan benturan kepentingan
 - WBS Kementerian Keuangan
 - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
- f. *Vendor Gathering* 2023
Dalam upaya mensosialisasikan mekanisme WBS Perseroan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, TP3 berkoordinasi dengan Divisi Corporate Service and Communication dan Divisi Corporate Service & Procurement memasukkan poin pembahasan sosialisasi WBS Perseroan ke dalam Materi Acara *Vendor Gathering* Perseroan yang diselenggarakan pada 25 Juli 2023. Selain itu dalam pelaksanaan pengadaan, informasi terkait saluran WBS sudah disampaikan pada calon rekanan/ penyedia jasa di materi pemaparan *Aanwijzing*.
- g. Program Pengembangan Kompetensi karyawan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Pada 28 Juli 2023, perwakilan TP3 menjadi narasumber program pengembangan kompetensi karyawan dari LPEI, dalam kesempatan ini perwakilan TP3 menyampaikan mekanisme penerapan WBS di

and Communication (CSC) Division, Internal Audit (IA) Division, and Risk and Management (RM) Division, held a GRC Forum talk show with the theme "Establishing a Corporate Culture to Prevent Corruption and Bribery". The event was attended by the Company's employees, Board of Directors, Board of Commissioners and stakeholders, including representatives of the Ministry of Finance and Special Mission Vehicles (SMVs) under the Ministry of Finance.

The talk show presented speakers from the Ministry of Finance, i.e., Mr. Awan Nurmawan Nuh (Inspector General of the Ministry of Finance) and Mrs. Rina Widiyani Wahyuningdyah (Expert Staff for Law and Institutional Relations of the Ministry of Finance). One of the materials presented in the talk show included the integrity implementation in the form of encouraging a culture of speaking up & reminding each other, which supports the optimization of WBS system. In addition, the importance of strengthening regulations and whistleblower protection mechanisms within the Company was also conveyed.

- e. Socialization of Directorate of Separated State Assets (KND)
The socialization with the theme "Anti-corruption, Gratification Control, Whistleblowing System, Conflict of Interest, and Internal Control System" was held by the Directorate of KND of the Ministry of Finance, and attended by representatives of the Company's employees on 9 June 2023. The material included:
 - Strengthening the First Line to Enhance the Integrity Culture within the Ministry of Finance
 - Anti-gratification and Modesty
 - Conflict of interest handling
 - WBS of the Ministry of Finance
 - The Government Internal Control System (SPIP) within the Directorate General of State Assets Management (DGSAM)
- f. *Vendor Gathering* 2023
To disseminate the Company's WBS mechanism to a range of stakeholders, TP3, in coordination with the Corporate Service and Communication Division and Corporate Service & Procurement Division included the discussion material of the Company's WBS socialization at the Company's *Vendor Gathering* on 25 July 2023. In addition, in the procurement and information related to the WBS channel have been provided to prospective partners/service providers in the *Aanwijzing* presentation.
- g. Indonesian Export Financing Agency (LPEI) employee competency development program
On 28 July 2023, TP3 representatives became speakers for the employee competency development program from LPEI. At this event, TP3 representatives conveyed the WBS mechanism in the Company and development



Perseroan dan upaya-upaya pengembangan yang telah dilakukan dalam rangka memperkuat sistem WBS, materi dipaparkan kepada perwakilan dari LPEI antara lain Kepala Departemen dan *Team Leader*.

2. Sosialisasi Melalui *Email Blast*

Selama tahun 2023 dilaksanakan 2 (dua) sosialisasi WBS melalui email blast yaitu pada tanggal 27 Januari (*email blast* materi *corporate governance*) dan 22 Desember 2023 (*email blast* Surat Edaran Himbauan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya Keagamaan/Hari Besar Lainnya).

Sosialisasi melalui *email blast* ini dilakukan untuk menyegarkan kembali pengetahuan karyawan Perseroan terkait tata kelola, termasuk di dalamnya terkait sistem pengelolaan WBS serta himbauan apabila Insan Perseroan mengetahui adanya pelanggaran atas kebijakan pengendalian gratifikasi yang berlaku di Perseroan agar dapat menyampaikan laporan kepada TP3.

efforts conducted to strengthen the WBS system. The content was presented to representatives from LPEI, including Department Heads and Team Leaders.

2. Socialization via Email Blast

In 2023, two (2) email blasts were carried out for WBS socialization, on 27 January (email blast of corporate governance) and 22 December 2023 (email blast of Circular Letter of Appeal for Gratification Control on Religious Holidays/Other Holidays).

The dissemination in email blast was carried out to refresh the knowledge of the Company's employees regarding governance, including the WBS management system, and to appeal to the Company's employees to submit reports regarding any violations of the gratification control policy that applies in the Company to TP3.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Type of Violations to be Reported

Sejalan dengan kebijakan WBS, jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui saluran WBS meliputi pelanggaran sebagai berikut:

1. Perbuatan Pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perseroan.
2. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba dan perusakan barang.
3. Pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perseroan, misalnya Benturan Kepentingan, pelecehan serta terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
4. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sistem pengendalian internal atas laporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
5. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional Perseroan, ataupun kebijakan, prosedur, dan/atau peraturan lain yang berlaku bagi Perseroan.
6. Perilaku Insan Perseroan yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi Perseroan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.
7. Tindakan pembiaran Pelanggaran oleh Insan Perseroan yang mengindikasikan adanya keterlibatan yang bersangkutan dengan Pelanggaran tersebut.
8. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

In line with the WBS policy, the violations that can be reported via the WBS channel include the following:

1. Offenses that may cause financial or non-financial losses to the Company.
2. Violation of laws and regulations, such as signature forgery, embezzlement, markup, drug consumption, and destruction of goods.
3. Violation of the Company's Code of Conduct, such as Conflict of Interest, harassment, and involvement in prohibited community activities.
4. Violations of generally accepted accounting principles and internal control systems over financial statements that have the potential to result in material misstatements in the financial statements.
5. Violation of the Company's operational policies and procedures, or other policies, procedures, and/or regulations applicable to the Company.
6. Disgraceful behavior of the Company's personnel with the potential to tarnish the Company's reputation and/or which may result in losses to the Company.
7. Acts of omission of Violations by the Company's Personnel that indicate the involvement of the person related to the Violation.
8. Actions that endanger occupational health and safety.



Pihak Terkait Pengelola Pelaporan Pelanggaran Related Parties of Whistleblowing Management

Pihak pengelola pelaporan pelanggaran Perseroan adalah Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), Penanggung Jawab Tindak Lanjut Pelaporan (PJTL) dan Tim Investigasi Pelaporan Pelanggaran (TIPP).

TP3 adalah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Pelaporan Pelanggaran dan pelaksanaan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

PJTL terdiri atas:

1. Direktur Utama, jika Terlapor adalah karyawan;
2. Komisaris Utama, jika Terlapor adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau organ Dewan Komisaris; dan
3. Dewan Komisaris (yang dalam hal ini tidak termasuk Komisaris Utama), jika Terlapor adalah Komisaris Utama.

Adapun, TIPP adalah tim yang bertugas melakukan investigasi Pelaporan Pelanggaran yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris.

The parties responsible for the Company's whistleblowing system are the Whistleblowing Management Team (TP3), the Whistleblowing Reporting Follow-up Team (PJTL), and the Whistleblowing Investigation Team (TIPP).

TP3 is a team responsible for the Whistleblowing system management and the Whistleblowing System Policy implementation, whose members are determined via a Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

PJTL consists of:

1. President Director, if the Reported Party is an employee;
2. President Commissioner, if the Reported Party is a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an organ of the Board of Commissioners; and
3. Board of Commissioners (in this case, the Board of Commissioners does not include the President Commissioner) if the Reported Party is the President Commissioner.

Meanwhile, TIPP is a team in charge of investigating Violation Reports whose members are set forth using a Decree of the Board of Directors and/or a Decree of the Board of Commissioners.

Mekanisme Penyampaian Laporan Reporting Submission Mechanism

1. Tata cara penyampaian laporan atas terjadinya penyimpangan/Pelanggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Pelapor menyampaikan dugaan Pelanggaran secara tertulis kepada Perseroan melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang dikelola oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3).
 - b. Apabila Pelapor menarik kembali Laporan yang telah dilakukan, maka Pelapor wajib memberikan alasan terkait pembatalan Pelaporan dimaksud.
2. Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat berupa keterangan tertulis, dokumen, foto, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan Pelaporan Pelanggaran dan harus memenuhi kriteria Pelaporan sebagaimana diatur di dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

1. The procedure for submitting reports on the occurrence of irregularities/violations is as follows:
 - a. The Whistleblower submits the alleged Violation in writing to the Company by the reporting channel established by the Company, which is managed by the Whistleblower Management Team (TP3).
 - b. If the Whistleblower withdraws the Report that has been submitted, the Whistleblower shall provide reasons related to the cancellation of such Report.
2. The submitted Violation Report shall be equipped with supporting evidence, which may be in the form of written statements, documents, photos, and other evidence related to the Violation, and shall meet the Reporting criteria as stipulated in the Whistleblowing Reporting System Policy.



Saluran Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing Channel

Perseroan menyediakan fasilitas saluran Pelaporan Pelanggaran melalui:

1. Melalui *website* Perseroan, dengan alamat *website*: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Menyampaikan surat yang ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) Perseroan, dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
U.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18
Jakarta 12710 – Indonesia
3. Email: pelaporan@iigf.co.id.
4. Kotak Surat Masuk TP3 di lingkungan Perseroan.

The Company provides Whistleblowing channel facilities via:

1. The Company's *website*, at: www.ptpii.co.id/pelaporan-pelanggaran
2. Sending a letter addressed to the Company's Whistleblower Management Team (TP3), at the following address:

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
U.p Whistleblowing Management Team Capital Place Building, 7th Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.18
Jakarta 12710 – Indonesia
3. Email: pelaporan@iigf.co.id.
4. TP3 Inbox in the Company

Perlindungan Bagi Pelapor dan Terlapor Protection for Whistleblowers and Reported Parties

Perseroan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua Pelapor yang menginformasikan kejadian Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Perlindungan kepada Terlapor diberikan dengan berlandaskan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, Perseroan dapat bekerja sama dengan lembaga yang berwenang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Identitas Pelapor dijaga kerahasiaannya oleh Perseroan.
2. Perseroan memberikan perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi/tekanan dalam segala bentuk, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan Pelanggaran yang diajukan kepada pihak manapun
3. Perlindungan dan kerahasiaan diberikan kepada Pelapor yang beritikad baik, terhitung sejak pengaduan disampaikan sampai dengan pengaduan selesai ditindaklanjuti
4. Apabila Pelapor sendiri yang menyebarluaskan pengaduannya ke pihak lainnya yang mengakibatkan adanya risiko terungkapnya kerahasiaan Pelapor, maka akan menghilangkan hak atas perlindungan yang diterima dari Perseroan.
5. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

The Company has a clear and impartial commitment to support and protect all Whistleblowers who inform the Violation events that occur within the Company. The Whistleblower is protected based on the principle of presumption of innocence. In the event that there are indications of a criminal offense, the Company may cooperate with institutions authorized to protect witnesses and victims, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

Whistleblower's protection is in the form of:

1. The Company keeps the Whistleblower's identity confidential.
2. The Company provides protection to the Whistleblower from all forms of threats, intimidation/pressure, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported Violation.
3. Protection and confidentiality are provided to Whistleblowers who are in good faith, starting from the time the complaint is submitted until the complaint has been followed up.
4. If the Whistleblower himself/herself disseminates the complaint to other parties, which results in the risk of disclosure of the Whistleblower's confidentiality, the Company eliminates the Whistleblower's right to protection.
5. The Whistleblower's protection also applies to parties who carry out investigations and parties who provide information related to the complaint.



Perseroan juga memberikan perlindungan kepada Pelapor yang merupakan Insan Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pemecatan yang tidak adil;
2. Penurunan jabatan atau pangkat;
3. Pelecehan dan/atau diskriminasi; dan/atau
4. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Pelapor yang tidak berkenan identitasnya dipublikasikan, akan dijaga kerahasiaan identitas pribadinya, sesuai dengan jenis Pelanggaran yang dilaporkan. Dalam keadaan pelaporan sampai ke pengadilan atau kemungkinan proses hukum yang memerlukan identitas Pelapor, maka pembukaan identitas Pelapor dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelapor dan merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain perlindungan di atas, Perseroan juga dapat memfasilitasi perlindungan kepada Pelapor dan/atau keluarga inti Pelapor melalui aparat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila diperlukan.

Perseroan memberikan perlindungan kepada Terlapor melalui:

1. Kerahasiaan identitas Terlapor selama proses verifikasi dan Investigasi Pelaporan Pelanggaran.
2. Hak untuk membela diri dengan menyampaikan keterangan, saksi dan/atau bukti.
3. Hak mendapatkan informasi mengenai status kelanjutan proses dan hasil dari Investigasi.
4. Pemulihan reputasi dan nama baik Terlapor dalam hal berdasarkan hasil Investigasi Terlapor tidak dapat dibuktikan melakukan Pelanggaran.

The Company also provides protection to the Whistleblower who is a Company's employee for the following matters:

1. Unfair dismissal;
2. Demotion of rank;
3. Harassment and/or discrimination; and/or
4. Adverse records in the personal file record.

Whistleblowers who do not wish to have their identity published will have their personal identity kept confidential, in accordance with the type of Violation reported. In the event of reporting to the court or there is a possibility of a legal process that requires the Whistleblower's identity, the Whistleblower's identity shall be disclosed with prior notice to the Whistleblower and shall refer to the provisions in the prevailing laws and regulations. In addition to the above protection, the Company may also facilitate protection to the Whistleblower and/or the Whistleblower's immediate family utilizing the authorized apparatus based on prevailing laws and regulations, if necessary.

The Company protects the Reported Party by means of:

1. Confidentiality of the Reported Party's identity during the verification process and Whistleblowing Investigation.
2. The right to defend themselves by submitting testimony, witnesses, and/or evidence.
3. The right to obtain information regarding the status of the process continuation and the Investigation results.
4. Restoration of the reputation and good name of the Reported Party if the Investigation of the Reported Party resulted in no evidence of Violation event.

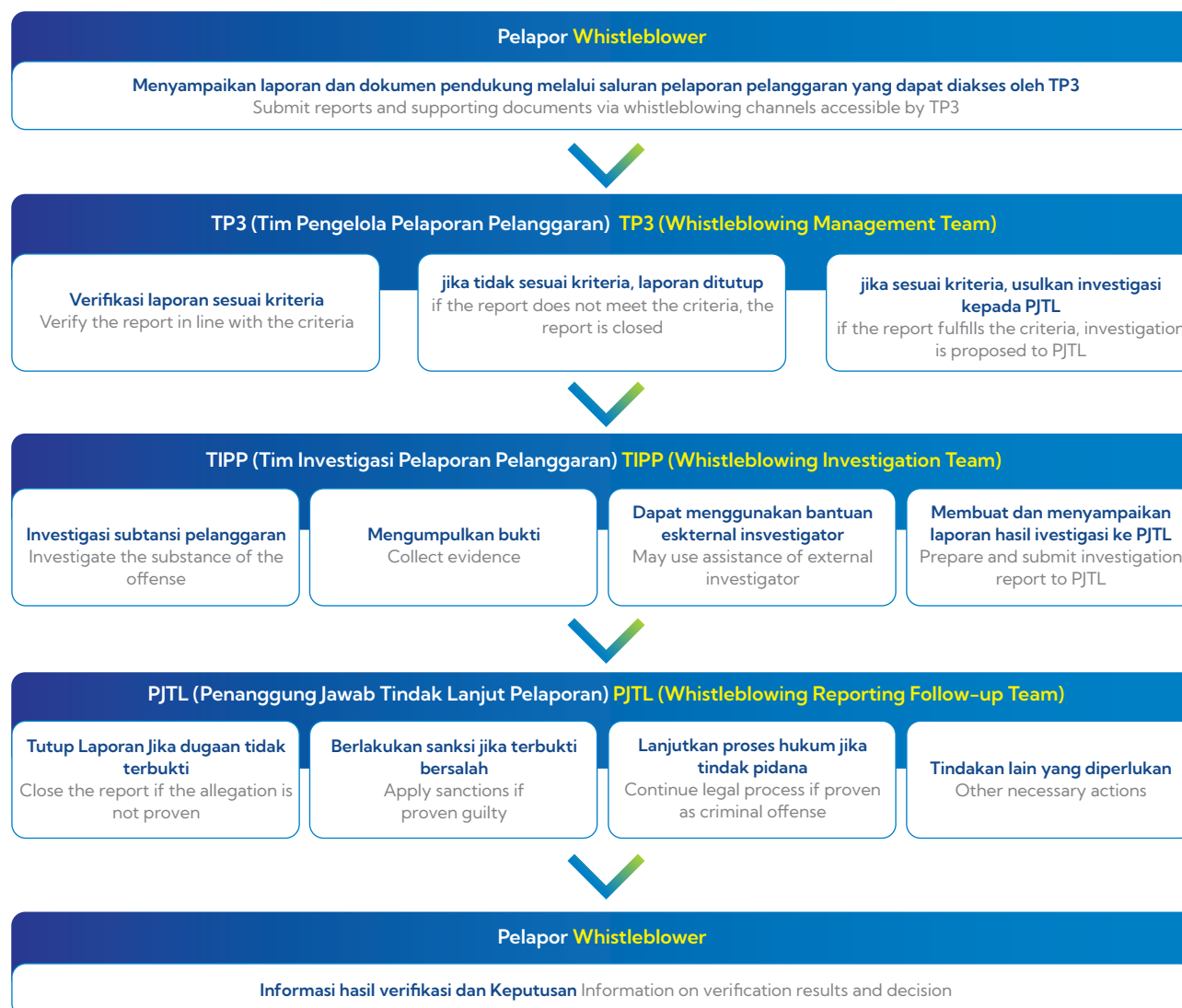




Penanganan Pelaporan Pelanggaran Complaint Handling

Berikut alur skema penanganan pelaporan pelanggaran Perseroan:

The following is a flowchart of the Company's customer complaint-handling scheme:



Penjelasan:

- Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini disampaikan melalui Saluran Pelaporan Pelanggaran yang dapat diakses oleh seluruh anggota TP3.
- TP3 melakukan verifikasi Pelaporan Pelanggaran yang diterima sesuai kriteria pelaporan. Apabila Pelaporan Pelanggaran tidak sesuai dengan kriteria, maka tidak perlu dilakukan Investigasi dan akan dilakukan penghentian penanganan pelaporan. Jika memenuhi kriteria pelaporan, TP3 mengusulkan kepada PJTL untuk dilakukan investigasi atas Pelaporan Pelanggaran oleh TIPP
- TIPP melakukan Investigasi terhadap substansi Pelanggaran yang dilaporkan serta mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi Pelanggaran. Dalam menjalankan tugasnya TIPP dapat menggunakan bantuan External Investigator. TIPP membuat dan menyampaikan laporan hasil Investigasi kepada PJTL serta fungsi kepatuhan anti penyuapan dan/atau fungsi kepatuhan lainnya yang terkait untuk melakukan investigasi lanjutan.
- Dari laporan hasil Investigasi/Investigasi lanjutan, PJTL menetapkan keputusan atas laporan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pelaporan tersebut ditutup atau selesai, jika dugaan Pelanggaran tidak terbukti;
 - Terlapor akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan, jika Terlapor terbukti bersalah;

Description:

- The reporter submits a report in the form of a letter with the necessary supporting documents. This report is submitted via the Whistleblowing Channel accessible by all TP3 members.
- TP3 verifies the Whistleblowing Report received based on the reporting criteria. If the Whistleblower's Report does not meet the criteria, it is not necessary to investigate and TP3 will stop handling the report. If the reporting criteria are met, TP3 proposes to PJTL to investigate the Whistleblowing by TIPP.
- TIPP investigates the event of the reported Violation and seeks and collects the necessary evidence to ensure that a Violation has indeed occurred. In carrying out its duties, TIPP may use the assistance of External Investigators. TIPP prepares and submits a report on the Investigation results to PJTL and the anti-bribery compliance function and/or other relevant compliance functions to conduct further investigations.
- From the Investigation/Further Investigation result, PJTL decides on the offense violations under the following conditions:
 - The report is closed or completed, if the alleged Violation is not proven;
 - The Reported Party will be subject to sanctions in accordance with the Company's prevailing provisions, if the Reported Party is found guilty;



- c. Pelaporan tersebut akan diteruskan kepada penyidik/pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana umum dan/atau korupsi; dan/atau
- d. Sanksi atau tindak lanjut lainnya yang dipandang perlu.
5. Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai hasil verifikasi dan keputusan akhir atas Pelaporan Pelanggaran.

- c. The report will be forwarded to the investigator/authorized party for further processing in accordance with the prevailing provisions and regulations, if there is evidence indicating that the Violation is related to general criminal offenses and/or corruption; and/or
- d. Sanctions or other follow-up deemed necessary.
5. The Whistleblower has the right to obtain information regarding the verification results and the final decision on the Whistleblowing.

Jumlah Laporan dan Tindak Lanjutnya Tahun 2023

Number of Reports and Follow-Up in 2023

Pada tahun 2023, Perseroan mencatat tidak terdapat pelaporan atas dugaan pelanggaran baik yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal Perseroan yang meliputi hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan.

In 2023, the Company recorded no reports of alleged violations whether categorized as acts that violate laws and regulations, related regulations/standards, and the Company's internal regulations, which include matters as stipulated in the Company's Whistleblowing System Policy

Uraian Description	2023	2022
Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir Number of complaints received in the last fiscal year	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints processed in the last fiscal year	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku terakhir Number of complaints settled in the last fiscal year	Nihil None	Nihil None
Jumlah pengaduan yang belum selesai diproses Total complaints under the follow-up process	Nihil None	Nihil None

Pengadaan Barang dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan bisnisnya, Perseroan telah menerbitkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perseroan agar dapat dilakukan secara profesional, mandiri, transparan dan bertanggung jawab dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kebijakan Perseroan dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa tertuang dalam Pedoman pengadaan Barang dan Jasa PT PII yang disahkan pada 31 Juli 2021. Pedoman ini menjadi acuan bagi Divisi Corporate Service & Procurement selaku divisi yang membidangi proses pengadaan barang dan jasa di Perseroan, dimana diantaranya memuat tujuan dan sasaran, kebijakan umum, etika pengadaan, tahapan pengadaan barang/jasa, ketentuan penerimaan barang/jasa, panel penyedia jasa konsultansi dan tanda bukti perjanjian.

Fungsi pengadaan barang dan jasa Perseroan dijalankan oleh Divisi Corporate Service & Procurement.

To fulfill its operational and business needs, the Company issued the Procurement of Goods and Services Manual with the objective of regulating the procurement of goods/services within the Company. Therefore, the procurement process can be carried out professionally, independently, transparently, and responsibly to support the acceleration of infrastructure development in Indonesia.

The Company's policy in implementing the procurement of goods and services is stipulated in the IIGF's Procurement of Goods and Services Manual approved on 31 July 2021. The Manual is a reference for the Corporate Service & Procurement Division as the division in charge of the process of procurement of goods and services in the Company, which includes goals and objectives, general policies, procurement ethics, stages of procurement of goods/services, provisions for the acceptance of goods/services, panels of consultancy service providers, and proof of agreement.

The Company's procurement of goods and services function is carried out by the Corporate Service & Procurement Division.



Sosialisasi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan

Socialization of the Company's Procurement of Goods and Services Manual

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa bagi karyawan maupun calon mitra penyedia barang dan jasa, Perseroan melakukan sosialisasi pedoman pengadaan barang dan jasa kepada karyawan. Sementara itu, sosialisasi kepada mitra dilakukan melalui pertemuan-pertemuan koordinasi dan komunikasi resmi. Selain itu, dokumen berupa Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa juga tersedia secara luas melalui *website* Perseroan di alamat www.ptpii.co.id, dapat diakses pada bagian publikasi manual kebijakan Perseroan.

The Company disseminates the procurement of goods and services manual to employees to increase understanding of the mechanism of procurement of goods and services for employees and prospective partners. The Company also disseminates to partners through coordination meetings and official communications. In addition, the document, Procurement of Goods and Services Manual is also widely available on the Company's website at www.ptpii.co.id, and is accessible in the publication section of the Company's manual.

Kegiatan Divisi Corporate Service & Procurement

Activities of the Procurement of Goods and Services Division

Selama tahun 2023, Divisi Corporate Service & Procurement telah melakukan:

1. Evaluasi dan peninjauan ulang prosedur pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan
2. Penyusunan dan pemutakhiran daftar vendor/mitra penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk proses pemilihan *vendor/mitra* penyedia yang adil dan kompetitif.
4. Pemantauan kinerja vendor/mitra penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam proyek-proyek Perseroan untuk memastikan bahwa standar kualitas dan waktu pengiriman terpenuhi.
5. Melaksanakan *vendor gathering* dalam rangka meningkatkan komunikasi antara Perseroan dengan para mitra kerja dalam hal penyampaian program-program dan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Perseroan, mendengar masukan dari mitra kerja untuk meningkatkan kinerja dalam hubungan kemitraan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, serta memberikan umpan balik atas kinerja pemasok. Pada tahun 2023, PT PII mengundang seluruh pemasok melalui *event vendor gathering* pada tanggal 25 Juli 2023

In 2023, the Corporate Service & Procurement has:

1. Evaluated and reviewed the procurement procedures to improve efficiency and transparency in the procurement process.
2. Prepared and updated a list of vendors/partners who provide goods and services in accordance with the qualification standards set by the Company.
3. Procured goods and services in accordance with established needs and requirements, including a fair and competitive vendor/partner selection process.
4. Monitoring the performance of vendors/partners in providing goods and services in the Company's projects to ensure that quality standards and delivery times are met.
5. Held a vendor gathering event as a means of increasing communication between the Company and its work partners, to convey programs and policies for the procurement of goods and/or services within the Company, hear input from working partners to improve performance in partnership relations in the procurement process of goods and/or services, as well as provide feedback on suppliers' performance. In 2023, IIGF invited all suppliers to a vendor gathering on 25 July 2023.



6. Melaksanakan kegiatan sinergi dengan *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan berupa Rapat Kerja dan *Site Visit* dalam rangka Kolaborasi antar unit Pengadaan Barang dan Jasa yang dihadiri oleh PT PII (Persero), PT SMI (Persero), PT SMF (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT LPEI pada tanggal 25-27 Oktober 2023 berlokasi di wilayah PLTP Patuha, PT Geo Dipa Energi (Persero). Hal ini menindaklanjuti MoU tentang Kerjasama Kolaborasi antar unit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan SMV di bawah Pembinaan dan Pengawasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

7. Pada akhir tahun 2023, melaksanakan survey kepuasan vendor/mitra dan pelanggan/pengguna layanan pengadaan barang/jasa PT PII dimana survey kepuasan vendor/mitra dan pelanggan/pengguna atas pelayanan PT PII (Persero) dilakukan sebagai tindak lanjut dari audit *Good Corporate Governance* (GCG).

Dari hasil survei diharapkan PT PII (Persero) dapat mengukur sejauh mana pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan harapan vendor dan pelanggan. Dan selanjutnya PT PII (Persero) dapat merumuskan strategi pelayanan yang baik untuk meningkatkan loyalitas yang berdampak pada meningkatnya pelayanan PT PII (Persero) sebagai *Fiscal Tools* Pemerintah.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan gambaran dan pendapat pelanggan dan penyedia barang/jasa terhadap pengadaan barang/jasa atas pelayanan yang telah diberikan PT PII (Persero).

a. Tingkat kepuasan vendor/mitra

1. Secara umum, 96,83% penyedia menyatakan puas selama berhubungan dengan PT PII (baik dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan).
2. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pengadaan sebesar 4,38 atau 87,54 (sangat puas).
3. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pelaksanaan 4,39 atau 87,71 (sangat puas).
4. Indeks kepuasan penyedia terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan sebesar 4,38 atau 87,62 (sangat puas).

b. Tingkat kepuasan Pelanggan

1. Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses pengadaan dan hasil barang/jasa sebesar 4,18 atau 83,57 (sangat puas).
2. Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses pengadaan sebesar 4,20 atau 84,07 (sangat puas).
3. Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses hasil barang/jasa sebesar 4,15 atau 83,06 (sangat puas).

6. Carried out synergy activities with the Ministry of Finance's *Special Mission Vehicles* (SMV) in the form of Working Meetings and Site Visits for the Collaboration between Procurement units, attended by IIGF, PT SMI (Persero), PT SMF (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT LPEI, on 25-27 October 2023 at GPP Patuha area, PT Geo Dipa Energi (Persero). The event was a follow-up on the MoU on Collaboration Cooperation between Procurement of Goods and Services units in the SMVs within the Guidance and Supervision of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

7. At the end of 2023, the Company carried out a satisfaction survey of vendors/partners and customers/users of IIGF's procurement of goods and services, this satisfaction survey of vendors/partners and customers/users of PT PII (Persero) was carried out as a follow-up to the Good Corporate Governance (GCG) audit.

IIGF shall be able to assess the extent to which the services provided are in accordance with the expectations of vendors and customers from the survey results. Further, IIGF shall formulate a good service strategy to increase loyalty, which affects the increase in IIGF's services as the Government's Fiscal Tool.

The activity has the objective of providing an overview and opinion of customers and goods/service providers on the procurement of goods/services for the services provided by IIGF.

a. Vendor/partner satisfaction level

1. Generally, 96.83% of suppliers expressed satisfaction while dealing with IIGF (both in the procurement process and the work execution).
2. The supplier satisfaction index for the procurement process was 4.38 or 87.54 (very satisfied).
3. The supplier satisfaction index for the execution process was 4.39 or 87.71 (very satisfied).
4. The supplier satisfaction index for the procurement and execution process was 4.38 or 87.62 (very satisfied).

b. Customer satisfaction survey

1. The customer satisfaction index for the procurement process and the results of goods/services was 4.18 or 83.57 (very satisfied).
2. The customer satisfaction index for the procurement process was 4.20 or 84.07 (very satisfied).
3. The customer satisfaction index for the results of goods/services was 4.15 or 83.06 (very satisfied).



Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Kreditor Creditor Rights Protection Policy

Perseroan senantiasa berupaya membina hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan para kreditor berdasarkan komitmen, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghormati, serta memberi perlakuan yang sama bagi para kreditor.

Etika Perseroan kepada kreditor diatur dalam Kebijakan Kode Etik PT PII, sejalan dengan kebijakan tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor dan menghormati hak dan kewajiban antara Perseroan dan kreditor sesuai kesepakatan berdasarkan perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran dan keterbukaan, diantaranya:

1. Berkomitmen melaksanakan klausul perjanjian dengan sebaik-baiknya.
2. Menyediakan informasi yang aktual dengan memperhatikan kebijakan penyediaan informasi yang berlaku di Perseroan.
3. Mematuhi *covenant* yang berlaku selama perjanjian, apabila ada.
4. Melakukan komunikasi dan pertukaran informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup pengadaan secara aktual, berimbang dan wajar dengan memperhatikan ketentuan terkait komunikasi yang berlaku di Perseroan.

The Company always strives to foster good relationships with all stakeholders, including with creditors based on commitment, trust, honesty and mutual respect, and provides equal treatment for creditors.

The Company's ethics to creditors are regulated in IIGF's Code of Conduct. In line with this policy, the Company is committed to fulfilling its obligations to creditors and respecting the rights and obligations between the Company and creditors in accordance with the previously agreed terms in the agreements, that promote the principles of fairness and transparency, including:

1. Commit to implementing the clauses of the agreement with best endeavors.
2. Provide actual information with due observance of the Company's information provision policy.
3. Comply with covenants applicable during the agreement, if any.
4. Communicate and exchange information required in accordance with the scope of procurement in an actual, balanced, and reasonable manner, with due regards to the provisions related to communication prevailing in the Company.

Kebijakan *Insider Trading* Insider Trading Policy

Kebijakan *insider trading* merupakan upaya dan/atau aturan yang jelas mengenai perdagangan dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak internal lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang belum tersedia di pasar.

Hingga akhir 2023, PT PII belum memiliki kebijakan *insider trading* karena Perseroan belum memiliki status sebagai perusahaan terbuka (emiten) yang sahamnya diperjualbelikan kepada publik. Meskipun begitu, Perseroan telah memiliki pengaturan terkait penyebaran informasi Perseroan yang tertuang dalam Kebijakan Kode Etik PT PII dan Pedoman Komunikasi, di mana setiap individu di Perseroan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumen Perseroan sesuai dengan klasifikasinya dan kebijakan terkait komunikasi serta tata kelola dokumen yang berlaku.

Selama tahun 2023, PT PII tidak menerima satu pun pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perseroan demi kepentingan pihak tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai praktik *insider trading*.

The insider trading policy is an effort and/or clear regulations regarding trading the corporation's shares conducted by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and other internal parties to ensure that no one benefits directly or indirectly from information that is not yet available to the public.

As of the end of 2023, IIGF does not have an insider trading policy because the Company is not a public company (issuer) of shares, such shares of which are traded to the public. However, the Company has arrangements related to the dissemination of the Company's information in the IIGF's Code of Conduct and Communication Manual, in which each individual of the Company shall maintain the confidentiality of all information and documents of the Company in accordance with their classification and policies related to communication and document governance that apply.

In 2023, IIGF did not receive any complaints on what can be considered insider trading practices—the company's internal disclosure of non-public information to specific parties' advantage.



Evaluasi Kepatuhan Tata Kelola Perusahaan

Evaluation of Corporate Governance Compliance

Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penerapan GCG sebagai bagian dari kepatuhan terhadap PMK 88/2015. Evaluasi atas penerapan GCG dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
4. Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

The Company conducts regular monitoring and evaluation of GCG implementation as part of compliance with PMK 88/2015. The evaluation of GCG implementation aims to:

1. Test and assess the GCG implementation through elaboration of GCG implementation conditions and comparison with predetermined indicators and testing parameters.
2. Provide a highlight of the assessment results via the GCG rating, along with proposed improvement recommendations, to reduce the gap between the practical level and the test indicators and parameters.
3. Monitor the consistency of GCG implementation within the Company's organization, as well as obtain input for the improvement and development of GCG policies.
4. Encourage the Company's management professionally, efficiently, and effectively, as well as empower the function and increase the independence of the Company.

Kriteria Penilaian

Assessment Criteria

Kriteria yang digunakan dalam mengukur efektivitas penerapan GCG berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 505/ KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan yang terdiri dari 6 (enam) aspek pokok yaitu:

The criteria used in assessing the effectiveness of GCG implementation is based on the Minister of Finance Decree No. 505/KMK.06/2020 on the Guidelines for Assessment and Evaluation of the Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, which consists of six (6) main aspects:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Testing/Indicators/Parameters		Bobot Weight
I.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementing Sustainable Good Corporate Governance	7
II.	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9
III.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35
IV.	Direksi Board of Directors	35
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9
VI.	Aspek Lainnya Other Aspects	+5
Skor Keseluruhan Overall Score		100



Pihak Penilai Independen Independent Party's Assessment

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, Perseroan harus melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:

1. Penilaian, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun; dan
2. Evaluasi, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Persero yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Penilaian atas penerapan GCG Perseroan Tahun Buku 2023 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Based on the Minister of Finance Regulation No.88/PMK.06/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Company (Persero) under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance, the Company shall measure the good corporate governance in the form of:

1. Assessment, i.e., a program to identify the Good Corporate Governance implementation in the Company through measurement of the exercise and application of Good Corporate Governance in the Company, carried out once (1) a year/annually; and
2. Evaluation, i.e., a program to describe the follow-up to the application and implementation of Good Corporate Governance in the Company carried out in the following year after the assessment as referred to in point a, which includes an evaluation of the assessment results and follow-up on improvement recommendations.

The assessment of the Company's GCG for the 2023 Fiscal Year was carried out by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).

Hasil Penilaian atas Penerapan GCG Tahun 2023 Result of GCG Assessment in 2023

Hasil skor penilaian GCG yang diperoleh PT PII Tahun Buku 2023 adalah sebesar **90,036** dengan predikat penilaian "**Sangat Baik**". Adapun rincian hasil penilaian dan perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

IIGF's GCG assessment score in the 2023 Fiscal Year was 90.036, with a "Very Good" predicate. The details of the assessment results and comparison with the previous year are as follows:

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Testing/Indicators/Parameters	Bobot Weight	Capaian Tahun 2023 Achievement 2023		Capaian Tahun 2022 Achievement 2022	
		Skor Score	% Pencapaian % Achieved	Skor Score	% Pencapaian % Achieved
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementing Sustainable Good Corporate Governance	7	6,823	97,46%	6,670	95,29%
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9	8,780	97,56%	8,575	95,28%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	31,860	91,03%	32,061	91,60%
Direksi Board of Directors	35	32,848	93,85%	31,343	89,55%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9	7,642	84,90%	8,687	96,53%
Aspek Lainnya Other Aspects	+5	2,083	41,67%	0,833	16,67%
Skor Keseluruhan Overall Score		90,036	-	88,170	-
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		Sangat Baik Sangat Baik			

Keterangan:
0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik
75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Remark:
0-50: Poor | 50-60: Not Good | 60-75: Okay | 75-85: Good | 85-100: Excellent



Rekomendasi Area of Improvement (Aol) GCG Perseroan Tahun Buku 2023

Recommendations for the Company's Areas of Improvement in GCG for the 2023 Fiscal Year

Penilaian atas penerapan GCG Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2024 menghasilkan 19 rekomendasi dengan area perbaikan/penyempurnaan *Area of Improvement* (Aol) yang terdiri dari:

The GCG assessment for the 2023 Fiscal Year carried out in 2024 resulted in 19 recommendations with Areas of Improvement (Aol), consisting of:

Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendation
I. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementing Sustainable Good Corporate Governance	Tidak ada rekomendasi No recommendation
II. Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	- Ketentuan tentang larangan rangkap jabatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris belum terdapat penjelasan atas penetapan jabatan lainnya secara rinci yang menimbulkan benturan kepentingan serta belum ada pengaturan mengenai mekanisme pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris. - The provisions on the prohibition of concurrent positions of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not yet contain an explanation of the description of other positions in detail that cause conflicts of interest, and there is no regulation regarding the resignation mechanism of the Board of Directors and Board of Commissioners.
III. Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan. Kegiatan pelatihan Dewan Komisaris belum terealisasi sepenuhnya. Sehingga tujuan peningkatan kapabilitas Dewan Komisaris belum tercapai secara optimal. Selain itu, atas laporan pelatihan dalam negeri, belum memuat ikhtisar dan simpulan dari pelatihan. - Dewan Komisaris belum sepenuhnya memberikan saran dan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perseroan secara tepat waktu dan relevan. - Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Naik dalam praktik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, telaah terhadap pedoman tata kelola perusahaan yang baik, dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta penyajian laporan hasil penerapan tata kelola yang diungkapkan dalam laporan tahunan. - Sekretaris Dewan Komisaris belum sepenuhnya menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan. - Sekretaris Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan arahan dan monitoring tindak lanjut dapat dinilai kecukupan monitoringnya dan mendapatkan persetujuan serta rekomendasi dari Dewan Komisaris. - Komite Dewan Komisaris belum sepenuhnya memastikan untuk melaksanakan rapat rutin sesuai dengan program kerja tahunan yang sudah ditetapkan. - Laporan Triwulanan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris belum menjelaskan perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan. - The Board of Commissioners has not fully implemented training programs to improve the competence of members of the Board of Commissioners as necessary. The Board of Commissioners' training have not been fully realized. Therefore, the objective of enhancing the capability of the Board of Commissioners has not been achieved optimally. In addition, the domestic training report has not yet contained an overview and conclusion of the training. - The Board of Commissioners has not fully provided advice and direction on important matters regarding changes in the business environment that shall have a major impact on the Company's business and performance in a timely and relevant manner. - The Board of Commissioners has not fully ensured that the good corporate governance principles have been implemented effectively and sustainably. Improvement in the practice of good corporate governance, review of good corporate governance guidelines, and other policies/technical provisions, as well as the presentation of reports on the governance results, are disclosed in the annual report. - The Secretary of the Board of Commissioners has yet to fully organise Board of Commissioners meetings and meetings between the Board of Commissioners with Shareholders, Board of Directors, and other related parties in accordance with the provisions.



Aspek Aspect	Rekomendasi Recommendation
	- The Secretary of the Board of Commissioners has not fully ensured that directions and follow-up monitoring can be assessed for monitoring adequacy and obtain approval and recommendations from the Board of Commissioners. - The Committees of the Board of Commissioners have not fully ensured that regular meetings are held in accordance with the established annual work program. - Quarterly reports from the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners have not described the comparison between the realization with the annual work program.
IV. Direksi Board of Directors	- Direksi belum menyusun laporan hasil pelatihan Direksi yang memuat ikhtisar dan simpulan materi pelatihan. - Direksi belum menetapkan mekanisme pengambilan keputusan yang memuat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan dan kesegeraan untuk mengomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi. - Kebijakan pengembangan karir masih dalam proses pemutakhiran. - Kurangnya sosialisasi dan pemahaman karyawan dalam hal penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatannya. - Aplikasi pengukuran dan penilaian kinerja belum diimplementasikan. - Hasil audit teknologi informasi belum dimuat dalam Laporan Kinerja Teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. - Kurangnya sosialisasi dan pemahaman karyawan atas sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara objektif dan transparan. - The Board of Directors has not prepared a report on the Board of Directors' training that contains an overview and conclusion of the training material. - The Board of Directors has not established a decision-making mechanism that includes a time frame for the immediacy of decision-making and the immediacy of communicating to organizational levels below the Board of Directors. - Career development policy is still in the updating process. - Lack of socialization and understanding of employees in terms of employee placement at each position level in accordance with their position specifications. - Performance assessment and evaluation have not been implemented. - Information technology audit results have not been included in the Technology Performance Report submitted to the Board of Commissioners. - Lack of socialization and employee understanding of the performance measurement and assessment system/guidelines for units and positions structurally that are applied objectively and transparently.
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	- Persepsi dan pemahaman atas "Tingkat kepatuhan Perseroan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perseroan" masih rendah. - Persepsi tingkat kemudahan akses dan pengunduhan terhadap kebijakan dan informasi penting Perseroan yang disediakan dalam laman/situs web Perseroan masih rendah. - Perseroan belum berpartisipasi dalam kompetisi di bidang keterbukaan informasi. - Perseroan belum memperoleh nominasi/menang Annual Report Award. - Perception and understanding of "the Company's adequate level of compliance with the Company's information control policy" is still low. - Perception of the level of ease of access and download of the Company's policies and vital information provided on the Company's website is still low. - The Company has not participated in any competition in the field of information disclosure. - The Company has not been nominated/won the Annual Report Award.
VI. Aspek Lainnya Other Aspects	Tidak ada rekomendasi No recommendation



Area perbaikan tersebut kemudian ditetapkan sebagai rencana aksi perbaikan/penyempurnaan yang menjadi fokus perhatian dari pihak manajemen dan membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan penerapan praktik GCG sesuai *best practices* yang terus berkembang.

These improvement areas are determined as an action plan to be the focus of attention from the management and require commitment from all related parties to be implemented to improve the GCG practices in accordance with best practices that keep improving.

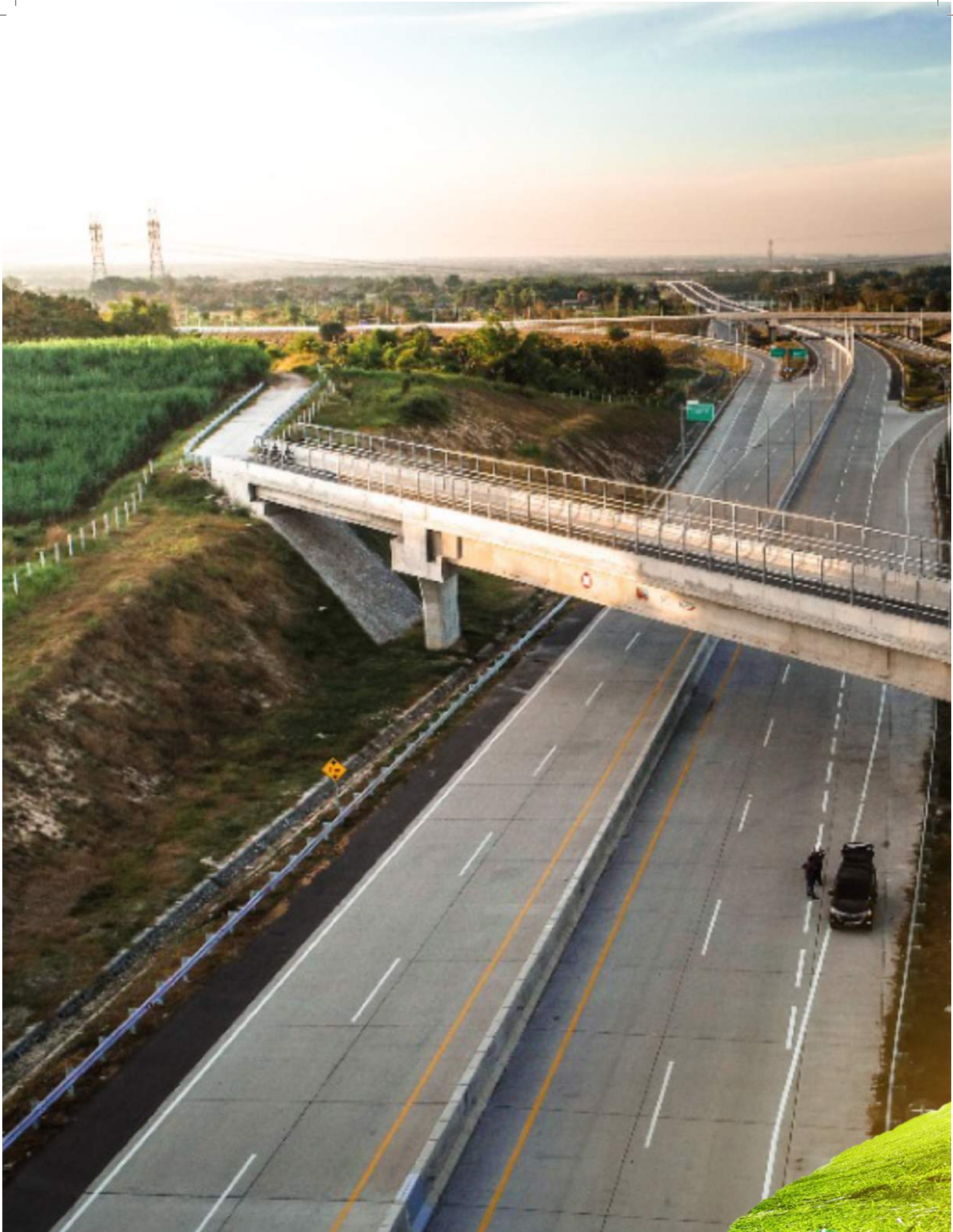
Tindak Lanjut Rekomendasi AOI Assessment GCG Perseroan Tahun Buku 2022

Follow-up of the Company's GCG Assessment AOI Recommendations for the 2022 Fiscal Year

Perseroan telah menindaklanjuti hasil GCG Assessment tahun buku 2022 sesuai rekomendasi yang diberikan penilai independen. Status tindak lanjut sesuai rekomendasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Company followed up on the GCG Assessment results for the 2022 fiscal year, as recommended by the independent assessor. The suggestions' status as of December 31, 2023 is as follows:

Aspek Aspect	Jumlah AoI Number of AOI	Penyelesaian AoI AOI Completion	Persentase Percentage
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Implementing Sustainable Good Corporate Governance	2	2	100%
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	1	1	100%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	9	9	100%
Direksi Board of Directors	12	12	100%
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	4	4	100%
Total	28	28	100%





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social Responsibility



Disclaimer

Informasi kegiatan kami terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan PT PII Tahun 2023, yang diterbitkan dalam buku terpisah dan dalam waktu yang bersamaan dengan Laporan Tahunan ini, sejalan dengan arahan pada SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021. Secara umum, informasi dalam Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan PT PII Tahun 2023 saling melengkapi.

"Information on our activities related to Corporate Social Responsibility (CSR) is presented in IIGF's 2023 Sustainability Report, which is published in a separate book simultaneously with this Annual Report, in line with the directives in SEOJK 16/SEOJK.04/2021. In general, the information in this Annual Report and IIGF's 2023 Sustainability Report are complementary".



Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Commitment to Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Sebagai salah satu *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan RI, PT PII terus berkomitmen dalam mendukung Pemerintah guna mencapai implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui berbagai kegiatan TJSL yang memberikan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan. Sepanjang tahun 2023, PT PII menjalankan berbagai program keberlanjutan yang berperan menciptakan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Indonesia, memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat secara luas dan melindungi lingkungan.

As one of the Ministry of Finance's *Special Mission Vehicles* (SMV), IIGF strives to commit to supporting the government in achieving the Sustainable Development Goals through various CSR activities, which have a major impact on society and the environment. In 2023, IIGF implemented various sustainability programs that contribute to creating a positive impact on Indonesia's sustainable infrastructure development, providing benefits to the lives of the public and protecting the environment.

Pada tahun 2023, sejumlah penghargaan berhasil diperoleh PT PII atas upaya dan konsistensi Perseroan dalam mendukung capaian pembangunan berkelanjutan. Berbagai penghargaan ini menjadi motivasi bagi PT PII untuk terus berkomitmen dalam memberikan dampak positif pada sektor sosial, ekonomi dan lingkungan di setiap langkahnya, serta mengedepankan prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG) untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.

In 2023, IIGF successfully won several awards for the Company's efforts and consistency in supporting the sustainable development goals. These various awards become IIGF's motivation to be committed to providing social, economic, and environmental impacts at every step, as well as promoting the Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in every step to support sustainable growth in order to provide maximum benefits to society.



Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan kategori Pengelolaan Sampah Perkotaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Corporate Social and Environmental Responsibility Award in the category of Urban Waste Management awarded by the Yogyakarta Municipal.



Penghargaan Best CSR in Infrastructure Guarantee Sector Industry 2023 pada Ajang penghargaan Indonesia Best CSR & TJSL Awards 2023 yang digelar The Iconomics.

2023 Best CSR in Infrastructure Guarantee Sector Industry at the 2023 Indonesia Best CSR & TJSL Awards held by The Iconomics.



Penghargaan Inovasi Sosial kategori Silver pada Ajang Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2023 yang digelar PT Sucofindo.

Silver Social Innovation Award at the 2023 Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) held by PT Sucofindo.



Penghargaan Top CSR 2023 on Star 4, dan Kategori Khusus TOP CSR Award 2023 untuk CSR Bidang Lingkungan pada Ajang TOP CSR Award 2023 yang digelar oleh Majalah Top Business.

Star 4 Top CSR Award 2023, and 2023 TOP CSR Award Special Category for CSR in the Environmental Sector at the 2023 TOP CSR Award held by Top Business Magazine.

Penghargaan Top Leader on CSR Commitment 2023 untuk Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo pada Ajang TOP CSR Award 2023 yang digelar oleh Majalah Top Business.

Top Leader on 2023 CSR Commitment Award for PT PII's President Director, M. Wahid Sutopo, at the 2023 TOP CSR Award held by Top Business Magazine.



Landasan Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Basis for the Corporate Social Responsibility Programs

Dalam menjalankan program TJSL, Perseroan berpedoman pada sejumlah peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Surat Keputusan Direksi No. 001/SK/PII-BOD/CSC1022 tentang Besaran Penyaluran Dana Sponsorship, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
6. Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/PII-BOD/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

In carrying out CSR programs, the Company refers to various internal regulations and prevailing laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 on Limited Liability Company's Social and Environmental Responsibility;
4. Company's Articles of Association;
5. Board of Directors' Decree No. 001/SK/PII-BOD/CSC1022 on the Fund Disbursement for Sponsorship, Donation, Corporate Social Responsibility;
6. Board of Directors' Decree No. 010/SK/PII-BOD/2020 on the Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation; and
7. Standard Operational Procedures for Corporate Social Responsibility Implementation.

Prinsip Dasar Pelaksanaan TJSL Perseroan

Principles of Company's CSR Implementation

Program TJSL Perseroan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan menerapkan prinsip:

1. **Terintegrasi**
Program TJSL dilaksanakan berdasarkan analisa kebermanfaatan, risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan Pemangku Kepentingan;
2. **Terarah**
Program TJSL memiliki arah dan target yang jelas untuk mencapai tujuan Perseroan;
3. **Terukur**
Program TJSL memiliki dampak sosial dan lingkungan serta memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi Pemangku Kepentingan dan Perseroan;
4. **Akuntabel**
Pelaksanaan Program TJSL dapat dipertanggungjawabkan sehingga memitigasi potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

The Company's CSR program is implemented in a systematic and integrated manner by applying the principles of:

1. **Integrated**
CSR programs are implemented based on analysis of benefits, risks, and business processes that relate to the Stakeholders;
2. **Targeted**
CSR programs have clear direction and targets to achieve the Company's objectives;
3. **Measured**
CSR programs have social and environmental impacts and provide benefits that generate change or added value for Stakeholders and the Company;
4. **Accountable**
The CSR Programs can be accounted for, thus mitigating the potential for misuse and irregularities;



5. Berkelanjutan

Pelaksanaan TJSL mempertimbangkan aspek kebermanfaatan secara berkelanjutan bagi masyarakat maupun Pemangku Kepentingan serta kontribusi dalam pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Transparan

Pelaksanaan kegiatan TJSL bersifat terbuka dan diungkapkan dalam pelaporan kegiatan Perseroan secara berkala kepada Pemangku Kepentingan serta pihak terkait lainnya.

5. Sustainable

CSR considers aspects of sustainable benefits for the community and Stakeholders, as well as contributions to economic development, both directly and indirectly.

6. Transparent

The CSR activities are implemented openly and are disclosed in the Company's regular reports to Stakeholders and other related parties.

Ruang Lingkup Program TJSL Perseroan Scope of the Company's CSR Program

Program TJSL PT PII difokuskan pada 5 (lima) bidang, sebagai berikut:

IIGF's CSR Programs focus on six five (5), as follows:

Ruang Lingkup TJSL PT PII Scope IIGF's CSR



Pendidikan Education

Mendukung peningkatan kualitas & pemerataan pendidikan sehingga menciptakan SDM unggul dan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Diantaranya melalui pemberian beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk tenaga pengajar.

Supporting the improvement of quality & equity of education to create excellent human resources and support for inclusive education.

This is conducted, among others, by scholarships provision and education quality improvement, including for teaching staff.



Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment

Mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat kurang mampu melalui program pemberdayaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas termasuk ekonomi serta aspek pendukungnya. Diantaranya melalui program pemberdayaan UMKM.

Supporting the improvement of the quality of life of the underprivileged through empowerment, training, and capacity building programs, including economy and its supporting aspects. This is conducted, among others, by MSMEs empowerment programs.



Lingkungan Environment

Mendukung inisiatif pelestarian dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan guna keberlangsungan ekosistem dan habitat di dalamnya. Diantaranya melalui program pengelolaan sampah, konservasi hutan, penghijauan dan energi terbarukan.

Supporting sustainable environmental preservation and conservation initiatives to maintain ecosystems and their habitats.

This is conducted, among others, by waste management, forest conservation, reforestation, and renewable energy programs.



Kesehatan Health

Mendukung inisiatif yang menciptakan pola hidup sehat, pengentasan masalah kesehatan, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta dukungan pada ketahanan pangan.

Supporting initiatives to create healthy lifestyles, alleviate health problems, improve the quality of public health, and support food security.



Sosial, Budaya dan Keagamaan Social, Cultural, and Religion

Mendukung inisiatif sosial guna mendukung pengentasan masalah sosial yang terjadi di sekitar Perseroan, serta mendukung pelestarian seni, budaya dan kegiatan keagamaan pada masyarakat. Diantaranya melalui dukungan pada pengentasan masalah kemiskinan ekstrim, stunting, bencana alam dan donasi keagamaan serta donasi kepada komunitas marginal.

Supporting social initiatives to support the alleviation of social problems that occur around the Company, as well as supporting the preservation of arts, culture, and religious activities in the community. This is conducted, among others, by eradication of extreme poverty, assistance for stunting, natural disasters, and religious donations, as well as donations to marginalized communities.



Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance

PT PII telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berperan untuk mendukung penerapan tata kelola berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ PT PII terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk bertanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

IIGF has a corporate governance structure and infrastructure with a role to support the implementation of sustainable governance. In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, IIGF's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. Each organ of the Board of Commissioners and Board of Directors has clear authorities and responsibilities as mandated in the Articles of Association and laws and regulations, including being responsible for maintaining the long-term sustainability of the Company's business.

Penanggung Jawab Penerapan Program Keberlanjutan Person in Charge of Sustainability Program

Dalam penerapan aspek keberlanjutan termasuk keuangan berkelanjutan, Direksi berperan dalam menetapkan dan menjalankan program-program keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam menjalankan program-program keberlanjutan ini, Direksi dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada jajaran struktur organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing organ. Direksi juga bertanggung jawab meninjau dan mengkaji efektivitas proses manajemen risiko lingkungan dan sosial serta meninjau dan menyetujui informasi yang dilaporkan dalam Laporan Keberlanjutan termasuk penentuan topik yang material bagi Perseroan.

In implementing sustainability aspects, which include sustainable finance, the Board of Directors has a role to determine and carry out sustainability programs that cover economic, social, and environmental aspects. In carrying out these sustainability programs, the Board of Directors may delegate some of their authority to the organizational structure reporting to them, in accordance with the provisions and authority of each organ. The Board of Directors is also responsible for reviewing and assessing the effectiveness of the environmental and social risk management process, and reviewing and approving the information reported in the Sustainability Report, including determining topics that are considered material to the Company.

Sejalan dengan semakin pentingnya pengelolaan isu lingkungan, sosial dan tata kelola, saat ini Direksi dalam proses pembentukan tim/taskforce penanggung jawab keberlanjutan termasuk penyusunan *framework* ESG dan *sustainability* Perseroan. Pembentukan Tim ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan Perseroan menjadi *sustainability company* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan saat ini dan masa depan.

In line with the increasing importance of managing environmental, social, and governance issues, the Board of Directors is currently in the process of establishing a task force responsible for sustainability, including the preparation of the Company's ESG and sustainability framework. The establishment of the Task Force has the objective to ensure that the Company becomes a sustainability company to support current and future sustainable development.

Pengembangan Kompetensi Terkait Program Berkelanjutan Sustainable Program Competence Development

Pada tahun 2023, sebagai bagian dari proses pengembangan program keberlanjutan, Perseroan memberikan kesempatan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Deputy Direktur dan organ Dewan Komisaris untuk ikut serta dalam berbagai program pelatihan dan seminar yang relevan dengan topik-topik ESG, antara lain:

In 2023, as part of the sustainability program development, the Company provided opportunities for the Board of Directors, Board of Commissioners, Deputy Director, and organs of the Board of Commissioners, to participate in various training programs and seminars relevant to ESG topics, as follows:



Peserta Participant	Judul Pelatihan Training	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Wahyu Utomo	<i>Climate change & Energy Policy making for longterm</i>	5-10 Maret 2023 5-10 March 2023	Harvard Kenedy Scool, Executive education admission
Direksi Board of Directors			
M. Wahid Sutopo	<i>Workshop of Water Innovative Finance Theme Side Event Road to the 10th World Water Forum 2024</i>	20 Maret 2023 20 Maret 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing.
Andre Permana	<i>Leading the Way In Sustainable Infrastructure</i>	21 Agustus 2023 21 August 2023	The Asset
	<i>The 7th Asia Urban Lighting Workshop</i>	19 – 21 September 2023 19 – 21 September 2023	The Asset
	<i>MDB Project Plaza 2023 – Leaping into a Green Beyond Global Crisis</i>	28 – 29 November 2023 28 – 29 November 2023	Ministry of Trade, Industry, and Energy & Ministry of Economy and Finance Korea
	ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing
Organ Dewan Komisaris Direct Report to the Board of Commissioners			
Ahmad Ghufon	ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing
Belis Siswanto	ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing
Deputi Direktur Deputi Direktur			
Pratomo Ismujatmika	FGD Penerapan ESG pada BUMN FGD for ESG Implementation at SOEs	14 Agustus 2023 14 August 2023	DJKN Kementerian Keuangan DJKN of the Ministry of Finance
	<i>The ESG Learning Program for Infrastructure Development</i>	18-21 Oktober 2023 18-21 October 2023	KIAT (Australia Partnership for Infrastructure)
	ESG Workshop: Kebijakan Implementasi ESG dalam mendorong Pembangunan Infrastruktur ESG Workshop: ESG Policy Implementation in Encouraging Infrastructure Development	12 Desember 2023 12 December 2023	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing, Ministry of Public Works and Housing

Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan Relationship with Stakeholders

PT PII menempatkan para pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam mendukung keberlanjutan usaha Perseroan. PT PII memandang keterbukaan dan penyampaian informasi yang komprehensif merupakan bagian dari hak pemangku kepentingan. Oleh karenanya, Perseroan senantiasa berupaya menjalin kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan beragam pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

IIGF considers stakeholders as parties who have a key role in supporting the Company's business sustainability. IIGF understands that information disclosure and delivery of comprehensive information are part of stakeholders' rights. Therefore, the Company establishes cooperation, coordination, and communication with various internal and external stakeholders.



PT PII telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan pada keterikatan dan *proximity* baik keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keberlanjutan usaha, proses bisnis dan aktivitas operasional Perseroan. Dari pemetaan yang dilakukan, Perseroan kemudian menyusun metode pelibatan serta tujuan pendekatan beserta frekuensinya untuk meningkatkan kualitas hubungan kepada seluruh pemangku kepentingan.

IIGF mapped stakeholders based on attachment, and proximity, both with direct and indirect links to business sustainability, business processes, and operations of the Company. The mapping results guided the Company to develop a method of engagement, the objective of such approach and its frequency, to improve the quality of relations with all stakeholders.

Kinerja dan Inisiatif Program Keberlanjutan Sustainability Program Performance and Initiatives

Pada tahun 2023, PT PII telah merealisasikan program TJSL melalui berbagai inisiatif dalam rangka mendukung upaya pemenuhan komitmen keberlanjutan Perseroan. Inisiatif keberlanjutan yang dilakukan terdiri atas Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan, dan Aspek Sosial yang kemudian diturunkan lebih lanjut mencakup Aspek Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja, Aspek Pelanggan serta Aspek Pemberdayaan Masyarakat.

In 2023, IIGF actualized the CSR program via various initiatives to support efforts to fulfill the Company's sustainability commitments. The sustainability initiatives consist of Economic Aspects, Environmental Aspects, and Social Aspects, which are then further derived to include Employment and Occupational Safety Aspects, Customer Aspects, and Community Empowerment Aspects.





Kinerja Ekonomi Economic Performance

PT PII berupaya untuk mewujudkan kinerja ekonomi yang terus meningkat melalui penerapan strategi yang tepat. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk terus mengoptimalkan perannya sebagai SMV Kementerian Keuangan guna mengakselerasi pengembangan infrastruktur dengan memberikan penjaminan yang memiliki nilai tambah dan dampak kebermanfaatannya. Sehingga dapat mendorong terciptanya Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan.

Pada tahun 2023, PT PII mencatatkan pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang secara keseluruhan memenuhi target dalam RKAP Tahun 2023. Pada aspek kinerja operasional, di tahun 2023 PT PII memainkan peran penting untuk mengakselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis dan menjadi penyedia penjaminan pada empat proyek baru, dengan nilai total investasi sebesar Rp27,9 Triliun. Proyek ini terdiri dari 2 (dua) Proyek KPBU dan 2 (dua) non-KPBU.

Di sisi keuangan, Perseroan berhasil mencatat kinerja keuangan yang *solid* dan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. PT PII mencatatkan realisasi laba tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp835,82 miliar, meningkat 17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp714,17 miliar dan berhasil berada 6% di atas target RKAP 2023. Untuk realisasi pendapatan usaha tahun 2023 tercapai sebesar Rp1,32 triliun, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,09 triliun dan berada 5% di atas target RKAP 2023.

Sejalan dengan upaya untuk meraih kinerja ekonomi yang optimal, di tahun 2023 Perseroan juga meningkatkan fokus dalam mengelola dampak ekonomi tidak langsung. Hal ini salah satunya dilakukan dengan memberikan penjaminan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dan di berbagai daerah termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta mengembangkan ekosistem infrastruktur khususnya melalui pembentukan *Community of Practice* untuk Pembiayaan Inovatif (INFINITY). Selain itu Perseroan juga melaksanakan berbagai program TJSL khususnya pada program sektor sosial berupa bantuan pembangunan maupun renovasi sarana prasarana umum masyarakat, program pengentasan kemiskinan ekstrem serta program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemasok lokal.

Pembahasan mengenai kinerja ekonomi dan strategi PT PII telah disampaikan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2023.

IIGF strives to realize continuous improvement of economic performance by implementing appropriate strategies. This is also part of the Company's efforts to optimize its role as SMV of the Ministry of Finance to accelerate infrastructure development, by providing guarantees that have added value and beneficial impacts, i.e., encouraging the construction of Resilient, Inclusive, and Sustainable Infrastructure Development.

In 2023, IIGF recorded growth in the operational and financial performance which comprehensively met the targets in the 2023 RKAP. In terms of operational performance, in 2023, IIGF played an important role in accelerating the development of several strategic infrastructures and providing guarantees for four new projects, with a total investment value of Rp27.9 trillion. These projects include 2 (two) PPP Projects, and 2 (two) non-PPP projects.

In terms of financial performance, the Company recorded solid and better financial performance compared to the previous year. IIGF recorded a profit for the year in 2023 of Rp835.82 billion, increased by 17% compared to the previous year of Rp714.17 billion, and succeeded in achieving 6% above the 2023 RKAP target. In 2023, the realization of operating revenues was Rp1.32 trillion, increased by 21% compared to the previous year of Rp1.09 trillion, and 5% above the 2023 RKAP target.

In line with efforts to achieve optimal economic performance, in 2023, the Company also increased its focus on managing indirect economic impacts. One of the efforts is to provide guarantees for infrastructure development projects in various sectors and regions, including underdeveloped, frontier, and outermost areas, developing the infrastructure ecosystem, especially through the establishment of the Community of Practice for Innovative Financing (INFINITY), as well as implementing various CSR programs, especially in the social sector by providing development assistance and renovation of public infrastructure, extreme poverty alleviation programs, as well as community empowerment programs and local suppliers empowerment.

The discussion of IIGF's economic performance and strategy has been described comprehensively in the Company's 2023 Sustainability Report.



Kinerja Lingkungan Environmental Performance

Dalam rangka mendukung strategi keuangan berkelanjutan, PT PII senantiasa memastikan setiap proyek yang akan didukung dapat memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Perseroan telah memiliki dan menetapkan indikator dari sisi *Environment, Social dan Governance* (ESG) yang perlu dipenuhi oleh sebuah proyek yang akan memperoleh penjaminan. Selain itu, upaya pengelolaan dampak lingkungan di setiap kegiatan operasional kantor juga terus dilakukan Perseroan untuk menciptakan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target emisi nol karbon atau *Net Zero Emission* (NZE) Indonesia pada 2060.

In supporting the sustainable finance strategy, IIGF ensures that each project supported shall fulfill sustainability principles. The Company formulated and established Environment, Social, and Governance (ESG) indicators that need to be fulfilled by a project that will be guaranteed. In addition, the Company manages environmental impacts in every office operation to establish sustainable infrastructure development, maintain ecosystem balance, and support the achievement of Sustainable Development Goals and Indonesia's Net Zero Emission (NZE) target by 2060.

Bentuk kepedulian PT PII terhadap upaya pelestarian lingkungan dan isu-isu terkait lingkungan diwujudkan dengan kontribusi yang diberikan Perseroan terhadap pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023, PT PII mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp108,25 juta yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, antara lain berupa pembelian *UV Box Sterilizer* untuk mencuci botol atau gelas minum sebagai upaya efisiensi penggunaan air, pengelolaan sampah kantor secara berkelanjutan yang bekerja sama dengan pihak ketiga, program pemulihan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan program penanggulangan lahan kritis Dataran Tinggi Dieng.

IIGF's care for environmental conservation efforts and issues related to the environment is manifested in the Company's contribution to environmental management. In 2023, IIGF spent Rp108.25 million of environmental expenditure to finance various environmental management and preservation programs, including the purchase of a *UV Box Sterilizer* to wash drinking bottles or glasses as an effort to reduce water consumption, sustainable office waste management in collaboration with third parties, Citarum Watershed ecosystem recovery program, and the Dieng Plateau land management program.

Perencanaan dan Pelaksanaan Inisiatif Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2023

Planning and Implementation of Environmental Management Program in 2023

Sasaran atau target PT PII terkait pengelolaan lingkungan pada tahun 2023 adalah optimalisasi pengelolaan dampak pada beberapa aspek lingkungan yaitu energi, emisi, air dan limbah serta keanekaragaman hayati, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

IIGF's objective or target related to environmental management in 2023 is to optimize the management of environmental-related impacts on several environmental aspects, i.e., energy, emissions, water, waste, and biodiversity, which ultimately provide a positive contribution to the Sustainable Development Goals.

Bentuk implementasi Perseroan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023, adalah sebagai berikut:

The Company implemented environmental protection and management in 2023 as follows:



1. Pengelolaan Limbah dan Sampah

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala yang dilakukan oleh PT PII merupakan salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik dengan cara menjaga aktivitas operasional Perseroan agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. PT PII senantiasa melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan jenisnya serta memastikan limbah tersebut dikelola dengan baik sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Inisiatif PT PII dalam mengelola dan mengurangi limbah salah satunya adalah dengan penggunaan material kertas dan pengurangan sampah plastik yang dilakukan melalui penggantian penggunaan Air Minum dalam Kemasan (AMDK) dengan penggunaan botol kaca.

Selama tahun 2023, kegiatan operasional kantor PT PII menghasilkan limbah B3 sebanyak 7,65 kg dan limbah non B3 sebanyak 2.075,20 kg. Untuk saat ini pengelolaan semua limbah yang dihasilkan dari operasional Perseroan dilakukan dengan pemisahan jenis limbah antara limbah B3, organik dan anorganik dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah tersertifikasi dalam pengelolaan limbah.

Selain itu, melalui program TJSL tahun 2023, PT PII meluncurkan program *flagship* WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*), di mana program ini merupakan program TJSL PT PII pada sektor lingkungan dalam pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Program WE CARE dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yakni Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dewanata di Dieng Kulon, Banjarnegara dan pengelolaan sampah organik dengan budidaya lalat *black soldier fly* (*maggot*) yang bertujuan mengurangi jumlah sampah organik sejak di hulu/skala rumah tangga yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Pengembangan budidaya *maggot* yang sudah dilakukan sejak tahun 2022 lalu dilanjutkan dengan program pengembangan plasma *maggot* di enam kecamatan di kota Yogyakarta.

Melalui program ini, PT PII mampu membantu pengurangan sampah organik dengan proyeksi sebesar 153,6 ton per tahun dan peningkatan ekonomi pada masyarakat pelaku budidaya dengan proyeksi sebesar Rp472,7 juta per tahun.

2. Pengelolaan dan Efisiensi Energi

Energi yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional Perseroan bersumber dari energi fosil yaitu listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada tahun 2023, volume penggunaan listrik PT PII tercatat sebanyak 92.428 kWh atau setara dengan 332,74 gigajoule. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 29,64% yang disebabkan oleh efisiensi penggunaan listrik lantai 7 dan 8 dengan inisiatif penghematan energi, baik cahaya atau peralatan listrik lainnya. Sementara itu, volume penggunaan BBM tahun 2023 tercatat sebanyak

1. Waste Management

Regular environmental management and monitoring conducted by IIGF are a form of the Company's commitment to providing a better quality of life by maintaining the Company's operations so as not to pollute the surrounding environment. IIGF manages waste according to its type and ensures that the waste is properly managed in accordance with prevailing standards and regulations. IIGF's initiatives in managing and reducing waste include the use of paper materials and the reduction of plastic waste by replacing bottled drinking water (AMDK) with glass bottles.

In 2023, IIGF's office operations generated 7.65 kg of B3 waste and 2,075.20 kg of non-B3 waste. Currently, the management of all waste generated from the Company's operations is implemented by separating the types of waste between hazardous, organic, and inorganic waste, and cooperating with third parties who have certifications in waste management.

In addition, through the CSR program in 2023, IIGF launched WE CARE (*Waste Management for Circular Economy*) flagship program, which is IIGF's CSR program in the environmental sector for organic and inorganic waste management. WE CARE program implementation has 2 activities, i.e., the Optimization of the Dewanata Integrated Waste Processing Site (TPST) in Dieng Kulon, Banjarnegara, and organic waste management by cultivating black soldier fly (*maggot*) to reduce organic waste from upstream/household scale at Yogyakarta. The maggot cultivation development has been carried out since 2022, and further continued with a maggot plasma development in six sub-districts in Yogyakarta.

Via this program, IIGF assisted in reducing organic waste with a projection of 153.6 tons per year and increasing the economy of the cultivators with a projection of Rp472,7 million per year.

2. Energy Management and Efficiency

The energy consumed to support the Company's various operations comes from fossil energy, i.e., electricity and oil fuel (BBM). In 2023, IIGF consumed 92,428 kWh or equivalent to 332.74 gigajoules of electricity. This amount decreased by 29.64% due to the efficient consumption of electricity on the 7th and 8th floors, with energy-saving initiatives on light or other electrical equipment. Meanwhile, the volume of oil fuel consumed in 2023 was 11,046 liters or equivalent to 337.77 gigajoules. The amount increased compared to the



11.046 liter atau setara dengan 337,77 gigajoule. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.766 liter atau setara dengan 190,28 gigajoule. Hal tersebut disebabkan oleh dampak pandemi 2023 yang sudah menurun dan aktivitas kendaraan operasional yang meningkat karena keperluan meeting dan acara Perseroan.

Berbagai inisiatif dilakukan PT PII dalam rangka efisiensi penggunaan energi diantaranya dengan mematikan aliran listrik pada saat ruangan atau perangkat kerja tidak digunakan, melakukan peningkatan efisiensi pencahayaan dengan penggantian lampu TL menjadi lampu LED dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk menerapkan budaya efisiensi energi.

Selain itu, secara rutin, PT PII juga melakukan kegiatan pengukuran penggunaan listrik dan BBM sebagai bentuk evaluasi Perseroan dalam menekan penggunaan energi dan pengembangan program efisiensi energi. Untuk mengetahui jumlah penggunaan energi per karyawan, PT PII telah melakukan perhitungan intensitas penggunaan energi dengan nilai intensitas energi di tahun 2023 sebesar 4,08 gigajoule/karyawan. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 31,19% dari tahun 2022 yaitu sebesar 3,11 gigajoule/karyawan. Berdasarkan analisa terhadap kondisi operasional Perseroan pada tahun 2023, bahwa terdapat peningkatan dalam penggunaan energi. Pulihnya kondisi pasca pandemi COVID-19 membuat aktivitas operasional Perseroan kembali normal, termasuk kegiatan karyawan yang kembali ke kantor secara reguler.

3. Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

PT PII turut melakukan pengelolaan pengendalian emisi GRK sebagai bentuk pencegahan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Pada tahun 2023, jumlah emisi GRK yang dihasilkan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 122,9% dari tahun 2022 yaitu sebesar 71,91 ton CO₂eq. Untuk mengetahui jumlah emisi GRK per karyawan, PT PII telah melakukan perhitungan intensitas emisi GRK dengan nilai intensitas emisi GRK di tahun 2023 sebesar 0,74 ton CO₂eq/karyawan, meningkat sebesar 57,45% dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,47 ton CO₂eq/karyawan.

Inisiatif pengelolaan dan pengendalian emisi GRK dilakukan PT PII dengan mengidentifikasi sumber-sumber emisi GRK dari kegiatan operasional Perseroan yang kemudian mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memitigasi dampaknya. Melalui pendekatan komprehensif, PT PII melakukan pemantauan dan perhitungan emisi GRK secara berkala, serta melakukan praktik-praktik yang lebih efisien dalam penggunaan energi seperti penggantian Lampu Hemat Energi (*Light Emitting Diode/LED*), himbauan mematikan AC dan alat elektronik lainnya.

previous year, which was 5,766 liters or equivalent to 190.28 gigajoules. This was because the 2023 pandemic impact has been declining, which caused increased operational vehicle activities for the Company's meetings and events.

IIGF conducted various initiatives in the context of efficient energy consumption, including turning off the electricity when the room or working device is not in use, increasing lighting efficiency by replacing TL lamps with LED lamps, and disseminating to all employees to implement a culture of energy efficiency.

In addition, IIGF also measures the electricity and fuel consumption as a form of the Company's evaluation in reducing energy consumption and developing energy efficiency programs. To determine the energy usage per employee, IIGF has calculated the energy usage intensity, which was 4.08 gigajoules per employee in 2023. This figure represents an increase of 31.19% from 3.11 gigajoules per employee in 2022. Based on an analysis of the company's operational conditions in 2023, there was an increase in energy usage. The recovery from the post-COVID-19 pandemic conditions has normalized the company's operations, including regular return-to-office activities for employees.

3. Greenhouse Gas (GHG) Emission Control

IIGF controls the GHG emission as a form of preventing global warming and climate change. In 2023, the Company's GHG emission generated increased by 122.9% compared to 2022, which was 71.91 tons CO₂eq. IIGF has calculated the GHG emission intensity to understand the GHG emissions per employee, with a GHG emission intensity of 0.74 ton CO₂eq/employee in 2023, increased by 57.45% from 2022 of 0.47 ton CO₂eq/employee.

IIGF conducted an initiative to manage and control GHG emissions by identifying the sources of GHG emissions from the Company's operations, and taking comprehensive steps to mitigate the impact. Through a comprehensive approach, IIGF monitors and calculates GHG emissions regularly, and implements more efficient practices in energy consumption, such as changing to Energy Saving Lamps (Light Emitting Diode/LEDs), and appealing to turn off air conditioners and other electronic devices.



4. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

Wilayah kerja PT PII tidak berada di dekat atau di dalam daerah konservasi atau daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Namun, PT PII menyadari bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan tol berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati, diantaranya trase yang melintasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, PT PII berupaya melakukan mitigasi dengan melakukan kajian alternatif untuk menghindari atau meminimalisir kawasan yang dilintasi trase dengan menggunakan desain teknis elevated, koridor satwa atau pendekatan teknis lainnya.

Pada tahun 2023, PT PII melaksanakan beberapa program TJSL yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup, diantaranya;

- Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum untuk mewujudkan Sungai Citarum Bersih, Sehat dan Lestari melalui penanaman pohon di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 2.290 pohon Kopi Arabika telah ditanam dengan luas area 4,58 hektare yang dimulai sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023
- Bersama Geo Dipa dan Pemerintah Daerah Banjarnegara melaksanakan program penanggulangan lahan kritis di Kawasan Dataran Tinggi Dieng melalui penanaman 15.000 pohon yang dimulai pada 6 Januari 2023 dan dilanjutkan hingga 12 Februari 2023.
- Penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi alam mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Perseroan mendukung konservasi mangrove sebagai pelindung pantai, penyerap karbon dan habitat biota yang bernilai ekonomis, seperti ikan, kepiting, dan udang. Penanaman mangrove sebagai bagian dari peringatan HUT PT PII ke-14 sekaligus kegiatan *Employee Volunteerism Program* (EVP) ini dilaksanakan pada 16 Desember 2023.

4. Biodiversity Conservation

IIGF's working area is not located near or in a conservation area or an area with high biodiversity value. However, IIGF understands that infrastructure development such as toll roads has the potential to have a negative impact on biodiversity when the route crosses areas with high biodiversity value. Therefore, IIGF strives to mitigate by conducting alternative studies to avoid or minimize areas crossed by the trail, or using elevated technical designs, animal corridors, or other technical approaches.

In 2023, IIGF carried out several CSR programs that focused on environmental conservation, including;

- Restoration of the Citarum Watershed Ecosystem to actualize a Clean, Healthy, and Sustainable Citarum River by planting trees in the Bandung Regency area, West Java Province. 2,290 Arabica Coffee trees have been planted with an area equivalent to 4.58 hectares from October 2022 to October 2023.
- The Company, together with Geo Dipa and the Banjarnegara Government, conducted a critical land management program in the Dieng Plateau Area by planting 15,000 trees, from 6 January 2023 until 12 February 2023.
- Planting 1,000 mangrove tree seedlings at Angke Kapuk Mangrove Nature Conservation, North Jakarta. This activity is part of the Company's efforts to support mangrove conservation as a coastal protection, carbon sink, and habitat for economically valuable biota, such as fish, crabs, and shrimp. Mangrove planting as part of the 14th IIGF anniversary, and IIGF's Employee Volunteerism Program (EVP) carried out on 16 December 2023.



Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup

Complaints about Environmental Problems

PT PII menyediakan Layanan Pengaduan Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk memperoleh dan menangani masukan, keluhan, atau pertanyaan dari pemangku kepentingan terkait isu lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional Perseroan. Pengaduan lingkungan ini dapat disampaikan secara langsung kepada Perseroan melalui sarana/media yang disediakan.

IIGF provides Environmental Complaint Services in an effort to gain and handle input, complaints, or questions from stakeholders regarding environmental issues resulting from the Company's operations. These environmental complaints can be submitted directly to the Company via the facilities/media provided.



Secara lisan, yaitu dengan:

Menghubungi *Call Center* di +62 21 5795 0550 atau mengunjungi kantor pusat PT PII yang beralamat di Capital Place Lt. 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710 – Indonesia.

Verbally, by:

Contacting the Call Center at +62 21 5795 0550, or visiting IIGF's head office at Capital Place Lt. 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 West Kuningan, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 12710, Indonesia.



Secara tertulis yaitu dengan:

– Menyampaikan *email* ke alamat info@iigf.co.id
– Menyampaikan form keluhan yang tercantum dalam situs *website* PT PII ataupun melalui media sosial Perseroan.

In writing, by:

– Sending an email to info@iigf.co.id
– Submitting a complaint form, available at IIGF's website or via the Company's social media.

Pada tahun 2023, PT PII tidak menerima pengaduan dari pemangku kepentingan terkait sehingga tidak terdapat denda ataupun sanksi lingkungan yang ditanggung oleh Perseroan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait lingkungan.

In 2023, IIGF did not receive complaints from stakeholders regarding the environment. Thus, there were no fines or environmental sanctions borne by the Company for non-compliance with environmental laws and regulations.

Penghargaan dan Sertifikasi atas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Environmental Management Certifications and Awards

Melalui program-program yang dijalankan secara konsisten, pada tahun 2023 PT PII memperoleh beberapa penghargaan dan sertifikasi yang terkait dengan kegiatan tanggung jawab Perseroan terhadap pengelolaan lingkungan, yaitu:

- *Top CSR 2023 on Star 4*, dan Kategori Khusus *TOP CSR Award 2023* untuk CSR Bidang Lingkungan pada Ajang *TOP CSR Award 2023* yang digelar oleh Majalah Top Business.
- Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) kota Yogyakarta untuk kategori Pengelolaan Sampah Perkotaan.
- *Environmental & Social Innovation Award (ENSIA) 2023 – Silver Winner* kategori Inovasi Sosial oleh PT Sucofindo.
- *Best CSR & TJSL in Infrastructure Guarantee Sector Industry* dari The Iconomics.

Through consistent programs, in 2023, IIGF obtained several awards and certifications related to the Company's environmental responsibility:

- *Star 4 Top CSR Award 2023*, and *2023 TOP CSR Award Special Category* for CSR in the Environmental Sector at the *2023 TOP CSR Award* held by Top Business Magazine.
- Corporate Environmental Social Responsibility (TSLP) for Yogyakarta in the Urban Waste Management category.
- *2023 Environmental & Social Innovation Award (ENSIA) – Silver Winner* in the Social Innovation category by PT Sucofindo.
- *Best CSR & TJSL in Infrastructure Guarantee Sector Industry* from The Iconomics.



Kinerja Sosial Social Performance

Kinerja keberlanjutan di aspek sosial menekankan pada tanggung jawab PT PII terhadap pengelolaan aspek ketenagakerjaan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, aspek pemberdayaan sosial kemasyarakatan, serta pengembangan layanan kepada pelanggan.

Sustainability performance in the social aspect emphasizes IIGF's responsibility for managing employment aspects, including employee health and safety, social community empowerment, and service development to customers.

Pengelolaan Aspek Ketenagakerjaan Employment Management

Sebagai lembaga yang berfokus pada penjaminan dan pendampingan proyek, PT PII menyadari bahwa memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Untuk itu, Perseroan berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pengelolaan SDM yang profesional, adil dan transparan melalui berbagai upaya inisiatif seperti kesetaraan dalam kesempatan kerja dan pengembangan kompetensi, keadilan dalam pengupahan dan penghapusan diskriminasi, serta perlindungan penyaluran aspirasi dan pengaduan karyawan. PT PII juga senantiasa berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, layak dan kondusif bagi karyawan.

As an institution that focuses on project guarantee and assistance, IIGF understands that having qualified and highly competitive human resources is the main key to achieving business success and sustainability. Therefore, the Company is committed to implementing HR management that is professional, fair, and transparent with various initiatives, such as equality in employment opportunities and competency development, fairness in remuneration and elimination of discrimination, as well as protection for channeling employee aspirations and complaints. IIGF strives to create a safe, decent, and conducive working environment for employees.

Komitmen Perseroan diperjelas dengan dituangkannya sejumlah pengaturan terkait pengelolaan SDM ke dalam beberapa kebijakan dan peraturan, antara lain:

1. Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024;
2. Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Human Capital HCOD.002/KEB/V.01/2023;
3. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-006/DIR/HR/06/2010 tentang Program Pelatihan Bagi Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-049/DIR/COS/HR/1116 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Direksi No. 006/DIR/HR/06/2010 tentang Program Pelatihan Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
4. Surat Keputusan Direksi Nomor SK-037/DIR/HC/COS/HR/1215 tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan sebagaimana diubah terakhir melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-045/DIR/HC/1220 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 tentang Fasilitas Kesehatan dan Asuransi Jiwa/Kecelakaan Karyawan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

The Company's commitment is evidenced by the inclusion of numerous arrangements related to HR management in several policies and regulations, among others:

1. 2022-2024 Company Regulation;
2. Human Capital Activity Management Policy HCOD.002/KEB/V.01/2023;
3. The Board of Directors' Decree No. SK-006/DIR/HR/06/2010 on Training Programs for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lastly amended by the Board of Directors' Decree No. SK-049/DIR/COS/HR/1116 on the Fourth Amendment to the Board of Directors' Decree No. 006/DIR/HR/06/2010 on Training Programs for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
4. The Board of Directors' Decree No. SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 on Health Benefits and Life/Accident Insurance for Employees, lastly amended by the Board of Directors' Decree No. SK-045/DIR/HC/1220 on the Amendment to the Board of Directors' Decree No. SK-037/IDR/HC/COS/HR/1215 on Health Benefits and Life/Accident Insurance for Employees of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Dengan komitmen dan kebijakan yang ditetapkan PT PII dalam pengelolaan dan pengembangan SDM Perseroan, diharapkan terciptanya hubungan baik antara karyawan dan Perseroan sehingga dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas, serta mendorong kualitas SDM yang kompeten dan profesional.

IIGF expects that with the commitment and policies set by the Company in managing and developing the Company's HR, a good relationship shall be established between employees and the Company to enhance productivity, loyalty, and encourage the quality of competent and professional human resources.



Inisiatif Program Pengelolaan SDM Tahun 2023

HR Management Program Initiatives in 2023

PT PII senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk pemenuhan hak-hak karyawan. Komitmen terhadap penghormatan HAM tersebut dinyatakan dalam kebijakan Perseroan yang secara tegas menolak adanya praktik kerja paksa dalam bentuk apapun. PT PII juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, menyelenggarakan praktik non-diskriminasi, menyelenggarakan inklusivitas dan keberagaman, menjamin kebebasan berserikat serta menciptakan kondisi kerja yang aman dan layak.

1. Kesetaraan Dalam Kesempatan Kerja

PT PII menerapkan proses rekrutmen yang selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras sehingga setiap rekrutmen yang diadakan oleh Perseroan dapat dipastikan selalu terbebas dari unsur diskriminasi. Perseroan juga turut memperhatikan termasuk batas usia pekerja untuk menghindari terjadinya praktik pekerja anak di lingkungan operasional dan adanya jam kerja sesuai dengan ketentuan untuk menghindari praktik kerja paksa. Komitmen ini terlihat dari bagaimana Perseroan patuh pada setiap regulasi ketenagakerjaan khususnya terkait batas usia dengan menetapkan syarat minimal usia bagi calon karyawan yaitu 18 tahun.

Pada tahun 2023, jumlah karyawan PT PII tercatat sebanyak 164 orang, dengan komposisi jumlah karyawan wanita sebanyak 76 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 88 orang. Di tahun ini juga Perseroan telah merekrut karyawan baru sebanyak 16 orang yang berasal dari tenaga *pro-hire* maupun *fresh graduates*.

2. Kesetaraan Dalam Pengembangan Karier dan Kompetensi

PT PII senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan dan berupaya untuk mendorong terpenuhinya keberagaman di setiap tingkatan organisasi Perseroan. Untuk itu, PT PII mendukung siapa saja untuk dapat mengembangkan kariernya dan menempati jabatan pimpinan tanpa adanya diskriminasi. Kebijakan pengembangan karier di Perseroan didasarkan pada sistem penilaian kinerja karyawan dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan target individual menggunakan metode *Key Performance Indicators* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC). Hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk program pengembangan, pelatihan, penempatan karyawan, *reward and punishment*, remunerasi dan perencanaan suksesi karyawan yang berpotensi tinggi naik ke posisi manajemen puncak. Selama tahun 2023, sebanyak 42 karyawan atau 25,61% dari total karyawan per Desember 2023 mendapatkan promosi jabatan.

IIGF upholds respect for Human Rights (HAM), including the fulfillment of employee rights. The commitment to respecting human rights is stated in the Company's policy, which expressly rejects the practice of forced labor in any form. IIGF is committed to employing labors that comply with the age requirements, having non-discrimination practices, conducting inclusiveness and diversity, ensuring freedom of association, and creating safe and decent working conditions.

1. Equality in Employment Opportunities

IIGF implements a recruitment process that upholds the principles of transparency and fairness, without distinguishing ethnicity, religion, and race. Thus, every recruitment process of the Company shall always be free from elements of discrimination. The Company also pays attention to Human Rights (HAM), including the age limit for employees, to avoid the practice of child labor in the business, and stipulates working hours in accordance with the provisions to avoid forced labor practices. This commitment is reflected by the Company's compliance with every employment regulation, especially regarding the age limit, by setting a minimum age requirement for prospective employees, i.e., 18 years.

In 2023, IIGF was recorded to have 164 employees, with 76 female employees and 88 male employees. This year, the Company also recruited 16 new employees from *pro-hire* personnel and *fresh graduates*.

2. Equality in Career Development and Competence

IIGF provides equal opportunities to every employee and strives to encourage diversity at all levels of the Company's organization. Therefore, IIGF supports any personnel to develop their career and occupy leadership positions without discrimination. The Company's career development policy is based on employee performance assessment system with reference to the individual goals achievement and targets pursuant to the *Balanced Score Card* (BSC)-based *Key Performance Indicators* (KPI) method. The assessment results are used as a basis to consider development programs, training, employee placement, reward and punishment, remuneration, and succession planning for employees with high potential to be promoted to top management positions. In 2023, 42 employees or 25.61% of the total employees, as of December 2023, were promoted.



Untuk memastikan bahwa setiap program pengembangan karier yang telah diberikan kepada karyawan menciptakan hasil yang optimal sesuai dengan target kinerja individu, divisi, dan korporasi, Perseroan melakukan kegiatan *monitoring* berupa *review* tengah tahun atas pencapaian kinerja seluruh karyawan dan pengoptimalan budaya *coaching* melalui Divisi Human Capital and Organization Development sebagai salah satu bentuk program pengembangan SDM.

Upaya kesetaraan juga tercermin dalam pengembangan kompetensi karyawan, dimana PT PII memastikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Program pengembangan kompetensi SDM dilakukan melalui program pelatihan, *workshop*, dan pengembangan keterampilan bagi karyawan, yang mencakup kompetensi teknis dan non-teknis yang dilaksanakan berdasarkan *Competency Model*.

Selama tahun 2023, PT PII telah melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan dengan jumlah jam pelatihan mencapai 3.678 jam dan rata-rata 22 jam per orang. Untuk total jumlah peserta pelatihan pada masing-masing program pelatihan dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini pada Bab Tinjauan Pendukung Bisnis Bagian Pengembangan Kompetensi Karyawan.

3. Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

PT PII berupaya menerapkan praktik ketenagakerjaan yang terbaik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam pemberian remunerasi karyawan. Remunerasi karyawan didasarkan pada aspek klasifikasi jabatan, masa kerja, beban kerja, lokasi, dan prestasi kerja tiap individu tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga rasio pemberian remunerasi pada setiap level jabatan yang sama adalah 1:1 antara karyawan perempuan dan laki-laki.

PT PII memastikan bahwa upah terendah karyawan yang baru direkrut telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah Perseroan beroperasi. Tahun 2023, upah terendah karyawan baru adalah sebesar Rp6,4 juta lebih tinggi dibandingkan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Perseroan juga memberikan tunjangan kepada karyawan seperti tunjangan jabatan, perumahan, komunikasi, transportasi, keagamaan serta *benefit* lain berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Bentuk remunerasi lainnya yang diberikan Perseroan yaitu berupa izin cuti melahirkan yang diberikan kepada karyawan perempuan yang akan memasuki masa melahirkan selama 90 hari, serta memberikan kelonggaran kepada karyawan pria untuk mendampingi pasangannya yang akan melakukan proses melahirkan dengan lamanya izin cuti selama 2 (dua) hari. Sepanjang tahun 2023, terdapat sebanyak 2 (dua) karyawan wanita dan 6 (enam) karyawan pria yang menggunakan hak cuti tersebut dengan seluruhnya (100%) kembali bekerja dan diterima kembali oleh Perseroan setelah masa cuti berakhir.

To ensure that each career development program provided to employees produces optimal results in line with individual, divisional, and corporate performance targets, the Company conducts monitoring in the form of a mid-year review of the performance achievements of all employees and optimization of the coaching culture via the Human Capital and Organization Development Division as one of the one forms of HR development program.

The efforts to provide equality are also reflected in employee competency development, in which IIGF ensures that all employees have equal opportunities to participate in training. The HR competency development program is carried out via training, workshops, and skills development for employees, which includes technical and non-technical competencies carried out based on the Competency Model.

In 2023, IIGF provided employee training and development programs with a total of 3,678 training hours and an average of 22 hours per person. The total training participants in each training program can be referred to in this Annual Report in the chapter Business Support Highlight, section Employee Competency Development.

3. Employee Remuneration and Welfare

IIGF strives to implement the best labor practices in accordance with prevailing laws and regulations, including in the provision of employee remuneration. Employee remuneration is based on aspects of position, length of service, workload, location, and work performance of each individual without discrimination to gender. Therefore, the ratio of remuneration at each level of the same position is 1:1 between female and male employees.

IIGF ensures that the lowest wage of newly recruited employees fulfills the prevailing Minimum Wage provisions in the area where the Company operates. In 2023, the lowest wage for new employees was Rp6.4 million, which was higher than the minimum wage set forth by the government. The Company also provides benefits to employees such as allowances for position level, housing, communication, transportation, religious holidays, etc., as well as other benefits in the form of regular medical check-ups.

The Company also provides other forms of remuneration, i.e., maternity leave for female employees who will enter the maternity period, for 90 days, and provide two (2) days leave for male employees to accompany their spouses who will carry out the process of giving birth. In 2023, two (2) female employees exercised their rights to maternity leave, and six (6) male employees exercised their rights to paternity leave, all of whom (100%) returned to work and were accepted back by the Company after the leave period ended.



4. Kebebasan Berserikat

PT PII senantiasa menghormati hak karyawan serta memberikan kebebasan untuk berserikat dan mengadakan forum komunikasi dan diskusi di lingkungan Perseroan untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan. Dalam menciptakan hubungan industrial yang baik, PT PII berkomitmen memenuhi hak karyawan atas kebebasan untuk berpendapat melalui Peraturan Perusahaan yang dijadikan pedoman baik oleh Perseroan maupun karyawan dalam menjaga hubungan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. PT PII memastikan seluruh karyawan telah terlindungi hak dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.

5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Karyawan

PT PII mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan, serta tetap mengupayakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan. Budaya K3 senantiasa ditingkatkan untuk mewujudkan tercapainya lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif. PT PII telah menetapkan kebijakan dan strategi untuk melindungi dan menjamin keamanan dan keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, sehingga dapat mencapai target kecelakaan nihil (*zero accident*) di lingkungan kerja. Dalam program pengelolaan kesehatan karyawan, Perseroan memberikan beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya dengan menyediakan dokter yang dapat dihubungi karyawan ketika membutuhkan penanganan segera, baik untuk karyawan sendiri maupun keluarganya. Untuk meningkatkan kondisi kesehatan karyawan, Divisi Human Capital and Organization Development melaksanakan berbagai kegiatan olahraga di lingkungan Perseroan, seperti yoga, badminton, *mini soccer*, tenis lapangan, golf, di mana seluruh peralatan dan akomodasi sewa lapangan ditanggung oleh Perseroan. Tidak hanya kegiatan olahraga rutin, Perseroan juga menyediakan ruang olahraga yang dilengkapi dengan perlengkapan olahraga seperti *treadmill* dan angkat beban, sehingga memudahkan karyawan untuk berolahraga di kantor. Selain kegiatan olahraga dan penyediaan ruang olahraga, Perseroan juga senantiasa menyelenggarakan *Medical Checkup* rutin 1 (satu) tahun sekali sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi.

Perseroan juga telah mengupgrade SOP Tanggap Darurat menjadi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha yang lebih komprehensif, mencakup identifikasi risiko, perencanaan bencana, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

Inisiatif ini menegaskan komitmen Perseroan dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan menghadapi berbagai tantangan dengan efektif, mendukung penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Perseroan mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari semua pihak yang terkait dan yakin bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi ekosistem kerja Perseroan.

4. Freedom of Association

IIGF respects employee rights, provides freedom of association, and holds communication and discussion forums within the Company to discuss employment issues. In creating good industrial relations, IIGF is committed to fulfilling employees' rights to freedom of expression via the provision of Company Regulation, which is the guideline for both the Company and employees in maintaining employment and industrial relations. IIGF ensures that all employees have their rights and obligations protected, as stated in the Company's Regulation.

5. Employee Occupational Health and Safety (OHS)

IIGF prioritizes employee health and safety, and strives to provide a healthy and safe working environment to support the Company's smooth operations. OHS culture is always improved to achieve a safe, healthy, and productive working environment. IIGF established policies and strategies to protect and ensure the security and safety of every employee and other people in the workplace, to achieve zero accident targets in the working environment. In the employee health management program, the Company provides several health facilities, including provisions for a doctor who can be contacted by employees when they need immediate treatment, both for themselves and their families. To improve the employees' health condition, the Human Capital and Organization Development Division conducts various sports activities within the Company, such as yoga, badminton, mini soccer, tennis, and golf, in which all equipment and field rental accommodation are covered by the Company. The Company provides not only regular sports, but also a sports room equipped with sports equipment, such as treadmills and weights, to facilitate the employees to exercise in the office. In addition to sports and the provision of the sports hall, the Company always organizes regular Medical Checkups once a year as stated in the Board of Directors' Decree.

In addition, the Company has refined its Emergency Response SOP into a more comprehensive Business Continuity Management System, covering risk identification, disaster planning, emergency handling, and post-disaster recovery.

These initiatives emphasize the Company's commitment to protecting employees' welfare and dealing with challenges effectively, supporting the creation of a safe, healthy, and productive working environment. We are grateful for the continued support from all relevant parties and are confident that this step will affect our entire work ecosystem positively.



Penanganan Pengaduan Karyawan Employee Complaint Management

PT PII menyediakan fasilitas pengaduan kepada karyawan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran terkait berbagai aspek operasional Perseroan. Setiap karyawan dapat menyampaikan pengaduan yang ditujukan langsung kepada atasannya untuk segera ditindaklanjuti. Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan secara struktural, maka karyawan dapat melakukan upaya perundingan bipartit dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pada tahun 2023, tercatat tidak terdapat pengaduan yang berindikasi pelanggaran terhadap pengelolaan ketenagakerjaan yang dilakukan, sehingga Perseroan tidak mendapatkan denda ataupun sanksi atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan terkait pengelolaan ketenagakerjaan.

IIGF provides a complaint facility to employees as a forum for submitting complaints, feedback, or suggestions related to various aspects of the Company's operations. Each employee can submit a complaint addressed directly to his/her supervisor for immediate follow-up. If the complaint cannot be resolved structurally, the employee has the right to submit it to the union to be resolved in a bipartite manner with reference to the laws and regulation regarding the settlement of industrial relations disputes.

In 2023, there were no complaints indicating any violations of employment management. Therefore, the Company did not receive fines or sanctions for non-compliance with laws and/or regulations related to employment management.

Pengembangan Sosial dan Masyarakat Social and Community Development

Sejumlah penghargaan TJSL yang diterima PT PII sepanjang tahun 2023 menunjukkan komitmen Perseroan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama masyarakat. Perseroan meyakini bahwa penerapan program TJSL khususnya pada aspek pengembangan sosial kemasyarakatan ini dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya yang pada akhirnya berdampak positif pada citra Perusahaan sekaligus mencapai keberlanjutan Perusahaan. PT PII melihat pentingnya kontribusi Perseroan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan melalui program-program TJSL yang mampu menekan dampak negatif potensial, seperti penurunan kesejahteraan yang mampu mengancam perekonomian masyarakat lokal.

Untuk itu, pengelolaan dampak terkait masyarakat lokal dilakukan Perseroan secara bertanggung jawab dengan berfokus pada penciptaan nilai manfaat bersama atau *Creating Shared Value* (CSV) yang mencakup aspek 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*) kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat, sehingga memberikan kontribusi positif berupa peningkatan kualitas hidup dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.

IIGF received several CSR awards in 2023, which reflected the Company's commitment to providing a better quality of life to the community. The Company understands that the CSR program implementation, especially in the aspect of social community development, shall establish strong relationships with the local community and other stakeholders, which ultimately have a positive impact on the Company's image while achieving the Company's sustainability. Further, IIGF considers the importance of the Company's contribution to improving the quality of life of the community and maintaining environmental balance via CSR programs that are able to reduce potential negative impacts, such as a decrease in welfare that may threaten the local community economy.

Therefore, the Company implements impact management related to the local community in a responsible manner by focusing on *Creating Shared Value* (CSV) which includes aspects of 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace* and *Partnership*) for all stakeholders, especially the community, to contribute positively in the form of improving the quality of life and economic development of the local community.



Komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat secara khusus dilakukan Perseroan dengan menetapkan kebijakan pelaksanaan TJSL dalam Surat Keputusan Direksi No.010/SK/PII-BOD/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Kebijakan tersebut selanjutnya diimplementasikan PT PII melalui berbagai program yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam mewujudkan keberlanjutan Perseroan.

The commitment to grow with the community is specifically executed by the Company by establishing a policy for the CSR implementation, in the Board of Directors' Decree No. 010/SK/PII-BOD/2020 on the Guidelines for Corporate Social Responsibility Implementation. IIGF then implemented the policy through various programs that are in line with sustainable development goals, which ultimately contribute to realizing the Company's sustainability.

Inisiatif Program Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Tahun 2023

Social and Community Empowerment Program Initiatives in 2023

Perseroan telah menetapkan program TJSL prioritas yang difokuskan pada sektor yang mendukung percepatan pembangunan berlandaskan prinsip *Environment, Social and Governance* (ESG), serta pada kegiatan yang dinilai mampu menciptakan kesejahteraan dan manfaat berkelanjutan jangka panjang kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat.

The Company has set forth prioritized CSR, i.e., focus on activities that support the acceleration of development based on the principles of Environment, Social, and Governance (ESG) and on activities that are considered capable of creating long-term sustainable welfare and benefits for all stakeholders, especially the community.

Pada tahun 2023, realisasi penyaluran dana yang dikeluarkan PT PII untuk program TJSL mencapai Rp4,43 miliar, yang diperuntukan pada lima fokus bidang program, yaitu Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Sosial Keagamaan dan Kesehatan.

In 2023, IIGF disbursed Rp4.43 billion for the CSR program, which was allocated to five focus areas of the program, i.e., the Environment, Community Empowerment, Education, Religious Affairs, and Health.



Realisasi Penyaluran Dana Program TJSL Selama Tiga Tahun Terakhir (Rp)

Fund Disbursement Realization in the Last Three Years (Rp)

No.	Bidang Penyaluran Sector	2021	2022	2023
1.	Lingkungan Environment	352.783.468	562.656.658	403.771.749
2.	Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	1.829.570.670	919.900.536	987.836.837
3.	Pendidikan Education	1.463.965.875	663.986.500	937.615.749
4.	Sosial Keagamaan Religious Social	784.545.100	1.345.834.630	1.678.693.658
5.	Kesehatan Health	825.407.000	193.400.000	421.867.400
Total		5.256.272.113	3.685.778.324	4.429.785.393



Berbagai kegiatan/program TJSL yang dilakukan sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu aksi PT PII dalam mendukung pencapaian SDGs dengan menciptakan kesejahteraan yang dinilai mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

CSR activities/programs are considered one of the forms of the Company's support to SDGs, by creating welfare, which shall be capable of supporting the development acceleration and community's economic improvement.

Berikut ini ringkasan program TJSL prioritas/unggulan yang telah dilaksanakan PT PII sepanjang tahun 2023.

The following is a summary of flagship CSR programs implemented by IIGF in 2023.

Capaian SDG's SDG Achievements



Bidang Lingkungan Environment

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp403.771.749 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL di bidang Lingkungan sebanyak 6 program. In 2023, the Company disbursed Rp403,771,749 of budget for CSR implementation in the Environmental sector for 6 programs.

Program TJSL Unggulan Sektor Lingkungan tahun 2023 diantaranya:

- Program WE CARE (Waste Management for Circular Economy)**, yaitu program pengelolaan sampah organik melalui budidaya BSF (*Black Soldier Fly*)/maggot di kota Yogyakarta. Program ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pengelolaan sampah organik yang berfokus pada pengembangan Kandang Maggot Jogja (KMJ). Kemudian pada tahun 2023 ini, program berfokus pada pengembangan plasma maggot di 6 lokasi (Kelurahan Karangwaru, Bumijo, Winongo Asri, Bener, Wirobrajan, dan Badran) yang meliputi; studi pendahuluan dan 5 tahap *capacity building*, yaitu mengenai BSF secara umum; Teknis Operasional dan *Workshop*; Kelembagaan dan Peraturan; Keuangan, Bisnis Model, dan Ekspor; serta Branding. Program WE CARE dilaksanakan sejak Oktober 2023 hingga Desember 2023, dan akan dilanjutkan pada tahun 2024.
- Program Pemulihan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum**, yaitu program yang bertujuan untuk mewujudkan Sungai Citarum Bersih, Sehat dan Lestari melalui penanaman pohon di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 2.290 pohon Kopi Arabika telah ditanam dengan keluasan area 4,58 hektare yang dimulai sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023.
- Program Penanggulangan Lahan Kritis Dataran Tinggi Dieng**. PT PII bersama PT Geo Dipa Energi dan Pemerintah Daerah Banjarnegara melaksanakan program penanaman 15.000 pohon yang bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan lahan kritis di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Program penanaman pohon ini dimulai sejak 6 Januari hingga 12 Februari 2023.
- Program Konservasi Alam Mangrove Jakarta Utara**
Sebagai bagian dari peringatan HUT PT PII ke-14 sekaligus kegiatan *Employee Volunteerism Program* (EVP), PT PII melaksanakan program penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di kawasan konservasi alam mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Kegiatan yang dilaksanakan pada 16 Desember 2023 ini merupakan bagian dari upaya Perseroan mendukung konservasi mangrove sebagai pelindung pantai, penyerap karbon dan habitat biota yang bernilai ekonomis, seperti ikan, kepiting, dan udang.

Flagship CSR Programs in the Environmental Sector in 2023 include:

- WE CARE (Waste Management for Circular Economy) program**, an organic waste management program, cultivating BSF (*Black Soldier Fly*)/maggot in Yogyakarta city. This program is a continuation of the organic waste management program with a focus on Maggot Cages in Jogja, i.e., Kandang Maggot Jogja (KMJ). Further, in 2023, the program focused on developing maggot plasma in 6 locations (Karangwaru, Bumijo, Winongo Asri, Bener, Wirobrajan, and Badran villages) which include preliminary studies and 5 phases of capacity building, i.e., general BSF; Technical Operations and Workshops; Institutions and Regulations; Finance, Business Models, and Exports; and Branding. WE CARE program has been implemented from October 2023 up to December 2023, and will be continued in 2024.
- Citarum Watershed Ecosystem Restoration Program** is a program with the objective of creating a Clean, Healthy, and Sustainable Citarum River through tree planting in Bandung Regency, West Java Province. 2,290 Arabica Coffee trees were planted in an area equivalent to 4.58 hectares from October 2022 to October 2023.
- Dieng Plateau Critical Land Restoration Program**. IIGF, in collaboration with PT Geo Dipa Energi and the Banjarnegara Government planted 15,000 tree planting program with the objective to support efforts to reduce critical land in the Dieng Plateau Area. The tree planting program was conducted from 6 January to 12 February 2023.
- North Jakarta Mangrove Nature Conservation Program**
As part of the 14th anniversary of IIGF simultaneously with the Employee Volunteerism Program (EVP), IIGF planted 1,000 mangrove tree seedlings at Angke Kapuk Mangrove Nature Conservation, North Jakarta. This activity, carried out on 16 December 2023, was part of the Company's efforts to support mangrove conservation as a coastal protection, carbon sink, and habitat for economically valuable biota, such as fish, crabs, and shrimp.



Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment		
Selama tahun 2023, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp987.836.837 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 8 program. In 2023, the Company disbursed Rp987,836,837 of budget for TJSL implementation in the Community Empowerment sector for 8 programs.	Program TJSL Unggulan Sektor Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023 diantaranya: Program Pemberdayaan UMKM 'Rumah Oleh-oleh Situbondo' PT PII berkomitmen untuk turut andil mendukung program pengembangan UMKM Indonesia, terutama yang berada di wilayah sekitar proyek yang dijamin. Salah satunya adalah wilayah Situbondo, Jawa Timur yang dilalui proyek Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi. Di Situbondo, PT PII bekerjasama dengan mitra program Tiga Langkah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM Situbondo sebagai program TJSL PT PII. Adapun pelaksanaan program yang merupakan keberlanjutan program Pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 ini meliputi beberapa inisiatif, diantaranya; - Pembangunan 1 pusat pemasaran produk-produk UMKM di Kabupaten Situbondo melalui Rumah Oleh-oleh Situbondo - Menjadikan Rumah Oleh-oleh Situbondo sebagai cikal bakal <i>One Stop Solution</i> bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses edukasi, pemasaran, bisnis, kolaborasi, perizinan, <i>co-working space</i>, dan galeri produk unggulan Situbondo - Memfasilitasi 22 pelaku UMKM untuk mendapatkan desain dan kemasan produk - Peningkatan <i>communal branding</i> bagi UMKM Situbondo Program Pemberdayaan UMKM 'Rumah Kemas Makassar' PT PII bekerjasama dengan Baznas mendirikan Rumah Kemas bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rumah Kemas merupakan fasilitas perbaikan kemasan dan tempat kemas otomatis yang diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan pelayanan kemasan bagi UMKM, membantu UMKM memecahkan permasalahan kemasan yang dihadapinya, menjadi unit konsultasi mengenai kemasan dan menjadi tempat pelayanan pengemasan yang dapat diakses oleh pelaku UMKM, serta dapat menyediakan kemasan sesuai dengan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan program pembangunan Rumah Kemas ini, PT PII dan Baznas menargetkan peningkatan usaha kurang lebih 50 pelaku UMKM. Adapun target dan sasaran program ini adalah sebagai berikut: - Meningkatkan standar kualitas produk yang lebih higienis dan sesuai standar permintaan pasar - Menyediakan sarana pembinaan khusus di bidang pengemasan - Menyediakan berbagai layanan dan fasilitas serta informasi terkait kemasan produk agar para pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan mutu, penampilan, nilai jual dan daya saing produknya - Meningkatkan permintaan pasar atas produk UMKM binaan Baznas tidak hanya pasar lokal, tapi bisa masuk pada pasar ekspor - Mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM	Flagship TJSL Programs in the Community Empowerment Sector in 2023 include: MSME Empowerment Program 'Situbondo Souvenir House' ILGF is committed to participating in supporting the Indonesian MSMEs development program, especially those in the area around the guaranteed project. One of them is Situbondo, East Java, which is traversed by the Probolinggo-Banyuwangi Toll Road project. In Situbondo, ILGF, in collaboration with Tiga Langkah program partner, carried out a community empowerment program by developing Situbondo MSMEs as ILGF's TJSL program. The program implementation is a continuation of the MSME Empowerment program since 2022, which includes several initiatives: - Construction of 1 marketing center for MSME products in Situbondo Regency at Situbondo Souvenir House. - Making Situbondo Souvenir House the forerunner of One Stop Solution for MSME entrepreneurs to obtain access to education, marketing, business, collaboration, licensing, co-working space, and a gallery of Situbondo's flagship products - Facilitating 22 MSME entrepreneurs to have product designs and packaging - Improving communal branding for Situbondo MSMEs MSME Empowerment Program 'Makassar Packaging House' ILGF, in collaboration with Baznas, formed a Packaging House for MSME entrepreneurs at Maros Regency, South Sulawesi. Packaging House is an automatic packaging and repair facility that shall be a packaging information and service center for MSMEs, assisting MSMEs in solving packaging problems they face, being a consulting place regarding packaging, and being a packaging service place accessible to MSME entrepreneurs, and providing packaging as needed. In implementing this Packaging House construction program, ILGF and Baznas targeted approximately 50 MSME entrepreneurs. The program's targets and objectives are as follows: - Improving product quality standards that are more hygienic and in accordance with market demand standards - Providing specialized coaching facilities in the packaging sector - Providing various services and facilities as well as information related to product packaging so that MSME entrepreneurs can improve the quality, appearance, selling value, and competitiveness of their products. - Increasing market demand for BAZNAS-assisted SME products, not only in the domestic market but also in the export market. - Supporting sustainability and Creating Shared Value for the Company in providing CSR to the community.



	3. Program Pemberdayaan UMKM 'Gerai Zmart Madiun PT PII bekerjasama dengan Baznas juga bekerjasama dalam melaksanakan program pengembangan Zmart, yaitu program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk dukungan sarana-prasarana usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Adapun pelaksanaan program meliputi: - Modal usaha, dukungan sarana-prasarana warung, renovasi, dan penguatan <i>branding</i> warung kepada 32 penerima manfaat - Pendampingan usaha berbasis kelompok (pertemuan kelompok) dilaksanakan 2 pekan sekali - Pendampingan personal dilakukan untuk memastikan penerima manfaat mengaplikasikan materi yang diberikan pada saat pendampingan kelompok - Peningkatan manajemen <i>stock</i> barang dan pelayanan. 4. Program Pemberdayaan UMKM 'Bedah Warung Kerek Jakarta Selatan Sebagai upaya meningkatkan kapasitas UMKM khususnya di sekitar kantor Perseroan, PT PII bekerjasama dengan Baznas DKI Jakarta melakukan program Bedah Warung Kerek untuk 6 pelaku UMKM kuliner yang meliputi: - Renovasi warung dan peningkatan <i>branding</i>nya - Perbaikan alat kerek makanan termasuk higienitas tempat makanan - Penambahan opsi sistem pembayaran. 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian Padi Nutrizinc dan Pengembangan Pemasaran Produk PT PII terus berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia sebagai bagian dari dukungan pada ketahanan pangan nasional melalui Program Peningkatan Produk Pertanian Padi Nutrizinc dan Pengembangan Pemasaran Produk yang dilaksanakan di Klari, Karawang. Pelaksanaan program ini meliputi: - Pelatihan 30 Petani yang mencakup materi pengelolaan lahan pertanian dan pengenalan padi Nutrizinc - Pelatihan 30 kader Posyandu yang berasal dari 13 Desa di Kecamatan Klari terkait materi gizi seimbang dan pengenalan manfaat beras Nutrizinc untuk pengentasan masalah <i>stunting</i> - Pelatihan 30 pelajar SMK terkait peningkatan kualitas produk pertanian lokal unggulan seperti beras Nutrizinc, pengembangan jaringan pemasok produk dan dasar menjadi distributor produk pertanian lokal, pengembangan pemasaran (optimalisasi <i>e-commerce</i>), pembuatan manajemen keuangan, pengemasan produk, serta dukungan perlengkapan pendukung pengemasan produk - <i>Demo Farm</i> yang mencakup penggarapan lahan, penanaman benih padi Inpari Nutrizinc, pemupukan, penyemaian dan pemantauan secara intensif - Seremonial program sekaligus pemanenan	3. Madium Zmart Stall' MSME Empowerment Program IIGF, in collaboration with Baznas, implemented the Zmart development program, which is an economic empowerment program in the form of support for micro-retail business facilities by enhancing the presence and capacity to overcome poverty in urban areas. The program implementation includes: - Business capital, stall infrastructure support, renovation, and stall branding strengthening to 32 beneficiaries - Group-based business assistance (group meetings) held every 2 weeks - Personal mentoring is carried out to ensure that the relevant beneficiary implements the material provided during group mentoring - Improved stock management and service. 4. 'South Jakarta Crane Stall Renovation' MSME Empowerment Program To build the capacity of MSMEs, especially around the Company's office, IIGF, in collaboration with Baznas of the Special Capital Region of Jakarta, provided Crane Stall Renovation program for 6 culinary MSME entrepreneurs, which included: - Shop renovation and branding improvement - Improvement of food crane equipment, including the hygiene - Additional payment system options. 5. Nutrizinc Rice Agricultural Production Improvement Program and Product Marketing Development IIGF strives to commit to developing the agricultural sector in Indonesia as part of its support for national food security through the Nutrizinc Rice Agricultural Production Improvement and Product Marketing Development Program at Klari, Karawang. The program implementation includes: - Training of 30 Farmers, which includes material on farm management, introduction to Nutrizinc rice, and discussion of constraints regarding Nutrizinc rice farming. - Training of 30 Integrated Health Service Post cadres from 13 villages in Klari Sub-District related to balanced nutrition and introduction to the Nutrizinc rice benefits to alleviate stunting problems - Training of 30 Vocational High School students related to improving the quality of superior local agricultural products such as Nutrizinc rice, developing a product supplier network and the basics of being a distributor of local agricultural products, optimizing <i>e-commerce</i>, developing financial management and product packaging, and supporting equipment for product packaging. - Demo Farm includes land cultivation, planting of Inpari Nutrizinc rice seeds, fertilization, seeding, and intensive monitoring - Ceremony and harvesting



Pendidikan Education

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp937.615.749 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL di bidang Pendidikan sebanyak 6 program. In 2023, the Company disbursed Rp937,615,749 of budget for CSR implementation in the Education sector for 6 programs.

Program TJSL unggulan di bidang pendidikan tahun 2023 diantaranya:

- 1. Program Peningkatan Inovasi Pembelajaran Guru Melalui "Guru Binar"**
PT PII bekerjasama dengan Poetra Sampoerna Foundation mengadakan kegiatan Guru Binar dengan tema 'Digitalisasi dalam Pembelajaran Phase II' yang dilaksanakan di Buleleng, Bali. Program ini merupakan keberlanjutan dari program Phase I sebelumnya, yang dilaksanakan pada tahun 2022. Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kompetensi para guru dalam perancangan media pembelajaran berbasis *digital* dan dapat mendiseminasikan pengetahuan dan keterampilannya secara kontekstual dalam kerangka kurikulum merdeka.

Pada program Phase II yang dilakukan secara *hybrid* ini, PT PII menyasar 50 guru SD dan SMP yang telah melalui proses seleksi untuk diberikan *live coaching* mengenai Media Belajar Digital serta pelatihan dan pendampingan untuk dapat menjadi Diseminator Professional. Setelah *live coaching*, 50 guru penerima manfaat diminta untuk mengembangkan media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi dan instrumen penilaian sesuai prinsip kurikulum merdeka, serta mendiseminasikan ilmu yang telah diberikan kepada 350 guru lainnya di wilayah Bali, sehingga imbas dari program yang diberikan berdampak luas.

- 2. Program Beasiswa PT PII untuk Mahasiswa Indonesia Timur**
PT PII menginisiasi pemberian beasiswa pendidikan kepada 75 mahasiswa berprestasi Indonesia Timur yang sedang menempuh pendidikan di 3 Universitas, yakni 25 mahasiswa di Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Sulawesi Utara, 25 mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Sulawesi Selatan, 25 mahasiswa Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Maluku.

Beasiswa ini ditujukan kepada para mahasiswa dari keluarga pra sejahtera yang sedang menempuh perkuliahan minimal semester 2, memiliki potensi akademik dan non akademik yang baik, serta mendapatkan rekomendasi dari pihak Dekanat atau Rektorat. Beasiswa diberikan dalam bentuk tunjangan biaya hidup dan pendidikan selama 6 bulan. Program pemberian beasiswa ini telah berjalan dari 2023 dan akan berakhir pada 2024.

Selain pemberian dana pendidikan bulanan, program beasiswa ini juga dilengkapi dengan beberapa aktivitas untuk para penerimanya, diantaranya program *capacity building* para penerima beasiswa melalui kegiatan *Student Gathering* and Seminar, yaitu program pendamping yang bertujuan untuk meningkatkan *soft skill* mahasiswa melalui pemberian materi *leadership & communication* dengan mengundang *professional trainer*. Selain itu paguyuban penerima beasiswa di setiap universitas juga didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program *community development* yang digagas oleh paguyuban penerima beasiswa untuk masyarakat sekitar.

Flagship CSR Programs in the Education sector in 2023 include:

- 1. Teacher Education Improvement Program via "Guru Binar"**
IIGF, in collaboration with Poetra Sampoerna Foundation, held a Guru Binar activity with the theme 'Digitalization in Learning Phase II' which was held in Buleleng, Bali. This program is a follow-up on Phase I, which was carried out in 2022. This program was implemented with the objective of increasing the competence of teachers in designing digital-based learning media and being able to disseminate their knowledge and skills contextually within the framework of the independent curriculum.

In this hybrid Phase II program, IIGF targeted 50 elementary and junior high school teachers who have been selected and given live coaching on Digital Learning Media, as well as training and mentoring to become Professional Disseminators. After the live coaching, the 50 beneficiary teachers are requested to develop technology-based contextual learning media and assessment instruments according to the independent curriculum principles, and disseminate the knowledge that has been given to 350 other teachers in Bali. Thus, the program has a broad impact.

- 2. IIGF's Scholarship Program for Eastern Indonesian Students**
IIGF provided educational scholarships to 75 outstanding Eastern Indonesian students who are studying at 3 universities, i.e., 25 students at Sam Ratulangi University (UNSRAT) Manado, North Sulawesi, 25 students at Hasanuddin University (UNHAS) Makassar, South Sulawesi, and 25 students at Pattimura University (UNPATTI) Ambon, Maluku.

This scholarship is intended for students from pre-prosperous families who are studying at least in the 2nd semester and at most in the 6th semester, have good academic and non-academic potential, and have recommendations from the Dean or Rector. The scholarship is provided in the form of a 6-month living and education allowance and would be transferred to the scholarship recipients monthly. The scholarship program has been running since 2023 and will end in 2024.

In addition to the monthly education fund, this scholarship also provided several activities for the recipients, including a capacity-building program for scholarship recipients through Student Gathering and Seminar activities, which is a companion program with the objective of improving students' soft skills by providing leadership & communication materials by inviting professional trainers. In addition, the association of scholarship recipients in each university is also encouraged to be active in social activities via community development programs initiated by the scholarship recipients for the surrounding community.



3. Program Pelatihan Keterampilan Anak Tidak / Putus Sekolah di Kabupaten Kampar

PT PII bekerja sama dengan Yayasan Sigap Kerlip Indonesia (YSKI) melaksanakan program 'Magang Efektif jadi Pribadi Unik dan Mandiri (Medium) Kriya Limpah Kumandang' bagi 50 Anak Tidak/Putus Sekolah Usia Produktif dari 13 Desa di Kabupaten Kampar guna meningkatkan kapasitas mereka agar dapat memiliki keterampilan dan hidup mandiri.

Sejak bulan Oktober Tahun 2023 PT PII dan YSKI telah melakukan pendataan Jumlah ATS/APS di Kabupaten Kampar yang akan mengikuti program ini, dan pada bulan November program 'Medium Kriya Limpah Kumandang' resmi dimulai. Adapun program ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pelatihan yang mencakup keterampilan teknis, konseptual, interpersonal, manajemen, dan komunikasi mengenai pengelolaan destinasi wisata alam dan cottage, pilih pilah sampah menjadi produk siap jual, pendidikan ramah anak, kesehatan masyarakat, serta kesiapsiagaan dan keselamatan terpadu dalam menghadapi bencana alam
- *Business Coaching Program* meliputi penyusunan business plan, pelatihan membuat produk kriya limbah kumandang, *branding*, dan pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk
- Pameran dan pemasaran produk karya limbah kumandang melalui kegiatan Simphoni Bangsa.

4. Program Revitalisasi Sarana Pendidikan & Edukasi Pola Hidup Sehat untuk Masyarakat Suku Kokoda Papua Barat

PT PII bekerja sama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah melaksanakan program revitalisasi sarana – prasarana sekolah dan pendidikan pola hidup sehat untuk masyarakat Kokoda di Papua Barat. Program ini dilaksanakan dengan menginisiasi beberapa kegiatan, diantaranya:

- Revitalisasi sarana – prasarana sekolah untuk memberikan dukungan bagi keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar sehingga guru dan murid tidak khawatir akan terjadinya potensi bencana yang mengancam keselamatan saat proses belajar mengajar berlangsung.
- Pengadaan fasilitas prasarana sekolah (IT) untuk memberikan kebutuhan peralatan sekolah guna mendukung proses belajar mengajar dengan pengadaan kursi dan meja bagi murid dan guru serta mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Pelatihan teknologi pembelajaran (*e-learning*) bagi Guru dan Siswa untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menggunakan teknologi informasi sebagai alat pendukung pembelajaran yang efektif. Program ini mencakup pengenalan terhadap perangkat lunak dan aplikasi yang relevan, pemanfaatan sumber daya daring, dan pengembangan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa.

3. Capacity Building for Out of School Children at Kampar Regency

IIGF, in collaboration with Yayasan Sigap Kerlip Indonesia (YSKI), conducted the 'Kriya Limpah Kumandang Effective Apprenticeship to Become a Unique and Independent Person (Medium)' program for 50 Productive Out-of-School Children from 13 Villages in Kampar Regency, to enhance their capacity to have skills and live independently.

Since October 2023, IIGF and YSKI have collected data on the number of Out-of-School children at Kampar Regency who would take part in this program. In November, the 'Medium Kriya Limpah Kumandang' program officially began. The program was implemented over a period of 4 months with a series of activities as follows:

- Training includes technical, conceptual, interpersonal, management, and communication skills regarding the management of natural tourist destinations and cottages, sorting waste into ready-to-sell products, child-friendly education, public health, and integrated preparedness and safety in facing natural disasters.
- Business Coaching Program includes business plan preparation, training on making limbah kumandang craft products, branding, and utilization of social media for product marketing.
- Exhibition and marketing of limbah kumandang products through Simphoni Bangsa activities.

4. Revitalization of Educational Facilities & Healthy Lifestyle Education Program for Kokoda Tribe of West Papua

IIGF, in collaboration with the Muhammadiyah Community Empowerment Council (MPM), implemented a revitalization program for school facilities and healthy lifestyle education for the Kokoda community in West Papua. This program was implemented by initiating several activities, including:

- Revitalization of School Facilities to provide support for the safety and comfort of the teaching and learning process so that teachers and students are not worried about potential disasters that threaten their safety during the learning process.
- Procurement of School Infrastructure Facilities (IT) to provide school equipment needs, to support the learning process by procuring chairs and tables for students and teachers, and to provide a more interactive learning process by utilizing technological developments.
- E-Learning Technology Training for Teachers and Students to build teachers' capacity to use information technology as an effective learning support tool. This includes an introduction to relevant software and applications, utilization of online resources, and development of technology skills needed to create a more interactive learning experience that is relevant to students' needs.



	- Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi Warga Warmon, Kokoda, Papua Barat. Program pelatihan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dirancang untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola hidup bersih. Dalam memandang permasalahan kesehatan di Kampung Warmon Kokoda, pendekatan edukatif dan partisipatif dianggap sebagai kunci utama untuk mencapai perubahan perilaku yang berkelanjutan. Program ini melibatkan warga kampung secara aktif, mengajak mereka untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran dan penerapan pola hidup bersih.	- Clean and Healthy Lifestyle Behavior (PHBS) Movement for Warmon Residents, Kokoda, West Papua. The Clean and Healthy Lifestyle (PHBS) training program is designed to enhance community awareness and knowledge about the importance of a clean lifestyle. In terms of health issues in Warmon Kokoda Village, a focus on educative and participatory approaches is considered key to achieving sustainable behavior change. The program actively involves the villagers, inviting them to be part of the learning process and doing a clean lifestyle.

Sosial Keagamaan Religious Affairs

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp1.678.693.658 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL di bidang Sosial Keagamaan sebanyak 8 program. In 2023, the Company disbursed Rp1,678,693,658 of budget for CSR implementation in the Religious Affairs sector for 8 programs.	Program TJSL unggulan di bidang sosial dan keagamaan tahun 2023 diantaranya: Program Berbagi Berkah Ramadhan Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445H/2024 M, PT PII menyelenggarakan Donasi berbagi berkah bulan Ramadan melalui dukungan berbagai inisiatif sosial keagamaan, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun lingkungan sekitar tempat tinggal karyawan. Donasi berbagi berkah bulan Ramadan pada tahun 2023 diberikan kepada sekitar 28 Yayasan / DKM / Pesantren / Komunitas keagamaan lainnya guna mendukung kegiatan keagamaan seperti santunan kepada panti asuhan, kaum dhuafa, pembangunan dan renovasi masjid dan mushola serta kegiatan sosial keagamaan lainnya, yang merupakan rekomendasi dari karyawan. Program Semua Bisa Makan Pada bulan suci Ramadhan 1445H/2024 M, PT PII kembali menyalurkan donasi paket makanan siap saji guna mendukung program Semua Bisa Makan untuk masyarakat kurang mampu di sekitar kantor Perseroan. Paket makanan yang terdistribusikan sebanyak 2.500 porsi ini juga sebagai upaya mendukung 10 pelaku usaha warung makan yang berperan dalam menyiapkan makanan siap saji. Program Berbagi Daging Qurban Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444H / 2023 serta sebagai bentuk kepedulian sosial, PT PII menyalurkan 250 kaleng daging hewan kurban untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar area kantor Perseroan. Program Bantuan Pembangunan Rumah Korban Bencana Kebakaran di Langkat, Sumatera Utara Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di Langkat Sumatera Utara pada 2022, PT PII membantu para korban melalui pembangunan 6 unit Rumah Type 30 yang berlokasi di Kampung Darussalam, Desa Telaga Said, Se Lapan, Langkat. Bantuan ini bertujuan agar para korban dapat memiliki rumah yang layak huni kembali dan dapat beraktivitas normal seperti sebelumnya.	Flagship CSR Programs in the Religious Affairs sector in 2023 include: Ramadhan Blessing Sharing Program To welcome the holy month of Ramadhan 1445H in 2024, IIGF organised a donation to share the Ramadhan blessings by supporting various social and religious initiatives, both in the vicinity of the company and the environment around the employees' residences. The donations to share the Ramadhan blessings in 2023 were provided to approximately 28 foundations/DKM/Islamic Boarding Schools/other religious communities, to support religious activities, such as donations to orphanages, the poor, construction and renovation of mosques and prayer rooms, and other social religious activities, as recommended by the employees. In 2023 Everyone Can Eat Program In the holy month of Ramadan 1445H in 2024, IIGF again distributed donations of ready-to-eat food packages to support the Everyone Can Eat Program for underprivileged communities around the Company's office. The 2,500 staple food packages were distributed as an effort to support 10 food stall enterprises that play a role in preparing ready-to-eat meals. Qurban Sharing (Sacrificial Meat) Program To welcome Eid al-Adha 1444H in 2023, and as a form of social care, IIGF distributed 250 cans of sacrificial meat to people in need around the Company's office area. House Construction Assistance for Fire Disaster Victims in Langkat, North Sumatra As a form of care for the people affected by the fire in Langkat, North Sumatra, in 2022, IIGF assisted the victims in the construction of 6 units of Type 30 houses located in Kampung Darussalam, Telaga Said Village, Se Lapan, Langkat. This assistance has the objective of enabling the victims to have a livable home again and be able to carry out normal activities as before fire.



Kesehatan Kesehatan		
Selama tahun 2023, Perseroan telah menyalurkan anggaran sebesar Rp421.867.400 yang diperuntukkan bagi pelaksanaan TJSL di bidang kesehatan sebanyak 4 program. In 2023, the Company disbursed Rp421,867,400 of budget for CSR implementation in the Health sector for 4 programs.	Program TJSL unggulan di bidang kesehatan tahun 2023 diantaranya:	Flagship CSR Programs in the Health sector in 2023 include:
	Program Revitalisasi Akses Air Bersih & Management Pengelolaan Berbasis Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT PT PII berkomitmen untuk mendukung ketersediaan air bersih di daerah pedalaman Indonesia, salah satunya di daerah Nusa Tenggara Timur. Di Desa Tliu Kabupaten Timor Tengah Selatan, PT PII bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah mendukung sarana prasarana akses air bersih berbasis masyarakat dan manajemen pengelolaannya yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari bagi warga Desa Tliu. Adapun pelaksanaan program meliputi: - Sosialisasi program pembangunan bak penampung air sumur, atap/ sumur, instalasi pipa air, instalasi listrik, <i>workshop</i> pengelolaan air berbasis masyarakat - Pengadaan bak penampung utama air sumur - Pengadaan instalasi pipa air bersih dengan jenis pipa PN 16 SDR sepanjang 250 meter yang dapat dimanfaatkan oleh warga Tliu sekitar 250 keluarga. - Pengadaan atap (penutup) air sumur Tliu - <i>Workshop</i> tata kelola kelembagaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas) Desa Tliu. - Konsultasi dan pendampingan pengelolaan air bersih (Pamsimas Desa Tliu) - Pengadaan kendaraan operasional pengelolaan air bersih (Pasimas) - <i>Monitoring</i> dan evaluasi program peningkatan akses air bersih dan manajemen pengelolaan air bersih berbasis masyarakat Program Pengembangan Kapasitas Kader Sehat dan Peningkatan Gizi dengan Beras Nutrizinc PT PII mendukung upaya penurunan angka <i>stunting</i> di Indonesia melalui Intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan asupan karbohidrat dan protein untuk peningkatan gizi dan kesehatan. Melalui program pelatihan pertanian produk pertanian padi lokal unggulan beras nutrizinc yang telah dijalankan sebelumnya, PT PII telah memiliki sebuah produk beras, nutrizinc, hasil kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Karawang yang dimana beras ini memiliki kadar <i>zinc</i> tinggi untuk pencegahan gizi buruk maupun <i>stunting</i>. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader sehat termasuk terkait pentingnya gizi keluarga ini meliputi:	Clean Water Access Revitalization & Community-Based Management Program, Timur Tengah Selatan Regency, East Nusa Tenggara IIGF is committed to supporting the availability of clean water in rural areas of Indonesia, one of which is at East Nusa Tenggara. In Tliu Village, Timor Tengah Selatan Regency, IIGF, in collaboration with the Muhammadiyah Community Empowerment Council (MPM) supported community-based clean water access facilities and management that are beneficial for the daily lives and economic development of Tliu villagers. The program implementation includes: - Socialization of the construction program of the Tliu well water reservoir, Tliu roof/well, water pipe installation, electrical installation, community-based water management workshop - Procurement of the main reservoir of Tliu well water - Procurement of clean water pipe installation with PN 16 SDR pipe of 250 meters, beneficial for Tliu villagers of approximately 250 families. - Procurement of roof (cover) of Tliu water well - Workshop on institutional governance of community-based clean water (Pamsimas) in Tliu Village. - Consultation and mentoring on clean water management (Pamsimas Tliu Village) - Procurement of operational vehicles for clean water management (Pasimas) - Monitoring and evaluation of programs to improve access to clean water and management of community-based clean water management, important to be carried out. Healthy Cadre Capacity Building and Nutrition Improvement Program with Nutrizinc Rice IIGF supported efforts to reduce stunting in Indonesia through specific nutrition interventions, i.e., interventions related to increasing carbohydrate and protein intake to enhance nutrition and health. By using the local nutrizinc rice product from the agricultural training program that has been carried out, IIGF has a rice product, nutrizinc, in collaboration with the Ministry of Agriculture and the Karawang Regency Government, which has high zinc levels for the prevention of malnutrition and stunting. The program has the objective to increase the capacity of healthy cadres including the importance of family nutrition, including:



	- Edukasi / penyuluhan kepada kader sehat yang berada di 13 Desa dengan target total peserta adalah 390 kader sehat posyandu. Peserta Pelatihan (Kader Sehat / Posyandu) secara berkelanjutan memberikan edukasi untuk masyarakat minimal target 10% dari jumlah penduduk yang tercatat di kecamatan Klari yakni total 195.489 jiwa, khususnya untuk remaja, ibu hamil, ibu sedang menyusui, serta ibu dan remaja dengan kondisi anemia. - Penyaluran 3.550 paket gizi sehat yang berisi karbohidrat yang didapat dari beras nutritzinc and protein hewani untuk balita dan anak, perempuan dengan kondisi anemia, perempuan hamil, serta ibu yang memiliki anak balita usia sekolah 3. Program BERAksi (Bergerak Atasi Stunting) Jakarta PT PII mendukung Pemerintah Kota Jakarta Pusat dalam upaya menurunkan angka stunting khususnya di Kelurahan Johar Baru melalui program BERAksi (Bergerak Atasi Stunting). Program ini dilaksanakan dengan pemberian makanan sehat bergizi untuk 16 anak dengan kategori <i>underweight</i>, <i>wasting</i> dan <i>stunting</i> yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, memenuhi kecukupan protein, serta menambah berat badan dan tinggi anak. Program Jakarta BERAksi dilaksanakan selama 90 hari, sedangkan untuk anak yang mengalami <i>underweight</i> dilaksanakan selama 14 hari saja. Melalui program ini, orang tua juga diberikan edukasi tentang pentingnya makanan bergizi untuk tumbuh kembang anak.	- Education/counseling to healthy cadres in 13 other villages with a total target of 390 Integrated Health Service Post healthy cadres. Training Participants (Healthy Cadres/ Integrated Health Service Post) continuously provide education for the Community with a minimum target of 10% of the total population recorded in Klari Sub-District, with a total of 195,489 people, especially for adolescents, pregnant women, breastfeeding mothers, as well as mothers and adolescents with anemia. - Distribution of 3,550 healthy nutrition packages containing carbohydrates from nutritzinc rice and animal protein for toddlers and children, women with anemia, pregnant women, and mothers who have children under five school age. 3. BERAksi (Change to Overcome Stunting) Program in Jakarta IIGF supported the Central Jakarta City Government to reduce stunting rates, especially in Johar Baru Village using the BERAksi (Change to Overcome Stunting) program. This program provided nutritious healthy food for 16 children with underweight, wasting, and stunting categories, with the objective to fulfill nutritional needs, meet protein adequacy, and increase children's weight and height. The Jakarta BERAksi program was implemented for 90 days, while it was carried out for 14 days for underweight children. Via this program, parents are also educated about the importance of nutritious food for children's growth and development.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Public Complaint Handling

PT PII menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat setempat maupun para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pengaduan maupun kritik apabila ditemukan hal yang bersifat merugikan maupun hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan TJSL Perseroan. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada Perseroan dengan menghubungi *Call Center* di +62 21 5795 0550 atau mengunjungi kantor pusat PT PII. Pengaduan juga dapat disampaikan secara tertulis yang ditujukan ke email Perseroan info@iigf.co.id atau melalui *form* keluhan yang tercantum dalam situs *website* PT PII ataupun melalui media sosial Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, PT PII tidak menerima pengaduan dan sanksi terkait ketidakpatuhan terhadap masyarakat maupun terkait program TJSL yang dilaksanakan, serta tidak terdapat insiden pelanggaran terkait hak-hak masyarakat adat yang dilakukan Perseroan.

IIGF implements the transparency principle to the local community and other stakeholders in submitting complaints and criticisms if there are things that are detrimental or matters related to the Company's CSR activities. Complaints can be submitted directly to the Company by contacting the Call Center at +62 21 5795 0550 or visiting IIGF's head office. Complaints can also be submitted in writing, addressed to the Company's email info@iigf.co.id or via the complaint form available at IIGF's website or the Company's social media.

In 2023, IIGF did not receive complaints and sanctions related to non-compliance with the community or the CSR program implemented. There were no incidents of violations related to the rights of indigenous peoples by the Company.



Peningkatan Layanan Kepada Pelanggan Service Improvement to Customers

Pelanggan merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi PT PII. Hal ini mendorong Perseroan untuk terus berupaya memberikan produk dan layanan terbaik dan setara kepada para pelanggan. PT PII senantiasa mengembangkan produk dan layanan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Perseroan meyakini pengembangan dan inovasi terhadap produk dan layanan yang berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada pelanggan.

Dalam memberikan layanan kepada pelanggan, PT PII berupaya memenuhi kebutuhan dari berbagai segmen pelanggan, sesuai dengan perkembangan lini usaha dan portofolio proyek yang didukung oleh Perseroan. Upaya paling utama adalah memberikan pelayanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan secara profesional, baik dari sikap maupun respon yang diberikan oleh Perseroan dan segenap jajarannya. Sejalan dengan itu, PT PII juga senantiasa melakukan inovasi pengembangan layanan, serta membuka saluran pengaduan bagi pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik sesuai dengan prosedur standar yang berlaku.

Customers are one of IIGF's main stakeholders, which encourages the Company to strive to provide the best and equal products and services to customers. IIGF develops sustainable products and services that shall be able to provide economic, social, and environmental benefits. The Company believes that continuous development and innovation of products and services will provide greater long-term benefits to customers.

In providing services to customers, IIGF strives to fulfill the needs of various customer segments, in accordance with the development of business lines and project portfolios supported by the Company. The most vital part is to provide the best and most useful service for each customer professionally, both in the attitude and response given by the Company and all its staff. In line with that, IIGF constantly innovates service development, opens a complaint channel for customers, and is committed to providing the best solution in line with the applicable standard procedures.

Kesetaraan Pemenuhan Kualitas Layanan kepada Pelanggan Equitable Fulfillment of Service Quality to Customers

Perseroan berkomitmen menjunjung kesetaraan pada pelayanan yang adil, konsisten dan berkualitas pada semua jenis layanan yang diberikan tanpa memandang perbedaan tertentu atau diskriminasi perlakuan pada pelanggan. Sehingga melalui pendekatan ini, PT PII memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan akan selalu diperlakukan secara profesional dan berintegritas sehingga terwujud hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik dari sisi badan usaha pemerintah, maupun mitra lainnya.

Bagi PT PII, memberikan perlakuan yang setara kepada pelanggan merupakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, serta dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

The Company is committed to upholding fairness, consistency, and quality of services in all types of services provided without discriminating the customers. Therefore, through this approach, IIGF ensured that every prospective stakeholder shall be treated professionally and with integrity to have a mutually beneficial and sustainable relationship for both the government contracting agency and other partners.

IIGF considers providing equal treatment to customers as the obligation of entrepreneurs, as stipulated in the Law of Consumer Protection, to treat or serve consumers correctly and honestly without any discrimination. The article in the Law stated that entrepreneurs are prohibited from discriminating against consumers in providing services, and are prohibited from discriminating against the quality of services to consumers.



Transparansi Informasi Produk dan Layanan Transparency of Products and Services Information

PT PII senantiasa berupaya untuk selalu memberikan informasi yang jelas, akurat, transparan. Setiap pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi lengkap terkait produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui situs *website* yang beralamat di www.ptpii.co.id. Sejalan dengan itu, Perseroan juga menyediakan sarana/media yang dapat diakses oleh pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya yang ingin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dengan menghubungi Perseroan di +6221 57950550 atau melalui email Perseroan yang beralamat di info@iigf.co.id.

IIGF strives to provide clear, accurate, and transparent information. Every stakeholder can find complete information regarding the products and services offered by the Company via the website at www.ptpii.co.id. In line with that, the Company provides facilities/media that are accessible by customers or other stakeholders who want to obtain more comprehensive information, by contacting the Company at +6221 57950550 or through the Company's email address at info@iigf.co.id.

Pengelolaan Pengaduan Pelanggan Customer Complaint Management

Sebagai bagian dari upaya Perlindungan Pelanggan, Perseroan telah menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan yang dapat ditujukan kepada Divisi Corporate Secretary & Communication. Penyampaian keluhan, saran atau kritik dapat disampaikan melalui alamat pengaduan ke:

As part of the Customer Protection effort, the Company provides a channel to submit complaints, to be addressed to the Corporate Secretary & Communication Division. Complaints, suggestions, or criticisms can be submitted via the complaint media to:

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place, 7-8 Floor

Jl. Gatot Subroto No. Kav 18, RT.6/RW.1, Kuningan Barat,
Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan

+62 21 5795 0550 +62 21 5795 0040 info@iigf.co.id

Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey

PT PII secara berkala melaksanakan survei kepuasan pelanggan berupa *stakeholders survey* kepada pemangku kepentingan kunci Perseroan guna memperoleh *feedback* terkait pengetahuan dan persepsi atas kinerja Perseroan. Survei ini dilaksanakan PT PII sebagai upaya Perseroan untuk memahami pandangan terhadap pengetahuan terkait layanan yang diberikan maupun persepsi atas kinerja Perseroan. Melalui interaksi terstruktur ini, PT PII mampu mengidentifikasi area perbaikan, mengukur tingkat kepuasan, serta meningkatkan kualitas keseluruhan produk dan layanan yang diberikan.

IIGF regularly conducts customer satisfaction surveys in the form of stakeholder surveys to the Company's stakeholders to obtain feedback regarding the knowledge and perception of the Company's performance. IIGF conducts the study in its effort to understand the perspective and knowledge of the Company's services and performance. Through this structured interaction, IIGF can identify areas of improvement, assess satisfaction levels, and improve the overall quality of the products and services provided.

Pada tahun 2023, rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata *existing stakeholder* sebesar 4,50 dan masuk dalam kategori "Sangat Teredukasi". Sementara itu rata-rata persepsi kinerja PT PII di mata *potential stakeholders* sebesar 4,02 atau masuk dalam kategori "Sangat Positif". Jika dirangkum, maka indeks pengetahuan dan persepsi kinerja dari para stakeholders baik *existing* maupun *potensial* PT PII adalah sebesar 4,26 dari skala 5 yang berada pada level "Satisfactory".

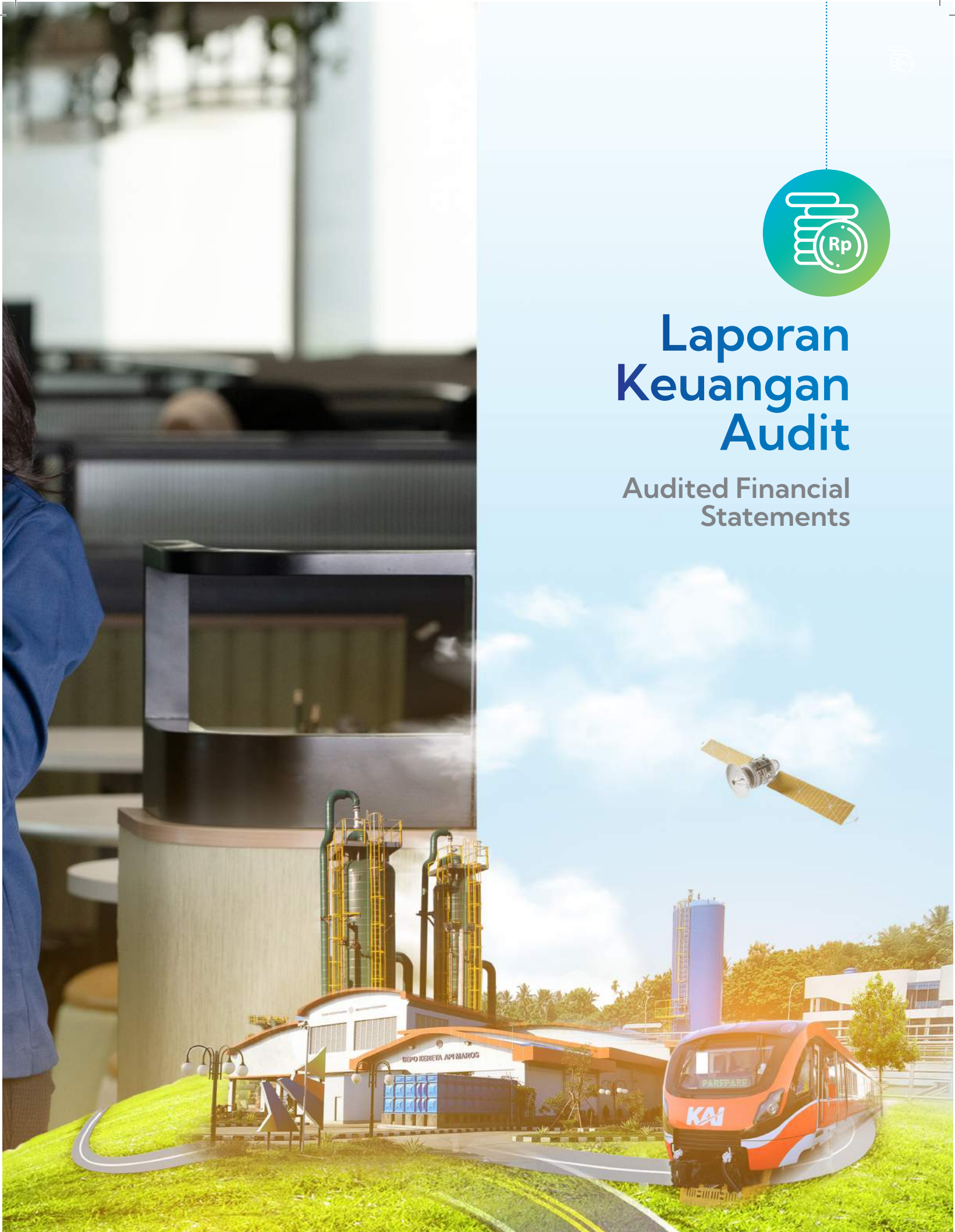
In 2023, the existing stakeholders assessed IIGF's performance at 4.50, or "Very Educated". Meanwhile, the potential stakeholders assessed IIGF's performance at 4.02, or "Very Positive". In summary, the knowledge index and perceived performance of IIGF from existing and potential stakeholders is 4.26 out of 5, or "Satisfactory".





Laporan Keuangan Audit

Audited Financial
Statements





PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS*
31 DESEMBER/*DECEMBER* 2023



**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**
**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Wahid Sutopo
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Donny Hamdani
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Alamat Rumah : Jl. Duren Sawit Blok K2/10 RT
012 RW 011, Klender, Duren
Sawit, Jakarta Timur
Nomor Telepon : 021- 5795 0550
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2023 AND
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**

We, the undersigned:

1. Name : M. Wahid Sutopo
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address : Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Telephone : 021- 5795 0550
Title : President Director
2. Name : Donny Hamdani
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal
Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta
12710
Residential address : Jl Duren Sawit Blok K2/10 RT
012 RW 011, Klender, Duren
Sawit, Jakarta Timur
Telephone : 021- 5795 0550
Title : Finance Director

declare that:

1. we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
b. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 Februari/February 2024

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

M. Wahid Sutopo
Direktur Utama/
President Director

Donny Hamdani
Direktur Keuangan/
Finance Director

Address : Capital Place 7-8th Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia
Phone : +62 21 5795 0550 | Fax : +62 21 5795 0040 | Email : info@iigf.co.id | Website : www.iigf.co.id



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00206/2.1025/AU.1/09/1124-1/1/II/2024



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

00206/2.1025/AU.1/09/1124-1/1/II/2024



- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
28 Februari/February 2024

Jimmy Pangestu, S.E.
Izin Akuntan Publik/ Public Accountant License No. AP.1124



Penjaminan Infrastruktur Indonesia
/Persero/ 00206/2-1026-AU-1/09-1124-
1/1/2024

00206/2.1025/AU.1/09/1124-1/1/2024



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	121,487,653	5	134,306,368	Cash and cash equivalents
Investasi	15,793,648,683	6	15,008,163,837	Investments
Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 18.775.000 (2022: Rp 2.000.000)	327,574,789	7	294,720,460	Account receivables – net of allowance for impairment losses of Rp 18,775,000 (2022: Rp 2,000,000)
Piutang lainnya	11,444,354		9,884,584	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3,106,223		2,824,837	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	13,550,832	8	4,895,573	Fixed assets
Aset hak-guna	45,313,785	9	12,573,130	Right-of-use assets
Aset takberwujud	4,287,126	10	5,469,731	Intangible assets
Beban tangguhan	4,333,808	11	5,663,392	Deferred expenses
Pajak dibayar dimuka	5,030,281	13a	2,015,255	Prepaid income tax
Aset pajak tangguhan	70,902,886	13d	69,194,332	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039		5,369,039	Refundable deposits
JUMLAH ASET	16,406,049,459		15,555,080,538	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	14,044,779	12	9,993,160	Account payables
Utang pajak	3,845,808	13b	3,779,948	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	162,668,910	14	135,669,181	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	130,836,305	15	169,931,976	Unearned income
Liabilitas sewa pembiayaan	46,200,522	16	8,545,628	Finance lease liabilities
Pinjaman penerusan	55,126,686	17	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas imbalan kerja	30,526,271	18	18,565,047	Employee benefits obligation
JUMLAH LIABILITAS	443,249,281		401,611,626	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 20.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 10.655.000 lembar, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	10,655,000,000	19	10,655,000,000	Share capital - authorised, 20,000,000 shares - issued and paid 10,655,000 shares, with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Laba belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	142,007,600		20,604,578	Unrealised gain from financial assets at fair value through other comprehensive income
Keuntungan aktuarial, setelah pajak	848,646		5,906,831	Gain from actuarial, net of tax
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib	264,478,126	21	228,769,445	appropriated - statutory reserve
Belum ditentukan penggunaannya	4,900,465,806		4,243,188,058	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	15,962,800,178		15,153,468,912	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	16,406,049,459		15,555,080,538	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan	232,353,547	22	252,573,833	Revenue from guarantee
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	70,529,576	22	41,098,924	Revenue from project preparation and transaction advisory
Pendapatan pengelolaan dana	1,009,080,358	22	793,702,056	Income from investments
Pendapatan lainnya	6,042,076	22	1,477,498	Other income
Jumlah pendapatan	1,318,005,557		1,088,852,311	Total revenues
Beban usaha				Operating expenses
Beban pajak final	(139,545,730)	13c	(98,959,572)	Final tax expense
Umum dan administrasi	(127,058,918)	23	(113,441,398)	General and administrative
Penjaminan	(77,191,609)	23	(82,378,959)	Guarantee
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	(76,928,221)	23	(49,357,081)	Project preparation and transaction advisory
Pengembangan usaha	(35,617,112)	23	(31,257,890)	Business development
Kerugian penurunan nilai	(16,775,000)	7	(2,000,000)	Impairment losses
Beban bunga (termasuk beban bunga sewa pembiayaan)	(5,712,278)		(6,403,589)	Interest expense (including finance lease interest)
Penyusutan	(3,163,028)	8	(4,526,421)	Depreciation
Amortisasi	(2,145,325)	10	(1,773,502)	Amortisation
(Kerugian)/keuntungan kurs, bersih	(63,587)		337,799	Foreign exchange (loss)/gain, net
Penghasilan keuangan, kotor	1,428,073		1,815,715	Finance income, gross
Lain-lain	306,445		1,729,057	Others
Jumlah beban usaha	(482,466,290)		(386,215,841)	Total operating expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	835,539,267		702,636,470	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan	281,887	13c	11,537,151	Income tax benefit
Laba tahun berjalan	835,821,154		714,173,621	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan/(kerugian) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	121,403,022	6b	(279,746,765)	Items that will be reclassified subsequently to profit and loss: Gain/(loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income for the year
	121,403,022		(279,746,765)	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	(6,484,852)	18	2,151,088	Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss: Remeasurement from post-employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	1,426,667	13d	(473,239)	Related income tax
	(5,058,185)		1,677,849	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	116,344,837		(278,068,916)	Other comprehensive income for the year, net of tax
Total laba komprehensif tahun berjalan	952,165,991		436,104,705	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Laba/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealised gain/ (loss) from financial assets at fair value through other comprehensive income	Keuntungan setelah pajak/ Actuarial gain net of tax	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	Balance at 1 January 2022
				Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib/ Appropriated - statutory reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo 1 Januari 2022	9.570.000,000	300.351,343	4.228,982	197.499,338	3.716.635,078	13.788.714,741	
Penambahan modal	1.085.000,000	-	-	-	-	1.085.000,000	Additional capital
Pencadangan saldo laba	-	-	-	31.270,107	(31.270,107)	-	Appropriation of retained earnings
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:							
- Laba tahun berjalan	-	-	-	-	714.173,621	714.173,621	Comprehensive income for the year: Profit for the year -
- Dividen	-	-	-	-	(156.350,534)	(156.350,534)	Dividend -
- Penghasilan komprehensif lain:							Other comprehensive income -
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	-	(279.746,765)	-	-	-	(279.746,765)	Financial assets at fair value through
- melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	1.677,849	-	-	1.677,849	other comprehensive income
- Pengukuran kembali atas liabilitas	-	-	-	-	-	-	Remeasurement of post-employment -
- Imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	benefit liabilities, net of tax
Saldo 31 Desember 2022	10.655.000,000	20.604,578	5.906,831	228.769,445	4.243.188,058	15.153.468,912	Balance at 31 December 2022
Pencadangan saldo laba	-	-	-	35.708,681	(35.708,681)	-	Appropriation of retained earnings
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:							
- Laba tahun berjalan	-	-	-	-	835.821,154	835.821,154	Comprehensive income for the year: Profit for the year -
- Dividen	-	-	-	-	(142.834,725)	(142.834,725)	Dividend -
- Penghasilan komprehensif lain:							Other comprehensive income -
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	-	121.403,022	-	-	-	121.403,022	Financial assets at fair value through
- melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	(5.058,185)	-	-	(5.058,185)	other comprehensive income
- Pengukuran kembali atas liabilitas	-	-	-	-	-	-	Remeasurement of post-employment -
- Imbalan pascakerja, setelah pajak	-	-	-	-	-	-	benefit liabilities, net of tax
Saldo 31 Desember 2023	10.655.000,000	142.007,600	848,646	264.478,126	4.300.465,806	15.962.800,178	Balance at 31 December 2023

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan		835,539,267	702,636,470	Profit before income tax
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:				Add items not affecting cash flows:
- Beban penyusutan	8	3,163,028	4,526,421	Depreciation expense -
- Beban kerugian penurunan nilai	7	16,775,000	2,000,000	Impairment losses -
- Beban amortisasi	10	2,145,325	1,773,502	Amortisation expense -
- Beban penyisihan imbalan kerja	18	6,056,779	3,387,218	Expense from -
- Beban amortisasi aset hak-guna	9	18,237,353	18,859,696	provision for employee benefits obligation
- Beban bunga sewa pembiayaan		1,784,503	2,475,813	Right-of-use assets amortisation expense -
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		883,701,255	735,659,120	Finance lease interest expense -
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				Changes in operating assets and liabilities
- Piutang usaha		(49,629,330)	(127,503,419)	(Increase)/decrease in operating assets:
- Piutang lainnya		(1,559,770)	850,713	Account receivables -
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka		(281,385)	3,909,386	Other receivables -
- Beban tangguhan		1,329,583	1,907,536	Prepaid expenses and advances -
- Pajak dibayar dimuka		(3,015,026)	(402,310)	Deferred expenses -
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:				Prepaid tax -
- Utang usaha		4,051,619	2,620,396	(Decrease)/increase in operating liabilities:
- Utang pajak		65,860	(641,521)	Account payables -
- Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain		26,999,729	70,387,353	Taxes payable -
- Pembayaran manfaat imbalan kerja	18	(580,407)	(1,566,722)	Accrued expenses, provisions and other payables
- Pendapatan tangguhan		(39,095,671)	(1,185,278)	Payment of employee benefits
		(61,714,798)	(51,623,866)	Unearned income -
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		821.986.457	684.035.254	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penempatan investasi		(664,081,825)	(7,339,609,334)	Placement for investments
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud	8,10	(12,781,007)	(5,282,162)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(676,862,832)	(7,344,891,496)	Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	19	-	1,085,000,000	Share capital received
Pembayaran dividen	20	(142,834,725)	(156,350,534)	Dividend payment
Pembayaran sewa	27	(15,107,615)	(27,434,510)	Payment for lease
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(157,942,340)	901,214,956	Net cash flow (used in)/provide from financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas		(12,818,715)	(5,759,641,286)	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun		134,306,368	5,893,947,654	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun		121,487,653	134,306,368	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan dengan Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No. 6 tanggal 12 Juli 2023. Selanjutnya, perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0139871 pada tanggal 13 Juli 2023.

Sesuai dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk:

- Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) di bidang infrastruktur;
- Memberikan penjaminan Pemerintah (*sovereign guarantees*) dalam pembiayaan di bidang lainnya selain infrastruktur berdasarkan penugasan Pemerintah; dan
- Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan pemerintah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang mendukung perekonomian nasional baik pusat dan daerah.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain:

- Memberikan penjaminan kewajiban finansial Pemerintah dalam skema perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") dalam proyek infrastruktur.
- Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah di bidang infrastruktur.
- Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 dated 27 January 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Arry Supratno, S.H. No. 06 dated 12 July 2023. Subsequently, the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-AH.01.09-0139871 dated 13 July 2023.

In accordance with adjustment of Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to:

- To provide sovereign guarantees in infrastructure sectors;
- To provide sovereign guarantee for financing in other than infrastructure sectors based on the assignment from the Government; and
- To conduct activities related to the implementation of sovereign guarantees and other activities related to the implementation of project development that support the national economy both centralised and regional.

In achieving its objective, the Company may do, among others:

- To provide guarantee for the Government's financial obligations in the Public Private Partnership ("PPP") cooperation agreement in infrastructure projects.
- To provide guarantee for the Government's financial obligations in the infrastructure sector.
- To provide guarantees for default risk of the State-Owned Enterprises ("SOEs") based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/2 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain: (lanjutan)

- d) Memberikan penjaminan atas risiko gagal bayar Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD") dan/atau pemerintah daerah berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan, dan penerbitan surat utang/obligasi.
- e) Memberikan penjaminan atas risiko finansial lainnya kepada BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha berdasarkan penugasan dan/atau ketentuan Menteri Keuangan, yang timbul sebagai akibat perolehan pembiayaan atau fasilitas mitigasi risiko finansial selain pinjaman dan surat utang/obligasi.
- f) Memberikan penjaminan kepada pelaku usaha lainnya sesuai dengan penugasan dan/atau ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- g) Memberikan jasa konsultasi, penyediaan informasi, fasilitas perencanaan, penyiapan, dan penilaian kelayakan, atas proyek atau program, serta hal lain terkait mitigasi risiko/pemantauan risiko dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek.
- h) Kerja sama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan internasional dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan.
- i) Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- j) Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.

Perusahaan merupakan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("BUPI") yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan memiliki dukungan pemenuhan kelayakan dan kapasitas oleh, bila diperlukan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral atau kombinasinya - untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

1. GENERAL (continued)

In achieving its objective, the Company may do, among others: (continued)

- d) To provide guarantees for default risk of the Regional Owned Enterprises based on the assignment and/or the provision set by the Minister of Finance arising from the implementation of loan agreements with financial institutions, and issuance of debt securities/bonds.*
- e) To provide guarantee for other financial risks to SOEs, Regional Owned Enterprises and/or Enterprises based on the assignment and/or provision set by the Minister of Finance arising from obtaining financing or financial risk mitigation facilities other than loan and debt securities/bonds.*
- f) To provide guarantee to other business entities in accordance with the assignments and/or provisions set by the Minister of Finance.*
- g) To provide consulting services, providing informations, planning facilities, preparation, and feasibility assessment, on project or program, and other matters related to risk mitigation/risk monitoring and/or activities related to risk allocation and project financing structure.*
- h) Cooperation with other parties, including international financial institutions in implementation of guarantee provision.*
- i) Joint ventures or equity participation in other legal entities that have similar goals and objectives with the Company.*
- j) Other activities to achieve the goals and objectives of the Company.*

The Company is BUPI that operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). Guarantees provided by the Company have eligibility and capacity supported by, as necessary, the Government of Indonesia ("GOI"), a multilateral financing agency or a combination - for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/3 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2023
Komisaris Utama	Rina Widiyanti Wahyuningdyah ¹⁾
Komisaris	Iqbal Islami ²⁾
Komisaris	Mariatul Aini
Direktur Utama	Muhammad Wahid Sutopo
Direktur	Andre Permana
Direktur	Donny Hamdani

- 1) Rina Widiyanti Wahyuningdyah diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 216/KMK.06/2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2023.
- 2) Iqbal Islami diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ("KMK") No. 33/KMK.06/2023 yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki 164 pegawai (2022: 151 pegawai) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

The Company is domiciled in Indonesia, located at Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2023 and 2022, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	2022	
Awan Nurmawan Nuh	President Commissioner	
Wahyu Utomo	Commissioner	
Mariatul Aini	Commissioner	
Muhammad Wahid Sutopo	President Director	
Andre Permana	Director	
Donny Hamdani	Director	

- 1) Rina Widiyanti Wahyuningdyah has been appointed as the President Commissioner based on KMK No. 216/KMK.06/2023 which has been set on 19 June 2023.
- 2) Iqbal Islami has been appointed as the Commissioner based on KMK No. 33/KMK.06/2023 which has been set on 31 March 2023.

As at 31 December 2023, the Company has 164 employees (2022: 151 employees) (unaudited).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2024.

Berikut ini adalah informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The financial statements of the Company were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 28 February 2024.

Presented below are the material accounting policy information adopted in preparing the Company's financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/4 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statement of cash flows is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/5 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru yang telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"; dan
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Terkait adanya siaran pers DSAK-IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Perusahaan, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statement of Financial Accounting Standards

The Indonesian Accounting Standard Board Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued new standards which have been effective on 1 January 2023, these standards are as follows:

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" - Accounting policies disclosure;
- Amendment of SFAS 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- Amendment of SFAS 25: "Accounting policies, changes of accounting estimates, and error"; and
- Amendment of SFAS 46: "Income Tax" regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial years.

Regarding the DSAK-IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Company changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provision in SFAS 24 for the general fact pattern of pension programs based on the UU Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Company, therefore the impact of the changes is recorded entirety in the financial statements for the year ended 31 December 2022.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/6 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

b. Penjabaran mata uang asing

b. Foreign currency translation

a. Mata uang fungsional dan penyajian

a. Functional and presentation currency

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.

b. Transaksi dan saldo

b. Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

Transactions denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

c. Kas dan setara kas

c. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

d. Aset dan liabilitas keuangan

d. Financial assets and liabilities

Aset keuangan

Financial assets

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, (iii) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), (iii) financial assets measured at amortised cost. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- (i) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which are acquired principally for the purpose of selling or repurchasing them in the short-term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- (ii) *Financial assets measured at amortised cost*

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha, piutang lainnya, uang jaminan yang dapat dikembalikan serta investasi Perusahaan pada obligasi tertentu.

Financial assets at amortised cost are recognised initially at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's financial assets at amortised cost comprise of cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables, other receivables, refundable deposits and the Company's investment in certain bonds.

- (iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- (iii) *Financial assets at fair value through other comprehensive income*

Suatu instrumen utang diukur pada aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi:

A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/8 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

(iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

(iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income (continued)

Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

After initial measurement, these financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in statement of changes in equity until the financial assets are derecognised. The Company's investments in certain bonds are classified in this category.

Penilaian pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Solely payments of principal and interest ("SPPI") assessment

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Company's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/9 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen senior;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (berdasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but not limited to:

- How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;
- The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and
- How managers of the business unit are compensated (based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

The Company can reclassify all of its financial assets if and only if, its business model for managing those financial assets changes.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/10 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menetapkan aset keuangan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual.

Ketika ada sejumlah aset keuangan yang dianggap tidak dapat tertagih atau berpotensi gagal bayar, maka cadangan kerugian penurunan nilai akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai adalah selisih antara jumlah aset keuangan yang tercatat dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung berdasarkan skenario pemulihan yang diidentifikasi atas rencana penyelesaian untuk masing-masing badan usaha secara individu. Keadaan dari masing-masing badan usaha secara individu dipertimbangkan ketika Perusahaan memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukkan unsur pertimbangan yang signifikan.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto piutang usaha dan beban tangguhan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dianggap tidak dapat tertagih atau berpotensi gagal bayar.

Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial assets (continued)

Business model assessment (continued)

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

Impairment of financial asset

The Company determines that financial asset should be evaluated for impairment through individual evaluation.

When any financial assets amount is considered uncollectible or potentially default, a credit impairment provision is raised. This provision is the difference between the account receivables and the present value of estimated future cash flows, based on recovery scenario that has been identified for the workout plan for each investors individually. The individual circumstances of each investors are considered when the Company estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgement.

Presentation of allowance for expected credit losses in statements of financial position

Allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the account receivables and deferred expenses.

At each reporting date, the Company assesses whether the financial assets recorded at amortized cost considered uncollectible or potentially default.

Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/11 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain, dan pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial liabilities

Financial liabilities measured at amortised
cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, accrued expenses, provisions and other payables, and two-step loans are classified in this category.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/12 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Determination of fair value (continued)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss over the life of the instrument.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/13 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), nilai tukar mata uang asing, volatilitas dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sedangkan reklasifikasi untuk liabilitas keuangan tidak diperkenankan.

Perusahaan akan mereklasifikasi aset keuangan yang terdampak oleh perubahan model bisnis. Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Determination of fair value (continued)

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset, and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Reclassification of financial assets

The Company is permitted to reclassify its financial assets if the Company changes its business model for managing financial assets while reclassification for financial liabilities is not permitted.

The Company will reclassify financial assets affected by changes in business models. Changes in the Company's business model objectives must have an impact before the reclassification date.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/14 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL** (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar);
- hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan; dan
- pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perusahaan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan terdiri dari: KPBU, Non-KPBU, dan penjaminan pelaku usaha korporasi.

Kerugian kredit ekspektasian nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan. Kerugian kredit ekspektasian atas jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain.

KPBU

Perusahaan memiliki perjanjian regres dengan PJPK terkait dengan penjaminan KPBU, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPK atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha ("BU") akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION** (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Reclassification of financial assets
(continued)

The followings are not a change in business model:

- changes in intention relating to certain financial assets (even in situations significant changes in market conditions);
- temporary loss of certain markets for financial assets; and
- transfer of financial assets between parts of the Company with different business models.

The Company applies a prospective reclassification of the date of the reclassification. The Company does not restate profits, losses (including impairment profit or loss), or interest recognised earlier.

Financial guarantee contracts and other commitment receivables

The financial guarantee contracts owned by the Company consist of: PPP, Non-PPP, and guarantees for corporate business entities.

Expected credit loss on financial guarantee contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement. Expected credit loss on financial guarantees is recognised as other liabilities.

PPP

The Company has recourse agreement with GCA related to PPP's guarantee, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that has been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/15 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya (lanjutan)

Non-KPBU

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan BUMN Terjamin terkait dengan penjaminan atas gagal bayar dari BUMN Terjamin yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi. Perusahaan akan mendapatkan hak tagih dari BUMN Terjamin atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada pemberi pinjaman dan/atau pemegang obligasi akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran BUMN Terjamin kepada pemberi pinjaman.

Pelaku Usaha Korporasi

Peran Perusahaan dalam penjaminan pelaku usaha korporasi adalah untuk memberikan dukungan *loss limit* dan melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") atas kewajiban finansial terjamin (Pelaku Usaha) kepada penerima jaminan (Bank) dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN").

e. Investasi

Investasi terdiri dari deposito berjangka, obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta Obligasi Pemerintah.

Obligasi Pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Perusahaan telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Financial guarantee contracts and other commitment receivables (continued)

Non-PPP

The Company also has recourse agreement with guaranteed SOEs related to provision of guarantee to guaranteed SOEs for defaulted payments by guaranteed SOEs who received loans and/or issued bonds. The Company will get the rights to claim or recourse back to guaranteed SOEs for any payment that has been made by the Company to the lenders and/or bondholders, due to inability of guaranteed SOEs in fulfilling its financial obligations to the lenders.

Corporate Business Entity

The Company's role in corporate business entity guarantee to provide loss limit support and carry out joint guarantees with the Indonesian Export Financing Agency ("LPEI") for guaranteed financial obligations (Business Entity) to guarantee recipients (Banks) related to the government's guarantee for National Economic Recovery ("PEN").

e. Investments

Investments consist of time deposits, corporate bonds traded in the money market and at the stock exchange and Government Bonds.

Government Bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia purchased from the market.

The Company has classified all investment in sukuk as amortised cost in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/16 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

e. Investasi (lanjutan)

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi disajikan sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut. Selisih antara biaya perolehan dan nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

e. Investments (continued)

Investments in sukuk measured at amortised cost are stated at fair value plus or minus transaction costs related to the acquisition of the investment. The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.

f. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

f. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives, as follows:

Tahun/Years

Prasarana kantor	4
Peralatan komputer	4
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	4

Leasehold improvement
Computer equipments
Office equipments, furnitures and fixtures

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

The assets residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statement profit or loss.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/17 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Aset takberwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset takberwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset takberwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

g. Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

h. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/18 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

h. Perpajakan (lanjutan)

h. Taxation (continued)

Pajak penghasilan tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is recognised on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan suku bunga pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus Ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

i. Liabilitas imbalan kerja

i. Employee benefits obligation

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

i. Employee benefits obligation (continued)

Pension benefits

The Company is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the UU Cipta Kerja No. 11 Year 2020 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on UU Cipta Kerja No. 11 Year 2020 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Job creation Law No. 11 of 2020 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/20 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

i. Employee benefits obligation (continued)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

Other long-term employee benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

j. Utang usaha dan lain-lain

j. Account and other payables

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

k. Penyisihan

k. Provisions

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diamortisasi berdasarkan metode garis lurus dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu periode penjaminan. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

- (i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.
- (ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

- (i) *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan/atau pada saat penjaminan telah efektif, sesuai dengan kesepakatan dalam surat imbal jasa, dan tidak dapat dikembalikan.
- (ii) Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Pendapatan penjaminan korporasi padat karya merupakan *guarantee fee* yang diakui sebesar porsi margin dari imbal jasa penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama yang diterima saat diberikannya penjaminan dan diamortisasi selama periode penjaminan atau periode pelaksanaan jasa.

Pendapatan bunga regres merupakan pendapatan bunga yang diterima atas timbulnya piutang regres. Pendapatan bunga regres diakui dengan metode bunga efektif.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

I. Revenues and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income and fees and commissions.

Premium income consists of *guarantee fee* and *processing fee*. Revenue from *guarantee fee* is amortised based on straight-line method and recognised as income over the guarantee period. Revenue from *processing fee* is recognised when earned.

- (i) *Guarantee fee* is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.
- (ii) *Processing fee* is earned for providing services in processing claims submitted to the guarantor.

Fees and commissions consist of upfront fee and other fees and commissions.

- (i) *Upfront fee* is recognised upon signing of guarantee contract and/or the effectiveness of guarantee, in accordance with fee letter, and non-refundable.
- (ii) Other fees and commission is recognised as incurred.

Revenue from labor intensive corporation is *guarantee fee* which is recognised at margin portion of loss limit guarantee and Corporate Business Entity co-guarantee service fees that received when the guarantee was given and are amortised during guarantee period or period of service.

Recourse interest income is interest income received on the occurrence of recourse receivables. Recourse interest income is recognised using the effective interest method.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

l. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan jasa dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui ketika jasa telah dilaksanakan, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan biaya-biaya yang terjadi dapat diukur secara handal. Pendapatan diakui sebesar biaya-biaya yang terjadi ditambah margin yang diakui untuk semua penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito berjangka dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu dan disajikan sebagai beban tangguhan. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

m. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset diidentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Pada tanggal permulaan sewa Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan. Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

l. Revenues and expenses (continued)

Revenue from project preparation and transaction advisory are recognised when services have been rendered, where it is probable that economic benefits will flow to the Company and expenses incurred can be reliably measured. Revenue is recognised from costs incurred plus recognised margin for all the work in process up to the stage completion as agreed.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred and presented as deferred charges. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.

m. Leases

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date. The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/23 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Beban keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset Hak-Guna" dan "Liabilitas sewa pembiayaan" di dalam laporan posisi keuangan.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- biaya langsung awal; dan
- biaya restorasi.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa jangka-pendek

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments are allocated between the principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets as part of "Right-of-Use Asset" and "Finance lease liabilities" in the statement of financial position.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *the amount of the initial measurement of lease liability;*
- *any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *any initial direct costs; and*
- *restoration costs.*

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Short-term leases

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

- perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
- perusahaan asosiasi;
- investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan iii di atas;
- karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
- entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

n. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS 7 "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

- entities under the control of the Company;
- associated companies;
- investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
- entities controlled by investors under note iii above;
- key employees and family members; and
- entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign currency exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk

(i) Foreign currency exchange rate risk

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2023 and 2022, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact the Company's current year profit after tax.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset keuangan Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito berjangka dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito berjangka Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan investasi yang diukur dengan biaya diamortisasi dengan suku bunga tetap.

Liabilitas keuangan Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan *SUN Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan memitigasi risiko kredit dengan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria *counterparty* yang selektif.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(1) Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rates in the market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within 1 (one) year (short-term), while most of the other investments are fixed rate investments.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as investment at fair value through other comprehensive income and investment at amortised cost with fixed interest rate.

*The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate using *SUN Benchmark* with 20 years tenor. The changes due to higher or lower interest rates in the market will not significantly impact the Company's interest expense.*

(2) Credit risk

The Company mitigates its credit risk by setting a prudent investment policy, including investment mandates for type of investment, portfolio, allocation as well as selective criteria for counterparty.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

Deposito berjangka, deposito yang diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai berikut:

	2023	2022
AAA	7,019,445,541	3,250,307,348
AA+	-	984,020,000
AA	-	1,953,388,102
	<u>7,019,445,541</u>	<u>6,187,715,450</u>

Untuk saldo kas dan setara kas, manajemen menganggap bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya dalam waktu dekat. Akibatnya, tidak ada penyisihan kerugian yang diakui berdasarkan ekspektasi kerugian kredit 12 bulan, karena penurunan nilai tersebut juga tidak signifikan bagi Perusahaan.

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek utang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang di luar Pemerintah dengan peringkat investasi paling rendah AA.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2023					
	Lancar/ Current	<1 tahun/ <1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	>2 tahun/ >2 years	Jumlah/ Total
Aset					
Kas dan setara kas ¹⁾	121,145,541	-	-	-	121,145,541
Investasi	15,793,648,683	-	-	-	15,793,648,683
Piutang usaha	321,201,039	21,848,750	1,300,000	2,000,000	346,349,789
Piutang lainnya	11,444,354	-	-	-	11,444,354
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039	-	-	-	5,369,039
	<u>16,252,808,656</u>	<u>21,848,750</u>	<u>1,300,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>16,277,957,406</u>
Dikurangi:					
Penyisihan kerugian penurunan nilai					<u>(18,775,000)</u>
					<u>16,259,182,406</u>

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk (continued)

Time deposits, time deposits classified as cash and cash equivalents and cash in bank are placed with highly reputable domestic banks as follows:

For cash and equivalents balances, management considers that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations in near term. As a result, no loss allowance has been recognised based on 12-month expected credit losses, as any such impairment is also insignificant to the Company.

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities outside Government with investment grade at the lowest of AA.

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Assets
Cash and cash equivalents¹⁾
Investments
Account receivables
Other receivables
Refundable deposits

Less:
Allowance for impairment losses



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

(2) Credit risk (continued)

31 Desember/December 2022					
Lancar/ Current	<1 tahun/ <1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	>2 tahun/ >2 years	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
Kas dan setara kas ¹⁾	133,920,301	-	-	133,920,301	Cash and cash equivalents ¹⁾
Investasi	15,008,163,837	-	-	15,008,163,837	Investments
Piutang usaha	293,920,460	2,800,000	-	296,720,460	Account receivables
Piutang lainnya	9,884,584	-	-	9,884,584	Other receivables
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039	-	-	5,369,039	Refundable deposits
	<u>15,451,258,221</u>	<u>2,800,000</u>	<u>-</u>	<u>15,454,058,221</u>	
Dikurangi:					Less:
Penyisihan kerugian penurunan nilai				<u>(2,000,000)</u>	Allowance for impairment losses
				<u>15,452,058,221</u>	

¹⁾Tidak termasuk kas

Not include cash on hand²⁾

(3) Risiko likuiditas

(3) Liquidity risk

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

As of 31 December 2023 and 2022, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses, provision, and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

31 Desember/December 2023					
Jumlah/ Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity contract	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha	14,044,779	-	14,044,779	-	Account payables
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan, dan utang lain-lain	162,668,910	-	73,294,256	89,374,654	Accrued expenses, provisions, and other payables
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	540,242	54,586,444	Two-step loans
	<u>231,840,375</u>	<u>-</u>	<u>87,879,277</u>	<u>143,961,098</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(3) Risiko likuiditas (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(3) Liquidity risk (continued)

31 Desember/December 2022				
	Jumlah/ Total	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No maturity contract	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year
Liabilitas keuangan				
Utang usaha	9,993,160	-	9,993,160	-
Biaya yang masih harus dibayar, penyesuaian, dan utang lain-lain	135,669,181	-	64,941,496	70,727,685
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	55,126,686
	<u>200,789,027</u>	<u>-</u>	<u>74,934,656</u>	<u>125,854,371</u>
				<i>Financial liabilities</i>
				<i>Account payables</i>
				<i>Accrued expenses, provisions, and other payables</i>
				<i>Two-step loans</i>

Selain pada liabilitas keuangan Perusahaan di atas, sebagai BUPI yang memberikan penyediaan penjaminan, risiko likuiditas pada Perusahaan juga berhubungan dengan adanya kemungkinan Perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansial atas klaim yang telah diajukan maupun potensi klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan. Perusahaan mengelola dan mengawasi risiko likuiditas untuk kewajiban finansial dengan menyesuaikan portofolio investasi dengan kewajiban finansial untuk klaim yang telah diajukan atau profil jatuh tempo dari potensi klaim. Perusahaan secara rutin melakukan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan likuiditas. Analisa ini, disertai dengan kebutuhan investasi yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan investasi yang konservatif, membantu Perusahaan dalam mengelola risiko likuiditas dengan tepat.

Apart from the Company's financial liabilities above, as BUPI who provides guarantees, liquidity risk for the Company is also related to the possibility that the Company will not be able to fulfill its financial obligations for claims that have been submitted or potential claims for risks borne by the Company in the guarantee agreement. The Company managed and monitored its liquidity risk for financial obligations by matching the investment portfolio to its financial obligations for claim that has been submitted or maturity profiles of the potential claims. The Company regularly analysed and identified the liquidity needs. These analyses, together with clear investment requirements according to regulation and a conservative investment policy, help the Company to appropriately manage liquidity risk.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Manajemen risiko modal

b. Capital risk management

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Estimasi nilai wajar

c. Fair value estimation

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);
- Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/30 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

c. Fair value estimation (continued)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2023 dan 2022.

The following table presents the Company's assets and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2023 and 2022.

31 Desember/December 2023					
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Tingkat 1/ <i>Level 1</i>	Tingkat 2/ <i>Level 2</i>	Tingkat 3/ <i>Level 3</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					Financial assets at fair value
Investasi pada instrumen utang	6,019,241,622	-	6,019,241,622	-	6,019,241,622
					Debt investments
Jumlah	6,019,241,622	-	6,019,241,622	-	6,019,241,622
					Total

31 Desember/December 2022					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					Financial assets at fair value
Investasi pada instrumen utang	6.327.272.274	-	6.327.272.274	-	6.327.272.274
Jumlah	6.327.272.274	-	6.327.272.274	-	6.327.272.274
					Debt investments
					Total

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Financial instrument not measured at fair values

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan:

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company's statements of financial position:

31 Desember/December 2023			
Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value		
Aset keuangan:			Financial assets:
Kas dan setara kas ^{*)}	121,145,541	121,145,541	Cash and cash equivalents ^{*)}
Investasi	9,774,407,061	9,787,053,266	Investments
Piutang usaha	327,574,789	327,574,789	Account receivables
Piutang lainnya	11,444,354	11,444,354	Other receivables
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039	5,369,039	Refundable deposits
	10,239,940,784	10,252,586,989	
Liabilitas keuangan:			Financial liabilities:
Utang usaha	14,044,779	14,044,779	Account payables
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	162,668,910	162,668,910	Accrued expenses provisions and other payables
Pinjaman penerusan	55,126,686	55,126,686	Two-step loans
	231,840,375	231,840,375	

^{*)}Tidak termasuk kas

Not include cash on hand^{*)}



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

c. Fair value estimation (continued)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada
nilai wajar (lanjutan)

Financial instrument not measured at fair
values (continued)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai
tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas
keuangan yang tidak disajikan pada nilai
wajarnya di laporan posisi keuangan
Perusahaan: (lanjutan)

The table below sets out the carrying
amounts and fair value of those financial
assets and liabilities not presented at their
fair value in the Company's statements of
financial position: (continued)

	31 Desember/December 2022	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan:		
Kas dan setara kas ^{*)}	134,306,368	134,306,368
Investasi	8,680,891,563	8,609,103,278
Piutang usaha	294,720,460	294,720,460
Piutang lainnya	9,884,584	9,884,584
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039	5,369,039
	<u>9,125,172,014</u>	<u>9,053,383,729</u>
Liabilitas keuangan:		
Utang usaha	9,993,160	9,993,160
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	135,669,181	135,669,181
Pinjaman penerusan	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>
	<u>200,789,027</u>	<u>200,789,027</u>

^{*)}Tidak termasuk kas

Financial assets:
Cash and cash equivalents^{*)}
Investments
Account receivables
Other receivables
Refundable deposits

Financial liabilities:
Account payables
Accrued expenses
provisions and
other payables
Two-step loans

^{*)}Not include cash on hand

- (i) Kas dan setara kas, piutang usaha,
piutang lainnya dan uang jaminan yang
dapat dikembalikan

- (i) Cash and cash equivalents, account
receivables, other receivables and
refundable deposits

Nilai wajar dari kas dan setara kas,
piutang usaha, piutang lainnya dan uang
jaminan yang dapat dikembalikan
ditetapkan berdasarkan diskonto arus
kas dengan menggunakan suku bunga
pasar uang yang berlaku untuk utang
dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo
yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di
bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas
dan setara kas, piutang usaha dan
piutang lainnya adalah perkiraan yang
layak atas nilai wajar (level 2 - hirarki nilai
wajar).

The fair value of cash and cash
equivalents, account receivables, other
receivables and refundable deposits
were based on discounted cash flows
using prevailing money market interest
rates for debts with similar credit risk
and remaining maturity. Since the
maturity is below one year, the carrying
amounts of cash and cash equivalents,
account receivables and other
receivables were a reasonable
approximation of its fair value (level 2 -
fair value hierarchy).



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/32 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

(ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 - hirarki nilai wajar).

(iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar untuk pinjaman penerusan dengan suku bunga mengambang, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya (level 2 - hirarki nilai wajar).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation (continued)

Financial instrument not measured at fair values (continued)

(ii) Debt investments

The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit maturity (level 2 - fair value hierarchy).

(iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities

The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 - fair value hierarchy).

(iv) Two-step loans

The fair value for two-step loans with floating interest rate, the carrying value approximates its fair value (level 2 - fair value hierarchy).

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/33 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

b. Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan

Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat piutang usaha serta kerugian penurunan nilai pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based on current market conditions.

b. Claim provision related to guarantee agreement

Allowance for impairment losses are provided when events or changes in circumstance indicate that the balance may not be collectible. The identification of uncollectible receivables requires the use of judgement and estimates. If the expectations are different from the original estimates, such differences will impact the carrying value of account receivables and impairment losses in the period in which such estimate has been changed.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**b. Penyisihan atas kewajiban terkait
perjanjian penjaminan (lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah kewajibannya atas proyek KPBU dan non-KPBU, dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Untuk proyek KPBU, Perusahaan memiliki hak regres kepada PJPK terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU. Untuk proyek non-KPBU, Perusahaan juga memiliki hak regres kepada BUMN Terjamin terkait risiko gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

Perusahaan secara aktif melakukan penelaahan atas kemungkinan kewajiban yang timbul di kemudian hari atas dukungan penjaminan *loss limit* dan penjaminan bersama pelaku usaha korporasi kepada LPEI. Identifikasi atas kemungkinan kewajiban yang timbul atas penjaminan pelaku usaha korporasi memerlukan pertimbangan dan estimasi. Apabila ekspektasi berbeda dengan ekspektasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak pada nilai estimasi komitmen dan kontinjensi pelaku usaha korporasi pada periode masa perubahan estimasi tersebut terjadi.

**c. Beban tangguhan dan cadangan kerugian
penurunan nilai**

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

**4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty:
(continued)

**b. Claim provision related to guarantee
agreement (continued)**

At each reporting date, the Company assesses its obligations for PPP and non-PPP projects, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantees agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. For PPP projects, the Company has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors. For non-PPP projects, the Company also has recourse to guaranteed SOEs related to risk of default of the loans.

The Company actively conducts a review of possible liabilities that may arise in the future for the support of loss limit guarantees and joint guarantees for corporate business entities to LPEI. Identification of possible liabilities arising from guarantees for corporate business entities requires consideration and estimation. If the expectations are different from the initial expectations, then this difference will have an impact on the estimated value of commitments and contingencies of corporate business entities in the period when the changes in estimates occur.

**c. Deferred charges and allowance for
impairment losses**

The Company continually evaluates objective evidence of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regard to the tender process at the end of each reporting period.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN
PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

**c. Beban tangguhan dan cadangan kerugian
penurunan nilai**

Penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas realisasi proyek.

**d. Piutang usaha - penjaminan dan
cadangan kerugian penurunan nilai**

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa piutang usaha - penjaminan yang dicatat masih dapat ditagih kepada Badan Usaha pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan, salah satunya, menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai syarat efektif, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai atas piutang penjaminan dibentuk dan dibebankan dalam laporan laba rugi ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai ketidakpastian atas pembayaran piutang penjaminan, serta mempertimbangkan kemampuan membayar dari Badan Usaha.

**4. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty:
(continued)

**c. Deferred charges and allowance for
impairment losses**

Provision for impairment losses on deferred expense is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of project realisation.

**d. Account receivables - guarantee and
allowance for impairment losses**

The Company continually evaluates objective evidence that account receivables - guarantee recorded can still be collected from Investors at the end of each reporting period. The Company, for instance, uses its judgement to assess whether the project will achieve effective clause that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders at the end of each reporting period.

Provision for impairment losses on guarantee receivables is recorded and charged to profit and loss when the Company obtained information and confirmations about uncertainty of payment, by also considering the Investor's ability to repay.

5. KAS DAN SETARA KAS

	2023
Bank	66,145,541
Deposito berjangka	55,000,000
Kas	342,112
	<u>121,487,653</u>

Deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga 3,00% - 6,25% per tahun di 2023 (2022: 3,00% - 4,25%).

Seluruh kas dan setara kas merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2023.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2022	
	104,320,301	Cash in banks
	29,600,000	Time deposits
	386,067	Cash on hand
	<u>134,306,368</u>	

Time deposits with original maturities of three months or less earned interest rates 3.00% - 6.25% per annum in 2023 (2022: 3.00% - 4.25%).

All cash and cash equivalents are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2023.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/36 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	2023	2022	
Deposito berjangka	6,898,300,000	6,053,795,149	Time deposits
Investasi dengan pendapatan tetap			Fixed income investments
- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6,019,241,622	6,327,272,274	Investment at fair value through other comprehensive income
- Investasi yang diukur pada biaya diamortisasi	2,855,722,849	2,596,340,908	Investment at amortised cost -
- Investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi (sukuk)	20,384,212	30,755,506	Investments measured at - amortised cost (sukuk)
	<u>15,793,648,683</u>	<u>15,008,163,837</u>	

Seluruh investasi merupakan aset keuangan dalam tahap 1 dan tidak ada mutasi antar tahap selama tahun 2023.

All investments are financial assets in stage 1 and there is no movement between stages during the year 2023.

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, karena manajemen berpendapat bahwa pihak lawan memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

The management does not provide any allowance for impairment losses for investments as of 31 December 2023 and 2022, since management believes that the counterparty has a strong capacity to meet its contractual obligations.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

a) Deposito berjangka

a) Time deposits

	2023	2022	
Bank BUMN	6,798,300,000	4,234,775,149	State-Owned banks
Bank Swasta	100,000,000	1,819,020,000	Private banks
	<u>6,898,300,000</u>	<u>6,053,795,149</u>	

Deposito berjangka dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 4,25% - 7,55% per tahun di 2023 (2022: 3,00% - 6,75%).

Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 4.25% - 7.55% per annum in 2023 (2022: 3.00% - 6.75%).

b) Investasi dengan pendapatan tetap

b) Fixed income investments

- Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investments at fair value through other comprehensive income

	2023	2022	
Obligasi Pemerintah	5,188,917,622	5,096,118,574	Government Bonds
Obligasi BUMN	830,324,000	1,231,153,700	State-Owned Enterprise bonds
	<u>6,019,241,622</u>	<u>6,327,272,274</u>	

Harga pasar investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar antara 94,77% sampai dengan 121,87% dan antara 90,47% sampai dengan 118,13% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The market price of investments at fair value through other comprehensive income ranged from 94.77% to 121.87% and from 90.47% to 118.13% as of 31 December 2023 and 2022, respectively.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/37 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

**b) Investasi dengan pendapatan tetap
(lanjutan)**

**- Investasi yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain
(lanjutan)**

Perusahaan mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai pasar investasi dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 121.403.022 (laba) dan Rp 279.746.765 (rugi) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan.

**- Investasi yang diukur pada biaya
perolehan**

Pada tanggal 31 Desember 2023, periode jatuh tempo investasi pada obligasi berkisar antara 1 - 11 tahun (2022: 1 - 12 tahun) dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 5,38% - 10,25% per tahun di 2023 (2022: 6,95% - 10,25%).

	2023	2022
Obligasi Pemerintah	2,748,722,849	2,459,340,908
Obligasi BUMN	107,000,000	137,000,000
	<u>2,855,722,849</u>	<u>2,596,340,908</u>

**- Investasi diukur pada biaya perolehan
diamortisasi (sukuk)**

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

	2023	2022
Obligasi BUMN	10,364,000	20,612,000
Obligasi Pemerintah	10,020,212	10,143,506
	<u>20,384,212</u>	<u>30,755,506</u>

6. INVESTMENTS (continued)

b) Fixed income investments (continued)

**- Investments at fair value through the
comprehensive income (continued)**

The company recognised the unrealized gains or losses from the changes in the market value of the investments categorised as fair value through other comprehensive income in the amount of Rp 121,403,022 (gain) and Rp 279,746,765 (loss) for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively, both recorded in the equity section of the statement of financial position.

- Investments at amortised cost

As of 31 December 2023, the maturity period of investments in bonds ranging between 1 - 11 years (2022: 1 - 12 years) maturities and earned interest rates ranging between 5.38% - 10.25% per annum in 2023 (2022: 6.95% - 10.25%).

**- Investments measured at amortised
cost (sukuk)**

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

7. PIUTANG USAHA

	2023	2022
Bunga yang belum diterima	137,923,984	126,019,099
Regres	92,032,652	35,233,991
Penjaminan	74,116,250	122,258,750
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	<u>42,276,903</u>	<u>13,208,620</u>
	<u>346,349,789</u>	<u>296,720,460</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(18,775,000)</u>	<u>(2,000,000)</u>
Total	<u>327,574,789</u>	<u>294,720,460</u>

7. ACCOUNT RECEIVABLES

Interest receivables
Recourse
Guarantee
Project preparation and transaction advisory

Allowance for impairment losses

Total

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/38 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang regres adalah segala pembayaran klaim yang telah dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJKP kepada BU atas proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Lampung, SPAM Pekanbaru, dan Palapa Ring Timur (lihat Catatan 25). Piutang bunga atas regres sebesar Rp 5.787.549 dicatat pada bunga yang belum diterima (2022 : Rp 1.116.960).

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang usaha sebesar Rp 23.350.000 mengalami penurunan nilai dan telah dicadangkan sebesar Rp 18.775.000 (2022: Rp 2.000.000).

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal	2,000,000	-
Penambahan	16,775,000	2,000,000
Saldo akhir	18,775,000	2,000,000

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

7. ACCOUNT RECEIVABLES (continued)

Recourse receivables is any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors for Water Supply System Lampung and Water Supply System Pekanbaru, and Eastern Palapa Ring projects (refer to Note 25). Interest receivables from recourse amounting Rp 5,787,549 recorded in interest receivables (2022: Rp 1,116,960).

As of 31 December 2023, account receivables amounting to Rp 23,350,000 are impaired and have been provisioned amounting Rp 18,775,000 (2022 : Rp 2,000,000).

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover losses from uncollectible account receivables.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

	2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance
Aset kepemilikan langsung:					Direct ownership assets:
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	-	10,142,451	-	(9,991,931)	150,520
Prasarana kantor	20,867,846	614,105	-	9,991,931	31,473,882
Peralatan komputer	14,214,197	840,825	-	-	15,055,022
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	11,029,848	220,906	-	-	11,250,754
	46,111,891	11,818,287	-	-	57,930,178
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(20,364,250)	(909,202)	-	-	(21,273,452)
Peralatan komputer	(10,279,111)	(1,987,354)	-	-	(12,266,465)
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(10,572,957)	(266,472)	-	-	(10,839,429)
	(41,216,318)	(3,163,028)	-	-	(44,379,346)
Nilai buku	4,895,573				Net book value



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/39 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

2022						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian						Construction in progress
17,394	679,619	-	(697,013)	-		Leasehold improvement
20,345,724	-	-	522,122	20,867,846		Computer equipments
13,545,906	493,400	-	174,891	14,214,197		Office equipments, furnitures and fixtures
10,921,616	108,232	-	-	11,029,848		
44,830,640	1,281,251	-	-	46,111,891		
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor						Leasehold improvement
(18,869,142)	(1,495,108)	-	-	(20,364,250)		Computer equipments
(7,891,289)	(2,387,822)	-	-	(10,279,111)		Office equipments, furnitures and fixtures
(9,929,466)	(643,491)	-	-	(10,572,957)		
(36,689,897)	(4,526,421)	-	-	(41,216,318)		
Nilai buku	8,140,743			4,895,573		Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that no impairment in fixed assets value as at 31 December 2023 and 2022.

9. ASET HAK-GUNA

9. RIGHT-OF-USE ASSETS

Perusahaan menyewa aset berupa gedung kantor yang digunakan dalam operasinya yang memiliki masa sewa selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 September 2020 dan berakhir pada 31 Agustus 2023. Perusahaan kemudian memperpanjang dengan masa sewa selama 3 tahun yang dimulai dari tanggal 1 September 2023.

The Company leases asset in the form of office space used for its operations that have a lease period of 3 years starting on 1 September 2020 and ending on 31 August 2023. The Company subsequently extended this lease with the period of 3 years starting on 1 September 2023.

Beban amortisasi sewa gedung kantor diakui sebagai beban sewa dalam kategori beban umum dan administrasi.

Amortisation expense of office space lease was recognised as rental expense under general and administrative expenses.

2023					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance		
Harga perolehan:					Acquisition cost:
Gedung kantor					Office building
56,579,087	50,978,008	(56,579,087)	50,978,008		
56,579,087	50,978,008	(56,579,087)	50,978,008		
Akumulasi amortisasi:					Accumulated amortisation:
Gedung kantor					Office building
(44,005,957)	(18,237,353)	56,579,087	(5,664,223)		
(44,005,957)	(18,237,353)	56,579,087	(5,664,223)		
Nilai buku	12,573,130		45,313,785		Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/40 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET HAK-GUNA

9. RIGHT-OF-USE ASSETS

2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:				Acquisition cost:
Gedung kantor	56,579,087	-	56,579,087	Office building
	56,579,087	-	56,579,087	
Akumulasi amortisasi:				Accumulated amortisation:
Gedung kantor	(25,146,261)	(18,859,696)	(44,005,957)	Office building
	(25,146,261)	(18,859,696)	(44,005,957)	
Nilai buku	31,432,826		12,573,130	Net book value

10. ASET TAKBERWUJUD

10. INTANGIBLE ASSETS

2023						
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Harga perolehan:					Acquisition cost:	
Aset dalam penyelesaian	48,878	482,312	-	(434,390)		96,800
Piranti lunak	13,863,246	480,408	-	434,390	14,778,044	Construction in progress Software
	13,912,124	962,720	-	-	14,874,844	
Akumulasi amortisasi:					Accumulated amortisation:	
Piranti lunak	(8,442,393)	(2,145,325)	-	-		(10,587,718)
	(8,442,393)	(2,145,325)	-	-	(10,587,718)	
Nilai buku	5,469,731				4,287,126	Net book value

2022						
Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>		
Harga perolehan:					Acquisition cost:	
Aset dalam penyelesaian	194,139	3,851,857	-	(3,997,118)		48,878
Piranti lunak	9,717,074	149,054	-	3,997,118	13,863,246	Construction in progress Software
	9,911,213	4,000,911	-	-	13,912,124	
Akumulasi amortisasi:					Accumulated amortisation:	
Piranti lunak	(6,668,891)	(1,773,502)	-	-		(8,442,393)
	(6,668,891)	(1,773,502)	-	-	(8,442,393)	
Nilai buku	3,242,322				5,469,731	Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that no impairment in intangible assets value as at 31 December 2023 and 2022.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/41 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. BEBAN TANGGUHAN

11. DEFERRED EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban tangguhan	19,928,555	19,859,413	Deferred expenses
Penyisihan penurunan nilai	<u>(15,594,747)</u>	<u>(14,196,021)</u>	Provision for impairment
	<u>4,333,808</u>	<u>5,663,392</u>	

Beban tangguhan terutama merupakan biaya atas jasa konsultasi yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

Beban tangguhan juga mencakup biaya pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan akan dibebankan ke laba rugi pada saat pendapatan dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui.

Deferred expenses also included costs for project preparation and transaction advisory and will be recognised to profit and loss upon the recognition of revenue from project preparation and transaction advisory.

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	14,196,021	13,386,382	Beginning balance
Penambahan	<u>1,398,726</u>	<u>809,639</u>	Additions
Saldo akhir	<u>15,594,747</u>	<u>14,196,021</u>	Ending balance

Kecuali untuk jumlah beban tangguhan yang telah dibentuk penyisihannya, manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek terkait akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu, beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Except for deferred expenses that have been provided with impairment provision, management believes that outstanding projects could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2023 and 2022.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

12. UTANG USAHA

12. ACCOUNT PAYABLES

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan penyediaan penjaminan, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan biaya operasional Perusahaan.

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee, project preparation and transaction advisory provision, and the Company's operational costs.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/42 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN

13. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid income tax

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Lebih bayar:			Overpayment of:
Pajak Pertambahan Nilai:			Value Added Tax:
- 2022	1,908,073	2,015,255	2022 -
- 2023	3,122,208	-	2023 -
	<u>5,030,281</u>	<u>2,015,255</u>	

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak lain-lain:			Other taxes:
- Pajak Pertambahan Nilai	1,346,414	1,677,341	Value Added Tax -
- Pajak Penghasilan Pasal 21	2,342,236	1,533,168	Withholding Tax Article 21 -
- Lainnya	157,158	569,439	Others -
	<u>3,845,808</u>	<u>3,779,948</u>	

c. Manfaat pajak penghasilan

c. Income tax benefit

Manfaat pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

Tax benefit of the Company consist of the following:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak tangguhan	281,887	11,537,151	Deferred tax
	<u>281,887</u>	<u>11,537,151</u>	

Rekonsiliasi antara manfaat pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax benefit and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	835,539,267	702,636,470	Profit before income tax
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(183,818,639)	(154,580,023)	Tax calculated at applicable tax rate
Pengaruh atas:			Effects of:
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	222,311,855	175,013,910	Revenues subjected to - final income tax
- Rugi pajak yang dibebankan di tahun berjalan	(947,046)	18,703,480	Tax loss charged - in current year
- Beban yang tidak dapat diperhitungkan	(37,264,283)	(27,600,216)	Non-deductible expenses -
Manfaat pajak penghasilan	<u>281,887</u>	<u>11,537,151</u>	Income tax benefit



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/43 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Manfaat pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax benefit (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak
penghasilan dan laba yang dikenakan pajak
adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income
tax and the Company's taxable income is as
follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	835,539,267	702,636,470	Profit before income tax
Beda waktu	1,431,339	52,441,595	Timing differences
Beda tetap	170,034,774	125,455,527	Permanent differences
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	(1,010,508,431)	(795,517,771)	Revenues subjected to final income tax
(Rugi)/laba pajak berjalan	(3,503,051)	85,015,821	Current tax (loss)/income
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	(70,226,268)	(155,242,089)	Tax loss carry forward
Akumulasi kerugian pajak	(73,729,319)	(70,226,268)	Accumulated tax losses

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

Below are details of accumulated fiscal losses:

	2023	2022	
Tahun fiskal:			Fiscal year:
2023	(3,503,051)	-	2023
2020	(43,281,299)	(43,281,299)	2020
2019	(26,944,969)	(26,944,969)	2019
	(73,729,319)	(70,226,268)	

Termasuk di dalam koreksi fiskal beda tetap adalah beban pajak sebesar Rp 139.545.730 (2022: Rp 98.959.572) yang dibayarkan atas penerimaan bunga dari deposito berjangka, pendapatan tetap dan rekening giro.

Included in the fiscal correction of the permanent difference is the tax expense of Rp 139,545,730 (2022: Rp 98,959,572) paid for interest income from time deposits, fixed income and current accounts.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2023 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Perusahaan.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2022 conform to the Company's Annual Tax Return.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/44 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset

2023					
	1 Januari/ January 2023	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 2023	
Penyisihan gaji dan bonus	6,578,964	(39,283)	-	6,539,681	Provision for salaries and bonus
Beban penyisihan imbalan kerja	4,084,310	1,204,802	1,426,667	6,715,779	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	2,022,808	(383,137)	-	1,639,671	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Pendapatan tangguhan penjaminan	5,419,972	491,340	-	5,911,312	Guarantee unearned income
Penyisihan penurunan nilai piutang	440,000	3,690,500	-	4,130,500	Allowance for account receivable
Penyisihan penurunan nilai	3,123,125	307,720	-	3,430,845	Provision for impairment
Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi	31,965,062	(9,092,388)	-	22,872,674	Corporate business entities unearned income
Estimasi komitmen dan kontinjensi penjaminan pelaku usaha korporasi	15,560,091	4,102,333	-	19,662,424	Commitment and contingencies of corporate business entities revenue
	69,194,332	281,887	1,426,667	70,902,886	

2022						
	1 Januari/ January 2022	Dampak perubahan tarif pajak/ Impact of changes in tax rates	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to statements of profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 2022	
Penyisihan gaji dan bonus	5,691,168		887,796	-	6,578,964	Provision for salaries and bonus
Beban penyisihan imbalan kerja	4,157,042		400,509	(473,239)	4,084,312	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	2,110,555		(87,752)	-	2,022,803	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Pendapatan tangguhan penjaminan	6,349,800		(929,828)	-	5,419,972	Guarantee unearned income
Penyisihan penurunan nilai piutang	-		440,000	-	440,000	Allowance for account receivable
Penyisihan penurunan nilai	2,945,005		178,121	-	3,123,126	Provision for impairment
Pendapatan tangguhan pelaku usaha korporasi	31,295,996		669,068	-	31,965,064	Corporate business entities unearned income
Estimasi komitmen dan kontinjensi penjaminan pelaku usaha korporasi	5,580,854		9,979,237	-	15,560,091	Commitment and contingencies of corporate business entities revenue
	58,130,420		11,537,151	(473,239)	69,194,332	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/45 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang ("UU") No. 2 Tahun 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal (*tax losses carry forward*) karena ketidakpastian tersedianya penghasilan kena pajak di masa depan dimana akumulasi kerugian pajak dapat dimanfaatkan.

e. Pemeriksaan pajak

Tahun pajak 2017

- Pajak penghasilan

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan menerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ("SP2DK") terkait pelaporan SPT tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21.

Pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan telah membayarkan kekurangan tagihan pajak sebesar Rp 451.103, dan telah dilakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak 2017.

13. TAXATION (continued)

d. Deferred tax asset (continued)

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law ("Perpu") of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 which has become Law ("UU") No. 2 Year 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the fiscal year 2022 onwards.

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

As at 31 December 2023 and 2022, the Company does not recognise deferred assets relating to the tax losses carried forward due to uncertainty about the availability of future taxable income where the tax losses carry forward can be utilised.

e. Tax audit

Fiscal year 2017

- Income tax

On 31 March 2022, the Company received a letter requesting an explanation of data and/or information ("SP2DK") regarding the reporting of Annual Income Tax Return with Income Tax Return Art 21.

On 29 December 2022, the Company has paid the insufficiency in tax bills amounting to Rp 451,103, and the Income Tax Return has been corrected for the fiscal year 2017.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/46 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Tahun pajak 2022

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 23 Mei 2023, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2022.

Pada tanggal 20 Desember 2023, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2022 sebesar Rp 2.015.255 (termasuk denda). Perusahaan telah menerima pembayaran lebih bayar ini sebesar Rp 1.908.073 pada tanggal 11 Januari 2024. Denda sebesar Rp 107.182 telah dibukukan oleh Perusahaan pada laba rugi.

Tahun pajak 2021

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2021.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Perusahaan menerima SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2021 sebesar Rp 1.612.945 yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 2 November 2022.

13. TAXATION (continued)

e. Tax audit (continued)

Fiscal year 2022

- Value added tax

On 23 May 2023, the Company received a tax audit letter related to Overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2022.

On 20 December 2023, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2022 amounting to Rp 2,015,255 (including penalty). The Company has received this overpayment amounting to Rp 1,908,073 on 11 January 2024. Penalty amounting to Rp 107,182 has been recorded by the Company on profit or loss.

Fiscal year 2021

- Value added tax

On 31 March 2022, the Company received a tax audit letter related to Value Added Tax for fiscal year 2021.

On 18 October 2022, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter which confirmed the overpayment of Value Added Tax for fiscal year 2021 amounting to Rp 1,612,945 and the payment was received by the Company on 2 November 2022.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

	2023	2022
Estimasi komitmen dan kontinjensi penjaminan pelaku usaha korporasi	89,374,654	70,727,685
Beban jasa konsultasi	40,353,354	31,901,707
Bonus dan gaji	29,725,822	29,904,380
Lainnya	3,215,080	3,135,409
	<u>162,668,910</u>	<u>135,669,181</u>

Manajemen berpendapat bahwa estimasi komitmen dan kontinjensi atas penjaminan pelaku usaha korporasi yang diakui dalam laporan keuangan adalah cukup untuk menutup potensi klaim penjaminan yang tidak terpulihkan.

14. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

Estimated commitment and contingencies of corporate business entities
Advisory fees
Bonus and salary
Others

Management believes that the estimated commitment and contingency to guarantees for corporate business entities recognised in the financial statements are adequate to cover potential non-recoverable guarantee claims.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/47 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PENDAPATAN TANGGUHAN

15. UNEARNED INCOME

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Penjaminan pelaku usaha korporasi	103,966,704	145,295,740	Corporate business
Penjaminan infrastruktur	<u>26,869,601</u>	<u>24,636,236</u>	entities guarantee
	<u>130,836,305</u>	<u>169,931,976</u>	Infrastructure guarantee

16. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN

16. FINANCE LEASE LIABILITIES

Liabilitas sewa pembiayaan merupakan liabilitas sewa pembiayaan aset hak-guna yang merupakan nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar dan dihitung dengan suku bunga implisit dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Finance lease liabilities represent lease liabilities for right-of-use assets of present value of unpaid lease payments and are calculated using the implicit interest rate of the incremental loan interest rate.

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Future minimum lease payments together with the present value of the minimum lease payments for year 2023 and 2022 were as follows.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:			The present value lease liabilities are as follows:
- Tidak lebih dari 1 tahun	18,557,572	8,545,628	Not later than 1 year -
- Lebih dari 1 tahun	<u>27,642,950</u>	<u>-</u>	Later than 1 year -
	<u>46,200,522</u>	<u>8,545,628</u>	

17. PINJAMAN PENERUSAN

17. TWO-STEP LOANS

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development.

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu *World Bank*, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek KPBU di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029.

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on PPP in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due up to 2029.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/48 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amendemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan SUN Benchmark dengan tenor 20 tahun. Batas penarikan pinjaman penerusan telah berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 19 November 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-162/MK.5/2020 sebagai amendemen kedua atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan jadwal pembayaran pokok pinjaman dengan masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun sejak tanggal penarikan pertama dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2034.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah akumulasi penarikan pinjaman penerusan adalah sebesar Rp 55.126.686. Pinjaman penerusan ini menggunakan SUN Benchmark sebagai acuan tingkat suku bunga atau setara dengan tingkat suku bunga 7,13% pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Selama tahun 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas bunga pinjaman penerusan Rp 3.927.776 (2022: Rp 3.927.776).

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

17. TWO-STEP LOANS (continued)

On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The loans drawdown expired on 30 April 2019.

On 19 November 2020, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-162/MK.5/2020 as second amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of changes in repayment schedule with grace period of 9 (nine) years starting from the first drawdown date and are due up to 2034.

As at 31 December 2023 and 2022, the withdrawal of accumulated two-step loans are amounting to Rp 55,126,686. This loan used SUN Benchmark as reference of interest expense or equivalent to 7.13% for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively. During 2023, the Company has paid the interest of the two-step loans amounting Rp 3,927,776 (2022: Rp 3,927,776).

The Company has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 tanggal 2 November 2020.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, perusahaan aktuaris independen.

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company provides employee benefits based on the provisions of Job Creation Law No. 11/2020 dated 2 November 2020.

Employee benefits obligations as at 31 December 2023 and 2022 have been calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, an independent actuary.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/49 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)

Liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan aktuarial tanggal 21 Februari 2024 dan 20 Februari 2023 diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefits obligations based on the actuarial reports dated 21 February 2024 and dated 20 February 2023 recognised in the statements of financial position are as follows:

	2023	2022	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	24,549,282	14,099,905	Pension and other post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	5,976,989	4,465,142	Other long-term benefits
	<u>30,526,271</u>	<u>18,565,047</u>	

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense/(income) recognised in the statements of profit or loss is as follows:

	2023	2022	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	4,100,872	2,691,884	Pension and other post-employment benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	1,955,907	695,334	Other long-term benefits
	<u>6,056,779</u>	<u>3,387,218</u>	

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the post-employment benefits obligation as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Retirement age
Tingkat diskonto	6.80%	7.30%	Discount rate
Tingkat mortalita	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	Mortality rate
Tingkat kenaikan gaji	10.00%	8.00%	Salary increment rate
Tingkat pengunduran diri	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter	5% sampai di usia 25 tahun dan menurun secara linear ke 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ 5% up to age 25 and reducing linearly to be 1% at age 45 and thereafter	Resignation rate

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya

Pension and other post-employment benefits

Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Pension and other post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:

	2023	2022	
Liabilitas imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	24,549,282	14,099,905	Pension and other post-employment benefits obligation

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/50 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada
laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Net expense/(income) recognised in the
statements of profit or loss is as follows:*

	2023	2022	
Biaya jasa kini	2,872,070	2,556,846	Current service cost
Beban bunga	990,574	954,820	Interest cost
Biaya jasa lalu	161,881	435,231	Past service cost
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(1,345,532)	Adjustment due to change in benefit attribution method
Kelebihan pembayaran imbalan	76,347	90,519	Excess of benefit paid
	<u>4,100,872</u>	<u>2,691,884</u>	

Mutasi imbalan pensiun dan pascakerja lainnya
adalah sebagai berikut:

*The movement in the pension and other post-
employment benefits is as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal tahun	14,099,905	14,983,249	Balance at the beginning of the year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	4,100,872	4,037,416	Employee benefit expense charged in the current year
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(1,345,532)	Adjustment due to change in benefit attribution method
Pengukuran kembali: Keuntungan/(kerugian) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	6,484,852	(2,151,088)	Remeasurement: Gain/(loss) from changes in financial assumptions
Pembayaran imbalan kerja	(136,347)	(1,424,140)	Benefit paid
	<u>24,549,282</u>	<u>14,099,905</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap
perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada
imbalan pensiun dan pascakerja lainnya adalah
sebagai berikut:

*The sensitivity of the defined benefit obligation to
changes in significant actuarial assumptions on
pension and post-employment benefits obligation
are as follow:*

	31 Desember/December 2023			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(2,107,977)	2,423,919	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	3,573,272	(3,139,600)	Rate of salary increase in the future



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/51 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya
(lanjutan)

Pension and other post-employment benefits
(continued)

31 Desember/December 2022			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(1,058,328)	1,200,631
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	2,095,819	(1,843,281)
			Discount rate Rate of salary increase in the future

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program
pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember
2023 adalah 15,46 tahun (2022: 13,76 tahun).

The weighted average duration of the defined
benefit pension obligation at 31 December 2023
is 15.46 years (2022: 13.76 years).

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat
pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai
berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted
pension benefits is as follow:

	2023	2022	
Kurang dari 1 tahun	1,740,542	1,060,785	Less than a year
1 sampai 2 tahun	902,755	1,044,610	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	10,907,515	5,527,352	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	257,097,846	126,321,719	Over than 5 years

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya
diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai
berikut:

Other long-term benefits obligations recognised
in the statements of financial position are as
follows:

	2023	2022	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	5,976,989	4,465,142	Other long-term benefits obligation

Beban/(pendapatan) bersih yang diakui pada
laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense/(income) recognised in the
statements of profit or loss is as follows:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	828,429	800,294	Current service cost
Biaya jasa lalu	36,488	37,480	Past service cost
Beban bunga	306,604	281,682	Interest cost
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	784,386	(424,122)	Actuarial loss/(gains)
	1,955,907	695,334	



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/52 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

18. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term benefits (continued)

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	2023	2022	
Saldo awal tahun	4,465,142	3,912,390	Balance at the beginning of the year
Beban tahun berjalan	1,955,907	695,334	Current year expense
Pembayaran imbalan kerja	(444,060)	(142,582)	Employee benefits paid
	<u>5,976,989</u>	<u>4,465,142</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2023			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(390,638)	441,498
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	451,880	(407,931)
			Discount rate Rate of salary increase in the future
31 Desember/December 2022			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1.00%	(258,022)	289,474
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	305,587	(277,296)
			Discount rate Rate of salary increase in the future

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted after other long-term benefits is as follow:

	2023	2022	
Kurang dari 1 tahun	501,892	530,164	Less than a year
1 sampai 2 tahun	789,745	513,740	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	1,973,955	2,163,240	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	22,725,554	15,804,603	Over than 5 years



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/53 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

19. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	10,655,000	100	10,655,000,000	Government of the Republic of Indonesia
	2022			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	10,655,000	100	10,655,000,000	Government of the Republic of Indonesia

Pemegang saham telah meningkatkan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 20.000.000.000 melalui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan melalui Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No. 14 tanggal 19 November 2020 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 19 November 2020.

The Shareholders had increased the Company's authorised capital to Rp 20,000,000,000 by amendment of the Company's Article of Association through Notarial Deed of Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., No. 14 dated 19 November 2020 and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-0077464.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 19 November 2020.

Pada tanggal 23 Desember 2022, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1.085.000.000 yang telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 23 Desember 2022.

On 23 December 2022, in accordance with Government Regulation No. 53 year 2022 regarding addition of investment on the Company's capital by Government of Indonesia, the payment for issuance of share capital amounting to Rp 1,085,000,000 had been received by the Company on 23 December 2022.

20. DIVIDEN

Pada tahun 2023, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 22 tanggal 19 Mei 2023, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2023 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2022 sejumlah Rp 142.834.725 yang telah dibayarkan pada tanggal 9 Juni 2023.

In 2023, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 22 dated 19 May 2023, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 19 May 2023 approved amount of dividend for 2022 amounting Rp 142,834,725 that has been paid on 9 June 2023.

Pada tahun 2022, berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 15/A/Not/PT/VI/2022 Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2021 sejumlah Rp 156.350.534 yang telah dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2022.

In 2022, based on Notarial Deed of Arry Supratno, S.H., No. 15/A/Not/PT/VI/2022 Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders on 20 June 2022 approved amount of dividend for 2021 amounting Rp 156,350,534 that has been paid on 29 June 2022.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/54 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB**

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada tahun 2023, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 35.708.681, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 264.478.126. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 22 tanggal 19 Mei 2023.

Pada tahun 2022, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 31.270.107, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 228.769.445. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No.15/A/Not/PT/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

**21. RETAINED EARNING APPROPRIATED -
STATUTORY RESERVE**

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

In 2023, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 35,708,681, as the reserve balance became Rp 264,478,126. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed No. 22 of Arry Supratno, S.H., dated 19 May 2023.

In 2022, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 31,270,107, as the reserve balance became Rp 228,769,445. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders as covered by Notarial Deed No. 15/A/Not/PT/VI/2022 of Arry Supratno, S.H. dated 20 June 2022.

Management plans to increase the general reserve in the future.

22. PENDAPATAN

22. REVENUES

	2023	2022	
Pendapatan penjaminan:			Revenue from guarantee:
- Pendapatan premi	129,209,142	105,356,236	Premium income -
- Pendapatan pelaku usaha korporasi	78,694,405	45,228,047	Corporate business entities revenue -
- Pendapatan provisi dan komisi	24,450,000	101,989,550	Fees and commission -
	<u>232,353,547</u>	<u>252,573,833</u>	



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/55 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN (lanjutan)

22. REVENUES (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	<u>70,529,576</u>	<u>41,098,924</u>	Revenue from project preparation and transaction advisory
Pendapatan pengelolaan dana:			Income from investments:
- Deposito berjangka	387,151,445	193,522,894	Time deposits -
- Investasi dengan pendapatan tetap:			Fixed income: -
Pendapatan bunga	621,928,913	593,316,114	Interest income
Laba atas penjualan obligasi	<u>-</u>	<u>6,863,048</u>	Gain on sale of bonds
	<u>1,009,080,358</u>	<u>793,702,056</u>	
Pendapatan lainnya	<u>6,042,076</u>	<u>1,477,498</u>	Income from others
	<u>1,318,005,557</u>	<u>1,088,852,311</u>	

Pendapatan penjaminan pelaku usaha korporasi yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Revenue from corporate business entities recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Amortisasi pendapatan tangguhan penjaminan pelaku usaha korporasi	97,341,375	120,395,442	Amortisation of corporate business entities unearned income
Estimasi komitmen pelaku usaha korporasi	<u>(18,646,970)</u>	<u>(75,167,395)</u>	Estimated corporate business entities commitment
	<u>78,694,405</u>	<u>45,228,047</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

23. BEBAN USAHA

23. OPERATING EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Umum dan administrasi:			General and administrative:
- Pegawai	56,918,066	48,849,981	Employee cost -
- Sewa	23,043,522	21,046,838	Rent -
- Jasa profesional	13,812,539	16,842,881	Professional fees -
- Rapat dan konferensi	6,855,031	7,783,538	Meeting and conference -
- Outsourcing	6,175,776	4,631,827	Outsourcing -
- Beban bina karyawan	6,064,210	6,386,544	Employee development -
- Pemeliharaan	4,542,796	1,775,421	Maintenance -
- Pelatihan	4,310,379	1,101,145	Training -
- Perjalanan dinas	2,663,290	2,572,023	Travelling -
- Transportasi	970,688	842,032	Transportation -
- Perlengkapan kantor	780,758	1,014,994	Office equipment -
- Lokakarya	370,547	-	Workshop -
- Air dan Listrik	276,453	247,201	Water & electricity -
- Komunikasi	89,601	304,741	Communication -
- Lainnya	<u>185,262</u>	<u>42,232</u>	Others -
	<u>127,058,918</u>	<u>113,441,398</u>	



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/56 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. BEBAN USAHA (lanjutan)

23. OPERATING EXPENSES (continued)

	2023	2022	
Penjaminan:			Guarantee:
- Pegawai	70,239,585	61,248,083	Employee cost -
- Konsultan	3,626,883	18,111,742	Consultancy -
- Rapat dan konferensi	1,248,185	674,876	Meeting and conference -
- Lokakarya	1,040,390	374,735	Workshop -
- Perjalanan dinas	1,036,566	1,969,523	Travelling -
	<u>77,191,609</u>	<u>82,378,959</u>	
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi:			Project preparation and transaction advisory:
- Konsultan	48,029,935	23,692,490	Consultancy -
- Pegawai	23,593,649	22,788,555	Employee cost -
- Perjalanan dinas	1,861,630	987,141	Travelling -
- Lokakarya	1,776,989	503,338	Workshop -
- Rapat dan konferensi	1,666,018	1,385,557	Meeting and conference -
	<u>76,928,221</u>	<u>49,357,081</u>	
Pengembangan usaha:			Business development:
- Pegawai	18,815,370	17,137,790	Employee cost -
- IIGF Institute	5,353,308	3,204,036	IIGF Institute -
- Sumbangan sosial	4,429,785	3,685,778	Social contribution -
- Lokakarya	2,831,389	2,754,645	Workshop -
- Iklan dan promosi	1,918,502	2,219,953	Advertising and promotion -
- Representasi	847,652	808,833	Representation -
- Perjalanan dinas	711,986	996,083	Travelling -
- Rapat dan konferensi	709,120	450,772	Meeting and conference -
	<u>35,617,112</u>	<u>31,257,890</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 24.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 24.

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahannya dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- Bank-bank BUMN dan entitas-entitas nonbank BUMN merupakan pihak berelasi oleh karena merupakan entitas sepengendalian oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito berjangka dan obligasi.

- The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- The Board of Directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- SOEs banks and non-banks SOEs are related parties as those entities under common controls of the Government of the Republic of Indonesia where the Company places its investments in time deposits and bonds.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/57 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationship (continued)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Balances arising from related parties transactions

	2023	2022	
Kas dan setara kas			Cash and cash equivalents
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk	57,400,651	5,806,267	PT Bank Syariah Indonesia Tbk -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	42,264,005	98,972,070	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,261,048	8,907,029	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk -
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7,208	7,628	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	474	474	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)
	<u>114,933,386</u>	<u>113,693,468</u>	
Investasi			Investments
- Pemerintah Republik Indonesia	7,947,660,683	7,565,602,988	Government of the Republic of Indonesia
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	3,546,300,000	1,488,970,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,252,000,000	1,931,585,149	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	366,173,500	407,355,500	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	155,310,000	158,940,000	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	121,092,000	606,320,200	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	105,808,500	109,536,000	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	80,904,000	82,104,000	PT Pupuk Indonesia (Persero)
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	77,000,000	77,000,000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	41,400,000	41,052,000	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	349,810,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Pegadaian (Persero)	-	187,748,000	PT Pegadaian (Persero)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	153,120,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	30,000,000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	<u>15,693,648,683</u>	<u>13,189,143,837</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/58 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-
pihak berelasi (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES
INFORMATION (continued)

Balances arising from related parties
transactions (continued)

	2023	2022	
Piutang usaha			Account receivables
- Pemerintah Republik Indonesia	169,401,117	122,981,055	Government of the Republic of Indonesia
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	6,124,636	740,851	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	2,950,875	2,950,875	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,835,461	2,877,473	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2,122,912	2,191,312	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	756,000	756,000	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk	661,250	-	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	505,000	6,425,938	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Pertamina (Persero)	-	35,394,750	PT Pertamina (Persero)
- PT Len Industri (Persero)	-	1,939,000	PT Len Industri (Persero)
- Perusahaan Umum Damri	-	750,000	Perusahaan Umum Damri
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	717,004	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Lain-lain (dibawah Rp 500.000)	1,024,373	2,870,447	Others (below Rp 500,000)
	<u>186,381,624</u>	<u>180,594,705</u>	
	<u>15,880,030,307</u>	<u>13,369,738,542</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>96.79%</u>	<u>85.95%</u>	Percentage of total assets
Pinjaman penerusan			Two-step loans
- Pemerintah Republik Indonesia	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>	Government of the Republic of Indonesia
	<u>55,126,686</u>	<u>55,126,686</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>12.44%</u>	<u>13.73%</u>	Percentage of total liabilities
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain			Accrued expenses, provisions and other payables
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	<u>2,365,884</u>	<u>7,902,720</u>	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0.53%</u>	<u>1.97%</u>	Percentage of total liabilities



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/59 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES
INFORMATION (continued)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-
pihak berelasi (lanjutan)

Balances arising from related parties
transactions (continued)

	2023	2022	
Pendapatan			Revenues
- Pemerintah Republik Indonesia	676,500,750	570,841,574	Government of the Republic of Indonesia
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	143,811,349	7,202,282	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)	102,766,231	58,230,578	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Syariah)
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	29,525,917	17,807,750	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk	20,140,581	22,270,118	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	19,495,939	42,659,492	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19,244,004	28,888,505	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	13,725,000	13,725,000	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	9,450,000	9,450,000	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9,243,750	12,786,945	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Pertamina (Persero)	8,919,477	35,394,750	PT Pertamina (Persero)
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	7,892,500	7,388,257	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	6,160,000	6,160,000	PT Pupuk Indonesia (Persero)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4,032,232	3,630,906	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Geo Dipa Energi (Persero)	3,317,131	3,163,111	PT Geo Dipa Energi (Persero)
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3,280,000	4,889,160	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- PT Pegadaian (Persero)	2,802,922	13,277,000	PT Pegadaian (Persero)
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk	2,437,500		PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Len Industri (Persero)	2,400,000	1,939,000	PT Len Industri (Persero)
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1,414,042	12,891,878	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,297,966	1,235,809	Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)
- Perusahaan Umum Damri	200,000	750,000	Perusahaan Umum Damri
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	90,000	11,276,139	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
	<u>1,088,147,291</u>	<u>885,858,254</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>82.56%</u>	<u>81.36%</u>	Percentage of total revenue

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/60 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-
pihak berelasi (lanjutan)

	2023	2022
Beban penjaminan		
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	(3,170,952)	7,902,720
Persentase terhadap jumlah beban usaha	(0.66%)	2.05%
Beban bunga		
- Pemerintah Republik Indonesia	3,927,776	3,927,776
Persentase terhadap jumlah beban usaha	0.81%	1.02%
Kompensasi dan remunerasi manajemen kunci		
Dewan Komisaris		
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	8,609,071	7,086,592
Direksi		
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	19,381,195	14,730,815
	27,990,266	21,817,407
Persentase terhadap jumlah beban usaha	5.80%	5.65%

24. SIGNIFICANT RELATED PARTIES
INFORMATION (continued)

Balances arising from related parties
transactions (continued)

Guarantee expense

Lembaga Pembiayaan Ekspor -
Indonesia (Indonesia
Eximbank)

Percentage of total
operating expense

Interest expense

Government of the -
Republic of Indonesia

Percentage of total
operating expense

Compensation and
remuneration of the key
management personnel

Board of Commissioners
Salary and short-term -
employee benefit

Board of Directors
Salary and short-term -
employee benefit

Percentage of total
operating expenses

25. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Penjaminan

Hal-hal berikut adalah perjanjian penjaminan yang
telah ditandatangani oleh Perusahaan sampai
dengan 31 Desember 2023:

KPBU

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah ("CJPP")

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan
bersama dengan Pemerintah Republik
Indonesia ("Pemerintah") menandatangani
perjanjian penjaminan dengan PT Bhimasena
Power Indonesia ("Bhimasena") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Guarantee Agreement

The following are the guarantee agreement
entered by the Company as at 31 December
2023:

PPP

1. Batang East Java Power Plant Project
("CJPP")

On 6 October 2011, the Company together
with the Government of the Republic of
Indonesia (the "Government") entered into a
guarantee agreement with PT Bhimasena
Power Indonesia ("Bhimasena") as the
Investor.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/61 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah ("CJPP") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Bhimasena berupa *arranging fee* dan *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan perolehan pembiayaan, sedangkan *processing fee* dan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 21 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ("PKS") antara BU dan PJK.

Pada tanggal 6 Juni 2016, penandatanganan perolehan pembiayaan proyek dilakukan antara pemberi pinjaman dan Bhimasena. Pada saat yang bersamaan, penjaminan proyek sudah efektif.

2. Proyek Palapa Ring Barat

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Barat berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

1. Batang East Java Power Plant Project ("CJPP") (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Bhimasena in the form of arranging fee and upfront fee at the signing date and financial close date, while processing fee and guarantee fee are obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 21 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 June 2016, signing of financial close was held between lender and Bhimasena. At the same time, guarantee of the project has been effective.

2. Western Package Palapa Ring Project

On 29 February 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Barat in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/62 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

2. Proyek Palapa Ring Barat (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 2 Maret 2018.

3. Proyek Palapa Ring Tengah

Pada tanggal 4 Maret 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari LTI berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 30 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Desember 2018.

4. Proyek Palapa Ring Timur

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

2. Western Package Palapa Ring Project (continued)

On 10 November 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 2 March 2018.

3. Central Package Palapa Ring Project

On 4 March 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from LTI in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 30 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 21 December 2018.

4. Eastern Package Palapa Ring Project

On 29 September 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") as the Investor.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/63 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

4. Proyek Palapa Ring Timur (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Timur berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 29 Maret 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 29 Agustus 2019.

Piutang Regres atas klaim penjaminan yang dibayarkan Perusahaan (termasuk bunga regres) sebesar Rp 11 miliar (nilai penuh) dan Rp nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lihat catatan 7).

5. Proyek Tol Batang - Semarang

Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Semarang Batang berupa *upfront fee* pada saat tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

4. Eastern Package Palapa Ring Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Timur in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 March 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 29 August 2019.

Recourse receivables from guarantee claims paid by the Company (including recourse interest) amounting to Rp 11 billion (full amount) and Rp nil on 31 December 2023 and 2022, respectively (refer to note 7).

5. Batang - Semarang Toll Road Project

On 27 April 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Semarang Batang in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/64 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

5. Proyek Tol Batang - Semarang (lanjutan)

Pada tanggal 20 Juni 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Januari 2019.

6. Proyek Tol Pandaan - Malang

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Pandaan Malang berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPB.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi untuk seluruh seksi pada tanggal 2 April 2020.

7. Proyek Tol Manado - Bitung

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

5. Batang - Semarang Toll Road Project (continued)

On 20 June 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 21 January 2019.

6. Pandaan - Malang Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Pandaan Malang in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 3 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates for all sections on 2 April 2020.

7. Manado - Bitung Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") as the Investor.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/65 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

7. Proyek Tol Manado - Bitung (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Manado Bitung berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 6 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan Juni dan September 2020 untuk sebagian seksi.

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Balikpapan Samarinda berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 2 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi untuk seluruh seksi pada tanggal 24 Agustus 2021.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

7. Manado - Bitung Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Manado Bitung in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates on June and September 2020 for some sections.

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Balikpapan Samarinda in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 2 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates for all sections on 24 August 2021.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/66 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan

Pada tanggal 21 Juli 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Meta berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJP.

Pada tanggal 10 Februari 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 29 Januari 2021.

10. Proyek Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed (Sebelumnya Jalan Tol Jakarta - Cikampek II *Elevated*)

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated*") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated* berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan surat imbal jasa penjaminan. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJP.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

9. Water Supply System Umbulan Project

On 21 July 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Meta in the form of *upfront fee* at the signing date and effective date of guarantees, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 February 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 29 January 2021.

10. Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed (Previously Jakarta - Cikampek II *Elevated* Tol Road) Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated*") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated* in the form of *upfront fee* at the signing date of guarantee agreement and fee letter. Meanwhile, *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/67 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

10. Proyek Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed (Sebelumnya Jalan Tol Jakarta - Cikampek II *Elevated*) (lanjutan)

Pada tanggal 8 Mei 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 12 Desember 2019.

11. Proyek Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Citra Karya berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 22 Februari 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2020 untuk sebagian seksi.

12. Proyek Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

10. *Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bon Zayed (Previously Jakarta - Cikampek II Elevated Tol Road) Project (continued)*

On 8 May 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 12 December 2019.

11. *Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road Project*

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Citra Karya in the form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 22 February 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates on November 2020 for some sections.

12. *Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project*

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") as the Investor.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/68 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

12. Proyek Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Waskita Bumi berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 11 Desember 2017, penjaminan proyek telah efektif untuk ruas Krian - Legundi - Bunder dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan. Untuk ruas Bunder-Manyar telah efektif dengan diterbitkannya Berita Acara Pengadaan Tanah pada tanggal 1 Juli 2019.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2020 untuk sebagian seksi.

13. Proyek Tol Serang - Panimbang

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Wika Sepang berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

12. Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Waskita Bumi in the form of *upfront fee* at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 11 December 2017, the guarantee of the project has been effective for Krian - Legundi - Bunder segment road since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled. For Bunder-Manyar segment road has been effective with issuance of Minutes of Land Acquisition on 1 July 2019.

The project operates on November 2020 for some sections.

13. Serang - Panimbang Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Wika Sepang in the form of *upfront fee* at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/69 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

13. Proyek Tol Serang - Panimbang (lanjutan)

Pada tanggal 17 November 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada bulan November 2021 untuk sebagian seksi.

14. Proyek Tol Probolinggo - Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Probowangi berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 10 Juli 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

15. Proyek Tol Jakarta - Cikampek II Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

13. Serang - Panimbang Toll Road Project (continued)

On 17 November 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates on November 2021 for some sections.

14. Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Probowangi in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 July 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

15. Jakarta - Cikampek II South Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") as the Investor.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/70 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

15. Proyek Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Japek Selatan berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 27 Juni 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

16. Proyek SPAM Lampung

Pada tanggal 14 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ATL berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 12 Agustus 2020.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

15. Jakarta - Cikampek II South Toll Road Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Japek Selatan in the form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 27 June 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

16. Water Supply System Lampung Project

On 14 February 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ATL in the form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 14 August 2018, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 12 August 2020.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/71 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

16. Proyek SPAM Lampung (lanjutan)

Piutang Regres atas klaim penjaminan yang dibayarkan Perusahaan (termasuk bunga regres) sebesar Rp 98 miliar (nilai penuh) dan Rp 36 miliar (nilai penuh) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lihat catatan 7).

17. Proyek SPAM Semarang Barat

Pada tanggal 23 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Air Semarang Barat ("ASB") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ASB berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 29 Mei 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 22 Mei 2021.

18. Proyek Kereta Api Makassar - Parepare

Pada tanggal 5 April 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

16. Water Supply System Lampung Project (continued)

Recourse receivables from guarantee claims paid by the Company (including recourse interest) amounting to Rp 98 billion (full amount) and Rp 36 billion (full amount) on 31 December 2023 and 2022, respectively (refer to note 7).

17. Water Supply System West Semarang Project

On 23 November 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Air Semarang Barat ("ASB") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ASB in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 May 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

The project operates starting on 22 May 2021.

18. Makassar - Parepare Railway Train Project

On 5 April 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") as the Investor.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/72 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

18. Proyek Kereta Api Makassar - Parepare (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari CRI berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 14 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 16 September 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

19. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah

Pada tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari SNT berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 31 Maret 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

18. Makassar - Parepare Railway Train Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from CRI in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 14 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 16 September 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

19. Government Multifunction Satellite Project

On 3 May 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from SNT in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 31 March 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/73 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

20. Proyek Tol Semarang - Demak

Pada tanggal 23 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PPSD berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 9 Januari 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

21. Proyek Bandar Udara Labuan Bajo

Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Cinta Airport Flores ("CAF") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari CAF berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 14 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 14 November 2022, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan CAF berakhir sebelum efektif sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPK dan CAF.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

20. Semarang - Demak Toll Road Project

On 23 September 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PPSD in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 9 January 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

21. Labuan Bajo Airport Project

On 7 February 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Cinta Airport Flores ("CAF") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from CAF in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 14 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 14 November 2022, the guarantee agreement between the Company and CAF expired before being effective due to the expiration of the PKS between the GCA and CAF.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/74 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

22. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 3 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jalintim Adhi Abipraya ("JAA") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JAA berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 11 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 30 Desember 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

23. Proyek Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo

Pada tanggal 9 September 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jogjasolo Marga Makmur ("JMM") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JMM berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

22. Preservation of The East Sumatera Cross Road at South Sumatera Province Project

On 3 August 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jalintim Adhi Abipraya ("JAA") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JAA in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 11 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 30 December 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

23. Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo Toll Road Project

On 9 September 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jogjasolo Marga Makmur ("JMM") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JMM in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/75 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

24. Proyek Tol Yogyakarta - Bawen

Pada tanggal 13 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JJB berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

25. Proyek SPAM Pekanbaru

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani ("PPTM") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PPTM berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJK.

Pada tanggal 21 Juli 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Piutang Regres atas klaim penjaminan yang dibayarkan Perusahaan (termasuk bunga regres) sebesar Rp 12 miliar (nilai penuh) dan Rp nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lihat catatan 7).

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

24. Yogyakarta - Bawen Toll Road Project

On 13 November 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JJB in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

25. Water Supply System Pekanbaru Project

On 16 December 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Pembangunan Perumahan Tirta Madani ("PPTM") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PPTM in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 21 July 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Recourse receivables from guarantee claims paid by the Company (including recourse interest) amounting to Rp 12 billion (full amount) and Rp nil on 31 December 2023 and 2022, respectively (refer to note 7).



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/76 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

26. Proyek SPAM Jatiluhur I

Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ("WTJJ") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari WTJJ berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 10 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 25 Februari 2022, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

27. Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau

Pada tanggal 12 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhi Jalintim Riau ("AJR") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari AJR berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 11 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 5 Oktober 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

26. Water Supply System Jatiluhur I Project

On 19 February 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ("WTJJ") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from WTJJ in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 10 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 25 February 2022, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

27. Preservation of The East Sumatera Cross Road at Riau Province Project

On 12 April 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhi Jalintim Riau ("AJR") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from AJR in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 11 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 5 October 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/77 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

28. Proyek SPAM Karian Serpong

Pada tanggal 29 April 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Karian Water Services ("KWS") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari KWS berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

29. Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton

Pada tanggal 6 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Baja Titian Utama ("BTU") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari BTU berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 10 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 16 Juni 2022, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

28. Water Supply System Karian Serpong Project

On 29 April 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Karian Water Services ("KWS") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from KWS in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

29. Replacement and/or Duplication of Callender Hamilton Bridge Project

On 6 December 2021, the Company entered into a guarantee agreement with PT Baja Titian Utama ("BTU") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from BTU in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 10 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 16 June 2022, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/78 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

30. Proyek Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap

Pada tanggal 31 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Gedebage Cilacap ("JGC") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JGC berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Pada tanggal 10 Februari 2023, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan JGC berakhir sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPk dan JGC.

31. Proyek Tol Gilimanuk – Mengwi

Pada tanggal 8 Maret 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Tol Jagat Kerthi Bali ("JKB") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari JKB berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Pada tanggal 4 Agustus 2023, perjanjian penjaminan antara Perusahaan dengan JKB berakhir sehubungan dengan berakhirnya PKS antara PJPk dan JKB.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

30. Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Toll Road Project

On 31 January 2022, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Gedebage Cilacap ("JGC") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JGC in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

On 10 February 2023, the guarantee agreement between the Company and JGC expired due to the expiration of the PKS between the GCA and JGC.

31. Gilimanuk - Mengwi Toll Road Project

On 8 March 2022, the Company entered into a guarantee agreement with PT Tol Jagat Kerthi Bali ("JKB") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from JKB in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

On 4 August 2023, the guarantee agreement between the Company and JKB expired due to the expiration of the PKS between the GCA and JKB.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/79 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

32. Proyek Alat Penerangan Jalan Madiun

Pada tanggal 20 September 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Tri Tunggal Madiun Terang selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Tri Tunggal Madiun Terang berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 4 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 10 November 2022 penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Penjaminan

33. Proyek *Proving Ground* BPLJKSB Bekasi

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Indonesia International Automotive Proving Ground selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Indonesia International Automotive Proving Ground berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 13 Juni 2023, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

32. Road Lighting Device Project Madiun

On 20 September 2022, the Company entered into a guarantee agreement with PT Tri Tunggal Madiun Terang as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PT Tri Tunggal Madiun Terang in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 4 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 November 2022, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

33. Proving Ground BPLJKSB Project Bekasi

On 31 October 2022, the Company entered into a guarantee agreement with PT Indonesia International Automotive Proving Ground as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PT Indonesia International Automotive Proving Ground in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 13 June 2023, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/80 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

34. Proyek Tol Akses Patimban

Pada tanggal 24 Januari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Akses Patimban selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Jasamarga Akses Patimban berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

35. Proyek Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Lombok Barat

Pada tanggal 12 Oktober 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Sinar Energi Indonusa selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Sinar Energi Indonusa berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 7 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

36. Proyek Tol JORR Elevated Cikunir - Ulujami

Pada tanggal 17 Oktober 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jakarta Metro EkspresWay selaku BU.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

34. Proyek Tol Akses Patimban

On 24 January 2023, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Akses Patimban as the Investor

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PT Jasamarga Akses Patimban in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

35. Public Street Light West Lombok Regency

On 12 October 2023, the Company entered into a guarantee agreement with PT Sinar Energi Indonusa as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PT Sinar Energi Indonusa in the form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 7 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

36. JORR Elevated Cikunir – Ulujami Toll Road

On 17 October 2023, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jakarta Metro EkspresWay as the Investor.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/81 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

36. Proyek Tol JORR Elevated Cikunir - Ulujami
(lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Jakarta Metro EkspresWay berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJP.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari perjanjian penjaminan KPBU di atas adalah sebesar Rp 74.479 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, terminasi, dana likuiditas terbatas, cidera janji pembayaran bulanan, ketersediaan layanan, biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung, biaya pengakhiran yang ditanggung dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Non-KPBU

1. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") Mandalika

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur pariwisata KEK Mandalika dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ITDC berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 35 tahun.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

36. JORR Elevated Cikunir – Ulujami Toll Road
(continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PT Jakarta Metro EkspresWay in the form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated, or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this guarantee agreement PPP above is amounting to Rp 74,479 billion (full amount) (unaudited) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, termination, limited liquidity fund, breach of monthly payment, availability payment, non-termination costs, termination costs and termination due to force majeure.

Non-PPP

1. Special Economic Zone ("SEZ") Mandalika Project

On 31 December 2018, the Company entered into a loan guarantee agreement for the construction of SEZ Mandalika tourism infrastructure facilities with Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on 28 December 2018, the Company is entitled to receive fees from ITDC in the form of *upfront fee* owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while *guarantee fee* is obtained from the effective date of guarantee for 35 years.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/82 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

1. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") Mandalika (lanjutan).

Pada tanggal 22 Maret 2019, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

2. Proyek Hydropower Programme

Pada tanggal 5 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur penyediaan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Sulawesi dan lainnya dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") selaku BUMN terjamin dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 14 tahun.

Pada tanggal 5 September 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") Dieng-2 dan Patuha-2

Pada tanggal 19 Agustus 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng-2 dan Patuha-2 dengan PT Geo Dipa Energi (Persero) ("GDE") selaku BUMN terjamin.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

1. Special Economic Zone ("SEZ") Mandalika Project (continued)

On 22 March 2019, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

2. Hydropower Programme Project

On 5 September 2019, the Company entered into a loan guarantee agreement for the infrastructure development in providing hydroelectric power plants in Sulawesi region and others with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") as the guaranteed SOE which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 14 years.

On 5 September 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

3. Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Project

On 19 August 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development project with PT Geo Dipa Energi ("GDE") as the guaranteed SOE.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/83 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") Dieng-2 dan Patuha-2 (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari GDE berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 21 September 2020, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

4. Proyek Pembangunan Jaringan Distribusi Kalimantan dan Maluku-Papua dengan Skema *Result-Based Lending* ("RBL-KMP")

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek RBL-KMP dengan PLN selaku BUMN Terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 14 Januari 2021, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

3. *Dieng-2 and Patuha-2 Geothermal Power Plant Development Project (continued)*

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from GDE in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 21 September 2020 the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

4. *Kalimantan and Maluku-Papua Distribution Network Development Project with Result-Based Lending Scheme ("RBL-KMP")*

On 16 December 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of RBL-KMP project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 14 January 2021, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/84 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

5. Proyek Pengembangan Distribusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Skema *Result-Based Lending* ("RBL-SNT")

Pada tanggal 16 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek RBL-SNT dengan PLN selaku BUMN terjamin dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 15 tahun.

Pada tanggal 16 Desember 2020, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

6. Proyek Pengembangan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali ("EJB")

Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek EJB dengan PLN selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 9 April 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

5. Sulawesi and Nusa Tenggara Distribution Development Project with Result-Based Lending Scheme ("RBL-SNT")

On 16 December 2020, the Company entered into a loan guarantee agreement of RBL-SNT project with PLN as the guaranteed SOE which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 15 years.

On 16 December 2020, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

6. East Java and Bali ("EJB") Distribution Network Development Project

On 10 February 2021, the Company entered into a loan guarantee agreement of EJB Project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 9 April 2021, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/85 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Non-KPBU (lanjutan)

7. Proyek Sustainable and Reliable Energy Access Program – Western and Central Java (“SREAP”)

Pada tanggal 19 Mei 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek EJB dengan PLN selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 20 tahun.

Pada tanggal 31 Mei 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

8. Proyek Pembangunan PLTU Tahap III (PLTU Timor-1 2 x 50 MW)

Pada tanggal 28 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman Proyek EJB dengan PLN selaku BUMN terjamin.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 10 tahun.

Pada tanggal 28 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari perjanjian penjaminan non-KPBU di atas adalah sebesar Rp 9.332 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Non-PPP (continued)

7. Sustainable and Reliable Energy Access Program – Western and Central Java (“SREAP”) Project

On 19 May 2022, the Company entered into a loan guarantee agreement of EJB Project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 20 years.

On 31 May 2022, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

8. PLTU Development Project Phase III (PLTU Timor-1 2 x 50 MW)

On 28 December 2022, the Company entered into a loan guarantee agreement of EJB Project with PLN as the guaranteed SOE.

Based on the loan guarantee implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 10 years.

On 28 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this guarantee agreement non-PPP above is amounting to Rp 9,332 billion (full amount) (unaudited) plus interests and other charges.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/86 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Penjaminan pelaku usaha korporasi

Pada tanggal 28 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dimana peran Perusahaan adalah memberikan dukungan *loss limit* dan dapat melaksanakan penjaminan bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") sebagai Badan Usaha Penjamin yang ditunjuk Pemerintah. Berdasarkan PMK tersebut, pada tanggal 19 November 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait pelaksanaan penugasan pemberian dukungan *loss limit* dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI terkait pengaturan tata cara penagihan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang terbit untuk periode bulan Desember 2021.

Pada tanggal 23 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Keuangan RI dan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan LPEI sehubungan dengan pelaksanaan penugasan penjaminan bersama dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan menandatangani adendum perjanjian kerja sama dengan LPEI terkait perubahan profil risiko debitur yang dapat dijamin.

Pada tanggal 1 April 2021, telah diterbitkan PMK No. 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2021.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Corporate business entities

On 28 July 2020, the issuance of Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Economic Recovery Program where the role of the Company are providing loss limit supports and performing co-guarantee with Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank ("LPEI") as a guarantor of Corporate Business Entities appointed by the Government of Indonesia. In accordance with the PMK, on 19 November 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance, and on 15 December 2020, the Company also entered into a cooperation agreement with LPEI regarding the implementation of the assignment to provide loss limit supports for the the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 13 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance regarding the procedure for collecting Loss Limit Guarantee Fees issued for the period December 2021.

On 23 December 2020, the Company entered into a cooperation agreement with Indonesia Ministry of Finance and also on 15 February 2021 with LPEI regarding implementation of a co-guarantee assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program. Furthermore, on 9 December 2021, the Company entered into an amendment of cooperation agreement with LPEI regarding the changes in the debtor's risk profile that can be guaranteed.

On 1 April 2021, the issuance of PMK No. 32/PMK.08/2021 regarding Changes of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates has ended on 17 December 2021.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/87 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

Penjaminan pelaku usaha korporasi

Pada tanggal 30 Maret 2022, telah diterbitkan PMK No. 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Nasional yang mengubah beberapa ketentuan terkait kriteria Korporasi yang mendapatkan pinjaman kredit modal kerja. Berdasarkan PMK tersebut, penerbitan sertifikat penjaminan diperpanjang paling lama pada tanggal 16 Desember 2022.

Berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Perusahaan memberikan dukungan *loss limit* kepada LPEI dengan batasan 90% dari akumulasi imbal jasa penjaminan *loss limit* yang diterima Perusahaan dari Pemerintah.

Sampai dengan 31 Desember 2022, nilai pinjaman yang telah diterbitkan sertifikat penjaminannya oleh LPEI dan disetujui untuk diberikan dukungan *loss limit* oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 8,11 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 5,58 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit). Penjaminan bersama Pelaku Usaha Korporasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan LPEI untuk nilai pinjaman yang dijamin sebesar Rp 2,7 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 2,0 triliun (nilai penuh) (tidak diaudit) dimana porsi penjaminan Perusahaan dengan LPEI adalah 80% dan 20%.

BUMN

1. Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 16 September 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi III Waskita Karya tahun 2021 dengan Waskita dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu") dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN").

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

Corporate business entities

On 30 March 2022, the issuance of PMK No. 27/PMK.08/2022 regarding second amendment of PMK No. 98/PMK.08/2020 regarding Procedures of Government Guarantee for Corporate Business Entities through Guarantee Entities for National Recovery Program that changes several provisions related to criteria for Corporate Business Entities to obtain working capital credit loans. Based on PMK, the issuance of guarantee certificates was extended no later than 16 December 2022.

Based on assignment from the Government, the Company provides *loss limit* supports to LPEI with threshold 90% of the accumulated *loss limit* received by the Company from Government.

As at 31 December 2022, the value of loans for which guarantee certificate has been issued by LPEI and approved for *loss limit* supports by the Company is Rp 8.11 trillion (full amount) (unaudited) with guarantee value amounting to Rp 5.58 trillion (full amount) (unaudited). The National Economic Recovery Program with LPEI has been carried out with the value of loans is Rp 2.7 trillion (full amount) (unaudited) with guarantee value amounting to Rp 2.0 trillion (full amount) (unaudited), with the portion of the guarantee between the Company and LPEI is 80% and 20%.

SOEs

1. Bonds III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

On 16 September 2021, the Company entered into a guarantee implementation agreement for the 2021 Waskita Karya's Bonds III with Waskita and guarantee assignment implementation agreement with Ministry of Finance of the Republic of Indonesia ("MOF") regarding the implementation for the National Economic Recovery Program ("PEN").



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/88 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

1. Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 16 September 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

2. Pinjaman PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman Waskita Karya dengan Waskita dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka pelaksanaan Program PEN.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

1. *Bonds III of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (continued)*

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from MOF in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 16 September 2021, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

2. *Loans of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")*

On 29 October 2021, the Company entered into a guarantee implementation agreement for Waskita Karya's loans with Waskita and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation for the PEN Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from MOF in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 29 October 2021, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/89 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

3. Obligasi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Obligasi IV Waskita Karya tahun 2022 dengan Waskita dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu") dalam rangka pelaksanaan Program PEN.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 22 April 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

4. Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pelaksanaan penjaminan atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya tahun 2022 dengan Waskita dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu") dalam rangka pelaksanaan Program PEN.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

3. Bonds IV of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

On 22 April 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for the 2022 Waskita Karya's Bond IV with Waskita and guarantee assignment implementation agreement with Ministry of Finance of the Republic of Indonesia ("MOF") regarding implementation for the PEN Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from MOF in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee.

On 22 April 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

4. Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")

On April 22, 2022, the Company signed a guarantee implementation agreement for Waskita Karya Sukuk Mudharabah I for 2022 with Waskita and an agreement for implementation of guarantee assignment with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia ("MOF") regarding implementation for the PEN Program.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/90 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

4. Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Kemenkeu berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2022 dan selanjutnya akan dibayarkan oleh Waskita sampai dengan berakhirnya penjaminan Pemerintah.

Pada tanggal 30 Mei 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

5. Penjaminan Pinjaman PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA")

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT INKA dengan INKA dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari INKA berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

4. Sukuk Mudharabah I of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") (continued)

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from MOF in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee until 31 December 2022 and then will be paid by Waskita until the end of the Government guarantee

On 30 May 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

5. Loans guarantee of PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA")

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for PT INKA loans with INKA and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from INKA in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/91 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

6. Penjaminan Pinjaman Perusahaan Umum DAMRI

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman Perum DAMRI dengan DAMRI dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari DAMRI berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

7. Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero)

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Pertamina (Persero) dengan Pertamina dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Pertamina berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

6. Loans guarantee of Perusahaan Umum DAMRI

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for Perum DAMRI loans with DAMRI and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from DAMRI in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

7. Loans guarantee of PT Pertamina (Persero)

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for PT Pertamina (Persero) loans with Pertamina and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from Pertamina in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/92 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

7. Penjaminan Pinjaman PT Pertamina (Persero) (lanjutan)

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

8. Penjaminan Pinjaman PT Len Industri (Persero)

Pada tanggal 30 Desember 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Len Industri (Persero) dengan Pertamina dan Kemenkeu dan juga perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan dengan Kemenkeu dalam rangka penjaminan pemerintah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Len Industri berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

Pada tanggal 30 Desember 2022, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

7. Loans guarantee of PT Pertamina (Persero) (continued)

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

8. Loans guarantee of PT Len Industri (Persero)

On 30 December 2022, the Company entered into a guarantee implementation agreement for PT Len Industri (Persero) loans with Pertamina and MOF and also guarantee assignment implementation agreement with MOF regarding implementation of an assignment of the sovereign guarantees for the National Economic Recovery Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PT Len Industri in the form of *upfront fee* owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee.

On 30 December 2022, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/93 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

BUMN (lanjutan)

9. Penjaminan Pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Pada tanggal 19 Oktober 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan dan perjanjian pelaksanaan penugasan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) berupa *upfront fee* yang terutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif.

Pada tanggal 19 Oktober 2023, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Kontinjensi

Dalam penjaminan KPBU, terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, batas akhir serah terima tanah untuk beberapa proyek jalan tol yang dijamin Perusahaan telah terlewati. Dalam hal adanya kompensasi tunai atas keterlambatan penyerahan tanah tersebut dapat diajukan oleh BU kepada PJPK 7 hari setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi ("SLO"). Dalam hal PJPK tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka BU dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan. Sampai dengan 31 Desember 2023, estimasi potensi klaim kepada PJPK terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah untuk 4 (empat) proyek adalah sebesar Rp 546 miliar (nilai penuh) (tidak diaudit). Pada sektor Jalan Tol, sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pula risiko keterlambatan penyesuaian tarif untuk 1 (satu) proyek dengan nilai maksimum pada Perjanjian Penjaminan untuk risiko tersebut sebesar Rp 200 Miliar (nilai penuh) (tidak diaudit).

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

SOEs (continued)

9. Loans guarantee of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

On 19 October 2023, the Company entered into a guarantee implementation agreement for PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) loans regarding implementation of National Food Reserved Program.

Based on the guarantee implementation agreement and guarantee assignment implementation agreement signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) in the form of upfront fee owed at the time of signing of the agreement with the payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee.

On 19 October 2023, the guarantee of the project has been effective along with the signing of guarantee agreement.

Contingencies

In PPP guarantee, regarding the risk of delay in land acquisition, the due date of land acquisition for few toll road project that guaranteed by Company have passed. In case of any cash compensation incurred due to delay in these land acquisition could be submitted by the Investor to GCA 7 days after the issuance of the Operation Worthiness Certificate ("OWC"). If the GCA did not fulfill the obligation to pay cash compensation in accordance with the time limit stipulated in the cooperation agreement, the Investor could submit a claim to the Company. As per 31 December 2023, the estimated potential claims to GCA regarding the delay of land acquisition risk for 4 (four) guaranteed projects is Rp 546 billion (full amount) (unaudited). In toll road sector, as per 31 December 2023, there was also risk of delay in the toll (tariff) adjustment for 1 (one) project with maximum guarantee exposure according to the Guarantee Agreement at Rp 200 billion (full amount) (unaudited).



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/94 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Kontinjensi (lanjutan)

Selain itu, terdapat risiko kegagalan dalam pembayaran bulanan untuk 3 (tiga) proyek sektor Sistem Penyediaan Air Minum dan 3 (tiga) proyek sektor Telekomunikasi yang dapat mengajukan klaim ke Perusahaan dengan estimasi potensi klaim sebesar Rp 931 miliar sampai dengan 31 Desember 2023 (tidak diaudit).

Dalam penjaminan Non-KPBU, jika BUMN Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian pinjaman kepada pemberi pinjaman, Perusahaan akan mengambil alih kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan perjanjian penjaminan sebelum terjadinya gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan. Terdapat potensi cidera janji dari 2 (dua) debitur karena tidak bisa memenuhi ketentuan *financial covenant* dengan estimasi potensial klaim sebesar Rp 4.184 miliar (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim aktual atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Atas penilaian tersebut, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada penyisihan atas klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki di atas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan para PJPK ("KPBU") atau BUMN Terjamin ("Non-KPBU") dari masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan.

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti

Pada tanggal 22 Agustus 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 4 (empat) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Pada tanggal 27 Juli 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti untuk periode perpanjangan sewa selama 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2020 dan berakhir pada 31 Agustus 2023.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Contingencies (continued)

In addition, there were risk of failure in monthly payment for 3 (three) project in Water Supply System sector and 3 (three) project in Telecommunication sector that can submit a claim to Company with an estimated potential claim of Rp 931 billion as at 31 December 2023 (unaudited).

In Non-PPP guarantee, if guaranteed SOEs are unable to fulfill payment obligation according to the loan agreement to the lenders, the Company will take over the payment obligations in accordance with guarantee agreement before the default of guaranteed SOEs' loan. There is a potential default of 2 (two) debtors due to failure to comply with financial covenants with an estimated potential claim of Rp 4,184 billion (unaudited).

As at 31 December 2023 and 2022, the Company has reviewed its obligation, whether in the form of potential claims and/or actual claims over the risks borne by the Company as stipulated in the guarantee agreement, to assess whether any provision required to be recognised in the financial statements. Based on the assessment, as at 31 December 2023 and 2022, there was no provision of claims deemed necessary to be made by the Company.

Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed agreement with GCA ("PPP") or guaranteed SOEs ("Non-PPP") of each projects, which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment.

Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 4 (four) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

On 27 July 2020, the Company entered into extension of lease agreement with PT Mahkota Prima Properti for another 3 (three) years lease period starting from 1 September 2020 and expires on 31 August 2023.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/95 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota
Prima Properti (lanjutan)

Pada tanggal 2 Agustus 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 3 (tiga) tahun dimulai dari 1 September 2023 dan berakhir pada 31 Agustus 2026.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Rent office agreement with PT Mahkota Prima
Properti (continued)

On 2 August 2023, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 3 (three) years starting from 1 September 2023 and expires on 31 August 2023.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

26. TRANSAKSI NONKAS

Transaksi nonkas yang penting adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Pencadangan saldo laba	35,708,681	31,270,107	Appropriation retained earnings
Kerugian penurunan nilai - piutang usaha	(16,775,000)	(2,000,000)	Impairment losses - account receivables
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar	121,403,022	(279,746,765)	Changes in fair value of financial assets at fair value

26. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transactions are as follows:

27. REKONSILIASI BERSIH

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

27. NET FINANCING RECONCILIATION

Reconciliation from financing activities are as follows:

	2023					
	Perubahan non-kas/ Non-cash changes					
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflow	Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	-	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas sewa pembiayaan	8,545,628	15,107,615		22,547,279	46,200,522	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	63,672,314	15,107,615	-	22,547,279	101,327,208	Total liabilities from financing activities

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/96 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN
BERSIH (lanjutan)**

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah
sebagai berikut: (lanjutan)

**27. NET FINANCING ACTIVITIES
RECONCILIATION (continued)**

Reconciliation from financing activities are as
follows: (continued)

	2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cashflow	Pergerakan valuta asing/ Movement of foreign exchange	Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost	Saldo akhir/ Ending balance	
Pinjaman penerusan	55,126,686	-	-	-	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas sewa pembiayaan	33,504,325	27,434,510	-	(52,393,207)	8,545,628	Financial lease liabilities
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	88,631,011	27,434,510	-	(52,393,207)	63,672,314	Total liabilities from financing activities

28. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a) Perjanjian Penjaminan

KPBU

Pada tanggal 27 Februari 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Surya Sapta Agung Tol selaku BU untuk Proyek Tol Kediri-Tulungagung.

BUMN

Pada tanggal 25 Januari 2024, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka Proyek Kereta Api Cepat Jakarta dan Bandung.

28. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a) Guarantee Agreement

PPP

On 27 February 2024, the Company entered into a guarantee agreement with PT Surya Sapta Agung Tol as the Investor of Proyek Tol Kediri-Tulungagung.

SOEs

On 25 January 2024, the Company entered into a guarantee agreement for PT Kereta Api Indonesia (Persero) loans regarding Proyek Kereta Api Cepat Jakarta dan Bandung.

29. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

29. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with the covenant;
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and
- Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-leaseback transactions.



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/97 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

29. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Standar tersebut akan berlaku efektif pada
1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi"
terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71
- Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada
1 Januari 2025.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap
masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah
sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

Pada saat penerbitan laporan keuangan,
Perusahaan masih mempelajari dampak yang
mungkin timbul dari penerapan standar baru dan
revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan
keuangan Perusahaan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

*The above standards will be effective on 1 January
2024 and early adoption is permitted.*

- *SFAS 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract"
regarding Initial Application of SFAS 74 and
SFAS 71 - Comparative Information.*

*The above standards will be effective on 1 January
2025.*

*Beginning 1 January 2024, references to the
individual SFAS and ISAKs will be changed as
published by DSAK-IAI.*

*As at the authorisation date of these financial
statements, the Company is still evaluating the
potential impact of these new and revised
standards to the Company's financial statements.*

THE ROAD TO SUSTAINABLE PERFORMANCE & IMPACT

JALAN MENUJU KINERJA DAN DAMPAK BERKELANJUTAN



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Guarantee & Infrastructure

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Capital Place, 7–8 Floor

Jl. Gatot Subroto No. Kav 18, RT.6/RW.1

Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan

Kota Jakarta Selatan South Jakarta

☎ +62 21 5795 0550

☎ +62 21 5795 0040

✉ info@iigf.co.id